



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan di daerah berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta untuk menciptakan kemandirian dalam rangka pembangunan daerah yang memperhatikan prinsip-prinsip demokratis, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;
- b. bahwa untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025-2026, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber-sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua unsur masyarakat Kabupaten Garut dalam rangka mencapai visi dan misi daerah.
7. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Kabupaten Garut untuk periode tahun 2025-2026.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
15. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2025-2026, serta disusun berdasarkan usulan-usulan program dan kegiatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun.
- (3) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi:
 - a. penyusunan Renja Perangkat Daerah;
 - b. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025; dan
 - c. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RKPD Tahun 2025 yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

RKPD Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 4 - 7 - 2024
Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 4 - 7 - 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2024 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD Kabupaten Garut Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Garut Tahun 2025-2026, yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi sambil menunggu kepala daerah terpilih dan definitif. RPD diperlukan sebagai pedoman bagi pejabat kepala daerah untuk memastikan fungsi pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat tetap berjalan dengan baik berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024.

Dokumen RKPD Kabupaten Garut Tahun 2025 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dan kebijakan serta prioritas nasional pada RKP Tahun 2025 maupun RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 serta perkembangan isu-isu strategis di daerah. RKPD Kabupaten Garut Tahun 2025 mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:



1. Secara substansial, merupakan penjabaran dari RPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai tahun pertama penjabaran RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026, RKPD Kabupaten Garut Tahun 2025 perlu disusun juga dengan mempertimbangkan percepatan pencapaian target-target pembangunan yang belum tercapai pada periode sebelumnya.

RKPD Kabupaten Garut Tahun 2025 disusun dengan tahapan meliputi persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Prinsip-prinsip dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 meliputi:

- a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. Dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah;
- d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional;

- e. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pendekatan perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, menggunakan pendekatan:

- Teknokratik**, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- Partisipatif**, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- Politis**, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
- Atas-Bawah dan Bawah-Atas**, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi hingga Nasional. Pendekatan *bottom-up* (bawah-atas) dilakukan dengan memperhatikan usulan prioritas dari desa/kelurahan dan kecamatan hasil dari Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan, yang dibahas dalam Musrebang tingkat kabupaten. Sedangkan pendekatan *top-down* (atas-bawah) dilakukan dengan mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah dan juga arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi Jawa Barat.

Perencanaan pembangunan Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, menggunakan pendekatan penganggaran berbasis *money-follow program* serta pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

Gambar 1.1 Pendekatan Perencanaan





Sesuai pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2025 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI), dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025.

Dengan seluruh pendekatan perencanaan yang ditunjang penerapan sistem informasi perencanaan dan penganggaran terpadu melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), maka RKPD Tahun 2025 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian daerah, sehingga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas seluruh proses perencanaan dan penganggaran daerah.

RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025. Sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah dirumuskan dalam penyusunan RKPD berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya.

Dokumen RKPD memiliki substansi rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, bahwa RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja program, dan kegiatan dalam RKPD harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Garut untuk pengembangan dan pembangunan menuntut dilakukannya proses penyatuan persepsi dan aspirasi tentang prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah yang berorientasi secara optimal kepada kebutuhan nyata masyarakat, sehingga diharapkan dapat diidentifikasi isu-isu strategis, masalah-masalah mendasar, prioritas program dan kegiatan, serta fokus pembangunan yang perlu dilakukan secara bertahap dalam upaya pencapaian visi daerah.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat SMART yaitu spesifik (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), sesuai atau relevan (*Relevant*), dan tepat waktu (*Time-bond*). Disamping itu, nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral dan komprehensif. Keterkaitan antar substansi dalam dokumen RKPD Tahun 2025 dapat terlihat pada bagan berikut.

Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Substansi Dalam Dokumen RKPD

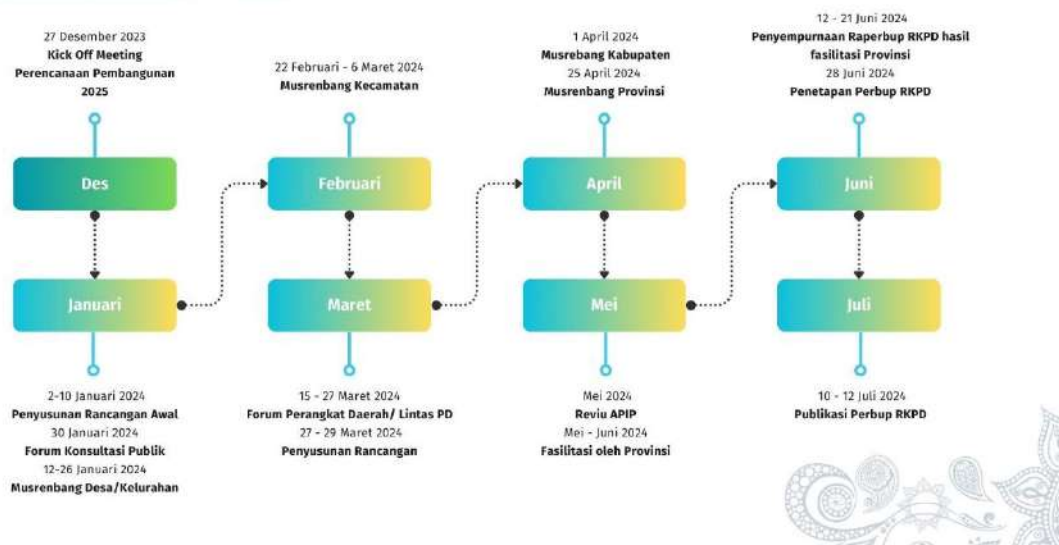


RKPD Tahun 2025 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sehingga, RKPD diharapkan dapat memberikan arah yang tepat, akurat dan benar-benar menopang kebutuhan

pembangunan di tengah terbatasnya kemampuan anggaran Daerah. Prinsip-prinsip tersebut sekaligus menjadi dasar pembangunan tahun 2025, dalam upaya untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2025-2026.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka proses penyusunan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2025 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu diawali dengan *Kick Off Meeting*, Forum Konsultasi Publik yang bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan dan diakhiri dengan Musrenbang Kabupaten. Pasca pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dilanjutkan dengan penyusunan rancangan akhir RKPD Tahun 2025 untuk penajaman dan penetapan daftar rencana program/kegiatan prioritas Kabupaten Garut. Setelah rancangan akhir RKPD Tahun 2025 tersusun, dilanjutkan dengan proses penetapan RKPD Tahun 2025 melalui Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Garut Tahun 2025. Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Garut Tahun 2025 disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1.3
Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2025



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Garut, 2023



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);



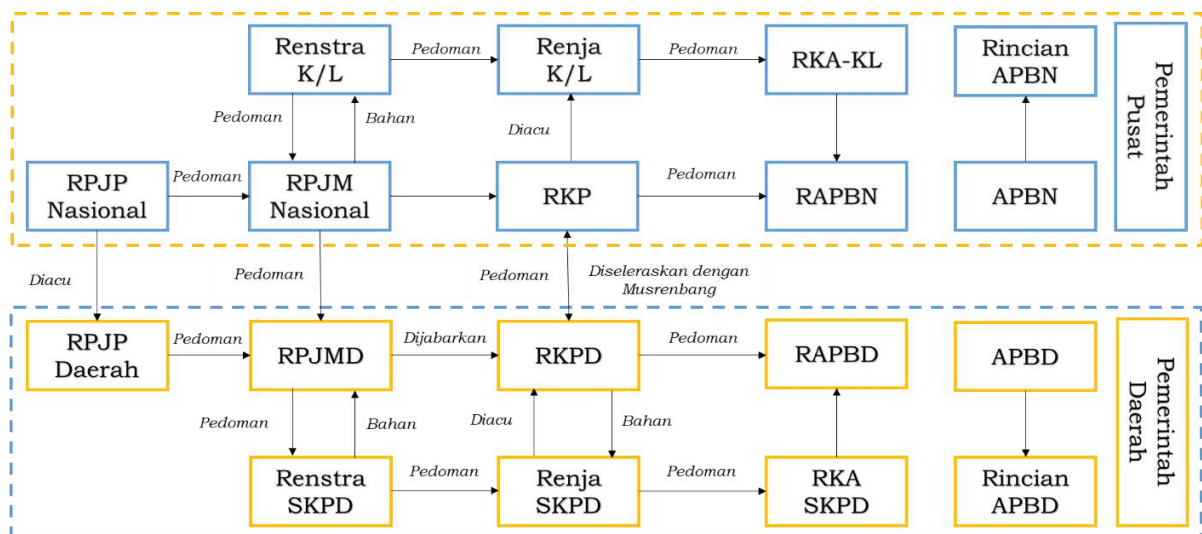
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah lainnya. Hubungan keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.4 berikut:

Gambar 1.4 Hubungan Antara RKPD Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Lain



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Penjelasan mengenai hubungan antara RKPD Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu:

- RKPD Tahun 2025 disusun berpedoman kepada RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 yaitu melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran,

arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

- b. RKPD Tahun 2025 disusun berpedoman pada program prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, yaitu melalui penyelarasan prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya. Penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 dengan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2025.
- c. RKPD Tahun 2025 disusun berpedoman pada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 dan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2026, yang dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi.
- d. RKPD Tahun 2025 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011 - 2031.
- e. RKPD Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan dokumen perencanaan sektoral lainnya diantaranya dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dokumen RAD Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2019-2024 dan dokumen Perencanaan Penganggaran Terintegrasi (PPT) Kesehatan Reproduksi untuk Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI).
- f. RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan



sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah.

- g. RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman/dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Garut Tahun 2025.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026.

Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kerangka operasional dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2025;
- b. Menetapkan strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan Tahun 2025;
- c. Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2025;
- d. Menjadi acuan Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025, KUA, PPAS serta RAPBD Tahun Anggaran 2025.
- e. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan, baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintahan maupun antartingkat pemerintahan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika meliputi :

Bab I Pendahuluan

Memuat gambaran umum penyusunan dokumen RKPD.

1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan, kedudukan, tahapan, prinsip, pendekatan penyusunan RKPD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat uraian ringkas tentang dasar hukum yang terkait langsung dengan penyusunan RKPD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Memuat hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memuat maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Memuat pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat gambaran umum kondisi daerah tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, uraian penelaahan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.1. Kondisi Umum Daerah

Memuat gambaran umum kondisi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Memuat telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.

Memuat uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan



permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.4. Inovasi Pembangunan

Memuat inovasi kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan daerah.

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Memuat uraian kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Memuat arahan pembangunan ekonomi dalam dokumen RKP, RKPD provinsi dan kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Memuat rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang hendak dicapai pada tahun 2025 pada RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 dengan turut memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025, maupun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Memuat rumusan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 yang bersinergi dengan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 maupun RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

4.3. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025

Memuat arahan kebijakan pembangunan kewilayahan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan tahun 2025.

4.4. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Memuat rumusan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam RKPD Kabupaten Garut Tahun 2025.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Memuat uraian rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Garut untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diamanatkan dalam RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026.

Bab VII Penutup

Memuat hal-hal penting dan perlu dilakukan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2025.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah tentang kondisi geografi dan demografi, indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, penelaahan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan hasil evaluasi RPJMD Tahun 2019-2024, sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah.

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Aspek Geografi

Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Garut memiliki letak yang strategis sebagai penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, dengan jarak sekitar 61,5 km dari Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Bandung dan sekitar 216 km dari Pusat Pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta. Karena itu Kabupaten Garut mempunyai kedudukan strategis dalam memasok kebutuhan warga kota dan kabupaten di Sekitar Garut. Ibu kota Kabupaten Garut berada pada Ketinggian 717 m diatas permukaan laut (dpl) dikelilingi oleh beberapa gunung yakni Gunung Karacak (1.883 m), Gunung Cikuray (2.821 m), Gunung Papandayan (2.622 m) dan Gunung Guntur (2.249 m).

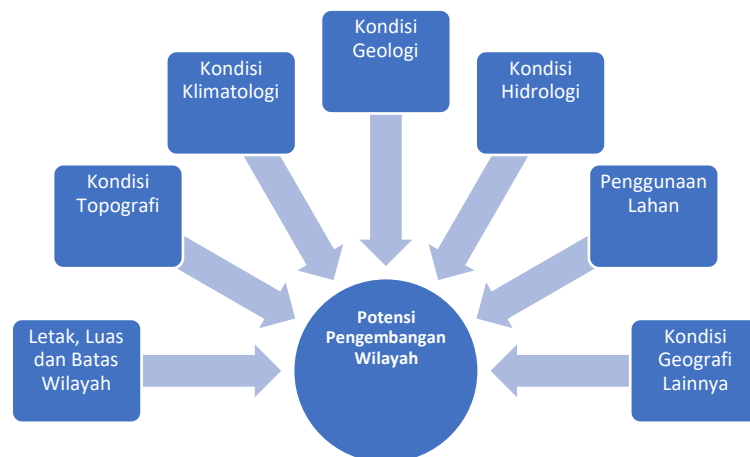
Secara umum Kabupaten Garut merupakan wilayah yang dinamis berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor. Kabupaten Garut turut berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan karena sebagian wilayah di Kabupaten Garut merupakan kawasan konservasi alam dan hutan lindung.

Gambar 2.1. Kondisi Strategis Wilayah Kabupaten Garut



Terdapat hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan kawasan budidaya, yang diilustrasikan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.2. Kondisi Geografi Daerah Dengan Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya



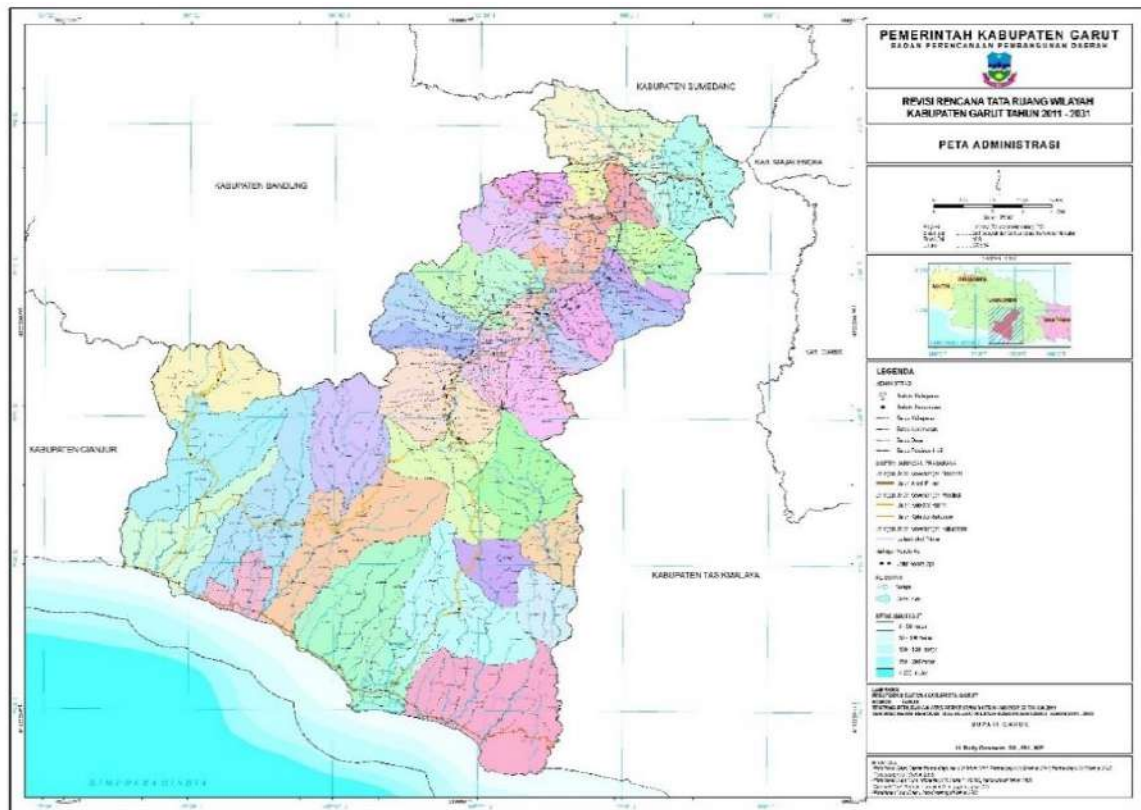


a. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Garut terletak pada koordinat 6°56'49" - 7°45'00" Lintang Selatan dan 107°25'8" - 108°7'30" Bujur Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031, Kabupaten Garut memiliki wilayah seluas 3.107,05 km² (310.705 ha). Kecamatan Cibalong merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 21.633 ha atau 6,96%, sedangkan Kecamatan Tarogong Kidul merupakan wilayah terkecil dengan luas 2.057 ha atau 0,66% dari wilayah Kabupaten Garut. Secara administratif, Kabupaten Garut terdiri dari 42 kecamatan, 21 kelurahan dan 421 desa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Gambar 2.3. Peta Administrasi Kabupaten Garut



Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031.

Tabel 2.1.
Jumlah Desa/Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Jumlah Rukun Warga (RW)	Jumlah Rukun Tetangga (RT)
1	Cisewu	-	9	77	281
2	Caringin	-	6	60	240
3	Talegong	-	7	61	257
4	Bungbulang	-	13	147	485
5	Mekarmukti	-	5	52	168
6	Pamulihan	-	5	43	148
7	Pakenjeng	-	13	126	519
8	Cikelet	-	11	109	386
9	Pameungpeuk	-	8	103	312
10	Cibalong	-	11	102	344
11	Cisompet	-	11	124	424
12	Peundeuy	-	6	63	207
13	Singajaya	-	9	76	309
14	Cihurip	-	4	34	135
15	Cikajang	-	12	113	514
16	Banjarwangi	-	11	81	382
17	Cilawu	-	18	195	724
18	Bayongbong	-	18	157	579
19	Cigedug	-	5	67	236
20	Cisurupan	-	17	141	811
21	Sukaesmi	-	7	47	251



No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Jumlah Rukun Warga (RW)	Jumlah Rukun Tetangga (RT)
22	Samarang	-	13	120	425
23	Pasirwangi	-	12	106	396
24	Tarogong Kidul	5	7	166	676
25	Tarogong Kaler	1	12	184	521
26	Garut Kota	11	-	221	966
27	Karangpawitan	4	16	241	786
28	Wanaraja	-	9	85	290
29	Sucinaraja	-	7	63	206
30	Pangatian	-	8	83	266
31	Sukawening	-	11	113	366
32	Karangtengah	-	4	36	136
33	Banyuresmi	-	15	181	544
34	Leles	-	12	142	434
35	Leuwigoong	-	8	105	281
36	Cibatu	-	11	138	437
37	Kersamanah	-	6	55	218
38	Cibiuk	-	5	58	176
39	Kadungora	-	14	173	591
40	Balubur Limbangan	-	14	164	474
41	Selaawi	-	7	63	219
42	Malangbong	-	24	157	685
Jumlah		21	421	4.632	16.805

Sumber: DPMD Kabupaten Garut, Februari Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD

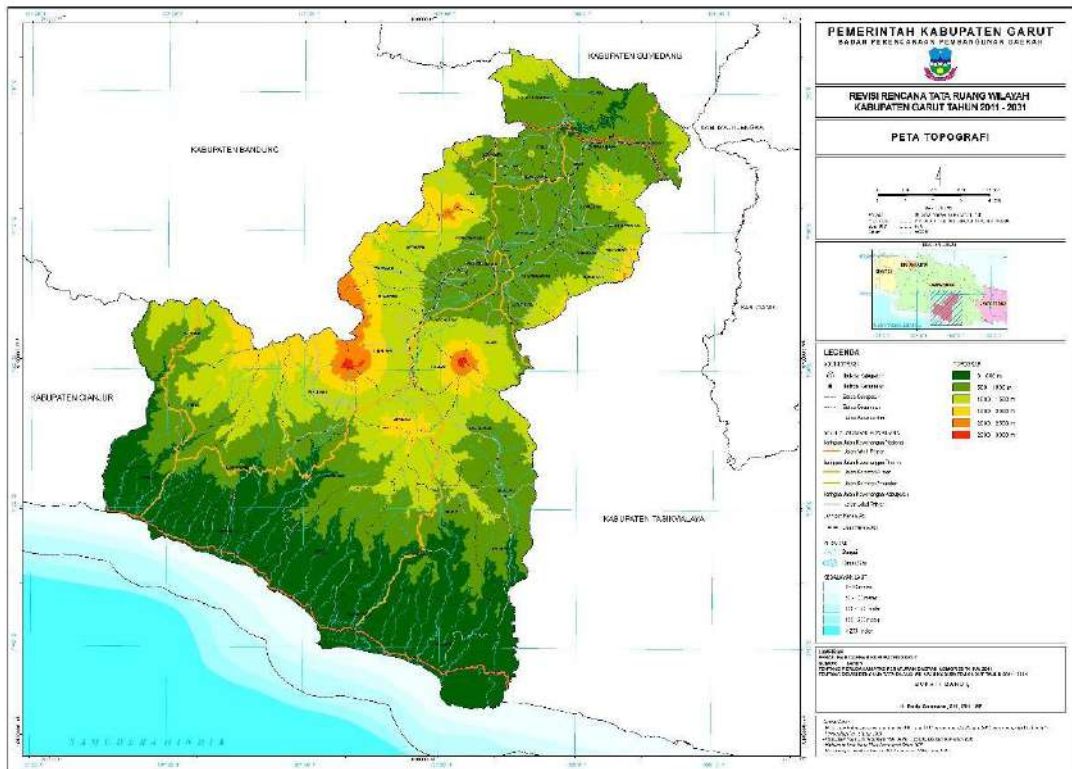
b. Kondisi Topografi

Kabupaten Garut memiliki karakteristik topografi yang beragam. Daerah sebelah utara, timur dan barat secara umum merupakan daerah dataran tinggi dengan kondisi berbukit-bukit dan pegunungan sedangkan daerah sebelah selatan sebagian besar permukaan tanahnya memiliki kemiringan yang cukup curam. Ditinjau dari kemiringan lahan, luas wilayah yang memiliki kemiringan antara lain adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Luas Wilayah menurut Topografi

No.	Kemiringan (derajat°)	Luas (Ha)	Rasio terhadap Luas Wilayah (%)	Karakteristik
1.	0-2	32.229	10,51	Wilayah dataran tinggi berbukit dan pegunungan di bagian utara, timur dan barat
2.	2-15	38.097	12,43	
3.	15-40	110.326	35,99	Wilayah selatan sebagian besar memiliki kemiringan yang cukup curam
4	>40	125.867	41,06%	

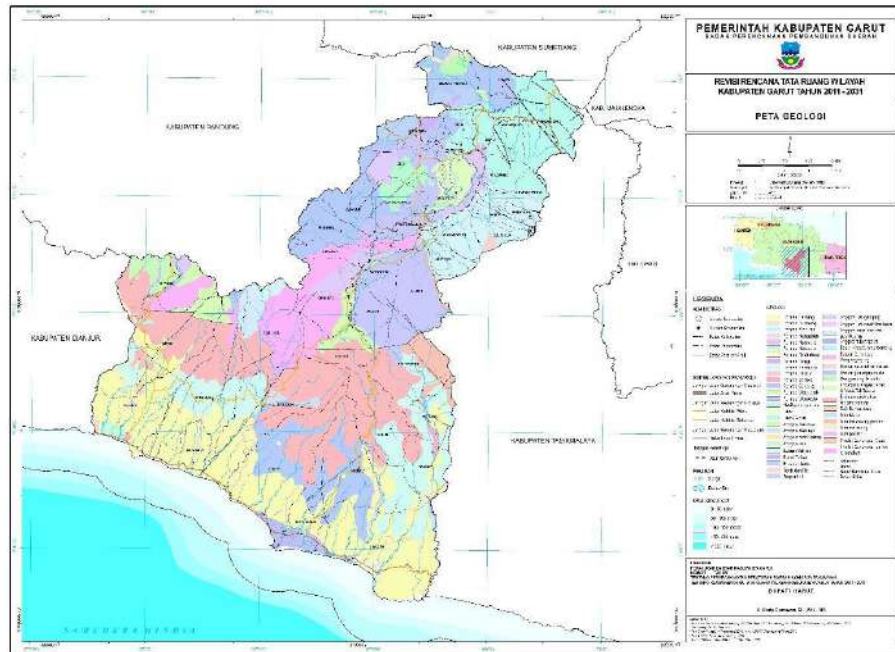
Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031

Gambar 2.4. Kondisi Topografis Kabupaten Garut

Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031

c. Kondisi Geologi

Kondisi geologi wilayah Kabupaten Garut, secara fisiografi termasuk dalam Zona Pegunungan Selatan Jawa Barat dan Zona Bandung dengan bentang alam yang dibagi empat satuan morfologi yaitu kerucut gunung api, perbukitan berelief kasar, perbukitan berelief halus dan pedataran. Stratigrafi daerah tersusun oleh batuan vulkanik, batuan sedimen dan batuan terobosan dengan struktur geologi adalah lipatan, sesar dan kekar. Jenis tanahnya secara garis besar meliputi jenis tanah aluvial, asosiasi andosol, asosiasi litosol, asosiasi mediteran, asosiasi podsolik, dan asosiasi regosol. Jenis tanah podsolik merah kekuning-kuningan, podsolik kuning dan regosol merupakan bagian paling luas dijumpai di wilayah Kabupaten Garut, terutama di bagian selatan, sedangkan bagian utara didominasi oleh jenis tanah andosol.

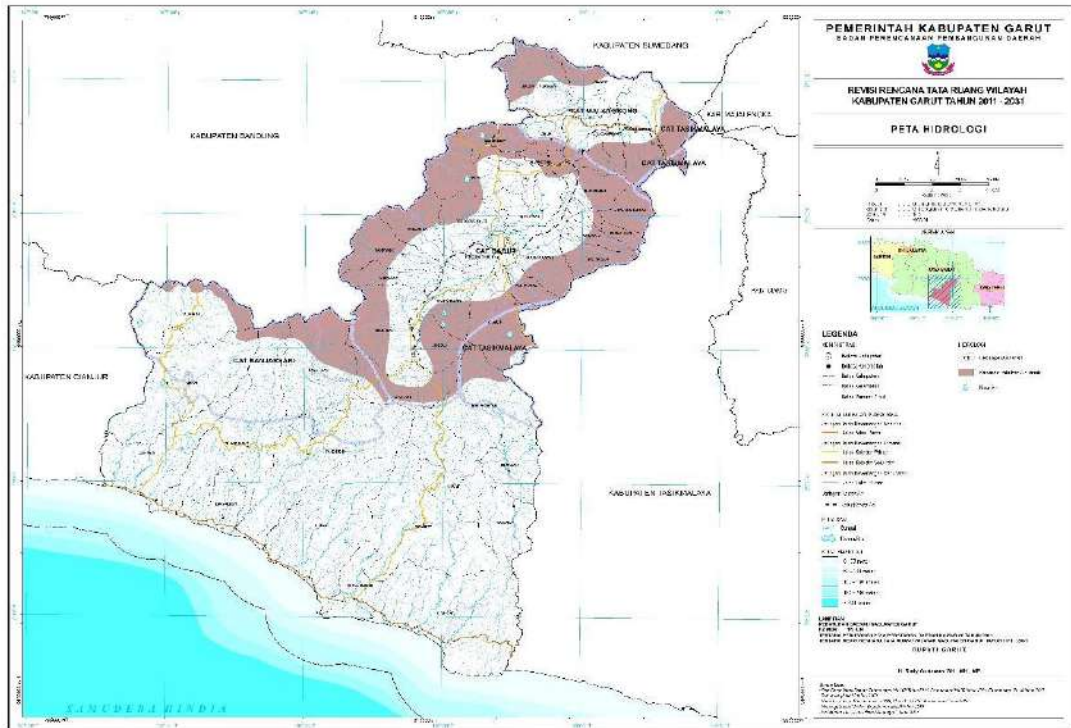
Gambar 2.5. Kondisi Geologis Kabupaten Garut

Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031

d. Kondisi Hidrologi

Di wilayah Kabupaten Garut terdapat 33 buah sungai dengan 101 buah anak sungainya dengan panjang seluruhnya 1.397,34 km. Berdasarkan arah alirannya, sungai-sungai di wilayah Kabupaten Garut dibagi menjadi dua Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Daerah Aliran Utara yang bermuara di Laut Jawa dan Daerah Aliran Selatan yang bermuara di Samudera Indonesia. Daerah Aliran Utara merupakan DAS Cimanuk Bagian Utara, sedangkan Daerah Aliran Selatan merupakan DAS Cikaengan dan Sungai Cilaki. Daerah Aliran Selatan pada umumnya relatif pendek, sempit dan berlembah-lembah dibandingkan dengan Daerah Aliran Utara.

Mata air tanah yang terdapat di Kabupaten Garut berjumlah 12 titik utama lokasi mata air. Debit mata air terbesar terletak di lokasi mata air Cibuyutan Desa Lewobaru Kecamatan Malangbong yaitu sebesar 700 liter perdetik.

Gambar 2.6. Kondisi Hidrologis Kabupaten Garut

Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Pasal 41 angka 1, cekungan air tanah diartikan sebagai suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Secara vertikal, cekungan air tanah dibatasi di bagian bawahnya oleh lapisan batuan yang secara nisbi bersifat kedap air dan di bagian atasnya oleh muka air tanah bebas dan/atau muka air permukaan (sungai, danau, rawa, waduk).

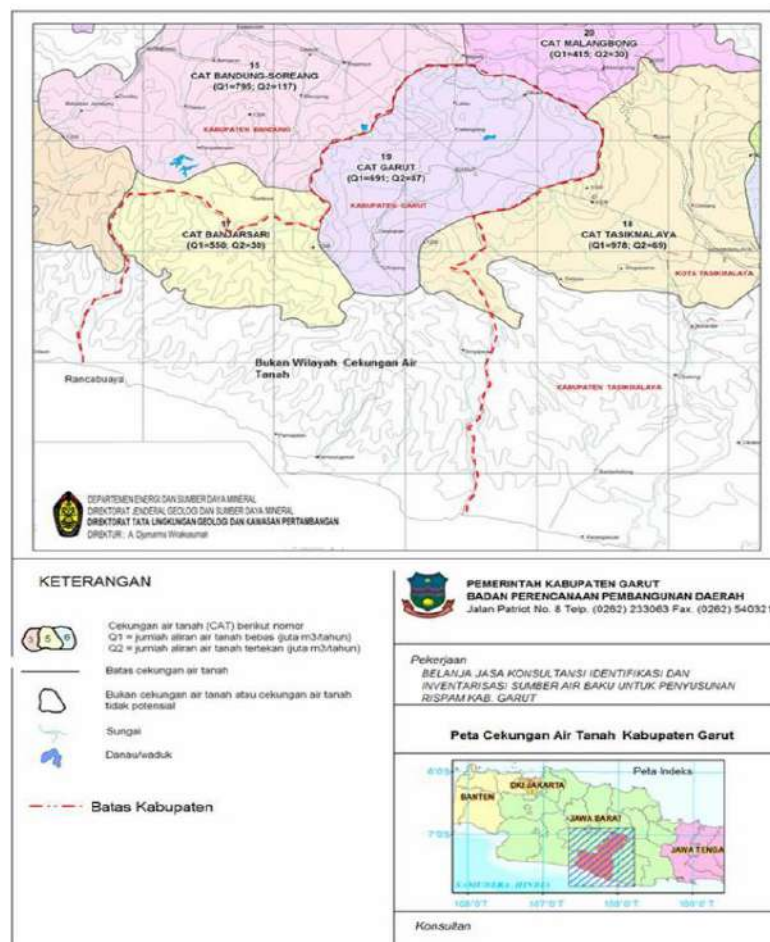
Berdasarkan kawasan cekungan air tanah Kabupaten Garut terbagi dalam 4 wilayah:

1. Cekungan Air Tanah Garut: Cekungan ini tersebar luas di bagian utara wilayah Kabupaten Garut.
2. Cekungan Air Tanah Tasikmalaya: Cekungan ini tersebar luas di bagian timur wilayah Kabupaten Garut, seperti dijumpai di Kecamatan Cilawu.
3. Cekungan Air Tanah Banjarsari, terdapat di bagian barat Kabupaten Garut, terutama terdapat di wilayah Kecamatan : Talegong, Pamulihan dan Cisewu.

4. Wilayah bukan cekungan air tanah. Pada wilayah bukan cekungan air tanah, keterdapatan air tanah hanya dijumpai secara terbatas pada zona pelapukan batuan impermeabel atau pada lembah perbukitan dimana terdapat akumulasi tanah pelapukan dan endapan hasil erosi yang bersifat porous.

Lebih jelasnya mengenai pembagian wilayah cekungan air tanah dapat dilihat pada peta berikut ini.

Gambar 2.7. Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Garut



Sumber : Dokumen Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk SPAM Kabupaten Garut

e. Kondisi Klimatologi

Secara umum iklim di wilayah Kabupaten Garut dapat dikategorikan sebagai daerah beriklim tropis basah (*humid tropical climate*) karena termasuk tipe Af sampai Am dari klasifikasi iklim Koppen. Iklim dan cuaca di Kabupaten Garut dipengaruhi tiga faktor utama, yaitu pola sirkulasi angin musiman (monsoonal circulation pattern), topografi regional yang bergunung-gunung dibagian tengah Jawa Barat, dan elevasi topografi di Bandung.

Variasi temperatur bulanan berkisar antara 18,5°C-31,2°C, dengan rata-rata suhu udara 25,3°C, kelembaban udara berkisar antara 43,9% hingga 96,0% dengan rata-rata kelembaban bulanan 72,5%. Kecepatan angin rata-rata bulanan berada pada kisaran 2,3 knot dan maksimal pada 11,4 knot dengan tekanan udara rata-rata bulanan berkisar pada 922,6 mb. Keadaan iklim Kabupaten Garut pada tahun 2023 secara terperinci adapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Kondisi Baseline Lingkungan Hidup Kabupaten Garut

Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)			Kecepatan Angin (knot)			Tekanan Udara (mb)		
	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks
Januari	19,5	26,4	31,6	42	66,6	93	0	3,5	13,0	919,0	923,0	1016,0
Februari	19,8	25,0	31,0	44	72,5	95	0	2,7	15,0	917,9	922,0	926,7
Maret	18,8	26,0	31,4	38	70,2	96	0	2,7	13,0	917,7	921,8	926,5
April	18,4	25,3	31,4	49	75,3	97	0	1,6	10,0	918,5	923,0	1014,6
Mei	19,0	25,7	31,6	44	73,8	96	0	2,3	10,0	919,1	922,5	926,2
Juni	17,6	24,5	30,2	44	75,8	95	0	1,8	10,0	919,6	923,0	1012,9
Juli	16,8	25,1	30,6	45	70,5	95	0	2,2	11,0	919,4	922,4	926,9
Agustus	17,6	25,6	31,0	47	68,8	95	0	2,3	10,0	919,7	922,7	926,1
September	18,5	25,6	32,2	36	70,3	100	0	2,2	9,0	918,7	923,4	927,9
Oktober	18,4	25,0	30,6	43	74,9	98	0	1,9	16,0	919,1	922,9	926,8
November	18,7	25,0	31,0	46	75,8	96	0	2,2	9,0	918,4	922,5	951,8
Desember	19,4	24,9	31,4	49	75,1	96	0	2,3	11,0	917,3	921,7	929,8
Rata-rata	18,5	25,3	31,2	43,9	72,5	96	0	2,3	11,4	918,7	922,6	951,0

Sumber : BPS Kabupaten Garut Tahun 2024

Selama musim hujan, secara tetap bertiup angin dari Barat Laut yang membawa udara basah dari Laut Cina Selatan dan bagian barat Laut Jawa. Pada musim kemarau, bertiup angin kering bertemperatur relatif tinggi dari arah Australia yang terletak di tenggara. Curah hujan bulanan berkisar antara 18,2 mm - 366,5 mm atau rata-rata curah hujan bulanan 1378, 49 mm dan sekitar 2.311,4 mm curah hujan rata-rata tahunan dengan bulan basah 5 bulan, bulan lembab 1 bulan dan bulan kering 6. Pada tahun 2023 terjadi fenomena *el-nino* yang mengakibatkan curah mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2022, jumlah curah hujan rata-rata menurun lebih dari 50 mm hal ini menyebabkan terjadinya

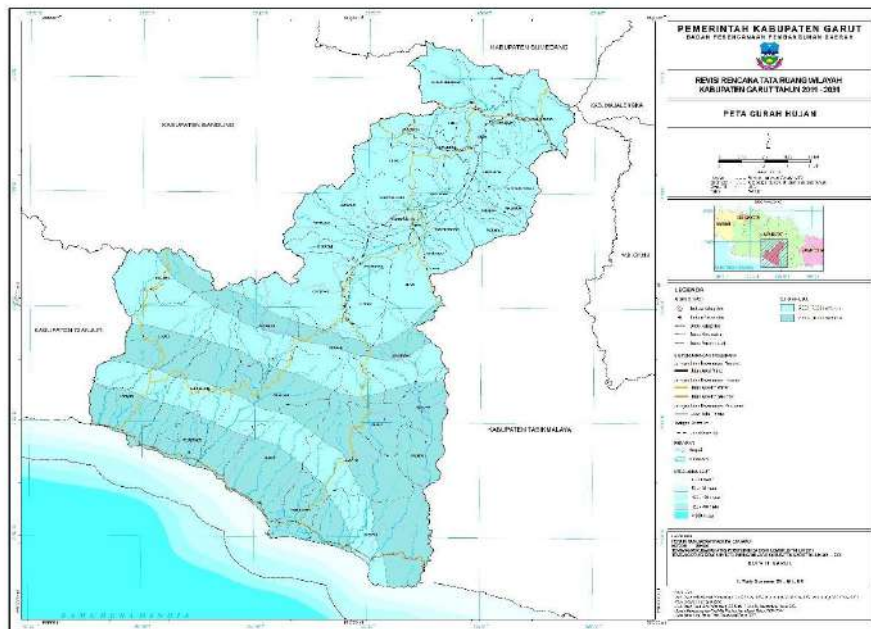


penurunan produktivitas pertanian di Kabupaten Garut seperti pada produktivitas padi yang menurun cukup signifikan pada tahun 2023 yakni turun 85,618 ton menjadi 773.635 ton sama halnya dengan komoditas lain seperti jagung, jahe, cabai dan bawang merah yang turut mengalami penurunan produktivitas. Adapun perbandingan curah hujan tahun 2022 dan 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4. Perbandingan Keadaan Iklim Curah Hujan Kabupaten Garut menurut Bulan Tahun 2022-2023

Bulan	Tahun 2022		Tahun 2023	
	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (Hari)	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (Hari)
Januari	59,5	8	69,8	18
Februari	117,1	18	111,1	25
Maret	238,9	19	219,9	23
April	336,2	26	275,5	19
Mei	146,9	18	268,5	19
Juni	150,6	15	85,2	14
Juli	98,5	12	24,0	8
Agustus	29,9	9	30,2	7
September	182,2	15	18,2	4
Oktober	366,7	21	70,8	6
November	307,2	25	231,0	22
Desember	277,7	26	366,5	25
Rata-rata	192,6	17,7	138,49	15,83

Sumber : BPS Kabupaten Garut, diolah Bappeda Tahun 2024

Gambar 2.8. Kondisi Curah Hujan Kabupaten Garut

Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031

f. Kondisi Penggunaan Lahan

Berdasarkan RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031, dari total luas wilayah 310.705,29 Ha, sebagian besar berupa hutan seluas 73.657,20 Ha (23,71%), kebun/perkebunan seluas 55.752,67 Ha (17,94%), tanah ladang seluas 52.681,37 Ha (16,96%), semak belukar seluas 47.030,36 Ha (15,14%), sawah tadah hujan seluas 40.065,42 Ha atau 12,89%, area pemukiman seluas 19.408,17 Ha (6,25%), sawah irigasi seluas 17.492,23 Ha atau 5,63%, dan sisanya berupa padang rumput, air sungai, tanggul pasir, danau/situ, bangunan, kolam ikan, hutan bakau, empang/tambak, pasir darat, dan mata air.

Tabel 2.5.
Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kabupaten Garut

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Proporsi (%)
1	Air Sungai	1.592,39	0,51%
2	Area Pemukiman	19.408,17	6,25%
3	Bangunan	82,83	0,03%
4	Danau/Situ	211,12	0,07%
5	Empang/Tambak	30,56	0,01%
6	Hutan	73.657,21	23,71%
7	Hutan Bakau	31,83	0,01%
8	Kebun/Perkebunan	55.752,67	17,94%



No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Proporsi (%)
9	Kolam Ikan	35,69	0,01%
10	Mata Air	2,58	0,00%
11	Padang Rumput	2.351,96	0,76%
12	Pasir Darat	5,27	0,00%
13	Sawah Irigasi	17.492,23	5,63%
14	Sawah Tadah Hujan	40.065,42	12,89%
15	Semak Belukar	47.030,36	15,14%
16	Tanah Ladang	52.681,37	16,96%
17	Tanggul Pasir	273,63	0,09%
	Jumlah	310.705,29	100,00%

Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031, yang dikelola dalam SIPD

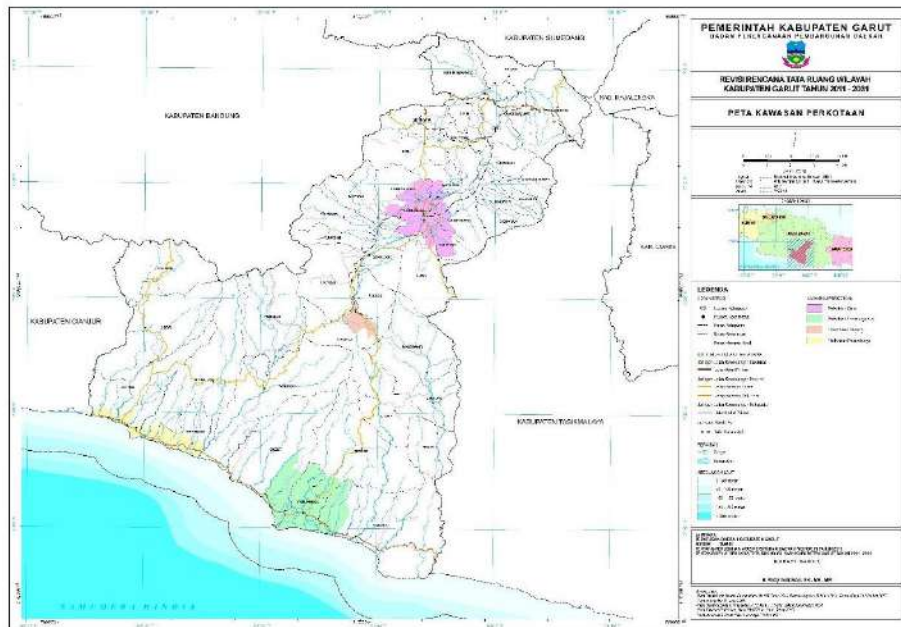
g. Kondisi Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Garut turut memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 yang bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten konservasi yang didukung oleh agribisnis, pariwisata, kelautan, dan industri yang berkelanjutan, serta berbasis mitigasi bencana. Tahun 2024 memasuki tahap ke III pelaksanaan RTRW Kabupaten Garut. Berdasarkan RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031, rencana sistem pusat kegiatan Kabupaten meliputi:

- 1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, terletak di Perkotaan Garut, Perkotaan Pameungpeuk, Perkotaan Cikajang dan Perkotaan Rancabuaya.
- 2) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, meliputi Perkotaan Cisewu; Perkotaan Talegong; Perkotaan Mekarmukti; Perkotaan Pamulihan; Perkotaan Pakenjeng; Perkotaan Cikelet; Perkotaan Cibalong; Perkotaan Cisompet; Perkotaan Peundeuy; Perkotaan Cihurip; Perkotaan Banjarwangi; Perkotaan Cilawu; Perkotaan Bayongbong; Perkotaan Cigedug; Perkotaan Cisurupan; Perkotaan Sukaresmi; Perkotaan Samarang; Perkotaan Pasirwangi; Perkotaan Karangpawitan; Perkotaan Wanaraja; Perkotaan Pangatikan; Perkotaan Sucinaraja; Perkotaan Sukawening; Perkotaan Karangtengah; Perkotaan Banyuresmi; Perkotaan Leles; Perkotaan Leuwigoong; Perkotaan Kersamanah; Perkotaan Cibiuk;

Perkotaan Balubur Limbangan; Perkotaan Selaawi, Perkotaan Singajaya; Perkotaan Malangbong; Perkotaan Cibatu; dan Perkotaan Kadungora.

Gambar 2.9. Rencana Kawasan Perkotaan Wilayah Kabupaten Garut



Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031

- 3) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, meliputi : Desa Sukajaya Kecamatan Cisewu, Desa Sukarame Kecamatan Caringin, Desa Sukamulya Kecamatan Talegong, Desa Cijayana Kecamatan Mekarmukti, Desa Pananjung Kecamatan Pamulihan, Desa Panyindangan Kecamatan Pakenjeng, Desa Pamalayan Kecamatan Cikelet, Desa Gunamekar Kecamatan Bungbulang, Desa Sancang Kecamatan Cibalong, Desa Depok Kecamatan Cisompet, Desa Toblong Kecamatan Peundeuy, Desa Mancagahar Kecamatan Pameungpeuk, Desa Cisangkal Kecamatan Cihurip, Desa Wangunjaya Kecamatan Banjarwangi, Desa Ciudian Kecamatan Singajaya, Desa Mangkurayat Kecamatan Cilawu, Desa Sukarame Kecamatan Bayongbong, Desa Barusuda Kecamatan Cigedug, Desa Cidatar Kecamatan Cisurupan, Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaresmi, Desa Cibodas Kecamatan Cikajang, Desa Sukakarya Kecamatan Samarang, Desa Pasirkiamis Kecamatan Pasirwangi, Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan, Desa Cinunuk Kecamatan Wanaraja, Desa Cimaragas Kecamatan Pangatikan, Desa Sukaratu Kecamatan Sucinaraja, Desa Sukamukti Kecamatan Sukawening, Desa Cintamanik Kecamatan Karangtengah, Desa Bagendit Kecamatan Banyuresmi, Desa Cangkuang Kecamatan Leles, Desa Talagasari Kecamatan Kadungora, Desa Tambaksari Kecamatan Leuwigoong, Desa Keresek Kecamatan Cibatu, Desa Nanjungjaya



Kecamatan Kersamanah, Desa Majasari Kecamatan Cibiuk, Desa Galihpakuwon Kecamatan Balubur Limbangan, Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi dan Desa Sukaratu Kecamatan Malangbong.

Wilayah kabupaten Garut yang mempunyai pengaruh penting terhadap pengembangan ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan menjadi prioritas dalam kebijakan penataan ruang daerah sebagai suatu kawasan strategis pada tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Kawasan Strategis Nasional (KSN) merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi meliputi KSN Fasilitas Uji Terbang Roket Pameungpeuk berada di Kecamatan Cikelet; dan KSN Pengamat Dirgantara Pameungpeuk berada di Kecamatan Cikelet.

Sementara itu Kawasan Strategis Provinsi (KSP) meliputi dua kawasan:

- 1) KSP Panas Bumi Kamojang - Darajat - Papandayan dengan sudut kepentingan pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi terletak di kecamatan Samarang, Pasirwangi dan Cisurupan.
- 2) KSP Garut Selatan dan sekitarnya dengan sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup terletak di Kecamatan Cisewu, Caringin, Talegong, Bungbulang, Mekarmukti, Pamulihan, Pakenjeng, Cikelet, Pameungpeuk, Cibalong, Cisompet, Peundeuy, Singajaya, Cihurip, Banjarwangi, dan Cikajang.

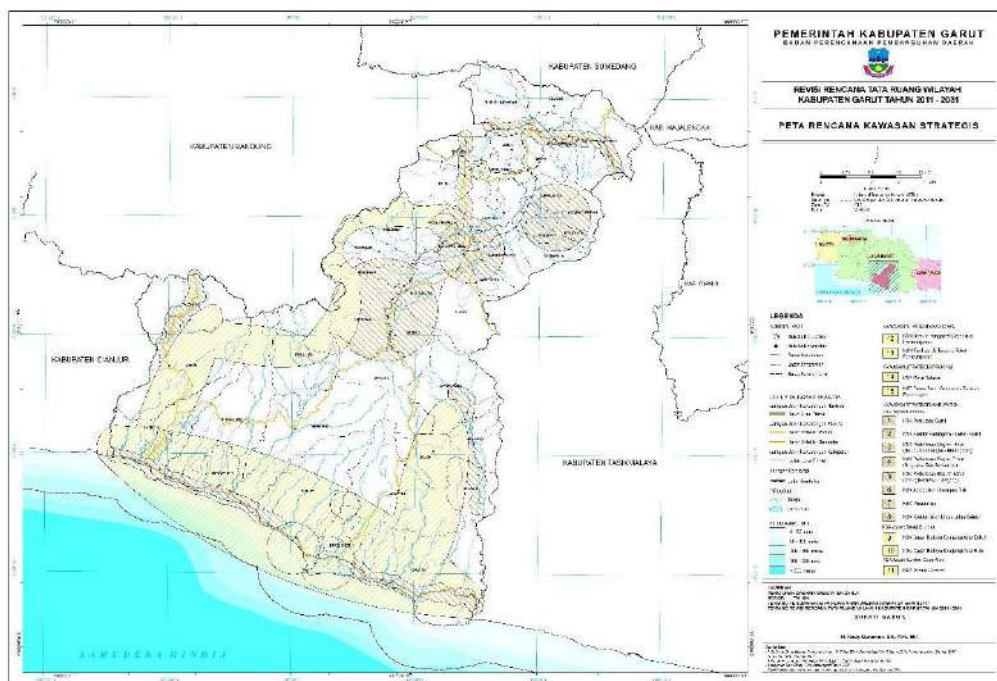
Dengan memperhatikan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP), telah ditetapkan 3 (tiga) jenis Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), meliputi:

- 1) Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten terdiri atas:
 - a) KSK Perkotaan Garut terletak di Kecamatan Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, Banyuresmi, Cilawu, dan Karangpawitan.
 - b) KSK Koridor Kadungora - Leles - Garut terletak di Kecamatan Kadungora, Leles, Tarogong Kaler dan Tarogong Kidul.
 - c) KSK Perbatasan Bagian Utara terletak di Kecamatan Balubur Limbangan, Selaawi, Kersamanah, Cibatuk, dan Malangbong.
 - d) KSK Perbatasan Bagian Timur terletak di Kecamatan Singajaya, Banjarwangi, Peundeuy dan Cihurip.
 - e) KSK Perbatasan Bagian Barat terletak di Kecamatan Caringin, Cisewu, dan Talegong.
 - f) KSK Agropolitan terletak di Kecamatan Cisurupan, Cikajang, Cigedug, Sukaresmi, Pasirwangi, dan Bayongbong.

- g) KSK Minapolitan terletak di Kecamatan Tarogong Kaler, Sukawening, Pangatikan, Sucinaraja, Wanaraja, dan Karangpawitan.
 - h) KSK Koridor Jalan Lintas Jabar Selatan terletak di Kecamatan Cibalong, Pameungpeuk, Cikelet, Mekarmukti, Pakenjeng, Bungbulang, dan Caringin.
- 2) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya berupa Kawasan Cagar Budaya terdiri atas Kampung Adat Dukuh yang berada di Kecamatan Cikelet dan Kampung Adat Pulo berada di Kecamatan Leles.
 - 3) Kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Wisata Cipanas yang berada di Kecamatan Tarogong Kaler.

Ditinjau dari rencana pola ruang wilayah kabupaten, target alokasi luasan Kawasan Lindung mencapai sebesar 50,65% sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah harus tetap dalam koridor daya dukung lingkungan dan oleh karenanya keseimbangan alokasi ruang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung merupakan prasyarat yang tetap dibutuhkan.

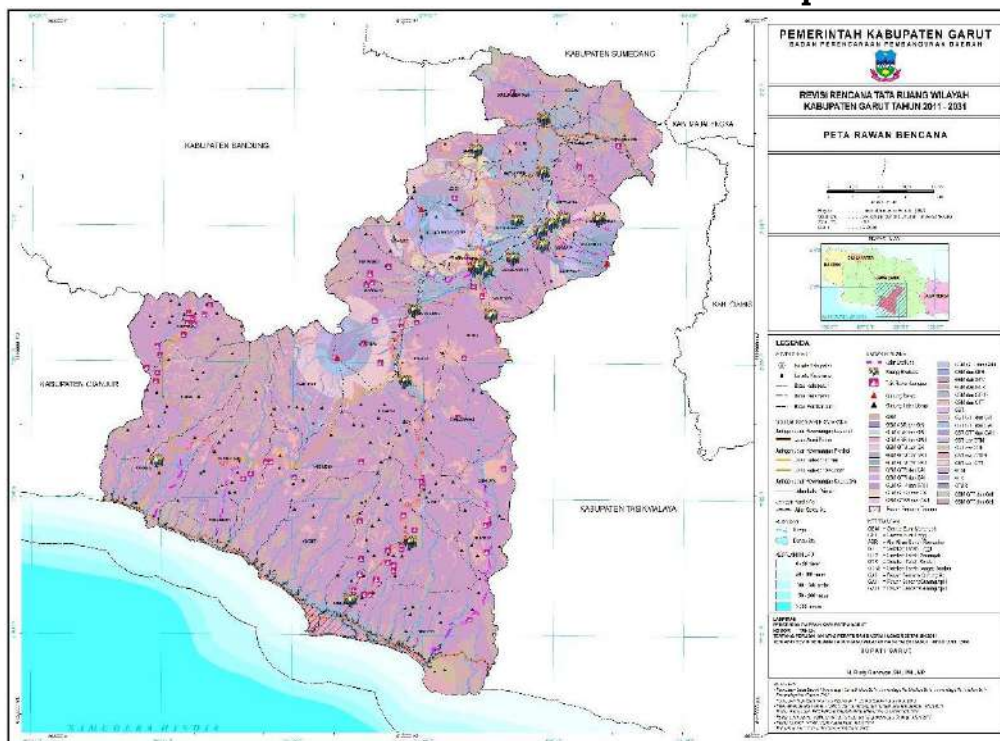
Gambar 2.10. Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Garut



Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031

h. Kondisi Wilayah Rawan Bencana

Gambar 2.11. Kondisi Peta Rawan Bencana Kabupaten Garut

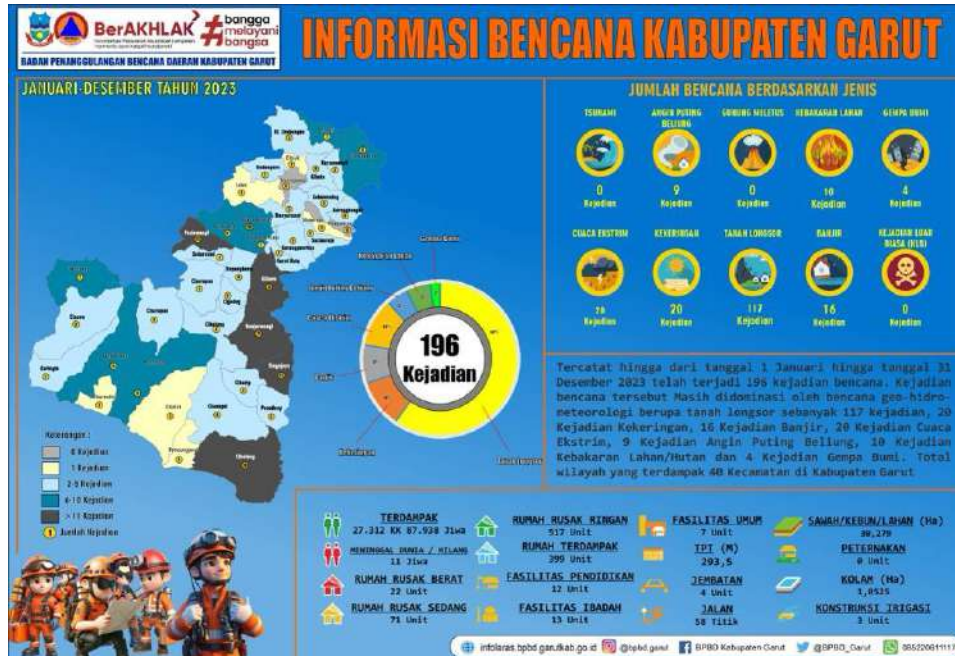


Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031.

Kondisi wilayah Kabupaten Garut yang mempunyai karakteristik pegunungan dan berbukit-bukit, memiliki curah hujan yang tinggi serta berada pada jalur gempa tektonik, dan perairan pantai selatan yang merupakan daerah lempengan lapisan bumi menjadikan Kabupaten Garut sebagai kawasan rawan bencana, diantaranya sebagai kawasan rawan bencana gunung api, gerakan tanah, tsunami, abrasi dan tanah longsor. Dari segi kebencanaan, Kabupaten Garut memiliki potensi resiko bencana yang tinggi, dengan jumlah kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan bencana gerakan tanah. Tercatat berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2023 Indeks Resiko Bencana Kabupaten Garut berada pada nilai 147,39 Poin meskipun cenderung menurun dari tahun 2022 yaitu pada nilai 164,91 poin. Tercatat hingga dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember 2023 telah terjadi 196 kejadian bencana, kejadian bencana tersebut masih didominasi oleh bencana geo-hidro-meteorologi berupa tanah longsor sebanyak 117 kejadian, 20 Kejadian Kekeringan, 16 Kejadian Banjir, 20 Kejadian Cuaca Ekstrem, 9 Kejadian Angin Puting Beliung, 10 Kejadian

Kebakaran Lahan/Hutan dan 4 Kejadian Gempa Bumi. Total wilayah yang terdampak 40 Kecamatan di Kabupaten Garut.

Gambar 2.12.
Informasi Kejadian Bencana Tahun 2023



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut Tahun 2023

Berdasarkan kondisi geologinya, beberapa kendala yang perlu diperhatikan, khususnya dalam perencanaan konstruksi bangunan diantaranya bahaya gerakan tanah dengan lokasi terdapat di Kecamatan Cisompet, Singajaya, Talegong, Pakenjeng, Cisurupan, Bayongbong, Cisewu dan Cilawu. Bahaya rawan erosi terdapat di lereng-lereng pegunungan seperti di bagian utara kompleks Gunung Mandalawangi, Gunung Haruman, Gunung Kaledong, Gunung Karacak, Gunung Guntur dan Gunung Papandayan serta tebing-tebing sepanjang Sungai Cimanuk.

Berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana pada Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut, maka Tingkat Ancaman dari setiap potensi bencana yang ada di Kabupaten Garut adalah :

- Tanah Longsor memiliki Tingkat Ancaman TINGGI dengan Indeks Ancaman tinggi dan Indeks Penduduk Terpapar tinggi;
- Banjir memiliki Tingkat Ancaman TINGGI dengan Indeks Ancaman sedang dan Indeks Penduduk Terpapar tinggi;

- Letusan Gunung Api dan Gempa Bumi memiliki Tingkat Ancaman SEDANG dengan Indeks Ancaman rendah dan Indeks Penduduk Terpapar tinggi;
- Tsunami memiliki Tingkat Ancaman RENDAH dengan Indeks Ancaman rendah dan Indeks Penduduk Terpapar sedang;
- Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem, Gagal Teknologi, Konflik Sosial, dan Pandemi memiliki Tingkat Ancaman RENDAH dengan Indeks Ancaman rendah dan Indeks Penduduk Terpapar rendah.

Berdasarkan data Indeks Resiko Bencana (IRB) yang di rilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kabupaten Garut termasuk kedalam kelas risiko bencana tinggi yang berada nilai 147,39 pada tahun 2023 capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian IRB pada tahun 2022. Jika dilihat berdasarkan data pada tabel dibawah ini, Kabupaten Garut memiliki Indeks Resiko bencana keempat tertinggi di Provinsi Jawa Barat setelah Kabupaten Cianjur.

Tabel 2.6.
Perbandingan Penurunan Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2019-2023

No.	Kabupaten/ Kota	2019	2020	2021	2022	2023	Kelas Resiko
1	Cianjur	207,13	215,08	197,08	207,62	185,14	Tinggi
2	Sukabumi	190,75	190,75	192,40	186,61	178,12	Tinggi
3	Tasikmalaya	203,01	203,01	186,51	174,11	159,14	Tinggi
4	Garut	197	252,2	185	164,91	147,39	Tinggi
5	Karawang	175,20	174,43	165,58	157,81	152,32	Tinggi
6	Bandung	175,20	171,91	168,78	157,25	132	Tinggi
7	Kota Cirebon	160,63	160,63	147,51	156,28	144,56	Tinggi
8	Subang	174,00	174,00	161,89	145,94	143,43	Tinggi
9	Cirebon	152,80	152,80	152,80	145,04	144,56	Tinggi
10	Kota Banjar	172,76	172,76	157,19	141,07	129,60	Tinggi
11	Pangandaran	145,44	145,44	129,21	137,36	147,85	Sedang
12	Majalengka	166,00	143,43	127,74	136,35	120,84	Sedang
13	Sumedang	156,23	141,57	122,22	133,52	135,05	Sedang
14	Ciamis	162,00	142,15	124,39	129,87	117,12	Sedang
15	Purwakarta	138,00	137,31	124,53	128,98	117,89	Sedang
16	Bogor	131,60	131,60	123,18	124,95	107,93	Sedang
17	Indramayu	133,03	132,89	130,11	124,10	111,60	Sedang

No.	Kabupaten/ Kota	2019	2020	2021	2022	2023	Kelas Resiko
18	Bekasi	167,22	136,79	114,59	122,49	116,85	Sedang
19	Kota Bekasi	136,88	136,88	125,31	116,54	1111,58	Sedang
20	Kuningan	119,20	119,20	117,37	114,69	125,80	Sedang
21	Kota Bandung	154,00	131,13	131,13	113,58	97,15	Sedang
22	Kota Tasikmalaya	110,22	110,22	108,18	108,89	106,93	Sedang
23	Kota Sukabumi	122,32	122,32	111,32	103,05	84,55	Sedang
24	Bandung Barat	114,40	114,40	102,67	92,91	108,64	Sedang
25	Kota Cimahi	120,40	105,41	91,71	82,01	72,63	Sedang
26	Kota Depok	89,63	89,63	82,56	76,53	80,44	Sedang
27	Kota Bogor	75,75	75,75	65,38	71,01	63,49	Sedang

Sumber : IRBI Tahun 2024, BNPB

2.1.1.2. Aspek Demografi

Jumlah Penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik diproyeksikan sebanyak 2.649.198 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 1.356.194 jiwa dan perempuan sebanyak 1.293.004 jiwa. Kondisi jumlah penduduk tersebut mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,84%. Tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 menjadi rata-rata sebesar 852,64 jiwa/ km².

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Tahun 2019–2023
Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS)

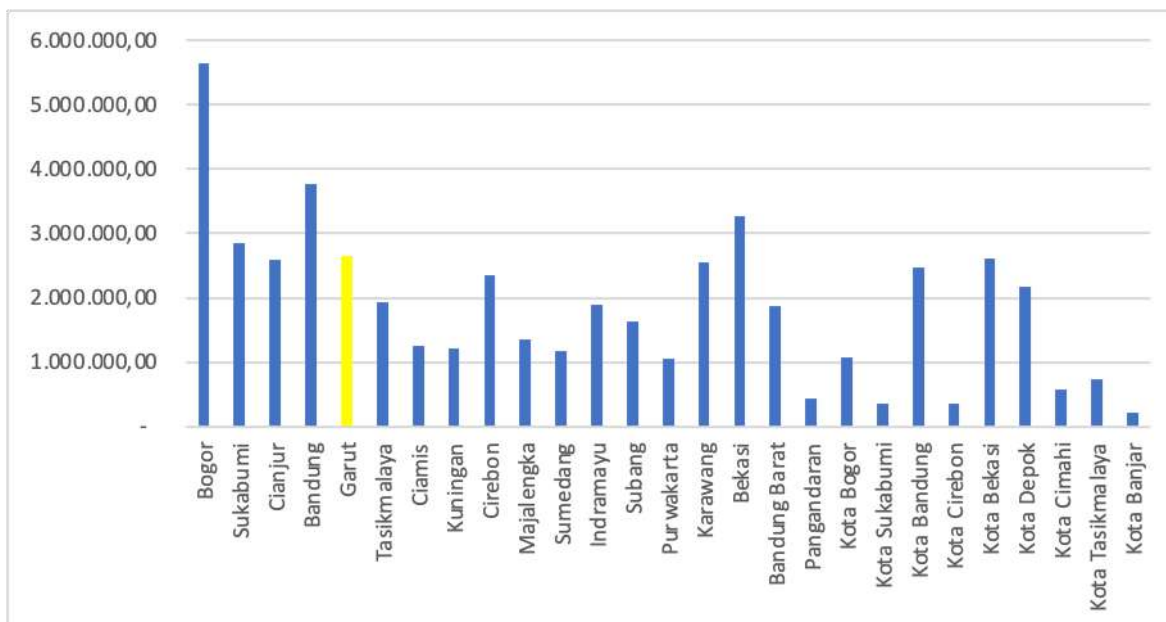
Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1. Jumlah Penduduk (Jiwa)*		2,577,354	2,613,540	2,648,990	2,683,690
- Laki-Laki (Jiwa)		1,320,592	1,338,410	1,355,750	1,372,710
- Perempuan (Jiwa)		1,256,762	1,275,130	1,293,240	1,310,980
2. Sex ratio (%)		105.08	104.96	104.83	104.71
3. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)*			1.4	1.36	1.31
4. Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)		829.52	841.16	852.57	863.74
5. Rasio Ketergantungan Umur		47.31	47.1	46.97	46.92

Sumber : Hasil proyeksi penduduk kabupaten Garut tahun 2020-2035, Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD

Kondisi penggolongan penduduk menurut jenis kelamin yang menggambarkan perbandingan kuantitas kelompok penduduk laki-laki dan perempuan (*Sex ratio*) menunjukkan rasio jenis kelamin penduduk pada tahun 2023 sebesar 104,71 yang berarti ada sekitar 104 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan. Berdasarkan data penduduk BPS, jumlah

penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2023 termasuk ke dalam 5 kabupaten dan kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Garut.

Gambar 2.13.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Tahun 2023* (Ribu Jiwa)



Keterangan : * Hasil proyeksi interim

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD

Sementara itu, gambaran demografi berdasarkan data kependudukan berdasarkan data pada Sistem Administrasi Kependudukan (SIK) yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2023 menjadi 2.753.949 jiwa. Jika dilihat dari jumlah penduduk yang dilaporkan melalui SIK dapat dilihat bahwa jumlah penduduk cenderung menurun hal ini disebabkan oleh upaya dari pemerintah daerah dalam melakukan verifikasi dan validasi data terhadap data kematian kepada desa melalui penyebaran buku pokok pemakaman dan pendataan terhadap pindah-datang warga, sehingga penurunan jumlah penduduk ini terdata dan telah dilaporkan kepada Dirjen Dukcapil. Kondisi penggolongan penduduk menurut jenis kelamin yang menggambarkan perbandingan kuantitas kelompok penduduk laki-laki dan perempuan (*Sex ratio*) menunjukkan rasio jenis kelamin (*Sex ratio*) penduduk

pada tahun 2023 adalah sebesar 104,38 yang berarti ada sekitar 104 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan.

Tabel 2.8.
Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Berdasarkan Data SIAK
Tahun 2019–2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1. Jumlah Penduduk (Jiwa)	2.284.418	2.514.515	2.550.203	2.759.490	2.753.949
- Laki-Laki (Jiwa)	1.168.329	1.285.225	1.302.006	1.408.225	1.406.452
- Perempuan (Jiwa)	1.116.089	1.229.290	1.248.197	1.351.265	1.347.497
2. Sex ratio (%)	104,68	104,55	104,31	104,21	104,38
3. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,19	10,7	1,42	8,20	-0,20
4. Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	735,24	809,29	820,78	888,13	886,35
5. Jumlah Rumah Tangga (KK)	844.182	849.981	856.511	915.327	907.609

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut 2024, yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan data pada SIAK, penduduk terbanyak menurut kecamatan tahun 2023 berada di kecamatan Karangpawitan, Malangbong, Garut Kota, Cilawu dan Tarogong Kidul.

Tabel 2.9.
Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Menurut Kecamatan
Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019–2023

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Garut Kota	120.315	125.822	127.346	134.153	132.592
2	Karangpawitan	119.903	132.051	134.108	146.364	146.285
3	Wanaraja	41.655	46.333	47.313	51.288	50.856
4	Tarogong Kaler	86.458	91.821	92.720	100.132	100.379
5	Tarogong Kidul	104.582	111.330	112.076	119.111	117.771
6	Banyuresmi	82.182	89.798	91.588	98.510	98.120
7	Samarang	67.876	75.647	76.595	83.393	83.474
8	Pasirwangi	53.093	62.210	63.660	70.786	72.067
9	Leles	72.259	79.785	81.145	88.428	88.552
10	Kadungora	87.039	92.200	93.564	99.715	98.247
11	Leuwigoong	42.449	46.040	46.557	50.780	50.445
12	Cibatu	68.397	73.144	73.838	79.110	78.141
13	Kersamanah	35.610	38.289	38.676	41.963	41.740
14	Malangbong	111.994	128.568	130.890	141.383	140.522
15	Sukawening	51.488	55.859	56.429	60.595	60.059
16	Karangtengah	16.863	18.337	18.555	19.893	19.703
17	Bayongbong	89.994	97.931	98.363	106.153	106.416



No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
18	Cigedug	36.856	41.451	42.031	45.534	45.708
19	Cilawu	99.052	105.627	107.319	115.919	115.269
20	Cisurupan	80.624	92.120	93.760	103.678	106.621
21	Sukaresmi	34.271	38.778	39.405	43.247	43.716
22	Cikajang	72.433	79.741	81.183	87.518	87.722
23	Banjarwangi	44.142	54.049	55.656	61.096	60.964
24	Singajaya	39.885	45.762	46.107	50.065	49.644
25	Cihurip	16.766	18.616	18.912	20.236	19.946
26	Peundeuy	20.342	23.222	23.702	25.714	25.117
27	Pameungpeuk	38.511	42.165	42.419	44.970	44.443
28	Cisompet	47.339	51.185	52.199	55.918	56.005
29	Cibalong	39.716	44.368	45.168	48.588	48.408
30	Cikelet	38.425	42.903	43.743	46.905	46.832
31	Bungbulang	50.186	54.917	55.221	60.636	61.173
32	Mekarmukti	16.126	18.176	18.474	19.667	19.430
33	Pakenjeng	56.200	64.975	66.068	73.072	74.098
34	Pamulihan	16.516	18.212	18.270	19.518	19.330
35	Cisewu	30.482	32.743	33.106	35.424	34.956
36	Caringin	26.909	31.162	32.205	35.127	35.070
37	Talegong	25.681	28.102	28.511	30.846	30.529
38	Bl. Limbangan	67.553	75.841	76.794	86.029	85.937
39	Selaawi	39.021	41.474	41.613	44.820	44.474
40	Cibiuk	31.536	34.209	34.631	37.414	37.478
41	Pangatikan	37.210	40.636	41.093	44.340	44.235
42	Sucinaraja	26.479	28.916	29.190	31.452	31.475
	Jumlah	2.284.418	2.514.515	2.550.203	2.759.490	2.753.949

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut 2024, yang dikelola dalam SIPD

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal dasar pembangunan, oleh karenanya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan, baik sumber daya manusia sebagai subjek maupun objek dalam pembangunan.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi dalam suatu wilayah. Secara makro besaran PDRB yang diukur atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 5,639 Triliun atau 8,47% dari Rp 66,59 Triliun pada tahun 2022 menjadi Rp 72,23 Triliun pada tahun 2023. Keadaan ini menggambarkan adanya peningkatan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kabupaten Garut. Kendati demikian, perkembangan tersebut belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Garut, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.

Tabel 2.10.

Ringkasan Pencapaian PDRB Kabupaten Garut Tahun 2019–2023

Uraian Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
a. PDRB atas dasar harga berlaku	Juta Rp	57.579.150	58.043.000	60.836.770	66.590.620	72.229,23
b. PDRB atas dasar harga Konstan	Juta Rp	39.092.650	38.598.150	39.981.190	42.012.960	44.087,22
c. Jumlah penduduk pertengahan tahun	Jiwa	2.622.425	2.585.607	2.604.787	2.627.220	2.683.665
d. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku	Rp	22.116.000	22.480.000	23.356.000	25.346.000	26.914.399
e. PDRB per kapita atas dasar harga konstan	Rp	14.939.000	14.949.000	15.349.000	15.991.000	16.427.989
f. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,02	-1,26	3,58	5,08	4,94
g. Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita adh berlaku	%	8,46	1,72	4,04	8,52	6,19
h. Laju Pertumbuhan	%	4,37	0,14	2,82	4,18	2,73



Uraian Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
n PDRB Perkapita adh konstan						

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD.

Sementara itu, PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan di Kabupaten Garut pada tahun tahun 2023 juga mengalami peningkatan 2022 juga mengalami peningkatan Rp 436 Juta atau tumbuh 2,73% dari sebesar Rp 15,99 Triliun pada tahun 2022 menjadi Rp 16,427 Triliun pada tahun 2023. Kondisi tersebut merupakan indikasi quantum (volume) produk barang/jasa secara umum mengalami peningkatan. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2023 turun menjadi sebesar 4,94, lebih rendah 0,14 % dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 5,08 %.

Tabel 2.11 Target dan Realisasi serta Capaian Indikator

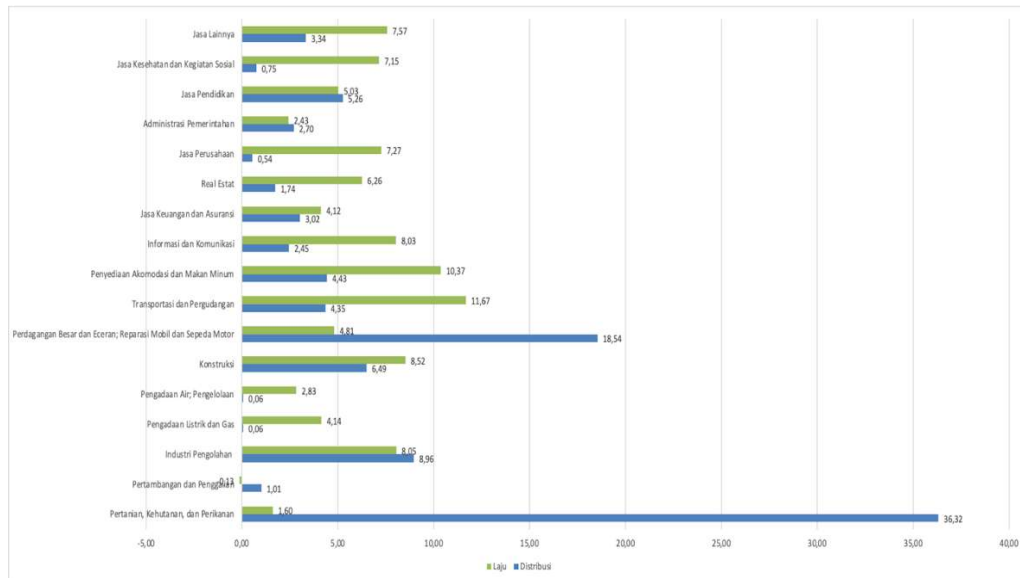
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target (%)	5,5	-3,07	3,39 - 4,37	4,31 - 5,4	4,59 - 5,51	5,23
Realisasi (%)	5,02	-1,26	3,58	5,08	4,94	
Capaian (%)	91,27	-131,72	92,27	104,63	97,82	

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD

Apabila dibandingkan dengan target LPE tahun 2023 sebesar 4,59% - 5,51%, maka capaian LPE 2023 adalah sebesar 97,82 % dari *median range* target tersebut. Kondisi ini cenderung menurun jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022. Data perbandingan target dan realisasi serta capaian indikator laju pertumbuhan ekonomi tersaji pada tabel 2.7 di atas.

Gambar 2.14. Struktur Perekonomian Kabupaten Garut dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2023



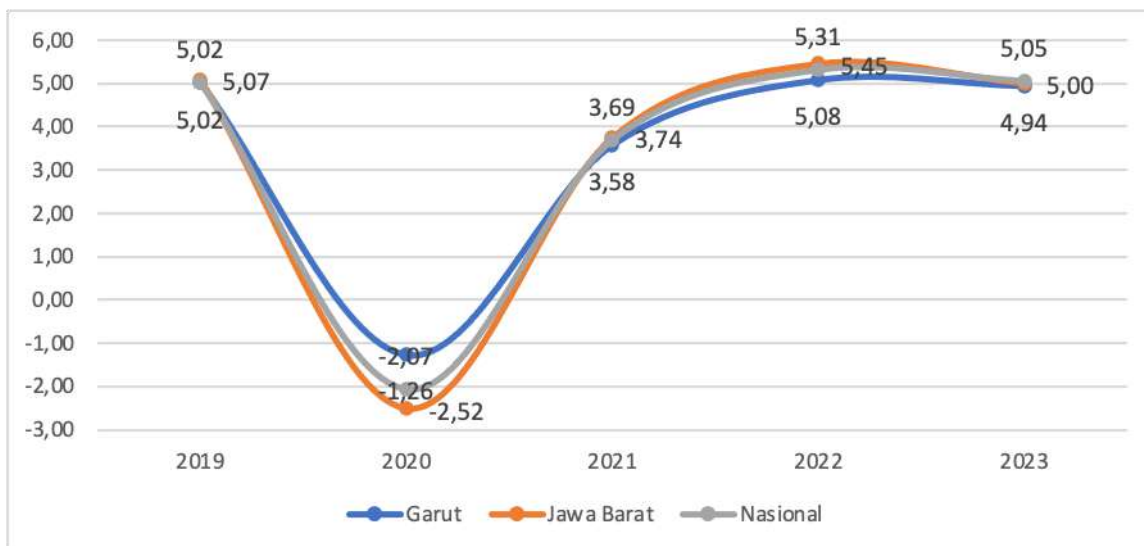
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD

Selama periode 2020-2023, struktur perekonomian sebagian masyarakat tidak bergeser yaitu tetap pada kategori Pertanian, yang terlihat dari besarnya peranannya terhadap pembentukan PDRB mencapai 36,32 % pada tahun 2023, meskipun memang mengalami penurunan 1,06 % dari Tahun 2023 sebesar 37,38 %. Kondisi tersebut dapat dimengerti, karena kegiatan ekonomi sebagian besar penduduk di wilayah Kabupaten Garut bermata pencaharian di kategori ini serta sebagian besar lahan digunakan untuk kegiatan di kategori pertanian, perubahan iklim yang menyebabkan kemarau berkepanjangan juga turut menjadi penyebab menurunnya produktivitas hasil pertanian. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB tahun 2023 selain sektor pertanian, adalah sektor perdagangan dengan kontribusi 18,54% dan sektor industri pengolahan sebesar 8,96 %.

Adapun dilihat dari sektor lapangan usaha, hampir semuanya mencatatkan pertumbuhan positif kecuali untuk Pertambangan dan penggalian yang mengalami penurunan 1,03%. Sektor lapangan usaha yang menyumbang pertumbuhan tertinggi yaitu Transportasi dan Pergudangan (11,67%), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (10,37%), Konstruksi (8,52%), Industri Pengolahan (8,05%), Informasi dan Komunikasi (8,03%) dan Jasa Lainnya (7,57%).

Pada periode 2023, kinerja perekonomian Kabupaten Garut sebesar 4,97% masih berada dibawah capaian LPE Provinsi Jawa Barat (5,00%) dan Nasional (5,%).

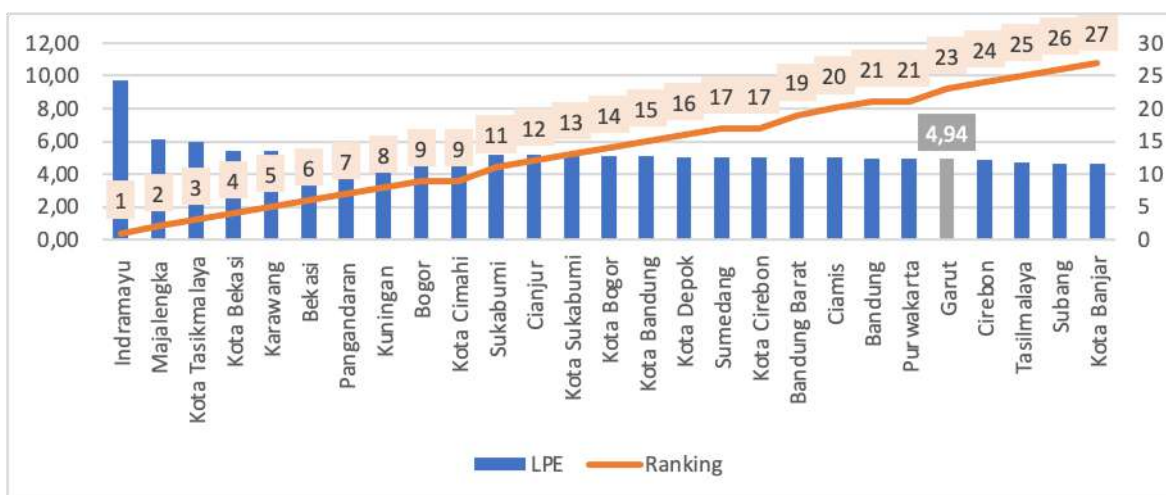
Gambar 2.15. Perbandingan LPE Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD.

Perbandingan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 terhadap kabupaten/kota se-Jawa Barat menunjukkan LPE Kabupaten Garut berada pada peringkat ke-23, turun tujuh peringkat dibandingkan tahun 2022. Adapun data perbandingan pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten Garut dengan Kabupaten/Kota di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

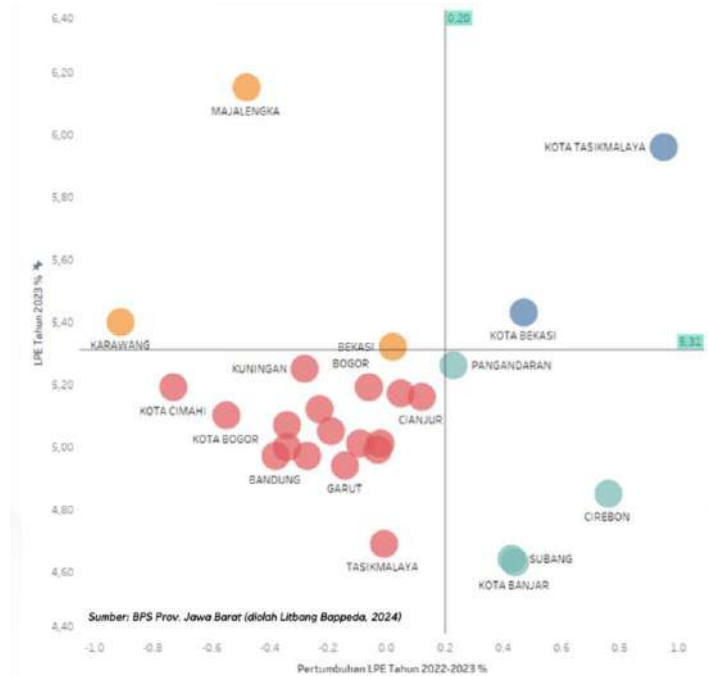
Gambar 2.16. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian LPE kabupaten/kota tahun 2022 dibandingkan gap kenaikan tahun 2020-2022, maka capaian LPE Kabupaten Garut dapat dikelompokkan dalam kategori kuadran IV.

Gambar 2.17. Analisis Kuadran Capaian LPE dan Rata-Rata Gap LPE Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut. Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, Tahun 2024

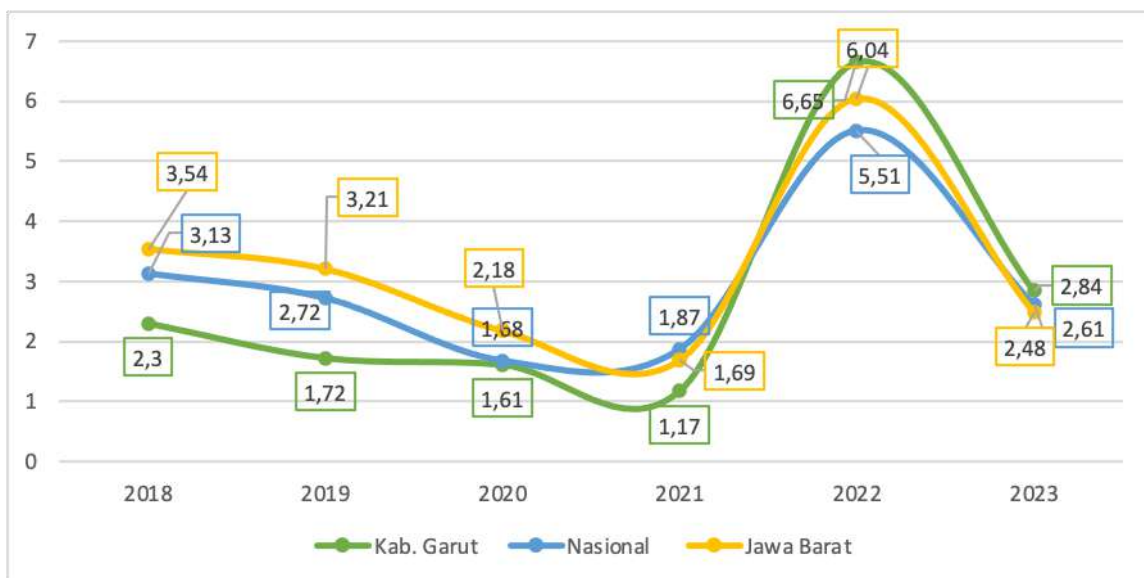
Kelompok kabupaten/kota pada Kuadran I merupakan daerah dengan nilai LPE tahun 2023 diatas rata-rata dan nilai pertumbuhan LPE 2022-2023 diatas rata-rata yang meliputi Kota Tasikmalaya dan Kota Bekasi. Sedangkan Kabupaten Garut berada di Kuadran IV yang merupakan Kabupaten/Kota dengan nilai LPE dan Gap LPE dibawah rata-rata. Meliputi Kabupaten Bogor, Kuningan, Bandung, Kota Bogor, Kota Cimahi dan lainnya.

b. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus dan terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Pada tahun 2023, perhitungan inflasi Kabupaten Garut, berdasarkan data BPS yang mengacu

pada tingkat inflasi di Kota Tasikmalaya sebesar 2,84% dengan IHK sebesar 114,96 dan terendah terjadi di Kota Cirebon sebesar 0,63% dengan IHK sebesar 116,16 tercatat inflasi tertinggi di Jawa Barat terjadi di Kota Bogor yakni sebesar 3,36%, menunjukkan kondisi peningkatan harga-harga yang lebih terkendali dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi inflasi pada tahun 2023 dipengaruhi oleh komoditas beras, cabai merah, rokok kretek filter, sewa rumah, kontrak rumah, emas perhiasan, cabai rawit, bawang putih, rokok putih, rekreasi, daging ayam ras, sate, gula pasir, sekolah menengah atas, upah asisten rumah tangga. Sementara komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, diantaranya tarif air minum PAM, bahan bakar rumah tangga, telur ayam ras, minyak goreng, bensin, bawang merah, tomat, sabun cair/cuci piring, daging sapi, petai, sepatu wanita, ikan gurame, tas sekolah, laptop/notebook, melon, telpon seluler. Penurunan inflasi hampir merata di seluruh wilayah termasuk inflasi Jawa Barat sebesar 2,48% dan Nasional sebesar 2,61%. Pencapaian inflasi tahun 2023 mencapai 10,00% dari target Tahun 2022 sebesar 2,5% - 4,5%. Pada tahun 2023 berdasarkan berita resmi yang dirilis oleh BPS pada semester 1 tahun 2023 atau per juni tahun 2023 Jawa Barat mengalami inflasi sebesar 3,88% cenderung menurun jika dibandingkan dengan data inflasi YoY juni tahun 2023. Perbandingan Inflasi Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional tersaji pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.18.
Perbandingan Inflasi Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan tabel 2.12 dibawah ini capaian target inflasi tahun 2023 berada pada nilai 118,86 persen dengan inflasi berada pada nilai 2,84 persen. Data target dan realisasi serta capaian indikator inflasi tahun 2019 hingga target tahun 2024 akan disajikan pada tabel 2.12 berikut.

Tabel 2.12.
Target dan Realisasi serta Capaian Indikator Inflasi
Tahun 2019-2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target (%)	6	1,12-3,12	2,5-4,5	2,5-4,5	2,5-4,5	2,5-4,5
Realisasi (%)	1,72	1,61	1,17	6,65	2,84	
Capaian (%)	171,33	124,05	166,57	10,00	118,86	

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD

Perbandingan inflasi tahun 2023 pada tujuh kota di Jawa Barat menunjukkan bahwa inflasi Kabupaten Garut sebesar 2,84% (berdasarkan data BPS mengacu pada inflasi di Kota Tasikmalaya), mengalami inflasi tertinggi kedua dibandingkan dengan 6 kota lainnya, dan Kota Bandung berada pada peringkat satu dengan nilai inflasi 7,45%.

Tabel 2.13.
Perbandingan Indeks Harga Konsumen dan Perubahannya Tahun 2023 di
Tujuh Kota di Jawa Barat dan Nasional

	Kota	IHK Des 2023	Inflasi Des 2023	Inflasi Tahun Kalender (ytd)	Inflasi Tahun ke tahun (yoy)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bogor	119,42	0,22	3,36	3,66
2	Sukabumi	116,40	0,19	2,72	2,72
3	Bandung	116,16	0,32	0,63	0,63
4	Cirebon	113,87	0,29	3,22	3,22
5	Bekasi	119,30	0,54	3,14	3,14
6	Depok	117,76	0,27	2,49	2,49
7	Tasikmalaya	114,96	0,27	2,84	2,84
	Gabungan Jawa Barat	117,96	0,37	2,48	2,48
	Nasional	116,56	0,41	2,61	2,61

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD

Mulai bulan Agustus tahun 2023, perkembangan harga-harga secara real time di Kabupaten Garut tidak hanya ditunjukkan dari Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Tasikmalaya (Kota IHK terdekat) melainkan dengan indikator proxy baru yaitu Indeks Perkembangan Harga (IPH). Meskipun dari

cakupan komoditas lebih terbatas (hanya komoditas Bahan pokok penting sedangkan IHK mencakup seluruh barang dan jasa), IPH relatif lebih mudah diperoleh (IPH dapat dihitung per-minggu, sedangkan IHK dihitung per-bulan). IPH dihitung dengan melihat perkembangan harga di 20 komoditas utama (beras, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabe merah, cabe rawit, minyak goreng, gula pasir, bawang putih, daging sapi, tepung terigu, ikan bandeng, ikan nila, ikan lele, kangkung, bayam, wortel, tomat, pisang, dan jeruk) yang dipantau oleh DisperindagESDM di pasar-pasar besar kemudian hasil pantauan tersebut dilakukan perhitungan oleh BPS. Di sepanjang Agustus hingga Desember 2023, Kabupaten Garut mengalami dua periode inflasi (September, dan November-Desember) dan dua periode deflasi (Agustus dan Oktober) dengan IPH terendah di -1,175 di minggu ke-3 bulan Agustus dan tertinggi di 2,529 di minggu ke-4 bulan September. di tahun 2023, komoditas yang memiliki andil perkembangan harga yang paling signifikan adalah Beras dan Cabai.

c. PDRB Perkapita

Pada tahun 2023, PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami pertumbuhan sebesar 6,19 % atau dari semula Rp 25,35 juta pada tahun 2022 menjadi Rp 26,91 juta pada tahun 2023. PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku, selain masih terkandung inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli, juga karena pola distribusi dari pendapatan regional Garut tidak mutlak merata.

Tabel 2.14.
Pendapatan Perkapita Kabupaten Garut
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2019-2023

Tahun	PDRB Per Kapita (Rp Juta)		Jumlah Penduduk	Laju PDRB Per Kapita (%)	
	adh Berlaku	adh Konstan		adh Berlaku	adh Konstan
2019	22,12	14,939	2.622.425	8,69	4,60
2020	22,48	14,949	2.585.607	1,65	0,07
2021	23,36	15,349	2.604.787	3,90	2,68
2022	25,35	15,991	2.627.220	8,52	4,18
2023	26,91	16,427	2.683.665	6,19	2,73

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD.

Pencapaian PDRB perkapita atas dasar harga berlaku selama periode 2019-2023 terus mengalami peningkatan, namun demikian capaian Kabupaten

Garut masih tergolong rendah jika dibandingkan capaian Jawa Barat sebesar Rp 52,65 juta dan terpaut jauh dari Nasional yang telah mencapai sebesar Rp 74,96 juta.

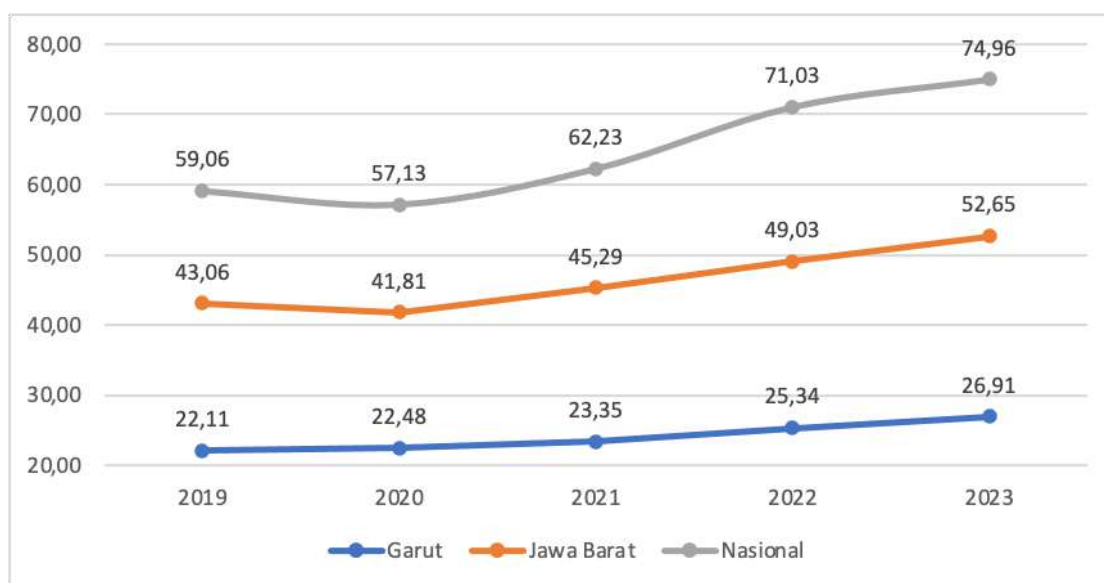
**Tabel 2.15 Target dan Realisasi serta Capaian Indikator
PDRB Perkapita ADHB Tahun 2019-2024**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target (Juta Rp.)	21,28	21,62-22,09	22,39-22,59	23,25-23,52	24,33-24,49	25,43-25,61
Realisasi (Juta Rp.)	22,12	22,48	23,36	25,35	26,91	
Capaian (%)	103,16	100,70	103,85	108,40	110,24	

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan tabel diatas data realisasi PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan tingkat capaian pada tahun 2023 berada pada nilai 110,40 persen atau dalam artian target telah dapat terpenuhi.

**Gambar 2.19. Perbandingan PDRB Perkapita (ADHB)
Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023**

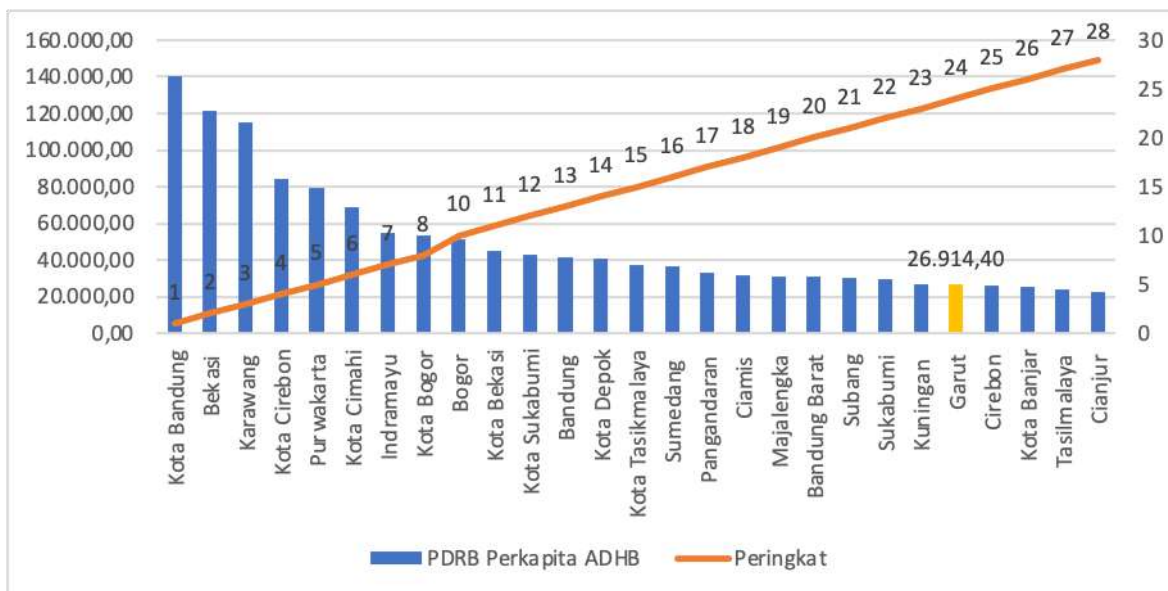


Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD

Pencapaian PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Garut Tahun 2023 dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, berada di peringkat 24 sama dengan peringkat dari tahun sebelumnya di bawah Kabupaten Sukabumi,

Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat.

Gambar 2.20. Perbandingan PDRB Perkapita (ADHB) Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD

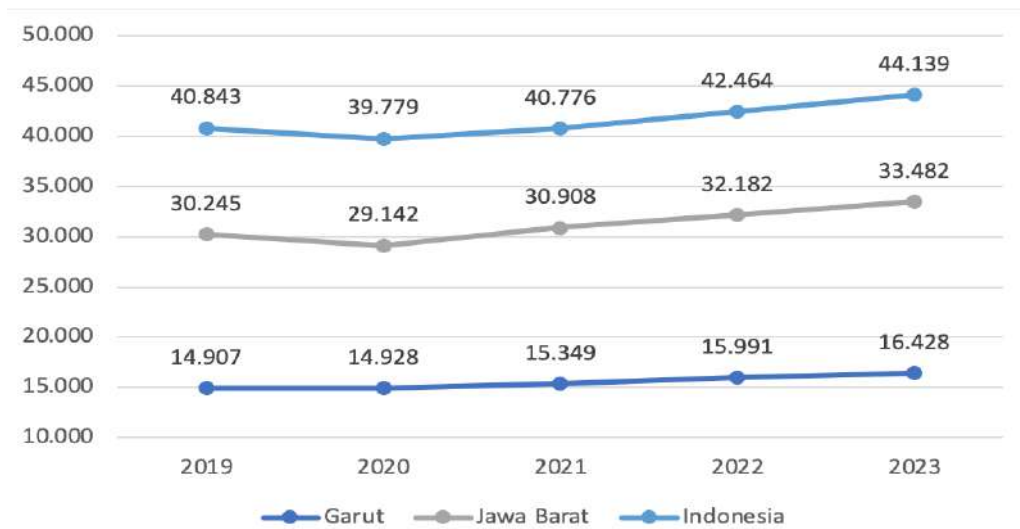
Tabel 2.16 Target dan Realisasi serta Capaian Indikator PDRB Perkapita ADHK Tahun 2019-2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target (Juta Rp.)	14,57	14,67-15	15,2-15,35	15,79-15,96	16,45-16,6	17,18
Realisasi (Juta Rp.)	14,90	14,63	15,35	15,99	16,43	
Capaian (%)	102,26	98,64	100,49	100,72	99,43	

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD

Capaian PDRB perkapita adh konstan tahun 2023 sebesar Rp.16,43 juta capaian ini sudah cenderung meningkat jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 yang berada pada angka Rp.15,99 juta, capaian tahun 2023 belum dapat mencapai target yang telah ditentukan yakni baru mencapai 99,43%, meskipun cenderung meningkat capaian PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Garut masih tergolong rendah dari capaian Jawa Barat sebesar Rp 52,65 juta dan terpaut jauh dari Nasional yang telah mencapai sebesar Rp 74,96 juta.

Gambar 2.21. Perbandingan PDRB Perkapita (ADHK) Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023

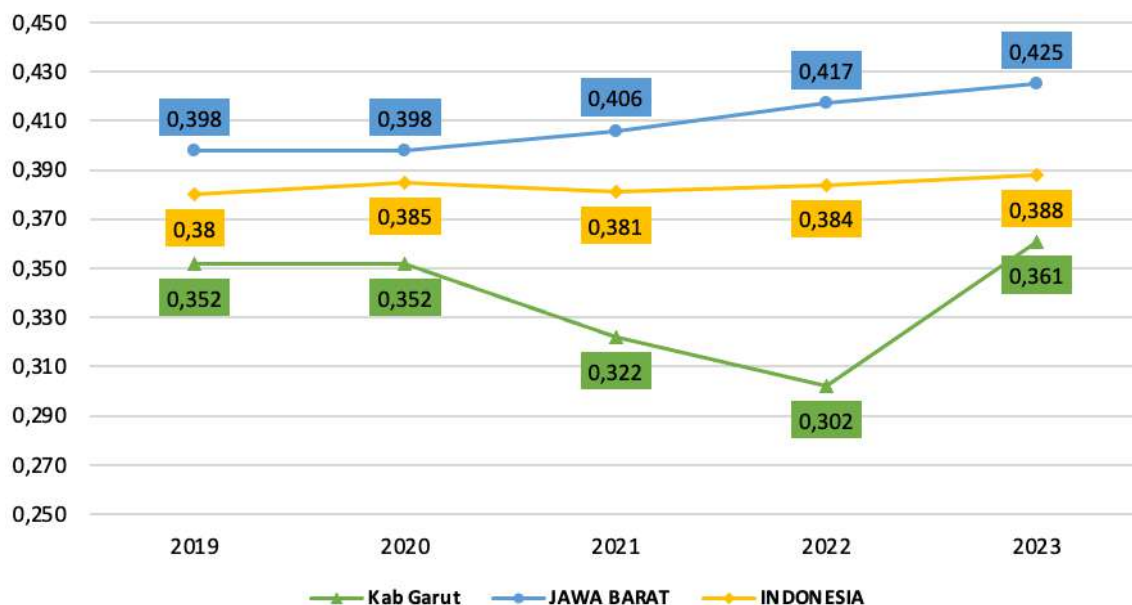


Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD

d. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah, dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai gini ratio, makin tinggi ketimpangan yang terjadi. Ini artinya bagian pendapatan yang diterima kelompok penduduk kaya semakin besar. Idealnya, kemajuan ekonomi suatu wilayah dapat diiringi dengan pemerataan pendapatan sehingga kesenjangan tidak tinggi. Masyarakat golongan ekonomi bawah harus didorong untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan mereka, sehingga ketimpangan dapat diperkecil. Dengan kata lain, koefisien gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Gambar 2.22 Indeks Gini Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan data Susenas BPS, pencapaian gini rasio tahun 2023 berada pada level menengah dengan besaran 0,361, cenderung meningkat 0,059 poin dan dikategorikan kelompok ketimpangan “ringan” karena berada di bawah 0,4. Kenaikan indeks gini di Kabupaten Garut pada tahun menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan namun belum meningkat secara merata. Capaian tersebut juga lebih baik dari Jawa Barat sebesar 0,425 dan Nasional sebesar 0,388. Pencapaian Indeks Gini tahun 2023 mencapai 100% dari target pada RKPD Tahun 2023 sebesar 0,360-0,362 poin.

**Tabel 2.17 Target dan Realisasi serta Capaian Indikator
Indeks Gini Tahun 2019-2024**

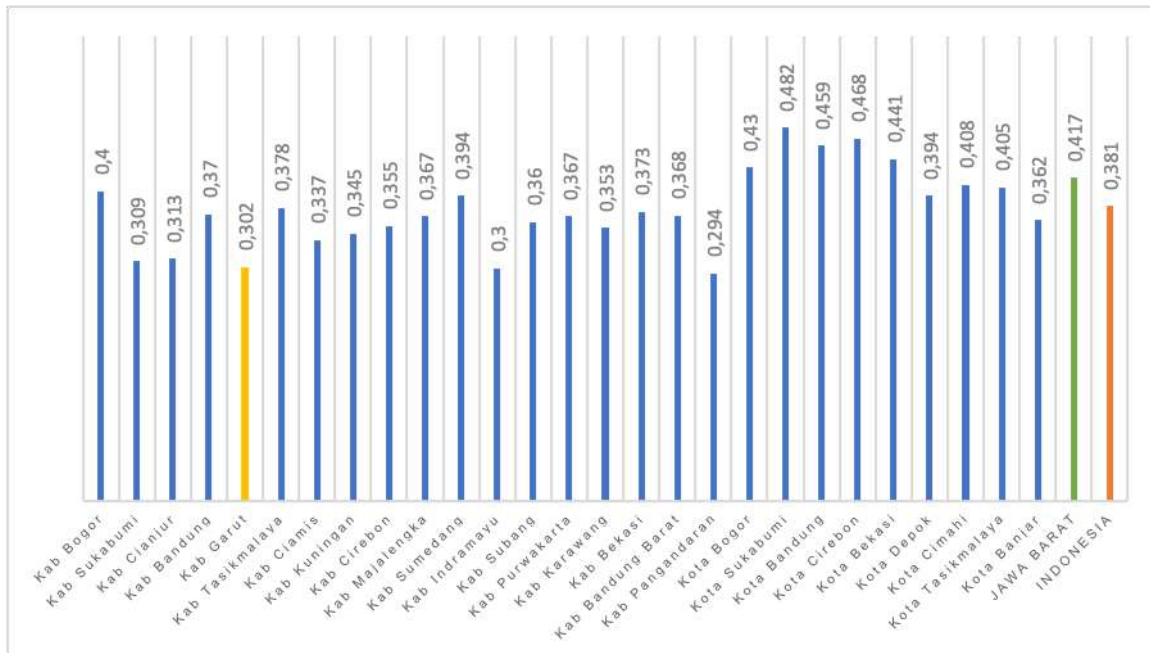
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target (%)	n/a	0,359-0,361	0,360-0,362	0,36 – 0,362	0,36 – 0,362	0,35
Realisasi (%)	0,352	0,352	0,322	0,302	0,361	
Capaian (%)	n/a	110,52	102,22	116,34	100	

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD

Jika dibandingkan dengan kabupaten kota di Jawa Barat, pada tahun 2023 Kabupaten Garut berada pada peringkat ke-3 di bawah kabupaten Pangandaran dan kabupaten Indramayu. Kondisi tersebut sama dengan tahun

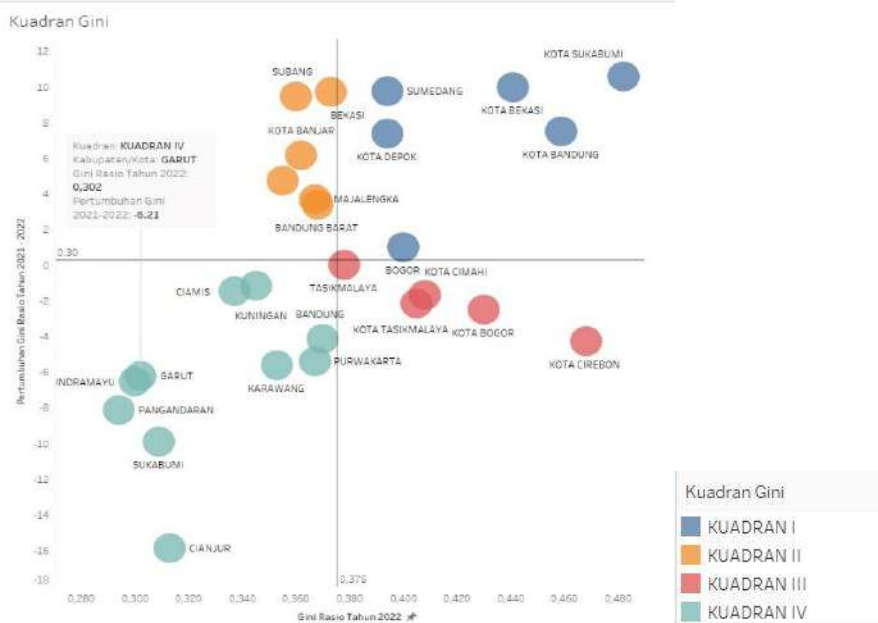
2021 Kabupaten Garut berada pada peringkat ke-3 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Kondisi ini menunjukkan adanya gap yang lebih kecil antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan masyarakat berpendapatan rendah..

Gambar 2.23 Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.24. Analisis Kuadran Perbandingan Capaian Indeks Gini Kabupaten Garut dengan Rata-rata Gap Kabupaten/Kota Tahun 2022



Sumber : BPS Kabupaten Garut. Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, Tahun 2023

Dari analisis kuadran, Kabupaten Garut berada di kuadran IV yaitu kabupaten/kota dengan pencapaian Indeks Gini lebih lebih baik dari rata-rata (0,375) dan penurunan/perbaikan tingkat ketimpangan lebih baik dari rata-rata, turun 0,020 poin menjadi 0,302 pada tahun 2022.

e. Penduduk Miskin

Berdasarkan Data BPS, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut mengalami penurunan sekitar 0,23% dari 10,65% menjadi 10,42% (Maret 2022). Angka ini masih lebih tinggi dari angka Provinsi (8,06%) dan Nasional (9,54%). Secara jumlah, penduduk miskin telah berkurang sekitar 4.690 jiwa menjadi 276,67 ribu jiwa pada tahun 2022. Selama periode 2020-2022, dari sisi persentase penduduk miskin berada pada peringkat ke-10 dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat.

Tabel 2.18. Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Garut Tahun 2018-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)	301.202	310.437	320.050	335.134	367.681
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	235,19	262,78	281,36	276,67	260,48
Persentase Penduduk Miskin (Persen)	8,98	9,98	10,65	10,42**	9,77
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,87	0,97	1,40	1,81	1,17
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,16	0,15	0,29	0,45	0,23

Sumber : BPS Kabupaten Garut Tahun 2024

Perbandingan kondisi pencapaian indikator kemiskinan terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Garut, secara umum pencapaian pada tahun 2023 belum dapat mencapai target RPJMD yang telah ditetapkan.

**Tabel 2.19.
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kemiskinan
Tahun 2018-2024**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin				Persentase Penduduk Miskin (%)			
	Target RPJMD	Realisasi	% capaian target tahunan	% capaian target akhir RPJMD	Target RPJMD	Realisasi	% capaian target tahunan	% capaian target akhir RPJMD
2019	265.769	235.190	111,51%	111,51%	9,63	8,98	106,75%	106,75%
2020	252.110 – 265.410	262.780	98,75%	63,26%	6,92- 7,03	9,98	80,48%	56,92%

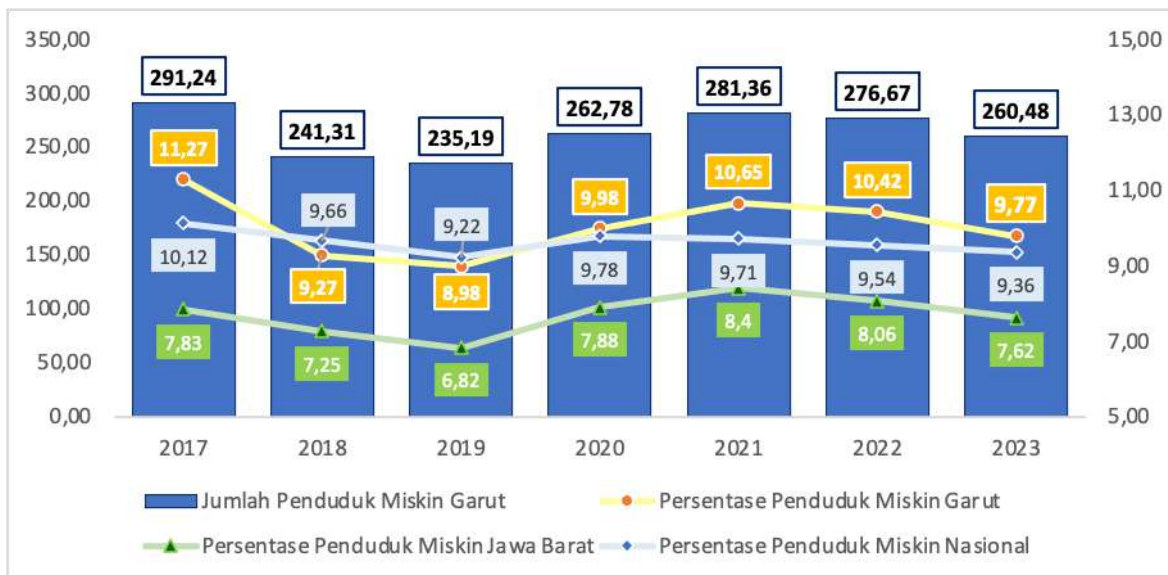
Tahun	Jumlah Penduduk Miskin				Persentase Penduduk Miskin (%)			
	Target RPJMD	Realisasi	% capaian target tahunan	% capaian target akhir RPJMD	Target RPJMD	Realisasi	% capaian target tahunan	% capaian target akhir RPJMD
2021	240.960 - 254.380	281.360	86,40%	53,59%	8,98- 9,48	10,65	84,62%	47,31%
2022	227.670 - 230.670	276.670	79,27%	56,03%	8,41 - 8,52	10,42	76,90%	50,60%
2023	209.170 - 212.170	260.480	76,36%	64,45%	7,66 - 7,77	9,77	73,36%	59,93%
2024	190.670 - 193.670				6,92 - 7,03			

Sumber : Target RPJMD Kab. Garut dan data realisasi BPS Kab. Garut, Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) Kabupaten Garut Tahun 2023 mengalami peningkatan Rp 32.547,- per kapita per bulan atau sebesar 9,71 % dari Rp 335.134,- per kapita per bulan pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp 367.681,- per kapita per bulan pada tahun 2023. Apabila dilihat perkembangannya, selama periode tahun 2019-2023, garis kemiskinan Kabupaten Garut terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Namun demikian, menurut kabupaten dan kota di Jawa Barat, Kabupaten Garut mempunyai garis kemiskinan yang terendah selama periode 2015-2023. Secara umum, garis kemiskinan Tahun 2023 di Jawa Barat menunjukkan peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan komoditi non makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat pada tingkat ekonomi rendah lebih didominasi pengeluaran untuk kebutuhan makanan dibandingkan kebutuhan bukan makanan.

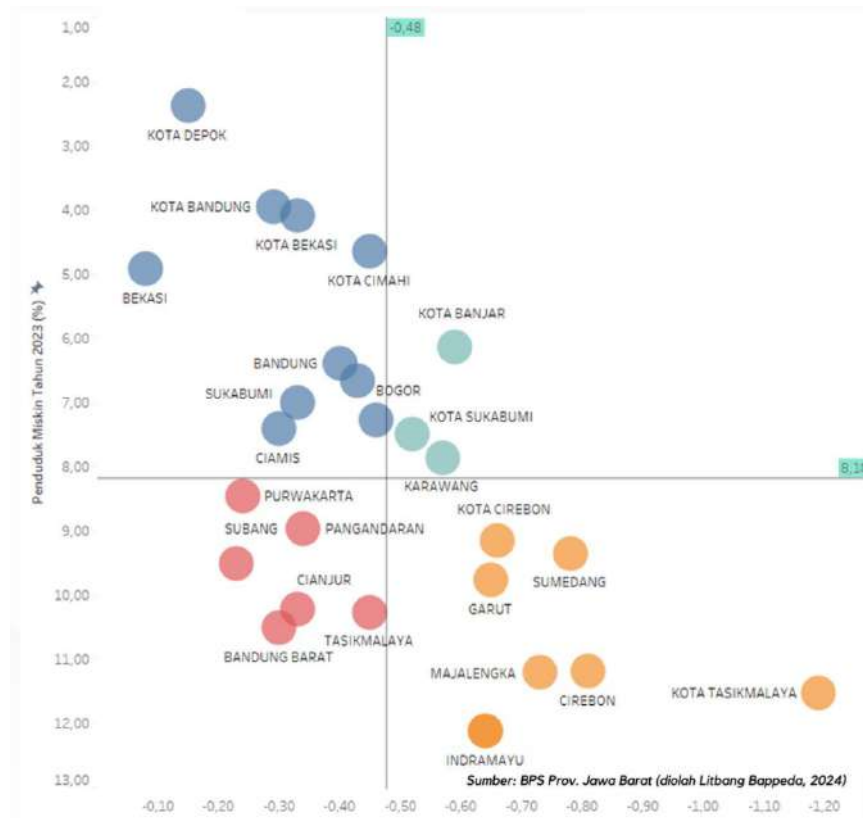
Gambar 2.25.
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Garut – Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Maret Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD

Jika dibandingkan dengan angka persentase penduduk miskin Jawa Barat maupun Nasional, pencapaian angka persentase penduduk miskin Kabupaten Garut sebesar 9,77% pada tahun 2023, berada diatas rata-rata penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar 7,62 % dan Nasional sebesar 9,36 %. Hal ini perlu menjadi perhatian dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Garut. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Barat, Kabupaten Garut berada dalam urutan 10 besar kabupaten/kota persentase penduduk miskin terbanyak. Berdasarkan analisis kuadran terhadap capaian persentase penduduk miskin kabupaten tahun 2023 dibandingkan dengan gap penurunan persentase penduduk miskin tahun 2022-2023, maka Kabupaten Garut dapat dikelompokkan dalam kategori kuadran III dengan angka capaian persentase penduduk miskin diatas rata-rata Provinsi Jawa Barat dan laju peningkatan diatas rata-rata.

Gambar 2.26.
Analisis Kuadran Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Garut dengan Rata-rata Gap Kabupaten/Kota Tahun 2022-2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut. Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, Tahun 2024

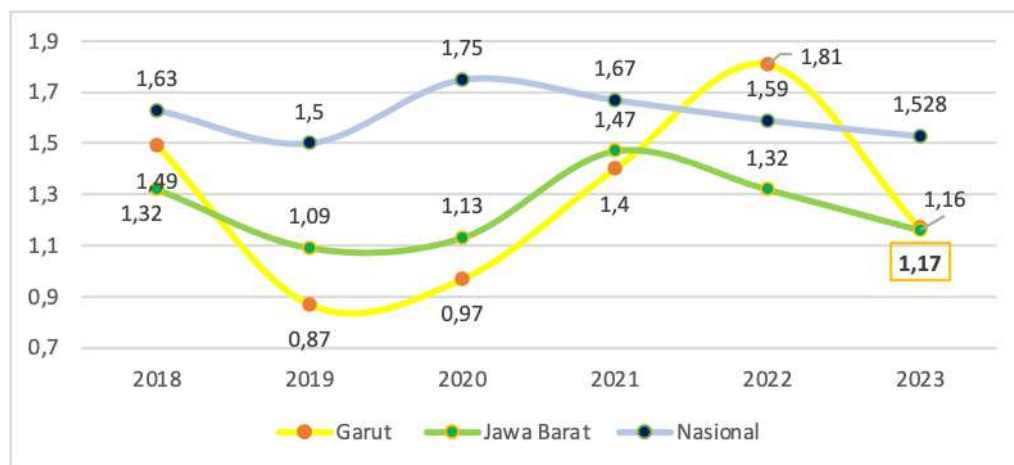
Bahasan mengenai kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari indikator makro. Kabupaten Garut berada di kuadran III yang memiliki jumlah warga miskin di atas rata-rata provinsi (260,48 ribu jiwa) dan penurunan jumlah penduduk miskin sekitar 16,190 ribu jiwa. Hal ini merupakan sebuah indikasi bahwa masyarakat Kabupaten Garut memiliki kerentanan tinggi dalam menghadapi sebuah krisis ekonomi.

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebagai ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dan juga Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebagai indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, keduanya sama-sama menunjukkan

kecenderungan naik. Ini mengindikasikan adanya perburukan kondisi kesejahteraan pada penduduk miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,81 poin pada tahun 2022 menjadi 1,17 poin pada tahun 2023, artinya penurunan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Kondisi Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2023 tersebut diatas Provinsi Jawa Barat sebesar sebesar 1,16 poin dan dibawah Nasional sebesar 1,528 poin.

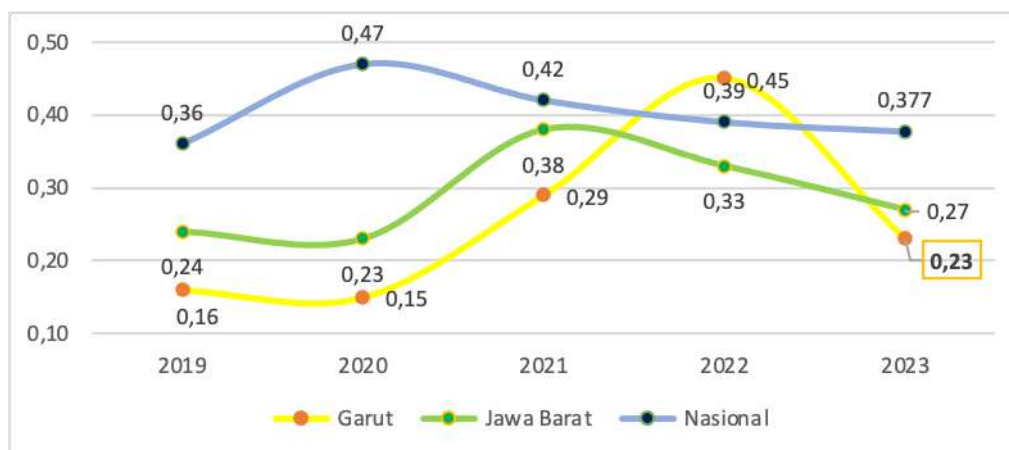
Gambar 2.27.
Indeks Kedalaman Kemiskinan
Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD

Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,45 poin pada tahun 2022 menjadi 0,23 poin pada tahun 2023, artinya kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin menurun. Kondisi Indeks Keparahan Kemiskinan pada tahun 2023 tersebut dibawah Provinsi Jawa Barat sebesar 0,27 poin maupun Nasional sebesar 0,377 poin.

Gambar 2.28.
Indeks Keparahkan Kemiskinan
Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial, jumlah total DTKS Kabupaten Garut Tahun 2023 sebanyak 1.815.818 jiwa dengan sebaran per kecamatan sebagai berikut :

Tabel 2.20.
Jumlah DTKS menurut Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Individu	Jumlah Keluarga
1	Banjarwangi	53.313	21.679
2	Banyuresmi	62.826	24.401
3	Bayongbong	64.471	23.100
4	Bl. Limbangan	55.815	21.584
5	Bungbulang	35.365	15.158
6	Caringin	21.304	8.904
7	Cibalong	37.445	15.289
8	Cibatu	55.999	20.957
9	Cibiuk	19.901	7.301
10	Cigedug	28.141	11.016
11	Cihurip	14.612	6.342
12	Cikajang	53.298	22.314
13	Cikelet	33.556	13.369
14	Cilawu	79.247	30.696
15	Cisewu	19.322	9.214
16	Cisompet	43.048	16.720
17	Cisurupan	64.294	26.706
18	Garut Kota	91.930	33.664
19	Kadungora	60.241	23.214
20	Karangpawitan	91.680	32.586
21	Karantengah	13.565	5.170



No	Kecamatan	Jumlah Individu	Jumlah Keluarga
22	Kersamanah	29.641	10.533
23	Leles	46.279	19.562
24	Leuwigoong	33.169	12.730
25	Malangbong	100.328	36.084
26	Mekarmukti	14.444	6.028
27	Pakenjeng	61.607	24.850
28	Pameungpeuk	29.179	11.993
29	Pamulihan	13.504	5.761
30	Pangatikan	31.685	12.059
31	Pasirwangi	53.083	20.880
32	Peundeuy	19.884	7.289
33	Samarang	51.835	20.139
34	Selaawi	30.934	11.949
35	Singajaya	40.977	16.147
36	Sucinaraja	22.935	9.458
37	Sukaresmi	33.233	12.345
38	Sukawening	42.326	15.206
39	Talegong	18.783	9.074
40	Tarogong Kaler	54.783	20.429
41	Tarogong Kidul	56.388	20.745
42	Wanaraja	31.444	12.587
Jumlah		1.815.818	705.236

Sumber: Dinas Sosial Kab. Garut Tahun 2024 yang dikelola dalam SIPD

f. Indeks Pembangunan Manusia

Status pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2023 mencapai 68,11 poin atau mencapai 98,53% dibandingkan target IPM Tahun 2023. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Garut tumbuh 1,03% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 (67,41%). Hal ini menunjukkan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Garut yang direpresentasikan oleh 3 (tiga) dimensi yaitu angka harapan hidup, pengetahuan dan standar hidup layak yang diukur dengan indikator Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli.

Tabel 2.21.
Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Realisasi	Target	% Capaian
	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	68,11	68,63 - 69,62	98,53%
A	Indeks Pendidikan	Poin	59,91	60,46 - 62,35	97,57%

No	Indikator	Satuan	Realisasi	Target	% Capaian
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,16	12,07 - 12,15	100,41%
	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,84	8,08 - 8,58	94,12%
B	Indeks Kesehatan	Poin	80,11	79,83 - 80,03	100,22%
	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,07	71,89 - 72,02	100,16%
C	Indeks Pengeluaran	Poin	65,83	64,09 - 64,15	97,82%
	Pengeluaran per kapita	(000 Rp)	8.685	9012,5 - 9212,5	95,31%
D	Indeks Pembangunan Manusia (LF SP 2020)	Poin	69,22		
	Indeks Kesehatan (LF SP 2020)	Poin	84,09		
	Angka Harapan Hidup (LF SP 2020)	Tahun	74,66		

Sumber: BPS Kabupaten Garut Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD

Selama periode Tahun 2019 sampai 2023, IPM mengalami tren kenaikan kecuali pada Tahun 2020 yang mengalami sedikit penurunan yang kemungkinan besar diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat tidak hanya sisi kesehatan namun juga sisi perekonomian (indeks pengeluarannya) serta pendidikan terutama pelaksanaan pembelajaran pada pendidikan formal. Sedangkan berdasarkan hasil Long Form SP20 IPM Kabupaten Garut pada Tahun 2023 berada pada nilai 69,22 Poin.

Tabel 2.22.

Target dan Realisasi serta Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019-2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target(Poin)	75,02	66,41-66,46	66,85-66,96	67,52-68,54	68,63-69,62	69,7
Realisasi(Poin)	66,22	66,12	66,45	67,41	68,11	
Capaian(%)	88,26	99,52	99,32	99,09	98,53	

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD

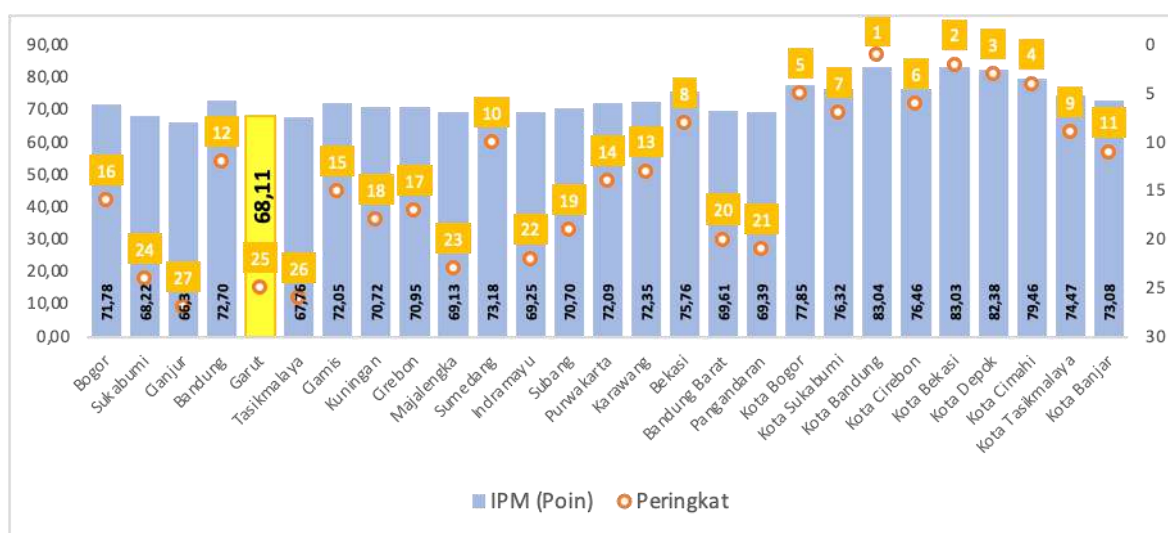
Kondisi tahun 2023, dari sisi nilai IPM sebesar 68,11 poin berada pada peringkat ke-25 dibandingkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Dari sisi pertumbuhan IPM (1,03 %), Kabupaten Garut berada pada peringkat ke-6 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, lebih besar dari pertumbuhan IPM Jawa Barat sebesar 0,85 % dan Nasional sebesar 0,88 %.

Tabel 2.23.
Perbandingan IPM Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2019-2023

Uraian	Indeks Pembangunan Manusia				
	2019	2020	2021	2022	2023
IPM Garut	66,22	66,12	66,45	67,41	68,11
IPM Jawa Barat	72,03	72,09	72,45	73,12	73,74
IPM Nasional	71,92	71,94	72,29	72,91	73,55
Rangking IPM di Jawa Barat	25	25	25	25	25
Rangking Pertumbuhan IPM di Jawa Barat	4	20	9	1	6
Selisih dari Jawa Barat (poin)	-5,81	-5,97	-6,00	-5,70	-5,63
Selisih dari Nasional (poin)	-5,70	-5,82	-5,84	-5,50	-5,45
Pertumbuhan IPM Garut	1,22%	-0,16%	0,50%	1,45%	1,03%
Pertumbuhan IPM Jawa Barat	1,02%	0,08%	0,50%	0,92%	0,85%
Pertumbuhan IPM Nasional	0,75%	0,02%	0,49%	0,86%	0,88%

Sumber : BPS RI, Tahun 2024 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

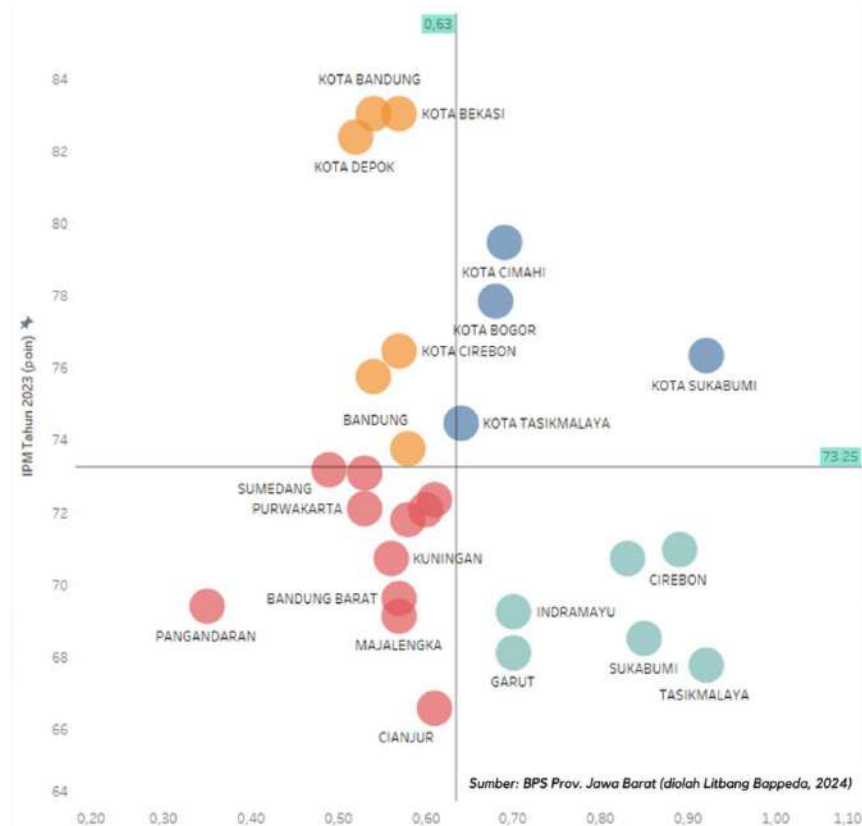
Gambar 2.29.
Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian IPM kabupaten/kota tahun 2023 dibandingkan gap pertumbuhan IPM tahun 2022-2023, maka capaian IPM kabupaten Garut dapat dikelompokkan dalam kategori kuadran III yaitu kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM dibawah rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat namun perumbuhannya lebih baik dan lebih tinggi dari rata-rata.

Gambar 2.30.
Analisis Kuadran Capaian IPM dan Gap Rata-rata IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut. Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, Tahun 2024

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya yang berkaitan erat dengan buta huruf. Semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. AMH pada tahun 2022 sebesar 99,60 %, mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2023 sebesar yang hanya mencapai 99,02 (mencapai 99,57% dari target tahun 2023).

Tabel 2.24.
Target dan Realisasi serta Capaian Angka Melek Huruf (AMH)
Tahun 2019-2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target (%)	99,53	99,21	99,29	99,37	99,45	99,53
Realisasi (%)	98,82	98,74	99,14	99,60	99,02	



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian (%)	98,82	98,74	99,14	100,23	99,57	

Sumber: BPS, Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD

b. Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Komponen pembentuk IPM dari dimensi pengetahuan diukur melalui tingkat pendidikan, menggunakan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. RLS tahun 2022 sebesar 7,83 tahun atau setara dengan kelas VII, meningkat 0,3 tahun atau tumbuh 0,17% dari 2021 sebesar 7,53 tahun. RLS tahun 2022 mencapai 98,12 % dari target sebesar 7,73-8,23 tahun.

Tabel 2.25.

Target dan Realisasi serta Capaian Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Tahun 2019 - 2024

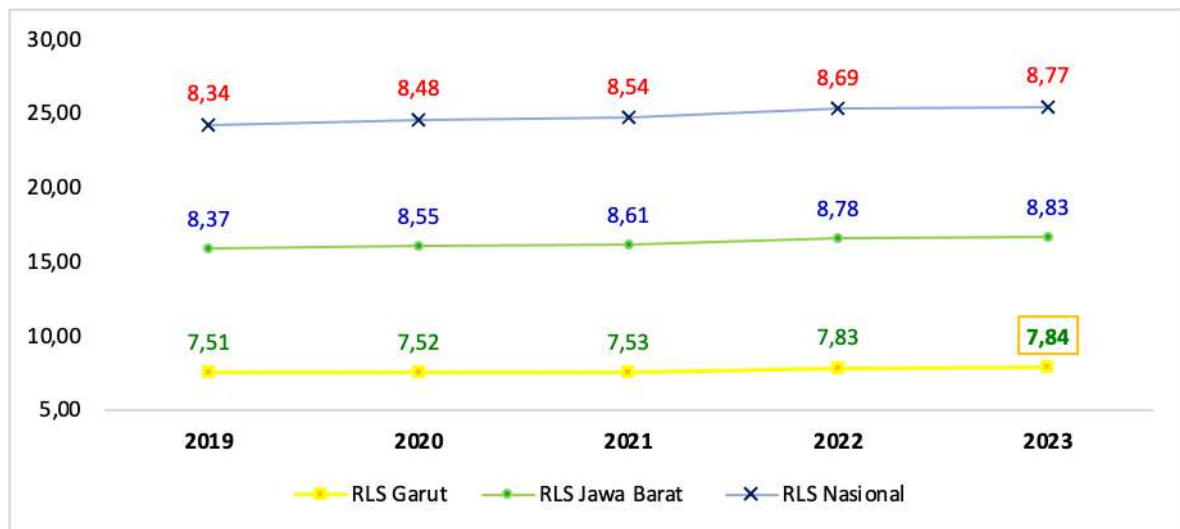
No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Δ 2022-2023	Δ 2019-2023
1	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)								
	Target (Tahun)	8,70	7,53 - 7,54	7,62 - 7,64	7,73 - 8,23	8,08 - 8,58	8,43 - 8,93		
	Realisasi (Tahun)	7,51	7,52	7,53	7,83	7,84		0,01	0,33
	Capaian (Tahun)	86,32	99,80	98,68	98,12	94,12			
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)								
	Target (Tahun)	13,10	11,85 - 11,86	11,98 - 12,00	12,01 - 12,09	12,07 - 12,15	12,13 - 12,21		
	Realisasi (Tahun)	11,82	11,91	12,03	12,15	12,16		0,01	0,34
	Capaian (Tahun)	90,23	100,46	100,33	100,83	100,41			

Sumber: BPS, Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD

Harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang (dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas), untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Capaian HLS tahun 2023 sebesar 12,16 tahun, artinya anak usia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 12,16 tahun atau hampir setara lulusan SMA, meningkat 0,01 tahun atau tumbuh 0,13 % dari tahun 2022. HLS tahun 2023 mencapai 100,41% dari target tahun 2023 sebesar 12,16

tahun. Indeks Pendidikan tahun 2023 mencapai 80,11 poin, tumbuh 0,42 persen atau meningkat 0,34 poin dari tahun 2022, mencapai 97,57% dari target tahun 2022.

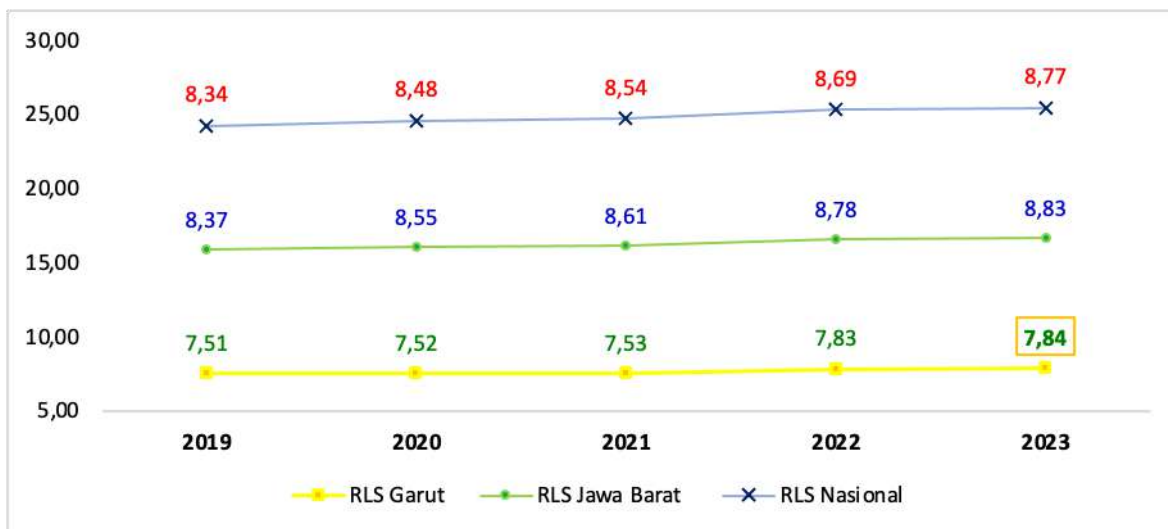
Tabel 2.31.
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut Tahun 2024 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

Capaian RLS Kabupaten Garut tahun 2023 masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional yaitu masing-masing terpaut 0,99 tahun dan 0,93 tahun. Kondisi tahun 2023, dari sisi nilai RLS berada pada peringkat ke-21 dan dari sisi pertumbuhan RLS dibandingkan tahun 2022 berada pada peringkat ke-20 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat tahun 2023. Kabupaten Garut menunjukkan peningkatan pertumbuhan RLS pada tahun 2023 sebesar 0,13 % dan berada pada peringkat ke-20 dari 27 Kabupaten, serta berada dibawah pertumbuhan RLS Jawa Barat sebesar 0,57 % dan Nasional sebesar 0,92%. Selama periode Tahun 2019-2023, pertumbuhan RLS Jawa Barat sebesar 5,50%, dan juga RLS Nasional sebesar 5,16 % sedangkan Kabupaen Garut hanya tumbuh 4,39% yang menyebabkan gap capaian RLS Kabupaten Garut dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional semakin besar setiap tahunnya.

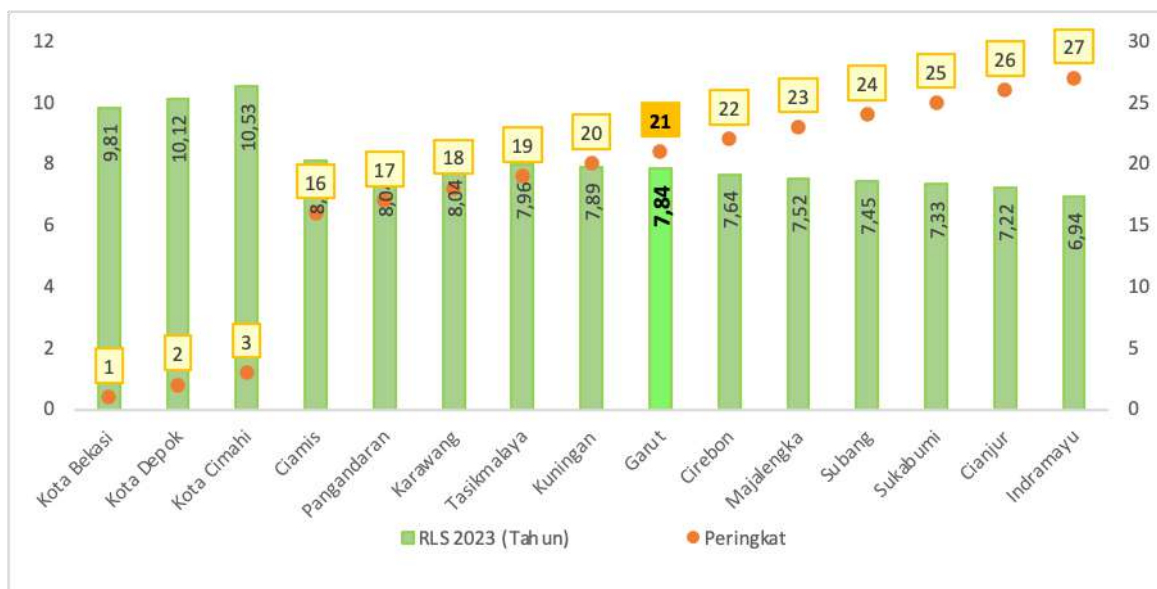
Gambar 2.32.
RLS Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut Tahun 2024 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

Dibandingkan capaian kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, pencapaian RLS Kabupaten Garut tahun 2023 masih berada di peringkat 21 di atas Kabupaten Tasikmalaya sebesar 7,83 tahun, namun masih dibawah Kabupaten Karawang sebesar 7,96 tahun. Pada tahun 2023, RLS tertinggi adalah Kota Bekasi, yang mencapai 11,66 tahun, diikuti oleh Kota Depok, dan Kota Cimahi.

Gambar 2.33.
Perbandingan RLS Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut Tahun 2024 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

Pencapaian Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2023 sebesar 12,16 tahun dengan capaian target 100,41%. Namun demikian, Capaian HLS tahun 2023 masih tertinggal 0,52 tahun dari HLS Jawa Barat (12,68 tahun) dan masih tertinggal 0,99 tahun dari HLS Nasional (13,15 tahun).

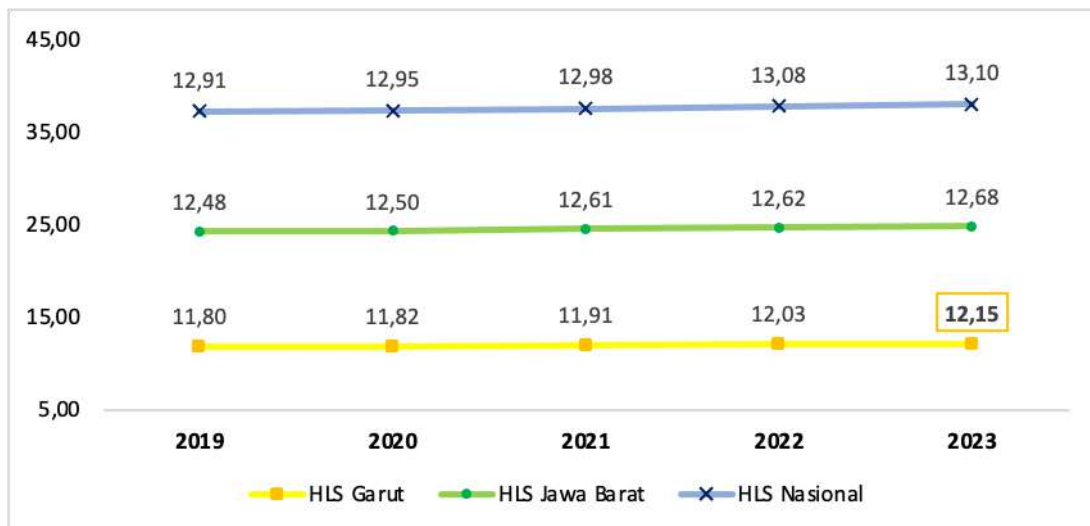
Tabel 2.26.
Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023

Uraian	EYS (Harapan Lama Sekolah (Tahun))					% Pertumbuhan 2022 - 2023	% Pertumbuhan 2019 - 2023
	2019	2020	2021	2022	2023		
HLS Garut (tahun)	11,82	11,91	12,03	12,15	12,16	0,08%	2,88%
HLS Jawa Barat (tahun)	12,48	12,50	12,61	12,62	12,68	0,48%	1,60%
HLS Nasional (tahun)	12,95	12,98	13,08	13,10	13,15	0,38%	1,54%
Rangking HLS di Jawa Barat	26	25	24	22	24		
Rangking Pertumbuhan HLS di Jawa Barat	11	3	1	1	22	22	2
Selisih dari HLS Jawa Barat (tahun)	-0,66	-0,59	-0,58	-0,47	-0,52	-0,39%	1,27%
Selisih dari HLS Nasional (tahun)	-1,13	-1,07	-1,05	-0,95	-0,99	-0,30%	1,33%

Sumber : BPS Kabupaten Garut Tahun 2024 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

Kondisi tahun 2023, capaian HLS berada pada peringkat ke-22 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Pertumbuhan HLS Kabupaten Garut tahun 2019-2023 berada diatas pertumbuhan HLS Jawa Barat dan HLS Nasional yakni berada pada nilai 2,88% sehingga gap capaian HLS Kabupaten Garut dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional semakin kecil setiap tahunnya.

Gambar 2.34.
Perbandingan HLS Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, Tahun 2024 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

Dibandingkan capaian kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, pencapaian HLS kabupaten Garut tahun 2023 berada di peringkat 24 di atas Kabupaten Cianjur sebesar 12,16 tahun. Pada tahun 2023, HLS tertinggi adalah Kabupaten Ciamis yang mencapai 14,29 tahun, diikuti oleh Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Cimahi.

Gambar 2.35.
Perbandingan HLS Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2023



Sumber : BPS, Tahun 2024 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

Indeks Pendidikan tahun 2023 mencapai sebesar 59,91 poin, dan dibandingkan. Capaian Indeks Pendidikan tahun 2023 masih terpaut 4,74 poin dari Indeks Pendidikan Jawa Barat sebesar 64,66poin, dan terpaut 5,85 poin dari Nasional sebesar 65,76 poin.

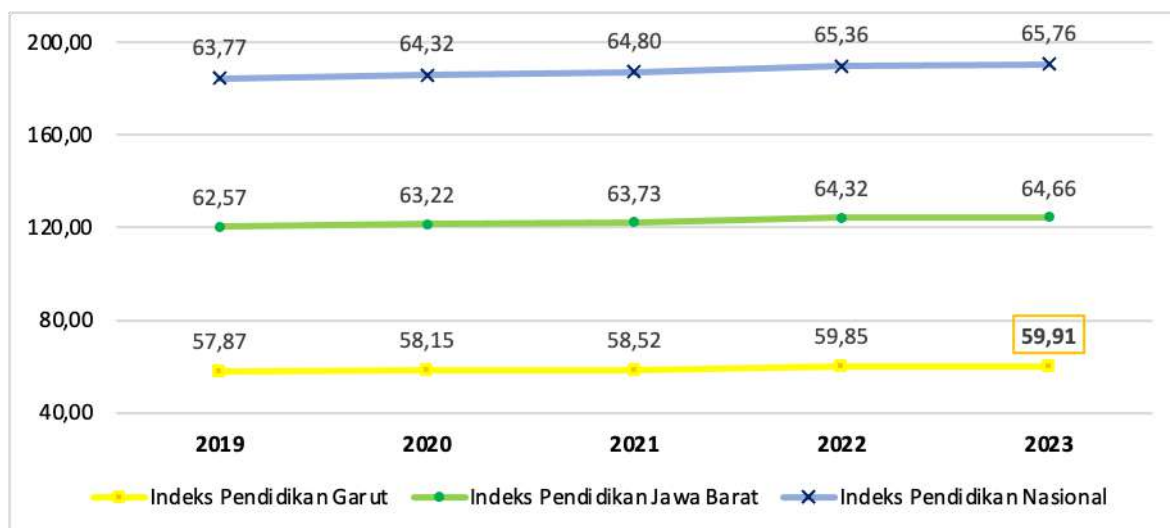
Tabel 2.27.
Perbandingan Indeks Pendidikan Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023

Uraian	Indeks Pendidikan					% Pertumbuhan 2022 - 2023	% Pertumbuhan 2019 - 2023
	2019	2020	2021	2022	2023		
Indeks Pendidikan Garut	57,87	58,15	58,52	59,85	59,91	0,10%	3,53%
Indeks Pendidikan Jawa Barat	62,57	63,22	63,73	64,32	64,66	0,52%	3,34%
Indeks Pendidikan Nasional	63,77	64,32	64,80	65,36	65,76	0,62%	3,12%
Rangking Indeks Pendidikan di Jawa Barat	21	22	21	21	22		
Rangking Pertumbuhan Indeks Pendidikan di Jawa Barat	23	14	16	1	27	27	9
Selisih dari Indeks Pendidikan Jawa Barat (poin)	-4,70	-5,07	-5,21	-4,47	-4,74	-0,42%	0,19%
Selisih dari Indeks Pendidikan Nasional (poin)	-5,91	-6,17	-6,28	-5,51	-5,85	-0,52%	0,41%

Sumber : BPS, Tahun 2024 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

Kondisi tahun 2023, dari sisi nilai Indeks Pendidikan sebesar 59,91 poin berada pada peringkat ke-22 dan dari sisi pertumbuhan Indeks Pendidikan sebesar 0,10% dibandingkan tahun 2022 lebih rendah dari pertumbuhan indeks pendidikan Jawa Barat sebesar 0,52 % dan Nasional sebesar 0,62%. Selama periode Tahun 2019-2023, pertumbuhan Indeks Pendidikan Kabupaten Garut berada diatas pertumbuhan Indeks Pendidikan Jawa Barat (3,34%) dan Nasional (3,12%) yakni berada pada pertumbuhan 3,53% yang mengakibatkan gap yang cenderung semakin mengecil.

Gambar 2.36.
Indeks Pendidikan Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut Tahun 2024 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

Tantangan yang masih dihadapi di bidang pendidikan diantaranya pendidikan formal belum dirasakan oleh semua kalangan. Untuk meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan, maka dari sisi input perlu didahului oleh peningkatan ketersediaan fasilitas pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sehingga standar kualitas pelayanan pendidikan diantaranya rasio murid terhadap guru atau rasio guru terhadap sekolah, jumlah sekolah dan lainnya dapat dipenuhi, terutama jumlah sekolah antar jenjang pendidikan yang belum sebanding merupakan salah satu hal yang perlu menjadi perhatian karena terkait dengan kemudahan akses dan daya tampung terhadap pendidikan. Dari sisi proses, untuk meningkatkan kualitas output yang dihasilkan pada pembangunan manusia diantaranya melalui peningkatan kemudahan akses ke sarana pendidikan (sekolah) dengan mendekatkan jarak ke sekolah yang didukung kondisi jalan serta kemudahan menuju sekolah mengingat kondisi topografi Kabupaten Garut yang cukup beragam. Upaya untuk meningkatkan Indeks Pendidikan diantaranya dengan meningkatkan daya tampung pendidikan pada PAUD, SD dan SMP serta memberikan akses pendidikan kesetaraan bagi penduduk putus sekolah.

c. Angka Usia Harapan Hidup

Pencapaian IPM ditinjau dari dimensi umur panjang dan sehat diukur dari indikator angka harapan hidup saat lahir (AHH) dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 72,07 tahun. Selama periode 2019-2023, walaupun relatif lambat, AHH mengalami pertumbuhan sebesar 0,31 % atau meningkat 0,22 tahun. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi.

Tabel 2.28.

**Target dan Realisasi serta Capaian Angka Harapan Hidup (AHH)
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024**

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Δ2022-2023	Δ2019-2023
Target (tahun)	71,02	71,42 - 71,48	71,63 - 71,74	71,7- 71,89	71,89 - 72,02	72,03 - 72,16		
Realisasi (tahun)	71,22	71,41	71,59	71,85	72,07		0,31%	1,19%
Capaian (%)	100,29	99,94	99,87	100,03	100,16			

Sumber: BPS, Tahun 2024 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

Dari capaian AHH yang tersaji pada data target dan realisasi serta capaian tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, pencapaian AHH tahun 2023 sebesar 72,07 tahun telah mencapai 100,16 % dari target pada tahun 2023.

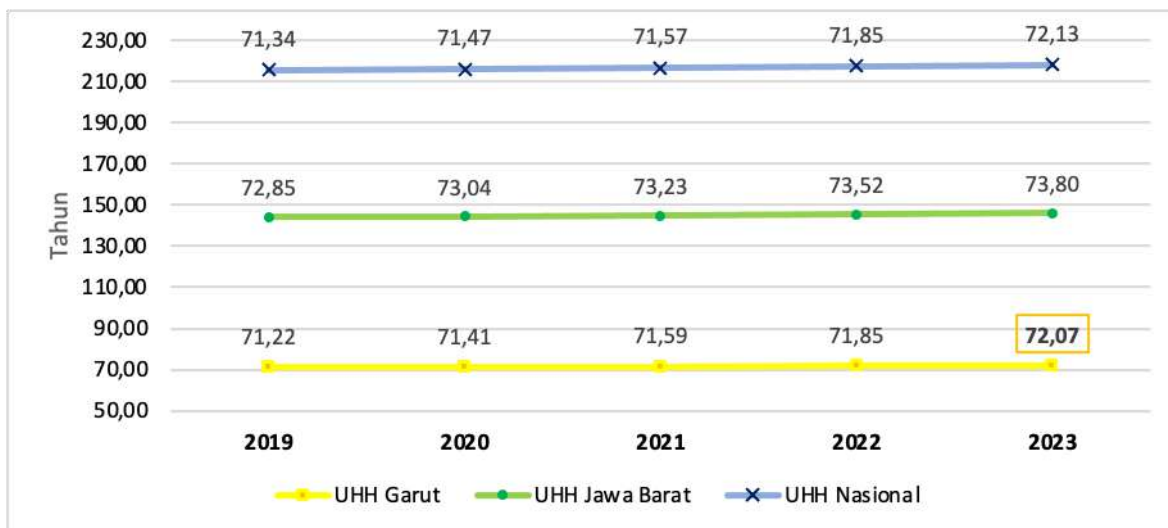
Tabel 2.29.

**Perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Garut, Jawa Barat
dan Nasional Tahun 2019-2023**

Uraian	AHH (Angka Harapan Hidup (Tahun))					% Pertumbuha n 2022 - 2023	% Pertumbuha n 2019 - 2023
	2019	2020	2021	2022	2023		
AHH Garut	71,22	71,41	71,59	71,85	72,07	0,31%	1,19%
AHH Jawa Barat	72,85	73,04	73,23	73,52	73,80	0,38%	1,30%
AHH Nasional	71,34	71,47	71,57	71,85	72,13	0,39%	1,11%
Rangking AHH di Jawa Barat	19	19	20	20	20		
Rangking Pertumbuhan AHH di Jawa Barat	14	14	18	25	26	26	24
Selisih dari AHH Jawa Barat (tahun)	-1,63	-1,63	-1,64	-1,67	-1,73	-0,07%	-0,11%
Selisih dari AHH Nasional (tahun)	-0,12	-0,06	0,02	0,00	-0,06	-0,08%	0,09%

Sumber : BPS, Tahun 2024 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD.

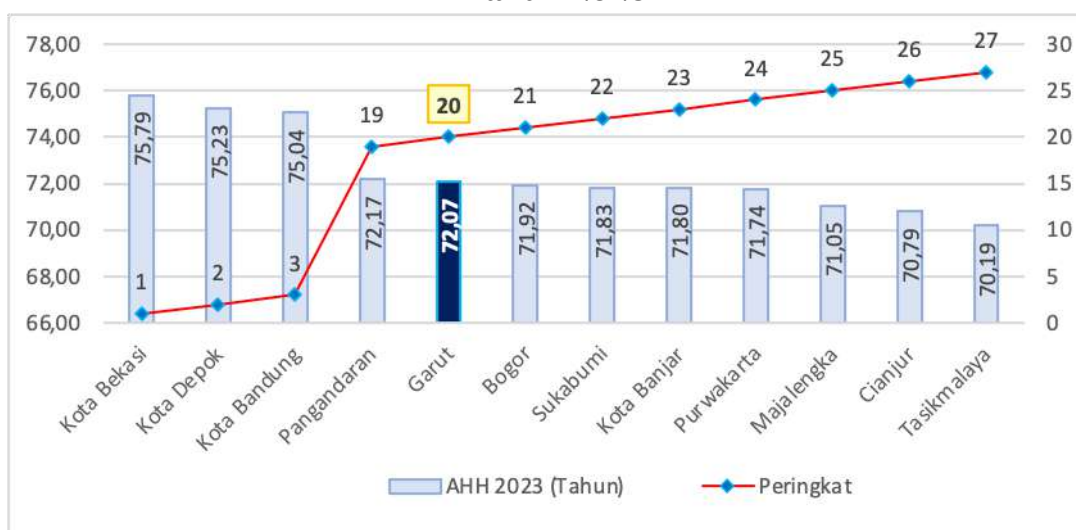
Gambar 2.37.
Angka Harapan Hidup Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Tahun 2024 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD.

Selama periode Tahun 2019-2023, pertumbuhan AHH Kabupaten Garut sebesar 1,19 % berada di bawah pertumbuhan Jawa Barat (1,30%) namun berada diatas Nasional sebesar (1,11%). Dibandingkan capaian kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, pencapaian AHH kabupaten Garut tahun 2023 masih berada di peringkat 20. Pada tahun 2023 AHH tertinggi adalah Kota Bekasi sebesar 75,79 tahun, disusul Kota Depok, dan Kota Bandung.

Gambar 2.38.
Perbandingan AHH Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut Tahun 2024 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD.

Indeks Kesehatan tahun 2023 mencapai sebesar 80,11 poin dan telah mencapai 100,22 dibandingkan target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Capaian Indeks Kesehatan tahun 2023 masih terpaut 2,66 poin dari Indeks Kesehatan Jawa Barat (82,77 poin), namun terpaut 0,09 dengan Indeks Kesehatan Nasional (80,20 poin).

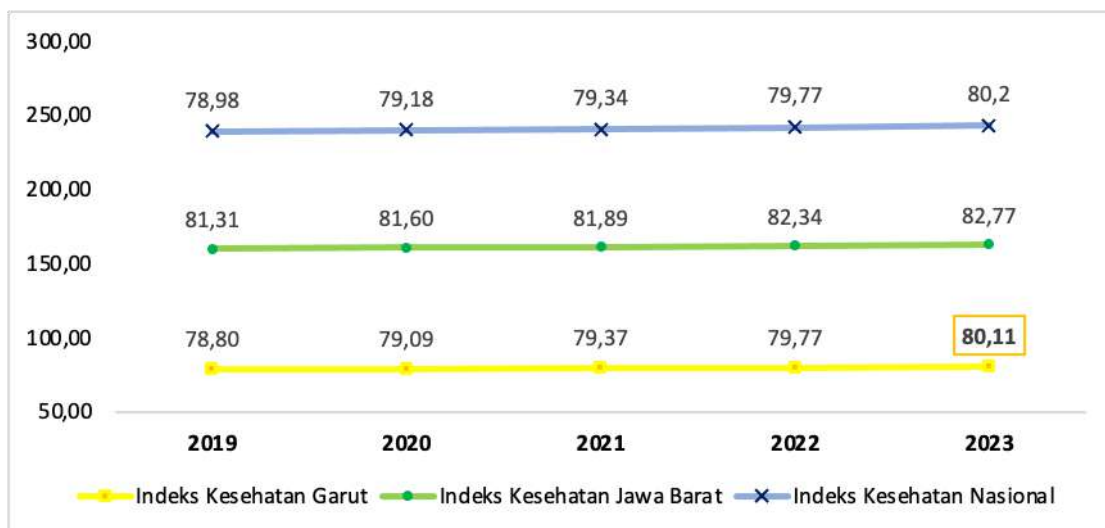
Tabel 2.30.
Perbandingan Indeks Kesehatan Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023

Uraian	Indeks Kesehatan					% Pertumbuhan 2022 - 2023	% Pertumbuhan 2019 - 2023
	2019	2020	2021	2022	2023		
Indeks Kesehatan Garut	78,80	79,09	79,37	79,77	80,11	0,42%	1,66%
Indeks Kesehatan Jawa Barat	81,31	81,60	81,89	82,34	82,77	0,52%	1,80%
Indeks Kesehatan Nasional	78,98	79,18	79,34	79,77	80,20	0,54%	1,54%
Rangking Indeks Kesehatan di Jawa Barat	19	19	20	20	20		
Rangking Pertumbuhan Indeks Kesehatan di Jawa Barat	14	14	18	25	26	26	23
Selisih dari Indeks Kesehatan Jawa Barat (poin)	-2,51	-2,51	-2,52	-2,57	-2,66	-0,10%	-0,14%
Selisih dari Indeks Kesehatan Nasional (poin)	-0,18	-0,09	0,03	0,00	-0,09	-0,12%	0,12%

Sumber : BPS Tahun 2024 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD.

Kondisi tahun 2023, dari sisi nilai Indeks Kesehatan sebesar 80,11 poin berada pada peringkat ke-20 dan dari sisi pertumbuhan Indeks Kesehatan sebesar 0,50 %, berada pada peringkat ke-26 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Laju pertumbuhan Indeks Kesehatan Kabupaten Garut selama periode 2019-2023 lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sehingga pada tahun 2023.

Gambar 2.39.
Indeks Kesehatan Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, Tahun 2024 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

Menurut konsep hidup sehat H.L.Blum, terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat sebagai faktor determinan timbulnya masalah kesehatan yang terdiri dari faktor lingkungan sebesar 45% (sosial, ekonomi, politik, budaya), faktor perilaku kesehatan/gaya hidup sebesar 30% (life style), faktor pelayanan kesehatan sebesar 20% (jenis cakupan dan kualitasnya) dan faktor keturunan sebesar 5% (genetik). Keempat faktor tersebut saling berinteraksi yang mempengaruhi kesehatan perorangan dan derajat kesehatan masyarakat.

Akselerasi pembangunan pada dimensi kesehatan di Kabupaten Garut sangat perlu terus dilakukan terhadap faktor-faktor determinan yang mempengaruhi dimensi tersebut, yang tidak sebatas pada sektor kesehatan, namun melibatkan hampir seluruh sektor pembangunan yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, infrastruktur, sanitasi, pendidikan dan lain sebagainya. Pada dasarnya, upaya yang harus dilakukan harus diarahkan untuk meningkatkan kecukupan dan aksesibilitas penduduk terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan serta peningkatan responsivitas penduduk terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut.

Percepatan pelaksanaan program-program kesehatan untuk menekan angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan yang disertai dengan upaya mewujudkan fasilitas kesehatan yang memadai serta tenaga medis yang

lebih merata, mutlak harus dijaga dan ditingkatkan konsistensinya. Sehingga diharapkan dapat menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan secara optimal. Disamping itu, akselerasi pencapaian IPM diharapkan tidak hanya bertumpu pada dinas teknis saja, melainkan harus terintegrasi dengan tugas-tugas kecamatan, kelurahan dan pemerintahan desa dan perangkat daerah lainnya, serta lebih diarahkan kepada upaya perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dengan seluruh jaringan kerjanya.

d. Pengeluaran Per Kapita

Pencapaian IPM ditinjau dari dimensi standar hidup layak, indikator yang dipergunakan yaitu indikator perkembangan tingkat pengeluaran sebagai pendekatan pengukuran daya beli masyarakat di suatu wilayah. Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita penduduk Garut mencapai Rp 8,685 juta per kapita per tahun, naik Rp 266 ribu atau 3,34 % dari tahun sebelumnya. Walaupun relatif lambat, pengeluaran per kapita Garut selama periode 2018-2022 terus meningkat dengan pertumbuhan sekitar 13,16%.

Tabel 2.31.
Pencapaian Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Garut
Tahun 2019 – 2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	$\Delta 2022 - 2023$	$\Delta 2019 - 2023$	Target 2022	Target 2023	Target 2024
	INDEKS PENGELUARAN	61,74	63,69	62,84	63,17	65,83	2,58%	3,35%	65,39-66,1	66,96-67,63	68,45-69,09
1.	Pengeluaran per kapita (000 Rp)	8.099	7.876	7.961	8.227	8.685	5,57%	7,24%	8562,5-8762,5	9012,5-9212,5	9462,5-9662,5

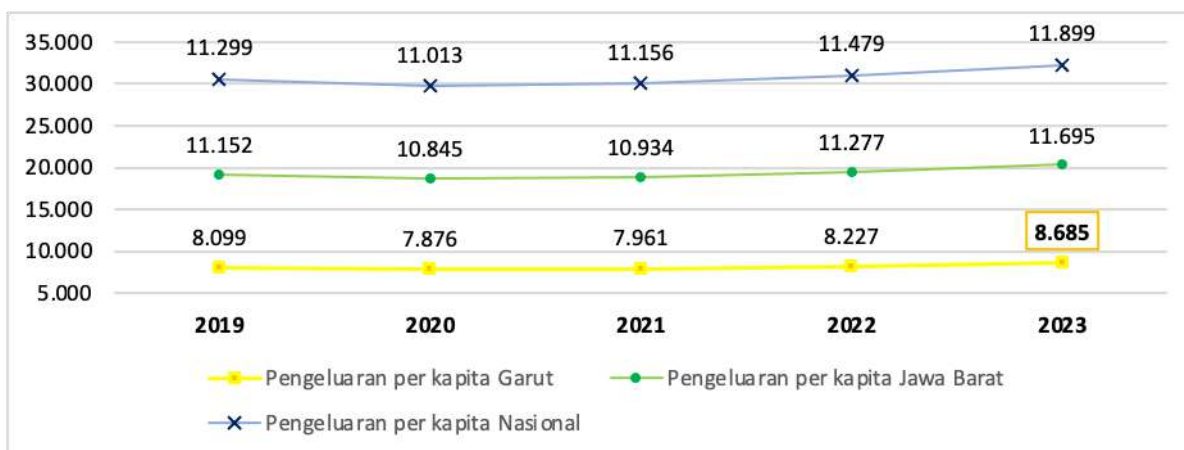
Sumber: BPS, Tahun 2024 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

Dari capaian pengeluaran per kapita, maka Indeks Pengeluaran pada tahun 2023 mencapai 65,83 poin, mengalami pertumbuhan 2,58 % atau naik 1,66 poin dari tahun 2022. Selama periode 2019-2023, Indeks Pengeluaran meningkat 2,13 poin atau tumbuh 3,35 dari tahun 2019.

Pencapaian pengeluaran per kapita tahun 2023 sebesar Rp 8.685 juta apabila dibandingkan target telah mencapai 95,31%. Namun demikian, capaian pengeluaran per kapita tahun 2023 masih terpaut Rp 3,01 juta dari capaian Jawa Barat (Rp 11,695 juta) dan masih terpaut Rp 3,214 juta dari capaian Nasional (Rp 11,899 juta). Kondisi tahun 2023, dari sisi nilai pengeluaran per kapita berada pada peringkat ke-25 dan dari sisi pertumbuhan pengeluaran per

kapita sebesar berada pada peringkat ke-1 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat yaitu sebesar 5,57 %, lebih tinggi dari laju pertumbuhan capaian pengeluaran per kapita Jawa Barat (3,71%).

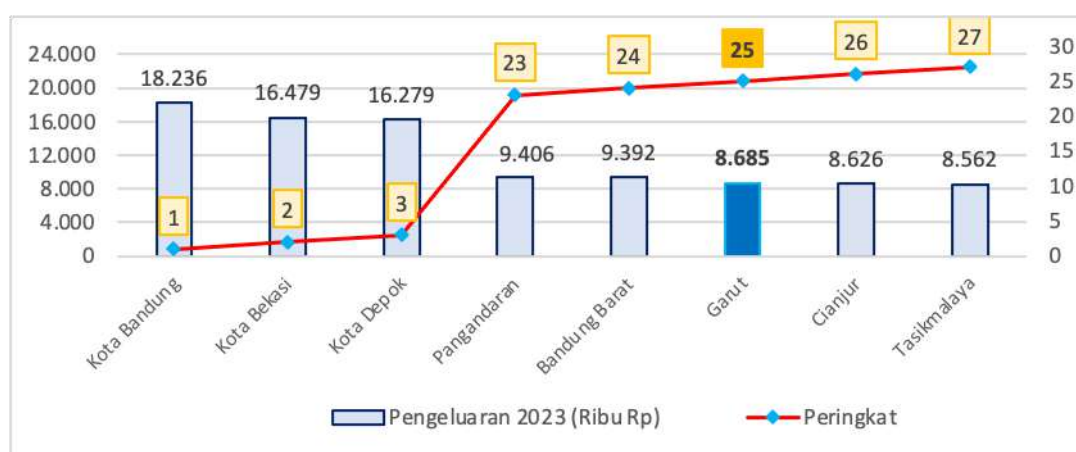
Tabel 2.41. Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, Tahun 2024 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

Selama periode Tahun 2019-2023, pertumbuhan pengeluaran per kapita Kabupaten Garut sebesar 7,24 %, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pengeluaran per kapita Jawa Barat (4,87 %) dan Nasional (5,31%) sehingga gap capaian pengeluaran per kapita antara Kabupaten Garut dengan Jawa Barat dan Nasional menjadi semakin kecil dari selama periode 2019 - 2023.

Gambar 2.42. Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, Tahun 2024 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

Dibandingkan capaian kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, pencapaian Pengeluaran Per kapita Kabupaten Garut Tahun 2023 masih berada

di peringkat 25 diatas Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Tasikmalaya. Pada tahun 2023, Pengeluaran Per kapita tertinggi adalah Kota Bandung, yang mencapai Rp 118,236 juta diikuti oleh Kota Bekasi, dan Kota Depok.

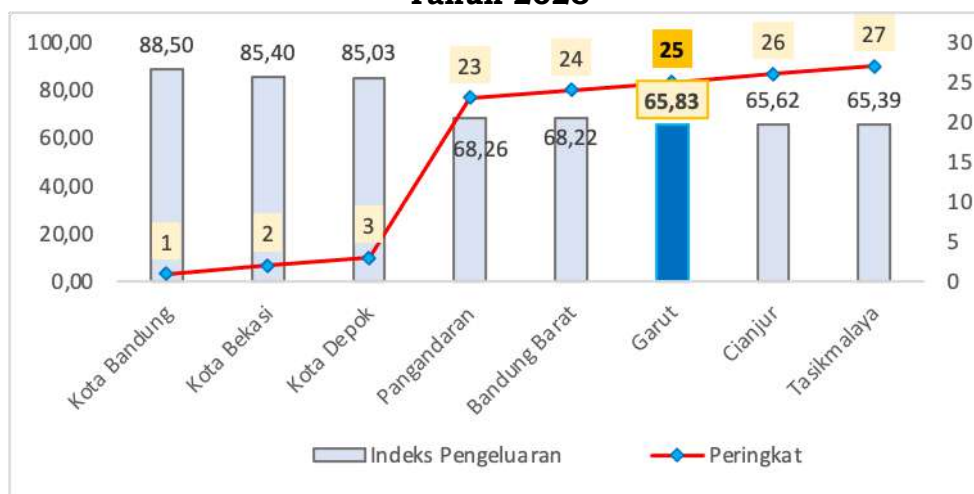
Gambar 2.43.
Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Garut- Jawa Barat - Nasional Tahun 2019 -2023



Sumber : BPS, Tahun 2024 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

Indeks Pengeluaran tahun 2023 mencapai 65,83 poin dan telah mencapai 97,82% dari target 2023 (66,96-67,63). Capaian Indeks Pengeluaran tahun 2023 masih terpaut 9,09 poin dari Jawa Barat (74,92) dan terpaut 9,62 poin dari Nasional (75,45).

Gambar 2.44.
Perbandingan Indeks Pengeluaran Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2023



Sumber : BPS, Tahun 2024 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

Kondisi tahun 2023, dari sisi nilai Indeks Pengeluaran berada pada peringkat ke-25 dan dari sisi pertumbuhan Indeks Pengeluaran sebesar 2,58 %,



berada pada peringkat ke-1 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat diatas pertumbuhan Indeks Pengeluaran Jawa Barat sebesar 1,51%. Baik dari sisi pertumbuhan maupun capaian indeks pengeluaran pada tahun 2023 peningkatan cukup signifikan dapat dilihat pada indeks pengeluaran Kabupaten Garut.

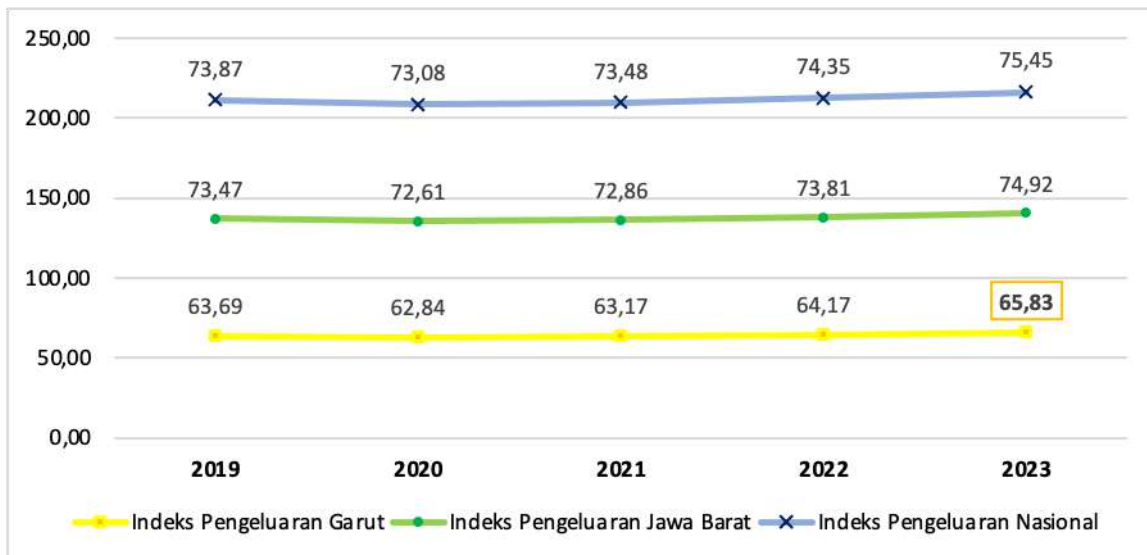
Tabel 2.32.
Perbandingan Pengeluaran Per Kapita
Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2023

Uraian	Indeks Pengeluaran					% Pertumbuhan 2022 - 2023	% Pertumbuhan 2019 - 2023
	2019	2020	2021	2022	2023		
Indeks Pengeluaran Garut	63,69	62,84	63,17	64,17	65,83	2,58%	3,35%
Indeks Pengeluaran Jawa Barat	73,47	72,61	72,86	73,81	74,92	1,51%	1,98%
Indeks Pengeluaran Nasional	73,87	73,08	73,48	74,35	75,45	1,48%	2,14%
Rangking Indeks Pengeluaran di Jawa Barat	26	26	26	26	25		
Rangking Pertumbuhan Indeks Pengeluaran di Jawa Barat	1	20	3	12	1	1	2
Selisih dari Indeks Pengeluaran Jawa Barat (poin)	-9,77	-9,78	-9,70	-9,64	-9,09	1,07%	1,37%
Selisih dari Indeks Pengeluaran Nasional (poin)	-10,18	-10,24	-10,31	-10,18	-9,62	1,10%	1,21%

Sumber : BPS, Tahun 2024 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

Selama periode Tahun 2019-2023, pertumbuhan Indeks Pengeluaran Kabupaten Garut sebesar 3,35% berada di atas pertumbuhan Indeks Pengeluaran Jawa Barat dan Nasional sehingga gap capaian Indeks Pengeluaran menjadi semakin kecil.

Gambar 2.44.
Indeks Pengeluaran Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Tahun 2024 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni dan budaya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Di sisi lain, pengembangan seni budaya di Kabupaten Garut diselenggarakan secara terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan, yang sekaligus berperan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah. Integralitas pembangunan seni budaya dan pariwisata merupakan sesuatu yang lazim berlaku di Indonesia dan perkembangannya ke masa depan, berhubungan erat dengan kualitas kondisi alam dan lingkungan, politik dan keamanan, serta sarana dan prasarana. Pembangunan seni dan budaya selama periode tahun 2019-2023 sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, diantaranya jumlah Organisasi Seni dan Budaya tahun 2022 sama dengan tahun 2021 yakni 54 organisasi dan pada tahun 2022 jumlah grup kesenian meningkat dari 906 grup pada tahun 2021 menjadi 979 grup pada tahun 2022.

Tabel 2.33.
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Tahun 2019 – 2023

No	Indikator	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	Kebudayaan					
1.	Organisasi Seni dan Budaya	40	51	54	54	54
2.	Jumlah grup kesenian	623	770	906	979	979
	Pemuda dan Olahraga					
1.	Jumlah gedung olahraga	6	6	8	16	16
2.	Jumlah stadion olahraga	10	10	10	12	12

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Pemuda dan Olahraga, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD

Sementara itu, dalam pembangunan pemuda dan olahraga diarahkan pada optimalisasi olahraga prestasi dan membangun budaya olahraga dalam masyarakat. Untuk meningkatkan pembinaan olahraga dimaksud masih diperlukan dukungan sarana dan prasarana olahraga, baik olahraga masyarakat maupun sarana olahraga terpadu serta pembinaan terhadap atlet potensial sebagai sarana pembangkitan kreativitas masyarakat.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, gambaran umum kondisi daerah dari aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan. Data dan analisa capaian dari setiap aspek pelayanan per urusan perangkat daerah diperoleh dari laporan kinerja (Lapkin) Perangkat daerah tahun 2023.

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun modal sumber daya manusia (human resources) yang berkualitas sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan serta memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Penyelenggaraan Urusan

Bidang Pendidikan mencakup 5 (lima) sub urusan yaitu Manajemen Pendidikan, Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, dan Bahasa dan Sastra. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Pendidikan selama tahun 2018 – 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.34.
Pencapaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2019-2023

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendidikan					
	Angka partisipasi kasar					
1	APK PAUD/TK	74,5	55,05	85,4	85,4	59,48
2	APK SD sederajat	105,66	105,66	98,58	106,54	101,80
3	APK SMP sederajat	115,11	115,11	79,66	99,6	102,87
	Angka pendidikan yang ditamatkan					
1.	APT SD sederajat	35,57	40,16	32,63	n/a	n/a
2.	APT SMP sederajat	16,24	18,09	16,6	n/a	n/a
	Angka Partisipasi Murni:					
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,3	99,3	94,45	97,18	97,97
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	98	98	67,13	83,28	79,9
	Angka partisipasi sekolah :					
1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	100	100	85,76	98,49	99,59
2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	100	100	59,59	95,29	95,77
	Angka Putus Sekolah:					
1	Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI	0	0,036	0,003	0,001	0,001
2	Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs	0	0,004	0,021	0,005	0,005
	Angka Kelulusan:					
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100
	Angka Melanjutkan (AM):					
1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	96,67	96,67	77,17	80,75	85,50
2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	n/a	80,81	n/a	n/a	n/a
	Fasilitas Pendidikan:					
1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	73	73	99,26	65,48	79,05
2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	82,91	83	99.25.00	70,13	80,25
3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	n/a	n/a	42,52	n/a	3,9
4	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	14,03	23	24	25	25



No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
6	Rasio guru/murid pendidikan menengah	14,7	20	19	19	n/a
7	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	14,03	23	24	25	n/a
8	Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar per kelas rata-rata	14,03	20	19	19	n/a
9	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	98,46	100	n/a	n/a	99,74
10	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	100	100	100	99,9	99,9
11	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,56	99,56	99,14	99,6	99,7
12	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95,75	95,55	96,49	87,84	93,67

Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yang mencakup 3 (tiga) jenis pelayanan dasar sampai tahun 2023 untuk jenis pendidikan dasar telah mencapai 96,03% untuk indikator Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs), untuk jenis pelayanan dasar kesetaraan telah mencapai 91,10 %, sementara untuk jenis pelayanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini mencapai 91,55 %. Capaian SPM untuk pendidikan kesetaraan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023, sedangkan untuk pendidikan anak usia dini pada tahun 2022 memiliki capaian yang rendah dikarenakan ada perubahan dalam perhitungan.

Tabel 2.35.
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2019-2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	98,90	99,27	89,50	97,50	96,03
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	n/a	30,54	15,06	81,68	91,10
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	97,1	97,30	85,40	46,32	91,55

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD

2. Kesehatan

Parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan. Penyelenggaraan Urusan Bidang Kesehatan mencakup 4 (empat) sub urusan yaitu Upaya Kesehatan; Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan; Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman; dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan dilakukan melalui peningkatan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan perorangan (kuratif dan rehabilitatif) dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan mutu layanan, pemerataan aksesibilitas layanan dan jangkauan pelayanan kesehatan. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dilakukan dengan upaya promotif-preventif melalui program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), peningkatan kualitas lingkungan, screening faktor risiko penyakit tidak menular. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Kesehatan selama tahun 2019–2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.36.
Pencapaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase pelayanan medis	%	100	100	100	100	100
2	Persentase pelayanan penunjang medis	%	100	100	100	100	100
3	Persentase pelayanan profesi medis	%	100	100	100	100	100
4	Persentase pelayanan keperawatan	%	89,71	99,9	100	100	100
5	Persentase pelayanan asuhan keperawatan	%	81,25	85,5	100	100	100
6	Persentase Capaian SPM yang mencapai target	%	n/a	n/a	70,83	72,07	74,77
7	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	orang	248	210	225	334	320,00
8	Angka kelangsungan hidup bayi	orang	51.486	44.778	51.175	48.178	44.078
9	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	orang	2	7 orang (0,02)	6 orang (0,027)	11	8
10	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	orang	4,31	196 orang (4,58)	219 orang (4,28)	250	6,5
11	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	orang	82,27	58 orang (135,51)	112 orang (242,3)	48	117,65
12	Rasio posyandu per satuan balita	rasio	1/100	1/53	1/53	1 / 53	1/100



No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
13	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	rasio	1/7784	1/7784	1/13.235	1/7.600	1/9.184
14	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	rasio	1/443737	1/4394395	1/396825	1/382.221	1/385.714
15	Rasio dokter per satuan penduduk	rasio	1/6574	1/7965	1/5419	1/11291	1/4770
16	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	rasio	1/1042	1/5795	1/4916	1/7304	1/4285
17	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	rasio	69,89	14,46	100	100	100
18	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	96,84	87,05	89,68	94	96
19	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	82,57	77,6	60,42	90,04	96,28
20	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100
21	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	%	-	-	-	Tidak ada data	100
22	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	95,42	95	87,71	101,52	96,77
23	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Rate	2,37	0,042	2,13	2,6	11,35
24	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	71,09	41,19	35,64	63,15	100
25	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	50,78	34,69	71,8	120,1	91,86
26	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	rasio	98	86	178,2	278,5	281,5
27	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	rasio	0,98	2,3	2,6	2,2	4,03
28	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	42,62	34,69	100	100	91,85
29	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	40,91	85,80	72,5	84,18	83,82
30	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
31	Penderita diare yang ditangani	%	85	36	100	89,57	100
32	Angka kejadian Malaria	Kasus/100.000	5	4	0,27	0,34	0,41
33	Tingkat kematian akibat malaria	Kasus/1000	0	0	0	0	0
34	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu	%	0	0	0	0	0

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
	berinsektisida						
35	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	0	0	0	0	0
36	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,00019	0,025	0,23	0,32	0,38
37	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	%	n/a	n/a	n/a	0	n/a
38	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	20	20	47,23	0	49,1
39	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	5	25,75	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Slamet Garut, Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD
Keterangan: N/A menjelaskan bahwa indikator ini sudah tidak digunakan lagi di tahun 2022

Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, terdapat 12 jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif,
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

Adapun capaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bidang Kesehatan Tahun 2019-2023 tersaji pada tabel 2.37 berikut.

Tabel 2.37.
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bidang Kesehatan
Tahun 2019-2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	93,81	100,00	100	95,58	95,99
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	94,38	87,05	94,6	94,00	91,81
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	99,39	104,00	100	99,30	94,76
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	86,22	84,96	66,3	92,00	90,33
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	75,76	66,78	46,7	82,99	97,06
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	67,16	64,08	42,2	113,95	98,61
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	77,10	66,79	58,9	78,89	98,86
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	3,83	25,70	35,71	91,99	100
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	7,00	53,25	39,66	89,10	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	100	84,00	68,7	84,66	100
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	45,19	82,74	124,33	98,57
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	65	62,60	52,6	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, Kabupaten Garut, 2024, yang dikelola dalam SIPD

Capaian Pelayanan Dasar Kesehatan telah di targetkan mencapai 100 persen pada tahun 2023, berdasarkan data yang telah di dapatkan dari Dinas Kesehatan hanya 4 (tiga) jenis pelayanan dasar yang dapat mencapai target. Rata-rata capaian 8 jenis pelayanan dasar lainnya berada pada nilai capaian diatas 90 persen, adapun capaian terendah jika dibandingkan dengan capaian

jenis pelayanan dasar lainnya adalah pada jenis pelayanan dasar pelayanan pada kesehatan ibu bersali, hal ini diakibatkan oleh akses masyarakat kepada fasilitas kesehatan atau kelahiran seperti puskesmas, klinik maupun bidan masih terbatas dikarenakan aksesibilitas yang masih terbatas terutama di wilayah perdesaan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencakup 11 (sebelas) sub urusan yaitu Sumber Daya Air (SDA), Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan, Jasa Konstruksi, dan Penataan Ruang. Salah satu indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 yakni persentase kemantapan jalan, persentase luas areal yang terlayani oleh jaringan irigasi, persentase tampungan air yang tersedia baru mencapai 46,16% dan Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang baru mencapai 99,90% serta indikator persentase penurunan luas genangan air hal ini dilatarbelakangi oleh kapasitas drainase yang sudah tidak sesuai kondisi debit air akibat run off pada kawasan terbangun yang semakin tinggi, daerah resapan air semakin sempit serta masterplan pengendalian banjir yang belum terupdate secara berkala dan penanganan sistem drainase masih dilakukan secara parsial. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.38.

**Pencapaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2019-2023**

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					Target 2023	%Capaian 2023
			2019	2020	2021	2022	2023		
1	Persentase kemantapan Jalan	%	n/a	n/a	49,92	51,42	55,25	55,27	99,96
2	Cakupan air Minum layak	%	79,84	85,08	86,96	88,51	90,04	90,04	100,00
3	Cakupan sanitasi layak	%	66,73	67,03	67,20	67,69	68,11	68,11	100,00
4	Persentase Luas areal yang terlayani oleh Jaringan irigasi	%	n/a	n/a	81,89	82,70	84,4	84,4	98,85
5	Persentase penurunan luas genangan air	%	n/a	n/a	60	50	27,5	25	90,00
6	Persentase tampungan air yang tersedia	%	n/a	6,93	23,81	34,92	38,1	82,54	46,16
7	Persentase bangunan yang Layak Teknis dan fungsi	%	n/a	0,05	8,4	9,52	10,31	9,45	109,10
8	Persentase Luas Bangunan Dan	%	n/a	n/a	6	12	32,48	20	162,40

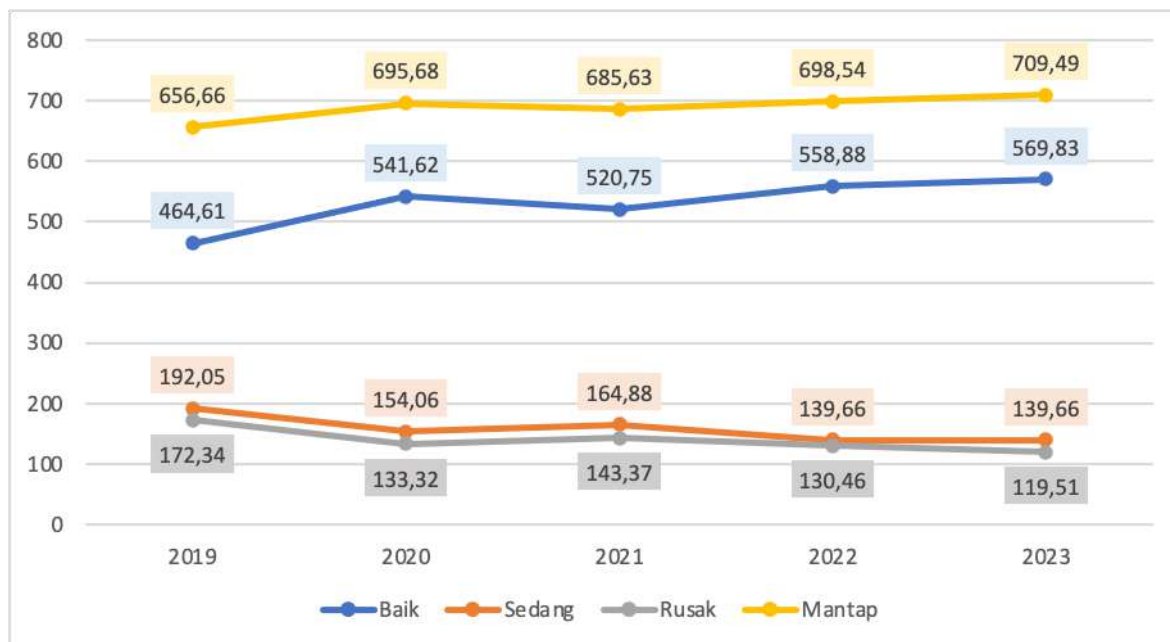
No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					Target 2023	%Capaian 2023
			2019	2020	2021	2022	2023		
	Lingkungan Yang Tertata								
9	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	78,83	82,5	83	83,50	83,92	84	99,90
10	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan bersertifikat	%	n/a	8,33	19,64	23,73	32,27	27,24	118,47
11	Persentase proyek tanpa kecelakaan konstruksi	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Garut, Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD

a. Jaringan Jalan

Tingkat kemandapan jalan (jalan kabupaten dan jalan desa) pada tahun 2023 mencapai 55,25% dengan Kondisi jalan mantap sepanjang 709,49 Km jalan rusak ringan sepanjang 119,51 Km yang di dominasi oleh jalan desa.

Gambar 2.45. Kondisi Panjang Jalan Kabupaten Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD

b. Sumber Daya Air

Pada aspek infrastruktur jaringan irigasi, pembangunan difokuskan dalam upaya meningkatkan intensitas tanam padi sawah khususnya pada daerah Irigasi Teknis yang menjadi kewenangan pemerintah seluas 16.067 Ha dengan jumlah bangunan bendung utama 38 buah, bangunan air pelengkap

1.694 buah, saluran primer 174,02 km, saluran sekunder 51,96 km dan saluran tersier 3,50 km. Saluran irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2022 sebesar 57,98% meliputi saluran primer 102,75 km (59,04%), saluran sekunder 28,40 km (54,66%) dan saluran tersier 1,89 km (54,09%). Luas areal terlayani sampai dengan tahun 2022 sebesar 82,70% (13.287,41 ha) mengalami peningkatan seluas 129,70 ha dibandingkan tahun 2021 seluas 13.157,71 ha (81,89%).

%) dan saluran tersier 1,89 km (54,09%). Luas areal terlayani sampai dengan tahun 2022 sebesar 82,70% (13.287,41 ha) mengalami peningkatan seluas 129,70 ha dibandingkan tahun 2021 seluas 13.157,71 ha (81,89%).

c. Air Bersih dan Sanitasi

Air bersih dan sanitasi layak merupakan kebutuhan dasar manusia sehingga pencapaian kinerja urusan pekerjaan umum dinilai melalui cakupan air minum layak dan cakupan sanitasi layak. Persentase Air Minum Layak artinya dimana air minum yang dikatakan layak adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum sedangkan sanitasi layak merupakan fasilitas yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu dan dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik. Adapun data pencapaian kinerja urusan pekerjaan umum bidang air bersih dan sanitasi tahun 2019-2023 tersaji pada tabel berikut.

n oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu dan dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik. Adapun data pencapaian kinerja urusan pekerjaan umum bidang air bersih dan sanitasi tahun 2019-2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.39.

Pencapaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Bidang Air Bersih dan Sanitasi Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Cakupan air Minum layak	%	76,00	79,84	85,08	86,96	88,51	90,04

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.	Cakupan sanitasi layak	%	64,60	66,73	67,03	67,20	67,69	68,11

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Garut Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Pencapaian kinerja cakupan air minum layak pada tahun 2023 sebesar 90,047%% mengalami peningkatan 1,54% dari tahun 2022 yang mencapai 88,51%. Meskipun cenderung meningkat dari capaian di tahun sebelumnya namun beberapa permasalahan masih ditemui diantaranya ketersediaan air yang semakin menurun, belum optimalnya pemeliharaan dan pengelolaan pasca pembangunan serta perlindungan sumber-sumber air yang belum dilakukan secara maksimal.

Pencapaian kinerja cakupan sanitasi layak pada tahun 2023 sebesar 68,11% mengalami peningkatan 0,42% dari tahun 2022 yang mencapai 67,69%. Meskipun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian cakupan sanitasi layak di Kabupaten Garut yakni masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat, pengelolaan air masih belum dilaksanakan, pengelolaan pasca pemebangunan belum dilakukan, dan pengelolaan air limbah berskala kawasan belum dilakukan serta belum terdapat unit-unit kerja khusus dalam pengelolaan air limbah.

d. Penataan Ruang

Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang pada tahun 2023 mencapai 90,04% meningkat dibanding tahun sebelumnya dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 2.40.
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum
Tahun 2019-2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	79,84	81,27	86,97	88,51	90,04
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	66,73	67,38	67,20	67,69	68,11

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Garut, Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD

Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum yang mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar sampai tahun 2023, meliputi penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari telah mencapai 90,04% mengalami peningkatan 1,54% dari tahun 2022. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi sebesar 68,11% mengalami peningkatan 0,42 % dari tahun 2022 yang mencapai 67,69%. Meskipun berdasarkan capaian SPM Pekerjaan umum tahun 2023 belum dapat mencapai 100 persen karena capaian pelayanan dihitung secara akumulatif setiap tahunnya, namun secara pencapaian kinerja standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum telah mencapai 100 persen.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencakup 5 (lima) sub urusan yaitu Perumahan; Kawasan Permukiman; Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU); dan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selama tahun 2019– 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.41.
Pencapaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Prosentase Penanganan Korban Bencana dan terdampak Program Pemerintah	%	n/a	100	100	100	100
2	Cakupan Penurunan luasan permukiman kumuh	Ha	n/a	0,87	0	1,3	4,12
3	Menurunnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Unit	42.057	36.138	32.504	31.010	28.936
4	Luas Kawasan Permukiman dengan PSU yang representatif	Ha	n/a	n/a	6.727	346,5	6936
5	Jumlah Pengembang yang Terregistrasi dan tersertifikasi	Perusahaan	n/a	n/a	n/a	n/a	30

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Garut, Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD.

Rumah tidak layak huni yang ditangani pada tahun 2023 sebanyak 2.074 unit, sehingga jumlah rumah tidak layak huni yang pada tahun 2023 menurun menjadi 28.936 unit, sudah lebih rendah dari target tahun 2022, meskipun demikian cakupan penurunan luas permukiman kumuh tahun 2023 meningkat cukup signifikan yakni mencapai 4,12 Ha meskipun mengalami peningkatan. Selain pencapaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman memiliki tanggung jawab terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal sebagai berikut.

Tabel 2.42.
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang
Perumahan Rakyat Tahun 2019-2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang Layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%*	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Garut, Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD
Keterangan: *Untuk tahun 2019 sebanyak 0 unit

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan Urusan Bidang Ketentraman, dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat mencakup 3 (tiga) sub urusan yaitu Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bencana, dan Kebakaran. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Ketentraman, dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat selama tahun 2017 – 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.43.
Pencapaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum
Tahun 2019 – 2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Prosentase Penurunan Pelanggaran Perda	%	100	80	75	64	96
2	Prosentase Penanganan Gangguan Tibum	%	91	45	60	75	70

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Tranmas						
3	Rasio Linmas/10.000 Penduduk	Per 10.000 penduduk	62	62	62	62	62
4	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	%	n/a	n/a	100	100	87,27
5	Indeks Kapasitas Daerah	Poin	n/a	0,46	0,39	0,65	0,72

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut, Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD

Prosentase Penurunan Pelanggaran Perda pada tahun 2023 mencapai 96% dan Prosentase Penanganan Gangguan Tibumtranmas mencapai 70% telah mencapai target tahun 2022. Rasio jumlah linmas terlatih per 10.000 penduduk pada tahun 2023 sebesar 62 orang per 10.000 penduduk juga telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 62 per 10.000 penduduk.

Indeks Kapasitas Daerah tahun 2023 adalah sebesar 0,72 lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 dan telah dapat mencapai target tahun 2023. IKD dinilai setiap tahun untuk mengukur keberhasilan capaian kegiatan penanggulangan bencana.

Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas yang mencakup 5 (lima) jenis pelayanan dasar dengan target capaian 100%. Dua jenis pelayanan dasar belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan karena adanya kebijakan keuangan terkait efisiensi anggaran yang digeserkan untuk penanganan pandemi COVID-19 sehingga realisasi pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana belum dapat tercapai 100%. Selain itu faktor lain yang menyebabkan pelayanan informasi rawan bencana yang belum dapat mencapai 100% adalah karena tidak semua daerah rawan bencana mendapatkan layanan informasi lewat media sosial karena adanya keterbatasan teknologi informasi dan jangkauan internet yang masih belum dapat menjangkau seluruh daerah rawan bencana.

Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas yang mencakup 5 (lima) jenis pelayanan dasar dengan target capaian 100% yaitu:

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum

2. Pelayanan informasi rawan bencana
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Dua jenis pelayanan dasar belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan karena adanya kebijakan keuangan terkait efisiensi anggaran yang digeserkan untuk penanganan pandemi COVID-19 sehingga realisasi pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana belum dapat tercapai 100%. Selain itu faktor lain yang menyebabkan pelayanan informasi rawan bencana yang belum dapat mencapai 100% adalah karena tidak semua daerah rawan bencana mendapatkan layanan informasi lewat media sosial karena adanya keterbatasan teknologi informasi dan jangkauan internet yang masih belum dapat menjangkau seluruh daerah rawan bencana.

Tabel 2.44.
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian Tahun 2023(%)	Perangkat Daerah
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	98,86	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	50,55%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	77,26%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	87,27%	Dinas Pemadam Kebakaran

Sumber : Satpol PP, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD

6. Sosial

Penyelenggaraan Urusan Bidang Sosial mencakup 6 (enam) sub urusan yaitu pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Sosial selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.45.
Pencapaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021*)	2022	2023
1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100	100	39,95	56,73	70
2	Persentase PPKS yang tertangani	%	100	100	59,77	35,24	77
3	Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	76,82	57,93	
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	100	6,13	8,02	
5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100
6	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	75,01	100	100
7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	100	100	0,57	1,68	

Sumber : Dinas Sosial Kab. Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Keterangan: *) Perhitungan capaian kinerja tahun 2021 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial serta memperkuat kelembagaan sosial. Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, terdapat 5 (lima) jenis pelayanan dasar dengan target capaian 100% sebagai berikut.

**Tabel 2.46. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Pelayanan Bidang Sosial Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	100%
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Katutura Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100%	100%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Garut, Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD.

7. Tenaga Kerja

Bidang ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan, selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun.

**Tabel 2.47. Pencapaian Kinerja Indikator Makro Ketenagakerjaan
Kabupaten Garut Tahun 2019-2023**

Uraian Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
a. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,28	8,96	8,68	7,6	7,33
b. Jumlah Pengangguran Terbuka	Jiwa	84.045	103.607	104.212	101.135	102.010
c. Persentase Penduduk Bekerja	%	92,72	91,04	91,32	92,40	92,67
d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	62,70	61,11	62,76	68,84	70,10
e. Jumlah Penduduk Usia Kerja	Jiwa	1.842.301	1.892.059	1.912.716	1.785.309	1.985.377
f. Jumlah Angkatan Kerja	Jiwa	1.155.071	1.156.180	1.200.346	1.330.355	1.391.755
g. Jumlah Penduduk Bekerja	Jiwa	1.071.026	1.052.573	1.096.134	1.229.218	1.289.745
h. Jumlah Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	687.230	735.879	712.370	602.126	593.622

Sumber : BPS Kab. Garut, Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD.

Pada tahun 2023, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Garut mencapai 1.391.755 orang, meningkat dari tahun 2022 sebanyak 1.330.355 orang. Persentase jumlah penduduk bekerja dari total angkatan kerja pada tahun 2023 meningkat dari 92,40% (1.229.218) pada tahun 2022 menjadi 92,67% (1.289.745) dimana angkatan kerja yang menjadi pengangguran atau Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan dari 7,6% menjadi 7,33% pada tahun 2023. Adapun dari sisi jumlah nya naik 875 orang menjadi 102.010 orang. Adapun data target dan realisasi serta capaian TPT dan Jumlah Penganggur tersaji pada tabel dibawah ini.

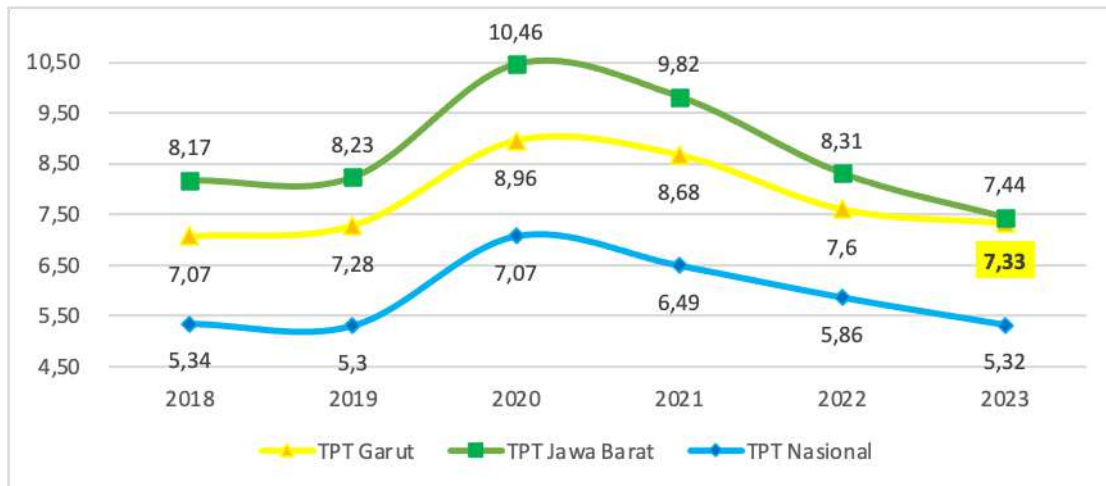
Tabel 2.48.
Target dan Realisasi serta Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
dan Jumlah Penganggur Tahun 2019-2024

Tahun	Jumlah Penganggur			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		
	Target(Jiwa)	Realisasi(Jiwa)	Capaian(%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2019		84.045		4,25	7,28	98,82
2020	110.560-118.473	103.607	109,52	9,78-10,48	8,96	98,74
2021	106.560-114.473	104.212	105,70	8,96-9,46	8,68	99,14
2022	102.500-110.473	101.135	105,05	8,21 - 8,41	7,6	108,54
2023	98.560-106.473	102.010	100,49	7,31 - 7,51	7,33	101,08
2024	94.560-102.473			6,61		

Sumber: BPS, Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD

Angka tingkat pengangguran terbuka tersebut adalah angka yang dihitung dengan dasar penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun ke atas, bukan angka TPT yang biasa digunakan, dimana penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. TPT merupakan perbandingan antara banyaknya orang yang mencari pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, baik yang sudah pernah bekerja maupun belum pernah bekerja terhadap angkatan kerja. Pencapaian TPT tahun 2023 sebesar 7,33% adalah 101,08% terhadap target yang ditetapkan. Pencapaian TPT Tahun 2023 masih perlu terus diturunkan karena masih diatas TPT Nasional sebesar 5,86%, meskipun sudah dibawah TPT Jawa Barat sebesar 8,31%.

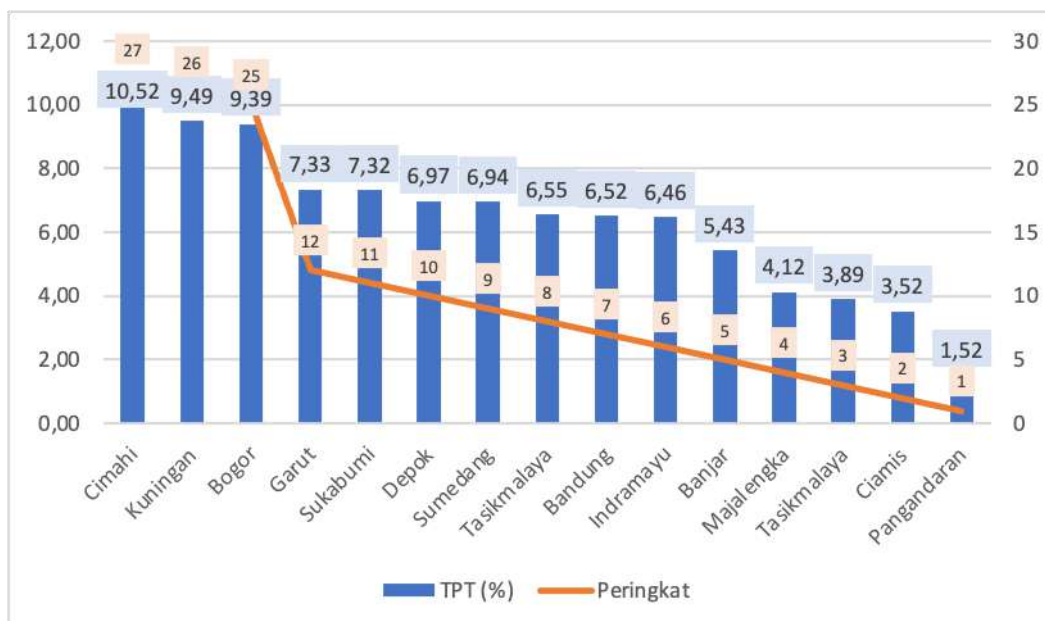
Gambar 2.46. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut. Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, Tahun 2024

Dibandingkan capaian kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, pencapaian kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka kabupaten Garut tahun 2023 berada di peringkat 12. Pada tahun 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi adalah Kota Cimahi sebesar 10,52%, disusul Kabupaten Kuningan dan Bogor, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka terendah adalah kabupaten Pangandaran sebesar 1,52%, disusul Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Majalengka.

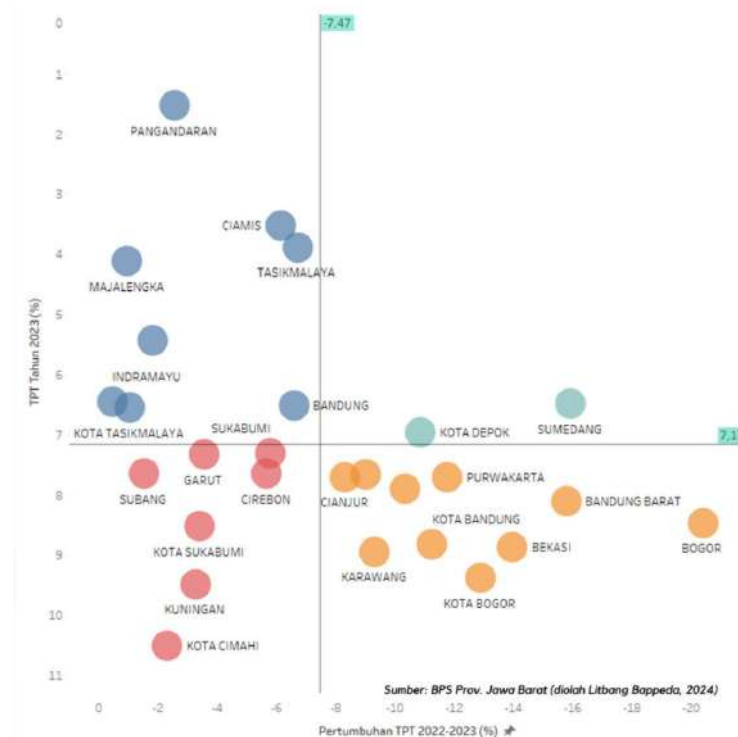
Gambar 2.47. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut. Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian TPT kabupaten/kota tahun 2022 Kabupaten Garut berada di kuadran IV dengan angka TPT berada di atas rata-rata Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat dan kinerja penurunan TPT dari tahun 2022 ke 2023 berada di bawah rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

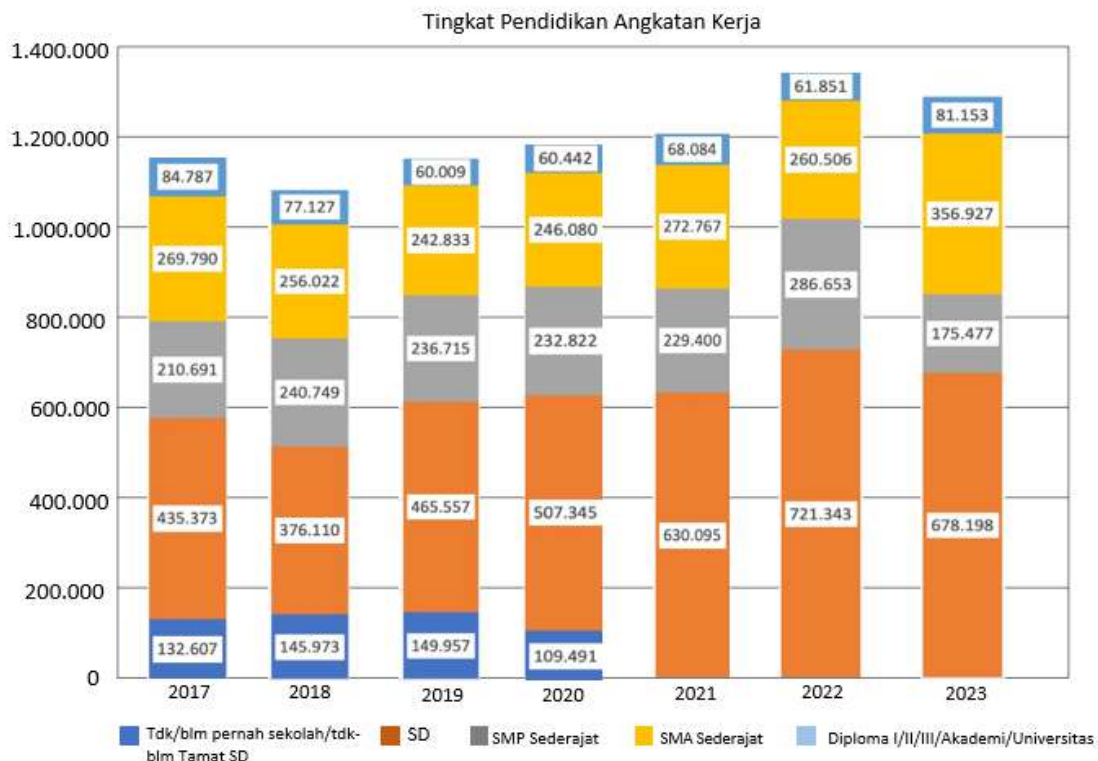
Gambar 2.48.
Analisis Kuadran Capaian TPT dan Laju Perubahan



Sumber : BPS Kabupaten Garut. Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, Tahun 2024

Kualitas angkatan kerja tahun 2023 masih tampak rendah yang ditunjukkan oleh dominasi jumlah angkatan kerja yang berpendidikan tidak lulus SD/belum pernah sekolah dan lulusan SD sederajat sebesar 678.198 jiwa atau 48,73% dari total angkatan kerja. Namun demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi pergeseran komposisi pendidikan angkatan kerja dimana porsi angkatan kerja dengan pendidikan lulusan SLTA sederajat mengalami kenaikan menjadi 25,65% dan sedangkan lulusan perguruan tinggi mengalami kenaikan menjadi 5,83% total angkatan kerja.

Gambar 2.49.
Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Tahun 2017-2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD.

Masih relatif tingginya jumlah pengangguran terbuka tersebut mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang cukup besar di Kabupaten Garut masih belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor produksi, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang masih kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang masih rendah. Oleh karenanya, upaya peningkatan kualitas SDM bagi penduduk menjadi mutlak terus digiatkan, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Karena investasi pada “human capital” ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian di Kabupaten Garut. Peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja terus dilakukan sebagai upaya penanggulangan pengangguran di Kabupaten Garut. Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya pemberian pelatihan terhadap pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Perluasan kesempatan kerja masih tetap menjadi perhatian, diantaranya melalui kegiatan pemberian kerja sementara di desa dan pengiriman tenaga kerja keluar negeri.

Dalam bidang ketenagakerjaan, indikator kesempatan kerja (demand for labour) merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan

penyerapan tenaga kerja yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan/ lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Sementara itu, angkatan kerja (labour force) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif sebagai sumber daya manusia. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Penyelenggaraan Urusan Bidang Tenaga Kerja mencakup 3 (tiga) sub urusan yaitu Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, dan Hubungan Industrial. Capaian kinerja Urusan Bidang Tenaga Kerja selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.49.
Pencapaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Kasus	28	23	16	21	30
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus	28	17	8	14	26
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Orang	9.871	2.362	11.210	9.377	5970
4	Keselamatan dan perlindungan (Kewenangan Provinsi)						
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Orang	31.344	31.559	40.317	50.363	58962
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Kasus	0	0	0	0	0
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	1.328	560	1.372	304	32
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Orang	108	656	320	0	176
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	n/a	n/a	100	0	0
10	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	5,21	5,51	5,96	n/a	n/a

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Garut, Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD.

Peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja terus dilakukan sebagai upaya penanggulangan pengangguran di Kabupaten Garut.

Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya pemberian pelatihan terhadap pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Perluasan kesempatan kerja masih tetap menjadi perhatian, diantaranya melalui kegiatan pemberian kerja sementara di desa dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

(1) **Kompetensi Tenaga Kerja.**

Pada tahun 2023 jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi di UPT-BLK sebanyak 208 orang.

(2) **Pencari Kerja Terdaftar.**

Pencari kerja terdaftar (Kartu AK.I) setiap tahun mengalami fluktuasi, hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan angkatan kerja aktif dan kesempatan kerja. jumlah pencari kerja yang terdaftar (Kartu AK.I) dalam tahun 2023 sebanyak 20.195, naik dari tahun 2022 sebanyak 24.315 orang.

(3) **Daya Serap Tenaga Kerja**

Jumlah perluasan kesempatan tenaga kerja dihitung dari tenaga kerja yang mengikuti kegiatan Padat Karya. Pada tahun 2023 jumlah tenaga kerja yang terserap melalui sistem padat karya (PKS-PK) berjumlah sebanyak 20.195 HOK. Meningkatnya perluasan kesempatan kerja melalui padat karya diharapkan dapat memberikan manfaat penambahan pendapatan bagi masyarakat.

8. **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Penyelenggaraan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencakup 6 (enam) sub urusan yaitu Kualitas Hidup Perempuan; Perlindungan Perempuan; Kualitas Keluarga; Sistem Data Gender dan Anak; Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan Perlindungan Khusus Anak. Capaian kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tahun 2019 – 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.50.
Pencapaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Tahun 2019 – 2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	48,30	62	47,28	52,41	52,35
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	16	18	18	16	10
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	39,48	54	39,97	77,6	45,74
4	Rasio KDRT	%	0,015	0,014	0,014	0,014	0,014
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	3,56	2,65	2,65	2,65	2,56
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	43,20	38,73	43,19	34,2	39,53
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
	yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu						
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	%	100,36	100	50,4	98,73	97,27
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	%	100,62	93,4	44,63	85,2	77,84
16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	%	107,83	62,4	41,59	42,56	55,83
17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	%	17,89	12,2	53,68	53,66	19,64
18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	99,41	99,36	103	99,56	99,53
19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	%	25,27	35	35	35	35,05

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Garut Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD.

Pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan diarahkan pada upaya mencapai sasaran meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam proses pembangunan dan terpenuhinya hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan dampak pornografi. Peningkatan pemberdayaan perempuan memegang peran dan posisi yang strategis diantaranya terhadap keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan dan keluarga berencana dengan mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai sektor pembangunan sesuai dengan proporsi dan karakteristik yang dimiliki. Organisasi Wanita, baik sosial, profesi maupun kemasyarakatan serta keagamaan, diantaranya : gabungan organisasi wanita, organisasi wanita persatuan antara lain Dharma Wanita Persatuan, Persit, Bhayangkari dan Ikatan Isteri Dokter Indonesia (IIDI). Selain itu, terdapat organisasi wanita di bidang kemasyarakatan antara lain Tim



Penggerak PKK, Forum Komunikasi Gender (Forkom Gender), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Organisasi wanita profesi yang ada diantaranya Ikatan Bidan Indonesia (IBI), HWK, IWAPI dan PERWOSI serta Organisasi Wanita Keagamaan antara lain Al-Hidayah, Wanita PUI, Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyiyah dan Persistri.

Upaya pencegahan dan penindakan dilakukan Pemerintah, dalam rangka memberikan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, prosentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani pada tahun 2023 sebesar 100% sesuai target. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kesadaran bahwa perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan merupakan tanggung jawab bersama yaitu tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah, hal ini merupakan dampak dari sosialisasi tentang peraturan perundang undangan terkait perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.

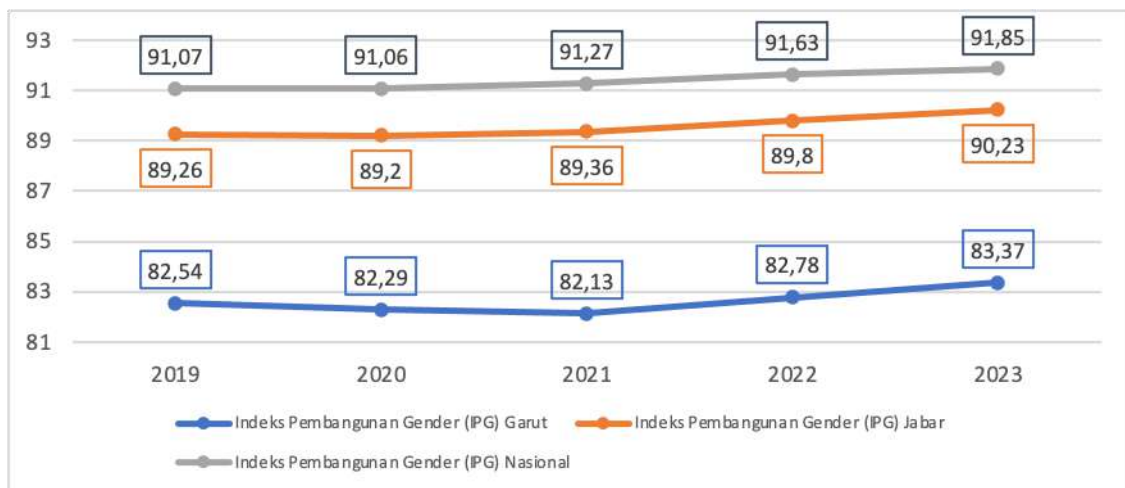
erintah, hal ini merupakan dampak dari sosialisasi tentang peraturan perundang undangan terkait perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.

Prosentase trafficking yang tertangani pada tahun 2023 yaitu sebesar 100% atau mencapai dari target. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya, meningkatnya kesadaran masyarakat sehingga berita atau informasi mengenai kasus kekerasan dapat segera ditangani; terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait (DPPKBPPPA, P2TP2A Kabupaten Garut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, P2TP2A Provinsi Jawa Barat, Kepolisian resort Garut, Dinas Sosial, Kecamatan, Desa dan lain-lain).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, komponen IPG terdiri dari Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran Perkapita. Pada Tahun 2023, Indeks Pembangunan Gender mencapai 83,37 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 yang berada pada nilai 82,78. Pencapaian IPG Tahun 2023 masih perlu terus ditingkatkan karena masih dibawah IPG Jawa Barat sebesar 90,23 dan Nasional 91,85. Untuk mencapai kesetaraan gender dan

memberdayakan kaum perempuan, maka upaya pencapaian target sebagaimana telah menjadi kesepakatan dalam SDGs perlu terus ditingkatkan, diantaranya mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan, menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan, dan meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan.

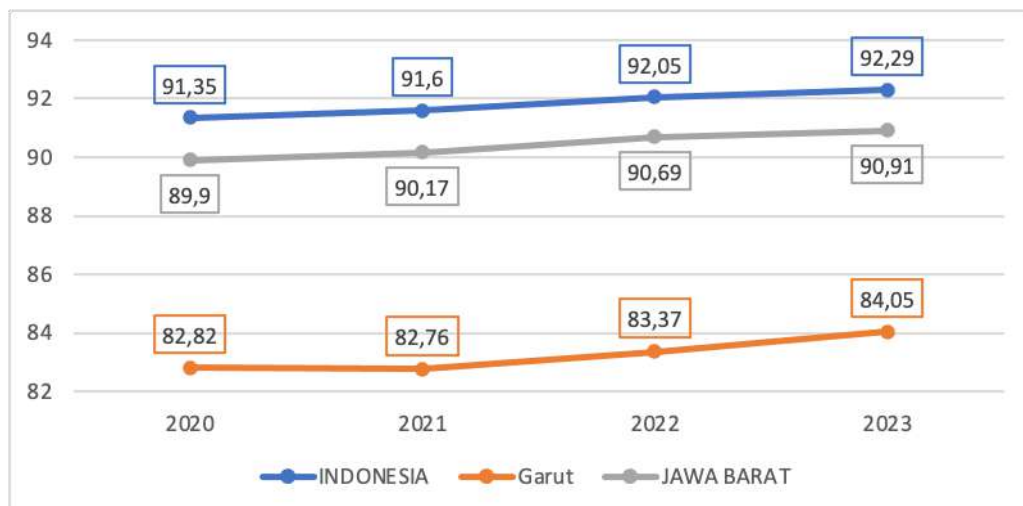
Gambar 2.50
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut. Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, Tahun 2024

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Garut berdasarkan umur harapan hidup hasil Sensus Penduduk tahun 2020 Long form berada pada nilai 84,05

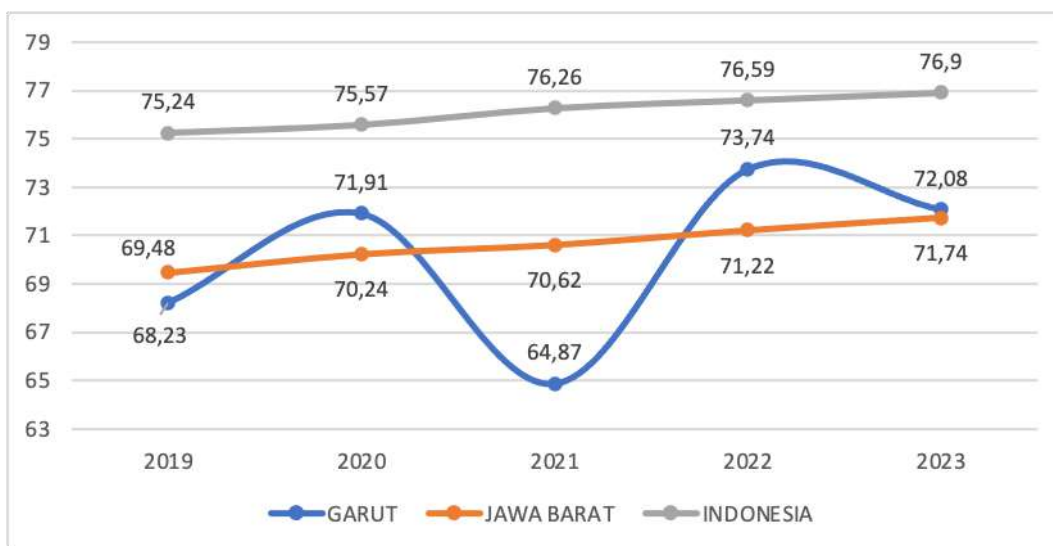
Gambar 2.51 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2023 menggunakan UHH hasil SP2020 Long Form



Sumber : BPS Kabupaten Garut. Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, Tahun 2024

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Komponen IDG terdiri dari keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Pencapaian IDG tahun 2023 sebesar 72,08 poin, menurun 1,26 poin dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 73,34 poin namun nilai ini masih berada diatas capaian Jawa Barat sebesar 71,74 poin dan masih berada dibawah IDG Nasional sebesar 76,9 poin.

Gambar 2.52. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut. Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, Tahun 2024

9. Pangan

Penyelenggaraan Urusan Bidang Pangan mencakup 4 (empat) sub urusan yaitu Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian; Penyelenggaraan Ketahanan Pangan; Penanganan Kerawanan Pangan; dan Keamanan Pangan. Capaian kinerja Urusan Bidang Pangan selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.51.
Pencapaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2019 – 2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	77,20	78,6	79,7	83,1	91,7
2	Penguatan cadangan pangan	%	11,25	50	n/a	85,5	473
3	Penanganan daerah rawan pangan	%	5,88	6,26	n/a	7,92	9,28

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
4	Ketersediaan pangan utama	Ton	492.442,25	230.702,67	459.341,32	568.770	297.194,12
5	Ketersediaan energi dan protein perkapita:						
	Energi per kapita	kcal/kap/hari	2566	5.909	5.925	5.888	1488,86
	Protein Perkapita	gram/kap/hari	78	177,4	177,8	176,9	39,9
6	Konsumsi energi dan protein perkapita:						
	Energi per kapita	kcal/kap/hari	n/a	2.229	2.257	2.268	2.130
	Protein Perkapita	gram/kap/hari	n/a	59,6	61	61,8	59,78
7	Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras)	%	n/a	<10	<9	<8	<6
8	Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	%	n/a	70,3	78,26	83,35	82,33

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD.

Indikator capaian kinerja urusan pangan salah satu-nya dilihat dari pencapaian skor PPH yang merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Capaian skor PPH Kabupaten Garut tahun 2023 mencapai 91,7 poin. Kelompok pangan yang baru terpenuhi hanya dari padi-padian. Untuk kelompok pangan yang lain, terutama pangan hewani, umbi-umbian, sayur dan buah, masih di bawah PPH maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Garut masih memerlukan peningkatan kualitas konsumsi pangan terutama penganekaragaman konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

Penyelenggaraan urusan pangan diantaranya juga diarahkan pada penanganan daerah rawan pangan yang didasarkan pada pelaporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). SKPG bertujuan untuk menyediakan informasi situasi pangan dan gizi masyarakat dan menjadi bahan kebijakan untuk perencanaan dan penetapan langkah-langkah pencegahan dan tindakan penanggulangan kerawanan pangan secara lebih cepat dan tepat.

Ketersediaan energi dan protein perkapita Kabupaten Garut pada tahun 2023 mencapai ketersediaan energi 1488,86 kkal/kap/hari dan ketersediaan

protein 39,9 gram/kap/hari. Pada tahun 2023, realisasi ketersediaan energi dan protein perkapita cenderung menurun jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan cara penghitungan. Konsumsi energi per kapita cenderung menurun dari tahun 2022 dari semula 2.268 kkal/kap/hari menjadi 2.130 kkal/kap/hari dan namun sudah melampaui dari standar angka kecukupan energi maksimal, yaitu 2.100 kkal/kap/hari walaupun kecukupan energi tersebut masih belum beragam dan masih tergantung pada padi-padian.

10. Pertanahan

Persentase bidang lahan milik pemerintah yang bersertifikat pada tahun 2023 mencapai 60,28% . Angka ini naik dari capaian tahun 2022 sebesar 11,27%. Sedangkan jumlah kasus pertanahan yang ditangani pada tahun 2023 mencapai 30 kasus Ringkasan pencapaian kinerja urusan Pertanahan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.52.
Pencapaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2019-2023

NO	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023*
1	Prosentase bidang lahan milik pemerintah yang bersertifikat	%	18,36	22,86	28,15	49,01	60,28
2.	Jumlah Kasus Pertanahan Yang di tangani	kasus	35	5	8	8	30

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman dan BPKAD Kabupaten Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

11. Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup diarahkan pada upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Tahun 2023, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan mencapai 66,89 persen cenderung menurun sebesar 3,86 poin dari capaian pada tahun 2022 yakni berada pada nilai 70,75. IKLH dihitung berdasarkan pada Indeks Kualitas Air (IKA) yang mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2023 menjadi 47,62 poin dan berada dalam klasifikasi kurang, turun cukup signifikan sebesar 16,75 poin dibandingkan dengan

realisasi pada tahun 2022 sebesar 64,37 poin, Indeks Kualitas Udara (IKU) berada dalam klasifikasi Sangat Baik berada pada angka 94,83 poin, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) berada pada nilai 48,32 poin dan masih berada pada klasifikasi Kurang. Berikut diuraikan tabel pencapaian kinerja urusan lingkungan hidup tahun 2019-2023.

Tabel 2.53.
Pencapaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	56,41	56,22	67,82	70,75	66,89
2	Persentase penyelesaian kasus lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100
3	Persentase dokumen lingkungan yang dievaluasi	%	1 dok KLHS RPJMD	20	100	100	100
4	Persentase pelaporan pengendalian B3 dan LB3	%	n/a	n/a	n/a	100	n/a
5	Persentase desa/kelurahan yang berbudaya lingkungan	%	n/a	n/a	25	25	25
6	Persentase peningkatan kemitraan lingkungan	%	n/a	n/a	20	20	n/a
7	Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota)	%	0,115	0,115	0,148	0,146	0,164
8	Tingkat Pengelolaan Sampah	%	22,60	25,27	25,66	29,95	31,48
9	Jumlah Dokumen Produk Pembinaan dan Pengawasan	%	n/a	n/a	4	2	n/a
10	Jumlah status masyarakat hukum adat, kearifan lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	n/a	n/a	n/a	2	n/a

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Keterangan: n/a data realisasi tahun berkenaan tidak dapat diukur dikarenakan kegiatan pada tahun berkenaan tidak dilaksanakan dan tidak dianggarkan setiap tahun

Jika berdasarkan nilai komponen IKLH dapat disimpulkan bahwa Indeks Kualitas Air (IKA) turun cukup signifikan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 berikut merupakan beberapa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan indeks kualitas air (IKA) yakni:

1. Penertiban titik-titik pembuangan air limbah melalui mekanisme self purification melalui penguraian zat-zat pencemar yang masuk ke dalam air Sungai secara alamiah, kualitas air akan semakin membaik jika mencapai hilir;
2. lalui penguraian zat-zat pencemar yang masuk ke dalam air Sungai secara alamiah, kualitas air akan semakin membaik jika mencapai hilir;

3. Peningkatan fasilitas pengelolaan cemaran domestik melalui peningkatan pelaksanaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), IPAL komunal;
4. Pemanfaatan Online Monitoring System (Onlimo) untuk Pemantauan Pemasangan alat pantau real-time pada beberapa titik pemantauan yang dianggap kritis dan memiliki prioritas tinggi sehingga dapat menjadi early warning system agar pengelolaan berbagai bentuk remediasi dapat dilakukan lebih awal.
5. Pengetatan izin pembuangan limbah terkait baku mutu dan pengawasan atas efisiensi pengolahan setiap IPAL industri;

Melaksanakan kegiatan pembersih unsur pencemaran dengan fokus pada kegiatan Pipanisasi dan Operasional IPAL 2 SIK Sukaregang dan Revitalisasi IPLT Copong.

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencakup 4 (empat) sub urusan yaitu Pendaftaran Penduduk; Pencatatan Sipil; Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan Profil Kependudukan. Realisasi capaian Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk tahun 2022 adalah sebesar 72,45 % atau belum dapat mencapai target tahun 2022. Sedangkan realisasi capaian Rasio Bayi berakte kelahiran adalah sebesar 85,62% atau telah melampaui target capaian pada tahun 2022 sebesar 190% sama halnya dengan Rasio pasangan berakte nikah yang mencapai realisasi target sebesar 239,7 % atau berada pada angka 112,7 % penerbitan akte nikah pada tahun 2022. Capaian kinerja Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.54.
Pencapaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	%	93,01	98,4	98,82	72,45	99,71
2.	Rasio bayi berakte kelahiran	%	76,56	80,1	79,03	85,62	92,31

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
3.	Rasio pasangan berakate nikah	%	47,79	43,9	100	112,7	84
4.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		Ada				
5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah				
6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	98,93	97,3	96,78	72,60	95
7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	60,5	34,9	71,6	90	80,11
8.	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	n/a	75	75	75	80
<i>*Indikator permen86 dan permen 18 beririsan dengan permendagri 00096-5384-DUKCAPIL 2023 sehingga untuk tahun 2023 menggunakan perubahan berdasarkan permendagri 5483-disdukcapil</i>							
1	Penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP Elektronik	%				Perekaman 98,90% dan Pencetakan 98,08%	98,08
2	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%				17,83	17,83
3	Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)	%				n/a	13,47
4	Pencapaian cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun	%				83,17	83,17
5	Kepemilikan Buku Pokok Pemakaman (BPP) di Desa/Kelurahan/Pemakaman Umum/Pemakaman Keluarga yang ada petugasnya	%				n/a	75
6	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra	%				0	4
7	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	%				4	4
8	Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	%				n/a	0
9	Penyusunan Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian	%				Ada	Ada
10	Keluaran/output kinerja pelayanan dokumen lainnya	%				0	1

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Keterangan: n/a belum ada data

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2019-2023 berkaitan dengan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dengan capaian kinerja antara lain sebagai berikut:

- (1) Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk tahun 2023 mencapai 99,71% cenderung meningkat dari tahun 2022 sebesar 72,45%;

- (2) Rasio bayi berakte kelahiran tahun 2023 mencapai 92,31% meningkat dari tahun 2022 sebesar 85,62%;
- (3) Rasio pasangan berakte nikah tahun 2023 mencapai 84% menurun dari tahun 2022 sebesar 112,7%;
- (4) Ketersediaan database kependudukan tahun 2023 sudah ada;
- (5) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah dilakukan;
- (6) Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tahun 2023 mencapai 95% ;
- (7) Cakupan penerbitan akta kelahiran tahun 2023 mencapai 80,11% menurun dari tahun 2022 sebesar 90%;
- (8) Cakupan pemanfaatan data kependudukan mencapai 80% pada tahun 2023.

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencakup 4 (empat) sub urusan yaitu Penataan Desa; Kerjasama Desa; Administrasi Pemerintahan Desa; dan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat. Capaian kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tahun 2019–2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.55.
Pencapaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	%	15	20	30	40	60
2	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Nilai	42	42	42	42	42
3	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Nilai	442	442	442	442	442
4	Persentase LSM Aktif	%	n/a	70	72	75	87
5	Persentase LPM Berprestasi	%	6	7	8	9	10
6	Persentase PKK Aktif	%	55	100	70	80	87
7	Persentase Posyandu Aktif	%	55	100	70	80	87
8	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	65	70	72	75	79
9	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut, Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan pada upaya meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai sumber daya pembangunan yang mampu berperan aktif dalam berbagai aspek pembangunan, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa, keberhasilan program ini adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun desa dan meningkatkan kinerja pemerintahan desa.

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencakup 3 (tiga) sub urusan yaitu Pengendalian Penduduk; Keluarga Berencana (KB); dan Keluarga Sejahtera. Adapun capaian Angka Kelahiran Total (TFR) tahun 2022 mencapai angka 2,45 % kembali meningkat jika dibandingkan dengan angka pada tahun 2021, Angka Kelahiran Total menggambarkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Realisasi Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49 pada tahun 2022 mencapai target yang telah ditetapkan yakni sebesar 104,2 %, dengan angka 72,39%.

Capaian kinerja Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.56.
Pencapaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Tahun 2019 – 2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,61	1,1	1,1	0,86	0,84
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,34	2,34	2,3	2,45	2,33
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	%	4,00	4,05	6,05	8,12	8,3
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	20	20	100	100	100
5	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk	Perda	0	0	0	-	-



No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
6	Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan	Sektor	0	0	8	8	8
7	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	Sekolah	2	2	5	5	5
8	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	anak	2,85	2,98	2,77	1,37	2,64
9	Ratio Akseptor KB	%	70,67	71,29	71,96	72,39	73,21
10	Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	%	70,67	71,29	71,96	72,39	73,21
11	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	Angka	49/1000	49/1000	49/1000	36/1000	36,36/1000
12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	3,89	3,89	3,44	3,36	3,36
13	Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	13,5	13,66	13,44	13,13	13,13
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	28,72	29,72	30,93	32,16	24,46
15	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	70,67	70,67	70,91	71,48	71,49
16	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB	%	82,32	83,04	84,15	84,32	84,45
17	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB	%	78,9	78,94	80,74	82,94	82,95
18	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB	%	75,62	78,24	80,79	79,88	79,9
19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	%	2	2	2	2	4,76
20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	%	50	55	60	78,69	78,7
21	Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	%	291	291	280	280	53,2
22	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri	%	84	87	84,92	86,41	86,5
23	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap	%	442	442	100	442	442

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Desa/Kelurahan						
24	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	100	100	100	100	100
25	Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	%	40	67	100	100	90
26	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa	%	100	100	100	100	100
27	Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	-	-	16 orang*	-	
28	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	45,65	55	60	101	72
29	Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	55,45	65	68	81	81
30	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	%	18,98	19	19,01	19,01	19,09
31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes	%	n/a	1,25	2	-	1,2

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Garut, Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD

Keterangan: * merupakan data total penduduk yang terkena Infeksi Menular Seksual (tidak spesifik berdasarkan kelompok umur remaja)

Penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana diarahkan pada upaya pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi.

15. Perhubungan

Penyelenggaraan Urusan Bidang Perhubungan mencakup 4 (empat) sub urusan yaitu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); Pelayaran; Penerbangan; dan Perkeretaapian. Capaian kinerja Urusan Bidang Perhubungan pada tahun 2019- 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.57.
Pencapaian Kinerja Urusan Perhubungan
Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	%	0,384	0,385	0,4368	105,82	120,25
2	Rasio Ijin Trayek	%	0,00081	0,128	0,061	0,082	0,03
3	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Unit	13.295	8.035	8.662	9.035	12,296
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Lokasi	13	2	2	2	2
5	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	38,39	38,5	0,43	0,1026	0,06
6	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	9,84	13	18,07	29,57	5,97
7	Pemasangan Rambu- Rambu	%	70,02	100	158	158	89,20
8	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	kend/Km	0,02	0,14	0.062	0.062	0.06
9	Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum	Org	150.250	65.340	501.224	1.031.637	341.836
10	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun	Org/Thn	150.250	65.340	501.224	1.031.637	341,836
11	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan	%	n/a	n/a	68,29	80,88	90,69
12	Persentase ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	%	n/a	n/a	58,64	71,5	85.4
13	Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	%	n/a	n/a	65,45	77,13	85.99
14	Persentase Pelayanan Angkutan Umum	%	n/a	n/a	50,06	63,85	81.96
15	Persentase Sosialisasi keselamatan perhubungan	%	n/a	n/a	52,08	68,58	85.07
16	Persentase Sarana Pelayaran yang Laik Layar	%	n/a	n/a	83,33	88,s89	94.44

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD.

Pelaksanaan urusan perhubungan dititikberatkan untuk menunjang kelancaran roda perekonomian daerah antara lain kegiatan usaha masyarakat dalam mendistribusikan pemasaran hasil produk barang dan jasa yang diindikasikan pada kelancaran dan keselamatan di jalan melalui indikator rasio angkutan darat, jumlah kendaraan bermotor yang laik operasi/diuji, prosentase kapal < 7 GT dalam kondisi laik layar, rambu lalu-lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

16. Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika mencakup 2 (dua) sub urusan yaitu Informasi dan Komunikasi Publik; dan Aplikasi

Informatika. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.58.
Pencapaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2019-2023

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat kematangan Aplikasi SPBE Pemkab Garut	%	n/a	3,26	3,25	3,25	3,29
2	Persentase informasi publik yang didiseminasikan kepada masyarakat	%	n/a	37	52	75	82

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut, Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD.

Tingkat kematangan aplikasi SPBE Pemkab Garut pada tahun 2023 meningkat 0,04 % dari capaian pada tahun 2022 yakni sebesar 3,29% berdasarkan Kepmenpan RB Nomor 13 Tahun 2024 sedangkan persentase informasi publik yang didiseminasikan kepada masyarakat mencapai 82 % cenderung naik dari tahun 2023. Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain tersedianya website resmi Pemerintah Kabupaten Garut (garutkab.go.id) sebagai media pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang secara lengkap menyampaikan berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah, kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, infrastruktur, potensi daerah, sistem informasi manajemen (hukum, kepegawaian, perizinan, pariwisata, kecamatan, informasi publik), informasi harga, rencana umum pengadaan, rencana pembangunan daerah, transparansi pengelolaan anggaran daerah dan lain sebagainya serta menjadi media interaksi secara elektronik dengan stakeholder pembangunan untuk menyampaikan saran, masukan, tanggapan dan keluhan terhadap penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Garut.

17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penyelenggaraan Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mencakup 7 (tujuh) sub urusan yaitu Izin Usaha Simpan Pinjam; Pengawasan dan pemeriksaan; Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; Pendidikan dan Latihan Perkoperasian; Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); dan



Pengembangan UMKM. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.59.
Pencapaian Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah
Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Koperasi Aktif	%	79,19	81	63,06	64,17	66,21
2	Jumlah Koperasi aktif	Angka	1153	1559	980	1.028	1071
3	Jumlah koperasi baru	Angka	18	20	43	48	35
4	Jumlah Koperasi Sehat	Angka	237	51	50	58	32
5	Jumlah wirausaha	Angka	1401	2019	8299	11.489	13.099
6	Jumlah UKM yang meningkat omsetnya	Angka	2256	720	1.306	1.235	1.291
7	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	n/a	n/a	10,6	7,9	6,2
8	Peningkatan Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	UKM	n/a	n/a	1537	1347	1435
9	Persentase fasilitasi penerbitan perizinan koperasi baru	%	n/a	n/a	215	48	35
10	Persentase koperasi yang diawasi	%	n/a	n/a	5	6,12	4,29
11	Persentase koperasi sehat	%	n/a	n/a	5	3,74	3,19
12	Persentase Pertumbuhan SDM Koperasi	%	n/a	n/a	15	4,9	n/a
13	Persentase Pertumbuhan Omzet Usaha Koperasi	%	n/a	n/a	1,36	1,25	2,2
14	Jumlah wirausaha Baru	Wirausaha Baru	n/a	n/a	737	3795	1411
15	Jumlah UKM yang terbina	Pelaku Usaha Mikro	n/a	n/a	975	1689	1141

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD.

Pada tahun 2023 persentase koperasi yang berkualitas memang cenderung menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yakni mencapai 6,2%, namun peningkatan usaha mikro yang menjadi wirausaha cenderung meningkat 88 UKM yakni mencapai 1435 dan jumlah UKM yang terbina pada tahun 2023 ini mencapai 1141 pelaku usaha mikro, dengan persentase koperasi aktif sebesar 66,21. Pertumbuhan omzet usaha koperasi juga menunjukkan nilai yang positif jika dibandingkan dengan tahun 2023 yakni mencapai 2,2%. Beberapa intervensi yang dilakukan dalam pencapaian berbagai indikator bidang urusan koperasi dan usaha kecil menengah yakni berupa fasilitasi perizinan, pelatihan, fasilitasi UKM naik kelas, pemasaran serta bantuan modal.

18. Penanaman Modal

Penyelenggaraan Urusan Bidang Penanaman Modal mencakup 5 (lima) sub urusan yaitu Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Promosi Penanaman Modal; Pelayanan Penanaman Modal; Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Penanaman Modal selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.60.
Pencapaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
Tahun 2019 – 2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	PMD/PMA	4.300	4.426	466	711	146
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Triliun Rp	1,3708	1,11	1,29	1,165	1,357
3	Rasio Penanam Modal (PMA-PMDN) mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB)	%	24.081	-	n/a	20	36
4	Rasio realisasi investasi dari minat investasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB)	%	55,85	256,99	n/a	33	n/a
5	Persentase penyelesaian pengaduan tepat waktu	%	n/a	n/a	100	100	100
6	Persentase penyelesaian Perizinan tepat waktu	%	n/a	n/a	100	100	100
7	Persentase data dan informasi perizinan dan non peizinan	%	n/a	n/a	100	100	100
8	Indeks kepastian hukum berusaha	Kategori	n/a	n/a	Baik	Baik	Baik

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kab. Garut, Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD.

Sementara itu, Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan perusahaan, tercatat realisasi investasi tahun 2023 sebesar Rp 1,356 triliun, naik cukup signifikan dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp 1,165 triliun. Terdapat peningkatan investasi pada sektor tersier pada tahun 2023 menjadi Rp. 905,9 Miliar, peningkatan terbesar berada pada perumahan, kawasan industri dan perkantoran, menjadi 492,98 Miliar meeningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 yang hanya mencapai 1.79 Miliar.

Tabel 2.61. Data Realisasi Investasi di Kabupaten Garut
Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2019-2023

No	Sektor	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
I	Sektor Primer	10.325.262.000	27.495.961.450	131.105.667.771	248.467.608.390	129.445.736.560



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

No	Sektor	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tanaman Pangan & Perkebunan	-	-	8.837.900.000	346.500.000	123.999.256.561
2	Peternakan	3.825.262.000	14.701.003.000	119.517.767.711	239.850.908.390	-
3	Perikanan	-	12.494.958.450	2.500.000.000	8.270.200.000	1.479.999
4	Pertambangan	6.500.000.000	300.000.000	250.000.000	-	5.205.000.000
II	Sektor Sekunder	228.149.979.346	360.876.787.997	709.699.945.420	597.724.131.438	321.344.466.986
1	Industri Makanan	24.258.108.481	10.000.000	1.615.400.000	11.068.400.000	10.477.600.000
2	Industri Tekstil	101.500.000.000	219.146.176.000	10.116.342.177	313.120.887.414	129.144.395.888
3	Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki	88.078.697.288	139.792.845.997	697.898.903.243	272.753.453.688	137.653.274.225
4	Industri Kayu	1.750.000.000	-	-	-	38.230.600.000
5	Industri Kertas dan Percetakan	-	-	-	200.000	-
6	Industri Karet dan Plastik	5.419.116.000	-	-	-	0
7	Industri Mineral dan Non Logam	-	-	-	-	-
8	Industri Logam, Mesin & Elektronik	-	-	-	100.000.000	-
8	Ind. Kimia dan Farmasi	561.250.000	-	69.300.000	-	-
9	Industri Lainnya	6.481.816.250	1.927.766.000	-	681.190.336	5.838.596.873
III	Sektor Tersier	1.132.369.051.149	365.271.976.840	449.278.377.309	319.048.768.923	905.914.149.245
1	Listrik, Gas dan Air	384.130.128.291	118.400.256.420	81.003.137.352	37.569.472.157	101.782.621.244
2	Konstruksi	27.484.569.130	1.252.000.000	215.539.000.000	69.670.800.000	127.373.800.000
3	Perdagangan & Reparasi	154.124.723.744	43.014.058.877	11.596.239.997	37.799.300.000	61.554.699.736
4	Hotel & Restoran	116.372.109.154	2.455.000.000	57.618.419.961	57.580.951.194	44.594.400.000
5	Transportasi, Gudang & Komunikasi	-	200.150.661.543	33.500.000	110.014.845.572	4.974.400.000
6	Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran	205.168.860.521	127.878.088.018	78.061.200.000	1.791.000.000	492.981.688.272
7	Jasa Lainnya	245.088.660.309	-	5.426.879.999	4.622.400.000	72.652.539.993
	Jumlah	1.370.844.292.495	1.113.847.290.239	1.290.083.990.44	1.165.240.508.751	1.356.704.352.791

Sumber : DPMPPT Kabupaten Garut, Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD.

Jumlah perizinan yang diterbitkan DPMPPT tahun 2022 melalui OSS-RBA sebanyak 23.210 perizinan, naik signifikan dibandingkan tahun 2021 sebanyak 815 perizinan. Perizinan untuk usaha mikro dan kecil yang selama ini dikelola oleh DPMPPT dan paling berkontribusi terhadap jumlah perizinan yang diterbitkan DPMPPT kewenangannya dilimpahkan kepada Camat, sesuai dengan

Peraturan Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam Penyelenggaraan Perizinan.

Tabel 2.62.
Data Jumlah Penerbitan Perizinan
di Kabupaten Garut Tahun 2019-2022

No	Jenis Perizinan	Jumlah Penerbitan Perizinan				
		2019	2020	2021	2022*	2023
1	Izin Prinsip Penanaman Modal/Pendaftaran Penanaman Modal	2182	-	-	n/a	n/a
2	Izin Prinsip Penanaman Modal Perubahan	-	-	-	n/a	n/a
3	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	-	-	-	n/a	n/a
4	Izin Lokasi	19	8	6	n/a	n/a
5	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)	77	52	39	n/a	n/a
6	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	441	262	-	n/a	n/a
7	Izin Gangguan (IG)	-	-	336	n/a	n/a
8	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	-	215	53	n/a	n/a
9	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	-	92	82	n/a	n/a
10	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	-	-	n/a	n/a
11	Tanda Daftar Gudang (TDG)	35	33	15	n/a	n/a
12	Izin Trayek Angkutan Perdesaan/Angkutan Kota	192	178	92	n/a	n/a
13	Izin Usaha Angkutan	-	-	-	n/a	n/a
14	Izin Reklame	20	20	16	n/a	n/a
15	Izin Mendirikan Klinik	-	-	-	n/a	n/a
16	Izin Operasional Klinik	30	30	17	n/a	n/a
17	Izin Operasional Rumah Sakit	-	-	3	n/a	n/a
18	Izin Mendirikan Rumah Sakit	-	1	-	n/a	n/a
19	Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan	2	33	24	n/a	n/a
20	Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air	8	7	8	n/a	n/a
21	Izin Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah	-	-	-	n/a	n/a
22	Izin Lingkungan	108	60	-	n/a	n/a
23	Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), kecuali Minyak Pelumas atau Oli Bekas	-	-	-	n/a	n/a
24	Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	9	14	17	n/a	n/a
25	Izin Usaha Industri	-	4	9	n/a	n/a
26	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	-	4	8	n/a	n/a
27	Izin Usaha Budidaya Perikanan	-	-	2	n/a	n/a
28	Izin Usaha Toko Swalayan	-	-	-	n/a	n/a
29	Izin Sewa Tanah Dan Pembuatan Jembatan Jalan Masuk Orang dan Kendaraan, Bangunan rumah, Toko dan Kios yang ada di Bantaran Irigasi	-	-	-	n/a	n/a
30	Izin menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan	19	19	-	n/a	n/a
31	Surat Izin Apotek	40	40	68	n/a	n/a
32	Surat Izin Toko Obat	8	8	11	n/a	n/a



No	Jenis Perizinan	Jumlah Penerbitan Perizinan				
		2019	2020	2021	2022*	2023
33	Surat Izin Toko Alat Kesehatan	-	-	1	n/a	n/a
34	Surat Izin Laboratorium Klinik Umum	-	-	-	n/a	n/a
35	Izin Usaha Budidaya Peternakan	-	-	1	n/a	n/a
36	Tanda daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata	-	-	-	n/a	n/a
37	Tanda daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman	-	-	2	n/a	n/a
38	Tanda daftar Usaha Penyediaan Akomodasi	-	-	3	n/a	n/a
39	Izin Usaha Tanaman Pangan	-	-	2	n/a	n/a
40	Nomor Induk Berusaha (NIB)	-	-	-	730	4.581
Jumlah		3.559	1.080	815	-	-

Sumber : DPMP Kabupaten Garut, Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD.

*Tahun 2022 perizinan telah menggunakan OSS-RBA

19. Kepemudaan dan Olahraga

Penyelenggaraan Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga mencakup 3 (tiga) sub urusan yaitu Kepemudaan; Keolahragaan; dan Kepramukaan. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.63.
Pencapaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2019 – 2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	30	40,8	60	80	85
2	Persentase Pemuda yang berprestasi	%	0,50	1,00	n/a	n/a	38
3	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	%	25	0	n/a	n/a	82
4	Prosentase nomor cabang olahraga diikuti	%	29	0*	85	100	100
5	Prosentase Olahraga Masyarakat secara rutin	%	42	0*	n/a	n/a	n/a
6	Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana Keolahragaan	%	5	0*	28,5	51,65	n/a
7	Persentase Wirausaha Muda	%	0,13	1,00	30,91**	32,73	34,45
8	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	72,45	0*	n/a	n/a	n/a
9	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	%	81,25	0*	n/a	n/a	n/a
10	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	45	0*	n/a	n/a	n/a
11	Jumlah Atlet Berprestasi	Atlet	29	0*	n/a	n/a	73
12	Jumlah Prestasi Olahraga	Atlet	29	0*	n/a	n/a	117
13	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Dibina	%	-	-	100	100	100

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Garut Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD.

Keterangan: n/a menjelaskan bahwa indikator ini sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 2021 disesuaikan dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 163 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Pemuda Dan Olah Raga Tahun 2019-2024

*event olahraga tidak terlaksana dikarenakan dampak pandemi covid 19

**Formula : Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berusaha di Garut / Jumlah pemuda di Garut

Persentase wirausaha muda di Kabupaten Garut setiap tahunnya kian mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, hal ini dapat terlihat pada banyaknya wirausaha muda yang memulai usaha mikro baik di bidang kreatif fashion, photography, akomodasi dan bidang usaha lainnya.

Pelaksanaan pembangunan pada urusan pemuda diarahkan pada upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kecakapan hidup di kalangan pelajar dan pemuda. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan pemahaman pemuda dan pelajar terhadap agama, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, serta peningkatan peran organisasi pemuda dalam pembangunan. Dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang bermartabat, memiliki etika, produktif serta dapat berperan aktif sebagai motor dalam pembangunan, maka dilakukan berbagai fasilitasi kegiatan kepemudaan.

Sementara itu, pelaksanaan pembangunan urusan keolahragaan diarahkan pada upaya pengembangan sistem pembinaan, permasalahan dan peningkatan prestasi olahraga yang sistematis, berkelanjutan, terpadu dan terarah. Strategi yang dilakukan adalah melalui peningkatan kuantitas atlet berbakat usia dini, penyelenggaraan event olahraga bagi masyarakat secara masal, peningkatan jumlah atlet yang berprestasi di tingkat Provinsi Jawa Barat, serta pembangunan/pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga. Dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang bermartabat, memiliki etika serta menjunjung nilai-nilai sportifitas, dilakukan fasilitasi kegiatan keolahragaan baik berupa Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga maupun Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat.

20. Statistik

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik mencakup sub urusan statistik sektoral yang secara garis besar pemanfaatannya berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang statistik daerah, antara lain perumusan kebijakan teknis perencanaan; pengkoordinasian penyusunan statistik daerah; dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang statistik daerah. Penyediaan dan pengelolaan sistem data dan statistik daerah yang terintegrasi dilakukan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Pencapaian kinerja urusan statistik selama tahun 2019-2023 antara lain

tersedianya dokumen data/statistik daerah untuk penyusunan rencana pembangunan daerah.

Tabel 2.64.
Pencapaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menggunakan data statistik sektoral	Kategori	n/a	50	69	79	100
2	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku "PDRB"	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Buku " Profil Daerah"	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut, Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD.

Urusan Statistik ini lebih fokus terhadap Statistik Sektoral dimana statistik ini pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Program dan Kegiatan. Manfaat yang akan diperoleh antara lain adalah untuk mengetahui kecenderungan (*trend*) yang akan terjadi pada masa datang, menentukan prioritas, sebagai acuan dalam evaluasi dan pengendalian kegiatan, serta untuk memperkirakan antisipasi terhadap resiko dan hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan. Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, instansi pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri dan/atau bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik. Sedangkan untuk memperoleh data dilakukan dengan cara survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

21. Persandian

Penyelenggaraan urusan bidang persandian terkait dengan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah kabupaten dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi secara aman menggunakan persandian. Urusan Persandian diselenggarakan melalui program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang diimplementasikan ke dalam kegiatan Sandi dan Telekomunikasi untuk pelayanan sanditel yang menghasilkan data dan informasi dalam bentuk radiogram dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten secara cepat dan

akurat. Pencapaian kinerja urusan persandian selama tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.65.
Pencapaian Kinerja Urusan Persandian
Tahun 2019-2023

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100
2	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Poin	112	125	250	289	450

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Urusan Persandian ini berkaitan erat dengan keamanan informasi, salah satu bentuk aplikasinya adalah penerapan tanda tangan elektronik bagi Pejabat tinggi Pratama dan pejabat Administrator di Pemerintah Daerah Kabupaten Garut agar tidak mudah disalahgunakan maupun dipalsukan. Urusan Persandian juga mengikuti Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan disrupsi. Era siber yang kini terus terjadi secara dinamis memunculkan risiko dan celah keamanan informasi. Digitalisasi proses kerja menjadikan keamanan informasi menjadi hal yang berpengaruh pada keseluruhan proses bisnis sehingga sangat penting untuk menjadi perhatian utama. Keterlibatan pihak ketiga dalam *supply chain* layanan perusahaan menimbulkan risiko baru. Layanan berbasis *cloud* memberikan peluang efisiensi dan peningkatan kinerja yang sangat signifikan bagi perusahaan namun juga menimbulkan risiko baru terkait data yang berada pada pengendalian pihak penyelenggara layanan. Beberapa aspek kebutuhan keamanan baru tersebut perlu dimitigasi agar bisnis dapat terus berjalan dengan baik.

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001, yaitu Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, Aspek Teknologi dengan suplemen Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan dan Perlindungan Data Pribadi. Indeks KAMI tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi kepada Pimpinan Instansi. Implementasi Indeks KAMI dilakukan oleh penyelenggara layanan publik secara elektronik



melalui Bimbingan Teknis, Asesmen, dan Konsultasi. Berkaitan Hal di atas, pada Tahun 2022 Indeks Keamanan Informasi Kabupaten Garut adalah sebesar 450 Poin.

22. Kebudayaan

Penyelenggaraan Urusan Bidang Kebudayaan mencakup 5 (lima) sub urusan yaitu Kebudayaan, Kesenian Tradisional, Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Kebudayaan selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.66.
Pencapaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023*
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Pagelaran	5	0	8	15	42
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	CB/ ODCB	20	20	25	20	25
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Buah	5	5	0	3	1
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	CB/ ODCB	5	5	3	4	4
5	Jumlah Karya Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	Buah	3	3	3	4	4

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Garut, Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD.

Kabupaten Garut memiliki Karya Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang telah ditetapkan sebagai WBTB Nasional sejumlah 4 buah yaitu Kesenian Lais, Kesenian Gondang Buhun dan Surak Ibra serta Kesenian Badeng. Adapun Karya Budaya yang sudah memperoleh HAKI masih belum ada.

Pengembangan seni budaya diselenggarakan secara terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan, yang sekaligus berperan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah. Dalam rangka upaya mendorong peningkatan pengembangan seni dan budaya daerah, pengembangan potensi dan budaya daerah dilakukan gelar seni dan budaya dalam bentuk pagelaran, pameran dan festival, dan juga pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya, karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi, dan cagar budaya yang dikelola secara terpadu.

23. Perpustakaan

Penyelenggaraan Urusan Bidang Perpustakaan mencakup 2 (dua) sub urusan yaitu Pembinaan Perpustakaan dan Pelestarian Koleksi Nasional dan

Naskah Kuno. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Perpustakaan selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.67.
Pencapaian Kinerja Urusan Perpustakaan
Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	orang	1.670.680	2.007.357	2.008.943	2.199.862	39.500
2	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Eksemplar	49.552	59.446	61.326	67.635	74.135
3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	%	0,65	0,25	0,75	0,75	0,0056
4	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/ Tahun	orang	1.670.680	167	518	183.322	1920
5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	6.053	7.707	8.245	13.039	14.885
6	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat	orang	0	2	8	8	6

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut, Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD.

Berdasarkan uraian perhitungan masing-masing UPLM, maka diperoleh hasil kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Garut pada tahun 2023 dengan rumus jumlah seluruh capaian UPLM dibagi jumlah seluruh unsur UPLM dikali 100, yaitu $(0,403+0,052+0,635+0,529+ 1,000+0,820+0,633) / 7 * 100 = 58,72$ atau setelah dikonversi menjadi 12,34 dan berada pada kategori Sedang. Adapun untuk nilai IPL nasional tahun 2023 adalah 14.58.

Peningkatan nilai kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Garut pada tahun 2022 diperoleh karena adanya peningkatan pada beberapa indikator, diantaranya ketercukupan koleksi perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan, perpustakaan ber-SNP (Standar Nasional Perpustakaan) dan keterlibatan masyarakat dalam komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pada aktivitas yang dilakukan di perpustakaan. Hal

ini menggambarkan bahwa pentingnya sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dengan pegiat literasi dan mitra pengelola perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus, dan perpustakaan umum di wilayah Kabupaten Garut.

Secara terperinci capaian indikator kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada tahun 2020-2023, terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.68.
Pencapaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2020-2023

No	Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
1	Pemerataan layanan perpustakaan	n/a	0,002	0,002	0,403
2	Ketercukupan koleksi perpustakaan	0,19	0,15	0,53	0,054
3	Ketercukupan tenaga perpustakaan	0,002	0,002	0,002	0,716
4	Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan	55,81	79,89	87,49	0,62
5	Perpustakaan berstandar nasional perpustakaan (SNP)	0,84	0,87	1,31	1
6	Keterlibatan masyarakat dalam komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	19,75	23,5	38,17	0,744
7	Anggota perpustakaan	n/a	1,19	1,40	0,574
	Jumlah	76,59	105,604	128,904	58,72
	Nilai IPLM	12,89	15,08	18,41	12,34

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 yang dikelola dalam SIPD.

24. Kearsipan

Penyelenggaraan Urusan Bidang Kearsipan mencakup 2 (dua) sub urusan yaitu Pengelolaan Arsip; Perlindungan dan Penyelamatan Arsip; dan Perizinan. Penyelenggaraan urusan kearsipan diarahkan pada peningkatan penerapan aturan arsip secara baku serta peningkatan SDM pengelola kearsipan. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Kearsipan selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.69.
Pencapaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	21,53	30,53	36,15	40,76	47,12
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	%	2	0,4	6	6	6

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

2.1.3.2. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan mencakup 2 (dua) sub urusan yaitu Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.70.
Pencapaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Konsumsi Ikan	kg	26,45	25,7	37,5	28,86	30,77
2	Nilai Tukar Nelayan	poin	108,36	108,01	101,5	103,00	105,4
3	Produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya)	ton	64.540	60,884	66.442,04	67.933	69056,03
4	Produksi dan pemasaran olahan hasil perikanan pada kelompok Binaan	ton	710	655	764,6	788	832,3
5	Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Kelompok	n/a	n/a	7	12	9

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut, Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD.

Penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan diarahkan untuk dapat meningkatkan produksi perikanan, konsumsi ikan, cakupan bina kelompok nelayan dan peningkatan nilai tambah bagi pembudidaya ikan dan nelayan dari hasil produksi perikanan, sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan kelompok pembudidaya ikan dan nelayan binaan. Konsumsi ikan Kabupaten Garut selama tahun 2022 mencapai 28,86 kg capaian Konsumsi ikan pada tahun 2023 mencapai 30,77 cenderung meningkat cukup signifikan.

Faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya meningkatkan hasil produksi perikanan tangkap sesuai potensinya diantaranya adalah:

nyebabkan sulitnya meningkatkan hasil produksi perikanan tangkap sesuai potensinya diantaranya adalah:

- 1) Musim yang tidak menentu menyebabkan nelayan sulit melaut sehingga hasil tangkapan menurun;

- 2) Rendahnya keragaman jenis alat tangkap nelayan di Kabupaten Garut menyebabkan keterbatasan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan, adapun beberapa alat tangkap yang banyak digunakan diantaranya gillnet dan pancing serta payang namun penggunaan payang masih rendah karena tergolong mahal padahal hasil produksi payang tergolong tinggi;
- 3) Kapal perikanan 5-30 GT sulit keluar masuk pelabuhan yang ada di Kabupaten Garut sehingga beralih ke pelabuhan di wilayah lain seperti Cilacap atau Pelabuhan Ratu yang menyebabkan hasil produksi tidak tercatat di Kabupaten Garut;

menyebabkan hasil produksi tidak tercatat di Kabupaten Garut;

- 4) Harga alat tangkap semakin mahal sementara harga ikan tidak banyak berubah sehingga minat nelayan untuk menangkap ikan cenderung menurun;
- 5) Lokasi Fishing Ground makin menjauh dari wilayah pantai sehingga sulit dicapai oleh armada tangkap nelayan yang umumnya masih sederhana.

2. Pariwisata

Penyelenggaraan Urusan Bidang Pariwisata mencakup 4 (empat) sub urusan yaitu Destinasi Pariwisata; Pemasaran Pariwisata; Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada tahun 2022 PAD sektor pariwisata di Kabupaten Garut cenderung meningkat 3 kali lipat dari tahun 2021 menjadi 2.39 Milyar, sedangkan pada tahun 2023 mencapai 2.1 Milyar. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Pariwisata selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.71.
Pencapaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kunjungan Wisata	orang	2.679.657	2.880.972	1.489.011	2.152.000	4.406.083	3.874.751
2	Lama Kunjungan Wisata	hari	n/a	n/a	1	2	2	2
3	PAD Sektor Pariwisata	Rp	n/a	n/a	755.078.488	781.453.625	2.391.591.411	2.105.327.876

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, Tahun 2024, dikelola dalam SIPD.

Penyelenggaraan urusan pariwisata diarahkan untuk mendorong peningkatan kunjungan wisata melalui peningkatan citra pariwisata Kabupaten Garut seiring dengan peningkatan citra pariwisata Indonesia, diversifikasi destinasi pariwisata di setiap Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) baik yang bersifat rintisan, pemeliharaan maupun revitalisasi dari daya tarik wisata yang ada, peningkatan pemasaran pariwisata melalui portofolio pelanggan dan produk yang berbasis kepada produk wisata alam, produk wisata budaya dan wisata buatan, serta revitalisasi seni budaya, sebagai bagian dari atraksi wisata yang dilakukan melalui pengamanan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni budaya yang tumbuh dan berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat.

Dalam rangka peningkatan citra pariwisata Indonesia antara lain ditempuh dengan peningkatan jumlah destinasi wisata di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi (Destination Management Organization/DMO). Jumlah destinasi wisata yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi dihitung melalui lokasi yang difasilitasi dengan skema peningkatan gerakan kesadaran kolektif *stakeholders*, pengembangan manajemen destinasi, dan penguatan organisasi pengelolaan destinasi pariwisata. Peningkatan kualitas tata kelola destinasi yang dilakukan dengan prinsip partisipatif, keterpaduan, kolaboratif, dan berkelanjutan melalui pendekatan proses, sistematis, dan manajerial.

Jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Garut pada tahun 2022 naik dua kali lipat menjadi 4,4 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,15 juta orang sedangkan untuk tahun 2023 jumlah kunjungan wisata mencapai 3,87 juta.

3. Pertanian

Penyelenggaraan Urusan Bidang Pertanian mencakup 5 (lima) sub urusan yaitu Sarana Pertanian; Prasarana Pertanian; Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian; dan Perizinan Usaha Pertanian. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Pertanian selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.72.
Pencapaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2019-2023

NO	BIDANG URUSAN/INDIK ATOR	SATUAN	REALISASI				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	37,11	37,97	37,35	37,38	36,32



NO	BIDANG URUSAN/INDIK ATOR	SATUAN	REALISASI				
			2019	2020	2021	2022	2023
2	Produktivitas padi sawah	kw/ha	67,84	51,51	60,38	61,28	67,89
3	Produktivitas jagung	kw/ha	73,89	74,63	76,21	76,77	76,86
4	Produktivitas kacang tanah	kw/ha	17,62	18	18,4	18,52	18,59
5	Produktivitas ubi jalar	kw/ha	141,77	153,29	143,45	143,85	143,95
6	Produktivitas ubi kayu	kw/ha	239,75	242,15	241,9	242,44	238,61
7	Produksi produk olahan tanaman pangan	Kw	508.465	247.923	499.177	443.477	443.126
8	Produktivitas Kopi	tom/ha	0,95	0,93	9,67	8,13	7,81
9	Produktivitas Teh	ton/ha	1,66	1,72	16,5	15,69	16,01
10	Produktivitas Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya	ton/ha	1,65	6,217	62,2	62,21	245,00
11	Produktivitas Tanaman Atsiri	ton/ha	0,41	0,38	0,42	0,72	0,44
12	Produktivitas Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya	ton/ha	0,33	7,717	77,2	88,3	45,27
13	Produksi produk olahan tanaman perkebunan	Ton	16.434	16,445	16.501	18.180	18205,00
14	Produktivitas komoditas Tembakau	ton/ha	0,87	0,807	8,63	8,76	10,88
15	Produktivitas Cabai	kw/ha	148,88	149,94	149,72	151,05	147,87
16	Produktivitas Bawang Merah	kw/ha	98,97	90,72	99,86	99,86	99,73
17	Produktivitas Kentang	kw/ha	232,69	234,04	235,18	235,59	235,61
18	Produktivitas Sayuran Lainnya	kw/ha	186,33	184,57	194,42	204,5	204,73
19	Produktivitas Jahe	kw/ha	2,6	2,66	3,13	2,95	2,96
20	Produktivitas Kunyit	kw/ha	2,75	2,71	2,82	2,96	2,97
21	Produktivitas Tanaman Obat Lainnya	kw/ha	2	2,87	2,11	3,21	3,33
22	Produktivitas Jeruk	kw/ha	46	36	50,25	50,42	50,51
23	Produktivitas Tanaman Buah Lainnya	kw/ha	40	32	40,11	40,82	40,91
24	Produktivitas Sedap Malam	Tangkai /m ²	n/a	n/a	724	831	836
25	Produktivitas olahan hasil hortikultura	kw/ha	564.321	355.698	578.032	589.048	589.250
26	Indeks Penanaman	Poin	2,64	1,89	2,65	2,77	2,76
27	Cakupan bina kelompok petani	%	3,72	5	7,25	8,53	9,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2019	2020	2021	2022	2023
28	Prosentase peningkatan sarana prasarana pemasaran pertanian	%	20	20	20	20	10,00
29	Prosentase peningkatan Penyuluh yang tersertifikasi	%	20	20	5	11	11,00
30	prosentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani	%	10	2	4	5,31	5,00
31	Indeks Ketersediaan Sarana yang sesuai peruntukannya	point	n/a	n/a	0,125	0,108	0,085
32	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	point	n/a	n/a	0,102	0,103	0,103
33	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana	%	n/a	n/a	10	100	100,00
34	Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Pertanian yang diberikan	%	n/a	n/a	50	100	100,00
35	Produksi Peternakan dan Olahan Hasil Peternakan (daging, telur, susu)	ton	39,806	42.303	34.992,39	31.816	30.392,32
36	Peningkatan layanan keswan dan kesmavet	%	n/a	n/a	5	5	5
37	Jumlah layanan perizinan usaha peternakan dan kesehatan hewan	Layanan	n/a	n/a	8	5	30
38	Peternak dan pelaku usaha yang mendapat Bimbingan dan penyuluhan	Kelompok	n/a	n/a	10	10	10

Sumber : Dinas Pertanian; Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut, Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD.

Penyelenggaraan urusan pertanian diarahkan pada upaya meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri melalui peningkatan produksi dan produktivitas Padi, Palawija, Sayuran dan Buah-

buahan, peningkatan nilai tambah komoditi pertanian, serta sumber daya manusia pertanian.

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Penyelenggaraan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mencakup sub urusan energi baru terbarukan. Persentase perusahaan yang berizin pada tahun 2023 berada pada nilai 28,57 %. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.73.

Pencapaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019-2023

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Prosentase data kelistrikan yang direkosiliasi	%	19	19	21,4	n/a	n/a
2	Persentase rumah tangga pengguna listrik;	%	84	88,5	92,66	n/a	n/a
3	Persentase Perusahaan yang berizin	%	19	n/a	18,25	28,57	28,57

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Keterangan: n/a menjelaskan bahwa indikator ini sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 2021

5. Perdagangan

Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan mencakup 5 (lima) sub urusan yaitu Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan; Sarana Distribusi Perdagangan; Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; Pengembangan Ekspor; dan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Perdagangan selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.74.

Pencapaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2017-2022

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021*	2022	2023
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	n/a	n/a	2,95	3	3
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	n/a	n/a	35	36	34
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	n/a	n/a	41,4	41,8	38
4	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	unit	n/a	n/a	3	5	1
5	Jenis Produk yang dipromosikan	jenis	n/a	n/a	10	12	14

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021*	2022	2023
6	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai dengan ketentuan	Pelaku usaha	n/a	n/a	16	18	20
7	Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	n/a	n/a	9	10	12
8	jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor	Sektor usaha	n/a	n/a	7	7	7

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Garut, Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD.

Keterangan: *Tahun 2022 menggunakan indikator baru sesuai dengan Perda Nomor 5 tahun 2021 Tentang Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024

6. Perindustrian

Penyelenggaraan Urusan Bidang Perindustrian mencakup 3 (tiga) sub urusan yaitu Perencanaan Pembangunan Industri, Perizinan, dan Sistem Informasi Industri Nasional. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Perindustrian selama tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.75.

Pencapaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Target	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pertambahan jumlah industri kecil	%	n/a	n/a	1	1,14	4,86
2.	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator	%	n/a	n/a	39,8	100	100
3.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi	%	n/a	n/a	100	100	100
4.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	n/a	n/a	100	100	100
5.	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten Garut	IKM	n/a	n/a	200	250	705
6.	Jumlah Industri memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang dimonitor dan dikeluarkan oleh instansi terkait	IKM	n/a	n/a	50	10	10
7.	Persentase perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas	%	n/a	n/a	0,15	0,18	0,2

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

7. Transmigrasi

Penyelenggaraan Urusan Bidang Transmigrasi mencakup 3 (tiga) sub urusan yaitu Perencanaan Kawasan Transmigrasi; Pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Transmigrasi selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.76.
Pencapaian Kinerja Urusan Transmigrasi
Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah MoU Antar Daerah dalam Penyelenggaraan Ketransmigrasian	mou	-	0	0	0	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD.

2.1.3.3. Penunjang Urusan

1. Perencanaan Pembangunan

Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pencapaian kinerja penunjang urusan perencanaan pembangunan selama tahun 2018-2022 antara lain sebagai berikut.

- (1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005–2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019–2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024;
- (2) Tersedianya Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan Laporan Triwulanan Kegiatan Pembangunan;
- (3) Tersedianya dokumen kajian perencanaan pembangunan daerah;
- (4) Tersedianya dokumen kajian penelitian dan pengembangan;
- (5) Tersedianya dokumen data/statistik daerah untuk penyusunan rencana pembangunan daerah;
- (6) Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
- (7) Terselenggaranya bimbingan teknis/workshop perencanaan pembangunan daerah; dan

- (8) Terselenggaranya perencanaan pembangunan secara partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah.

Hasil pencapaian kinerja penunjang urusan perencanaan tahun 2019-2023 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.77.

Pencapaian Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	%	100	100	97	100	100
7	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	78,83	82,5	83	84	84

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

2. Keuangan

Penyelenggaraan penunjang urusan keuangan diantaranya diarahkan pada pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan. Hasil pencapaian kinerja penunjang urusan keuangan tahun 2019-2023 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.78.

Pencapaian Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	4,64	6,57	6,73	3,22	5,37	3,78
3	Persentase Belanja Pendidikan (20)	%	34,77	32,54	32,33	34,12	33,59	20



No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
4	Persentase Belanja Kesehatan (10)	%	12,48	13,99	13,95	14,14	12,81	10
5	Perbandingan Antara Belanja Langsung Terhadap Total APBD	%	45,51	47,86	41,00	n/a	n/a	n/a
6	Perbandingan Antara Belanja Tidak Langsung Terhadap Total APBD	%	54,49	52,14	59,00	n/a	n/a	n/a
7	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa	%	0,29	0,31	0,32	0,34	0,36	0,35
8	Penetapan APBD	Kategori	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
9	Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	%	100	100	100	100	100	100
10	Presentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Aset sesuai Standar (SAP) dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100
11	Persentase SKPD yang Melaksanakan Penyerapan Anggaran Minimal 90	%	90	90	92	95	95	95
12	Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir	%	68	72	8	80	85	90
13	Persentase Pengaduan, Saran dan Permohonan yang ditanggapi dan ditindaklanjuti	%	99,59	99,99	98,98	99,72	100	n/a
14	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah	%	98,51	99,97	100	100,74	101,37	n/a
15	Persentase Objek dan subjek pajak daerah (Ekstensifikasi dan Intensifikasi Objek dan Subjek Pajak Daerah) yang terverifikasi dan terintegrasi Sistem pajak	%	99,32	99,36	98,43	99,58	99,77	n/a
16	Persentase tingkat kesadaran, kepatutan dan kepatuhan wajib pajak daerah	%	99,64	94,59	98,72	98,94	99,62	n/a
17	Persentase peningkatan pengelolaan administrasi pajak daerah	%	98,75	99,46	99,05	99,12	100	n/a
18	Persentase Tingkat pengelolaan teknologi informasi pajak daerah	%	99,04	98,45	99,23	100	100	n/a
19	Persentase pemenuhan laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	%	99,92	99,70	99,25	100	100	n/a

Sumber : Inspektorat, BPKAD dan Bapenda Kabupaten Garut, Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD.

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Garut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran pencapaian kinerja penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan tahun 2019-2023 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.79.
Pencapaian Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2019-2023

N O	BIDANG URUSAN/INDIKATO R	SATUA N	REALISASI				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	orang	37	37	39	36	38
2	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	orang	231	258	250	255	259
3	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	orang	10.891	10.059	9.463	8.888	8469
4	Kebijakan kepegawaian Kabupaten Garut yang ditetapkan	Kebijak an	n/a	n/a	5	2	4
5	Persentase penempatan ASN Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi dan Kompetensi	%	80	80	95,36	97,5	82
6	Prosentase Terpenuhi Pengadaan Pegawai	%	80	112	30,30	97,5	82
7	Prosentase Data Pegawai yang Telah Diperbaharui	%	n/a	98,68	99,13	99,57	97
8	Persentase ASN yang Disiplin	%	99,98	99,9	99,90	99,77	99,96
9	Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	JP	n/a	20	20	20	20
10	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	n/a	15	n/a	3	3
11	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	%	n/a	43	44	46	93
12	Persentase Terpenuhi Pengembangan Kompetensi PNS	%	67	14	82	77	86

Sumber : BKD Kabupaten Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Keterangan : Kebijakan yang telah ditetapkan:

1. Perbup No. 132 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS
2. Perbup No. 131 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Mutasi PNS
3. Perbup No. 130 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi
4. Perbup No. 129 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta ASN
5. Perbup No. 141 Tahun 2021 tentang Pedoman Pola Karier PNS

4. Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan, antara lain perumusan kebijakan teknis; pengkoordinasian penyusunan penelitian dan pengembangan; dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan.

Pencapaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan selama tahun 2019-2023 antara lain tersedianya dokumen kajian penelitian dan pengembangan, penyusunan dan penerapan roadmap Sistem Inovasi Daerah (SiDa).

Tabel 2.80.
Pencapaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2019-2023

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	70	75	6,82	56,1	166,7
2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	50	50	66,67	51,22	75
	Penerapan SiDa:						
3	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	9,09	9,09	27,27	115,15	100
4	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	%	60	60	78,95	36,84	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

5. Pengawasan

Penyelenggaraan penunjang urusan pengawasan diarahkan untuk meningkatkan tingkat *Leveling* atas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Garut yang masih berada pada *Leveling* 2. Hasil pencapaian kinerja penunjang urusan pengawasan tahun 2017-2022 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.81.
Pencapaian Kinerja Urusan Pengawasan
Tahun 2019-2023

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP PEMDA	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB (74,91)
2	Persentase SKPD Nilai SAKIP "A"	%	48	55	55	65	100
3	Tingkat Maturitas SPIP	Level	L.3	L.3	L.3	L3	L3
4	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	%	76	78	82	82	94,54
5	Persentase Pengaduan yang tertangani	%	100	100	100	100	100
6	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	L.3 DC	L.3	L.3	L3	L3
7	Persentase MCP (Monitoring Center Prevention) Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi	%	83	92	77,04	93	92
8	Jumlah SKPD/Unit Kerja berpredikat ZI WBK WBBM dari TPN (Tim Penilai Nasional)*	unit	n/a	n/a	0	0	0

Sumber : Inspektorat Kabupaten Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

2.1.3.4. Urusan Pendukung

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Hasil pencapaian kinerja urusan pendukung DPRD tahun 2019-2023 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.82.
Pencapaian Kinerja Urusan Pendukung DPRD
Tahun 2019-2023

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program-	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2019	2020	2021	2022	2023
	program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD						
4	tingkat fasilitasi pelaksanaan peran dan fungsi legislasi serta pengawasan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

2. Sekretariat Daerah

Hasil pencapaian kinerja urusan pendukung KDH dan WKDH tahun 2019-2023 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.83.
Pencapaian Kinerja Urusan Pendukung KDH & WKDH
Tahun 2019-2023

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	REALISASI				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio Guru Ngaji Aktif Dalam "Garut Mengaji"	%	68	73	76	80	81
2	Cakupan Magrib Mengaji	%	63	70	80	80	90
3	Rasio Dewan Masjid Indonesia (DMI Tingkat Kabupaten Garut Aktif Mengelola Masjid	%	19	45	45	50	50
4	Persentase Masjid Dalam Kondisi Baik	%	50	63	65	68	68
5	Persentase Pesantren Salafiah Dalam Kondisi Baik	%	20	45	50	60	60
6	Rasio Lembaga Pendidikan Keagamaan Aktif	%	20	45	50	60	94
7	Persentase SKPD Yang Menerapkan Aktifitas Keagamaan Di Lingkungannya	%	80	75	75	80	90
8	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kesejahteraan	%	80	85	90	90	95



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	REALISASI				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Sosial Dan Masyarakat						
9	Nilai Unsur Penataan dan Penguatan Organisasi dalam Indek Reformasi Birokrasi	Nilai	3,05	3,05	3,05	n/a	—
10	Nilai Unsur Ketatalaksanaan dalam Indek Reformasi Birokrasi	Nilai	3,09	3,09	3,09	n/a	—
11	Tingkat Kualitas Pelayanan Publik Pada SKPD Dan Unit Kerja	Nilai	4,17	-	4	4	4,02
12	Prosentase Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Lembaga Perbankan Dan Non Perbankan Daerah Sebagai Daya Dukung Ekonomi Kerakyatan	%	80	85	85	n/a	95
13	Persentase SKPD Yang Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100
14	Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan	Produk Hukum	10 Perda, 120 Perbup, 1000 Kepbup	10 Perda, 84 Perbup, 850 Kepbup	10 Perda, 230 Perbup, 850 Kepbup	15 Perda, 219 Perbup, 864 Kepbup	12 Perda, 184 Perbup, 824 Kepbup
15	Prosentase Capaian Kinerja KDH/WKDH	%	80	80	85	90	95
16	Prosentase Pelayanan Internal Terhadap Aktivitas Kedinasan KDH/WKDH	%	80	80	100	95	95
17	Prosentase Kasus Pertanahan Yang Difasilitasi	%	100	60	50	Dipindah-kan ke Perkim	
18	Nilai LPPD	Angka	n/a	3,5117	3,5117	n/a	Sangat Tinggi (3,4962)
19	Prosentase Kecamatan Berkinerja Baik	%	100	100	100	100	100



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	REALISASI				
			2019	2020	2021	2022	2023
20	Prosentase Kesepakantan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti Kedalam Perjanjian Kerjasama	%	100	91	73	100	90
21	Prosentase Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	%	10	n/a	n/a	Dipindah-kan ke DPMD	
22	Prosentase Pelayanan Publik Dan Pembinaan Pegawai	%	80	100	100	100	100
23	Persentase Sarana Dan Prasarana Berkondisi Baik	%	80	95	95	96	80
24	Prosentase Kepuasan Layanan Internal Sekretariat Daerah	%	90	93	93	95	98

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Dinas Perumahan dan Permukiman, Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD.

2.1.3.5. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diantaranya diarahkan pada upaya pemeliharaan Keamanan dan ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat, pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP, pembinaan terhadap masyarakat dalam pemahaman pengembangan wawasan kebangsaan dan fasilitasi kerjasama penanganan gangguan keamanan dan ketertiban dengan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.84.
Pencapaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Tahun 2019 – 2023

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Kebebasan Berkeyakinan	%	66,67	66,67	80	100	100
2	Tingkat Kebebasan Berkumpul Berserikat	%	99,64	99,98	80	100	100
3	Tingkat Kebebasan Berpendapat	%	88,29	85,94	97,29	100	99,13
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam politik	%	78	n/a	78,91	n/a	79,57
5	Tingkat Akuntabilitas	%	n/a	n/a	Sangat	Sangat	Sangat

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol				Baik	Baik	Baik

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD.

2.1.3.6. Urusan Kewilayahan

Urusan Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Hasil pencapaian kinerja urusan kewilayahan tahun 2019-2023 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.85.
Pencapaian Kinerja Urusan Kewilayahan
Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022*	2023
1	Persentase pelaksanaan PATEN yang sesuai standar pelayanan	%	100	100	100		
2	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	100	100		
3	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar kelurahan	%	n/a	70	70		
4	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan	%	n/a	75	75		
5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	n/a	n/a	n/a	82,91	83,19
6	Nilai Sinergitas Kinerja kecamatan	Nilai	n/a	n/a	n/a	76,35	78,40
7	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%	n/a	n/a	n/a	100	100,00
8	Nilai SAKIP Kecamatan	Kategori	n/a	n/a	n/a	B	B

Sumber : Kecamatan, Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD.

Keterangan: Realisasi capaian dan indikator pada tahun 2022 ditulis "n/a" karena sudah tidak digunakan sebagai indikator kinerja urusan sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2024 masing-masing kecamatan.

Sebelumnya Urusan Kewilayahan dijelaskan oleh 4 (empat) indikator yaitu indikator Persentase pelaksanaan PATEN sesuai standar pelayanan dan Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan, Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar kelurahan dan Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan sudah tidak digunakan karena adanya perubahan Renstra SKPD Kecamatan yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2021 sehingga indikator kinerja meliputi Nilai SKM, Nilai Sinergitas Kecamatan, Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam

Pembangunan serta Nilai SAKIP Kecamatan, realisasi indikator nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) pada tahun 2023 berada pada angka 83,19%, sedangkan nilai SAKIP berada pada nilai kategori nilai B.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan pembangunan daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan berkaitan dengan indikator yang terkait fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia, dengan gambaran pencapaian kinerja selama tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.86.
Pencapaian Kinerja Aspek Daya Saing Daerah
Tahun 2019-2023

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (komoditas pangan)	Rp	490.956	554.237	503.987	522,212	588.794
2	Nilai tukar petani	Poin	110,93	100,19	98,80	103***	n/a
3	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Rp	41,45	41,04	39,36	335,866	43,36
4	Produktivitas total daerah	juta	n/a	36,04	36,47	50,05	n/a
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa*	%					
6	Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	2,06	1,07	1,98	4,55	n/a
7	Rasio ketergantungan**	Angka	57,65	47,36	47,23	47,16	46,92

Sumber : BPS Kabupaten Garut; Badan Kesbang Kabupaten Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Keterangan: *Kategori swasembada sudah tidak digunakan

**Data 2017-2020 : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Garut 2022, Data 2022: Hasil Proyeksi penduduk interim

*** merupakan data Nilai Tukar Petani Provinsi Jawa Barat

Ditinjau dari nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dirilis oleh Badan Riset Indonesia (BRIN) Tahun 2023 Kabupaten Garut memperoleh skor 3,37 masih berada di bawah skor Provinsi Jawa Barat yang berada pada nilai 3,76 namun telah mendekati skor nasional yang mencapai 3,44. Dibandingkan

dengan skor IDSD pada tahun 2022 (2,94) peningkatan yang cukup signifikan diperoleh Kabupaten Garut meningkat 0,5 poin meskipun masih dibawah rata-rata Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang berada pada skor 3,46, dari 12 (dua belas) pilar yang dinilai, terdapat dua pilar yang meningkat cukup signifikan yakni pada komponen Lingkungan pendukung yakni Pilar adopsi TIK mengukur tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dari suatu daerah. TIK dapat mengurangi biaya transaksi serta mempercepat pertukaran informasi dan ide pada suatu daerah sehingga meningkatkan efisiensi dan mendorong inovasi. Pilar ini dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator yakni pengguna internet, pelanggan internet *fixed broadband* , jangkauan jaringan 4G dan penggunaan seluler. Pilar 3 pada tahun 2023 mencapai 4,03 meningkat 1,13 poin dari tahun 2022 yang mencapai 2,90. Pilar kedua yakni komponen Pasar pada pilar 10 ukuran pasar yakni berpeluang meningkatkan produktivitas bisnis dengan mengeksplorasi skala ekonomi Kabupaten Garut memperoleh nilai 4,74 pada 2023 meningkat 2,12 poin dari capaian tahun 2022 yang salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan PDRB ADHK 2010. Pada pilar 12 yang terkait dengan kapabilitas inovasi Kabupaten Garut masih memperoleh nilai yang belum optimal yakni masih mencapai 2,75 poin artinya kuantitas dan kualitas riset dan inovasi di Kabupaten Garut masih memerlukan perbaikan.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Konsumsi adalah salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang merupakan kegiatan membelanjakan pendapatan untuk berbagai macam barang dan jasa guna memenuhi segala kebutuhan, baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani seperti makan, minum, pendidikan, kesehatan, hiburan dan kebutuhan lain. Pola konsumsi rumah tangga terbagi atas 2 (dua) yaitu pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

Pada tahun 2022, rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Garut secara nominal mencapai Rp. 1.039.588 yang terdiri dari pengeluaran konsumsi pangan sebesar Rp. 588.794 (56,64%) dan pengeluaran konsumsi non

pangan sebesar Rp. 450.794 (43,36%). Rata-rata pengeluaran per kapita pada tahun 2023 tersebut mengalami kenaikan Rp. 181.511 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp. 858.077.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Untuk meningkatkan Daya Saing Daerah, dibutuhkan dukungan ketersediaan infrastruktur wilayah meliputi beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat wilayah dalam menunjang aspek-aspek pembangunan lainnya di Kabupaten Garut.

Pemerintah Kabupaten Garut terus berupaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan pergerakan ekonomi masyarakat melalui pembangunan panjang jalan baru yang dibangun pada tahun 2023 sepanjang 54,03 km, direkonstruksi sepanjang 277,14 km, direhabilitasi sepanjang 80,96 km dan pembangunan jembatan sepanjang 2716,79 m. Kemantapan jalan Kabupaten Garut tahun 2023 mencapai 55,25 meningkat 3,83% jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 yakni mencapai 51,42%. Kondisi jalan yang mantap akan mendukung kelancaran pendistribusian arus barang, mobilitas penumpang serta kemudahan akses terhadap prasarana transportasi lainnya. Sistem transportasi yang handal memiliki kemampuan daya dukung struktur tinggi dan kemampuan jaringan yang efektif dan efisien dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wilayah, pembangunan ekonomi, mobilitas manusia, barang, dan jasa, dan diharapkan menjadi daya tarik yang kuat bagi masuknya investasi.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka mendukung iklim berinvestasi, kondisi daya saing daerah dari sisi keamanan daerah merupakan salah satu faktor pendorongnya. Angka kriminalitas dapat menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan

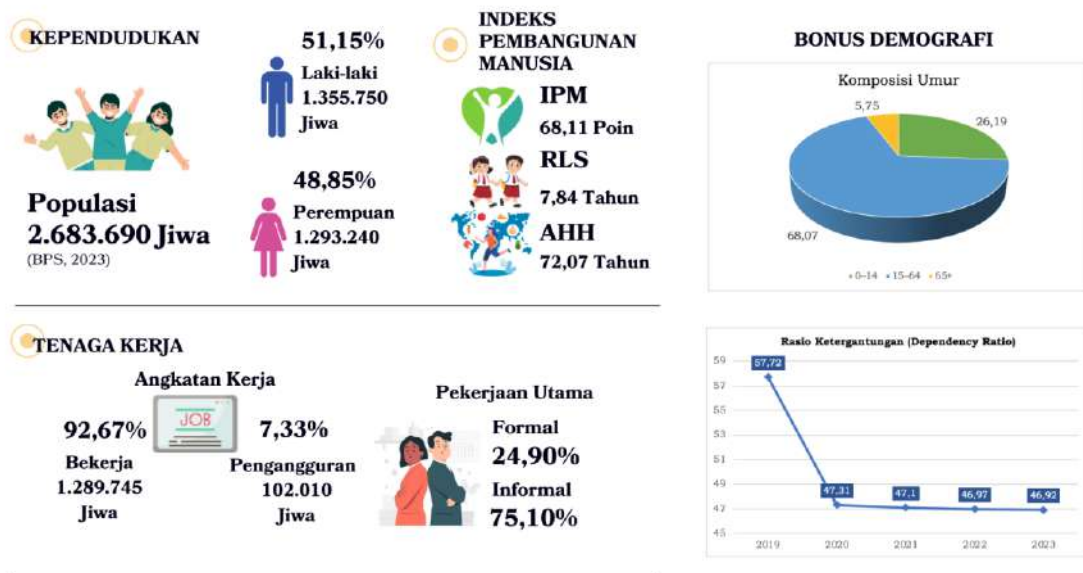
masyarakat. Pada tahun 2022 jumlah tindak kriminal sebanyak 605 kasus, naik 89 kasus dibandingkan kondisi tahun 2021 sebanyak 516 kasus. Apabila jumlah kasus kriminal tersebut dibandingkan terhadap jumlah penduduk maka Angka Kriminalitas pada tahun 2022 mencapai 4,549 per 10.000 penduduk, artinya dari 10.000 jumlah penduduk di Kabupaten Garut terdapat sekitar 2 tindak kriminal, kondisi tersebut meningkat dari tahun 2020 sebanyak 1,98 kasus kriminal per 10.000 penduduk. Untuk mendukung kondisi keamanan masyarakat, maka perlu terus didorong adanya partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kondisi iklim berinvestasi di Kabupaten Garut masih belum kondusif, hal ini diantaranya dipengaruhi oleh belum adanya kebijakan yang memberikan kepastian berusaha, belum adanya kebijakan mengenai Investasi baik skala umum maupun detail, dan kualitas SDM yang belum sesuai dengan kebutuhan Calon Investor serta masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap berkembangnya Investasi.

Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan perusahaan, tercatat realisasi investasi tahun 2022 sebesar Rp 1,165 trilyun, dan kembali meningkat pada tahun 2023 mencapai Rp. 1,356 trilyun.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal dasar pembangunan, oleh karenanya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan, baik sumber daya manusia sebagai subjek maupun objek dalam pembangunan. Salah satu aspek daya saing daerah yang sangat penting yang berkaitan dengan sumber daya manusia dapat dilihat diantaranya dari kondisi kualitas tenaga kerja yang diantaranya diukur dari Rasio tenaga kerja lulusan S1/S2/S3 dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 4,65 % mengalami penurunan 1,02 % dari tahun 2021.

Gambar 2.53.
Sumber Daya Manusia Kabupaten Garut



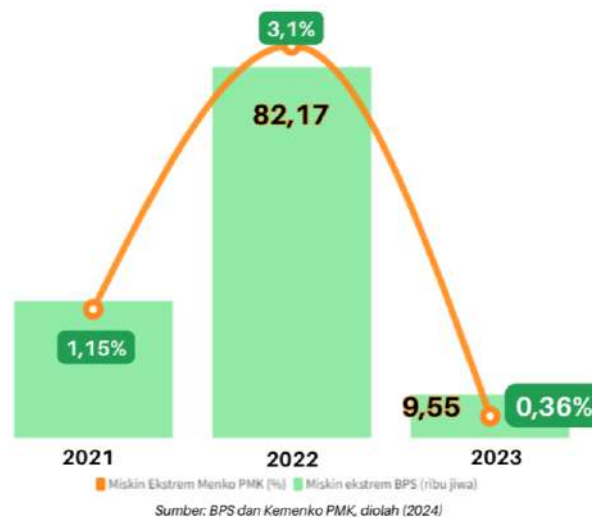
Sumber : BPS Kabupaten Garut Tahun 2023 diolah Bappeda

Kabupaten Garut pada tahun 2023 masih mengalami bonus demografi ditunjukkan dengan rasio ketergantungan yang kecil dimana struktur umur penduduk usia produktif yaitu usia 15-64 tahun lebih banyak dibanding usia tidak produktif yaitu usia 0-14 tahun dan 65 tahun keatas artinya terjadi perubahan struktur usia penduduk dimana terdapat lebih banyak jumlah penduduk usia produktif (usia kerja) jika dibandingkan dengan usia tidak produktif yang dipahami dapat membawa keuntungan perekonomian bagi suatu wilayah. Kelompok penduduk ini dapat menjadi motor penggerak dalam pemanfaatan sumber daya dan teknologi sehingga output perekonomian dapat meningkat. Kabupaten Garut pada tahun 2023 memiliki rasio ketergantungan sebesar 46,92% yang berarti bahwa 100 penduduk usia muda menanggung 46 penduduk usia non produktif. Hal ini dapat terlihat dari persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang cukup tinggi mencapai 68,67%, usia non produktif 42,33%. Struktur penduduk tersebut menjadi salah satu potensi modal pembangunan Kabupaten Garut disaat jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Berdasarkan data yang dirilis BPS Kabupaten Garut masih akan melalui masa bonus demografi yang cukup panjang hingga sampai dengan tahun 2035, sehingga diharapkan banyak tenaga kerja atau faktor produksi yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan perekonomian.

2.1.5. Kemiskinan Ekstrem

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, para Bupati atau Walikota diinstruksikan untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota; menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/ kelurahan; menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address); memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Gambar 2.54. Persentase dan Jumlah Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Garut Tahun 2021-2023



Berdasarkan estimasi Satgas data Kemenko PMK jumlah penduduk miskin ekstrim tahun 2023 mengalami penurunan dari 82,17 ribu jiwa menjadi 9,55 ribu jiwa, dan merupakan penurunan terbanyak ke-2 dari kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat (-72,62 ribu jiwa). Tingkat kemiskinan ekstrim tahun 2023 mengalami penurunan dari 3,1% menjadi 0,36%, merupakan penurunan tertinggi ke-1 dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat (-2,74%)



Upaya Pemerintah Kabupaten Garut dalam penanganan kemiskinan ekstrem ini dilakukan melalui 3 (Tiga) Strategi yang dilaksanakan oleh seluruh OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Garut secara sinergis, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 948.410.259.316,-. Adapun upaya yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Strategi 1 : Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat Dengan Anggaran sebesar Rp. 619.321.369.496,- yang dilaksanakan melalui teras pangan, bank pangan, gerakan pangan murah, lumbung pangan, penyaluran CPPD, warung akses pangan, kegiatan operasi pasar murah di 8 kecamatan, pembayaran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki bpjs kesehatan melalui Lapad Ruhama sebanyak 774 orang, penyaluran CBP bapanas ke 42 kecamatan sebanyak 296.885 KPM, monitoring dan pemberian bantuan korban terdampak bencana banjir rob di pesisir pantai selatan kabupaten garut, rehabilitasi sosial /pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat s.d. maret 2024 sudah terealisasi 40,34%, perlindungan dan jaminan sosial pada tanggap darurat dan pasca bencana bagi korban bencana, pemberian makanan tambahan (PMT).
2. Strategi 2 : Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dengan Anggaran sebesar Rp. 11.620.024.200,- yang dilaksanakan melalui Pendataan pencari kerja sebanyak 2.309 orang Penempatan pencari kerja di Dalam Negeri sebanyak 1.215 orang, penempatan pencafi kerja ke Luar Negri sebanyak 104 orang, padat Karya pembukaan jalan baru di desa sirnajaya Kecamatan Tarogong Kaler, padat karya pembukaan jalan baru di desa Purwajaya Kecamatan Peundeuy, padat karya pembukaan jalan baru di desa Padahurip Kecamatan Banjarwangi, Pelatihan Budidaya dan bantuan sarana perikanan budidaya, Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan keluarga, Pemberian bantuan Hibah kepada lembaga krmasyarakatan Desa, Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Bimbingan Teknis Fasilitasi Produk Hukum Desa, Bimbingan Teknis Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa, Pelatihan & Pemberian Hibah Kewirausahaan;

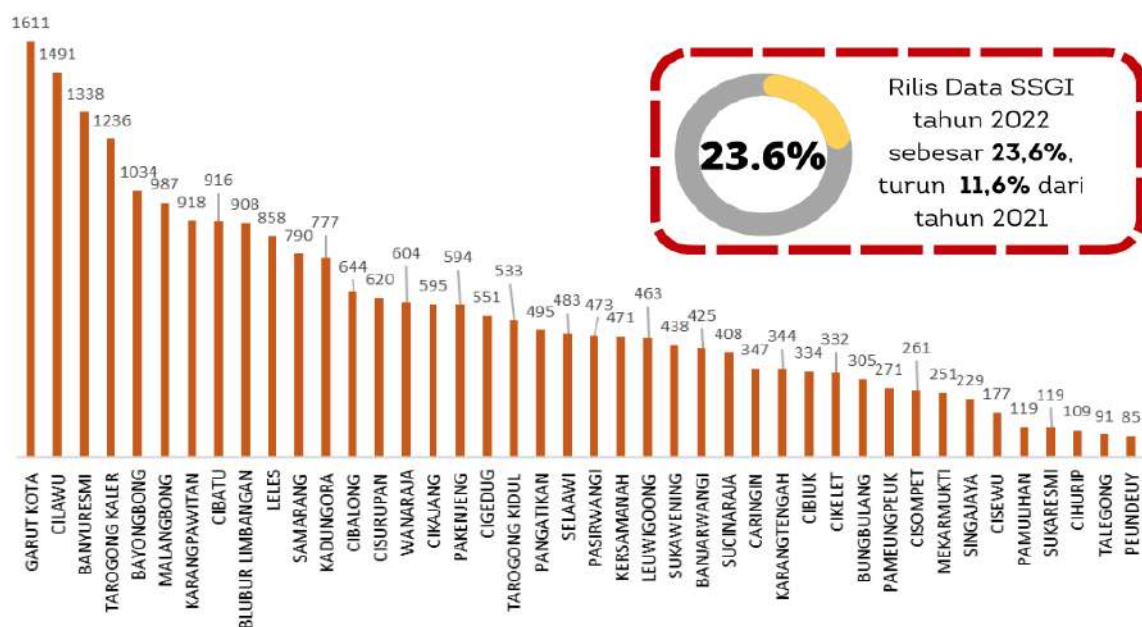
3. Strategi 3 : Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan Dengan Anggaran sebesar Rp. 317.468.865.620,- yang dilaksanakan melalui Pendataan, rapat koordinasi tingkat desa dan kecamatan dalam pembentukan P2WKSS, Launching zero waste dalam mengatasi sampah plastik dan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Bimtek peningkatan kapasitas Kader posyandu dan Kader Pembangunan Desa, Pelaksanaan Deklarasi Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) Tahun 2024, Rehabilitasi sedang/berat Bangunan PKBM Darulhidayah, Pengadaan mebel sekolah SD, Kegiatan pendampingan pemberdayaan kompetensi KS, Guru dan operator dalam menganalisis rapor pendidikan jenjang SD Tahun 2024, Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu (252 orang kader posyandu desa/kel, Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM) jumlah 168 orang KPM Desa, Gerakan NGAHIENG, melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, Gerakan SAWAH LEDOK, melalui sistem irigasi yang terintegrasi dan terairi air sepanjang musim, Gerakan CAI CUR COR, melalui penguasaan sumber mata air, kuantitas dan kualitas pendistribusian serta sanitasi berkelanjutan, Gerakan RAHARJA, melalui rencana tata ruang wilayah dan kawasan yang akan mewujudkan keselamatan dari bencana dan kesejahteraan lahir batin, Penanganan rumah tidak layak huni (RUTILAHU) di setiap desa sekabupaten, Penanganan kawasan kumuh melalui NATA KOTA, GERBANG CAHAYAKU dan NATA LEMBUR serta Penanganan bencana alam melalui GANCANG WANGUN.

2.1.6. Prevalensi Stunting

Angka prevalensi stunting Kabupaten Garut tahun 2021 mencapai 35,2 % berdasarkan data yang dirilis oleh SSGI Kementerian Kesehatan. Pemerintah Garut memiliki komitmen yang kuat dalam upaya penurunan angka prevalensi stunting melalui Program TOSS (Temukan Obati Sayangi Balita Stunting) selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Mendukung Program Unggulan Gubernur Jawa Barat Untuk Mewujudkan Jabar New Zero Stunting. Pemkab Garut berhasil menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 23,6 % pada tahun 2022, yang merupakan penurunan tertinggi kedua di Jawa Barat.

Melalui gerakan bersama bulan pencarian stunting, pemberian makanan tambahan, pengobatan penyakit penyerta, pemantauan tumbuh kembang, peningkatan pola asuh, peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan serta kolaborasi stakeholder bapak asuh. Adapun pada tahun 2023 total anggaran yang direncanakan untuk penanganan prevalensi stunting dengan kolaborasi antar OPD termasuk kecamatan adalah sebesar Rp. 1.478.444.551.019,-.

Gambar 2.55.
Jumlah balita stunting berdasarkan data Sistem informasi gizi terpadu bulan Februari 2024



Sumber : Kemenkes RI 2023

Berdasarkan pelaporan yang disampaikan melalui Sistem informasi gizi terpadu (Sigizi Terpadu) jumlah balita yang diukur pada Februari 2024 sebanyak 173.516 balita yang terdiri dari 6.242 balita sangat pendek, 17.793 Balita pendek dan 148.740 balita normal, sehingga presentase balita stunting di Kabupaten Garut sebanyak 13,85 %, dengan balita stunting terbanyak berada pada Kecamatan Garut Kota.

2.1.7. Evaluasi Capaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Pelaksanaan TPB di Indonesia diamanatkan dan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) menjadi salah satu acuan dalam

pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “No-one Left Behind”. TPB terdiri dari 17 (tujuh belas) Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu. Tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan TPB/SDGs, meliputi:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.



13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) memiliki empat pilar utama, yakni pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Kondisi lingkungan merupakan dasar dalam menopang kesejahteraan sosial dan ekonomi, dalam pencapaian kesejahteraan manusia. Ilustrasinya, kondisi lingkungan yang sehat dan bersih disertai dengan daya dukung yang baik, akan mampu menciptakan masyarakat yang sehat dan bahagia, untuk kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat tercipta kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Gambaran capaian indikator SDGs Kabupaten Garut tahun 2019-2022 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.87 Pencapaian Indikator SDGs Kabupaten Garut Tahun 2019-2023**

	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1,2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	8,98	9,98	10.65	10,42	9,77
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	63,22	73,2	42,3	83,71	
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	75,39	n/a	40317	46.130	47.538
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	1,5	5,9	n/a	n/a	n/a
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai	169955	151526	n/a	n/a	n/a



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.		bersyarat/Program Keluarga Harapan.					
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	94,06	79,74	60,24	69,84	n/a
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. (*Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI))	88,79	82,6	60,42	90,04	
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	62,37	63,38	86,96	88,51	90,04



	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.							
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	70,98	71,62	67,2	67,69	68,11
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	99,3	99,3	94,45	97,18	92,75
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	98	98	67,13	83,28	87,9



	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.							
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	80,01	n/a	74,08	81,43	83,17
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	88,5	n/a	n/a	n/a	n/a
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	75	133	n/a	n/a	n/a



	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	3	2	n/a	n/a	n/a
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	n/a	n/a	100	100	100
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	70	150	n/a	n/a	n/a
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	1	1	n/a	n/a	n/a
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. (Indeks Resiko Bencana)	188,06	131,65	185	164,91	147,39



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.							
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	9052,5	n/a	n/a	n/a	n/a
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	ada	n/a	n/a	n/a
1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	42 ORANG TKSK, 1 ORANG PEKERJA SOSIAL, 46 ORANG TAGANA,	42 ORANG TKSK, 61 ORANG TAGANA, 2 ORANG PEKERJA SOSIAL	36,91	32,62%	
1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang,	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	n/a	n/a	Pengeluaran untuk layanan pokok Rp. 1.729.698.565.535 atau 17,44% dari total belanja (Pendidikan : 7,95%	Pengeluaran untuk layanan pokok Rp. 2.524.796.115.452 atau 32,62% dari total belanja (Pendidikan : 20,72% Kesehatan:	



	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.					Kesehatan: 8,91% Perlindungan Sosial: 0,58%)	11,44% Perlindungan Sosial: 0,46%)	
2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	n/a	n/a	n/a	7,74	5,76
2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.(*Prevalensi balita gizi kurang)	3,8	4,3	2,4	4,24	n/a
2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari(*Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari))	n/a	n/a	n/a	n/a	5,76
2,2	Pada tahun 2030,	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan	4,55	6,4	35,2	23,6	24,1



	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.		sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.					
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	3,57	4,5	35,2	23,6	24,1
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	1,8	2,7	n/a	n/a	n/a
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	11,92	16,71	11,34	7,6	



	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.(* Bayi mendapatkan ASI Eksklusif)	73,7	77,5	89,96	90,67	92,48
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	77,8 dan 26,45	78,6 dan 25,7	79,7 dan 37,5	83,1 dan 30,77	91,7 dan 31,64
2,3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	n/a	n/a	199086,7	n/a	n/a
3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI). (*Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup)	82 orang (jumlah kasus)	125 orang(jumlah kasus)	112 orang (jumlah kasus)	48 orang (jumlah kasus)	117,65
3,1	Pada tahun 2030, mengurangi	3.1.2*	Persentase perempuan pernah	94,06	79,5	60,24	69,84	81,43



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.		kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.					
3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	3,88	17,92	6 orang (0,027)	0,05 (11 orang)	n/a
3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan jj yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	458,38	429,46	219 orang (4,28)	250 (orang)	6,5
3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	0,23	0,35	225	7,16 (334 orang)	320
3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	77,79	82,6	92,11	92.68	n/a
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0,01	0,01	0,23	0,32	0,38



	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.							
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. (*Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk))	135	86	178,2	278,5	281,5
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang. (Angka kejadian Malaria Kasus/100.000)	0,05 (5/100.000)	0,04 (4/100.000)	0,27	0,34	0,41
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	100	100	n/a	n/a	n/a
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	1	1	n/a	n/a	n/a



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.							
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	1	1	n/a	n/a	n/a
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun. (*Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Merokok)	n/a	9,1	37,7	38,76	37,93
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	n/a	28	n/a	10,77	n/a
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	n/a	21,8	n/a	n/a	n/a
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	n/a	0,2	n/a	n/a	n/a
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang	1	1	n/	n/a	n/a



	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.		menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.					
3,5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkotika.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3,5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	67,05	67,1	n/a	n/a	n/a
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	70,67	67,1	71,32	72,39	73,21
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	28,72	29,73	30,93	32,16	24,46



	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	49/1000	49/1000	49/1000	36/1000	36,36/1000
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	2,85	2,85	2,3	2,45	2,33
3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	63,22	73,2	n/a	n/a	n/a
3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	63,22	n/a	n/a	n/a	n/a



	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.							
3,9	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	n/a	9,1	n/a	n/a	n/a
3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	n/a	n/a	37,7	38,76	37,93
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang,	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	n/a	n/a	0,18	1,19	n/a



	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.							
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. (*Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Kemampuan Membaca dan Menulis)	n/a	n/a	98,77	99,28	n/a
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	97,4	n/a	100	100	100
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	77	n/a	100	100	100
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	105,66	105,66	98,58	106,54	101,8
4,1	Pada tahun 2030, menjamin	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK)	115,11	115,11	79,66	99,6	102,87



	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.		SMP/MTs/ sederajat.					
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	7,51	n/a	7,53	7,83	7,84
4,2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	31,18	n/a	85,4	85,4	59,48
4,4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	n/a	n/a	76.08	n/a	75,69
4,5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan	SD = 93,60 % SMP = 74,06 %	n/a	(1) 94,45 (2) 67,13	(1) 97,18 (2) 83,28	(1) 92,75 (2) 87,9



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.		Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.					
4,6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	99,56	n/a	99,14	99,6	n/a
4,6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	99,61	99,56	n/a	n/a	n/a
4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	PAUD = 31,60 % SD = 53,70% SMP = 44,80 % SMA = 40 % SMK = 23,70 % SLB = 53,5 %	n/a	61	n/a	n/a
5,1	Mengakhiri segala bentuk	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a



	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.		responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.					
5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	n/a	n/a	0,010646	n/a	n/a
5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. (*Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu)	100	100	100	100	100
5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	0,66	0,66	n/a	n/a	n/a
5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur	19	19	19,01	19,01	19,09



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.		25-49 tahun. (*Rata-rata usia kawin pertama wanita)					
5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	49/1000	49/1000	49/ 1000	36/ 1000	36,36/1000
5,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	18	20	1,6	1,6	10
5,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	38,32	44,23	n/a	n/a	n/a
5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	13,5	13,48	13,44	13,13	13,13



	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.							
5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	64	64	n/a	n/a	n/a
5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	66,57	n/a	n/a	n/a	75,55
6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	79,84	81,13	77,35	88,51	90,04
6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	79,84	81,13	77,35	88,51	90,04
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.							
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	66,73	67,32	67,13	67,69	68,11
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	n/a	79,19% (350 desa/kel dari total 442 desa/kel).	n/a	n/a	n/a
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	186	192	455	n/a	n/a
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a



	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.							
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	6,53	7,56	67,2	67,69	68,11
6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6,3	Pada tahun 2030,	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a



	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.							
6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6,4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	n/a	Secara khusus, belum dipunyai Rencana Pengelolaan daerah aliran sungai, pelaksanaan	n/a	n/a	n/a



	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
					pengelolaan dilakukan secara situasional dan kondisiona			
6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	n/a	Telah terbentuk forum FKPDAS (Forum Komunikasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai), kesepakatan dan kesepahaman dilakukan Desember 2020 melibatkan stakeholder	n/a	n/a	n/a
6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Ada	Ada	n/a	n/a	n/a
7,1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	88,5	99,84	n/a	n/a	n/a



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
7,1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7,1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7,1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita (PDRB per kapita)	8,45	-0,25	3,9	5,08	4,94
8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1.(a)	PDB per kapita (PDRB per kapita).	22069111	22014028	23,356	25,346	26,91
8,2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	3,78	2,05	55,5	54,17	n/a



	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	dan padat karya.							
8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	32,79	n/a	n/a	n/a	n/a
8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	29,47	24,01	32,06	24,52	24,9
8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	32,79	n/a	n/a	75,48	75,1
8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.							
8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. (*TPT Kabupaten Garrut)	7,28	8,96	8,68	7,6	7,33
8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2.(a)	Tingkat pengangguran. setengah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
8,6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	3,78	3,95	3,73	4,15	4,43
8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	3889	876	n/a	n/a	n/a



	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.							
8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	2877083	1396148	2152000	4.406.083	3.874.751
8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
8,1	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
8,1	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
8,1	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	keuangan bagi semua.							
9,1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
9,1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	n/a	n/a	n/a	19,2 km	19,2 km
9,1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	8,16	n/a	n/a	n/a	n/a



	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.							
9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	8,94	-0,46	5,91	10,56	n/a
9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	28,02	n/a	n/a	n/a	n/a
9,3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
9,3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
9,5	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	n/a	n/a	91,71	n/a	n/a
9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	66,57	n/a	91,71	n/a	n/a
9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	38,47	n/a	n/a	n/a	61,55
10,1	Pada tahun 2030, secara	10.1.1*	Koefisien Gini.	0,352	0,352	0,322	0,302	0,361



	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.							
10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	8,98	9,89	10,65	10,42	9,77
10,2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10,3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	99,64	99,98	n/a	n/a	n/a



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
10,3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Ada	Ada	n/a	n/a	n/a
10,4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	75,39	n/a	n/a	n/a	n/a
11,1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	93,14%	94,10% (577.541 unit dari total rumah sebanyak 613.699 unit)	94,70%	95,02%	95,30%
11,1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
11,3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a



	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.							
11,4	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
11,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	3,32	n/a	178	855	11
11,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	208.63	208.64	185	164,91	147,39
11,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	-	EWS Gempa 1 Unit	13	13	13
						(5 peringatan banjir; 8 peringatan longsor)	(5 peringatan banjir; 8 peringatan longsor)	(5 peringatan banjir; 8 peringatan longsor)
11,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	9052,5	n/a	n/a	n/a	n/a



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.							
11,6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	21,89	n/a	25,66	29,94	31,48
11,6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
11,7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	49,48	n/a	n/a	n/a	n/a
11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. (*Masih dalam proses penyusunan)	Ada	Ada	n/a	n/a	n/a



	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.							
12,4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	n/a	97,18	n/a	n/a	n/a
12,5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	45,33	n/a	1612,08	39.465,93	43.221,59
12,6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
12,7	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
12,8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.		Masyarakat (SPM) dan teregister.					
13,1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Ada	Ada	n/a	n/a	n/a
13,1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	3,32	n/a	178	855	11
15,1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	49,48	n/a	n/a	n/a	n/a
15,3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	27,32	n/a	n/a	n/a	n/a
15,6	Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Ada	Ada	n/a	n/a	n/a



	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	internasional.							
15,9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	100	100	n/a	n/a	n/a
16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area	100	100	n/a	n/a	n/a



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	terkait angka kematian dimanapun.		tempat tinggalnya.					
16,2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan peniksaan terhadap anak.	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	80	80	n/a	n/a	n/a
16,2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan peniksaan terhadap anak.	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	80	80	n/a	n/a	n/a
16,2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan peniksaan terhadap anak.	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	80	80	n/a	n/a	n/a
16,5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	n/a	n/a	77,04	93	
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	91,69	n/a	WTP	WTP	n/a
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	100	100	WTP	WTP	n/a
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	70,8	n/a	B	B	B
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks	65,22	n/a	100	100	100



	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	transparan di semua tingkat.		Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).					
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	88,47	88,47	n/a	n/a	n/a
16,7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	18	20	1,6	1,6	n/a
16,7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	n/a	n/a	13971	n/a	n/a
16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	76,56	80,1	n/a	n/a	n/a
16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40%	n/a	n/a	69,52	78,29	73,86



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	semua, termasuk pencatatan kelahiran.		berpendapatan bawah.					
16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	76,56	80,1	74,08	81,43	81,01
16,1	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
16.b	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	2,7	n/a	2401024,9	n/a	n/a
17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	0,23	n/a	541997,41	n/a	n/a
17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a



	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	pendapatan lainnya.							
17,6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
17,6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
17,8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan,	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	38,47	n/a	n/a	n/a	61,55



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	khususnya teknologi informasi dan komunikasi.							
17,17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
17,17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
17,18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	97,33	n/a	68,71	95,75	96,67
17,18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	92,31	n/a	85,29	91,18	n/a



	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	dan dapat dipercaya, yang terpilih berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.							
17,18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilih berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	100	n/a	n/a	n/a	n/a
17,18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilih berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target.	83,63	83,63	83,63	83,63	83,63



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

	TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	relevan dengan konteks nasional.							
17,19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Ada	Ada	n/a	n/a	n/a
17,19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	120	n/a	91,43	n/a	n/a
17,19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	94,02	n/a	94,02	97,06	96,67

sumber : diolah Bappeda 2024

Berdasarkan kewenangan Kabupaten yang dibandingkan dengan target dan indikator TPB sesuai Perpres 59/2017 yaitu 220 indikator. Berdasarkan pembagian kewenangan dan kekhususan indikator terkait kondisi geografis, terdapat 184 indikator TPB yang relevan bagi Kabupaten Garut. Dalam analisis ini, capaian setiap indikator TPB di Kabupaten Garut dibandingkan dengan target nasional tahun 2019 (dalam Lampiran Peraturan Presiden RI No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB).

Berdasarkan data capaian tahun 2022 dari 1184 indikator TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten Garut 47,83 % Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional (SS), 21,74 % Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional (SB), 23,91 % Tidak Ada Data (N/A) dan 6,52% Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional (BB).

Kategori “telah mencapai target” dan “belum mencapai target” diberikan pada indikator yang telah dilaksanakan dengan capaian yang dibandingkan dengan target nasional sebagaimana tercantum pada Perpres 59 Tahun 2017. Sementara indikator “belum dilaksanakan” merupakan indikator yang tidak sampai saat ini belum dilaksanakan atau target capaiannya belum terakomodir dalam pelaksanaan program kegiatan di RPJPD Kabupaten Garut. Kategori “tidak ada data” diberikan pada indikator yang tidak tersedia data capaiannya.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, dilakukan telaahan terhadap hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2023 dan tahun berjalan 2024, serta realisasi RPJMD.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 36 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 yang diperbaharui dengan Peraturan Bupati nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Keseluruhan rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Garut. Dari evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, menunjukkan gambaran sebagai tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.



Realisasi anggaran RPJMD tahun 2023 mencapai 70,02 % dibandingkan dengan pagu indikatif program RPJMD. Hal ini sangat dipengaruhi oleh validnya pagu indikatif program yang dimuat dalam RKPD. Realisasi juga dipengaruhi oleh konsistennya kegiatan dalam RKPD dianggarkan dalam APBD. Realisasi anggaran RPJMD Kabupaten Garut s/d Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.88.
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program
Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
Sampai Triwulan IV Tahun 2023

No.	Nama Urusan	Target RPJMD pada Tahun 2023	Realisasi RPJMD (%)	Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.780.698.003.145	80,02%	3.025.323.746.710
1	1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.466.231.000.000	112,24%	1.645.763.402.666
2	1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	839.115.003.145	95,40%	800.539.958.709
3	1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	926.376.000.000	42,63%	394.880.389.128
4	1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	437.866.000.000	24,01%	105.113.245.755
5	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	59.619.000.000	85,35%	50.887.323.171
6	1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	51.491.000.000	54,65%	28.139.427.281
	2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	597.121.841.099	75,63%	451.610.798.949
1	2.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	34.534.351.129	46,92%	16.203.881.011
2	2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.885.000.000	124,81%	4.848.870.800
3	2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	26.541.000.000	65,47%	17.376.276.001
4	2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	500.000.000	167,67%	838.357.050
5	2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	153.650.000.000	36,36%	55.871.903.535
6	2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	23.003.000.000	98,69%	22.702.775.237
7	2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	24.943.000.000	161,15%	40.194.465.914
8	2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan	36.005.000.000	106,61%	38.384.063.400



No.	Nama Urusan	Target RPJMD pada Tahun 2023	Realisasi RPJMD (%)	Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Keluarga Berencana			
9	2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	86.522.900.000	103,19%	89.285.448.086
10	2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	31.336.000.000	53,64%	16.808.106.055
11	2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	10.618.589.970	121,83%	12.936.465.353
12	2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	11.387.000.000	146,09%	16.635.770.800
13	2.19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	126.493.000.000	74,48%	94.209.371.435
14	2.20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	1.325.000.000	35,68%	472.791.800
15	2.21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	900.000.000	31,05%	279.452.200
16	2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	10.535.000.000	137,72%	14.508.277.703
17	2.23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	13.293.000.000	69,51%	9.240.242.154
18	2.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	1.650.000.000	49,35%	814.280.415
	3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	258.346.366.005	63,27%	163.465.405.137
1	3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	23.342.093.505	124,26%	29.005.278.864
2	3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	7.895.000.000	73,45%	5.799.081.238
3	3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	118.990.272.500	73,61%	87.587.037.183
4	3.29 Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	253.000.000	51,41%	130.064.730
5	3.30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	73.143.000.000	7,81%	5.710.393.199
6	3.31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	34.415.000.000	102,32%	35.214.000.723
7	3.32 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	308.000.000	6,35%	19.549.200
	4. PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	234.497.000.000	66,63%	156.245.968.616
1	4.01 Sekretariat Daerah	152.138.000.000	58,39%	88.826.268.349
2	4.02 Sekretariat DPRD	82.359.000.000	81,86%	67.419.700.267
	5. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.017.211.746.767	78,46%	798.146.984.012
1	5.01 Perencanaan	17.978.000.000	90,32%	16.237.228.382
2	5.02 Keuangan	968.167.746.767	78,94%	764.266.868.207
3	5.03 Kepegawaian	17.842.000.000	76,52%	13.651.917.241
4	5.04 Pendidikan Dan Pelatihan	12.385.000.000	22,18%	2.746.529.452
5	5.05 Penelitian Dan Pengembangan	839.000.000	148,32%	1.244.440.730
	6. PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	44.367.000.000	69,19%	30.697.273.907



No.	Nama Urusan	Target RPJMD pada Tahun 2023	Realisasi RPJMD (%)	Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	6.01 Inspektorat Daerah	44.367.000.000	69,19%	30.697.273.907
	7. KEWILAYAHAN	201.738.000.000	79,41%	160.199.433.082
1	7.01 Kecamatan	201.738.000.000	79,41%	160.199.433.082
	8. PEMERINTAHAN UMUM	21.814.000.000	124,03%	27.056.207.637
1	8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik	21.814.000.000	124,03%	27.056.207.637
	Jumlah	6.155.793.957.016	70,02%	4.812.745.818.050

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 Triwulan IV, yang dikelola dalam SIPD.

Rekapitulasi tingkat capaian kinerja program RPJMD, diperoleh rata-rata tingkat capaian RPJMD sampai Tahun 2023 dibandingkan dengan target periode akhir RPJMD adalah 86,23% untuk target kinerja dan 70,02 % untuk target anggaran.

Tabel 2.89.
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Sampai Triwulan IV Tahun 2023

No.	Nama Urusan	Rata-rata Tingkat Capaian RPJMD S/D Tahun 2023	
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	
	1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	76,72%	55,46%
1	1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	73,72%	81,06%
2	1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	62,87%	71,73%
3	1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	80,64%	43,75%
4	1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	75,85%	26,25%
5	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	88,76%	56,07%
6	1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	68,25%	36,39%
	2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	81,29%	56,60%
1	2.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	80,46%	40,98%
2	2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	86,04%	71,05%
3	2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	85,20%	50,51%
4	2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	70,61%	115,76%
5	2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	97,76%	25,78%
6	2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	79,99%	54,63%
7	2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	65,04%	88,88%
8	2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	73,76%	69,17%



No.	Nama Urusan	Rata-rata Tingkat Capaian RPJMD S/D Tahun 2023	
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	
9	2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	91,39%	62,82%
10	2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	58,32%	25,73%
11	2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	58,35%	80,56%
12	2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	72,20%	65,96%
13	2.19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	82,83%	30,65%
14	2.20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	69,48%	24,34%
15	2.21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	88,44%	30,92%
16	2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	53,01%	94,99%
17	2.23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	86,11%	50,67%
18	2.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	88,82%	35,47%
	3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	73,75%	44,58%
1	3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	62,50%	69,47%
2	3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	74,00%	78,23%
3	3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	60,66%	49,94%
4	3.29 Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	95,11%	32,59%
5	3.30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	30,30%	8,20%
6	3.31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	38,88%	57,66%
7	3.32 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	42,49%	10,66%
	4. PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	91,95%	48,99%
1	4.01 Sekretariat Daerah	58,60%	42,36%
2	4.02 Sekretariat DPRD	77,11%	55,62%
	5. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	94,68%	58,80%
1	5.01 Perencanaan	94,50%	63,72%
2	5.02 Keuangan	90,54%	60,14%
3	5.03 Kepegawaian	90,62%	61,86%
4	5.04 Pendidikan Dan Pelatihan	88,01%	35,50%
5	5.05 Penelitian Dan Pengembangan	78,80%	71,43%
	6. PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	59,76%	53,09%
1	6.01 Inspektorat Daerah	59,76%	53,09%
	7. KEWILAYAHAN	91,63%	86,65%
1	7.01 Kecamatan	91,63%	86,65%
	8. PEMERINTAHAN UMUM	98,32%	74,38%
1	8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik	98,32%	74,38%
	Jumlah	86,23%	70,02%

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil RKPD Triwulan IV Kabupaten Garut Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.



Tingkat capaian program RKPD Tahun 2023 menunjukkan secara rata-rata adalah 92,69 % untuk target kinerja, dan 93,41 % untuk target anggaran. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Tabel 2.90.
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program
RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023
Sampai Triwulan IV Tahun 2023

No.	Nama Urusan	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023	
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	
	1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	89,69%	99,61%
1	1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	65,64%	91,55%
2	1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	77,53%	100,46%
3	1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	95,72%	99,90%
4	1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	99,55%	104,30%
5	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	98,53%	99,56%
6	1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	95,63%	101,09%
	2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	91,04%	96,29%
1	2.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	88,04%	80,69%
2	2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	95,33%	95,51%
3	2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	96,01%	119,61%
4	2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	59,99%	134,49%
5	2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	88,59%	95,64%
6	2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	86,55%	81,51%
7	2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	99,03%	100,41%
8	2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	99,41%	100,81%
9	2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	98,04%	96,96%
10	2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	92,11%	90,53%
11	2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	91,91%	96,95%
12	2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	98,32%	93,88%
13	2.19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	87,54%	93,11%
14	2.20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	79,86%	79,86%
15	2.21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	96,81%	96,81%
16	2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	100,00%	104,05%

No.	Nama Urusan	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023	
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	
17	2.23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	91,56%	83,35%
18	2.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	89,68%	89,06%
	3 Urusan Pemerintahan Pilihan	91,26%	78,09%
1	3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	90,78%	95,27%
2	3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	98,12%	62,95%
3	3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	93,87%	94,83%
4	3.29 Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	97,01%	97,01%
5	3.30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	96,38%	44,63%
6	3.31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	90,03%	86,60%
7	3.32 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	70,00%	48,56%
	4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	97,21%	97,68%
1	4.01 Sekretariat Daerah	99,59%	100,82%
2	4.02 Sekretariat DPRD	94,83%	94,54%
	5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	94,88%	96,67%
1	5.01 Perencanaan	96,02%	94,70%
2	5.02 Keuangan	97,38%	96,46%
3	5.03 Kepegawaian	88,46%	88,45%
4	5.04 Pendidikan Dan Pelatihan	90,05%	90,05%
5	5.05 Penelitian Dan Pengembangan	100,00%	113,89%
	6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	87,55%	92,95%
1	6.01 Inspektorat Daerah	87,55%	92,95%
	7 Unsur Kewilayahan	93,77%	92,92%
1	7.01 Kecamatan	93,77%	92,92%
	8 Unsur Pemerintahan Umum	98,33%	101,73%
1	8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik	98,33%	101,73%
	Jumlah	92,69%	93,41%

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 Triwulan IV, yang dikelola dalam SIPD.

Evaluasi terhadap hasil RKPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 sampai dengan triwulan IV, dengan kendala umum yang dihadapi sebagai berikut:

1. Masih belum lengkapnya informasi dalam evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah, terutama yang belum memuat faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan ataupun realisasi target kinerja;

2. Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah yang terlambat dilaporkan ke Bappeda sehingga memperlambat pelaporan kepada Provinsi.

Beberapa faktor penghambat pencapaian kinerja hasil Evaluasi RKPD Tahun 2023, sampai dengan triwulan IV, antara lain :

- Program RKPD yang telah ditetapkan hanya sebagian yang dilaksanakan dalam APBD masih terdapat program RKPD yang tidak terakomodir dalam APBD;
- Pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah;
- Pengendalian internal di masing-masing perangkat daerah belum dilaksanakan secara optimal sehingga mempengaruhi terhadap target capaian organisasi;
- Belum tercapainya beberapa target tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
- Masih rendahnya realisasi kinerja sampai triwulan IV Tahun Anggaran 2023 diantaranya masih berlangsungnya proses pengadaan barang dan jasa, kegiatan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih dalam proses persiapan pelaksanaan;
- Keterlambatan penyampaian laporan triwulan capaian kinerja dari Perangkat Daerah.

Sedangkan Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja hasil evaluasi RKPD Tahun 2023, sampai dengan triwulan IV, antara lain :

- Tersedianya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur;
- Adanya dukungan pendanaan yang bersumber dari APBN, bantuan keuangan provinsi jawa barat sehingga mendorong pencapaian target kinerja perangkat daerah;
- Tingginya komitmen organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut untuk meningkatkan target kinerja;

Evaluasi terhadap realisasi RPJMD sampai tahun 2023 diantaranya dilakukan melalui pengukuran kinerja tujuan terhadap 5 (lima) tujuan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dengan menggunakan sebanyak 11 indikator tujuan pembangunan, dengan ringkasan pengukuran pencapaian kinerja indikator tujuan untuk setiap misi RPJMD Tahun 2019-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.91.

Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan Perubahan RPJMD Tahun 2023

TUJ MISI/TUJUAN AN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	REALISASI 2023	TARGET 2023	% Capaian	Keterangan	Status Capaian
Visi: GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA							
Misi 1: Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya							
1.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Indeks kesalehan sosial masyarakat	Kategori	84,49 (Baik)	Baik	100	Mencapai Target	√
	2. Indeks Kesehatan	Poin	80,11	79,83 - 80,03	100,23	Mencapai Target	√
	3. Indeks Pendidikan	Poin	59,91	60,46 - 62,35	97,56	Tidak Mencapai Target Tapi Meningkat	▲
	4. Jumlah Penduduk Miskin	Ribu jiwa	260,48	209,17- 212,17	76,36	Tidak Mencapai Target	▲
	5. Persentase penduduk bekerja	%	92,67	92,49-92,69	100,09	Mencapai Target	√
Misi 2: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah Disertai Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih							
2.1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme dalam pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	B	B	100	Mencapai Target	√
Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemandirian infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang							
3.1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas	1. Indeks Daya Saing Infrastruktur	%	83,17	91,71	90,69	Tidak Mencapai Target Tapi Meningkat	▲
3.2. Terwujudnya Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari dan Berkelanjutan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	66,89	60,75	110,11	Mencapai Target	√
	2. Indeks Risiko Bencana	Poin	147,39	197	125,18	Mencapai Target	√
Misi 4: Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan							
4.1. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,94	4,59 - 5,51	97,82	Tidak Mencapai Target	x
	2. Indeks Daya Beli	Poin	65,83	66,96 - 67,63	97,82	Tidak Mencapai Target Tapi Meningkat	▲

Sumber : BPS, dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD.

Keterangan: Target mengacu pada perubahan RPJMD 2019-2024 dan RKPD 2023

Tingkat pencapaian terhadap 11 (sebelas) indikator tujuan yang telah ditetapkan pada RKPD Tahun 2023, menunjukkan sebanyak 6 (enam) indikator



atau 54,54 % telah mencapai target, yaitu, indeks kesehatan, indeks reformasi birokrasi, indeks resiko bencana dan indeks kualitas lingkungan hidup, persentase penduduk bekerja; sebanyak 4 (empat) indikator atau 36,36% tidak mencapai target tetapi lebih baik dari tahun sebelumnya, yaitu indeks pendidikan dan indeks daya beli sedangkan 1 (satu) indikator lainnya belum dapat terukur.

Pengukuran kinerja sasaran dilakukan terhadap 16 sasaran strategis dengan menggunakan 23 indikator yang ditetapkan dan dokumen perjanjian kinerja Tahun 2023, dengan ringkasan pengukuran pencapaian kinerja indikator sasaran strategis untuk setiap misi RPJMD Tahun 2019-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.92.
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perubahan RPJMD
Tahun 2023

MISI/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI 2022	REALISASI 2023	TARGET 2023	% CAPAIAN
Misi 1: Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya						
1.1.1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	Indeks kesalehan sosial masyarakat	Kategori	Baik	84,49 (Baik)	Baik	100
1.1.2. Meningkatnya harapan hidup masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,85	72,07	71,89 - 72,02	100,15
1.1.3. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	1. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,83	7,84	8,08 - 8,58	94,12
	2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,15	12,16	12,07 - 12,15	100,41
1.1.4. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	1. Persentase penduduk miskin	Tahun	10,42	9,77	7,66 - 7,77	73,36
	2. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,6	7,33	7,31 - 7,51	101,08
1.1.5. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,86	0,84	1,1	123,64
Misi 2: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah Disertai Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih						
2.1.1. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik (83,81)	Baik	100
2.1.2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Kategori	B	n/a	A	n/a
	2. Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori	BB	BB	BB	100
	3. Nilai Evaluasi LPPD	Kategori	Tinggi	Tinggi (3,44962)	Sangat Tinggi	n/a
Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang						



MISI/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI 2022	REALISASI 2023	TARGET 2023	% CAPAIAN
3.1.1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	Persentase kemandapan jalan	%	51,42	55,25	55,27	99,96
3.1.2. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	%	100	100	98,81	101,2
3.1.3. Meningkatnya pemenuhan akses layanan sumber air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan	1. Cakupan air minum layak	%	88,51	90,04	90,74	100
	2. Cakupan sanitasi layak	%	67,69	68,11	68,53	100
3.1.4. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan permukiman	Luas Kawasan permukiman layak huni	Ha	6,825	6.936	6.784	102,24
3.1.5. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir	1. Persentase Luas Areal Yang Terlayani Oleh Jaringan Irigasi	%	82,7	83,43	84	98,85
	2. Persentase penurunan luas genangan air	%	60	27,5	25	90,00
3.2.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	70,75	66,89	60,75	110,11
3.2.2. Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana	Poin	164,91	147,39	197	125,18
Misi 4: Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan						
4.1.1. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	83,1	91,7	81	113,21
4.1.2. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	PDRB Per Kapita	Juta Rp	25,346	26,91	24,33-24,49	110,26
4.1.3. Meningkatnya realisasi investasi daerah	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Triliun Rp.	1,165	1,356	2,12-2,13	120,53

Sumber : BPS, dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD.

Keterangan: Target mengacu pada perubahan RPJMD 2019-2024 dan RKPD 2023

Tingkat pencapaian terhadap 23 (dua puluh tiga) indikator sasaran yang telah ditetapkan pada RKPD Tahun 2023, menunjukkan sebanyak 16 (Enam belas) indikator atau 69,56% telah mencapai target.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Secara teoritik, perumusan rencana kerja terlebih dulu diawali oleh proses analisis terhadap permasalahan yang muncul atau diperkirakan akan terjadi dan berpengaruh terhadap dinamika pencapaian pembangunan daerah, oleh karenanya perumusan masalah yang telah, sedang maupun yang akan dihadapi menjadi sebuah hal yang tidak boleh terlewatkan, agar senantiasa dapat terjaga korelasi yang positif antara pembangunan daerah dan kebijakan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang diharapkan.

2.3.1 Permasalahan Pokok

Tabel 2.93.
Identifikasi Permasalahan Pokok Daerah

No	Permasalahan Pokok	Analisa
1	Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran	Masih tingginya angka kemiskinan pada tahun 2023 yang berada pada angka 9,77% masih belum mampu mencapai target yang telah di tentukan pada RPJMD Tahun 2019-2024, baru dapat mencapai 73,36% dari target yang telah ditetapkan. Dari segi jumlah penduduk miskin Kabupaten Garut masih memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup banyak yakni 260.480 jiwa realisasi ini hanya mampu mencapai 76,36% target pada tahun 2023. Garis kemiskinan (GRK) Kabupaten Garut masih menjadi yang terendah dibandingkan Kabupaten / Kota lainnya di Jawa Barat yakni berada pada nilai Rp 367.681,- per kapita per bulan pada tahun 2023 Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai nol persen pada tahun 2024. Kabupaten Garut memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem yang perlu di intervensi sejumlah lebih dari 82,17 ribu penduduk (berdasarkan data BPS). Dalam bidang ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Garut Tahun 2023 masih berada pada angka 7,33% dan jika dibandingkan dengan Tahun 2022 hanya mengalami penurunan

No	Permasalahan Pokok	Analisa
		sebesar 0,27% saja (7,6%).
2	Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial	Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara untuk berkehidupan layak yang memiliki target 100% disetiap jenis pelayanan. Sampai tahun 2023, Capaian pelayanan dasar SPM Pendidikan masih dibawah standar yang ditetapkan. Seluruh jenis pelayanan pada bidang pendidikan seharusnya mencapai 100 tidak dapat mencapai target tersebut, diantaranya jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD sebesar 91,55%, kemudian untuk indikator jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan baru dapat mencapai 91,1% dan untuk indikator jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/SMP) sebesar 96,03%.
		Mayoritas Capaian pelayanan dasar SPM kesehatan pada tahun 2023 belum mampu mencapai target dan kisaran pencapaian pelayanan dasar berada pada diatas 90% hingga 100% dan cenderung mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022.
		Capaian pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum pada tahun 2023, masih belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan yakni cakupan sanitasi layak yang baru mencapai 68,11 % Kabupaten Garut masih menghadapi permasalahan kapasitas infrastruktur pengelolaan air limbah yang masih rendah dan belum berorientasi pada pengelolaan limbah skala kawasan dan cakupan air minum layak yang baru mampu mencapai 90,04 % masih rendahnya kualitas air baku dan tidak meratanya kuantitas dan ketersediaan air baku menjadi salah satu persoalan yang menyebabkan belum mampunya indikator cakupan air minum layak mencapai 100% dari target yang telah ditentukan. Persoalan lain terkait dengan penyelenggaraan pekerjaan umum dan penataan ruang yakni persentase kemitampan jalan kabupaten yang baru mencapai 55,25% hal ini terjadi akibat kelengkapan jalan seperti



No	Permasalahan Pokok	Analisa
		drainase yang masih belum optimal, pemeliharaan jalan dan masih rendahnya kualitas konstruksi, permasalahan jalan yang belum mantap masih ditemui di area perkotaan dan perdesaan. Pesatnya pembangunan di Kabupaten Garut khususnya di wilayah perkotaan mengakibatkan genangan hingga terjadinya banjir di wilayah perkotaan, hal ini diakibatkan oleh pembangunan yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan air. Pembangunan yang tidak diiringi oleh perbaikan saluran drainase, pengelolaan sampah serta keterbangunan ruang terbuka hijau menjadikan aliran <i>run off</i> bahkan banjir tidak dapat terhindarkan ketika terjadinya hujan. Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Garut yakni 23.071 unit dan kawasan kumuh perkotaan maupun perdesaan (86,75 Ha) serta kawasan permukiman yang masih belum dilengkapi dengan PSU. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau juga masih rendah hanya mencapai 12,3%. Permasalahan sosial yang masih di hadapi oleh Kabupaten Garut yakni Program perlindungan sosial khususnya program jaminan kesehatan nasional (JKN) belum mampu menjangkau seluruh masyarakat miskin maupun masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Validitas data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Garut masih belum optimal.
3	Rendahnya daya beli masyarakat, nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya	Kabupaten Garut berada di peringkat 25 atau 2 terbawah dari total 27 kabupaten/kota di Jawa Barat indeks pengeluaran Kabupaten Garut berada pada nilai 65,83 pada tahun 2023, berada jauh dari capaian Provinsi Jawa Barat (74,92) dan Nasional (74,45). Pencapaian pengeluaran per kapita tahun 2023 sebesar Rp 8,685 juta. Capaian pengeluaran per kapita tahun 2023 masih terpaut Rp 3,10 juta dari capaian Jawa Barat (Rp 11,695 juta) dan masih terpaut Rp 3,214 juta dari capaian Nasional (Rp 11,899 juta).



No	Permasalahan Pokok	Analisa
		Meskipun sektor pertanian menjadi kontributor tertinggi terhadap PDRB Lapangan usaha Kabupaten Garut yakni sebesar 37,35% namun masih ditemui berbagai permasalahan diantaranya nilai tambah pertanian pada level petani masih rendah, harga komoditas pertanian di Kabupaten Garut tidak stabil dan kurangnya kepastian pasar produk pertanian dan konsumsi produk pertanian oleh masyarakat lokal masih cenderung kurang. Masih rendahnya nilai tambah pada sektor perikanan dan peternakan diantaranya dilatarbelakangi oleh usaha perikanan dan peternakan masih dikelola sebagai usaha sampingan, intensifikasi budidaya mina padi belum dikelola dengan baik, masih rendahnya akses permodalan untuk kelompok peternak, hingga masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak.
		Nilai tambah ekonomi sektor pariwisata masih terbentur dengan karakteristik atraksi pariwisata yang masih homogen, kurangnya promosi pariwisata, aksesibilitas relatif kurang memadai, durasi tinggal wisatawan masih singkat, dan moda transportasi untuk mencapai objek wisata masih minim, serta masih minimnya sarana prasarana pariwisata dan pemahaman wisata di kalangan pelaku usaha maupun masyarakat.
4	Pembangunan antar wilayah belum merata	Dengan jumlah wilayah mencapai 3.107,05 km², dan secara administratif terbagi menjadi 42 kecamatan. Dalam bidang infrastruktur jalan, tingkat kemantapan jalan (jalan kabupaten dan jalan desa) pada tahun 2023 mencapai 55,25% dengan kondisi jalan mantap sepanjang 2.155,86 Km jalan rusak ringan sepanjang 745,66 Km dan rusak berat 1.000,48 Km dan mayoritas panjang jalan rusak baik ringan maupun berat di dominasi oleh jalan desa, berdasarkan data pada tahun 2023 terdapat 1000,48 Km jalan desa dengan kondisi rusak berat dan 709,85 dengan kondisi rusak ringan. Cakupan rumah tinggal bersanitasi layak sebesar 68,11 dan cakupan air minum



No	Permasalahan Pokok	Analisa
		layak sebesar 90. Belum terlayannya seluruh luas areal pertanian oleh irigasi teknis di Kabupaten Garut baru mencapai 83,43 %.
		Seiring peningkatan jumlah penduduk dan aktifitas masyarakat, perlu diimbangi dengan penyediaan infrastruktur daerah yang berkualitas secara merata untuk mendorong tumbuhnya perekonomian daerah, terlebih lagi dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, strategi untuk mengurangi jumlah kantong kemiskinan salah satunya adalah melalui penyediaan infrastruktur daerah untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya.
5	Kawasan Tertib Lalu lintas masih terganggu dengan aktifitas PKL	Pada Kawasan Perkotaan atau yang masih termasuk kedalam kawasan tertib lalu lintas masih ditemui dan ditempati oleh para PKL yang berjualan dan mengganggu hak pejalan kaki serta memberikan kesan kumuh dan tidak tertata kawasan ini berada di wilayah Jl. Ahmad Yani sepanjang 1,067 Km.
6	Tingginya angka kriminalitas, kejahatan seksual, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta lunturnya kultur sosial.	Pada tahun 2.132 kasus, yang paling banyak adalah pencurian 1.114 kasus, penipuan 237, kemudian kekerasan seperti penganiayaan dan pengeroyokan 352 kasus, dilanjut penggelepan 100 kasus dan perlindungan anak 98 kasus. Kasus kejahatan yang terjadi pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun 2022 yang hanya 574 kasus.
		Seiring perkembangan globalisasi, telah mendorong perubahan sosial budaya masyarakat. Globalisasi telah membawa dampak positif pada kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, maupun ekonomi masyarakat. Namun pada sisi lain, terjadi pula dampak negatif kemunduran nilai sosial budaya masyarakat yang menyebabkan mulai pudarnya budaya Indonesia dalam proses tata sosial dalam masyarakat. Terjadi pula dampak negatif kemunduran nilai sosial budaya masyarakat yang menyebabkan mulai pudarnya budaya Indonesia dalam proses tata sosial dalam masyarakat. Seiring masuknya budaya asing, beberapa kasus dampak negatif perubahan sosial budaya masyarakat diantaranya menurunnya



No	Permasalahan Pokok	Analisa
		budaya gotong royong yang saat ini mulai luntur digantikan dengan budaya “individualis”, maraknya tawuran, kekerasan, dan rusaknya moral generasi muda. Meningkatnya persaingan hidup dan menurunnya interaksi sosial dengan lingkungan sekitar, mendorong menurunnya nilai kemanusiaan gotong royong, rasa kesetiakawanan sosial dan meningkatnya kesenjangan sosial. Kemudahan akses ke dalam berbagai platform media sosial dengan menggunakan handphone maupun komputer, membuat berbagai tayangan atau konten yang memberikan dampak buruk mudah sekali diakses, pembatasan dan pengawasan penggunaan media sosial belum dilaksanakan dengan baik utamanya pembatasan bagi pengguna di bawah umur. Maraknya berbagai kasus perundungan juga tidak dapat terhindarkan.
7	Rendahnya kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan tingginya resiko bencana	Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dilaksanakan dengan sasaran terlaksananya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sampai tahun 2023, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan mencapai 66,89 poin, capaian ini menurun cukup signifikan dari capaian pada tahun 2022 yang mencapai 70,75 hal ini menunjukkan terdapat penurunan kualitas lingkungan di Kabupaten Garut pada Indeks Kualitas Air (IKA) 47,62. Sementara itu, dalam upaya mewujudkan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman, perkembangan kinerja pelayanan pengelolaan persampahan dihadapkan pada permasalahan Tingkat Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang baru mencapai 31,48%. Dalam hal pengelolaan sampah ini, Kabupaten Garut baru memiliki 1 (satu) TPA yang beroperasi yaitu TPA Pasir Bajing yang berada di Kecamatan Banyuresmi baru 9 Kecamatan di wilayah perkotaan yang terlayani oleh penanganan persampahan, dan sampah yang berasal dari pasar-pasar di wilayah garut selatan dan utara masuk di TPA Pasir Bajing. Belum optimalnya partisipasi masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah dimulai dari hulu melalui pola 3R (Reduce,



No	Permasalahan Pokok	Analisa
		Reuse, Recycle), terbatasnya kendaraan angkut sampah untuk meningkatkan pelayanan persampahan khususnya daerah perkotaan, perlunya penataan areal TPA Pasir Bajing serta adanya areal cadangan untuk TPA pada masa yang akan datang. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, masih rendahnya pengelolaan limbah serta masih kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan menjadi kendala dalam peningkatan kualitas lingkungan.
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang pada tahun 2023 telah mencapai 83,92%. Beberapa permasalahan yang masih ditemui dalam pemanfaatan fungsi tata ruang adalah seperti alih fungsi lahan dari pertanian ke fungsi lahan non pertanian, penggunaan badan jalan untuk kegiatan sektor informal, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan kebijakan pemanfaatan ruang perlu ditindaklanjuti melalui penetapan peraturan daerah zonasi pemanfaatan ruang maupun pengaturan penerbitan perizinan.
		Sementara itu, Kondisi wilayah Kabupaten Garut yang mempunyai karakteristik pegunungan dan berbukit-bukit, memiliki curah hujan yang tinggi serta berada pada jalur gempa tektonik, dan perairan pantai selatan yang merupakan daerah lempengan lapisan bumi menjadikan Kabupaten Garut sebagai kawasan rawan bencana, diantaranya sebagai kawasan rawan bencana gunung api, gerakan tanah, tsunami, abrasi dan tanah longsor. Dari segi kebencanaan, Kabupaten Garut memiliki potensi resiko bencana yang tinggi, dengan jumlah kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan bencana gerakan tanah (terdiri dari kawasan yang berada pada zona kerentanan gerakan tanah menengah dengan luas kurang lebih 37.629 hektar dan zona kerentanan gerakan tanah tinggi dengan luas kurang lebih 7.207 hektar, terletak di seluruh kecamatan), kawasan rawan bencana gunung api (terdiri dari KRB III Bahaya Jatuhan dan Bahaya Aliran dengan luas kurang lebih 1.090 hektar,

No	Permasalahan Pokok	Analisa
		KRB II Bahaya Aliran yang berada pada KRB II Bahaya Jatuh dengan luas kurang lebih 493 hektar, dan KRB I Bahaya Aliran dengan luas kurang lebih 1.384 hektar), dan kawasan rawan bencana banjir (terdiri dari kawasan terdampak banjir bandang dengan luas kurang lebih 63 hektar).
8	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi, kualitas dan akses pelayanan publik.	Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 nilai indeks Reformasi Birokrasi cenderung mengalami penurunan 0,49 poin menjadi 68,50 Poin. Berikut merupakan catatan pada evaluasi RB tahun 2023 meliputi RB General dan RB Tematik : 1. RB General a) Penetapan target atas Kegiatan Utama belum sepenuhnya didasarkan pada baseline tahun sebelumnya dan target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpanrb nomor 739 Tahun 2023); b) Penetapan target atas Output belum sepenuhnya didasarkan pada target Sasaran Kegiatan Utama; c) Rencana Aksi belum sepenuhnya didukung dengan anggaran yang memadai; d) Terdapat Sasaran strategis dan indikator kinerjanya tidak berorientasi hasil, Terdapat Indikator Program, Kegiatan tidak berorientasi hasil, Indikator output pada Sub Kegiatan tidak tepat, Implementasi belum sesuai dengan kebijakan; e) Kinerja penerapan manajemen risiko belum digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada seluruh UPR tingkatan operasional, strategis OPD dan Strategis Pemda secara memadai; f) Upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko belum memadai, Struktur MR belum berjalan optimal, Efektivitas RTP belum dilakukan penilaian Pembelajaran anti korupsi belum dilaksanakan secara terjadwal dan belum dilakukan di seluruh OPD, Laporan Audit Investigatif belum ada perbaikan pengendalian, Identifikasi Risiko Kecurangan belum



No	Permasalahan Pokok	Analisa
		2. RB Tematik a) Perumusan indikator belum memenuhi kriteria SMART dan Cukup; b) Rencana aksi yang disusun belum sepenuhnya secara logis mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah; Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi; c) Rencana aksi belum memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan.
8	Masih rendahnya realisasi investasi daerah (PMA dan PMDN) dan pendapatan daerah.	Belum tersedianya Rencana detil tata ruang yang telah memiliki aspek legal, iklim investasi yang kurang kondusif, belum optimalnya kualitas infrastruktur pendukung investasi serta belum adanya detail kepastian ruang untuk pelaksanaan investasi.

Sumber : Hasil Pengolahan Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD.



2.3.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Dari hasil pelaksanaan evaluasi pembangunan Kabupaten Garut tahun 2023, permasalahan yang perlu diidentifikasi secara lebih cermat, selain mendasarkan diri pada evaluasi kinerja pembangunan daerah pada tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan, juga perlu diperhatikan beberapa hal yang harus mendapatkan fokus dan dikategorikan sebagai permasalahan/hambatan mendasak yang dihadapi dalam setiap urusan pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 2.94.
Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
01.01	Pendidikan					
	Aksesibilitas, mutu dan tata kelola pendidikan dasar dan menengah masih belum optimal/rendah	1	Masih belum memadainya jumlah, kompetensi dan sebaran tenaga pendidik	1	Terbatasnya jumlah guru yang mengajar sesuai kompetensi	Optimalisasi akses, mutu dan tata kelola pendidikan
				2	Rasio guru dan murid masih belum sesuai standar	
				3	Belum meratanya distribusi guru	
		2	Belum optimalnya pencapaian SPM Pendidikan	1	Masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah	
				2	Masih rendahnya Harapan Lama Sekolah	
		3	Keterbatasan aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan	1	Sebaran fasilitas pendidikan belum merata	
				2	Daya tampung sekolah terbatas	
				3	Tingkat kemiskinan masyarakat	
		01.02	Kesehatan			
	Derajat Kesehatan masyarakat masih rendah	1	Tingginya angka AKB dan AKI	1	Masih rendahnya aksesibilitas pelayanan kesehatan Ibu dan Anak sesuai standar	Peningkatan akses layanan kesehatan ibu hamil dan bayi



No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
				2	Belum optimalnya pengelolaan Puskesmas mampu PONED	
		2	Tingginya angka prevalensi stunting	1	Persentase balita gizi buruk masih tinggi (0,094) dan Prevalensi balita gizi kurang masih tinggi (4,24)	Peningkatan cakupan pemantauan tumbuh kembang balita melalui posyandu prima
				2	Masih belum optimalnya kolaborasi dengan SKPD terkait	
		3	Masih kurangnya upaya pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku bersih dan sehat	1	Keterbatasan sumber daya (SDM, sarana dan prasarana, anggaran) terkait STBM	Pemberdayaan masyarakat
				2	Masih belum optimalnya kolaborasi dengan SKPD terkait	
		4	Peningkatan kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular	1	Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian penyakit	Multiple Burden Disease
				2	Perubahan gaya hidup	
				3	Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya imunisasi	Aksesibilitas Pelayanan kesehatan sesuai standar
				4	Ketersediaan vaksin masih belum optimal	
	Pelayanan Kesehatan belum memadai	1	Kuantitas SDM Kesehatan belum sesuai dengan standar	1	Masih kurang serasinya antara kebutuhan dengan pengadaan berbagai jenis SDM Kesehatan	Ketersediaan 9 jenis SDM Kesehatan prioritas terbatas
				2	Kurangnya Pemerataan dalam distribusi SDM kesehatan	
		2	Belum optimalnya kompetensi Tenaga Kesehatan	1	Masih rendahnya anggaran yang disediakan untuk pendidikan dan pelatihan teknis kesehatan dan non kesehatan	Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan non kesehatan masih kurang
		3	Belum terpenuhinya aspek penerima layanan dan aspek mutu minimal	1	Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung capaian mutu layanan dasar SPM	Aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan belum optimal



No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
			layanan dasar pada SPM	2	Belum optimalnya capaian aspek penerima layanan dasar	Keamanan Obat dan Makanan
		4	Belum Optimalnya Edukasi dan Pengawasan Keamanan pada Obat dan Makanan	1	terbatasnya Sumber daya baik SDM , Alat dan Anggaran terkait pengawasan obat dan makanan	
		5	Fragmentasi data; Kesulitan dalam manajemn dan keamanan	1	Masil belum terintegrasinya sistem informasi kesehatan di tingkat puskesmas dan perangkat daerah	Transformasi Teknologi Kesehatan
		6	Pembiayaan kesehatan yang tidak memadai	1	Keterbatasan sumber daya (anggaran)	Jaminan Kesehatan Semesta
				2	Belum semua Masyarakat Miskin sebagai peserta program JKN	
01.03	Pekerjaan umum dan penataan ruang					
	Belum optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah dan pengendalian penataan ruang	1	Rendahnya Kualitas dan kapasitas jalan / kemantapan jalan belum optimal (51,42%)	1	Kerusakan kembali jalan akibat bencana alam dan/atau habisnya umur rencana jalan	Konektivitas antar wilayah dan kemantapan jalan
				2	Kelengkapan jalan seperti drainase belum tersedia dan/ atau belum berfungsi secara optimal pada seluruh ruas jalan	
				3	pemeliharaan jalan belum dilakukan secara menyeluruh	
		2	Masih rendahnya dukungan sektor irigasi	1	Kualitas konstruksi, kerusakan infrastruktur akibat bencana alam	Dampak pengelolaan irigasi terhadap peningkatan produktivitas pertanian
				2	Kinerja OP irigasi belum maksimal	
				3	Ketersediaan air (debit air andalan) semakin menurun	
				4	Pengendalian ruang yang masih rendah dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian	



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
				5	Masyarakat petani pemakai air belum dilibatkan secara optimal dalam pengelolaan jaringan irigasi	
		3	Tingkat pengelolaan air minum masih rendah	1	Laju pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat, keterbatasan/ ketersediaan air yang semakin menurun, belum optimalnya pemeliharaan dan pengelolaan pasca pembangunan, perlindungan sumber-sumber air belum dilakukan secara maksimal	Pemenuhan layanan kebutuhan air minum dengan target <i>universal acces</i> sebesar 100%
		4	Sanitasi layak bagi masyarakat belum optimal	1	Laju pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat (angka BABS masih tinggi), pengelolaan pasca pembangunan belum dilakukan, masih belum dilakukan pengelolaan air limbah berskala kawasan, belum terdapat unit-unit kerja khusus dalam pengelolaan air limbah	Pemenuhan layanan pengolahan air limbah domestik dengan target <i>universal acces</i> sebesar 100%
		5	Genangan air dan Banjir di kawasan perkotaan dan permukiman	1	Kapasitas drainase yang sudah tidak sesuai kondisi debit air akibat <i>run off</i> pada kawasan terbangun semakin tinggi, kawasan/daerah resapan air semakin sempit, masterplan pengendalian banjir belum update secara berkala dan penanganan (rehabilitasi atau pembangunan) sistem drainase belum dilakukan secara menyeluruh baru dilakukan per bagian-bagian (parsial)	Optimalisasi pengelolaan sistem drainase
01.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
	Kualitas kawasan perumahan dan permukiman	1	Masih banyaknya rumah tidak layak huni	1	Taraf hidup masyarakat di Kabupaten Garut masih rendah	Peningkatan kualitas kawasan perumahan



No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
	masih rendah	2	Rendahnya kualitas lingkungan permukiman	1	Kebijakan penanganan kawasan kumuh masih belum optimal	dan permukiman
				2	Semakin tinggi pertumbuhan penduduk dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat	
				3	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan pasca konstruksi setelah serah terima dilakukan	
				4	Adanya konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat, atau antar kelompok masyarakat	
01.05	Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat					
	Pemahaman dan Ketaatan masyarakat terhadap Penegakan Perda dan perkara yang masih rendah	1	Masih terdapat banyak kasus pelanggaran Perda dan perkara di lingkungan masyarakat	1	Belum <i>intensnya</i> pelaksanaan patroli keamanan dan ketertiban ke seluruh jangkauan wilayah	Optimalisasi penegakan perda dan perkara
	Masih banyaknya kasus penyakit masyarakat	1	Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban di lingkungannya	1	Belum optimalnya media sosialisasi penegakkan perda dan perkara	Optimalisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
	Rasio Sumber daya Satpol PP dilihat dari segi kualitas dan kuantitas belum sebanding dengan jumlah penduduk;	1	Belum optimalnya pengamanan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat	1	Keterbatasan jumlah kuantitas dan kualitas SDM serta belum adanya penggunaan teknologi informasi yang digunakan dalam mengatasi keterbatasan tersebut	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP
		2	Belum adanya regulasi khusus terkait kebijakan kepegawaian anggota SATPOL PP yang berstatus non PNS (TKK & TKS)	1	Masih banyaknya anggota SATPOL PP yang berstatus non PNS (TKK & TKS)	



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan		Isu Strategis Urusan
	Belum optimalnya penegakkan trantibum yang beririsan antara tugas SATPOL PP dengan instansi lainnya	1	Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD terkait dan Instansi Vertikal lainnya dalam Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	1	Belum adanya SOP mengenai keterkaitan pelaksanaan penegakan trantibum yang <i>bercrosscutting</i> antara tusi SATPOL PP dengan instansi lainnya	Optimalisasi koordinasi dalam penegakkan trantibum antarstakeholder terkait
	Belum optimalnya pencegahan dan penanganan bencana serta kebakaran	1	Masih tingginya resiko bencana di Kab. Garut	1	Karakteristik geografis dan geologis Kab. Garut yang memiliki kerentanan tinggi terhadap resiko bencana	Optimalisasi pencegahan dan penanganan kejadian bencana serta kebakaran
				2	Keterbatasan dalam penyediaan peralatan dan alat penanggulangan bencana yang dapat menghambat respon cepat dan efektif	
				3	Belum optimalnya sistem peringatan dini	
		2	Belum optimalnya pendekatan pentaheliks dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	1	Kurangnya Integrasi Informasi dan Komunikasi dalam penanganan bencana antarstakeholder	
				2	Belum optimalnya penggunaan dana desa dan sumber pendanaan lainnya dalam penanggulangan bencana	
		3	Belum Optimalnya Pendidikan Kesiapsiagaan bencana	1	Pendidikan dan Kesadaran Kesiapsiagaan bencana dengan keterlibatan langsung masyarakat belum optimal	
				2	Kurang menyeluruhnya pendidikan kesiapsiagaan bencana yang disebabkan karena penyesuaian dengan kapasitas anggaran	
		4	Belum optimalnya sistem informasi kebencanaan	1	Terdapat beberapa aplikasi informasi kebencanaan tetapi terpisah dalam pengaksesan nya	
				2	Belum terintegrasinya sistem informasi kebencanaan	



No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
		5	Belum optimalnya manajemen pra bencana	1	Belum tersedianya dokumen kebencanaan baik data rawan bencana maupun peta rawan bencana berdasarkan jenis bencana	
		6	Belum optimalnya penanganan pasca bencana di 5 sektor	1	Kurangnya koordinasi dan kolaborasi di antara sektor-sektor terkait	
				2	Belum optimalnya rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana	
		7	Belum tercapainya respon cepat pemadam kebakaran	1	Jarak tempuh/jangkauan dari pos pemadam ke kejadian kebakaran	
				2	Belum optimalnya Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dalam response time 15 menit (WMK/Kecamatan/POS Damkar)	
		8	Masih rendahnya kapasitas/ pengetahuan/ kemampuan masyarakat dalam upaya penanganan bencana kebakaran	1	Belum optimalnya penyuluhan/ sosialisasi dan pembentukan relawan kebakaran (Redkar) di lingkungan masyarakat	
				2	Kurangnya pendidikan, sumber daya, akses terhadap peralatan keamanan, serta keterbatasan partisipasi komunitas dan dukungan pemerintah	
		9	Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi kebakaran terpadu (SIKARDU) dalam pemadam kebakaran	1	Kurangnya Fleksibilitas dan Kontrol Internal terkait SIKARDU, biaya berkala cukup tinggi serta Kurangnya Kendali terhadap Pembaruan dan Peningkatan Sistem	
				2	Otoritas pengelolaan sistem masih dimiliki oleh pihak ke 3 dan perlu dilakukan pembayaran secara	



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
					berkala	
		10	Belum optimalnya pemenuhan serta pemeliharaan alat kelengkapan pemadam kebakaran	1	Masih kurangnya sarana prasarana yang berkaitan dengan alat-alat pemadam/ alat pelindung diri & bahan bakar pada saat operasional (mobilitas tinggi) serta pemeliharaan unit	
		2		Keterbatasan anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran		
01.06	Sosial					
	Kemiskinan/ PMKS atau PPKS dan PSKS	1	Tingginya jumlah penduduk miskin dan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS/PPKS)	1	Adanya kesenjangan sosial ekonomi yang besar pada penduduk miskin dan kelompok rentan sehingga sulit untuk meningkatkan taraf hidup penduduk miskin dan kelompok rentan.	Penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS/PPKS)
		1	Penurunan kualitas layanan sosial	1	Keterbatasan sumber daya, termasuk dana, personel, dan fasilitas	
2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					
02.01	Tenaga Kerja					
			Masih banyak LPK yang belum melaksanakan Akreditasi serta terbatasnya bantuan pelatihan untuk Masyarakat miskin yang diselenggarakan di LPK		Pelaksanaan Pembinaan LPK melalui bimtek Akreditasi LPK, Pemberian Program Pelatihan LPK sesuai kejuruan untuk masyarakat miskin	Akreditasi LPK dan pelatihan LPK untuk masyarakat miskin
	Masih rendahnya pencari kerja yang bekerja		Keterbatasan peluang pekerjaan di sektor formal dan informal		Permodalan usaha dan fasilitas dan peralatan pelatihan yang belum sesuai dengan kebutuhan industri	Peluang dan permodalan usaha, serta upgrade skill usaha



No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
					Kurangnya mendapatkan pembinaan dan pelatihan bagi purna PMI	
			Tidak seimbangnya antara jumlah kelulusan dengan peluang kesempatan kerja	1	Jurusan kelulusan tidak sesuai kebutuhan pasar kerja,	Ketidakseimbangan kesempatan kerja dan jumlah lulusan
				2	Pencari kerja belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja	
			Rendahnya pencari kerja yang bekerja di luar kabupaten	3	Rendahnya keberanian pencari kerja untuk bekerja di luar kabupaten	Ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kesempatan kerja
					Kurangnya informasi terkait peluang kesempatan kerja ke Luar Negeri	Pemahaman terhadap pekerjaan di luar negeri
					Rendahnya pemahaman pencari kerja terkait prosedur bekerja di Luar Negeri	
	Kesadaran satuan pendidikan untuk mendirikan BKK masih rendah, Kurangnya memahami Tugas Pokok dan Fungsi BKK		Kurang optimalnya dukungan dari kepala satuan pendidikan atas pendirian BKK di sekolahnya masing-masing, Sarana dan prasarana BKK kurang memadai, Kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh Instansi terkait terhadap kinerja BKK		Keinginan dan kesadaran dari Satuan Pendidikan untuk mendirikan BKK harus didorong dan ditingkatkan	



No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
	Masih kurangnya kompetensi dan keahlian tenaga kerja di Kabupaten Garut yang siap masuk ke dunia kerja sehingga beberapa jabatan tertentu yang berada di level middle manajemen sampai top manajemen di perusahaan besar ditempati oleh tenaga kerja dari luar Kabupaten Garut. Prosentase tenaga kerja perempuan yang masuk ke industri lebih banyak daripada tenaga kerja laki-laki, dikarenakan kurangnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja laki-laki di dunia industri yang ada di Kabupaten Garut.		a. Pendidikan. Tenaga Kerja masih didominasi oleh lulusan SMK dan sederajat karena kebutuhan industri di Kabupaten Garut sebagian besar mengakomodasi lulusan SMA sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan oleh perusahaan. b. Kualifikasi Kesempatan kerja yang ada di dunia industri lebih banyak tersedia bagi tenaga kerja dengan lulusan sekolah setingkat SMA dibandingkan dengan permintaan tenaga kerja lulusan perguruan tinggi, sehingga seringkali tenaga kerja menduduki jabatan di Perusahaan yang tidak sesuai dengan ijazah yang dimiliki. c. Usia Sebagian besar tenaga kerja merupakan usia muda dan fresh graduate (baru lulus) yang langsung memasuki dunia kerja dengan pengalaman yang minimal sehingga seringkali kurang memiliki daya juang dan daya saing dalam bekerja	a. Kondisi dimana tenaga kerja tidak memiliki posisi tawar seringkali menyebabkan pekerja ditempatkan dalam jabatan yang tidak sesuai dengan kualifikasi. b. Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan regulasi ketenagakerjaan menyebabkan banyak pekerja yang tidak mendapatkan jaminan perlindungan dalam bekerja. c. Kurangnya kemampuan perusahaan dalam melaksanakan kebijakan pengupahan sesuai dengan ketentuan menyebabkan tidak terjaminnya kesejahteraan pekerja.	



No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
	a. Upah yang dilaporkan oleh perusahaan tidak sesuai dengan upah yang diterima pekerja sehingga iuran yang dibayarkan tidak sesuai dengan upah yang diterima b. Masih kurangnya pemahaman pemberi kerja dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja sehingga perusahaan dalam memasukan pekerja menjadi peserta BPJS masih dibedakan berdasarkan status pekerja apakah PKWT atau PKWTT. c. Pekerja kurang memahami hak dan kewajiban dalam mendapatkan jaminan sosial sehingga tidak menyadari pentingnya menjadi peserta BPJS untuk melindungi dirinya. dan tidak berani meminta haknya kepada pemberi kerja.		a. Masih adanya perusahaan yang termasuk kedalam kategori Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) baik itu program maupun kepesertaan pekerja. b. Masih banyak pekerja yang belum mendapat jaminan sosial tenaga kerja selama bekerja sehingga pada saat terjadi kasus kecelakaan, kematian atau sakit serta kondisi tidak dapat lagi bekerja pekerja tidak mendapat manfaat jaminan.		Masih kurangnya pemahaman baik pemberi kerja maupun pekerja terhadap hak dan kewajiban masing-masing dalam melaksanakan jaminan sosial tenaga kerja sebagai wujud perlindungan terhadap tenaga kerja.	
	a. Fungsi pembinaan yang belum berjalan maksimal terhadap perusahaan untuk dapat menjalankan peraturan ketenagakerjaan. b. Kurang optimalnya fungsi pengawasan terhadap perusahaan dalam menjalankan peraturan ketenagakerjaan terutama hak-hak normatif bagi pekerja.		a. Terbatasnya SDM Mediator Hubungan Industrial b. Kurangnya pemahaman para pihak yang berselisih terhadap ketentuan peraturan ketenagakerjaan c. Perusahaan yang tidak menjalankan peraturan		Adanya pemisahan kewenangan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan serta tidak seimbang SDM teknis dengan jumlah perusahaan yang ada.	



No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
			ketenagakerjaan d. Pengusaha maupun pekerja tidak memahami mekanisme penyelesaian PHI dan tidak memiliki kemampuan untuk negosiasi.		
	Kurangnya pemahaman pemberi kerja terhadap pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan terutama pemenuhan ketentuan mengenai Sarana Hubungan Industrial di perusahaan.		a. Tidak adanya Peraturan Perusahaan / Perjanjian Kerja Bersama menyebabkan pekerja dan pengusaha tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sehingga mengakibatkan timbulnya perselisihan hubungan industrial, baik itu perselisihan hak, PHK, antar serikat di satu perusahaan maupun perselisihan kepentingan. b. Komunikasi antara pengusaha dan pekerja tidak berjalan efektif karena tidak adanya forum komunikasi berupa Lembaga Kerjasama Bipartit di perusahaan sebagai wadah yang dapat menampung aspirasi dari pekerja. c. Pelaksanaan pengupahan tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan sebagai akibat tidak adanya pedoman	Perusahaan tidak melaksanakan peraturan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku	



No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
			pengupahan yang tertuang dalam Struktur dan Skala Upah		
	b. Kurangnya sosialisasi peran dan fungsi Asosiasi Pengusaha yang dilakukan oleh Apindo kepada pengusaha		a. Kurangnya minat pengusaha menjadi anggota Asosiasi Pengusaha b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak mendapat data dan laporan program kerja yang dilaksanakan Asosiasi Pengusaha	Pelaksanaan peran dan fungsi asosiasi pengusaha yang belum berjalan optimal	
	Masih kurangnya pemahaman pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.		a. Timbulnya perselisihan mengenai keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di satu perusahaan. b. Kurangnya pembinaan mengenai fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dari pengurus kepada anggotanya.	Pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan yang tidak dilaksanakan dan diterapkan oleh pengusaha yang menyebabkan ketidakpuasan bagi pekerja.	
	Regulasi tentang kebijakan pengupahan yang senantiasa mengalami perubahan sehingga formulasi perhitungan penyesuaian upah berganti setiap tahun.		a. Adanya perbedaan kepentingan yang disampaikan oleh masing-masing unsur anggota Dewan Pengupahan Kabupaten. b. Perbedaan pemahaman dan persepsi dalam implementasi peraturan perundangan.	Peran Dewan Pengupahan Kabupaten hanya sebagai pelaksana kebijakan pengupahan yang diterbitkan oleh pusat.	
	a. Masih adanya pengusaha yang membayar pekerja dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).		a. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi UMK sehingga pelaksanaan pengupahan	Kurangnya pemahaman pengusaha dalam melaksanakan kebijakan pengupahan sehingga penerapan upah tidak berjalan sesuai	



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
	b. Belum optimalnya fungsi pengawasan terhadap perusahaan dalam menjalankan kebijakan UMK.		tidak sesuai dengan ketentuan.		ketentuan	
			b. Di Kabupaten Garut perbandingan kategori usaha lebih banyak jenis usaha mikro dan kecil dimana peraturan mengenai UMK harusnya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur kategori perusahaan.			
			c. Kenaikan upah bagi pekerja tidak mempertimbangkan masa kerja sehingga tetap dikenakan upah sesuai kenaikan UMK			
	Belum optimalnya peran LKS Tripartit dikarenakan masih kurangnya kesepahaman dari masing-masing unsur keanggotaan dalam menjalankan fungsinya dimana yang berperan aktif dalam perumusan program kerja masih didominasi oleh unsur pemerintah.		a. Penyusunan program kerja hanya diusulkan oleh unsur pemerintah dengan memperhatikan dukungan anggaran operasional. b. Kurang aktifnya unsur anggota yang lain dalam melaksanakan program kerja. c. LKS Tripartit Kabupaten Garut belum menghasilkan kebijakan ketenagakerjaan yang sesuai dengan peran dan fungsinya.		Kesadaran dan pemahaman masing-masing unsur yang mewakili keanggotaan terhadap peran dan fungsi LKS Tripartit Kabupaten Garut.	
02.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					



No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
	Kesetaraan gender belum optimal	1	Pengarustamaan gender dan keberdayaan perempuan belum optimal	1	Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik	Peningkatan kesetaraan gender
	Pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak belum optimal	1	Penanganan pengaduan, trafficking, kekerasan dan sarana prasarana terhadap perlindungan korban anak dan perempuan belum optimal			Optimalisasi pemenuhan hak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak
		2	Masih terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak			
		3	Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak			
		4	Belum optimalnya penerapan regulasi pro gender dan perlindungan anak			
		5	Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data dan rendahnya partisipasi masyarakat			
02.03	Pangan					
	Distribusi Pangan belum optimal	1	Masih terdapat daerah rentan rawan pangan	1	Pangan belum terdistribusikan dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat	Peningkatan, pemantauan, pengendalian produktifitas pangan dan pemerataan distribusi pangan untuk meminimalisir daerah rentan rawan pangan
	Tingkat produktivitas pangan rendah	1	Terdapat beberapa komoditi pangan penting yang masih didatangkan dari luar	1	Ketersediaan pangan masih tergantung pada komoditi pangan dari import/luar daerah	
		2	Tinggi nya alih fungsi lahan untuk tanaman	1	Masih lemahnya aturan tata ruang untuk mendukung ketahanan	



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
			pangan		pangan daerah	
		3	Terbatasnya sumber daya manusia di sektor pangan	1	Nilai usaha pangan masih tergolong rendah sehingga minat untuk bekerja di sektor ini rendah	
	Diversifikasi jenis pangan	1	Tinggi nya ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras	1	Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan sumber gizi alternatif	
	Belum tercapainya skor pola pangan harapan yang ideal	1	Masih rendahnya konsumsi panganekaragaman pangan masyarakat	1	Belum optimalnya kesadaran konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi seimbang dan aman	Peningkatan diversifikasi pangan sumber daya lokal non beras non terigu
				2	Masih ada daerah yang terindikasi rawan pangan yang menimbulkan kurang gizi terutama gizi buruk bagi balita (Stunting)	Peningkatan pemahaman masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang memenuhi kaidah B2SA
	Masih kurangnya ketersediaan pangan dalam mencapai skor PPH tingkat ketersediaan untuk dikonsumsi perkapita perhari	1	Belum mencukupi nya produksi pangan dalam memenuhi ketersediaan konsumsi perkapita perhari dan diikuti tingginya laju pertumbuhan penduduk	1	Belum meratanya distribusi pangan strategis	Peningkatam sistem logistik pangan dalam pemerataan pemenuhan kebutuhan pangan strategis dari wilayah surplus ke wilayah defisit
	Belum optimalnya penjaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan yang beredar di masyarakat	1	Masih ditemukannya pangan segar asal tumbuhan yang terindikasi tidak aman dari cemaran	1	Kurangnya pengawasan peredaran pangan asal tumbuhan di masyarakat	Peningkatan sertifikasi dan registrasi PSAT, kesadaran masyarakat serta peningkatan pengawasan mutu keamanan pangan
				2	Kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap penjaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	
	Minimnya anggaran dan keterbatasan kewenangan DKP berdasarkan	1	Kurangnya kesadaran dari SKPD terkait untuk menggunakan konsep	1	Kurangnya sosialisasi dan koordinasi tentang pilar ketahanan pangan dan subsistem yang	Integrasi perencanaan pelaksanaan program/kegiatan



No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
	Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021, jika dibandingkan dengan indikator yang perlu diintervensi dalam pembangunan ketahanan pangan dan subsistemnya		ketahanan pangan sebagai dasar dalam melaksanakan program/kegiatan		membentuk sistem ketahanan pangan dengan stakeholder terkait	SKPD terkait ketahanan pangan (crosscutting)
02.04	Pertanahan					
	Belum Optimalnya penyelenggaraan urusan pertanahan guna mendukung kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten Garut	1	Terdapatnya sengketa dan konflik pertanahan	1	kesulitan dalam memperoleh informasi, mengelola dan mengawasi sengketa dan konflik pertanahan	Optimalisasi Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan
		2	Masih minimnya kepemilikan dan legalisasi aset pada masyarakat	1	Belum optimalnya penataan aset dan akses Objek Reforma Agraria di kabupaten Garut	Peningkatan Penataan Aset dan Akses Pertanahan
		3	Belum optimalnya sistem pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	1	Belum optimalnya pemahaman, koordinasi dan anggaran dalam penyelenggaraan pengadaan tanah	Peningkatan pemahaman, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan anggaran
02.05	Lingkungan Hidup					
	Kualitas Lingkungan Hidup Rendah	1	Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	1	Lemahnya pengendalian pencemaran lingkungan	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Kualitas Tutupan Lahan dan Hutan, Kualitas Air, dan Kualitas Udara)
				2	Meningkatnya alih fungsi lahan dan meningkatnya lahan kritis dan kerusakan lingkungan	
				3	Pengelolaan lahan pertanian tidak mempertimbangkan metode konservasi air dan tanah	
				4	Menurunnya kualitas lingkungan pada wilayah hulu DAS Cimanuk dan DAS Cilaki	



No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
				5	Masih tingginya pencemaran pada badan-badan air (sungai, situ/danau, dan lain-lain), terutama Sungai Cimanuk, baik dari limbah industri, usaha/kegiatan, maupun rumah tangga	
				6	Belum optimalnya pengelolaan limbah padat, limbah cair, emisi udara, dan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan oleh berbagai sektor	
				7	Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan limbah	
				8	Masih rendahnya kesadaran masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam upaya pengelolaan lingkungan	
				9	Masih kurangnya kuantitas dan belum optimalnya fungsi ruang terbuka hijau	
				10	Belum optimalnya penegakan hukum bidang lingkungan hidup	
				11	Belum terakreditasinya laboratorium lingkungan yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup;	
				12	Belum tersedianya regulasi di tingkat daerah (peraturan daerah dan peraturan bupati) mengenai pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
				13	Belum tersedianya regulasi di tingkat daerah (peraturan daerah dan peraturan bupati) mengenai perlindungan dan pengelolaan	



No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
					lingkungan hidup	
		2	Belum Optimalnya Pengelolaan Persampahan	1	Masih rendahnya cakupan pelayanan persampahan	Pengelolaan Persampahan
				2	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan belum optimalnya pengelolaan persampahan berbasis masyarakat melalui penerapan pola 3R (reduce, reuse, recycle) dari hulu ke hilir secara efektif dan terpadu	
				3	Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terpadu (TPS, TPA, dan pengangkutan dari hulu ke hilir)	
				4	Masih rendahnya upaya pengurangan sampah pada sumbernya	
				5	Belum tersedianya regulasi (peraturan bupati) mengenai persampahan	
02.06	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
	Cakupan Kesertaan KB MKJP	1	Kualitas kesertaan ber-KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih rendah	1	Kurangnya informasi dan motivasi bagi calon akseptor sehingga banyak pasangan usia subur (PUS) tidak ikut program KB	Peningkatan Kesertaan KB MKJP
				2	Masih banyak calon akseptor yang menentukan pemilihan kontrasepsi non MKJP	
				3	Tingkat partisipasi pria dalam ber-KB masih rendah	
	Problematika angka kelahiran, angka harapan hidup, kepadatan penduduk	1	Jumlah Kelahiran dan Pertumbuhan Penduduk Masih Tinggi	1	Kelahiran (Fertilitas) angka kelahiran berbanding lurus dengan laju pertumbuhan penduduk	Optimalisasi penduduk produktif
				2	Kematian (Mortalitas), angka kematian berbanding terbalik	



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
	Belum optimalnya sinergi kebijakan antara pemerintah daerah kabupaten dengan pemerintah daerah provinsi/instansi vertikal lainnya			3	dengan laju pertumbuhan penduduk Perpindahan Penduduk (Migrasi)	Belum adanya kesepakatan/MOU antara pemerintah daerah dan instansi pemerintah/vertikal lainnya dalam hal koordinasi pelayanan adminduk diluar kewenangan pemerintah daerah kabupaten
		1	Belum optimalnya koordinasi pelayanan adminduk dengan instansi vertikal/diluar kewenangan pemerintah daerah kabupaten (Misal. layanan adminduk ke SMA/SMK/MA karena kewenangannya berada pada pemerintah daerah provinsi dan kementerian agama, sehingga kesulitan dalam disposisi layanan adminduk ke sekolah tersebut)	1	Kewenangan yang diambil alih oleh instansi vertikal/instansi lainnya diluar kewenangan pemerintah daerah kabupaten mempersempit ruang gerak kebijakan pemerintah daerah kabupaten dalam berbagai urusan yang dimiliki	
		2	Belum optimalnya penyediaan sarana prasana pendukung alat rekam kependudukan terutama di wilayah-wilayah yang rawan bencana	2	Tidak adanya rencana pengembangan bersama atau kesepakatan jangka panjang antara pemerintah daerah dan instansi vertikal dalam pelayanan pelayanan adminduk	
		3	Masih banyak masyarakat yang tidak memiliki dokumen kependudukan	3	Peristiwa penduduk (mutasi, perubahan elemen data, dll) dan kepemilikan akta pencatatan sipil belum terdata dengan baik	
	Pelayanan adminduk belum memadai	1	Belum dilakukan perubahan/penyesuaian SOP penerbitan dokumen kependudukan	1	Petugas/operator pelayanan belum memahami dengan benar, begitu juga masyarakat pengguna layanan	Peningkatan pelayanan adminduk
		2	Belum dilakukan perubahan/penyesuaian SOP alur Pelayanan	2	Pelayanan baik secara online maupun manual yang belum memenuhi harapan semua pihak	



No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
		3	Tidak tersampainya berbagai informasi mengenai kemudahan dalam pengurusan administrasi kependudukan	3	Tidak tercapainya target dalam pencapaian kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	
		4	Keterbatasan SDM	4	Jumlah pengguna layanan yang terus meningkat tidak sebanding dengan petugas layanan	
		5	Keterbatasan blanko KTP el	5	Terhambatnya penduduk dalam memiliki KTP el	
		6	pemeliharaan alat perekaman	6	Peralatan dan perlengkapan layanan adminduk kurang optimal	
		7	Tidak meratanya ketersediaan alat perekaman adminduk di setiap kecamatan	7	Beberapa wilayah/kecamatan tidak dapat melakukan pelayanan dengan baik	
		8	Belum tersedianya saspras arsip hasil pelayanan adminduk secara digital (Permendagri 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan)	8	Penyelenggaraan dan penataan dokumen, berkas, data hasil pelayanan adminduk belum tertata dengan baik yang berpotensi pencarian dokumen terhambat.	
02.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
	Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa	1	Minimnya sarana dan prasarana di perdesaan	1	Belum meratanya pembangunan sarana dan prasarana di Desa	Pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana serta infrastruktur di perdesaan
		2	Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan kualitas aparatur desa	1	Kurangnya sinergitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Peningkatan pendidikan dan pelatihan kapasitas aparatur desa,
				2	Kurangnya kualitas SDM Lembaga Kemasyarakatan Desa	



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
				3	Kurangnya kualitas SDM aparatur Desa	masyarakat dan kelompok usaha ekonomi pedesaan
		3	Rendahnya kemampuan masyarakat Desa dalam mengakses kesempatan berusaha	1	Networking usaha belum optimal	
				2	Kurangnya kualitas SDM masyarakat desa	
		4	Belum optimalnya pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	1	Belum semua Desa membentuk BUMDesa	
				2	Sebagian besar lembaga ekonomi desa/ BUMDesa belum berjalan sehat	
02.08	Perhubungan					
	Layanan Transportasi belum tertata dan terkoneksi secara optimal	1	Merebaknya lokasi parkir illegal	1	Ketersedia lahan parkir terbatas baik di badan jalan maupun di luar badan jalan	Penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir
				2	Kenaikan Pengguna parkir (kendaraan/orang) tidak dibarengi kenaikan kantong parkir (di luar badan jalan maupun di badan jalan)	
				3	Penghapusan beberapa ruas jalan yang di jadikan lahan parkir badan jalan dengan pengendalian	
		2	Kemacetan di lokasi terminal bayangan (ruas jalan yang digunakan untuk aktifitas bongkar muat penumpang di jalan)	1	Terminal tipe c tidak tersedia di lokasi tujuan trayek kecamatan	Pengelolaan terminal penumpang type c
				2	Aktifitas terminal baik pada daerah kerja maupun daerah pengawasan terminal masih bergabung dengan aktifitas lainnya (pasar)	
		3	Akreditasi pelayanan PKB	1	Terbatasnya sarana prasarana pelayanan PKB	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor
				2	Kurangnya kesadaran para operator kendaraan untuk melakukan pengujian berkala	



No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan		Isu Strategis Urusan
		4	Tidak optimalnya kinerja angkutan penumpang/barang (beresiko gagal sistem operasional/rawan kecelakaan)	1	Terbatasnya kegiatan pengawasan/ operasi angkutan umum (PPNS dan Polri).	Optimalisasi pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap angkutan penumpang dan barang
				2	Kurangnya penindakan pelanggaran terhadap kelengkapan administrasi/teknis kendaraan demi keselamatan bersama.	
		5	Belum efektifnya system pelayanan angkutan umum	1	Belum adanya pendataan load factor kendaraan pada setiap trayek	Strategi penataan konektivitas berupa jaringan trayek dan simpul
				2	Tidak tersedia anggaran untuk melibatkan pihak ke-3	
				3	Belum optimalnya pemahaman petugas.	
				4	Kegiatan dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.	
				5	Belum terciptanya harmonisasi kegiatan antar pemangku kewenangan di Bidang Infrastruktur Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	
				6	Tidak pernah ada survey.	
		6	Pelaksanaan manajemen lalu lintas belum optimal	1	Belum maksimalnya penyediaan fasilitas perlengkapan jalan.	Optimalisasi pelaksanaan manajemen lalu lintas
				2	Hambatan samping	
				3	Kapasitas jalan terbatas/rendah.	
				4	Terjadinya kecelakaan lalu lintas.	
				5	Kemacetan	
				6	Kinerja jaringan jalan menurun	
		7	Pemenuhan alat keselamatan dan	1	Terbatasnya pendanaan untuk pengadaan peralatan keselamatan	Penyediaan perlengkapan jalan



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
			kelengkapan jalan belum lengkap		dan kelengkapan jalan	dan alat keselamatan
				2	Mayoritas perlintasan sebidang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Garut belum dilengkapi oleh alat keselamatan.	
				3	Rendahnya partisipasi masyarakat untuk menjaga dan merawat perlengkapan jalan	
02.09	Komunikasi dan Informatika					
	Belum optimalnya updating dan validasi data sektoral	1	Faktor Pendukung: Penerapan Regulasi SDI di Pemerintah Daerah. Adapun Faktor penghambatnya yakni belum maksimalnya pelaksanaan Forum Data	1	Kurangnya komitmen perangkat daerah dalam pengelolaan data sektoral pada setiap perangkat daerah	Implementasi satu data di tingkat Kabupaten Garut dalam mendukung Satu data Jabar dan Satu Data Indonesia
	Penyebaran luasan informasi publik belum menjangkau seluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Garut	1	Kominfo masih terbatas di penggunaan media sosial, media massa, dan media luar ruang	1	Rentang kendali penyebarluasan belum optimal disebabkan kondisi geografis Kabupaten Garut yang luas tidak berbanding lurus dengan sumber daya manusia yang ada	Optimalisasi keterbukaan informasi publik
	Aspek penerapan manajemen SPBE dan penilaian audit TIK masih rendah,	1	penanggung jawab pemenuhan nilai SPBE tidak hanya bertumpu kepada Dinas Kominfo, tetapi harus dipenuhi oleh seluruh SKPD Kabupaten Garut	1	kurangnya komitmen perangkat daerah untuk mendukung pencapaian indeks SPBE	SPBE merupakan IKU kepala daerah yang harus dipenuhi oleh seluruh SKPD



No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
	Aspek penerapan sistem manajemen keamanan informasi masih rendah	1	Penerapan sistem keamanan informasi sesuai SNI/ISO 27001 :2022 belum diterapkan secara optimal	1	Perlu penerapan dan audit Keamanan Informasi sesuai klausul dalam SNI/ISO 27001 : 2022	Indeks Keamanan Informasi merupakan parameter penerapan keamanan informasi yang didasarkan parameter Sistem Manajemen Keamanan Informasi
02.10	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
	Belum optimalnya Daya Saing UKM	1	Terbatasnya akses pembiayaan dan permodalan usaha	1	Mayoritas UKM masih berstatus informal dan belum memiliki skema bisnis yang bankable	Peningkatan keterbukaan akses pembiayaan dan permodalan
				2	Akses dan literasi terkait dengan permodalan usaha mikro yang terbatas, sehingga menghambat dalam pengembangan usaha	
		2	Kurang efektifnya bantuan/ fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah daerah	1	Dinamisnya objek data UKM	Peningkatan kualitas fasilitasi pemerintah daerah
				2	Sensitivitas tinggi pelaku usaha terhadap pendataan	
				3	Kurang bersinerginya bantuan/ fasilitas kepada pelaku usaha yang diberikan dari berbagai instansi	
				4	Minimnya pengawasan usaha pasca pemberian izin melalui OSS	
				5	Belum adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi pasca pemberian bantuan/ fasilitas dari pemerintah	
				6	Belum optimalnya proposal pemberian modal usaha yang disusun oleh pelaku usaha	
		3	Belum Optimalnya Kebijakan Perlindungan Pelaku Usaha Dalam Daerah	1	Belum optimalnya kebijakan P3DN	Optimalisasi kebijakan perlindungan pelaku usaha dalam daerah
				2	Masih adanya pelaku usaha yang belum terdaftar di e-katalog	



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
				3	Masih bergantungnya masyarakat kepada produk-produk luar daerah	
				4	Belum rampungnya kebijakan-kebijakan terkait kepastian berusaha	
		4	Belum Optimalnya Produktivitas Usaha UKM	1	Sarana dan Prasarana Usaha Mikro Kurang Memadai	Optimalisasi produktivitas Usaha UKM
				2	produk barang/ jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro di Kabupaten Garut tidak dapat bersaing secara harga, karena kurang efisien dalam hal biaya produksi dan pemenuhan kebutuhan pasar	
				3	Diversifikasi Produk UKM masih kurang optimal	
		5	Manajemen Pengelolaan UKM	1	Pelaku usaha mikro menjalankan kegiatan usahanya mulai dari produksi, pemasaran sampai dengan pengelolaan keuangan hanya individu	Peningkatan manajemen pengelolaan UKM
		6	Belum optimalnya pemasaran produk UKM	1	Terbatasnya Jejaring Pemasaran	Pemasaran dan Akses Pasar KUKM
				2	Belum Optimalnya Pemanfaatan Informasi Teknologi dalam pemasaran produk UKM	Digitalisasi Usaha
	Belum optimalnya kualitas Koperasi	1	Masih sedikitnya Koperasi yang memiliki jenis usaha sektor riil (Produsen/ jasa)	1	Terbatasnya persepsi masyarakat terhadap Koperasi sebagai usaha simpan pinjam	Kebijakan Pengembangan Koperasi pada Sektor Riil
				2	Terbatasnya kualitas SDM pengelola Koperasi	
				3	Terbatasnya akses permodalan	
		2	Peningkatan kuantitas kelembagaan koperasi	1	Menurunnya minat masyarakat terhadap Koperasi	Peningkatan kuantitas dan kualitas



No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
			tidak diimbangi dengan kualitas koperasi	2	Masih adanya koperasi yang tidak melakukan dan melaporkan Rapat Anggota Tahunan, terutama untuk koperasi baru	kelembagaan koperasi
				3	Masih banyaknya Koperasi yang belum menerapkan prinsip dan nilai koperasi	
				4	Orientasi pendirian koperasi yang hanya untuk mengharapkan bantuan semata, atau menggunakan badan hukum koperasi hanya sebagai wadah untuk menampung program/ bantuan untuk kepentingan pribadi	
				5	Koperasi belum menerapkan prinsip dan nilai koperasi	
				6	Koperasi belum melaksanakan aturan aturan perkoperasian sesuai dengan peraturan perundang undangan	
				3	Belum Optimalnya Kebijakan Perlindungan Koperasi Dalam Daerah	
		4	Belum optimalnya kualitas usaha koperasi	1	Kurangnya kesadaran Anggota Koperasi untuk berpartisipasi dalam meningkatkan modal koperasi dan memajukan usaha koperasi	Optimalisasi kualitas usaha koperasi
				2	Kurangnya kapasitas Koperasi untuk berinovasi dalam pengembangan dan layanan bagi anggota	
				3	Pembinaan koperasi belum berorientasi pengembangan usaha	



No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
				4	Belum optimalnya proses kemitraan untuk mendorong kerjasama usaha	
				5	Minimnya akses permodalan koperasi terhadap Perbankan karena tidak Bankable	
				6	Terbatasnya jaringan usaha dan pemasaran koperasi untuk menjangkau pasar terutama dalam promosi produk, akses informasi pasar dan saluran pemasaran	
		5	Belum optimalnya kapasitas SDM Koperasi	1	Terbatasnya kapasitas SDM Aparatur	Optimalisasi kapasitas SDM Kopeasi
				2	Cakupan demografi yang belum diimbangi dengan pembagian SDM yang merata dalam pembinaan koperasi	
				3	Pembinaan koperasi belum secara optimal menggali potensi usaha koperasi	
		6	Belum optimalnya tatakelola dan pemanfaatan data keragaan Koperasi	1	Kesesuaian data keragaan belum tervalidasi	Penguatan Basis Data Koperasi
				2	Terbatasnya waktu serta SDM untuk proses pendataan	Penguatan Basis Data Koperasi
02.11	Penanaman modal					
	Kurang Optimalnya Investasi Penanaman Modal	1	Iklim Investasi belum kondusif	1	Belum adanya kebijakan yang memberikan kepastian berusaha	Optimalisasi Investasi Penanaman Modal
				2	Belum adanya kebijakan mengenai Investasi baik skala umum maupun detil	
				3	Kualitas SDM yang belum sesuai dengan kebutuhan Calon Investor	
				4	Keberterimaan masyarakat terhadap Investasi	



No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
		2	Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal belum optimal	1	Belum adanya skema reward and punishment terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal	
				2	Pelaporan kegiatan penanaman modal masih belum terjamin keakuratannya	
		3	Belum Optimalnya Pelaksanaan Promosi Investasi	1	Belum adanya dokumen peluang investasi yang dapat ditawarkan kepada calon investor	
				2	Pelaksanaan Promosi masih berbasis output	
02.12	Kepemudaan dan Olahraga					
	Belum optimalnya perolehan prestasi olahraga	1	Belum optimalnya kapasitas daya saing keolahragaan	1	Belum optimalnya sarana prasarana olahraga	Optimalisasi sarana prasarana olahraga, kapasitas SDM dan pelaksanaan kompetisi
				2	Belum optimalnya manajemen dan kapasitas SDM keolahragaan	
				3	Belum optimalnya penyelenggaraan kompetisi reguler dan berjenjang sebagai sarana pembibitan	
	Belum optimalnya wirausaha pemuda	1	Belum optimalnya kapasitas daya saing kepemudaan	1	Belum optimalnya peningkatan kapasitas pemuda	Peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan
				2	Belum optimalnya pengembangan organisasi kepemudaan	
				3	Belum optimalnya pelibatan pemuda dalam organisasi kepramukaan	
				4	Masih rendahnya penyelenggaraan event-event olahraga di Kab. Garut	
				5	Belum adanya regulasi mengenai kepramukaan (Perda)	
				6	Belum optimalnya bumi perkemahan (Status)	



No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
				7	Belum adanya kampung pramukan (rintisan pendidikan)	
				8	Belum adanya legalitas standing untuk pembina (belum adanya instruktur pembina pramuka)	
				9	Kondisi lapangan terbuka di Kecamatan belum tersentuh oleh pembangunan representatif	
				10	Belum optimalnya SOP peminjaman sarana olahraga bagi berbagai pihak	
				11	Belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga	
02.13	Statistik					
	Belum optimalnya kesiapan penyelenggaraan satu data Indonesia	1	Tata kelola pemanfaatan data belum optimal	1	Kesadaran akan kebutuhan data dalam perencanaan pembangunan masih rendah	Peningkatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data dan informasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan urusan daerah;
				2	Pembaharuan data tidak dilakukan secara berkala dan berkelanjutan	Penguatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia penyelenggaraan urusan statistik;
		2	Belum optimalnya implementasi pembagian peran kelembagaan penyelenggaraan statistik	1	Pengelolaan database masih dilakukan secara manual	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan urusan statistik;



No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
						Membangun e-database sebagai bagian dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
02.14	Persandian					
	Belum optimalnya keamanan informasi	1	Kerangka kerja keamanan informasi belum maksimal	1	Belum optimalnya tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;	Optimalisasi keamanan informasi
		2	Kelengkapan pengamanan terhadap aset informasi belum diterapkan dengan baik	1	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya persandian	
				2	Belum optimalnya operasional pengamanan persandian;	
				3	Belum optimalnya pola hubungan persandian antar organisasi perangkat daerah.	
02.15	Kebudayaan					
	Kurangnya pemberdayaan budaya seni daerah	1	Kurangnya media pelaku budaya seni daerah untuk melestarikan, memajukan, memanfaatkan kebudayaan daerah	1	Terbatasnya event-event besar sebagai media prosesi seni, helaran, dan pagelaran sen	Promosi wisata dan budaya berbasis digital yang dilakukan daerah
		2	Situs Cagar Budaya daerah yang pelestarian, pemajuan, dan pemanfaatannya belum optimal	1	Kurangnya pengamanan dan penataan cagar budaya	
				2	Pembinaan terhadap para seniman masih kurang	
		3	Kualitas SDM rendah	1	Apresiasi dan perlindungan terhadap seni tradisional belum optimal	
02.16	Perpustakaan					



No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
	Masih rendahnya kunjungan perpustakaan dan minat membaca masyarakat	1	Masih rendahnya pengembangan literasi	1	Perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan pemustaka masih terbatas;	Peningkatan budaya gemar membaca dan penerapan literasi informasi
					Belum optimalnya promosi dan publikasi dalam pengembangan minat dan budaya baca masyarakat;	
					Kurangnya sosialisasi minat baca masyarakat	
		2	Kurangnya koleksi bahan pustaka baik cetak maupun digital	1	Masih kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan	Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan sesuai standar
				2	Kurangnya tenaga pustakawan yang ahli di seluruh perpustakaan, baik perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan perguruan tinggi	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pengelola perpustakaan
				3	Kuantitas dan kualitas serta jenis koleksi bahan perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan perguruan tinggi	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pengelola perpustakaan
				4	Perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan pemustaka masih terbatas	Peningkatan budaya gemar membaca dan penerapan literasi informasi
				5	Akses layanan perpustakaan belum optimal.	
02.17	Kearsipan					
	Belum adanya sarana prasarana pelayanan yang representatif	1	Belum terpenuhinya SDM kearsipan yang memadai	1	Rendahnya sumber daya pengelola kearsipan baik secara kuantitatif maupun kualitatif	Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya pengelola kearsipan
				2	Rendahnya kepedulian pengelolaan kearsipan	Peningkatan kepedulian pengelolaan kearsipan



No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
		2	Masih kurangnya sarana dan prasarana kearsipan berupa sarana alih media, ruang galeri, auditorium dan laboratorium preservasi dan perbaikan arsip	1	Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan	Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan
				2	Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi kearsipan	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi kearsipan
3	URUSAN PILIHAN					
03.01	Kelautan dan Perikanan					
	Belum optimalnya produksi perikanan	1	Peningkatan produksi hasil tangkapan tidak optimal	1	Terbatasnya sarana dan prasarana penangkapan ikan dan sarana pemasaran hasil perikanan	Optimalisasi produksi dan produktivitas perikanan
		2	Kurangnya pengetahuan dan keterampilan nelayan dan wanita nelayan	1	Terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan bagi nelayan dan wanita nelayan	
		3	Tidak Jalannya proses pelelangan ikan di TPI	1	Adanya para bakul yang memberikan modal awal penangkapan ikan kepada nelayan sehingga semua hasil tangkapan nelayan langsung dijual ke bakul tersebut dengan harga yang ditentukan bakul, bukan hasil kesepakatan nelayan dan bakul	
		4	Nelayan banyak yang terjerat pinjaman kepada para bakul	1	Belum adanya fasilitasi akses permodalan pada lembaga keuangan	
		5	Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut belum optimal	1	Terbatasnya sarana dan prasarana penangkapan	
	Alih fungsi lahan kolam dan kualitas sumberdaya yang menurun	1	Usaha perikanan budidaya pada umumnya masih dikelola secara tradisional sebagai usaha tani sampingan	1	Belum semua petani/pembudidaya ikan memahami potensi usaha di sektor perikanan	



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan	
		2	Masih sering terjadinya alih fungsi kepentingan penggunaan lahan dari lahan usaha tani budidaya perikanan menjadi lahan untuk kepentingan lainnya.	1	Pembangunan area pemukiman/ industri yang tidak terencana		
		3	Semakin menurunnya kualitas perairan dan daya dukung sumberdaya perairan	1	Terjadinya proses kerusakan lingkungan pada Daerah Aliran Sungai.		
	Transfer ilmu dan teknologi belum optimal	1	Kelembagaan kelompok pembudidaya ikan sebagai wadah belajar bersama serta unit usaha bersama belum dapat berjalan secara optimal.	1	Kesadaran masyarakat untuk membentuk kelompok usaha masih belum optimal		
		2	Belum optimalnya proses alih teknologi terapan dalam mendorong peningkatan produksi di sektor perikanan	1	Terkendala oleh terbatasnya jumlah dan kualitas petugas dilapangan.		
		3	Masih rendahnya kemampuan aksesibilitas petani ikan dan nelayan terhadap sistem dan mekanisme pasar serta rantai tata niaga hasil perikanan.	1	Terkendala oleh terbatasnya jumlah dan kualitas petugas dilapangan.		
		4	Angka konsumsi ikan di Kabupaten Garut relatif masih rendah dibanding rata-rata Jawa Barat dan Nasional	1	Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi ikan untuk peningkatan gizi, rendahnya daya beli		
	03.02	Pariwisata					



No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
	Jumlah Kunjungan dan Lama tinggal wisatawan masih rendah	1	Daya saing Destinasi Pariwisata unggulan masih rendah	1	Kurangnya atraksi yang bisa ditawarkan kepada pengunjung di destinasi pariwisata unggulan Daerah	Kesiapan atraksi, amenitas, aksesibilitas dari destinasi wisata
				2	Belum meratanya amenitas pendukung pariwisata	
				3	Kelembagaan Pariwisata destinasi pariwisata yang belum diberdayakan	
				4	Belum tumbuhnya kesadaran wisata bagi masyarakat sekitar destinasi pariwisata unggulan daerah	
				5	Belum lengkapnya atau belum operasionalnya Infrastruktur Ekonomi Kreatif untuk mendukung Ekosistem Kreatif	
				6	Sumber Daya Manusia Aparatur dan Sumberdaya Insan Kreatif yang masih belum optimal	
				7	Masih sulitnya aksesibilitas ke destinasi pariwisata unggulan daerah	
				8	Belum terdapat payung hukum yang dapat menjadi pedoman Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Garut	
		2	Promosi pariwisata belum optimal	1	Belum adanya Kalender Event Tahunan yang dapat dipromosikan	Promosi wisata dan budaya berbasis kalender event dan citra daerah
				2	Belum terbentuknya Branding/ Citra Daerah sebagai identitas khas pariwisata Garut	
		3	Pelaporan kunjungan wisatawan belum optimal	1	Data kunjungan wisatawan masih belum digital	Optimalisasi pendataan dan



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
				2	Terdapat Potensi namun belum terpetakan – Data mengenai Ekonomi Kreatif sangat minim - Minimnya data akan berpengaruh terhadap perencanaan	pelaporan kunjungan wisata
03.03	Pertanian					
	Peningkatan Produksi/ Peningkatan Harga Komoditas Pertanian tidak sebanding dengan Peningkatan Kesejahteraan Petani	1	Mayoritas masyarakat yang berprofesi "Petani" adalah buruh tani (tidak memiliki lahan pertanian)	1	Harga lahan Pertanian yang tidak terjangkau	Optimalisasi produksi dan produktivitas pertanian
				2	Sulitnya akses keuangan bagi Petani	
				3	Minimnya pengetahuan Petani tentang pembiayaan di sektor pertanian	
				4	Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	
		2	Rantai pasok komoditas pertanian yang terlalu panjang	1	Sulitnya akses langsung ke pasar/ konsumen komoditas pertanian	
				2	Terikatnya komitmen produk Petani ke pihak penghubung ke Pasar	
	Kurang optimalnya produksi komoditas Pertanian Strategis dan Unggulan	1	Terbatasnya subsidi pupuk ke masyarakat	1	Ketergantungan petani terhadap subsidi pupuk	
				2	Mahalnya pupuk	
		2	Adanya Potensi gagal panen/ tanam	1	Perubahan iklim/ cuaca	
				2	Terbatasnya jangkauan pelayanan irigasi/ perpipaan	
		3	Mahalnya biaya produksi pertanian	1	Sulitnya akses ke Lahan Pertanian	
	Pengalihan fungsi lahan pertanian ke non-pertanian	1	Peningkatan aksesibilitas ke Lahan Pertanian tanpa dibarengi kebijakan pengendalian pembangunan	1	Tidak adanya peraturan mengenai pengendalian pembangunan	
				2	Tidak adanya penegakan peraturan mengenai pengendalian pembangunan	



No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
	Belum Optimalnya produksi dan produktivitas ternak	1	Perumusan kebijakan belum optimal dan tepat sasaran	1	Data sebagai dasar perumusan kebijakan belum dapat menggambarkan potensi secara keseluruhan	Optimalisasi produksi dan produktivitas ternak
		2	Tingkat keberhasilan Inseminasi Buatan rendah	1	Kurangnya sarana dan prasarana inseminasi buatan	
				2	Terbatasnya aksesibilitas peternak terhadap sarana produksi, pemasaran dan Permodalan	
		3	Fasilitasi sarana dan prasarana peternakan, produksi dan pengembangan usaha yang tidak tepat sasaran	1	Tidak matangnya perencanaan dan penentuan kelompok	
		4	Pengelolaan bantuan oleh kelompok tidak optimal	1	Kurang matangnya dalam verifikasi CPCL dan kurangnya pengawasan terhadap kelompok	
		5	Ketersediaan lahan hijauan pakan yang semakin berkurang	1	Alih fungsi lahan menjadi lahan pemukiman	
				2	Ketersediaan sumber pakan hijauan belum dikelola secara intensif dan terpadu	
				3	Peternak belum terbiasa menanam HPT secara khusus	
		6	Sumber Daya Manusia yang menguasai teknologi masih terbatas	1	Alat dan mesin penunjang peternakan masih merupakan hal baru bagi peternak	
		7	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan/ternak menular	1	Belum optimalnya penyuluhan terhadap peternak	
		8	Pelayanan kesehatan hewan dan penanganan wabah penyakit hewan menular belum optimal	1	Keterbatasan Sumberdaya manusia dan Sarana Prasarana pelayanan kesehatan hewan	



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
		9	Pengawasan peredaran hewan dan produk hasil peternakan belum optimal	1	Kurang kesadaran dan pemahaman masyarakat pentingnya kesehatan ternak	
		10	Masih ditemukan produk hewan di masyarakat yang belum memenuhi standar mutu	1	Pelaku usaha belum menerapkan Nilai Kontrol Veteriner (NKV), fasilitas sarana prasarana penunjang produk peternakan belum memenuhi standar yang diterapkan dan belum memiliki kesadaran akan pemenuhan standar pemenuhan mutu produk	
03.04	Energi dan Sumberdaya Mineral					
	Pemanfaatan Langsung Panas Bumi belum optimal	1	Perusahaan pemanfaatan langsung panas bumi belum memiliki izin pemanfaatan	1	Keterbatasan wewenang dalam penerbitan izin	Penyelesaian izin pemanfaatan ESDM
				2	Belum rampungnya kebijakan terkait perizinan pemanfaatan langsung panas bumi	
03.05	Perdagangan					
	Masih rendahnya kontribusi sektor perdagangan	1	Rendahnya daya saing Sarana Distribusi Perdagangan	1	Masih terbatasnya kemampuan manajemen pengelola pasar	Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan
				2	Rendahnya daya saing pedagang tradisional terhadap toko modern	
				3	Belum optimalnya sarana prasarana perdagangan	
				4	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas data perdagangan	
		2	Rendahnya nilai ekspor	1	Masih belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak konsumen	Perlindungan terhadap hak-hak konsumen



No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan		Isu Strategis Urusan
		3	Tidak stabilnya harga barang kebutuhan pokok dan Barang Penting	1	Masih tingginya biaya distribusi barang terutama di wilayah Garut Selatan	Stabilisasi biaya transport
03.06	Perindustrian					
	Masih rendahnya kontribusi industri Kecil Menengah	1	Rendahnya daya saing industri kecil menengah daerah	1	Belum optimalnya pengelolaan database industri kecil menengah daerah	Peningkatan daya saing Industri Kecil Menengah
				2	Sulitnya akses logistik untuk perindustrian	
				3	Masih adanya pelaku usaha yang belum terdaftar di e-katalog	
				4	Masih adanya industri yang belum memiliki sertifikasi TKDN pada produknya	
				5	SDM masih belum sesuai kebutuhan industri	
		2	Rendahnya pertumbuhan industri kecil menengah	1	Belum rampungnya kebijakan-kebijakan terkait kepastian berusaha	Peningkatan pertumbuhan Industri Kecil Menengah
				2	Belum tersedianya kawasan industri	
				3	Terbatasnya kawasan peruntukkan industri	
03.07	Transmigrasi					
	Untuk pemberangkatan yang menentukan adalah pemerintah pusat dalam bentuk SK Menteri dimana daerah tujuannya	1	Pemberangkatan dan penempatan transmigran yang tidak dapat dipastikan dapat dilaksanakan setiap tahun	1	Pemberangkatan dan penempatan transmigran oleh pemerintah pusat	Optimalisasi pemberangkatan dan penempatan transmigrasi
4	PENUNJANG URUSAN					
04.01	Pembinaan dan Pengawasan					
	Peran dan layanan audit intern sebagian besar berupa audit ketaatan	1	Kompetensi APIP terkait pengawasan substantif masih kurang	1	Jumlah aparaturnya pengawasan yang telah mengikuti diklat audit kinerja dan pengawasan substantif masih terbatas	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme aparaturnya pengawasan secara berkelanjutan



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
	Program strategis Pemerintah Daerah belum dijadikan sebagai fokus pengawasan intern	1	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan belum memperhatikan cascading isu stretegis pemerintah daerah	1	Penetapan sasaran audit dalam PKPT belum ditetapkan berdasarkan hasil penilaia risiko yang memadai	Implementasi Pengawasan Intern Berbasis Risiko
	Akses untuk mendapatkan data dan dokumen yang diperlukan memerlukan waktu yang lama	1	Belum terintegrasinya data dan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan intern	1	Aplikasi untuk mendukung pelaksanaan pengawasan belum tersedia	Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan Pengawasan Intern
	Pengendalian Intern dalam penyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya mampu memperbaiki kelemahan organisasi	1	Sistem Pengendalian Intern dalam penyelenggaraan pemerintahan belum dievaluasi secara berkala	1	Peran manajemen sebagai lini pertama dan lini kedua dalam melaksanakan pengendalian intern masih kurang	Peningkatan Implementasi SPIP dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	Tindaklanjut atas hasil pengawasan eksternal belum seluruhnya sesuai rekomendasi	1	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Eksternal belum efektif	1	Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh manajemen belum sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal secara berkelanjutan
	Pelaksanaan pembangunan oleh penyedia jasa dan pengelolaan keuangan Desa belum seluruhnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	1	APIP tidak mampu melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pembangunan daerah dan desa	1	Jumlah kegiatan pembangunan dan jumlah pemerintah Desa yang harus diawasi tidak sebandig dengan jumlah aparatur yang tersedia	Pelayanan Pengaduan Masyarakat yang efisien dan efektif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, serta Sinergitas Pengawasan bersama Aparat Penegakan Hukum
	Road Map Reformasi Birokrasi belum seluruhnya dilaksanakan	1	Rencana aksi reformasi birokrasi belum seluruhnya dilaksanakan	1	APIP belum mampu mengawal proses Reformasi Birokrasi	Peningkatan peran APIP dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi
	Perangkat Daerah/Unit Kerja belum memenuhi standar/kriteria	1	Rekomendasi hasil evaluasi belum seluruhnya ditindaklanjuti	1	APIP belum mampu mengawal terwujudnya ZI/WBK dan WBBM	Peningkatan Kepatuhan dan pengembangan



No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
	ZI/WBK/WBBM					budaya integritas
04.02	Perencanaan					
	Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan pembangunan	1	Kurangnya integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja	1	Kesulitan dalam mengelola dan mengawasi proses perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi, serta redundansi dan inkonsistensi data karena sistem perencanaan, penanggaran dan informasi kinerja baik manual maupun terkomputerisasi belum terintegrasi secara optimal.	Penyelarasan sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja, dengan ruang lingkup integrasi sistem aplikasi perencanaan dan penganggaran, kemudahan implementasi tahap perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.
				2	Kurangnya kesadaran dan komitmen dari para pemangku kepentingan untuk menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi.	
		2	Kurangnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja yang berorientasi hasil/manfaat untuk masyarakat.	1	Rendahnya kualitas hasil analisis kebutuhan masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ke depan yang berbasis kinerja yang berorientasi hasil/manfaat untuk masyarakat.	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja yang berorientasi hasil/manfaat untuk masyarakat
				2	Rendahnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi karena tidak lengkap, tidak akurat, tidak mutakhir, dan tidak relevan.	
		3	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.	1	Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan pembangunan daerah.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.



No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
				2	Kurangnya pemahaman, penerapan, kapasitas, kompetensi, keterlibatan, pemberdayaan, sinergi, dan harmonisasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inklusif, dan berorientasi hasil.	
		4	Kurangnya kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia perencana sesuai kebutuhan ideal.	1	Rendahnya profesionalisme dan integritas sumber daya perencana dalam menjalankan tugasnya.	Peningkatan kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia perencana sesuai kebutuhan ideal.
				2	Rendahnya pemahaman dan penerapan core values ASN BerAKHLAK oleh sumber daya manusia perencana.	
		5	Masih adanya ketidaksesuaian dan ketidakkonsistenan antara rencana pembangunan nasional, sektoral, dan daerah.	1	Kurangnya kualitas sumber daya manusia perencana, baik di pemerintah pusat maupun daerah, dalam melakukan analisis, formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan yang berbasis data, fakta, dan evidensi.	Implementasi penyelarasan perencanaan antara daerah, provinsi dan pusat serta antar sektor tingkat pemerintahan.
				2	Kurangnya pemahaman dan penerapan konsep dan prinsip perencanaan pembangunan yang terintegrasi, sinkron, sinergis, harmonis, konsisten, dan berorientasi hasil.	
04.03	Keuangan					
	Pengelolaan aset dan keuangan daerah belum optimal	1	Belum optimalnya pengelolaan aset daerah	1	Rendahnya tingkat sertifikasi aset milik pemerintah daerah	
		2	Belum optimalnya pengelolaan keuangan	1	Belum optimalnya penetapan target PAD dan retribusi daerah	



No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan	
			daerah	2	Masih kurangnya sertifikasi pemeriksa wajib pajak		
				3	Belum optimalnya pengelolaan Sistem Informasi pengelolaan pajak daerah serta belum terintegrasi		
				4	Rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak daerah sehingga diperlukan pembinaan dan sosialisasi kepada wajib pajak		
				5	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan retribusi daerah oleh SKPD penghasil retribusi daerah serta perlu adanya rasionalisasi terkait penetapan target retribusi		
04.04	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan						
	Belum optimalnya proses sistem dan layanan kepegawaian	1	Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur;	1	Kurangnya pengembangan potensi ASN	Optimalisasi Profesionalisme ASN dan Peningkatan Sistem Merit Manajemen Asn	
		2	Sistem kepegawaian belum mampu mendorong	1	Belum terbangunnya menejemen		
			peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adildan layak sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja		talenta sesuai permenpan 3 tahun 2020		
					2		Belum terupdate nya database kepegawaian
					3		Belum adanya kejelasan kebijakan/undang-undang terkait penataan tenaga honorer
04.05	Penelitian dan Pengembangan						



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
	Belum optimalnya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan	1	Hasil Kelitbangan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah	1	Belum tersusunnya Rencana Induk Kelitbangan	Penguatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan litbang daerah
						Peningkatan koordinasi dan kerjasama serta kualitas perencanaan dan evaluasi program kelitbangan
						Penguatan basis data dan diseminasi hasil kelitbangan
		2	Belum optimalnya penyelenggaraan inovasi daerah	1	Belum tersedianya SDM Peneliti	Peningkatan kebijakan inovasi daerah, fasilitasi inovasi daerah, dan pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SiDa)
				2	Belum adanya tim pengelola inovasi daerah	
5	PENDUKUNG					
05.01	Pendukung KDH dan WKDH					
	Belum optimalnya kelembagaan pemerintah dalam melaksanakan prinsip <i>good governance</i>	1	Belum idealnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, terukur dan tepat fungsi;	1	Belum tersedianya database penyaluran hibah	Optimalisasi kelembagaan pemerintah dalam melaksanakan prinsip <i>good governance</i>
				2	Rendahnya ketaatan terhadap regulasi yang menjadi dasar dalam proses permohonan bantuan	
				3	Belum optimalnya laporan kinerja dalam bentuk data, berkas, dokumentasi sebagai bahan pelaporan aksi HAM dan bahan penilaian “Kabupaten/kota peduli HAM"	
				4	Belum optimalnya kerjasama anatara pemda	



No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
					dengan lembaga/badan dalam negeri dan luar negeri serta CSR dalam pembangunan daerah	
		2	Belum idealnya standar pelayanan dalam rangka menghadapi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.	1	Rendahnya pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar / landasan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga berpotensi menjadi permasalahan hukum	
				2	Pelayanan publik belum optimal sesuai dengan harapan masyarakat.	
05.02	Pendukung DPRD					
	Masih rendahnya Raperda inisiatif DPRD	1	Belum tersedianya grand desain tentang pembuatan program legislasi daerah	1	Belum adanya pemahaman yang terintegrasi berkenaan dengan prosedur penyusunan produk hukum daerah	Optimalisasi penyusunan Raperda inisiatif DPRD
06.00	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
06.01	Kesatuan Bangsa dan Politik					
	Masih rendahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta tingginya angka konflik sosial	1	Menurunnya nilai-nilai Pancasila di masyarakat	1	Masih perlunya peningkatan wawasan kebangsaan di masyarakat	Penguatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
				2	Kuatnya arus globalisasi negatif di generasi muda	
				3	Masih tingginya penyalahgunaan dan peredaran narkoba	
		2	Belum optimalnya partisipasi politik masyarakat	1	Belum optimalnya pembinaan budaya politik masyarakat	Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
		3	Masih adanya Ormas Destruktif	1	Belum optimalnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Optimalisasi Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		1	Belum optimalnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	1	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam upaya memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Optimalisasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
		1	Belum optimalnya kerukunan antar umat beragama	1	Masih adanya penyebaran paham-paham intoleransi dan radikalisme	Penanggulangan Penyebaran Paham Intoleransi dan Radikalisme untuk Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama
		1	Belum optimalnya deteksi dini dan kewaspadaan terhadap gangguan stabilitas wilayah	1	Belum optimalnya kerjasama intelijen	Peningkatan Deteksi Dini dan Kewaspadaan terhadap Gangguan Stabilitas Wilayah untuk Menurunkan Angka Konflik Sosial
				2	Masih tingginya penyebaran berita bohong (hoax)	
7	KEWILAYAHAN					
07.01	Pemerintahan					
	Trantibum masih rendah	1	Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	1	Rendahnya dukungan dari pemangku kepentingan	Optimalisasi pelaksanaan Pemerintahan di tingkat Kecamatan dan Desa
	Pemberdayaan Desa belum optimal	1	Penguatan Pemberdayaan kelompok rentan	1	Kurang optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	



No	Masalah Pokok	Permasalahan			Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
	Profesionalisme Aparatur masih rendah	1	Tata kelola organisasi dan manajemen ASN belum optimal	1	Belum optimalnya pelayanan terhadap masyarakat	

Sumber : RPD Kabupaten Garut 2025-2026 diolah Bappeda 2024

2.3.3. Permasalahan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2023 Untuk Dasar Identifikasi Isu Strategis

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023, masih banyak permasalahan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan isu strategis guna menyelesaikan permasalahan utama pembangunan daerah secara bertahap dengan memperhatikan isu strategis pembangunan nasional dan isu strategis pembangunan provinsi. Berikut ini adalah penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yang dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan identifikasi isu strategis.



Tabel 2.95.
Permasalahan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2023 dan Penjelasannya
Sebagai Dasar Identifikasi Isu Strategis

No	Permasalahan	Penjelasan	Identifikasi Isu Strategis
1.	Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran; Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial; Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial	Upaya pengurangan jumlah penduduk miskin, pengentasan kemiskinan ekstrem , pengangguran dan perluasan kesempatan berusaha; belum optimal. Perlu peningkatan kehidupan masyarakat yang agamis, demokratis dan berbudaya luhur, Belum terkendalinya kependudukan dan masih perlunya pembangunan keluarga sejahtera, Pasca pelaksanaan Pilkada Serentak .	Kualitas sumberdaya manusia
2.	Rendahnya daya beli masyarakat, nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya	Rendahnya daya beli masyarakat, nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya dan Masih rendahnya realisasi investasi daerah (PMA dan PMDN) dan pendapatan daerah.	Pembangunan ekonomi yang inklusif
3.	Pembangunan antar wilayah belum merata	Perlunya pemerataan infrastruktur antar wilayah secara merata, cakupan air minum dan sanitasi layak (mendukung pengurangan kantong kemiskinan)	Pemerataan Pembangunan infrastruktur antar wilayah didukung dengan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan
	Rendahnya kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan tingginya resiko bencana	Masih Rendahnya kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan tingginya resiko bencana	
4.	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi, kualitas dan akses pelayanan publik.	Perlunya reformasi birokrasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan.

Sumber : Hasil Pengolahan Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023, dapat ditetapkan 4 (empat) isu strategis sebagai berikut:

- 1. Kualitas sumberdaya manusia
- 2. Pembangunan ekonomi yang inklusif
- 3. Pemerataan Pembangunan infrastruktur antar wilayah didukung dengan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan



4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan.

Untuk menentukan prioritas isu strategis tersebut, disusun sejumlah kriteria yang kemudian akan digunakan pada pembobotan seperti tampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.96.
Kriteria Untuk Prioritas Isu-Isu Strategis

No	Kriteria
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

Dengan menggunakan kriteria seperti tampak pada tabel diatas, maka disusun bobot untuk masing-masing kriteria seperti tampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.97.
Pembobotan Kriteria Untuk Prioritas Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Dengan menggunakan kriteria pada tabel diatas, kemudian dilakukan skoring untuk setiap isu strategis yang telah diidentifikasi. Skoring dilakukan dengan memberikan nilai antara 1 sampai dengan 5, isu yang memiliki kesesuaian paling tinggi dengan kriteria mendapatkan nilai 5, sedangkan isu yang kesesuaiannya paling rendah mendapatkan nilai 1. Hasil skoring kemudian dikalikan dengan besaran bobot setiap kriteria, sehingga menghasilkan urutan prioritas isu strategis.

Urutan prioritas isu strategis beserta rankingnya ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.98.



Urutan Prioritas Identifikasi Isu Strategis
Berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2023

No.	Isu Strategis	Ranking
1.	Kualitas sumberdaya manusia	1
2.	Pembangunan ekonomi yang inklusif	2
3.	Pemerataan Pembangunan infrastruktur antar wilayah didukung dengan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan	3
4.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan.	4

Sumber : diolah Bappeda Kabupaten Garut 2024

2.4 Inovasi Pembangunan

Inovasi memegang peran penting dalam pembangunan daerah, melalui berbagai terobosan dan ide-ide segar dalam sistem birokrasi yang akan mendorong daerah berkembang lebih maju. Oleh karena itu, inovasi merupakan faktor penting dalam sistem pemerintahan daerah dalam mendukung perkembangan ekonomi dan daya saing daerah.

Inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Garut dalam perencanaan pembangunan daerah terdiri atas inovasi pada proses perencanaan dan inovasi dalam kegiatan pembangunan daerah. Inovasi pada proses perencanaan diantaranya yakni :

- Pemanfaatan teknologi informasi terutama dalam pengumpulan penyusunan program dan usulan kegiatan.
- Proses perencanaan yang lebih partisipatif melalui tatap muka langsung dengan masyarakat dan *stakeholder* pembangunan daerah
- Proses musyawarah perencanaan di tingkat desa dan kecamatan yang lebih kolaboratif; serta
- Pendekatan perencanaan yang menyeluruh dan terkoordinasi (holistik) dengan pemilihan kebijakan prioritas yang ingin dicapai secara terintegrasi dan mempertimbangkan aspek spasial wilayah.

Sementara itu, inovasi dalam kegiatan pembangunan daerah dilaksanakan dalam rangka pencapaian pembangunan daerah yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang prima serta peningkatan daya saing daerah.

A. Inovasi Pada Proses Perencanaan

1. Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada proses perumusan usulan rencana program dan kegiatan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah suatu sistem aplikasi berbasis teknologi informasi secara *online* untuk mendukung proses penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Garut yang efektif,

efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga diharapkan proses perencanaan pembangunan mulai dari pengumpulan hingga pengolahan data mampu menghasilkan informasi yang akurat, relevan serta tepat waktu. Penerapan Sistem SIPD untuk proses perencanaan pembangunan Tahun 2022 dilakukan dengan melakukan input secara langsung pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri, setelah pada tahun sebelumnya dilakukan dengan menggunakan *e-planning* daerah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD). Penerapan SIPD tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Garut dalam perumusan rencana program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat hasil pelaksanaan Musrenbang RKPD di tingkat Kecamatan dan telaahan masukan pokok-pokok pikiran DPRD. Melalui penerapan aplikasi SIPPD, maka penyusunan rencana program dan kegiatan pada RKPD dapat memiliki manfaat dari sisi transparansi, keamanan, satu pintu dan bersifat *real time*.

Gambar 2.56. Penerapan *e-Planning* SIPD



2. Penentuan Skala Prioritas Usulan Kegiatan Menggunakan Metode *Meta Plan*

Metode “*Meta Plan*” merupakan salah satu metode untuk penentuan skala prioritas kegiatan dari hasil musrenbang tingkat desa/kecamatan yang diwali dengan menyeleksi dan memilih 3 (tiga) prioritas kegiatan berdasarkan kesepakatan dari masing-masing desa berdasarkan proses skoring dari setiap kegiatan dengan nilai antara 0 sampai 5 dengan kategori sangat penting sekali, penting, cukup penting, kurang penting, dan tidak penting.



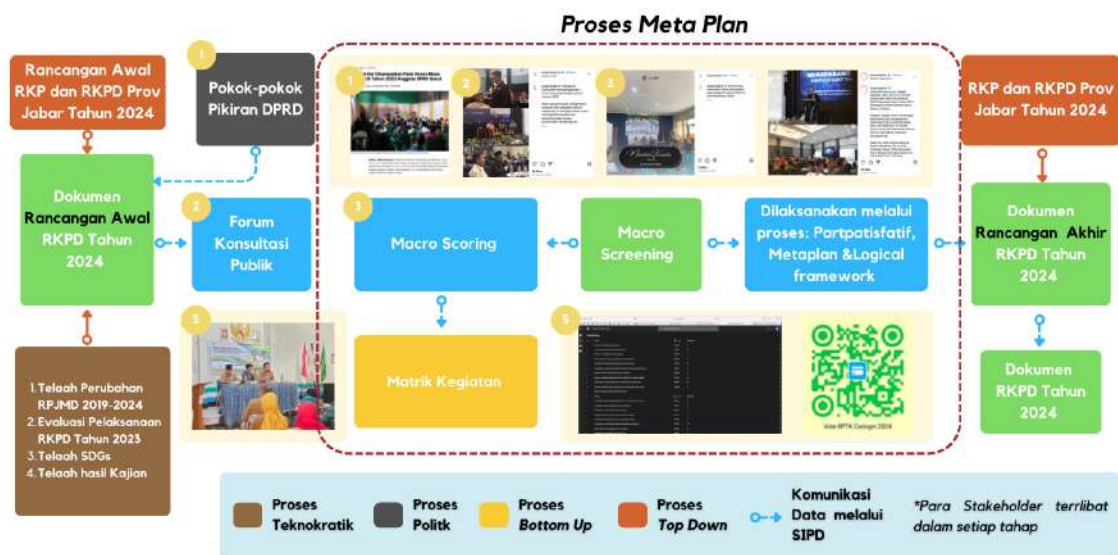
Selanjutnya, ditetapkan kegiatan yang bernilai besar berdasarkan peringkat dan diberikan makro skoring bernilai antara 0 sampai 5, dengan kategori nilai tambah, rantai nilai, model usaha, majemen dan pengelolaan.

Dengan menggunakan metode “*Meta Plan*” tersebut, dari usulan pada musrenbang desa/kelurahan dapat dilakukan penajaman kegiatan prioritas untuk ditetapkan dan disepakati bersama sebagai prioritas Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan (RPTK) yang akan diusulkan pada RKPD Tahun 2025 dan hasilnya dapat diterima setiap unsur pemangku kepentingan tanpa adanya konflik meskipun usulannya tidak terakomodir.

Musrenbang ini dilaksanakan dengan menggunakan 3 metode, yaitu partisipatif, *metaplan* dan *logical framework approach*, 3 metode tersebut diterapkan kaena pembangunan diharapkan pada pilihan-pilihan yang semakin kompleks dan sulit, sehingga dibutuhkan consensus diantara pelaku dan agenda yang semakin kompleks dan sulit, sehingga dibutuhkan konsensus di antara pelaku dan agenda yang semakin kolaboratif untuk penyusunan rencana tindakannya. Partisipatif artinya seluruh pelaku pembangunan harus terlibat dalam proses diagnose-perencanaan-pelaksanaan-pengendalian. Mereka bukan sekedar peserta lokakarya dan responden wawancara, akan tetapi harus merupakan bagian dari kelompok kerja. *Metaplan* merupakan diskusi dengan penuliskan gagasan/program pada kartu, sehingga memungkinkan banyak program muncul secara terstruktur, sedangkan *logical framework approach* adalah analisis terhadap program yang ditulis berdasarkan logika sebab akibat. Isu penting diterjemahkan ke dalam pohon tujuan dan hasil analisis diterjemahkan ke dalam tahap-tahap perencanaan.

Sedangkan pelaksanaannya terdiri atas 3 tahapan, yaitu: *macro screening*, *macro scoring* dan matriks kegiatan. *macro screening* bertujuan untuk menyeleksi dari sekian banyak program desa/ kelurahan menjadi ± 2 program kegiatan, ditulis di kartu *metaplan*, dan di tempelkan pada papan kertas yang telah di sediakan sesuai dengan kategorinya, yaitu : (1) potensi sumber daya alam, (2) potensi sumber daya manusia, (3) teknologi dan infrastruktur pendukung, dan (4) kebutuhan pasar. Setelah itu, setiap item program kegiatan disusun di kolom pada tahapan *macro scoring*. Kolom *scoring* terdiri dari 5 kategori, yaitu : (1) nilai tambah, (2) rantai nilai, (3) Model usaha, (4) manajemen, dan (5) lembaga pengelola. Setiap kolom *scoring* di beri nilai antara 0 (Tidak penting) sampai 5 (sangat penting sekali). Kemudian pada masing-masing program nilainya dijumlahkan. Nilai terbesar di tiap-tiap desa/kelurahan diberikan peringkat kemudian dimasukkan ke dalam matriks kegiatan disusun berdasarkan peringkat tersebut. Pada matriks kegiatan terdiri dari atas kolom program, volume, lembaga terkait, kontribusi, estimasi biaya, dan waktu (*start up program*).

Gambar 2.57. Kerangka Kerja Meta Plan



3. Inovasi perencanaan melalui Ngopi Sultan (Ngobrol Pintar Seputar Perencanaan)

Inovasi perencanaan melalui Ngopi Sultan (Ngobrol Pintar Seputar Perencanaan) dilaksanakan melalui FGD (*Focus Group Discussion*) secara *hybrid* secara daring dilaksanakan melalui video confrence zoom meeting dan siaran langsung melalui kanal youtube, Ngopi sultan membahas mengenai berbagai hal terkait perencanaan seperti proses penyusunan dokumen perencanaan, data hingga proses penjaringan isu strategis dan peningkatan pendapatan daerah.

B. Inovasi Program Pembangunan Daerah

Dalam rangka percepatan pembangunan daerah yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang prima, dan peningkatan daya saing daerah, pemerintah Kabupaten Garut menerapkan perencanaan pembangunan dengan pendekatan holistik, tematik, integratif dan spasial untuk mendorong pelaksanaan kegiatan prioritas yang dapat meningkatkan



kepuasan masyarakat terhadap penyediaan berbagai fasilitas publik ditengah terbatasnya kapasitas rill keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah. Pendekatan holistik dalam pelaksanaan perencanaan ini dilaksanakan melalui perencanaan yang terkoordinasi secara multi-sektor, multi-stakeholder dan multi-SKPD berdasarkan tematik fokus daerah.

Berikut merupakan detail implementasi kegiatan inovasi SKPD yang telah berjalan (sebelum tahun 2024):

Tabel 2.99 Implementasi Kegiatan Inovasi

No	Judul Inovasi dan Detail	Tahun Awal pelaksanaan
1	RAKSA PADUKA BERGRADASI (Gerakan Desa Sadar Adminstrasi Kependudukan melalui Gerai Administrasi Kependudukan Desa Terintegrasi dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan)	2023
2	GERBANG RAJA (Strategi Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan Melalui Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera)	2023
3	GERBANG CAHAYAKU (Gerakan Bangun Cegah Kawasan Kumuh) Merupakan salah satu program unggulan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut berupa penataan kawasan permukiman di perkotaan dengan tujuan memelihara, menjaga dan mencegah suatu kawasan permukiman terindikasi kumuh agar tidak masuk kedalam kategori kumuh	2023
4	PANDUMAS (Pelayanan dan Pengaduan Permasalahan Sosial) Inovasi percepatan pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, melalui layanan media sosial dan aplikasi chat.	2023
5	SILAT Peningkatan Kualitas Pengelolaan Alat Kesehatan Melalui (Sistem Informasi Pengelolaan Alat Kesehatan ada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut)	2023
6	Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik Melalui Media Website di Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut	2023
7	PUBLISH BABY Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan	2023
8	SIMETRIS (Optimalisasi Monitoring Evaluasi Terpadu Program Strategis) Sebagai Upaya Pengendalian Dan Evaluasi Pada Bidang PPEPD BAPPEDA Kabupaten Garut	2023
9	Peningkatan Akurasi Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Melalui Penyusunan Pedoman Jaminan Kesehatan di Kabupaten Garut	2023
10	DIGJAYA Optimalisasi Pengolahan Dan Penyajian Data Administrasi Kependudukan	2023
11	Optimalisasi Penyebarluasan Promosi Wisata Melalui Pengembangan Website di Kecamatan Caringin Kabupaten Garut	2023
12	Upaya Peningkatan Efektifitas Pelaporan Melalui Pedoman Standarisasi Penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Garut	2023
13	TERAS PANGAN Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat Melalui Gerakan Tertata Asri Pangan Di Pekarangan (TERAS PANGAN) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut	2023
14	KATAPEL JUPEL Pemajuan Kebudayaan Lokal Melalui Peningkatan Juru Pelihara (KATAPEL JUPEL) di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Garut	2023
15	Peningkatan Tata Kelola Keuangan BLUD Melalui Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Yang Terintegrasi Pada RSUD dr. Slamet Garut	2023
16	Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Dengan Pola Kemitraan Kelembagaan Di Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut	2023
17	SI LADU KETAN Peningkatan Paten Melalui Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (SI LADU KETAN) Di Kantor Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut	2023



No	Judul Inovasi dan Detail	Tahun Awal pelaksanaan
18	Peningkatan Tata Kelola Perencanaan Dan Pelaporan Pembangunan Desa Melalui Forum Koordinasi Terpadu Di Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut	2023
19	SIAMPEL Peningkatan Layanan Sanitasi Melalui Sistem Informasi Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (SIAMPEL) Di Kabupaten Garut	2023
20	OPPABOLING Optimalisasi Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan Melalui Kolaborasi Pelayanan Keliling (OPPABOLING) Di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut	2023
21	Optimalisasi Pendapatan Asli Desa Melalui Pola Kemitraan BUMDES Dan Komunitas Masyarakat Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Desa Di Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut	2023
22	SIMADU MPP Sistem Informasi Manajemen Terpadu Mal Pelayanan Publik Digital (SIMADU-MPP)	2023
23	SIKOPI GARUT Optimalisasi Penilaian Kinerja Organisasi Melalui Sistem Informasi Kinerja Organisasi Dan Penilaian Instansi Garut (SIKOPI-GARUT)	2023
24	SERASI Pengembangan Sinergitas Ekonomi Kreatif Berbasis Kolaborasi (SERASI) Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Garut	2023
25	Strategi Penurunan Potensi Konflik Sosial Melalui Peta Kerawanan Potensi Konflik Sosial Di Kabupaten Garut	2023
26	KONTRAK HYBRID Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan Melalui KONTRAK HYBRID Pada Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Garut	2023
27	SIUJI PAMAN Peningkatan Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan Melalui Pengelolaan Pelayanan SIUJI PAMAN (Sosialisasi, Edukasi Dan Pengujian Pangan Aman) Di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut	2023
28	Pengelolaan Informasi Kinerja Pelayanan Publik Melalui Jajak Pendapat Online Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut	2023
29	RUMAH EKSPOR Peningkatan Kinerja Ekspor Daerah Melalui Coaching Clinic "RUMAH EKSPOR" Di Kabupaten Garut	2023
30	SATRIA Peningkatan Mutu Tata Kelola Sarana Dan Prasarana Sekolah Melalui Sistem Aplikasi Data Sarana Dan Prasarana Pada Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar (SATRIA) Dinas Pendidikan Kabupaten Garut	2023
31	PEPELING Pengelolaan Penyuluhan Pertanian Melalui Mobil Penyuluhan Pertanian Keliling (PEPELING) Di Kabupaten Garut	2023
32	GASPOLS Transformasi Digital Melalui Garut Single Portal Online Service (GASPOLS)	2023
33	PORDA KARPAW Efektivitas Penyusunan Pelaporan Data Melalui Portal Data Karangpawitan (PORDA KARPAW) Di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut	2023
34	PODCAST RUANG BINCANG ONLINE LITERASI RUBICON LITE Pengembangan Layanan Perpustakaan Melalui "PODCAST RUANG BINCANG ONLINE LITERASI RUBICON LITE" Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Garut	2023
35	Pelestarian Sumber Daya Genetik Ternak Domba Garut Melalui Inkubasi Peternakan Berbasis Kawasan Di Kabupaten Garut	2023
36	TANGKAS Optimalisasi Pemberdayaan Kelembagaan Anak Dengan Gerakan Terpadu Tangani Kekerasan Anak Di Sekolah (TANGKAS) Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut	2023



No	Judul Inovasi dan Detail	Tahun Awal pelaksanaan
37	Manajemen Data Perencanaan Melalui Sistem Informasi Rencana Kebutuhan Rumah Sakit (RKRS) Pada RSUD dr. Slamet Garut	2023
38	SI PRIMA Peningkatan Informasi Pelayanan Publik Melalui Sistem Informasi Pelayanan Prima (SI PRIMA) Pada Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut	2023
39	SINTA Peningkatan Tata Kelola Administrasi Rapat Kerja DPRD Melalui Sistem Informasi Rapat Kerja (SINTA)	2023
40	Optimalisasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan Berbasis Partisipatif Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Garut	2023
41	Akselerasi Pengurangan Risiko Bencana Melalui Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pembentukan Desa Tangguh Bencana Di Kabupaten Garut	2023
42	E-KLIWAS Strategi Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Melalui E-KLIWAS (Elektronik Klinik Pengawasan) Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut	2023
43	JAWARA DESA Inovasi Peningkatan daya saing usaha mikro melalui inkubasi bisnis di tingkat desa	2023
44	GARUDA (Garut Satu Data) Portal data terbuka yang menyediakan data akurat dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten Garut	2023
45	SIDATING Optimalisasi Pelaporan Melalui Sistem Informasi Data Stunting (Sidating) Di Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut	2023
46	Optimalisasi Pelaporan Evaluasi Kinerja Bersumber Dari Laporan Pengaduan Masyarakat Di Dinas Perhubungan Kabupaten Garut	2023
47	TESIS WEB Optimalisasi Barang Milik Daerah Melalui Teknologi Berbasis Situs Web (Tesis Web) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Garut	2023
48	SAWARGA Peningkatan Penanganan Keamanan Dan Ketertiban Melalui Aplikasi Sapa Warga (Sawarga) Di Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut	2023
49	SIGITALISASI Updating Sistem Pelaporan Data Balita Stunting (Sigitalisasi) Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut	2023
50	SISPEL Pengembangan Sistem Pelaporan (Bang Sispel) data Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut	2023
51	Pembuatan Bank Data Dalam Rangka Peningkatan Akurasi Data Kependudukan Dan Catatan Sipil Melalui Google Drive Di Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut	2023
52	Optimalisasi Kinerja Seksi Pengembangan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Garut	2023
53	SIPANDU JAYA Sistem Pelaporan Posyandu Terpadu (SIPANDU JAYA) di Wilayah Kerja Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut	2023
54	Optimalisasi Pelayanan UPT Diskannak Wilayah VIII Melalui Sosialisasi Penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) Kepada Kelompok – Kelompok Ternak Di Wilayah Kecamatan Cikelet	2023
55	Penyediaan Media Informasi Harga Ternak Domba di Pasar Hewan Bayongbong	2023
56	TIMER PEPENDE Pengawasan Pengelolaan Dana Desa oleh Tim Terpadu (Timer Pepende) di Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut	2023
57	ANDONG KERATON Optimalisasi Pelayanan Pengajuan Berkala Kendaraan Bermotor Melalui Andong Keraton (Angket Pendorong Kepuasan Masyarakat Secara Online) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Garut	2023
58	SIKEREN (SIKEREN) Sistem Informasi Keluarga Berencana	2023
59	OPEN GOPE	2023



No	Judul Inovasi dan Detail	Tahun Awal pelaksanaan
	Optimalisasi Pelaporan Kegiatan Pertanian melalui Model Google Workspace Drive (Open Gope) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian Wilayah XIII Kabupaten Garut	
60	Mekanisme Penyelesaian Kerugian Daerah Dengan SOP TPKD Sebagai Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan Kegiatan Daerah di Inspektorat Daerah Kabupaten Garut	2023
61	PENDAK Penandatanganan Dokumen Administrasi Kepegawaian Secara Elektronik (PENDAK)	2023
62	Penyediaan Data Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Garut	2023
63	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Standart Operational Procedure (SOP) Perencanaan, Penganggaran Hibah dan Bansos Serta Modul Perencanaan dan Penganggaran Hibah dan Bansos pada Pemerintah Daerah Kabupaten Garut	2023
64	Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat di Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota	2023
65	SAROJA Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dan Lingkungan Melalui Bank Sampah Regol Sejahtera (SAROJA) di Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota	2023
66	Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Berbasis Sistem Aplikasi pada Kecamatan Bl. Limbangan Kab. Garut	2023
67	Digitalisasi Pengelolaan Data Kerusakan Jalan, Ruas Jalan Kiarakohok-Linggamanik di UPT PUPR Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut	2023
68	SIPEDOC II Optimalisasi Sistem Informasi Pengelolaan Data Irigasi di Daerah Irigasi Citameng II (SIPEDOC II)	2023
69	SIPIDAH Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah Melalui Aplikasi Sistem Pendaftaran Pajak Daerah (SIPDAH) pada Badan pendapatan Daerah Kabupaten Garut	2023
70	Mengeksplorasi Potensi Informasi Berbasis Digital dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Tarogong kaler	2023
71	Optimalisasi Administrasi Tata Kelola Pasar Wisata Samarang Kepala UPT Disperindag Esdm Wil. XIII	2023
72	Peningkatan Pembinaan Terhadap Pelaku Ikm di UPT Wilayah I Cilawu Kabupaten Garut	2023
73	SISIL Penggunaan sistem informasi laboratorium (SISIL) sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan di laboratorium kesehatan dan kalibrasi Kabupaten Garut	2023
74	Pelajar Sadar Keselamatan Berlalu Lintas (Pesak Lalin) di UPTD Wilayah III Dinas Perhubungan Kabupaten Garut	2023
75	ZI BERTEMAN Pencegahan Kecelakaan Diperlintasan Perkeretaapian Melalui Sosialisasi Zero Accident Berhenti Tengok Kanan Kiri Aman (ZI BERTEMAN) Dinas Perhubungan Kabupaten Garut	2023
76	SIDATUK Sistem Informasi Data Kependudukan Kersamanah "Sidatuk" di Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut	2023
77	SI TANDUK GAGAH Sistem Informasi Pendataan Penduduk Gagal Sekolah (Si Tanduk Gagah) di Kabupaten Garut	2023
78	AJUDAN Digitalisasi Arsip Kepegawaian di Sekretariat Daerah Kabupaten Garut - "AJUDAN" (Aplikasi Anjungan Data Kepegawaian)	2023
79	DIGI PENA Digitalisasi pelayanan kelurahan Karangmulya (DIGI PENA)	2023
80	Sistem Pengelolaan Dokumen Kepegawaian berbasis Website di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.	2023
81	Peningkatan Layanan Informasi Publik pada UPT Penyiaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut	2023



No	Judul Inovasi dan Detail	Tahun Awal pelaksanaan
82	DID Digitalisasi Display Informasi Diskominfo (DID) Agenda Kegiatan dan Data Kepegawaian Berbasis Web di Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut	2023
83	SIRDUK Peningkatan Efektifitas Pelaporan Data Penduduk Melalui Sistem Online "Sirduk" (Sistem Rekapitulasi Penduduk Online) di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut	2023
84	SI PERMANA METAL Peningkatan Sistem Pelaporan Masalah Bencana Melalui Media Digital (Si Permana Metal) di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut	2023
85	Strategi kolaborasi Pengembangan Desa Wisata Pendekatan Pentahelix Dalam Percepatan Peningkatan Ekonomi Daerah Sebuah Strategi kolaborasi Pengembangan Desa Wisata Pendekatan Pentahelix Dalam Percepatan Peningkatan Ekonomi Daerah	2022
86	SIBINWAS Sebuah Program Peningkatan Pengawasan Keuangan Desa Melalui Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (SIBINWAS PAKDE) di Inspektorat Daerah Kabupaten Garut	2022
87	ASN Sebuah upaya membangun Akuntabilitas Kinerja Melalui Aplikasi "ASN SIGAP" Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut	2022
88	SESENTIL Sebuah upaya Akselerasi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Melalui Asistensi Sosial yang Berkualitas dan Terintegrasi (SESENTIL) di Social Centre	2022
89	Peningkatan Pengelolaan Irigasi Melalui Pemberdayaan Masyarakat yang Mandiri dan Berkelanjutan Upaya peningkatan Pengelolaan Irigasi Melalui Pemberdayaan Masyarakat yang Mandiri dan Berkelanjutan	2022
90	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Melalui Formula 3 in 1 (Sirib, Rabwal, dan PKBK) Upaya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Melalui Formula 3 in 1 (Sirib, Rabwal, dan PKBK)	2022
91	Sikawat Merupakan upaya peningkayan Optimalisasi Pelayanan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Melalui Sikawat di Kabupaten Garut	2022
92	Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum Melalui Kolaborasi Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Perdesaan Merupakan upaya peningkatan cakupan pelayanan air minum melalui kolaborasi pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Perdesaan	2022
93	SIDAKEP Sebuah upaya dalam Optimalisasi Proses Pengendalian Program Kegiatan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) Melalui Sistem Pengendalian Keproyekan «SIDAKEP» di Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman	2022
94	STOP KABUR Merupakan sebuah Strategi Terpadu dalam Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak Bawah Umur (STOP KABUR) Melalui Kolaborasi Lintas Sektor Berbasis Digital	2022
95	SPBE Merupakan Akselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Melalui Pengembangan Command Centre	2022
96	Pembuatan Mesin Pengaduk Dodol Dengan Menggunakan Sistem Double Jacket Untuk Meningkatkan Produktivitas Industri Dodol Pembuatan Mesin Pengaduk Dodol Dengan Menggunakan Sistem Double Jacket Untuk Meningkatkan Produktivitas Industri Dodol	2022
97	GENTRA KARYA Merupakan sebuah Strategi Kolaborasi Penurunan Angka Pengangguran melalui Gerakan Tenaga Kerja Berkarya (GENTRA KARYA) di Kabupaten Garut (Kolaborasi Pentahelix)	2022
98	Manajemen Pengelolaan Obat Bagi Peserta BPJS Berbasis Teknologi Informasi untuk Menunjang Pelayanan One Stop Shopping di RSUD dr. Slamet Garut	2022
99	Program Optimalisasi Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit Berbasis Teknologi Informasi Merupakan Program Optimalisasi Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit Berbasis Teknologi	2022



No	Judul Inovasi dan Detail	Tahun Awal pelaksanaan
	Informasi	
100	Akselerasi Farmasi Berbasis Antar Obat dan Kolaborasi Stakeholder	2022
101	TOSS Stunting Merupakan Upaya pembuktian prevalensi Stunting dari hasil SSGI Th 2021 Kab. Garut tidak setinggi hasil tersebut. disusun langkah upaya strategis yg di ACC pimpinan mendapatkan dukungan berupa kebijakan dan anggaran untuk penanganan secara langsung maupun tidak langsung. Hingga mendapat apresiasi semua pihak terutama tk.Prov dan Tk. Pusat	2022
102	"MELANI" Merupakan penguatan program rutin yang telah dilaksanakan dikesehatan ibu dan anak (KIA) kab. Garut. Dengan harapan semua pihak terkait lintas program maupun lintas sektor lebih mengetahui program yang mendukung terjadinya kasus kematian ibu, bayi dan juga terjadinya prevalensi stunting. Sehingga dukungan kebijakan dan dukungan program stakeholder terkait akan lebih optimal. Sehingga kasus kematian ibu, kematian bayi dan prevalensi stunting tidak terjadi	2022
103	PAJERO Program Inovasi PAJERO (Pelayanan Administrasi Kependudukan Jemput Ka Rorompok) yang menjadi tanggungjawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka setiap pemohon mendapatkan dokumen Kependudukan melalui pelayanan langsung mendatangi kerumah warga yang rentan seperti Disabilitas, orang sakit, lansia dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) untuk mendapatkan penerbitan dokumen Kependudukan yang terdiri dari Penerbitan Kartu Keluarga, KTP elektronik dan Perekaman / Iris mata.	2022
104	T-REKK Program Inovasi T-REKK (Tim Reaksi Cepat Kagawatdaruratan Administrasi Kependudukan) yang menjadi tanggungjawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka setiap pemohon mendapatkan dokumen Kependudukan melalui pelayanan langsung mendatangi kerumah sakit yang merawat pasien dimana identitas kependudukannya belum valid atau belum terdaftar sebagai penduduk untuk mendapatkan pelayanan Perekaman / Iris mata dan penerbitan dokumen Kependudukan yang terdiri dari Penerbitan Kartu Keluarga, dan KTP elektronik.	2022
105	INFOLARAS Optimalisasi Kinerja Penanggulangan Bencana Melalui Sistem Informasi Terpadu Selaras (INFOLARAS)	2022
106	Optimalisasi Penanganan Sanitasi Melalui Pembentukan Kewirausahaan Sanitasi Secara Pentahelix di Kecamatan Pasirwangi	2021
107	SAPAKAT MALIRE NU MISKIN Merupakan sebuah Strategi Multi Stakeholder Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Melalui Penyediaan Lavanan Infrastruktur Dasar dan Peningkatan Masvarakat Miskin	2021
108	DEWA MEMBUMI (Pengembangan Desa Wisata melalui Pemetaan Potensi dan Kolaborasi untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi di Kabupaten Garut) Tujuan kegiatan inovasi yaitu mengembangkan Desa Wisata yang berkelanjutan dan tematik dalam mendukung Pemulihan Ekonomi dengan sasaran mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan desa wisata. Strategi yang digunakan yaitu: 1. Memetakan dan menilai potensi Desa Wisata berdasarkan 4A+P (Attraction, Accessibility, Amenity, Ancillary, Promotion), Ketentuan Pola Ruang dan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten 2. Membangun kolaborasi dan komitmen bersama perencanaan penganggaran pengembangan Desa Wisata Ruang lingkup inovasi yang dilaksanakan adalah melakukan pengembangan desa wisata dengan mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan melalui pemetaan dan penilaian potensi desa wisata serta kolaborasi multisektor.	2021
109	DASI PAK RT Merupakan sebuah Optimalisasi Pelaporan Pajak Daerah Melalui Dashboard Realisasi Pajak Daerah Real Time	2021
110	SIMBOL Optimalisasi Program Peningkatan Pendapatan ASI Daeran Melalui Sistem Online (SIMBOL) pada Badan Pendapatan Daerahkabupaten Garut	2021



No	Judul Inovasi dan Detail	Tahun Awal pelaksanaan
111	PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) Merupakan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui konsep Small/Micro Business Incubator (SBI) berbasis pemberdayaan (Empowerment). Merupakan upaya pemulihan ekonomi masyarakat pesisir yang terdampak pandemik Covid 19. Kelompok yang menjadi sasaran adalah kelompok wanita nelayan yang masuk kategori masyarakat miskin atau terdampak covid 19. Kegiatan dilaksanakan melalui konsep Small Business Incubator dari mulai tahap pembentukan kelompok, pendampingan, pelatihan serta pemberian bantuan modal usaha. Dari kegiatan ini diharapkan terbentuk kelompok usaha pesisir yang terintegrasi yang diharapkan akan berdampak pada pengentasan kemiskinan sekaligus mendorong peningkatan produksi, diversifikasi dan nilai tambah usaha hasil perikanan. Dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun dengan target 1000 RTM di 7 kecamatan pesisir.	2021
112	Point Breeding Center (PBC)/ SERIKANDI PBC merupakan unit penyedia benih ikan mandiri yang disebar di titik-titik tertentu di kawasan perairan danau atau sungai dalam rangka menjamin kontinuitas produksi ikan. Didalam unit PBC ini dikembangkan Sistem Restocking Ikan Mandiri (Serikandi) dimana induk ikan dipelihara dalam unit spawning ground untuk menghasilkan benih. Setelah dipelihara dalam unit nursery ground, benih yang sudah layak tebar kemudian dilepas ke perairan. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan pada kawasan Perairan Umum Daratan (PUD) sehingga stock ikan akan terus terjaga keberadaannya tanpa perlu ada penebaran benih dari luar. Selain mendorong produksi, inovasi ini juga diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan PUD dan masyarakat di sekitar perairan.	2021
113	Rumpon Milenial (Rumpon Wisata Ramah Lingkungan) Rumpon Ramah Lingkungan merupakan inovasi yang digagas dalam rangka menata kawasan perairan Situ Bagendit. Tujuannya untuk mensinergikan usaha perikanan tangkap dengan pembangunan sektor pariwisata. Dilakukan dengan memperkenalkan masyarakat dengan rumpon yang lebih inovatif dan ramah lingkungan sebagai pengganti rumpon tradisional. Dengan begitu diharapkan nelayan masih bisa menikmati hasil tangkapan tanpa mengganggu keindahan kawasan wisata. Rumpon yang akan diperkenalkan pada masyarakat adalah rumpon yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu pemandangan dan tidak mengganggu aktivitas lalu lintas perahu/rakit para wisatawan. Rumpon ini juga sekaligus bisa memberikan tambahan penghasilan bagi nelayan dari sektor pariwisata. Kajian dilakukan bekerjasama dengan Politeknik Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pangandaran.	2021
114	TPI Mobile -Aplikasi Pelelangan Ikan Online pertama di Indonesia Inovasi ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan UPT TPI (Tempat Pelelangan Ikan) melalui penerapan inovasi pelelangan ikan berbasis aplikasi. Bertujuan untuk mendorong peningkatan pelayanan TPI dalam rangka meningkatkan harga dan nilai tambah ikan di tingkat nelayan. Kegiatan dilaksanakan melalui pengembangan Aplikasi pelelangan Ikan online dengan nama TPI Mobile yang akan menjadi aplikasi pelelangan ikan pertama di Indonesia. Melalui aplikasi ini, para pebisnis dan masyarakat di seluruh Indonesia bisa membeli ikan asal Garut dengan mengikuti lelang dan bertransaksi secara online.	2021
115	Pokmaswas GO Inovasi ini dilaksanakan dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian sumberdaya hayati kelautan dan perikanan sehingga capaian produksi perikanan tangkap bisa terus dipertahankan/ meningkat. Kegiatan dilakukan melalui penguatan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengawasan Sumberdaya Perikanan (Pokmaswas). Dilaksanakan melalui bantuan sarana prasarana patroli serta pengembangan aplikasi pengawasan dan pelaporan online yang diberinama Pokmaswas-GO (Pokmaswas-Garut Online). Pokmaswas GO akan menjadi salah satu aplikasi pertama di Indonesia dalam meningkatkan efektifitas pengawasan dan pelaporan Pokmaswas yang akan hubungkan dengan sistem pelaporan pemerintah provinsi dan pusat.	2021



No	Judul Inovasi dan Detail	Tahun Awal pelaksanaan
116	Pengembangan <i>Closed Loop</i> Bisnis Pertanian Pada Tahun 2021 Pilot Project (3 Ha). Kegiatan <i>Closed Loop</i> merupakan Pengembangan Kawasan Hortikultura secara Korporasi Petani mulai Hulu sampai dengan Hilir dengan sinergitas antar stake holder (Petani, Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Perbankan. Tahap Pengembangan Kawasan <i>Closed Loop</i> (30 Ha) di Kecamatan Cigedug dan Duplikasi Kegiatan <i>Closed Loop</i> (50 Ha) di Kecamatan Cikajang. Sedangkan komoditas yang dikembangkan Cabai Besar, Cabai Rawit, Sawi Putih, Kol/Kubis, Tomat, Kentang.	2021
117	Membangun Sistem “Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani” (Komoditas Jagung) Pada Tahun 2021 Lokus Garut Selatan (Kec. Pakenjeng, Bungbulang, Cikelet dan Mekarmukti) seluas 2.850 Ha. Korporasi petani adalah Lembaga ekonomi petani yang berbadan hukum berbentuk koperasi, badan usaha milik petani, CV, PT, usaha dagang dengan sebahagian besar kepemilikan modalnya dari petani yang akan mengarah pada skala industri, distribusi, pemasaran dan permodalan, sehingga petani punya posisi tawar (<i>bargaining position</i>) atas produk yang dihasilkan. Tujuan : Penataan kelembagaan petani (kelompok tani/ Gapoktan) untuk keterpaduan program dan kegiatan pembangunan pertanian yang efisien dan efektifitas pelaksanaan kegiatan di lapangan, pengutuhan system dan usaha agribisnis yang terintergasi, efisiensi system budidaya, pengolahan, peningkatan posisi tawar dan kesejahteraan petani serta penguatan sektor pertanian dalam perekonomian wilayah.	2021
118	Sistem Informasi Pembangunan Keluarga secara nge LINK (SI BANGGA-LINK) Sebuah sistem informasi yang mengemas program pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan anak yang nantinya bisa diakses oleh tingkat kecamatan dan desa secara nge link, agar memudahkan pemberian informasi program kepada sasaran.	2021
119	Akselerasi <i>freshope Garut Freshmarket</i> Akselerasi <i>freshope Garut Freshmarket</i> merupakan kegiatan memfasilitasi para petani produksi dengan pelaku usaha/ pasar seperti Ekspor, Hotel, Restoran, Catering, Pasar Online, dll. Dengan kepastian harga jelas. Pada Tahun 2020 Pembangunan Fisik Bangunan <i>Freshope</i> . Tahun 2021 Penataan Ruangan dan Taman/Halaman Bangunan <i>Freshope</i> . a. Mengoptimalkan pemasaran produk hasil pertanian baik langsung/temu mitra maupun menggunakan aplikasi pemasaran. b. Mengadakan bazar rutin untuk beberapa komoditas pada saat panen raya atau harga turun. Memasarkan produk hasil pertanian ke perumahan/kampung dengan kendaraan roda tiga/mobil atau bermitra dengan toko dan warung yang ada.	2020
120	Garut <i>Edufarm Centre</i> (GEC) GEC merupakan inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan minat generasi muda terhadap bidang pertanian sebagai upaya peningkatan sumberdaya manusia berkualitas dengan regenerasi petani era 4.0 yang adaptif terhadap teknologi information and technology (IT) dan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Garut <i>Edufarm Center</i> (GEC) memiliki peran penting dan strategis dalam menumbuh-kembangkan minat generasi muda terhadap pertanian dan regenerasi petani. Pertanian adalah sektor yang sangat potensial tetapi perlu ditunjang dengan sumberdaya manusia yang berkualitas.	2020
121	Pengembangan Klinik Industri "Klinik industri sebagai pusat konsultasi industri, workshop, R&D, dan inkubasi bisnis Pengadaan Co working space inkubasi bisnis untuk industri"	2020
122	Gerakan Pembangunan Keluarga Tangguh Peranan Poktan dalam intervensi Penurunan Stunting melalui Garapan Khusus	2020



No	Judul Inovasi dan Detail	Tahun Awal pelaksanaan
123	Pengembangan Kreatifitas Remaja melalui Komunitas Remaja Berencana (KIRANA GARUT) Peranan KIRANA dalam upaya Penurunan Stunting melalui Penundaan Usia Perkawinan (PUP) 21-25 Tahun.	2020
124	Pembentukan Kampung Ramah Anak Dalam mewujudkan Kabupaten Garut Layak Anak salah satu inovasi adalah pembentukan kampung ramah anak yang tujuannya untuk membangun inisiatif pemerintah desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha agar mengembangkan visi misi, kebijakan, program, kegiatan dan kelembagaan pembangunan yang peduli dan memihak pada pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak Pembentukan kampung ramah anak (KRA) masih dalam tahap sosialisasi ke kampung KB dan Lokasi P2WKSS, dalam tahap rencana pembentukan dan sosialisasi KRA tahun 2022 selain di Kampung KB dan Lokasi P2WKSS semuanya disesuaikan dengan kemampuan dukungan kegiatan tersebut walaupun target keseluruhan 442 Desa/Kelurahan	2020
125	Peningkatan promosi dan pemasaran kebun “ <i>Wancina Ngopi Suruput Kopi Garut</i> ” Kopi masih menjadi salah satu komoditas andalan sub sektor perkebunan hingga saat ini. Salah satu upaya untuk memberikan nilai tambah serta daya saing suatu produk dapat dilakukan melalui promosi maupun pemasaran yang terstruktur dan sistematis. Selain itu membudidayakan minum kopi di kalangan masyarakat Garut juga perlu dilakukan untuk meningkatkan konsumsi lokal yang dilakukan dengan melibatkan berbagai komunitas masyarakat sebagai penggerak utama. Disamping itu, perlu juga dibangun ruang edukasi terkait Kopi Garut hingga dapat dikenal oleh seluruh masyarakat.	2019
126	Sistem Manajemen Pemanfaatan Barang Daerah Kabupaten Garut (<i>SiMaMan-BaDaG</i>) Sistem Informasi Manajemen Pemanfaatan Barang Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan barang milik daerah lebih efektif khususnya dalam rangka Penertiban Aset Tanah dan Bangunan di Kabupaten Garut yang diantaranya terdiri dari data-data meliputi Data tanah dan bangunan serta Informasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah khususnya Tanah Dan Bangunan. Sistem Informasi Manajemen Pemanfaatan Barang Daerah juga memudahkan informasi khususnya kepada masyarakat tentang tata kelola pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2018
127	Inovasi Laboratorium Veteriner Keliling (Pengembangan inovasi posyandu ternak) Kegiatan penyidikan pangan asal hewan untuk melindungi masyarakat dari bahan pangan yang berbahaya serta melindungi konsumen produk pangan asal hewan untuk mendapatkan produk yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal. Pengujian yang dilakukan antara lain rapid test boraks, rapid test formalin, uji kandungan babi serta melakukan uji bangkai.	2018
128	Sistem informasi jaringan elektronik melalui pelayanan <i>online</i> (SIJEMPOL) Sistem informasi jaringan elektronik melalui pelayanan <i>online</i> (SIJEMPOL) merupakan sistem yang dibuat untuk memfasilitasi perizinan <i>online</i> .	2018

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara substansial, diantaranya memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, yang menggambarkan kondisi ekonomi makro daerah, tantangan dan prospek perekonomian daerah serta arah kebijakan ekonomi daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target pembangunan.

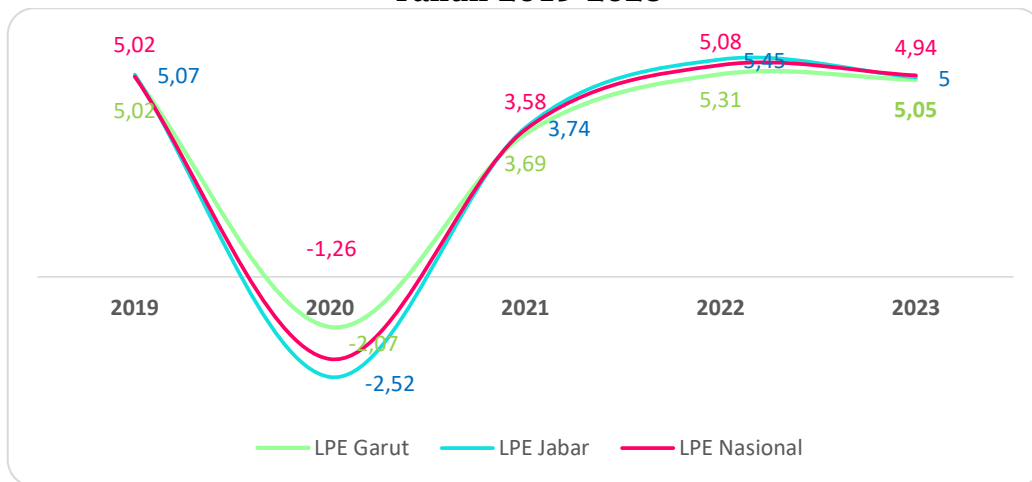
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah memuat arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP Tahun 2025, kebijakan pembangunan ekonomi dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Kerangka ekonomi daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik perekonomian daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian Kabupaten Garut, bab ini juga membahas mengenai tantangan serta prospek perekonomian Kabupaten Garut kedepan yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah.

3.1.1 Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2023

Ditinjau dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang secara teknis diukur dari perkembangan besaran PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan, dimana BPS memakai harga konstan tahun 2010, menunjukkan bahwa LPE Kabupaten Garut pada 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,94%, menurun jika dibandingkan LPE tahun 2022 sebesar 5,08%.

Gambar 3.1
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Garut, Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD

Dilihat dari pertumbuhan masing-masing kategori, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2023 yaitu (i) Transportasi dan Pergudangan (11,67%), (ii) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (10,37%); (iii) Konstruksi (8,52%); (iv) Industri Pengolahan (8,05%) dan (v) Informasi dan Komunikasi (8,03%).

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Garut Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,41	0,55	3,61	4,43	1,60
B	Pertambangan dan Penggalian	0,12	(0,69)	1,29	(0,09)	(0,13)
C	Industri Pengolahan	8,93	(0,46)	5,91	6,29	8,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,29	(1,21)	10,18	3,62	4,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,23	6,42	9,82	2,82	2,83
F	Konstruksi	7,74	(5,58)	6,82	1,98	8,52
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,91	(6,72)	3,08	4,53	4,81
H	Transportasi dan Pergudangan	5,03	(3,19)	0,21	11,89	11,67
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,50	(3,05)	0,25	17,02	10,37
J	Informasi dan Komunikasi	3,91	23,15	7,28	6,07	8,03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,54	0,48	4,33	0,19	4,12
L	Real Estat	9,24	(0,15)	9,98	4,50	6,26
M,N	Jasa Perusahaan	7,55	(13,45)	8,54	9,98	7,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,60	(1,74)	(0,86)	(0,31)	2,43
P	Jasa Pendidikan	7,09	4,95	1,09	2,77	5,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,98	(5,09)	7,59	7,25	7,15

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
R,S,T, U	Jasa lainnya	6,37	(2,76)	0,82	9,82	7,57
Produk Domestik Regional Bruto		5,02	(1,26)	3,58	5,08	4,94

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD.

Keterangan: *)Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara

3.1.2 Struktur Ekonomi

Nilai tambah yang mampu diciptakan dari berbagai aktivitas ekonomi diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sampai tahun 2023 atas dasar harga berlaku (ADHB) mengalami peningkatan sebesar Rp 5,63 Triliun atau 8,47% dari Rp 66,59 Triliun pada tahun 2022 menjadi Rp 72,22 Triliun pada tahun 2023. Keadaan ini menggambarkan adanya peningkatan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kabupaten Garut. Meskipun demikian, perkembangan tersebut juga belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Garut, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.

Tabel 3.2
PDRB ADHB Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21.478,90	22.037,47	22.720,77	24.894,24	26.230,19
B	Pertambangan dan Penggalian	783,47	687,49	740,60	805,86	727,73
C	Industri Pengolahan	4.698,73	4.740,87	5.165,75	5.711,72	6.469,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	35,77	35,24	38,96	40,85	43,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	31,80	33,98	37,53	39,07	40,56
F	Konstruksi	3.631,72	3.445,76	3.867,07	4.178,87	4.685,37
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.393,93	10.740,47	11.279,18	12.290,10	13.394,55
H	Transportasi dan Pergudangan	2.219,37	2.191,80	2.241,00	2.626,73	3.139,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.177,20	2.194,97	2.267,66	2.761,80	3.196,55
J	Informasi dan Komunikasi	1.172,81	1.447,37	1.546,59	1.635,13	1.767,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.749,50	1.782,44	1.923,49	2.038,43	2.180,57
L	Real Estat	974,01	979,08	1.079,17	1.162,12	1.257,71
M,N	Jasa Perusahaan	311,95	279,39	304,83	350,13	391,47
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.900,75	1.892,30	1.885,97	1.875,58	1.949,17
P	Jasa Pendidikan	2.999,65	3.278,32	3.407,99	3.538,46	3.800,24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	421,06	409,76	449,56	489,50	542,58

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
R,S, T,U	Jasa lainnya	1.893,97	1.866,46	1.880,29	2.152,03	2.412,49
Produk Domestik Regional Bruto		57.874,57	58.043,17	60.836,41	66.590,62	72.229,23

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD.

Keterangan: *)Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara

Untuk menganalisis perkembangan dari volume produk barang/jasa umumnya digunakan PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan (ADHK) Tahun 2010. PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan Tahun 2010 naik Rp 2,07 Triliun atau 4,94% dari sebesar Rp 42,01 Triliun pada tahun 2022 menjadi Rp 44,08 Triliun pada tahun 2023. Kondisi tersebut merupakan indikasi *quantum* (volume) produk barang/jasa secara umum mengalami peningkatan.

Tabel 3.3
PDRB ADHK Seri 2010 Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.414,99	12.483,74	12.934,34	13.507,50	13.722,99
B	Pertambangan dan Penggalian	817,33	811,71	822,17	821,39	820,29
C	Industri Pengolahan	3.383,59	3.367,92	3.567,01	3.791,38	4.096,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	23,50	23,21	25,57	26,50	27,60
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19,82	21,10	23,17	23,82	24,50
F	Konstruksi	2.617,08	2.470,95	2.639,53	2.691,81	2.921,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.478,34	7.908,33	8.151,74	8.520,78	8.930,76
H	Transportasi dan Pergudangan	1.512,34	1.464,03	1.466,84	1.641,32	1.832,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.573,30	1.525,26	1.529,14	1.789,40	1.974,93
J	Informasi dan Komunikasi	1.204,15	1.482,96	1.590,94	1.687,52	1.823,06
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.111,07	1.116,36	1.164,75	1.166,99	1.215,06
L	Real Estat	786,04	784,84	863,16	901,98	958,48
M,N	Jasa Perusahaan	239,56	207,35	225,07	247,53	265,53
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.186,17	1.165,49	1.155,43	1.151,80	1.179,80
P	Jasa Pendidikan	1.950,60	2.047,08	2.069,35	2.126,60	2.233,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	323,65	307,18	330,49	354,46	379,79
R,S, T,U	Jasa lainnya	1.450,95	1.410,94	1.422,50	1.562,18	1.680,43
Produk Domestik Regional Bruto		39.092,48	38.598,45	39.981,20	42.012,96	44.087,22

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD.

Keterangan: *)Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara

Selama tujuh tahun terakhir (2017-2023) struktur perekonomian Garut didominasi oleh 5 (lima) kategori diantaranya: (i) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (ii) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; (iii) Industri Pengolahan; (iv) Konstruksi; serta (v) Jasa Pendidikan, sampai dengan tahun 2023, kategori pertanian masih menjadi kategori unggulan (*prime mover*) dalam menggerakkan perekonomian daerah, kategori ini memberikan sumbangan nilai tambah yang dihitung atas dasar harga berlaku sebesar Rp 26,23 Triliun, dengan *share* 36,32% terhadap perekonomian. Sedangkan sumbangan nilai tambah pertanian terhadap PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai Rp 13,72 Triliun.

Tingginya peranan kategori pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Garut tidak lepas dari beberapa keunggulan komparatif (*comparative advantages*), seperti kondisi tanah yang relatif lebih subur dan cocok untuk beragam komoditi pertanian dan jumlah penduduk yang besar yang berimplikasi pada sistem pertanian yang tampak sangat beragam dan hampir sebagian besar komoditi produk pertanian sangat dominan kontribusinya, seperti berbagai palawija, sayur-sayuran dan juga padi. Namun demikian, akselerasi kinerja kategori pertanian tersebut masih belum optimal, diantaranya disebabkan hubungan antar subsistem pertanian dan kategori lain (*linkages*) belum sepenuhnya menunjukkan sinergitas pada skala lokal, regional dan nasional, hal ini tercermin dari pengembangan agroindustri yang belum optimal baik dalam pengolahan maupun pemasarannya.

Pengembangan yang bersifat sektoral pada sistem pertanian serta ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global merupakan kendala yang masih dihadapi kategori pertanian. Potensi lain dalam kategori pertanian yaitu pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan terutama dalam pengembangan usaha perikanan tangkap di pesisir selatan, usaha budidaya laut, bioteknologi kelautan, serta berbagai macam jasa lingkungan kelautan. Namun kondisi dan potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang besar ini belum diikuti dengan perkembangan bisnis dan usaha perikanan dan kelautan yang baik. Tingkat investasi sarana dan prasarana pendukung bisnis kelautan serta produksi sumber daya perikanan dan kelautan masih jauh dari potensi yang ada. Di lain pihak, lemahnya kondisi pembudidaya dan nelayan sebagai produsen menyebabkan kurang berkembangnya kegiatan dan pengelolaan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan.

Dari sisi penciptaan nilai tambah, kecepatan sektor pertanian dalam menciptakan nilai tambah sangatlah lambat apabila diperbandingkan dengan sektor lainnya terutama industri manufaktur, sehingga tidaklah mengherankan jika wilayah yang didominasi oleh sektor pertanian cenderung pertumbuhan ekonominya sangat lambat. Pada sisi lain, seiring peningkatan jumlah penduduk tentu saja berimplikasi pada peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman, sehingga luas lahan pertanian memiliki cenderung terus mengalami penurunan. Apabila dipahami secara lebih luas kondisi tersebut telah memberikan suatu sinyal positif terhadap hasil pembangunan karena salah satu indikator kemajuan negara berkembang adalah terjadinya pergeseran dari struktur ekonomi berbasis pertanian ke sektor lainnya.

Di samping pertanian, kategori yang memiliki kontribusi cukup dominan pada tahun 2023 adalah kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang mampu menciptakan nilai tambah atas dasar harga berlaku sebesar Rp 13,39 Triliun dengan *share* 18,54%, atau mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp 12,29 Triliun. Kondisi tersebut merupakan indikasi dari kenaikan volume barang/ jasa yang diperdagangkan di wilayah Kabupaten Garut.

Peranan kategori industri pengolahan yang merupakan kategori andalan di Jawa Barat, kontribusinya untuk PDRB Kabupaten Garut menduduki posisi ketiga dengan *share* mencapai 8,96%, dan nilai tambah atas dasar harga berlaku sebesar Rp 6,46 Triliun, relatif meningkat jika dibandingkan posisi tahun 2022 sebesar Rp 5,71 Triliun. Walaupun Kabupaten Garut memiliki keunggulan komparatif di sektor pertanian, namun kelemahan yang mendasar adalah masih rendahnya kegiatan industri yang memanfaatkan hasil-hasil pertanian, sehingga perdagangan antar wilayah yang dilakukan lebih dominan berupa bahan-bahan mentah hasil pertanian. Untuk itu roda perekonomian Kabupaten Garut dipandang dapat bergerak lebih cepat apabila dikembangkan industri yang dapat mengolah hasil-hasil pertanian, yang merupakan keunggulan wilayah yang dapat memperpanjang rantai agribisnis, sehingga produksi Kabupaten Garut dapat berupa barang-barang industri hasil pertanian.

3.1.3 Pendapatan per Kapita

Indikator ekonomi lainnya yang dapat memberikan gambaran kesejahteraan masyarakat secara makro adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan hasil bagi pendapatan regional (PDRB) dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada tahun 2023 PDRB per kapita mengalami pertumbuhan 6,19% dari Rp 25,34 juta pada tahun 2022 menjadi Rp 26,91 juta pada tahun 2023. Peningkatan ini dapat dikatakan cukup tinggi karena levelnya berada di atas laju inflasi yang terjadi sepanjang tahun 2023 (2,84%). Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya dapat dipakai untuk menggambarkan peningkatan dari daya beli masyarakat. Karena pada PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB), selain masih terkandung inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli, juga karena pola distribusi dari pendapatan regional Kabupaten Garut tidak mutlak merata. PDRB per Kapita ADHB tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat produktivitas penduduk di suatu wilayah yang menunjukkan nilai pendapatan yang dihasilkan akibat kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah Garut per penduduk selama satu tahun.

Untuk lebih menggambarkan perkembangan daya beli atau pendapatan riil dari masyarakat dapat diamati perkembangan PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga konstan. Pendapatan per kapita pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 6,19% dimana daya beli masyarakat secara riil pada periode yang sama mengalami kenaikan sebesar 2,73% yang tercermin dari kenaikan PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga konstan. Kondisi tersebut mencerminkan pengaruh inflasi yang terjadi pada periode bersangkutan.

Tabel 3.4
Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Garut Tahun 2019-2023

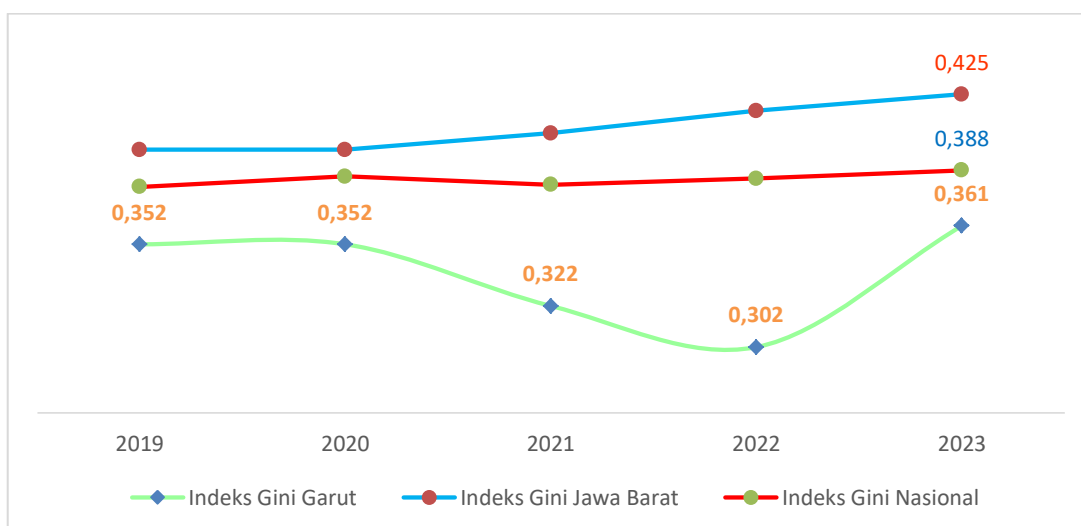
Tahun	PDRB Per Kapita (Rp Ribuan)		Jumlah Penduduk	Laju PDRB Per Kapita (%)	
	Berlaku	Konstan		adh Berlaku	adh Konstan
2019	22.116	14.939	2.622.425	8,69	4,60
2020	22.480	14.949	2.585.607	1,65	0,07
2021	23.356	15.349	2.604.787	3,9	2,68
2022	25,346	15,991	2.627.220	8,52	4,18
2023	26,914	16,427	2.683.665	6,19	2,73

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD.

3.1.4 Indeks Gini

Berdasarkan data Susenas BPS, pencapaian gini rasio Kabupaten Garut sepanjang tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi berada pada rentang 0,302-0,361. Ketimpangan paling rendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 0,302 sedangkan paling tinggi terjadi pada tahun 2023 berada pada level menengah dengan besaran 0,361 (kategori kelompok ketimpangan “ringan” karena berada di bawah 0,4). Capaian tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2022 dan sesuai rentang target RKPD 2023 sebesar 0,360-0,362. Capaian tersebut juga lebih baik dari nilai Indeks Gini Jawa Barat sebesar 0,425 dan Nasional sebesar 0,388.

Gambar 3.2
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Garut Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Garut, yang dikelola dalam SIPD

3.1.5 Inflasi

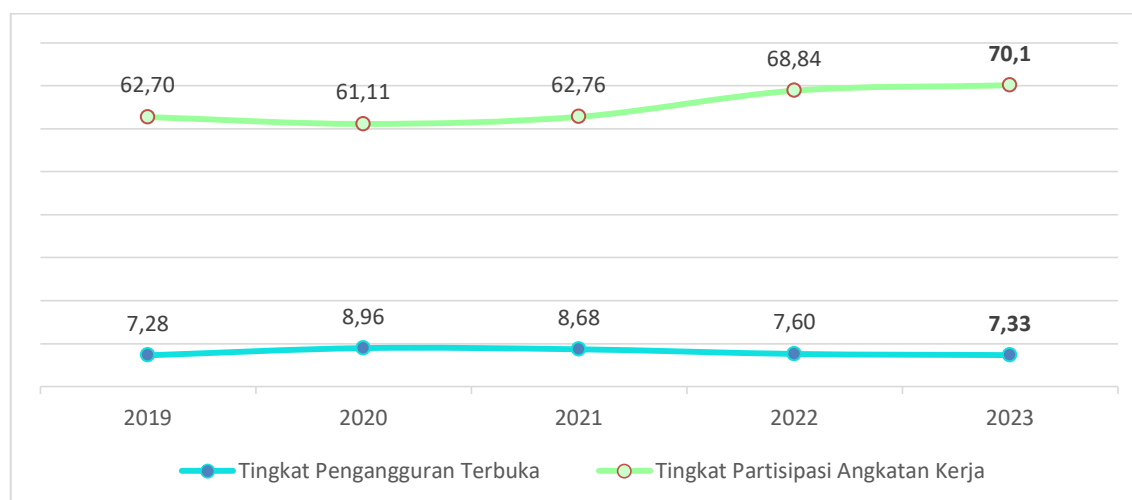
Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus dan terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Pada tahun 2023, perhitungan inflasi Kabupaten Garut, berdasarkan data BPS yang mengacu pada tingkat inflasi di Kota Tasikmalaya, menunjukkan kondisi peningkatan harga-harga yang terkendali dibandingkan tahun sebelumnya, dimana selama kurun waktu 12 bulan inflasi secara umum telah mencapai 2,84%. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa

beban hidup rumah tangga secara makro di Kabupaten Garut pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar kurang lebih 3,81%, dengan struktur kebutuhan yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 sebesar 6,65%. Kondisi inflasi pada tahun 2023 tersebut di atas inflasi Jawa Barat sebesar 2,48%, dan juga Nasional sebesar 2,61%.

3.1.6 Ketenagakerjaan

Dalam bidang ketenagakerjaan, berdasarkan data BPS Kabupaten Garut, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 mencapai 1,39 juta orang, naik 61,4 ribu orang dibanding Agustus 2022. Sejalan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang juga meningkat sebesar 1,26% poin dari 68,84% pada Agustus 2022 menjadi 70,10% pada Agustus 2023. Jumlah penduduk bekerja tahun 2023 sebanyak 1,28 juta orang atau 92,67% dari total angkatan kerja, dan jumlah penduduk menganggur sebanyak 0,10 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,33% menurun 0,27% dari tahun 2022 sebesar 7,60%. Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2023 masih di atas TPT Nasional sebesar 5,32%, namun dibawah TPT Jawa Barat sebesar 7,44%.

Gambar 3.3
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Garut, Data per Agustus 2023, yang dikelola dalam SIPD.

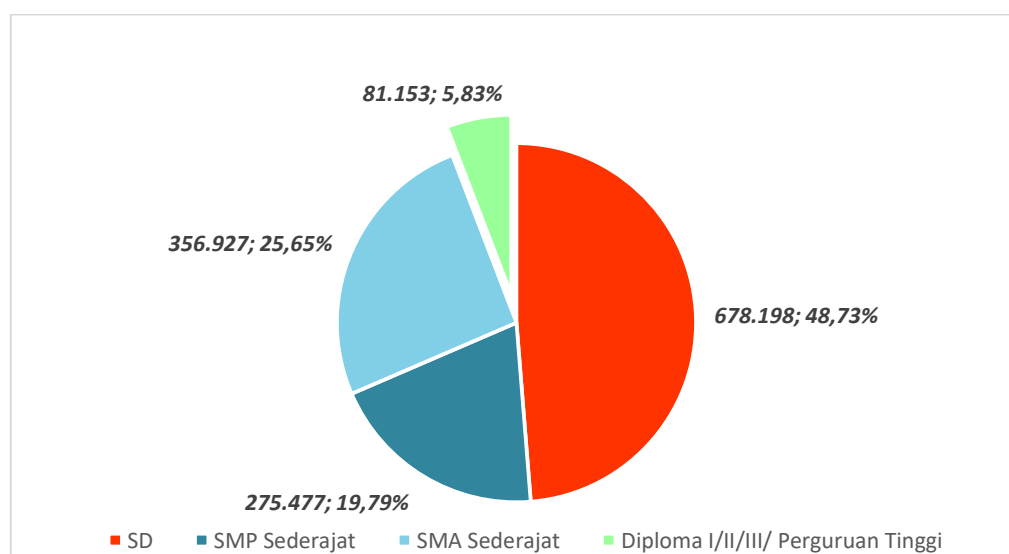
Tabel 3.5
Angkatan Kerja dan Penduduk Bekerja Kabupaten Garut
Tahun 2019 – 2023

No	Indikator Ketenagakerjaan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk yang bekerja Usia Kerja 15 Tahun Keatas (orang)	1.018.544	1.071.026	1.096.134	1.229.218	1.289.745
2	Angkatan Kerja Usia Kerja 15 Tahun Keatas (orang)	1.155.071	1.156.180	1.200.346	1.330.353	1.391.755
3	Rasio Penduduk bekerja Usia Kerja 15 Tahun Keatas (%)	92,72	91,04	91,32	92,40	92,67
4	Jumlah Pengangguran Terbuka (orang)	84.045	103.607	104.212	101.135	102.010
5	Tingkat Pengangguran (%)	7,28	8,96	8,68	7,60	7,33
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	60,13	62,70	62,76	68,84	70,10

Sumber: BPS Kabupaten Garut, Data per Agustus 2023, yang dikelola dalam SIPD

Kualitas angkatan kerja masih tampak rendah yang ditunjukkan oleh dominasi jumlah angkatan kerja yang berpendidikan lulusan SD sederajat sebesar 678.198 jiwa atau 48,73% dari total angkatan kerja, walaupun angka ini menurun dari tahun 2022 sebesar 721.343 jiwa atau 54,22% dari total angkatan kerja. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, kembali terjadi pergeseran komposisi pendidikan angkatan kerja dimana porsi angkatan kerja dengan pendidikan lulusan SD sederajat dan lulusan SMP sederajat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dibandingkan lulusan SMA sederajat dan perguruan tinggi yang jumlahnya meningkat cukup signifikan dari tahun 2022.

Gambar 3.4
Jumlah Angkatan Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023



Sumber: BPS Kabupaten Garut, Data per Agustus 2023, yang dikelola dalam SIPD

3.1.7 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

A. Tantangan Perekonomian Global dan Nasional

Kondisi perekonomian global relatif masih stabil, namun pertumbuhan ekonomi tidak merata dan dihadapkan pada tantangan global yaitu risiko inflasi dan gejolak geopolitik. *International Monetary Fund* (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 dan tahun 2025 sebesar 3,2 persen. Inflasi global diprediksi akan terus menurun menjadi 5,9 persen pada tahun 2024 dan 4,5 persen pada tahun 2025. Kondisi perekonomian global utamanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketidakpastian kondisi geopolitik karena adanya konflik, perselisihan perdagangan atau perubahan dalam dinamika politik internasional, fluktuasi nilai mata uang yang memiliki dampak terhadap daya saing ekspor dan impor, dan perubahan harga komoditas global terutama pada negara-negara yang sangat bergantung pada ekspor komoditas tertentu.

Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen. Realisasi ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan solid di atas 5,00 persen di tengah berbagai kondisi ketidakpastian, meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2022. Faktor-faktor yang menjaga perekonomian domestik tahun 2023 di antaranya intensitas kegiatan partai politik menjelang pemilihan umum, terjaga daya beli masyarakat karena tingkat inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan ekspor positif. Selanjutnya, produk domestik bruto per kapita Indonesia tumbuh sebesar 2,82 persen, menjadi US\$4.919,73 atau setara dengan Rp74,96 juta di tahun 2023. Dengan realisasi ini, Gross National Income per kapita Indonesia tahun 2023 diperkirakan sebesar US\$4.750 mempertahankan predikat kategori upper-middle income country yang dicapai di tahun 2022.

Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor mencatatkan realisasi pertumbuhan positif di tahun 2023. Beberapa sektor mampu tumbuh mencapai dua digit, di antaranya sektor transportasi dan pergudangan, jasa lainnya, dan penyediaan akomodasi dan makan minum, masing-masing sebesar 13,96; 10,52; dan 10,01 persen. Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makanan dan min sejalan dengan sektor transportasi, mengingat faktor tingginya mobilitas masyarakat, peningkatan kinerja sektor pariwisata, serta persiapan pemilihan umum sangat erat kaitannya dengan kedua sektor tersebut.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tahun 2023 tumbuh sebesar 4,82 persen, didukung oleh subkomponen konsumsi transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel karena faktor peningkatan aktivitas wisata dan tingginya mobilitas masyarakat. Selain itu, menjelang tahun pemilu 2024 konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga tahun 2023 tumbuh mencapai 9,83 persen. Tingginya aktivitas kampanye, distribusi logistik kebutuhan pemilu, dan sosialisasi pelaksanaan pemilu memengaruhi tingginya realisasi ini. Kedua komponen konsumsi tersebut menghasilkan realisasi pertumbuhan konsumsi masyarakat sebesar 4,93 persen di tahun 2023.

Perbaikan positif yang telah dicapai pada tahun 2023 masih dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan, yang membutuhkan tindak lanjut dan penanganan pada pelaksanaan tahun berikutnya. Adapun tantangan yang masih dihadapi, di antaranya (1) konflik global yang memengaruhi rantai pasok global dan stabilitas perekonomian nasional; (2) belum optimalnya pelayanan dasar di wilayah timur dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia, terutama pada bidang kesehatan, pendidikan, serta teknologi informasi dan komunikasi; (3) adanya isu perubahan iklim yang berdampak pada kelestarian lingkungan serta ketahanan pangan; (4) terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia, yang ditunjukkan dengan masih rendahnya produktivitas dan kurang terdistribusinya sumber daya manusia terampil; serta (5) rendahnya kapasitas teknologi dalam pengembangan infrastruktur energi terbarukan. Dengan demikian, Pemerintah perlu menitikberatkan pada upaya menjawab tantangan sekaligus menentukan langkah perbaikan pada pencapaian pembangunan yang masih memerlukan perhatian atau belum dapat memenuhi target yang diharapkan.

Tabel 3.6 Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025

No	Indikator	Sasaran 2025
1	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% <i>yoy</i>): Akhir Periode	1,5–3,5 ^{a)}
2	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	15.000–15.400 ^{b)}
3	Cadangan Devisa (US\$ miliar)	149,5–153,7
4	Cadangan Devisa (dalam bulan impor)	6,1–6,1 ^{c)}
5	Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	(0,4)–(0,2) ^{d)}
6	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	19,9–20,0
7	Kontribusi PDB Pariwisata (%)	4,60
8	Nilai Devisa Pariwisata (miliar US\$)	22,10
9	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,70–11,20
10	Keseimbangan Primer (% PDB)	0,00–0,00 ^{c)}
11	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,45)–(2,80) ^{d)}
12	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	39,78–39,98
13	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,5–7,8
14	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	1.868,2–1.905,6
15	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp)	805,5–842,2

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2024.

Keterangan: a) Keputusan *High Level Meeting* Pengendalian Inflasi Tingkat Menteri pada Januari 2024 dan sasaran inflasi dalam RPJPN Tahun 2025-2045; b) Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro tanggal 7 Februari 2024; c) Perbedaan angka desimal dalam *range* terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma; serta d) Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif.

B. Tantangan Perekonomian Regional Jawa Barat

Tantangan ekonomi Jawa Barat yaitu belum meratanya investasi karena masih terkonsentrasi di Jawa Barat bagian utara. Kemudian mayoritas kabupaten/kota di Jawa Barat terkategori memiliki kapasitas fiskal yang rendah, dimana porsi realisasi belanja yang bersifat produktif masih rendah, sehingga perlu kerangka kebijakan untuk mendorong produktivitas kabupaten/kota. Tekanan inflasi di negara maju yang masih berlanjut, dan kebijakan moneter ketat diproyeksikan akan membebani aktivitas ekonomi di beberapa negara mitra dagang Jawa Barat, sehingga akan menurunkan permintaan luar negeri atas produk Industri manufaktur, sebagaimana diketahui bahwa industri manufaktur adalah penyumbang terbesar PDRB Jawa Barat. Perubahan iklim juga membuat sulitnya memprediksi cuaca ekstrem di beberapa wilayah Jawa Barat, sehingga menjadi penyebab utama inflasi pada komoditas pangan. Perubahan iklim juga menjadi tantangan bagi sektor pertanian sebagai salah satu penyumbang PDRB Jawa Barat dan penyerapan tenaga kerja.

Tantangan perekonomian Jawa Barat tahun 2025 meliputi:

1. Memelihara stabilitas kinerja perekonomian di tengah ketidakpastian perekonomian global;
2. Akselerasi produktifitas sektor kunci PDRB Jawa Barat melalui percepatan realisasi investasi;
3. Optimalisasi ekonomi digital dan industri yang berbasis high tech;
4. Penguatan konektifitas dan inklusifitas ekonomi Jawa Barat, diversifikasi ekonomi khususnya UMKM, IKM, serta pariwisata;
5. Pencapaian kemandirian pangan berkelanjutan di tengah perubahan iklim; dan
6. Tenaga kerja terampil sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar tenaga kerja

Secara sektoral, tantangan tersebut digambarkan sebagai berikut:

1. Tantangan pada sektor investasi:
 - a. Impelementasi Online Single Submisiion Risk Based Approach (OSS-RBA) pada seluruh sektor perizinan;
 - b. Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing kawasan industri dalam menarik investasi;
 - c. Memperkuat fungsi kelembagaan dalam promosi, bussines matching, market sounding, link and match investor industri kecil dan industri besar; dan
 - d. Formalisasi Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Industri Kecil Menengah (IKM) pada OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Tantangan pada sektor industri:
 - a. Penyerapan tenaga kerja lokal oleh industri berteknologi tinggi;
 - b. Hilirisasi industri yang terdiversifikasi;
 - c. Perwujudan kawasan industri pada Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. Substitusi bahan baku impor;
 - e. Kemitraan industri besar dan IKM; dan
 - f. Pemanfaatan tingkat komponen dalam negeri 40 persen.
3. Tantangan pada sektor UMKM:
 - a. Memperkuat ekosistem digital UMKM dari hulu ke hilir; dan
 - b. Meningkatkan kontribusi sektor UMKM dalam perekonomian Jawa Barat melalui wirausaha baru dan UMKM naik kelas.

4. Tantangan pada sektor pariwisata:
 - a. Operasionalisasi dan optimalisasi destinasi wisata;
 - b. Pengembangan desa wisata;
 - c. Pengembangan destinasi pariwisata berstandar nasional dan internasional; dan
 - d. Percepatan Sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE); dan
 - e. Pengembangan SDM pelaku ekonomi kreatif.
5. Tantangan pada sektor perdagangan:
 - a. Perdagangan berorientasi ekspor ke luar negeri maupun antar provinsi;
 - b. Pasar rakyat yang memenuhi SNI;
 - c. Ketersediaan komoditas dan harga-harga bahan pokok yang terjangkau melalui Pusat Distribusi Provinsi;
 - d. Market intelligence untuk penetrasi pasar regional dan ekspor;
 - e. Promosi dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
 - f. Penyediaan komoditas perdagangan yang kualitas, kuantitas, dan kontinuitasnya terjaga.
6. Tantangan pada sektor pertanian dan pangan
 - a. Penyediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau;
 - b. Perlindungan harga di tingkat produsen;
 - c. Peningkatan produksi komoditas substitusi bahan pangan;
 - d. Peningkatan produktivitas bahan pangan; dan
 - e. Peningkatan produksi pertanian potensi ekspor
7. Tantangan pada sektor ketenagakerjaan:
 - a. Kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
 - b. Penempatan calon tenaga kerja Jawa Barat;
 - c. Penguatan Balai Pelatihan Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
 - d. Pengangguran baru sebagai dampak dari relokasi industri ke luar wilayah Jawa Barat; dan
 - e. Penciptaan lapangan pekerjaan melalui usaha mandiri.

Memperhatikan kondisi saat ini serta tuntutan dan tantangan yang akan dihadapi ke depan maka akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen makro pembangunan dan akan berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan proyeksi sebagaimana disajikan pada Tabel 3.7 dibawah ini.

Tabel 3.7
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025

No.	Indikator Makro dan Pembangunan	TARGET	
		2025 ¹⁾	2025 ²⁾
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	N/A	74,39
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	4,96 – 5,37	5,81
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,42 – 6,99	7,25
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,85 – 6,46	7,13
5	Indeks Gini (Poin)	0,383 – 0,390	0,383
6	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	N/A	1,02
7	Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah)*	N/A	61,57

Sumber: Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Ket: 1) Target Nasional terhadap Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil rakortekbangnas 2024

2) Hasil perhitungan Tim KEMD Provinsi Jawa Barat berdasarkan kondisi 2023.

C. Tantangan dan Prospek Ekonomi Kabupaten Garut

Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Garut, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional, maupun lingkungan regional Jawa Barat. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan, sebagai tahap awal pelaksanaan RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah saat ini, tantangan perekonomian Kabupaten Garut secara sektoral dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Sektor Pariwisata
 - a. Pengembangan destinasi wisata;
 - b. Pengembangan pemasaran destinasi pariwisata;
 - c. Pengembangan kelembagaan pariwisata; dan
 - d. Pengembangan industri ekonomi kreatif.
2. Sektor Pertanian
 - a. Perlindungan dan pengembangan usaha pertanian mencakup perizinan dan pengembangan usaha pertanian;
 - b. Peningkatan sarana prasarana pertanian;

- c. Peningkatan kualitas sumber daya pertanian mencakup kelembagaan penyuluhan, kelembagaan petani, BUM petani, sarana dan prasarana penyuluhan; dan
 - d. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian mencakup penanganan OPT, penanganan dampak perubahan iklim, dan agroklinik.
3. Sektor Pangan
- a. Peningkatan ketersediaan pangan;
 - b. Penanganan kerawanan pangan;
 - c. Pemanfaatan pangan;
 - d. Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan; dan
 - e. Pengawasan keamanan pangan.
4. Sektor Perikanan dan Peternakan
- a. Peningkatan produksi perikanan tangkap;
 - b. Peningkatan produksi perikanan budidaya;
 - c. Peningkatan produksi peternakan;
 - d. Peningkatan produksi olahan hasil perikanan; dan
 - e. Peningkatan produksi olahan hasil peternakan.
5. Sektor Koperasi dan UKM
- a. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi (kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, inovasi dan teknologi);
 - b. Pengembangan koperasi di sektor tertentu (kelautan dan perikanan, perdagangan, dan pertanian);
 - c. Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan SDM serta desain dan teknologi (produk, sarana dan prasarana, kemitraan, pemasaran, perlindungan, modal, SDM);
 - d. Pemberdayaan usaha mikro (pendataan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan);
6. Sektor Industri dan Perdagangan
- a. Pendampingan perizinan usaha (IUI, tanda daftar gudang, dll);
 - b. Peningkatan kewirausahaan;
 - c. Pemberdayaan pelaku usaha;
 - d. Operasi pasar bersama;

- e. Peningkatan kapasitas produksi; dan
 - f. Pembinaan pelaku usaha bersama.
7. Sektor Ketenagakerjaan
- a. Peningkatan padat karya tunai;
 - b. Pelatihan vokasi; dan
 - c. Pelatihan TKM mikro.
8. Investasi
- a. Peningkatan infrastruktur Mall Pelayanan Publik (Pengembangan IT MPP, Sarana Prasarana Command Center MPP, Pojok Digital, Digitalisasi Data Perizinan dan MPP Digital);
 - b. Promosi potensi daerah;
 - c. Peningkatan pelayanan SI-PM;
 - d. Peningkatan iklim investasi (Pengawasan Rutin/ Insidental/Pengawasan Penanaman Modal/ Pengawasan LKPM, Pengawasan Penanaman Modal Terpadu); dan
 - e. Peningkatan kualitas SDM, *Good Governance*, dan peningkatan pelayanan perizinan.

Berdasarkan kondisi saat ini serta tantangan yang akan dihadapi ke depan maka proyeksi kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diharapkan telah memasuki fase pemantapan dan stabilisasi pertumbuhan menuju penormalan ekonomi. Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Garut diantaranya, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran; serta Industri Pengolahan. Ketiga sektor tersebut diproyeksikan akan tetap tumbuh positif seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi nasional dan regional.

Sektor-sektor lain yang menjadi perhatian yaitu sektor Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Konstruksi; Industri Pengolahan; dan Informasi dan Komunikasi dikarenakan sektor tersebut tumbuh positif pada tahun 2023, setelah berkontraksi negatif pada tahun 2020. Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 11,67 persen, naik signifikan jika dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2020 yang berkontraksi -3,19 persen sebagai dampak dari dampak pembatasan pergerakan masyarakat dan penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan terhadap permintaan angkutan transportasi, sementara itu sektor penyediaan akomodasi dan makan

minum pada tahun 2023 mengalami kontraksi sebesar 10,37 persen. Sektor konstruksi kembali tumbuh positif sebesar 8,52 persen setelah terkontraksi -5,58 persen pada tahun 2020 yang terkena dampak penundaan atau penghentian berbagai proyek pembangunan infrastruktur pemerintah yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan. Sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 8,05 persen setelah terkontraksi -0,46 persen pada tahun 2020. Proyeksi pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha tahun 2024-2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.8
Proyeksi Pertumbuhan PDRB Sisi Lapangan Usaha Kabupaten Garut
Tahun 2024-2025 (Persen)

Kategori Lapangan Usaha		Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023*	Target 2024 ^{a)}	Target 2025 ^{b)}
Pertumbuhan PDRB ADHK		3,58	5,08	4,94	4,87-5,57	5,23
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,61	4,43	1,60	3,00-4,00	3,01
B	Pertambangan dan Penggalian	1,29	-0,09	-0,13	-0,1-0,15	-0,11
C	Industri Pengolahan	5,91	6,29	8,05	6-6,5	7,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,18	3,62	4,14	5-5,5	3,88
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,82	2,82	2,83	5,5-6	2,83
F	Konstruksi	6,82	1,98	8,52	6-6,5	5,25
G	Perdagangan besar dan eceran	3,08	4,53	4,81	5,1-6	4,67
H	Transportasi dan Pergudangan	0,21	11,89	11,67	6-6	11,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,25	17,02	10,37	7,51-8,12	13,69
J	Informasi dan Komunikasi	7,28	6,07	8,03	5,5-6	7,05
K	Jasa Keuangan	4,33	0,19	4,12	5,5-6	2,15
L	Real Estate	9,98	4,50	6,26	5,7-6	5,38
M,N	Jasa Perusahaan	8,54	9,98	7,27	4,5-5	8,63
O	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,86	-0,31	2,43	5-5	1,06
P	Jasa Pendidikan	1,09	2,77	5,03	6,5-7	3,90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,59	7,25	7,15	8-8,5	7,20
R,S,T, U	Jasa Lainnya	0,82	9,82	7,57	7,5-8	8,69

Sumber: BPS Kabupaten Garut, Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD.

Keterangan: *) angka sementara; a) RPJMD 2019-2024; b) Hasil perhitungan

Prospek membaiknya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 diperkirakan memberikan dampak besar bagi membaiknya pencapaian sasaran indikator makro pembangunan daerah. Tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan diperkirakan menurun, tingkat kesenjangan menyempit, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Garut Tahun 2025

No	Indikator Makro	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025				
				Garut	Provinsi Jawa Barat		Nasional	
				(a)	(b)	(c)	(d)	
1	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	68,11	69,7-70,68	69,51	70,57	74,39	75,17 // 0,56 (Indeks Modal Manusia)	0,56 (Indeks Modal Manusia)
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,85	1,1	1,17	1,17	n/a	1,46	n/a
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,94	4,87-5,57	5,1	4,5-5,1	5,81	4,96 – 5,37	5,3 - 5,6
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	9,77	6,92-7,03	9,21	8,2-9,06	7,13	5,85 - 6,46	7,0 - 8,0
5	Pendapatan Per Kapita (Juta Rp)	26,91	25,43-25,61	29,782	28,49	61,57	57,14	n/a
6	Persentase Pengangguran Terbuka (%)	7,33	6,41-6,61	7,03	6.67 - 7.26*	7,88	6,42 – 6,99	4,5 - 5,0
7	Indeks Gini (poin)	0,361	0,35-0,36	0,30	0,347-0,36	0,383	0,383 - 0,390	0,379 - 0,382
8	Inflasi (%)	2,84	2,5-4,5	2,5-4,5	3,5	3.3-3.9	3.3-3.9	1.5 - 3.5
9	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Ton CO ₂ Eq)				643.797,58			

Sumber : BPS Kabupaten Garut Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD.

Keterangan: a) RPD 2025-2026; b) Hasil Penyelarasan RPJPD Provinsi; c) Target Nasional terhadap Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil rakortekbangnas 2024; d) Hasil perhitungan Tim KEMD Provinsi Jawa Barat berdasarkan kondisi 2023.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan arah

kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada ketentuan perundangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi:

- a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
- b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.

- c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah, telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (non-APBD) antara lain pendanaan melalui APBN; pendanaan melalui APBD Provinsi, kolaborasi APBD kabupaten/kota; Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN); Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/*Public Private Partnership* (PPP); swadaya masyarakat; serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).

3.2.1 Kondisi, Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah, otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah, sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki. Sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi:
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang Sah
- 2) Pendapatan Transfer yang meliputi:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat

Kebijakan Transfer ke Daerah pada tahun 2025 secara umum diarahkan untuk mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kebijakan Transfer ke Daerah, sebagai berikut

 - (1) mendukung arah kebijakan RKP Tahun 2025 yaitu (a) sumber daya manusia berdaya saing dan produktif; (b) infrastruktur untuk peningkatan produktivitas; serta (c) pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan;
 - (2) mendukung penerapan kerangka pikir Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal yang berfokus pada tiga pilar yaitu *promoting growth*, pemerataan ekonomi, dan penguatan *wellbeing*;
 - (3) mengarahkan penggunaan Transfer ke Daerah untuk mendukung Prioritas Nasional;
 - (4) menerapkan *matching program* antara kegiatan yang didanai Transfer ke Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun sumber pendanaan lainnya, sebagai upaya memperkuat sinergi pendanaan.
 - b. Transfer antar Daerah
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi:
 - a. Hibah
 - b. Dana Darurat dan/ atau
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari dana transfer baik pusat maupun transfer antar daerah serta pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sampai saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana transfer, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya dengan kebijakan yang tidak membebani masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Adanya perubahan regulasi seperti pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta penerbitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditindaklanjuti dengan penyesuaian peraturan di tingkat daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tentu akan berpengaruh terhadap target PAD untuk tahun anggaran 2024 dan seterusnya.

Upaya-upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah :

- a. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
- c. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
- d. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. Memberikan insentif/bonus dan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang berhasil mencapai atau melampaui target; dan
- f. Optimalisasi upaya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan.

Sementara itu Pendapatan Transfer Pusat pada tahun 2025 merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Perimbangan yang merupakan bagian dari transfer pusat bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Adapun kebijakan yang ditempuh sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
- b. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK);
- c. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
- d. Optimalisasi proses pelaporan penggunaan dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui aplikasi KRISNA; dan
- e. Optimalisasi penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan transfer.

Adapun kebijakan penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, bantuan keuangan dari provinsi maupun hibah dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Selain itu indikasi kehiatan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui beberapa upaya sebagai berikut.

A. Pendapatan Daerah berbasis *Smart Tax*

- 1) Standarisasi Unit Layanan Stationary dan Mobile
- 2) Standarisasi Tempat Arsip Data KBM berbasis container
- 3) Tax Center : Implementasi Sim-C Fitur Layanan Pengaduan dan Konsultasi secara menyeluruh di Pusat dan P3DW
- 4) Sosialisasi berbasis Robocall dan Whats App blast
- 5) Sosialisasi Berbasis Media Sosial, Media Cetak, dan Media Informasi Lainnya
- 6) Sosialisasi Berbasis kearifan Lokal
- 7) Updating Kurikulum Perpajakan
- 8) Operasi Gabungan dengan Mitra
- 9) Operasi Khusus
- 10) Perluasan akses layanan di Ruang Publik
- 11) Pemberian penghargaan philothra

12) e-Voucher Bahan Bakar

13) Implementasi penghapusan data kendaraan

B. Community Engagement

1) Updating PKS layanan dengan kabupaten/kota

2) Pengembangan KSWP Pajak Kendaraan Bermotor 3. Pembentukan

3) Forum Komunikasi Pendapatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Gathering/Jambore Pajak Daerah 5.

4) Safari Tax Exhibition di 5 Wilayah

5) Supporting GIIAS

C. Meningkatkan Profesionalisme Pengelola Pajak

1) Pengawasan Kinerja pendapatan secara berkala

2) Evaluasi tematik pelaksanaan kegiatan

3) Sertifikasi pegawai dalam standarisasi pelayanan minimal

Sedangkan kegiatan prioritas pengelolaan pajak daerah tahun 2025 dilaksanakan melalui :

1) Peningkatan Pajak Daerah (Papada) melalui Ektensifikasi dan intensifikasi Pajak Daerah;

2) Peningkatan Pengawasan Pajak Daerah
- Sistem Informasi Manajemen Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (SIWASPADA).

- Aplikasi Pengawasan Pajak Daerah (Aplikasi Pengawasan Transaksi pada Wajib Pajak (alternatif pengganti Tapping Box)

3) Sistem Informasi Retribusi Daerah (SiReda)
Sistem yang dirancang untuk menganalisis perilaku kegiatan retribusi menggunakan data yang ada

Adapun upaya peningkatan Daerah (Papada) melalui Ektensifikasi dan intensifikasi Pajak Daerah dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1) Intensifikasi pajak meliputi

a) Menyesuaikan/memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi pengelola pendapatan asli daerah (Badan pendapatan daerah), berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang, yaitu dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, retribusi daerah;

- b) Implementasi fungsi-fungsi dalam organisasi antara lain, pendaftaran dan pendataan, penetapan, pembukuan dan pelaporan, penagihan terhadap penunggak pajak serta perencanaan dan pengendalian operasional;
 - c) Membangun, memelihara dan mengembangkan sistem pelayanan pembayaran dengan memanfaatkan teknologi informasi atau sarana yang memadai;
 - d) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan;
 - e) Peningkatan pengawasan dan pengendalian serta pemberian sanksi yang tegas;
 - f) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - g) Meningkatkan kegiatan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi.
- 2) Ekstensifikasi Pajak Daerah
- a) Melakukan pengembangan atau menggali potensi wajib pajak baru;
 - b) Melakukan review terhadap Perda yang berlaku, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian Antara lain : Objek Pajak Daerah, Tarif Pajak Daerah. Khusus dalam menetapkan tarif dilaksanakan tidak semata-mata untuk meningkatkan penerimaan namun mempertimbangkan kemampuan masyarakat;
 - c) Benchmarking ke daerah lain guna menambah wawasan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur besaran Opsen PKB yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemungutan PKB, dengan ketentuan alokasi sebagai berikut:

- a. 1,5% (satu koma lima persen) dari penerimaan Opsen PKB lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
- b. 1,75% (satu koma tujuh lima persen) dari penerimaan Opsen PKB antara Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah); dan
- c. 2,0% (dua koma nol persen) dari penerimaan Opsen PKB kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan diatas maka di proyeksikan untuk tahun 2025 Kabupaten Garut akan memperoleh Opsen PKB sebesar Rp65.613.514.240,00,-. Sedangkan Opsen BBNKB yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan optimalisasi penerimaan BBNKB, dengan ketentuan alokasi sebagai berikut:

- a. 1,5% (satu koma lima persen) dari penerimaan opsen BBNKB lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- b. 1,75% (satu koma tujuh lima persen) dari penerimaan opsen BBNKB antara Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
- c. 2,0% (dua koma nol persen) dari penerimaan opsen BBNKB kurang dari Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan diatas maka di proyeksikan untuk tahun 2025 Kabupaten Garut akan memperoleh Opsen BBNKB sebesar Rp 45.804.521.011,00,-.

Kenaikan Proyeksi Pendapatan Asli Daerah disebabkan oleh adanya kenaikan proporsi persentase antara provinsi dan daerah pembagian besaran persentase pajak jenis kendaraan bermotor (PKB, BBNKB) bagi daerah lebih tinggi. Tarif opsen Provinsi pada tahun 2023 menetapkan pajak sebesar 1,85 % dan Provinsi memperoleh 1,12% atau hanya turun 0,2% dan Kabupaten Garut memperoleh 0,73 % mengalami kenaikan 0,2%. Sedangkan untuk pendapatan Transfer Pendapatan PKB dan BBNKB awalnya berada pada kode rekening pendapatan transfer, untuk Tahun Anggaran 2025 berpindah kepada kode rekening Pendapatan Asli Daerah, kemudian untuk pendapatan dana transfer tahun 2025 diestimasikan perhitungan rata-rata pendapatan transfer selama kurun waktu 3 tahun terakhir, tahun 2023 cukup besar dikarenakan DAU Earmark PPPK nilainya cukup meningkat, dan estimasi pada tahun 2024 dan 2025 nilainya akan menurun sesuai dengan rencana penerimaan ASN dan PPPK.

Proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2025, turut dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi, baik itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Sumber dana pembangunan APBD Kabupaten Garut secara umum masih didominasi oleh sumber dana transfer dan lain-lain

pendapatan yang sah, sementara kemampuan PAD hanya memberikan kontribusi yang tidak terlalu signifikan terhadap pendapatan. Untuk tahun 2025, pendapatan diproyeksikan mencapai Rp.4.678.540.534.348,00 meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.903.127.173.922,00 Pendapatan Transfer sebesar Rp.3.775.413.360.426,00. Berdasarkan perkembangan kondisi realisasi pendapatan Tahun 2021, 2022, dan 2023, Proyeksi / Target Pendapatan Daerah Tahun 2024–2025 disajikan pada berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

Tabel 3.10
Realisasi Pendapatan Tahun 2021 - 2023 dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Tahun 2024 – 2026

Kode	Uraian	Realisasi APBD 2021 1)	Realisasi APBD 2022 2)	Realisasi APBD 2023 3)	APBD 2024 4)	Proyeksi/Target 2025 5)	Proyeksi/Target 2026 6)
4.	Pendapatan	4.684.404.923.196	4.626.954.746.948	4.780.042.147.399	4.626.276.404.520	4.678.540.534.348	4.784.808.223.843
4.1	Pendapatan Asli Daerah	560.783.376.918	486.038.766.410	535.681.310.300	519.625.237.734	903.127.173.922	947.960.028.853
4.1.1	Pajak Daerah	126.527.804.958	157.569.982.468	173.835.653.663	180.000.000.000	542.600.000.000	569.730.000.000
4.1.2	Retribusi Daerah	15,259,959,070	15.711.817.595	20.948.150.084	215.856.827.388	230.946.140.560	242.545.741.324
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6,455,066,625	7.044.369.160	7.336.469.580	7.515.950.023	7.515.950.023	7.515.950.023
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	412.540.546.265	305.712.597.187	333.561.036.973	116.252.460.323	122.065.083.339	128.168.337.506
4.2	Pendapatan Transfer	3.784.572.413.274	4.081.264.360.586	4.219.412.786.728	4.091.889.534.786	3.775.413.360.426	3.836.848.194.990
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.261.973.058.051	3.413.296.605.794	3.595.898.907.785	3.786.082.401.000	3.579.962.319.255	3.628.512.465.752
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	522.599.355.223	667.967.754.792	623.513.878.943	305.807.133.786	195.451.041.171	208.335.729.238
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	339.049.133.004	59.651.619.952	25.399.770.931	14.761.632.000	-	-
4.3.1	Pendapatan Hibah	20.133.542.423	46.365.278.610	10.507.849.500	14.761.632.000	-	-
4.3.2	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	318.915.590.581	13.286.341.342	14.891.921.431	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	4.684.404.923.196	4.626.954.746.948	4.780.042.147.399	4.626.276.404.520	4.678.540.534.348	4.784.808.223.843

Sumber : BPKAD dan Bapenda Kabupaten Garut, 2024

1) LRA APBD 2021 - Audited

2) LRA APBD 2022 - Unaudited

3) LRA APBD 2023 - Unaudited

4) Perda APBD 2024

5) 6) RPD 2025-2026



3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Penggunaan belanja daerah yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dalam APBD ditujukan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah dan mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah. Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2025 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain:

- 1) Melaksanakan program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan, pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta pendampingan program-program pemerintah pusat;
- 2) Memenuhi pelaksanaan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan operasional;
- 3) Memenuhi pelaksanaan Program Unggulan yang merupakan Program Prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 tahun;
- 4) Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijamin melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang dan Pokok – pokok Pikiran DPRD;
- 5) Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;
- 6) Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten;
- 7) Memenuhi pelaksanaan program daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan.

Selain itu, untuk belanja daerah yang bersumber dari dana transfer yang bersifat terarah atau ditentukan penggunaannya, diarahkan untuk selalu memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pengelolaan dana transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.



Kebijakan optimalisasi opsen telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 bahwa penggunaan hasil penerimaan opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk mendukung kegiatan pemungutan digunakan antara lain untuk:

- a. sosialisasi atau edukasi untuk meningkatkan kepatuhan Masyarakat dalam membayar pajak;
- b. penyelenggaraan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT);
- c. penegakan hukum atau operasi gabungan penertiban administrasi kendaraan bermotor; dan atau
- d. penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) atau penagihan tunggakan PKB/pendataan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, dituangkan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

Tabel 3.11
Realisasi Belanja Tahun 2021 - 2023 serta Proyeksi Belanja Tahun 2024 - 2026

Kode	Uraian	Realisasi APBD 2021 ¹⁾	Realisasi APBD 2022 ²⁾	Realisasi APBD 2023 ³⁾	Proyeksi/Target 2024 ⁴⁾	Proyeksi/Target 2025 ⁵⁾	Proyeksi/Target 2026 ⁶⁾
5.	Belanja	4.649.602.155.581	4.688.455.777.826	4.812.745.818.050	4.773.238.404.520	4.718.540.534.348	4.824.808.223.843
5.1	Belanja Operasi	3.289.003.496.580	3.228.017.251.870	3.409.465.190.272	3.617.740.508.604	3.545.045.027.684	3.640.177.016.188
5.1.1	Belanja Pegawai	1.711.698.801.354	1.678.298.468.729	1.623.923.894.714	2.135.655.823.171	2.092.741.599.009	2.148.900.736.110
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.088.825.013.582	1.142.620.219.161	1.324.307.932.451	980.096.918.420	960.402.687.542	986.175.284.707
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0
5.1.4	Belanja Subsidi	-	951.000.000	1.111.000.000	-	-	0
5.1.5	Belanja Hibah	477.437.424.029	380.223.522.022	426.855.242.357	483.558.367.013	473.841.664.569	486.557.299.895
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	11.042.257.615	25.874.389.999	33.267.120.750	18.429.400.000	18.059.076.564	18.543.695.476
5.2	Belanja Modal	558.797.286.428	700.943.778.898	680.967.695.485	374.080.508.174	366.563.672.077	376.400.481.135
5.2.1	Belanja Modal Tanah	34.923.261.221	21.374.678.883	17.710.354.017	9.549.606.200	-	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.413.219.545	115.797.914.649	164.947.127.598	118.780.838.536	-	-
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	204.878.310.049	149.847.397.573	290.110.589.529	172.804.578.911	-	-
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	184.540.470.291	394.817.632.912	191.233.976.444	56.342.070.350	-	-
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.042.025.322	19.106.154.881	16.965.647.897	16.548.414.177	-	-
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	55.000.000	-	-
5.3	Belanja Tidak Terduga	39.452.922.903	28.771.620.642	5.907.754.376	58.051.096.244	25.000.000.000	25.000.000.000
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	39.452.922.903	28.771.620.642	5.907.754.376	58.051.096.244	25.000.000.000	25.000.000.000
5.4	Belanja Transfer	762.348.449.670	730.723.126.416	716.405.177.917	723.366.291.498	781.931.834.588	783.230.726.521
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	13.045.583.078	17.422.666.527	19.333.448.767	19.827.720.898	85.090.075.462	89.350.331.546
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	749.302.866.592	713.300.459.889	697.071.729.150	703.538.570.600	696.841.759.126	693.880.394.975
	Jumlah Belanja	4.649.602.155.581	4.688.455.777.826	4.812.745.818.050	4.773.238.404.520	4.718.540.534.348	4.824.808.223.843
	Surplus / (Defisit)	34.802.767.615	(61.501.030.877)	(32.251.950.091)	(146.962.000.000)	(40.000.000.000)	(40.000.000.000)

Sumber : BPKAD Kabupaten Garut, 2024

- ¹⁾ LRA APBD 2021 - Audited
- ²⁾ LRA APBD 2022 - Unaudited
- ³⁾ LRA APBD 2023 - Unaudited
- ⁴⁾ Perda APBD 2024
- ⁵⁾ ⁶⁾ RPD 2025-2026



Untuk tahun 2025, belanja diproyeksikan mencapai Rp.4.718.540.534.348,00 meliputi komponen Belanja Operasi sebesar Rp.3.545.045.027.684,00, Belanja Modal sebesar Rp. Rp.366.563.672.077,00 Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.25.000.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp.781.931.834.588,00.

Guna mengatasi keterbatasan sumber pembiayaan APBD Kabupaten Garut Tahun 2025 dalam pembangunan daerah, maka pendanaan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2025, dilakukan sinergi dan kolaborasi pembiayaan pembangunan antara APBD Kabupaten Garut, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN serta sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Secara rinci, daftar rencana belanja daerah untuk rencana program dan kegiatan seluruh Perangkat Daerah disajikan dalam Lampiran Buku II RKPD Kabupaten Garut Tahun 2025.

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Adapun Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2025 meliputi:

- 1) Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten. Rencana

penggunaan SiLPA akan digunakan dari SiLPA *non-earnmarked* yang merupakan sisa dari belanja pegawai dan sisa belanja barang jasa lainnya;

- 2) Defisit APBD ditutup melalui Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah (Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang) dan atau Transfer/ Penarikan Dana Cadangan Daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan sebagai berikut :



Tabel 3.12

Realisasi Pembiayaan Tahun 2021 - 2023 serta Proyeksi/Target Pembiayaan Tahun 2024 - 2026

Kode	Uraian	Realisasi APBD 2021 ¹⁾	Realisasi APBD 2022 ²⁾	Realisasi APBD 2023 ³⁾	APBD 2024 ⁴⁾	Proyeksi/Target 2025 ⁵⁾	Proyeksi/Target 2026 ⁶⁾
6.	Pembiayaan	229.484.311.241	249.287.079.236	175.366.405.182	146.962.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000
6.1	Penerimaan Pembiayaan	240.634.311.241	264.287.078.856	187.866.405.182	159.962.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	240.634.311.241	264.287.078.856	187.866.405.182	159.962.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	240.634.311.241	264.287.078.856	187.866.405.182	159.962.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	11.150.000.000	14.999.999.620	12.500.000.000	13.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan						
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	11.150.000.000	14.999.999.620	12.500.000.000	13.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-



Kode	Uraian	Realisasi APBD 2021 ¹⁾	Realisasi APBD 2022 ²⁾	Realisasi APBD 2023 ³⁾	APBD 2024 ⁴⁾	Proyeksi/Target 2025 ⁵⁾	Proyeksi/Target 2026 ⁵⁾
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	11.150.000.000	14.999.999.620	12.500.000.000	13.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
	Pembiayaan Neto	229.484.311.241	249.287.079.236	175.366.405.182	146.962.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000
6.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	264.287.078.856	187.786.048.358	145.641.996.581	0	0	0

Sumber : BPKAD Kabupaten Garut, 2024

¹⁾ LRA APBD 2021 - Audited

²⁾ LRA APBD 2022 - Unaudited

³⁾ LRA APBD 2023 - Unaudited

⁴⁾ Perda APBD 2024

⁵⁾ RPD 2025-2026

Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diarahkan untuk membiayai:

- Rencana Alokasi Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
- Rencana Alokasi Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan prioritas pembangunan daerah dan membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.



3.2.5 Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan / *Corporate Social Responsibility* (CSR) Kabupaten Garut

Tanggung Jawab Sosial dan Perusahaan (TJSLP) adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. TJSLP merupakan sebuah konsep kepedulian perusahaan untuk berkontribusi terhadap masyarakat agar kehidupan sosial dan ekonominya meningkat dengan menjaga kondisi lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. TJSLP dalam perspektif perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu sumber kolaborasi pendanaan pembangunan yang potensial untuk dioptimalkan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan TJSLP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kabupaten Garut diturunkan kedalam 2 (dua) kebijakan yakni:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang mengatur mengenai Perencanaan dan Program Pembangunan, Pelaksanaan, Program dan Bidang Kerja, Kelembagaan, Penghargaan dan Sistem Informasi TJSLP;
- b. Keputusan Bupati Garut Nomor 446/Kep.1184.Bappeda/2017 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang menetapkan susunan keanggotaan beserta uraian tugas dari Tim Fasilitasi TJSLP;

Jika ditinjau dari penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan / *Corporate Social Responsibility* (CSR) Kabupaten Garut masih belum dapat terlaksana secara optimal, inisiasi forum CSR masih terkendala dengan langkah inisiasi yang belum sistematis dan terukur, Tidak Sejalannya susunan keanggotaan tim fasilitasi TJSLP dengan amanat peraturan daerah tentang TJSLP, dan tidak efektifnya pelaporan data realisasi program TJSLP serta belum terlaksananya monitoring dan evaluasi program TJSLP

Tabel 3.13

Realisasi CSR di Kabupaten Garut tahun 2021- 2023

Tahun	Realisasi	Perusahaan
2021	4.643.332.492,00	Dexa Medica Groups
		Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten
		PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
		PT Indocement Tungal Prakarsa (Palimanan-Cirebon) Tbk
		PT Jasa Sarana
		PT Migas Utama Jabar (Perseroda)
		PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang
		PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat
		PT Pos Indonesia (Persero)
		PT Tirta Gemah Ripah
2022	3.768.171.000,00	Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten
		PT Badjatex
		PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
		PT Migas Utama Jabar (Perseroda)
		PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat
		PT Pupuk Kujang Cikampek
		PT TD Automotive Compressor Indonesia
		Star Energy Group
2023	4.154.010.000,00	Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten
		PT Bank Jabar Banten Syariah
		PT Migas Utama Jabar (Perseroda)
		PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang
		PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat
		PT Pupuk Kujang Cikampek
		Star Energy Group

Sumber : Realisasi CSR Kabupaten Garut dalam website
<https://csr.jabarprov.go.id/>

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD Kabupaten Garut Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026. Oleh karenanya, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 dirumuskan untuk mencapai target kinerja RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026. Selain itu, perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 juga disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2023, capaian target pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal-eksternal sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya. Substansi sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2025 mengacu dan memperhatikan:

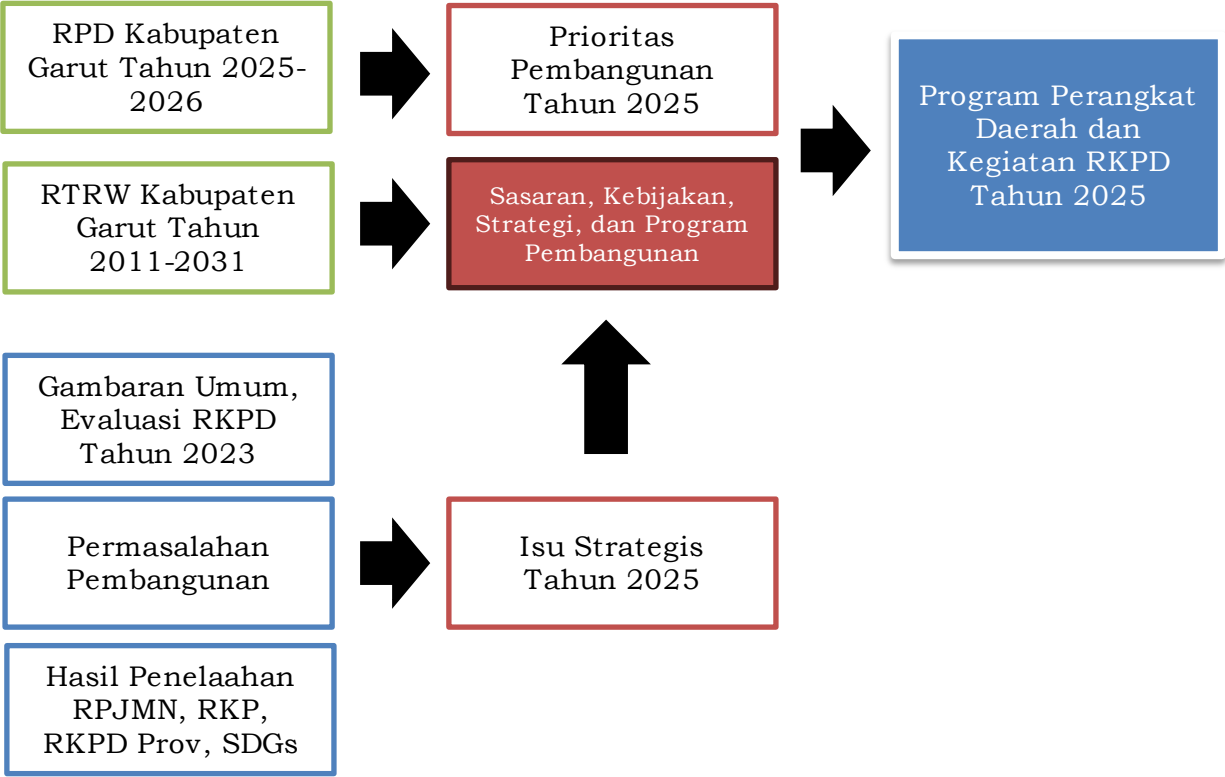
1. Arah kebijakan Pemerintah dalam RKP Tahun 2025.
2. Prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
3. Arah kebijakan Perubahan RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 guna mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan tahun 2025;
4. Arah kebijakan pembangunan kewilayahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031;
5. Konsistensi antara kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten Garut sebagai upaya pencapaian target pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten;
6. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan daerah dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025;
7. Penyelesaian terhadap masalah yang bersifat *urgent* pada tahun 2025 dengan fokus penanganan terhadap kemiskinan.

Guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah daerah tahun 2025-2026, maka RKPD Tahun 2025 difokuskan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 dengan mempertimbangkan dinamika permasalahan pembangunan terkini dan juga diarahkan untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

Selanjutnya rumusan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan.

Gambar 4.1

**Kerangka Pikir Perumusan Sasaran Dan Prioritas Program Pembangunan
Antara Pemerintah Pusat Serta Pemerintah Daerah**



Sumber : diolah Bappeda, 2024

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun lingkup daerah. Dalam rangka mewujudkan keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan, maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Garut turut memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025, maupun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dalam RKPD



Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, serta mengacu tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang hendak dicapai pada tahun 2025 pada Perubahan RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026.

4.1.1.Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Sebagai tahapan pertama dari pelaksanaan RPJPN Tahun 2025-2045 tahapan pertama merupakan landasan transformasi yang menjadi pemicu pertumbuhan baru meliputi pertumbuhan industri biru, industri kreatif, bioteknologi, hilirisasi sampai dengan produk akhir, dan industri hijau.

Sasaran visi pembangunan jangka menengah Tahun 2025-2029 adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan yang tercermin dalam 5 (lima) sasaran visi yaitu pendapatan per kapita setara negara maju; kemiskinan menuju 0 (nol) persen dan ketimpangan berkurang; kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; daya saing sumber daya manusia meningkat; serta intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju Net Zero Emission. Kelima sasaran visi ini memiliki target sebagai berikut.

Gambar 4.2 Sasaran Visi Indonesia Emas 2045



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas

Tema Pembangunan Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**" dengan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1. Sumber Daya Manusia Berkualitas :

- a. Transformasi Sosial melalui Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun, Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan, Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting, Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif, Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas, Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan *dual system*.
 - b. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi melalui Penetapan Kebijakan penguatan karakter dan jati diri bangsa.
2. Infrastruktur Berkualitas :
- a. Transformasi ekonomi melalui Penetapan hub. laut dan hub. udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi, Penguatan infrastruktur digital, Pengembangan infrastruktur transisi energi, Percepatan infrastruktur IKN.
 - b. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi melalui penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan melalui Penguatan sistem jaminan sosial nasional (SJSN), Pengembangan skema graduasi bansos, Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, Perempuan, dan penduduk rentan lainnya, Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat, Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebaagi angkatan kerja, Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan, Peningkatan produksi industri pengolahan, Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif, Penyediaan infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi.

Pada tahun 2025-2029 dalam rangka perkuatan fondasi transformasi dilaksanakan hilirisasi Sumber Daya Alam serta penguatan riset inovasi dan produktifitas tenaga kerja, dengan kisaran pertumbuhan 5,6 - 6,1 Persen dan diiringi oleh peranan industri pengolahan terhadap PDB: 21,9 % dan menargetkan 38% penduduk indonesia dengan pendapatan kelas menengah. Indikator pembangunan nasional tersaji pada Tabel berikut.



Tabel 4.1 Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

No	Sasaran Pembangunan Nasional	Realisasi 2023	Target 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05	5,3 - 5,6
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32	4,5 - 5,0
3	Tingkat Kemiskinan (%)	9,36	7,0 - 8,0
4	Rasio Gini (nilai)	0,388	0,379 - 0,382
5	Indeks Modal Manusia (nilai)	0,53	0,56
6	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	27,82	38,6
7	Nilai Tukar Petani (kumulatif)	112,46	113 - 115
8	Nilai Tukar Nelayan (kumulatif)	105,4	104 - 105

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas dalam Rancangan RKP 2025

4.1.2.Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPD Provinsi Jawa Barat Periode 2024-2026, dengan mengusung tema pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 yaitu **"Pemerataan Pembangunan Untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Jawa Barat"** melalui penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat. Adapun tujuan dan sasaran RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan sasaran:
 - a) Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat;
 - b) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
 - c) Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat;
 - d) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pembangunan Pemuda;
 - e) Terkendalinya Pertumbuhan dan Distribusi Penduduk.
2. Tujuan 2 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sasaran:
 - a) Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian dan Perdagangan;



- b) Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan;
 - c) Meningkatnya pertumbuhan sektor Penyediaan akomodasi makan dan minum;
 - d) Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja.
3. Tujuan 3 Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan, dengan sasaran:
- a) Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur;
 - b) Meningkatnya Kualitas infrastruktur;
 - c) Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman;
 - d) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - e) Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana;
 - f) Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Pedesaan.
4. Tujuan 4 Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang didukung oleh inovasi daerah, dengan sasaran:
- a) Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi;
 - b) Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
 - c) Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

Uraian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 sebagai penjabaran Tahun Kedua dari RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 disajikan pada tabel 4.2

Tabel 4.2
Target Indikator Makro Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target	
					2024	2025
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	73,68	74,24	73,56	74,39
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,51	5,00	5,42	5,81
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,31	7,44	8,01	7,88
4	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,54	7,62	7,39	7,13
5	Indeks Gini	Poin	0,396	0,425	0,408	0,383
6	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,12	n/a	1,44	1,42
7	Pendapatan Per Kapita*	Juta Rupiah	49,29	n/a	57,28	61,57



Sumber : Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat 2025

Berdasarkan Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Garut untuk RPJPD Tahun 2025-2045 terdapat 6 (enam) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Prioritas yang harus di selesaikan yang berkaitan dengan Isu Strategis Kabupaten Garut Tahun 2025. Berikut merupakan keterkaitan TPB Priorita Kabupaten Garut dengan Isu Strategis Kabupaten Garut Tahun 2025 :

Tabel 4.3 Keterkaitan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Isu Strategis Kabupaten Garut Tahun 2025

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025
TPB 1: Tanpa Kemiskinan TPB 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera	IS1. Kualitas sumberdaya manusia
TPB 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur	IS2. Pembangunan ekonomi yang inklusif
TPB 11: Kota dan Permukiman Yang Beerkelanjutan TPB 13: Penanggulangan Perubahan Iklim TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak	IS3. Pemerataan Pembangunan infrastruktur antar wilayah didukung dengan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan IS4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan.

Sumber : Laporan KLHS RPJPD 2025-2045, diolah Bappeda 2024

Namun deemikian, dalam upaya pencapaian 17 tujuan SDGs Pemerintah Kabupaten Garut memetakan keselarasan tujuan Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 dengan 17 tujuan SDGs yang kemudian diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Keselarasan Tujuan Kabupaten Garut Dengan 17 Tujuan SDGs

Tujuan Kabupaten Garut Tahun 2025-2026	17 Tujuan SDGs	Perangkat Daerah
1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Tujuan 3. Kehidupan sehat dan sejahtera (<i>good health and well-being</i>)	Dinas Kesehatan, DP2KBP3A, Disdik, Disnakertrans, Diskominfo, Dinas Koperasi dan UKM, Disparbud,
	Tujuan 4 Pendidikan berkualitas (<i>quality education</i>)	
	Tujuan 5 Kesetaraan Gender (<i>gender equality</i>)	
	Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan pertumbuhan Ekonomi (<i>decent work and economic growth</i>)	
2. Terwujudnya Pertumbuhan	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	Dinsos,



Tujuan Kabupaten Garut Tahun 2025-2026	17 Tujuan SDGs	Perangkat Daerah
Ekonomi yang Inklusif	(No-poverty)	Dinkes,Disnakertrans ,Dinas PUPR, Disdik, Disdukcapil, Dinstan, Diskop UKM, Disparbud, Disperindag, DLH, Diskominfo, DPMD, Bapenda, Bappeda, PUPR, Dishub, BPKAD, DPMPTSP
	Tujuan 2 Tanpa Kelaparan (No-hunger)	
	Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau (affordable and clean energy)	
	Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan pertumbuhan Ekonomi (decent work and economic growth)	
	Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (Industry, Innovation and Infrastructure)	
	Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan (Reduced Inequality)	
	Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (Responsible consumption and production)	
	Tujuan 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan (Partnerships for the goals)	
3. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak (Clean Water and Sanitation)	DLH, DISPERINDAG, BPBD,Disperkim, Dinas PUPR, DPMD, Dinsos, Diskominfo, Disparbud, Diskop UKM, Disnakertrans, Dinkes
	Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan pertumbuhan Ekonomi (decent work and economic growth)	
	Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (Industry, Innovation and Infrastructure)	
	Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan (Reduced Inequality)	
	Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang berkelanjutan	
	Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (Responsible consumption and production)	
4. Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas	Tujuan 16 Perdamaian Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh (Peace, justice, and strong institutions)	BAPPEDA, BPKAD, DP2KBP3A,BKD, Disdukcapil, Diskominfo, BAPENDA, DPMPTSP, Dishub, Dinas PUPR Seluruh perangkat Daerah
	Tujuan 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan (Partnerships for the goals)	

Sumber: Diolah Bappeda 2024

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025

Tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2025, merupakan rumusan kondisi yang akan dicapai atas capaian kinerja pembangunan pada pelaksanaan tahun pertama dari RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026. Tujuan dan sasaran tersebut meliputi :

Tujuan pertama RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 adalah **Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas** diarahkan untuk menjawab isu strategis sumber daya manusia yang berkualitas. Tujuan ini memiliki fokus pada 1) Pembangunan Karakter dan Budaya SDM; 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan; 3) Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan; 4) Penurunan prevalensi stunting, angka kematian ibu dan angka kematian bayi; 5) Pengendalian pertumbuhan penduduk; 5) Penanganan Kemiskinan; 6) Kesenjangan gender, hak anak, dan pembangunan pemuda; dan. Tujuan ini memiliki 6 (enam) sasaran meliputi: 1) Meningkatnya Kesalehan Sosial; 2) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat; 2) Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat; 4) Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat; 5) Terkendalinya Pertumbuhan dan Distribusi Penduduk; dan 6) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda.

Tujuan Kedua adalah **Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif**. Tujuan ini memiliki fokus pada 1) Nilai Investasi; 2) Sektor pertanian, perikanan dan peternakan, ekonomi dan industri kreatif, pariwisata, serta sektor UMKM; 3) Daya Beli Masyarakat; 4) Ketahanan Pangan. Tujuan ini memiliki 4 (empat) sasaran meliputi: 1) Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha; 2) Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan peternakan, ekonomi dan industri kreatif, pariwisata, serta sektor UMKM; 3) Meningkatnya daya beli masyarakat; 4) Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Pangan Masyarakat.

Tujuan Ketiga adalah **Terwujudnya Pemerataan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan** untuk menjawab isu strategis Pemerataan Pembangunan infrastruktur antar wilayah didukung dengan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan. Tujuan ini memiliki fokus pada 1) konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah; 2) Infrastruktur dasar; 3) Hunian layak; 4) Akses terhadap air minum dan sanitasi layak; 5) Kualitas lingkungan hidup, pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan 6) Ketangguhan terhadap bencana; serta 7) Pemerataan pembangunan perdesaan. Tujuan ini memiliki 4 (empat) sasaran meliputi: 1) Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Ekonomi; 2) Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; 3) Menurunnya risiko bencana; 4) Meningkatnya pemerataan pembangunan perdesaan.

Tujuan Keempat adalah **Terwujudnya Pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih** untuk menjawab isu strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan. Tujuan ini memiliki fokus pada 1) kualitas dan akses pelayanan publik; 2) akuntabilitas dan pengawasan; 3) tata kelola pemerintahan berbasis elektronik/digital; dan 4) Sistem manajemen SDM aparatur. Tujuan ini memiliki 1 (satu) sasaran yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsifs.

Untuk setiap rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan. Target indikator kinerja sasaran RPJPD Kabupaten Garut pada akhir periode tidak seluruhnya sama persis dengan target akhir RPD pada tahun 2026 sebab adanya penyesuaian terhadap kondisi terkini. Penyusunan target indikator kinerja pembangunan juga ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi capaian hingga tahun 2023 yang digunakan sebagai dasar atau *baseline*. Penentuan target disusun secara realistis dan diharapkan tetap mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan Kabupaten Garut.

Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025

ISU STRATEGIS		TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN& SASARAN		SATUAN		REALISASI			TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN		
								2021	2022	2023	2023	2024	2025
1	Kualitas sumber daya manusia	1	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	1. Indeks kesalehan sosial masyarakat	Nilai	Baik	83,56 (Baik)	84,49 (Baik)	Baik	Baik	84,89 (Baik)		
				2. Indeks Kesehatan	Poin	79,37	79,77	80,11	79,83 - 80,03	80,04 - 80,24	80,79		
				3. Indeks Pendidikan	Poin	58,52	59,85	59,91	60,46 - 62,35	61,79 - 63,68	61,2		
				4. Persentase Penduduk Miskin*	%	10,65	10,42	9,77	7,66 - 7,77	6,92-7,03	8,20 - 9,06		
a	Peningkatan moral, etika, dan tanggung jawab sosial	1. 1	Meningkatnya Kesalehan Sosial	1. Indeks Kesalehan Sosial	Nilai	Baik	83,56 (Baik)	84,49 (Baik)	Baik	Baik	84,89 (Baik)		
b	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat	1. 2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup *	Tahun	71,59	71,85	72,07	71,89 - 72,01	72,03 - 72,1	75,04		
c	Penurunan prevalensi stunting, angka kematian ibu dan angka kematian bayi												
d	Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan masyarakat	1. 3	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	1. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,53	7,83	7,84	8,08 - 8,58	8,43 - 8,93	7,94		
				2. Harapan Lama Sekolah *	Tahun	12,03	12,15	12,16	12,07 - 12,15	12,13 12,21	12,29		
e	Penanganan kemiskinan	1. 4	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	1. Jumlah penduduk miskin	Tahun	281,36	276,67	260,48	209,17- 212,17	190,67- 193,67	253,13		
f	Penanganan Pengangguran			2. Tingkat Pengangguran Terbuka*	Tahun	8,68	7,6	7,33	7,31 - 7,50	6,41-6,61	6.67 - 7.26*		
g	Pengendalian pertumbuhan penduduk	1. 5	Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,72	0,86	0,84	1,1	1,1	1,17		
h	Peningkatan kesetaraan gender, pemenuhan hak	1. 6	Meningkatnya Pengarusutamaan	Indeks Pemberdayaan	Poin	64,87	73,74	72,08			73,82		

ISU STRATEGIS	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN& SASARAN	SATUAN	REALISASI			TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN		
				2021	2022	2023	2023	2024	2025
anak, dan pembangunan pemuda	Gender dan perlindungan anak	Gender (IDG)							
		Indeks Pembangunan Gender	Poin	82,13	82,78	83,37			82
2 Pembangunan ekonomi yang inklusif	2 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,58	5,08	4,94	4,59 - 5,51	4,87 - 5,57	4,5-5,1
		2. Indeks Pengeluaran / Indeks Daya Beli	Poin	63,17	64,17	65,83	66,96-67,63	68,45-69,09	67,94
a Peningkatan nilai investasi	2.1 Meningkatnya realisasi investasi	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Triliun Rp.	1,29	1,165	1,356	2,12-2,13	1,52 - 1,53	1,71
b Pengembangan sektor pertanian, perikanan dan peternakan, ekonomi dan industri kreatif, pariwisata, serta sektor UMKM	2.2 Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan perekonomian daerah	1. Laju pertumbuhan sektor pertanian	%	3,61	4,43	1,6			4,31
		2. Laju pertumbuhan sektor perdagangan	%	3,08	4,53	4,81			4,85
		3. Laju pertumbuhan sektor pariwisata	%	0,25	17,02	10,37			12,5
		4. Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	5,91	6,29	8,05			6,3
c Peningkatan daya beli masyarakat	2.3 Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita	Rp. 000	7961	8.227	8.685	9.012,50-9.212,50	9.462,50-9.662,50	9.305,82
d Peningkatan ketahanan pangan daerah	2.4 Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	79,7	83,1	91,7	81	82	90
3 Pemerataan	3 Terwujudnya	1. Indeks Kualitas	Poin			63,66		51,55	63,17

ISU STRATEGIS		TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN& SASARAN	SATUAN	REALISASI			TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN		
						2021	2022	2023	2023	2024	2025
	Pembangunan infrastruktur antar wilayah didukung dengan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan		Pemerataan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Infrastruktur							
a	Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah	3.1	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Ekonomi	Persentase kemantapan jalan kabupaten dan poros desa	%	48,91	51,42	55,25	55,27	57,92	60,42
b	Penyediaan dan perbaikan infrastruktur dasar secara merata			Persentase Luas Areal Daerah Irigasi Yang Terlayani Oleh Jaringan Irigasi	%	75,23	82,7	83,43	84,4	88,04	91,25
				Persentase kawasan permukiman layak huni	%			35,66	25	36,02	36,59
				Cakupan air minum layak	%	87,26	88,51	90,04	90,04	90,74	91,25
c	Penyediaan hunian layak huni			Cakupan sanitasi layak	%	67,13	67,17	68,11	68,11	68,53	69,05
e	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan	3.2	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	67,82	69,25	90,04	60,75	63,21	68,12*
f	Peningkatan ketangguhan terhadap bencana	3.3	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Poin	185	164,91	147,39	197	194	145
g	Pemerataan pembangunan perdesaan	3.4	Meningkatnya pemerataan pembangunan perdesaan	Persentase Desa Mandiri dan Maju	%	32,3	53,45	68,65			75,77
4	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan	4	Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	66,25	68,89	68,50	BB	BB	71
						(B)	(B)	(B)			(BB)

ISU STRATEGIS		TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN& SASARAN	SATUAN	REALISASI			TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN		
						2021	2022	2023	2023	2024	2025
a	Peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik;	4.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,3	82,91	83,8	Baik	Baik	84,00
					(Baik)	(Baik)	(Baik)			(Baik)	
b	Penguatan akuntabilitas dan pengawasan			2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	B	75,701	77,829	A	A	86,38 (A)
							(B)	(B)			
				3. Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	74,28 (BB)	74,38	74,91	BB	A	80,05 (A)
							(BB)	(BB)			
				4. Nilai Evaluasi LPPD	Nilai	Tinggi (3,5117)	Tinggi	Tinggi (3,4962)	Tinggi	Tinggi	Tinggi (3,4966)
c	Penataan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik/digital			5. Indeks SPBE	Nilai	3,25	3,25	3,29	3,11	3,87	3,35
d	Penataan sistem manajemen SDM aparatur	6. Indeks Sistem merit	Nilai	266 (Baik)	Baik (259,5)	328,5 (Sangat Baik)	311.6 (Sangat Baik)	328 (Sangat Baik)	329 (Sangat Baik)		
		7. Indeks Kualitas Kebijakan Daerah	Nilai			68,76 (Baik)			73,2 (Baik)		
		8. Indeks Inovasi Daerah	Nilai		54,13 (Inovatif)	42,96 (Inovatif)			60,01 (Sangat Inovatif)		

Sumber : RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026, diolah Bappeda Kab. Garut 2024

Keterangan : * Baseline 2025 berdasarkan SEB 73/PR.03.01/BAPP Provinsi Jawa Barat



Dari ke-15 (lima belas) sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut tahun 2024 tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai penjabaran RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026. Dalam pelaksanaannya, sasaran pembangunan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran utama pembangunan nasional tahun 2025 dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, baik dari pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun dari dukungan pemerintah kabupaten, serta dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, media dan akademisi.

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Pelaksanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan Kabupaten Garut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional, sehingga perumusan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2025 harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 maupun RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

4.2.1 Telaah Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

RKP tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan nasional yang disusun sebagai penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. RPJMN 2025-2029 merupakan tahapan pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 saat ini penyusunan RPJMN telah memasuki tahap penyusunan rancangan awal adapun penekanan intervensi wilayah jawa diuraikan sebagai berikut:

1. Tema Pembangunan Pulau Jawa : Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan;
2. Jawa Barat: Pusat *cutting-edge industry*, inovasi dan pendidikan STEAM bertaraf global, serta penumpu ketahanan pangan nasional, tema ini memberikan makna bahwa fokus intervensi kewilayahan dan sarana prasarana di pulau Jawa pada tahun 2025 meliputi :
 - a. Peningkatan Produktivitas padi, hortikultura, peternakan, dan tanaman pangan lainnya guna mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur;



- b. Pengembangan industrialisasi perikanan modern, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur;
 - c. Penurunan *logistic cost* guna meningkatkan *comparative advantage* investasi di Jawa, antara lain melalui: lanjutan pembangunan jalan Tol Trans Jawa, lanjutan pembangunan Pelabuhan Patimban, serta optimalisasi dan peningkatan layanan pelabuhan hub utama Jawa (Tanjungpriok dan Tanjungperak);
 - d. Pengelolaan urban governance pada WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, dan WM Surabaya, termasuk pengembangan infrastruktur perkotaan (antara lain: transportasi, sumber daya air dan air minum, persampahan dan sanitasi, perumahan dan permukiman perkotaan), guna mewujudkan kawasan perkotaan sebagai pusat aglomerasi ekonomi yang efisien dan unggul;
 - e. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid (green, gray, dan social infrastructure* terutama pada kawasan perkotaan di pesisir utara Jawa yang didera multiancaman bencana: abrasi, rob, penurunan tanah dan banjir)
3. Hingga tahun 2045, Jawa diproyeksikan (masih) menjadi national economic heartland (dengan proyeksi penduduk sebanyak 195 juta orang) sehingga tetap di perlukan investasi dan intervensi yang memadai;
4. *Key Policies* Pengembangan Kewilayahan Jawa Barat 2025-2029 : Khusus wilayah Selatan Jawa Barat direncanakan sebagai Kawasan Afirmasi 3TP (tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan) prioritas;
5. Pengembangan wilayah afirmasi diarahkan kepada *multiinfrastructure Corridor & Key Logistics Infrastructure*. Di wilayah Garut akan di Bangun Jalan tol Gedebage-Garut-Tasikmalaya-Cilacap dan Peningkatan kualitas jalan pada Kawasan Afirmasi Jawa Barat Selatan

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.;

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia



2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

4.2.2 Telaah Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 disusun dengan menerapkan **konsep THIS**, yaitu:

- 1) **Tematik** (disesuaikan dengan isu strategis dan tema pembangunan);
- 2) **Holistik** (menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dari hulu sampai hilir);
- 3) **Integratif** (melibatkan berbagai Perangkat Daerah Provinsi dan terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota);
- 4) **Spasial** (mengacu pada kebijakan penataan ruang dan kebijakan kewilayahan).

Prioritas Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2026 meliputi:

1. **Prioritas 1**, yaitu Pertumbuhan Ekonomi berbasis inovasi penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan serta pengembangan pariwisata;
2. **Prioritas 2**, yaitu Pengembangan reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan serta pendidikan agama ;
3. **Prioritas 3**, yaitu Penguatan Sistem Kesehatan Daerah;
4. **Prioritas 4**, yaitu Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
5. **Prioritas 5**, yaitu Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa;
6. **Prioritas 6**, yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.

Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 disusun berdasarkan arah kebijakan pada RPD Provinsi Jawa Barat 2024- 2026 untuk tahun 2025, permasalahan dan isu strategis pembangunan tahun 2025, serta mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2025. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 juga ditetapkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional tahun 2025.

Prioritas dan sasaran prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 diimplementasikan melalui program prioritas pembangunan daerah, serta program pembangunan daerah, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan Jawa Barat.

4.2.3 Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/ penjangkaran aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut, diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Saran dan pendapat yang menjadi pokok-pokok pikiran DPRD untuk perencanaan pembangunan tahun 2024 yang telah dimasukkan kedalam *e-planning* Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), selanjutnya disinergikan dalam rancangan program dan kegiatan pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Saran dan masukan usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya disinergikan dalam rancangan program dan kegiatan pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pokok-pokok Pikiran DPRD

No.	Prioritas Daerah	Pokok-pokok Pikiran DPRD
01.00	PD1. Penanganan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Industri
		Bantuan modal Wirausaha Muda Pemula (WMP)
		Pelatihan Vocational bagi Masyarakat (Keterampilan : Kulit, Kopi, Sablon/Menjahit, Kuliner)
		Bantuan bagi warga miskin produktif (KUBE)
		Bantuan Perkuatan Modal Pelaku Usaha Mikro
		Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya
02.00	PD6. Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan penguatan sistem perlindungan sosial	Pengadaan Roda Pengangkut Sampah
		Pengadaan Bibit Tanaman Buah
		Pembangunan TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah : Reduce, Reuse, Recycle)
		Budidaya Maggot
		Pembangunan Bank Sampah
		Pembangunan Ruang Terbuka hijau (RTH)
		Pengadaan Tempat Pewadahan Sampah
		Penyediaan Mesin Pengolah Sampah
		Penghijauan Lahan Kritis
		Pengadaan Komposter
		Pembangunan Tembok Penahan Tanah
		Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU)
03.00	PD2. Reformasi kualitas sistem pendidikan, transformasi sistem kesehatan, keluarga berencana, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta peningkatan peran aktif pemuda	Pengadaan Roda Pengangkut Sampah
		Fasilitasi pelayanan Kesehatan bagi keluarga miskin: Penanggulangan binatang pembawa penyakit (fogging)
		Peralatan kesehatan Posyandu (alkes)
		Hibah barang untuk alat alat kelengkapan pos yandu prima
		Hibah Uang untuk pembangunan pos yandu prima
		Pembangunan lapang voli
		Pembangunan Ruang Kelas Baru (untuk sekolah swasta/ yang dikelola oleh masyarakat)



No.	Prioritas Daerah	Pokok-pokok Pikiran DPRD
		Pembangunan Zona Selamat Sekolah
		Pembangunan toilet/ tempat cuci tangan (jenjang PAUD dan SD)
		Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)
04.00	PD3. Penguatan budaya gotong royong, kehidupan beragama dan berbudaya serta ketentraman dan ketertiban politik, demokrasi	Bantuan keuangan untuk yayasan sosial kemanusiaan/ kemasyarakatan, Advokasi pelayanan publik, pendampingan pelayanan masyarakat
		Bantuan Guru Ngaji
		Bantuan hibah uang sarana keagamaan
05.00	PD5. Peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah diikuti dengan pembangunan desa dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pembangunan Jalan Lingkungan
		Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
		Pembangunan Drainase Permukiman
		Perbaikan Sistem Penyediaan Air Murni (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
		Rekonstruksi Jalan
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
		Rehabilitasi Jalan
		Pembangunan Tanggul Sungai Sub. DAS
		Pembangunan Septictank Komunal (Minimal Layanan 25 KK)
		Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku
		Jaringan Irigasi Usaha Tani
		Jalan Usaha Tani
		Pembangunan MCK dan Septictank (Minimal Layanan 5-10 KK)
		Rehabilitasi Jembatan Jalan
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
06.00	PD4. Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, peningkatan realisasi investasi, diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan kualitas konsumsi pangan	Pembangunan Pintu Perlindungan Kereta Api
		Alat Mesin Pertanian
		Pembangunan Embung dan Penampung Air Untuk Pertanian
		Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin)
		Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat
		Hibah Uang Teknologi Tepat Guna
		Hibah Uang untuk Pembangunan Sekretariat RT dan RW



No.	Prioritas Daerah	Pokok-pokok Pikiran DPRD
		Bantuan Bibit/Ikan/Unggas dalam Kelembagaan Pangan
		Bantuan Sarana Usaha Peternakan (Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau)
		Bantuan Sarana Perikanan Budidaya
		Penyusunan Masterplan desa wisata
		Desa Wisata (Akses Jalan Menuju Desa Wisata, Fasilitas Umum, Dll)
		Optimalisasi pengelolaan desa wisata
07.00	PD7. Tata Kelola pelayanan publik yang inovatif	Pembangunan Sarana Keagamaan
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
		Bantuan keuangan untuk yayasan sosial kemanusiaan/ kemasyarakatan, Advokasi pelayanan publik, pendampingan pelayanan masyarakat
		Bantuan Prasarana Pendukung Usaha Peternakan (Kandang Ternak)

Sumber: SIPD diolah Bappeda, Tahun 2024

4.2.4 Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Garut

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/Panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Perumusan isu strategis Kabupaten Garut tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi tahun 2024, arah kebijakan dari RPD dan arah kebijakan RKP serta memperhatikan dinamika isu strategis global dan nasional seperti penanggulangan kemiskinan ekstrem, peningkatan investasi daerah, digitalisasi administrasi pemerintahan, penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui perencanaan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi.

Berdasarkan hasil analisa data dan permasalahan pada Bab 2, terdapat 4 isu strategis dimana isu-isu strategis tersebut masih sesuai dengan isu strategis dalam RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026. Proses penyusunan isu strategis pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.7.



Tabel 4.7 Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025

Isu Strategis Tahun RPD 2025-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2023	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025
1. Kualitas sumberdaya manusia 2. Pembangunan ekonomi yang inklusif 3. Pemerataan Pembangunan infrastruktur antar wilayah didukung dengan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan 4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan.	Upaya pengurangan jumlah penduduk miskin, pengentasan kemiskinan ekstrem, pengurangan dan perluasan kesempatan berusaha; belum optimal. Perlu peningkatan kehidupan masyarakat yang agamis, demokratis dan berbudaya luhur, Belum terkendalinya kependudukan dan masih perlunya pembangunan keluarga sejahtera, Pasca pelaksanaan Pilkada Serentak. Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial Perlunya pemerataan infrastruktur antar wilayah secara merata, cakupan air minum dan sanitasi layak (mendukung pengurangan kantong kemiskinan) Rendahnya daya beli masyarakat, nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya Masih Rendahnya kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan tingginya resiko bencana	1. Kualitas sumberdaya manusia 2. Pembangunan ekonomi yang inklusif 3. Pemerataan Pembangunan infrastruktur antar wilayah didukung dengan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan 4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan.



Isu Strategis Tahun RPD 2025-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2023	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025
	Perlunya reformasi birokrasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Masih rendahnya realisasi investasi daerah (PMA dan PMDN) dan pendapatan daerah.	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, Tahun 2024

Catatan:

*Penjelasan permasalahan dapat dilihat pada Tabel 2.90

Sumber perumusan isu strategis:

1. Permasalahan pembangunan dalam RPD;
2. Permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD 2023;
3. Arah kebijakan RPD; dan
4. Arah kebijakan RKP

4.2.5 Keterkaitan Isu Strategis dengan Arah Kebijakan RKP 2025

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 mengusung tema pembangunan "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**". Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 difokuskan pada:

1. **SDM Berdaya Saing dan Produktif**, dilaksanakan melalui strategi:
 - a) Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun;
 - b) Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan;
 - c) Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan *Stunting*;
 - d) Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif;
 - e) Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas;
 - f) Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan *dual-system*;
 - g) Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa.
2. **Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas**, dilaksanakan melalui strategi:
 - a) Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur
 - b) konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;

- c) Penguatan infrastruktur digital;
- d) Pengembangan infrastruktur transisi energi;
- e) Percepatan infrastruktur IKN;
- f) Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

3. Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan, dilaksanakan melalui strategi:

- a) Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
- b) Pengembangan skema graduasi bansos;
- c) Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang
- d) disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya;
- e) Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat;
- f) Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja;
- g) Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan;
- h) Peningkatan produksi industri pengolahan;
- i) Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif;
- j) Penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi.

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan utama pembangunan daerah dalam RPD, permasalahan dari hasil evaluasi RKPD, permasalahan dan isu strategis pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2025, isu strategis pembangunan provinsi dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, isu yang sedang berkembang saat ini serta kondisi pasca pemilu dan pilkada serentak Tahun 2024, maka telah dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025 yang merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia;
2. Pembangunan ekonomi yang inklusif;
3. Pemerataan Pembangunan infrastruktur antar wilayah didukung dengan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan;
4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan.

Berikut merupakan penjabaran masing-masing isu strategis Kabupaten Garut.

1. Kualitas sumber daya manusia

- a. Peningkatan moral, etika, dan tanggung jawab sosial.
- b. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat;
- c. Penurunan prevalensi stunting, angka kematian ibu dan angka kematian bayi;
- d. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan masyarakat;
- e. Penanganan kemiskinan;
- f. Penanganan pengangguran;
- g. Pengendalian pertumbuhan penduduk;
- h. Peningkatan kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, dan pembangunan pemuda.

2. Pembangunan ekonomi yang inklusif;

- a. Peningkatan nilai investasi;
- b. Pengembangan sektor pertanian, perikanan dan peternakan, ekonomi dan industri kreatif, pariwisata, serta sektor UMKM;
- c. Peningkatan daya beli masyarakat;
- d. Peningkatan ketahanan pangan daerah.

3. Pemerataan Pembangunan infrastruktur antar wilayah didukung dengan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan

- a. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah;
- b. Penyediaan dan perbaikan infrastruktur dasar secara merata;
- c. Penyediaan hunian layak huni;
- d. Pemerataan akses terhadap air minum dan sanitasi layak;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- f. Peningkatan ketangguhan terhadap bencana;
- g. Pemerataan pembangunan perdesaan.

4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan.

- a. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik;
- b. Penguatan akuntabilitas dan pengawasan;
- c. Penataan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik/digital
- d. Penataan sistem manajemen SDM aparatur.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Garut tahun 2025 mengacu kepada strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 untuk pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025, sebagaimana disajikan pada tabel 4.8.

Tabel 4.8 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	
				Utama	Pendukung
Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatnya Kesalehan Sosial	Pembangunan iklim kehidupan masyarakat yang beragama, demokratis, toleran dan berbudaya	1. Penguatan organisasi/lembaga kemasyarakatan	Bakesbangpol	Setda
			2. Penguatan peran partai politik	Bakesbangpol	Setda, Setwan
			3. Peningkatan koordinasi dan komunikasi Forkopimda	Bakesbangpol	Setda
			4. Pemetaan, pembinaan dan pengendalian kerawanan konflik	Bakesbangpol	Setda, Satpol PP, Bakesbangpol
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Transformasi sistem kesehatan masyarakat	1. Perluasan cakupan integrasi pelayanan kesehatan primer	Dinas Kesehatan	DPMD, DP2KBP3A,
			2. Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dengan layanan unggulan sesuai dengan kebutuhan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi, Sekretariat Daerah
			3. Ketersediaan sektor farmasi dan alat kesehatan serta kesiapsiagaan krisis kesehatan	Dinas Kesehatan	BPBD, PMI
			4. Penyusunan rencana kebutuhan SDM dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	BKD, Sekretariat Daerah, BPKAD
			5. Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial, BPKAD, UOBK Blud RSUD dr. Slamet
			6. Integrasi sistem informasi kesehatan	Dinas Kesehatan	Diskominfo, RSUD dr. Slamet
			7. Intervensi spesifik penurunan stunting	Dinas Kesehatan	DPMD, Kewilayahan, DKP, Dinas Pertanian,
			8. Intervensi sensitif penurunan stunting	DP2KBP3A	Dinas PUPR, Dinas Perkim



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	
				Utama	Pendukung
	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Transformasi sistem pendidikan	1. Meningkatkan aksesibilitas dan tata kelola mutu pendidikan PAUD/TK, SD dan SMP serta pendidikan kesetaraan	Dinas Pendidikan	Dinas Sosial, Dispusip, Dishub, Dinas PUPR, Disperkim
			2. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta distribusi yang merata	Dinas Pendidikan	BKD
			3. Meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Dinas Pendidikan, Diskominfo
			4. Meningkatkan penyiapan pembibitan atlet yang menjadi lingkup kewenangan dunia pendidikan	Dispora	Disdik, KONI
			5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan kelembagaan/aktivitas untuk siswa/remaja/pemuda	Dispora	Disdik, KNPI, Kwarcab, Kesbangpol
	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Peningkatan taraf hidup masyarakat	1. Penyediaan akses terhadap peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat	Disnakertrans	Diskop UKM, Disperindag, ESDM, Disdik, Diskanak, Distan, Disparbud
			2. Perluasan kesempatan kerja dan peluang kerja sektor formal maupun informal yang berkualitas	Disnakertrans	Diskop UKM, Disperindag, ESDM, Disdik, Diskanak, Distan, Disparbud, DPMPSTP
			3. Penyediaan kemudahan akses permodalan usaha dan upgrade skill usaha	DiskopUKM	Disperindag, ESDM, Diskanak, Distan, Disnaker
			4. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan	Dinsos	Dinkes, Disdik, Diskop UMKM, Distan, DKP, Disnakertrans, Disparbud, Dinas PUPR, Disperkim, Disdukcapil, Disperindag
			5. Penanganan Pemerlu Pelayanan	Dinsos	Dinkes, Disdik, Diskop UMKM,



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	
				Utama	Pendukung
			Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan memperkuat rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta Perlindungan dan Jaminan Sosial		Distan, DKP, Disnakertrans, Disparbud, Dinas PUPR, Disperkim, Disdukcapil, Disperindag
	Terkendalinya Pertumbuhan dan Distribusi Penduduk	Penyelenggaraan pengendalian penduduk	1. Peningkatan pelayanan dan cakupan kepesertaan keluarga berencana	DP2KBP3A	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, DPMD, Kewilayahan
			2. Optimalisasi pemanfaatan data Keluarga	DP2KBP3A	Disdukcapil, Dinsos, Diskominfo, Kewilayahan
	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak	Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak serta partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan	1. Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan serta pemberdayaan perempuan	DP2KBP3A	Dinsos, Disdik, Dinkes, Setda, Satpol PP
			2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak	DP2KBP3A	Dinsos, Disdik, Dinkes, Setda, Satpol PP
			3. Pembinaan dan pengembangan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	DP2KBP3A	Diskop UMKM, Disperindag, DPMD, Dinkes
			4. Pengembangan dan Perluasan Kampung KB	DP2KBP3A	DPMD, Dinkes, Disperkim
			5. Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan pemuda	Dispora	Diskop UMKM, Disperindag, Disparbud, DPMD, Dinsos, Disnakertrans
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Meningkatnya realisasi investasi	Peningkatan promosi dan iklim investasi daerah	1. Perluasan Penyebaran Informasi Potensi, Promosi, dan Peluang Investasi	DPMPTSP	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan Disperindag ESDM, Diskop UKM, Disnaker, Disparbud
			2. Penyederhanaan pelayanan dan Kemudahan berusaha	DPMPTSP	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	
				Utama	Pendukung
			dan berinvestasi		
			3. Skema reward and punishment terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal	DPMPTSP	
			4. Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing	DPMPTSP	
			5. Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	
	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan perekonomian daerah	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Komoditas Pertanian	1. Peningkatan layanan sarana dan prasarana produksi dan pascapanen	Distan, Diskanak	
			2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pertanian	Distan, Diskanak	
			3. Peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Distan, Diskanak	BPBD
			4. Pengendalian kesehatan hewan ternak dan peningkatan kualitas pangan hewani	Distan, Diskanak	
			5. Perluasan Pasar Hasil Pertanian	Distan, Diskanak	
		Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil perikanan	1. Pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pasca panen perikanan	Diskannak	
			2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pembudidaya Ikan dan Nelayan	Diskannak	
			3. Perluasan Pasar Hasil Perikanan	Diskannak	
			4. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Diskannak	
		Peningkatan kontribusi sektor perdagangan	1. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	DisperindagESDM	
			2. Pengembangan Promosi dan Kerjasama Perdagangan	DisperindagESDM	
			3. Perlindungan dan Penggunaan Produk Dalam Daerah	DisperindagESDM	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	
				Utama	Pendukung
			4. Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil	DiskopUKM	
			5. Peningkatan Kinerja Koperasi	DiskopUKM	
		Peningkatan kontribusi sektor pariwisata	1. Peningkatan kualitas aksesibilitas, amenitas serta atraksi di destinasi pariwisata	Disparbud	
			2. Peningkatan pemasaran pariwisata	Disparbud	
			3. Peningkatan sumber daya manusia serta kelembagaan kepariwisataan daerah	Disparbud	
			4. Peningkatan pemanfaatan ekonomi kreatif dalam mendukung sektor pariwisata	Disparbud	
			5. Peningkatan pemanfaatan kebudayaan	Disparbud	
		Peningkatan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	1. Pengembangan Kawasan Industri	DisperindagESDM	
			2. Pengelolaan Sistem Informasi Industrial	DisperindagESDM	
			3. Promosi Produk Industri Lokal	DisperindagESDM	
			4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Industri	DisperindagESDM	Disnakertrans
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Peningkatan Keterjangkauan Harga Komoditas Kebutuhan Pokok	1. Peningkatan sarana distribusi perdagangan	DisperindagESDM	
			2. Stabilisasi harga dan penguatan rantai pasok barang pokok	DisperindagESDM	
			3. Perlindungan terhadap hak konsumen	DisperindagESDM	
	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	1. Peningkatan, pemantauan, pengendalian ketersediaan pangan	DKP	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Kesehatan, BPS, Disperindag ESDM
			2. Peningkatan, pemantauan, dan pengendalian sistem logistik pangan (Silopang)	DKP	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan, Disperindag



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	
				Utama	Pendukung
					ESDM, BULOG
			3. Peningkatan diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)	DKP	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan, Disperindag ESDM, Diskop UKM
			4. Peningkatan pengawasan mutu keamanan pangan	DKP	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan, Disperindag ESDM, Dinas Kesehatan
Terwujudnya Pemerataan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Ekonomi	Pemerataan dan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah	1. Peningkatan pemantapan jalan dan jembatan	Dinas PUPR	Dinas Perhubungan
			2. Pemerataan infrastruktur dasar	Dinas PUPR	Disperkim, DLH
			3. Penyediaan air baku yang andal dan berkelanjutan	Dinas PUPR	Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup
			4. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Dinas Perhubungan	Dinas PUPR
			5. Peningkatan pemenuhan akses terhadap sanitasi	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan
			6. Peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM	Dinas PUPR	
		Penyediaan kawasan perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan	1. Penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan	Disperkim	
			2. Peningkatan dan pemenuhan infrastruktur dasar permukiman	Disperkim	
			3. Peningkatan kualitas lingkungan kawasan permukiman	Disperkim	
			4. Pembangunan dan peningkatan kualitas RUTILAHU	Disperkim	Dinsos Disdukcapil
			5. Penyediaan perumahan untuk memangkas backlog (komersil dan bersubsidi)	Disperkim	DPMPTSP



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	
				Utama	Pendukung
	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pengendalian pencemaran air dan udara	1. Optimalisasi fungsi pengelolaan air limbah dan limbah B3	DLH	Dinas PUPR, Dinas Kesehatan
			2. Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan	DLH	
			3. Penurunan beban pencemaran air	DLH	Dinas PUPR, Dinas Kesehatan
			4. Pengendalian sumber emisi	DLH	Dishub
		Peningkatan tutupan vegetasi lahan	Optimalisasi program konservasi dan penataan ruang terbuka hijau	DLH	
		Peningkatan pengelolaan sampah	1. Peningkatan pengendalian pencemaran dan pemulihan lingkungan hidup	DLH	
			2. Pengurangan timbulan sampah	DLH	
			3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	DLH	
			4. Revitalisasi fungsi TPA	DLH	
		Perencanaan Penataan ruang dan pengembangan kawasan terbangun strategis	1. Perencanaan tata ruang berbasis sumber daya lingkungan berkelanjutan dan mitigasi bencana	Dinas PUPR	DLH
			2. Penataan Bangunan Sesuai Standar Melalui Layanan Sertifikat Laik Fungsi	Dinas PUPR	
			3. Penataan Kawasan strategis Kabupaten	Dinas PUPR	Disparbud, DLH
			4. Pengelolaan dan pengawasan jasa konstruksi yang sesuai standar	Dinas PUPR	
	Menurunnya risiko bencana	Peningkatan ketangguhan daerah terhadap bencana	1. Peningkatan upaya mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana	BPBD	Dinas PUPR, Setda, Bappeda, Disperkim, DPMPT, Dinkes, Disdik, Disdamkar, Satpol PP, Dinsos, DPMD, DKP, Distan, Diskanak,



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	
				Utama	Pendukung
			2. Pengendalian kegiatan pada kawasan rawan bencana	BPBD	Kewilayahan, Desa Dinas PUPR, Setda, Bappeda, Disperkim, DPMPT, Dinkes, Disdik, Disdamkar, Satpol PP, Dinsos, DPMD, DKP, Distan, Diskanak, Kewilayahan, Desa
	Meningkatnya pemerataan pembangunan perdesaan	Percepatan pembangunan desa mandiri dan maju	1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa	DPMD	Diskop UMKM, Disperindag, Dinsos, DKP
			2. Peningkatan dan penguatan sarana prasarana serta infrastruktur perdesaan	DPMD	Disperkim, Dinas PUPR, Distan, Diskominfo
			3. Penguatan kelembagaan desa dan tata kelola pemerintahan desa serta kerjasama antar desa	DPMD	Setda, Inspektorat, BPKAD
			4. Mendorong pengembangan pariwisata desa	DPMD	Disparbud, Disperkim, Dinas PUPR, Diskop UMKM, Disperindag, Diskominfo
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif	Penerapan standar pelayanan publik pada unit pelayanan publik	1. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai	Sekretariat Daerah, Diskominfo, DPMPTSP, Disdukcapil, Disdamkar	Seluruh perangkat daerah
			2. Peningkatan integritas dan kualitas SDM pelayanan	Sekretariat Daerah, Diskominfo, DPMPTSP, Disdukcapil, Disdamkar	Seluruh perangkat daerah
			3. Optimalisasi penerapan SOP dan standar pelayanan publik	Sekretariat Daerah, Diskominfo, DPMPTSP, Disdukcapil, Disdamkar	Seluruh perangkat daerah
		Penguatan kapasitas dan efektivitas	1. Penguatan Monitoring dan Evaluasi kinerja pelayanan publik	Sekretariat Daerah, Diskominfo,	Seluruh perangkat daerah



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	
				Utama	Pendukung
		pengawasan pelayanan publik	2. Penerapan <i>reward and punishment</i> pelayanan publik	DPMPTSP, Disdukcapil, Disdamkar	Seluruh perangkat daerah
		Pemantapan Penerapan Reformasi birokrasi	1. Penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Sekretariat Daerah	Seluruh perangkat daerah
			2. Penguatan dan penataan organisasi	Sekretariat Daerah	Seluruh perangkat daerah
			3. Optimalisasi penerapan merit sistem secara konsisten	BKD	Seluruh perangkat daerah
			4. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara transparan dan akuntabel	Bappeda, BPKAD, Inspektorat	Seluruh perangkat daerah
		Peningkatan inovasi daerah dalam rangka pelayanan publik dan pembangunan daerah	1. Pelaksanaan satu instansi, satu inovasi (One Agency One Innovation)	Bappeda	Seluruh perangkat daerah
			2. Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Sekretariat Daerah, Diskominfo, DPMPTSP, Disdukcapil	Seluruh perangkat daerah

Sumber: diolah Bappeda 2023

Keselarasan antara Isu Strategis Kabupaten Garut Tahun 2025 dengan Arah Kebijakan RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026, serta Isu Strategis/Tantangan dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2025, dituangkan pada tabel berikut:

Tabel 4.9. Keselarasan Isu Strategis Kabupaten Garut Tahun 2025 dengan Arah Kebijakan RPD 2025-2026, serta Isu Strategis/Tantangan dan Arah Kebijakan RKP 2025

Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025		Arah Kebijakan RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026		Isu Strategis / Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
1	Kualitas sumberdaya manusia	1	Penguatan organisasi/lembaga kemasyarakatan	1. Kualitas pendidikan belum merata 2. Layanan Pendidikan masih rendah 3. Kualitas pendidikan masih rendah 4. Kesenjangan partisipasi pendidikan tinggi 5. Kualitas lulusan masih rendah	SDM Berdaya Saing dan Produktif
		2	Penguatan peran partai politik		
		3	Peningkatan koordinasi dan komunikasi Forkopimda		



Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025		Arah Kebijakan RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026		Isu Strategis / Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
		4	Pemetaan, pembinaan dan pengendalian kerawanan konflik	6. Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun 7. Angka Kematian Ibu masih tinggi 8. Stunting masih tinggi 9. Prevalensi obesitas terus meningkat 10. Kasus baru TBC peringkat ke-2 dunia 11. Kasus baru Kusta peringkat ke 3 dunia 12. Puskesmas tidak tersedia 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar 13. Akurasi Program Bantuan Sosial masih rendah 14. Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) belum optimal dan inklusif 15. Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga 16. Tingginya ketimpangan gender 17. Belum kokohnya karakter dan jati diri bangsa 18. kualifikasi pendidikan angkatan kerja masih rendah 19. Tingkat kemiskinan masih stagnan 20. Akurasi program bantuan sosial masih rendah 21. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih rendah, khususnya pekerja sektor informal	
		5	Perluasan cakupan integrasi pelayanan kesehatan primer		
		6	Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dengan layanan unggulan sesuai dengan kebutuhan		
		7	Ketersediaan sektor farmasi dan alat kesehatan serta kesiapsiagaan krisis kesehatan		
		8	Penyusunan rencana kebutuhan SDM dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan		
		9	Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
		10	Integrasi sistem informasi kesehatan		
		11	Intervensi spesifik penurunan stunting		
		12	Intervensi sensitif penurunan stunting		
		13	Meningkatkan aksesibilitas dan tata kelola mutu pendidikan PAUD/TK, SD dan SMP serta pendidikan kesetaraan		
		14	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta distribusi yang merata		
		15	Meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat		
		16	Meningkatkan penyiapan pembibitan atlet yang menjadi lingkup kewenangan dunia pendidikan		
		17	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan kelembagaan/aktivitas untuk siswa/remaja/pemuda		



Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025		Arah Kebijakan RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026		Isu Strategis / Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
		18	Penyediaan akses terhadap peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat		
		19	Perluasan kesempatan kerja dan peluang kerja sektor formal maupun informal yang berkualitas		
		20	Penyediaan kemudahan akses permodalan usaha dan upgrade skill usaha		
		21	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan		
		22	Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan memperkuat rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta Perlindungan dan Jaminan Sosial		
		23	Peningkatan pelayanan dan cakupan kepesertaan keluarga berencana		
		24	Optimalisasi pemanfaatan data Keluarga		
		25	Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan serta pemberdayaan perempuan		
		26	Pemenuhan hak dan perlindungan anak		
		27	Pembinaan dan pengembangan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)		
		28	Pengembangan dan Perluasan Kampung KB		
		29	Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan pemuda		



Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025		Arah Kebijakan RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026		Isu Strategis / Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
2	Pembangunan ekonomi yang inklusif	1	Perluasan Penyebaran Informasi Potensi, Promosi, dan Peluang Investasi	1. Pertumbuhan Ekonomi Potensial Indonesia dalam tren Melambat 2. Ekonomi Indonesia hanya tumbuh rata rata 5,0% dalam 20 tahun terakhir 3. Total Factor Productivity (TFP) Indonesia dalam Tren Menurun	Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan
		2	Penyederhanaan pelayanan dan Kemudahan berusaha dan berinvestasi		
		3	Skema reward and punishment terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal		
		4	Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing		
		5	Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		
		6	Peningkatan layanan sarana dan prasarana produksi dan pascapanen		
		7	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pertanian		
		8	Peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		
		9	Pengendalian kesehatan hewan ternak dan peningkatan kualitas pangan hewani		
		10	Perluasan Pasar Hasil Pertanian		
		11	Pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pasca panen perikanan		
		12	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pembudidaya Ikan dan Nelayan		
		13	Perluasan Pasar Hasil Perikanan		
		14	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		
		15	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor		
		16	Pengembangan Promosi dan Kerjasama		



Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025		Arah Kebijakan RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026		Isu Strategis / Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
			Perdagangan		
		17	Perlindungan dan Penggunaan Produk Dalam Daerah		
		18	Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil		
		19	Peningkatan Kinerja Koperasi		
		20	Peningkatan kualitas aksesibilitas, amenitas serta atraksi di destinasi pariwisata		
		21	Peningkatan pemasaran pariwisata		
		22	Peningkatan sumber daya manusia serta kelembagaan kepariwisataan daerah		
		23	Peningkatan pemanfaatan ekonomi kreatif dalam mendukung sektor pariwisata		
		24	Peningkatan pemanfaatan kebudayaan		
		25	Pengembangan Kawasan Industri		
		26	Pengelolaan Sistem Informasi Industrial		
		27	Promosi Produk Industri Lokal		
		28	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Industri		
		29	Peningkatan sarana distribusi perdagangan		
		30	Stabilisasi harga dan penguatan rantai pasok barang pokok		
		31	Perlindungan terhadap hak konsumen		
		32	Peningkatan, pemantauan, pengendalian ketersediaan pangan		
		33	Peningkatan, pemantauan, dan pengendalian sistem logistik pangan (Silopang)		



Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025		Arah Kebijakan RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026		Isu Strategis / Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
		34	Peningkatan diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)		
		35	Peningkatan pengawasan mutu keamanan pangan		
3	Pemerataan Pembangunan infrastruktur antar wilayah didukung dengan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan	1	Peningkatan pemantapan jalan dan jembatan	1. Kualitas Jalan Daerah yang masih rendah 2. Penuntasan manfaat bendungan terbangun 3. Gap Pengelolaan Sampah	Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas
		2	Pemerataan infrastruktur dasar		
		3	Penyediaan air baku yang andal dan berkelanjutan		
		4	Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan		
		5	Peningkatan pemenuhan akses terhadap sanitasi		
		6	Peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM		
		7	Penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan		
		8	Peningkatan dan pemenuhan infrastruktur dasar permukiman		
		9	Peningkatan kualitas lingkungan kawasan permukiman		
		10	Pembangunan dan peningkatan kualitas RUTILAHU		
		11	Penyediaan perumahan untuk memangkas backlog (komersil dan bersubsidi)		
		12	Optimalisasi fungsi pengelolaan air limbah dan limbah B3		
		13	Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan		
		14	Penurunan beban pencemaran air		



Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025		Arah Kebijakan RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026		Isu Strategis / Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
		15	Pengendalian sumber emisi		
		16	Optimalisasi program konservasi dan penataan ruang terbuka hijau		
		17	Peningkatan pengendalian pencemaran dan pemulihan lingkungan hidup		
		18	Pengurangan timbulan sampah		
		19	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan		
		20	Revitalisasi fungsi TPA		
		21	Perencanaan tata ruang berbasis sumber daya lingkungan berkelanjutan dan mitigasi bencana		
		22	Penataan Bangunan Sesuai Standar Melalui Layanan Sertifikat Laik Fungsi		
		23	Penataan Kawasan strategis Kabupaten		
		24	Pengelolaan dan pengawasan jasa konstruksi yang sesuai standar		
		25	Peningkatan upaya mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana		
		26	Pengendalian kegiatan pada kawasan rawan bencana		
		27	Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa		
		28	Peningkatan dan penguatan sarana prasarana serta infrastruktur perdesaan		
		29	Penguatan kelembagaan desa dan tata kelola pemerintahan desa serta kerjasama antar desa		



Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025		Arah Kebijakan RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026		Isu Strategis / Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
		30	Mendorong pengembangan pariwisata desa		
4	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan.	1	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai	1. Kontribusi Iptek dan Inovasi terhadap Pembangunan Indonesia masih rendah 2. Terdapat desa/kelurahan serta layanan pendidikan dan kesehatan yang belum mendapatkan akses internet blankspot 3. Penguatan pemerintah digital (SPBE dan SDI) dan Keamanan Siber Nasional	Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan
		2	Peningkatan integritas dan kualitas SDM pelayanan		
		3	Optimalisasi penerapan SOP dan standar pelayanan publik		
		4	Penguatan Monitoring dan Evaluasi kinerja pelayanan publik		
		5	Penerapan reward and punishment pelayanan publik		
		6	Penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		
		7	Penguatan dan penataan organisasi		
		8	Optimalisasi penerapan merit sistem secara konsisten		
		9	Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara transparan dan akuntabel		
		10	Pelaksanaan satu instansi, satu inovasi (<i>One Agency One Innovation</i>)		
		11	Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi		

Sumber : diolah Bappeda 2024

4.2.6. Prioritas Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025

Sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan, maka perumusan tema pembangunan dilakukan untuk menjawab isu strategis pembangunan seiring



kondisi Kabupaten Garut dengan tema pembangunan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2025, yaitu ***“Pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat”***, yang diarahkan untuk melanjutkan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan lebih meningkatkan perluasan dan pemerataan pembangunan dan cakupan pelayanan ke seluruh wilayah di Kabupaten Garut utamanya daerah-daerah yang masih memiliki akses dan konektivitas terbatas akibat kondisi topografi termasuk memperbaiki aksesibilitas desa untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Pengembangan ekonomi Kabupaten Garut diarahkan kepada sektor-sektor unggulan pertanian, perikanan, dan kelautan, industri perdagangan hingga industri pengolahan dan pariwisata serta ekonomi kreatif. Pemerataan pembangunan ini diharapkan dapat mendukung penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran Kabupaten Garut yang masih tinggi sehingga dapat mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat.

Gambar 4.3
Tema Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025

TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN GARUT 2025



Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2025, yaitu :

- PPD 1 : Penanganan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja;
Reformasi kualitas sistem pendidikan, dan transformasi sistem
- PPD 2 : kesehatan, keluarga berencana, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta peningkatan peran aktif pemuda;
Penguatan budaya gotong royong, kehidupan beragama dan
- PPD 3 : berbudaya serta ketentraman dan ketertiban politik dan demokrasi;
Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, penguatan
- PPD 4 : cadangan dan ketahanan pangan daerah, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif mendorong peningkatan inovasi dan pendapatan daerah;
Peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah diikuti dengan
- PPD 5 : pembangunan desa dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- PPD 6 : Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan penguatan sistem perlindungan sosial;
- PPD 7 : Tata Kelola pelayanan publik yang inovatif.

Adapun berdasarkan Keterkaitan Permasalahan dan Isu Strategis maka Prioritas Pembangunan Daerah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.10
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2023	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Daerah
Upaya pengurangan jumlah penduduk miskin, pengentasan kemiskinan ekstrem , pengurangan dan perluasan kesempatan berusaha; belum optimal.	IS1. Kualitas sumberdaya manusia	PPD 1 : Penanganan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja
Perlu peningkatan kehidupan masyarakat yang agamis, demokratis dan berbudaya luhur, Belum terkendalinya kependudukan dan masih perlunya pembangunan keluarga sejahtera, Pasca pelaksanaan Pilkada Serentak .		PPD 2:Reformasi kualitas sistem pendidikan, dan transformasi sistem kesehatan, keluarga berencana, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta peningkatan peran aktif pemuda;
Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial		PPD 3 : Penguatan budaya gotong royong, kehidupan beragama dan berbudaya serta ketenteraman dan ketertiban politik dan demokrasi
Perlunya pemerataan infrastruktur antar wilayah secara merata, cakupan air minum dan sanitasi layak (mendukung pengurangan kantong kemiskinan)	IS3. Pemerataan Pembangunan infrastruktur antar wilayah didukung dengan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan	PPD 5: Peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah diikuti dengan pembangunan desa dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
Masih Rendahnya kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan tingginya resiko bencana		PPD 6: Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan penguatan sistem perlindungan sosial
Rendahnya daya beli masyarakat, nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya	IS2. Pembangunan ekonomi yang inklusif	PPD 4 : Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, penguatan cadangan dan ketahanan pangan daerah,



Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2023	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Daerah
Masih rendahnya realisasi investasi daerah (PMA dan PMDN) dan pendapatan daerah.		pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif mendorong peningkatan inovasi dan pendapatan daerah;
Perlunya reformasi birokrasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.	IS4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan.	PPD 7 : Tata Kelola pelayanan publik yang inovatif.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan rumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.11
Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 dan
Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2025	
PPP.1	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	PPD.1	Penanganan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja [PPP.1]
PPP.2	Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	PPD.2	Reformasi kualitas sistem pendidikan, transformasi sistem kesehatan, keluarga berencana, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta peningkatan peran aktif pemuda [PPP.2, PPP.3]
PPP.3	Penguatan sistem kesehatan daerah	PPD.3	Penguatan budaya gotong royong, kehidupan beragama dan berbudaya serta ketentraman dan ketertiban politik, demokrasi [PPP.2]
PPP.4	Penguatan sistem perlindungan sosial dan kesiapsiagaan penanggulangan resiko bencana	PPD.4	Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, peningkatan realisasi investasi, diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan kualitas konsumsi pangan [PPP.1]
PPP.5	Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengembangan lingkungan hidup serta gerakan membangun desa	PPD.5	Peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah diikuti dengan pembangunan desa dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan [PPP.5]
PPP.6	Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah	PPD.6	Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan penguatan sistem perlindungan sosial [PPP.4, PPP.5]



Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2025	
		PPD.7	Tata Kelola pelayanan publik yang inovatif [PPP.6]

Sumber : Hasil Pengolahan BAPPEDA

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Garut Tahun 2025 diimplementasikan melalui sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh *stakeholder* pembangunan. Strategi dan arah kebijakan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi dan arah kebijakan RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 yang diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan pada RKP Tahun 2025 serta RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab dapat dilihat pada Tabel 4.8 sampai Tabel 4.15 dengan total pagu anggaran yang mendukung program pembangunan daerah sebesar Rp. 3.200.591.396.704,-

Tabel 4.12 Keterkaitan Prioritas 1 Pembangunan Daerah dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
PPD 1 : Penanganan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	1. Jumlah penduduk miskin (Jiwa)	253,13	Peningkatan taraf hidup masyarakat	1. Penyediaan akses terhadap peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten (Persen)	52	6.008.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)*	6.67 - 7.26*		2. Perluasan kesempatan kerja dan peluang kerja sektor formal maupun informal yang berkualitas	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	11.03	2.280.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					3. Penyediaan kemudahan akses permodalan usaha dan upgrade skill usaha	Program Hubungan Industrial	Persentase Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (%)	72,27	875.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					4. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penanganan Rehabilitasi Sosial Bagi Kelompok Rentan(%)	80	9.675.000.000	Dinas Sosial
	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana (Poin)	145		5. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan memperkuat rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial,	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam Dan Sosial(%)	100	4.025.000.000	Dinas Sosial

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
					penanganan fakir miskin serta Perlindungan dan Jaminan Sosial					
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsive	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	Baik			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pelayanan pengelolaan taman makam pahlawan (%)	75,80	350.000.000	Dinas Sosial
			Total Pagu						Rp. 23.213.000.000,-	

Sumber :diolah Bappeda 2024

Keterangan : * Baseline 2025 berdasarkan SEB 73/PR.03.01/BAPP Provinsi Jawa Barat

Tabel 4.13 Keterkaitan Prioritas 2 Pembangunan Daerah dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
PPD 2:Reformasi kualitas sistem pendidikan, dan transformasi sistem kesehatan, keluarga berencana, kesetaraan gender dan pemenuhan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)*	75,04 *	Transformasi sistem kesehatan masyarakat	1. Perluasan cakupan integrasi pelayanan kesehatan primer	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Sesuai Standar (%)	94%	402.374.145.571	Dinas Kesehatan
							Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Dengan Obat, Bahan Habis Pakai Dan	96		

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
hak anak serta peningkatan peran aktif pemuda;							Vaksin Essensial (%)			
							Capaian Standar Pelayanan Minimal Siklus Hidup (%)	96%		
							Persentase Persalinan Di Fasyankes (%)	95		
							Persentase Capaian Spm Penyakit (%)			
							Persentase Akses Sanitasi Layak (%)	60%		
							Persentase Imunisasi Dasar Lengkap (%)	100		
					2. Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dengan layanan unggulan sesuai dengan kebutuhan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase TPM yang diawasi memenuhi syarat (%)	75	1.175.093.700	Dinas Kesehatan
					3. Ketersedian sektor farmasi dan alat kesehatan serta kesiapsiagaan krisis kesehatan		Persentase produk pangan yang diawasi (%)	10		
							Persentase Fasyankes yang melaksanakan Pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)	80		

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
					4. Penyusunan rencana kebutuhan SDM dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit pemerintah daerah dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	25	6.678.157.000	Dinas Kesehatan
					5. Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) aktif (%)	96	568.185.000	Dinas Kesehatan
					6. Integrasi sistem informasi kesehatan					Dinas Kesehatan
					7. Intervensi spesifik penurunan stunting					Dinas Kesehatan
					8. Intervensi sensitif penurunan stunting					Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	1. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,94	Transformasi sistem pendidikan	1. Meningkatkan aksesibilitas dan tata kelola mutu pendidikan PAUD/TK, SD dan SMP serta pendidikan kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-24Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	85%	666.614.560.364	Dinas Pendidikan

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
							Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Paud	65,76		
							Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar	96,61		
							Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama (%)	82,56		
						Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan Yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	100	1.100.000.000	Dinas Pendidikan
							Persentase Satuan Pendidikan Dasar Yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	100		

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
		2. Harapan Lama Sekolah (Tahun)*	12,29*		2. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta distribusi yang merata	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (%)	46,46	24.100.000.000	Dinas Pendidikan
						Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Rekomendasi Perizinan Satuan Pendidikan Yang Diterbitkan (%)	100	750.000.000	Dinas Pendidikan
					3. Meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase Satuan Pendidikan Yang Mengembangkan Bahasa Dan Sastra (%)	100	775.000.000	Dinas Pendidikan
						Program Pembinaan Perpustakaan	jumlah pengunjung perpustakaan (pemustaka)	42000 pemustaka	1.554.205.910	Dinas Pendidikan
						Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno (%)	22	1.250.000.000	Dinas Pendidikan
					4. Meningkatkan penyiapan pembibitan atlet yang menjadi lingkup kewenangan dunia pendidikan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Indek Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga (%)	65,23	98.445.611.612	Dinas Pemuda dan Olahraga

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
							Jumlah atlet berprestasi di tingkat provinsi dan nasional(orang)	40		Dinas Pemuda dan Olahraga
							Persentase Jumlah Desa yang Memiliki Sarana Prasarana Keolahragaan(un it)	189		Dinas Pemuda dan Olahraga
					5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan kelembagaan/a ktivitas untuk siswa/remaja/p emuda	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase SDM Kepramukaan yang telah mendapatkan pendidikan dasar kepramukaan (%)	89,00	2.911.942.476	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Terkendalinya Pertumbuhan dan Distribusi Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,17	Penyelenggaraan pengendalian penduduk	1. Peningkatan pelayanan dan cakupan kepesertaan keluarga berencana	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Akurasi Data Dan Informasi Dibanding Jumlah Kecamatan (%)	100	8.100.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					2. Optimaliasasi pemanfaatan data Keluarga	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga (%)	100	8.570.300.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (Poin)	73,82	Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak serta partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan	1. Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan serta pemberdayaan perempuan	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Lembaga Pemerintah/ Swasta/ Ormas Ramah Anak (%)	75	150.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan	Persentase Jumlah Lembaga Pemerintah/ Swasta/ Ormas Yang Responsif Gender (%)	75	963.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Indeks Pembangunan Gender (Poin)	82		2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Jumlah Lembaga Pemerintah/ Swasta/ Ormas Yang Responsif Gender (%)	100	649.479.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Lembaga Pemerintah/ Swasta/ Ormas Ramah Anak (%)	Madya (650)	1.670.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					3. Pembinaan dan pengembangan kelompok Usaha Peningkatan	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Mengenai Perlindungan Khusus Anak (%)	80	2.130.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
					Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)					dan Perlindungan Anak
					4. Pengembangan dan Perluasan Kampung KB	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Desa Yang Berkategori DRPPA (jumlah)	25	320.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					5. Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan pemuda	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase Kesertaan Ber Kb (Cu/Pus)(%)	72,18	14.255.425.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Peningkatan Layanan Kepemudaan(%)	65	11.161.519.321	Dinas Pemuda dan Olahraga
							Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif(%)	100		Dinas Pemuda dan Olahraga
Total Pagu									Rp.1.256.266.624.954,-	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2024

Keterangan : * Baseline 2025 berdasarkan SEB 73/PR.03.01/BAPP Provinsi Jawa Barat

Tabel 4.14 Keterkaitan Prioritas 3 Pembangunan Daerah dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
PPD 3 : Penguatan budaya gotong royong, kehidupan beragama dan berbudaya serta ketentraman dan ketertiban politik dan demokrasi	Meningkatnya Kesalehan Sosial	Indeks Kesalehan Sosial (Nilai)	84,89 (Baik)	Pembangunan iklim kehidupan masyarakat yang beragama, demokratis, toleran dan berbudaya	1. Penguatan organisasi/lembaga kemasyarakatan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase Koordinasi Pemerintahan (%)	96	38.684.737.402	Sekretariat Daerah
	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	68,12*	Perencanaan Penataan ruang dan pengembangan kawasan terbangun strategis	1. Perencanaan tata ruang berbasis sumber daya lingkungan berkelanjutan dan mitigasi bencana	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Jumlah status masyarakat hukum adat di kabupaten/ kota (Lokasi)	2	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
					2. Penataan Bangunan Sesuai Standar Melalui Layanan Sertifikat Laik Fungsi					
					3. Penataan Kawasan strategis Kabupaten					
					4. Pengelolaan dan pengawasan jasa konstruksi yang					

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
					sesuai standar					
	Meningkatnya pemerataan pembangunan perdesaan	Persentase Desa Mandiri dan Maju (%)	75,77	Percepatan pembangunan desa mandiri dan maju	1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa	Program Penataan Desa	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas (%)	25	900.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					2. Peningkatan dan penguatan sarana prasarana serta infrastruktur perdesaan	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase peningkatan kerjasama desa yang terjalin (%)	95	1.500.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					3. Penguatan kelembagaan desa dan tata kelola pemerintahan desa serta kerjasama antar desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel (%)	100	12.408.776.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					4. Mendorong pengembangan pariwisata desa					
				Penerapan standar pelayanan publik pada unit pelayanan publik	1. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai	Program Penetapan Tanah Ulayat	Prosentase Penetapan Tanah Ulayat Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan(%)	100	150.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
					2. Peningkatan integritas dan kualitas SDM pelayanan	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Yang Dapat Diselesaikan, Persentase Anggota Satpol Pp Dan Ppns Yang Mendapat Pelatihan, Persentase Pemberdayaan Satlinmas Dalam Rangka Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, Persentase Penanganan Penegakan Perda Dan Perkada Yang Terselesaikan(%)	90	8.745.556.700	Satuan Polisi Pamong Praja
					3. Optimalisasi penerapan SOP dan standar pelayanan publik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Yang Terasilitasi (%)	100	980.724.900	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik	1. Penguatan Monitoring dan Evaluasi kinerja pelayanan publik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui	Persentase Pemilih Yang Mengikuti Pendidikan Politik (%)	100	4.345.084.200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
						Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				
					2. Penerapan reward and punishment pelayanan publik	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	3.010.392.200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Yang Terfasilitasi (%)	100	971.547.400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial Yang Ditangani (%)	100	6.820.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Total Pagu									Rp. 78.616.818.802,-	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2024

Tabel 4.15 Keterkaitan Prioritas 4 Pembangunan Daerah dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
PPD 4 : Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, penguatan cadangan dan ketahanan pangan daerah, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif mendorong peningkatan inovasi dan pendapatan daerah;	Meningkatnya realisasi investasi	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA) (Triliun Rp.)	1,3	Peningkatan promosi dan iklim investasi daerah	1. Perluasan Penyebaran Informasi Potensi, Promosi, dan Peluang Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan investor (%)	10	775.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					2. Penyederhanaan pelayanan dan Kemudahan berusaha dan berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor yang berminat untuk Investasi (Investor)	4	700.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					3. Skema reward and punishment terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan penanaman modal/LKPM	30	785.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					4. Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing					
					5. Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal					
	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan perekonomian daerah	1. Laju pertumbuhan sektor pertanian (%)	4,29	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Komoditas Pertanian	1. Peningkatan layanan sarana dan prasarana produksi dan pascapanen	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian (unit)	5	17.912.076.000	Dinas Pertanian

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Indeks Ketersediaan Prasarana Yang Sesuai Peruntukannya (Poin)	0,103	49.432.500.000	Dinas Pertanian
		2. Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	4,71		2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan populasi ternak dalam satu tahun (%)	5	10.850.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian (Pternakan)	50	8.350.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
		3. Laju pertumbuhan sektor pariwisata (%)	11,7		3. Peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kelompok Tani Yang Melakukan Pola Usaha Agribisnis	10	6.375.000.000	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan
		4. Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan (%)	6,3		4. Pengendalian kesehatan hewan ternak dan peningkatan kualitas pangan hewani	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan Wilayah Pelayanan Kesehatan Hewan (%)	20	3.750.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
							Cakupan Wilayah Pelayanan Kesehatan Masyarakat Vetriner(%)	10		
					5. Perluasan Pasar Hasil Pertanian	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Pertanian Yang Diberikan	5	340.000.000	Dinas Pertanian

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
							(%)			
				Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil perikanan	1. Pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pasca panen perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Jumlah Prasarana Dan Sarana Perikanan Tangkap (Unit/Tahun)	25	7.700.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
							Peningkatan Sdm Perikanan Tangkap (Kelompok/Tahun)	3		
					2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pembudidaya Ikan dan Nelayan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Jumlah Prasarana Dan Sarana Perikanan Budiaya (Unit Per Tahun)	8	10.400.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
							Peningkatan Sdm Perikanan Budidaya (Kelompok/Tahun) (Kelompok/Tahun)			
					3. Perluasan Pasar Hasil Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Rasio Lokasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	25	900.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
					4. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Jumlah Sarana Dan Prasarana Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan (Unit/Tahun)	3	2.000.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
				Peningkatan kontribusi sektor pariwisata	1. Peningkatan kualitas aksesibilitas, amenitas serta	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Rincian Objek Pemajuan Kebudayaan Yang	70	1.150.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
					atraksi di destinasi pariwisata		Dilindungi, Dimanfaatkan Dan Dikembangkan (%)			
					2. Peningkatan pemasaran pariwisata	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan (Buah)	3	400.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					3. Peningkatan sumber daya manusia serta kelembagaan kepariwisataan daerah	Program Pengelolaan Permuseuman	Kepuasan Pengunjung Museum (Persentase)	100	300.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					4. Peningkatan pemanfaatan ekonomi kreatif dalam mendukung sektor pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Kepuasan Wisatawan (%)	100	3.850.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					5. Peningkatan pemanfaatan kebudayaan	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Media Yang Digunakan (%)	100	750.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Peningkatan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	1. Pengembangan Kawasan Industri	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual Yang Dilindungi (Hki)	100	1.050.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					2. Pengelolaan Sistem Informasi Industrial	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi	Kepuasan Konsumen Produk Ekonomi Kreatif (Persentase)	100	700.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
						Kreatif				
					3. Promosi Produk Industri Lokal	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Perdagangan Yang Ditingkatkan Kualitasnya (Unit)	25	104.050.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
					4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Industri					
				Peningkatan kontribusi sektor perdagangan	1. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan Yang Difasilitasi Untuk Penerbitan Izin Sesuai Dengan Ketentuan Pelaku Usaha (Pelaku Usaha)	3	320.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
					2. Pengembangan Promosi dan Kerjasama Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (%)	15	2.240.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
					3. Perlindungan dan Penggunaan Produk Dalam Daerah	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Sektor Usaha Yang Berorientasi Ekspor (Sektor usaha)	7	5.000.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
					4. Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Prosentase Pedagang Yang Dilakukan Pengawasan Barang Dan/Atau	43	500.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
							Jasa (%)			Mineral
					5. Peningkatan Kinerja Koperasi	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk Yg Dipromosikan (Jenis)	16	993.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
						Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertambahan Jumlah Industri Kecil (%)	1	13.350.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
						Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Jumlah Industri Memiliki Izin Usaha Industri (Iui) Yang Dimonitor Dan Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait (Ikm)	10	115.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
						Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Perusahaan Industri Kecil, Menengah Dan Perusahaan Kawasan Industri Di Kabupaten Yang Masuk Dalam Sii Nas(%)	0,5	100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita (Rp. 000)	9.305,82	Peningkatan Keterjangkauan Harga Komoditas Kebutuhan Pokok	1. Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Ksp/ Usp Berizin (%)	3	227.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
					2. Stabilisasi harga dan penguatan rantai pasok	Program Pengawasan Dan	Persentase Koperasi yang mematuhi	0,075	300.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
					barang pokok	Pemeriksaan Koperasi	peraturan perundang undangan (%)			dan Menengah
					3. Perlindungan terhadap hak konsumen	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Koperasi Bersertifikat Kesehatan Koperasi (%)	0,053	310.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
						Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang ditingkatkan Kompetensinya (%)	10.3 %	385.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
						Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang diberikan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (%)	2.52 %	800.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
						Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha Formal (%)	2.32 %	1.802.555.400	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
						Program Pengembangan Umkm	Persentase Usaha Mikro yang Difasilitasi Pengembangan Usaha (%)	0,0118	1.450.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Poin)	90	Peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	1. Peningkatan, pemantauan, pengendalian ketersediaan pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan energi perkapita	2520 kkal/ka p/hari	1.594.111.350	Dinas Ketahanan Pangan

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
						Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	CV Harga Beras	0,05	6.200.410.875	Dinas Ketahanan Pangan
					2. Peningkatan, pemantauan, dan pengendalian sistem logistik pangan (Silopang)	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	0,0995	518.712.550	Dinas Ketahanan Pangan
					3. Peningkatan diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	0,81	625.803.844	Dinas Ketahanan Pangan
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	75,04*	Transformasi sistem kesehatan masyarakat	4. Peningkatan pengawasan mutu keamanan pangan					
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsive	Indeks Kepuasan Masyarakat(Nilai)	Baik	Penerapan standar pelayanan publik pada unit pelayanan publik	1. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan Yang Dilakukan Melalui Mediasi(%)	60	175.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
					2. Peningkatan integritas dan kualitas SDM pelayanan	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan	Prosentase Tanah Obyek Landrefom (Tol) Yang Siap Diredistribusikan Yang Berasal Dari Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah	100	600.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
						Maksimum Dan Tanah Absentee	Absentee(%)			
					3. Optimalisasi penerapan SOP dan standar pelayanan publik					
Total Pagu									Rp. 270.126.170.019,-	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2024

Tabel 4.16 Keterkaitan Prioritas 5 Pembangunan Daerah dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
PPD 5: Peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah diikuti dengan pembangunan desa dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Ekonomi	Persentase kemantapan jalan kabupaten dan poros desa (%)	60,42	Pemerataan dan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah	1. Peningkatan pemantapan jalan dan jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Permukaan Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang	0,6042	186.600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
						Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (%)	88,91	23.849.200.000	Dinas Perhubungan
						Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Sarana Pelayaran Yang Laik Layar (%)	95,55	200.000.000	Dinas Perhubungan
		Persentase Luas Areal Daerah Irigasi Yang Terlayani Oleh	91,25		2. Pemerataan infrastruktur dasar	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya yang Terbangun(%)	94	70.900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
		Jaringan Irigasi (%)								
							Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik(%)	58		
					3. Penyediaan air baku yang andal dan berkelanjutan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jiwa yang Mendapat Akses Air Minum melalui SPAM	91,25	29.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					4. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapat Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah (%)	0,6873	12.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					5. Peningkatan pemenuhan akses terhadap sanitasi	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Perkotaan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik	55	21.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					6. Peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM					
		Persentase kawasan permukiman layak huni (%)	36,59	Penyediaan kawasan perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan	1. Penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan	Program Pengembangan Perumahan	Presentase Penanganan Rumah Koban Bencana Dan Terdampak Program Pemerintah (%)	100	5.985.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Cakupan air minum layak (%)	91,25		2. Peningkatan dan pemenuhan	Program Kawasan Permukiman	Cakupan Penurunan Luasan Permukiman	75,482	8.300.000.000	Dinas Perumahan dan

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
					infrastruktur dasar permukiman		Kumuh(Ha)			Permukiman
		Cakupan sanitasi layak (%)	69,05		3. Peningkatan kualitas lingkungan kawasan permukiman	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Yang Tertangani (unit)	500	7.500.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
					4. Pembangunan dan peningkatan kualitas RUTILAHU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Luas Kawasan Permukiman Dengan Psu Yang Representatif (Ha)	222	100.700.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
					5. Penyediaan perumahan untuk memangkas backlog (komersil dan bersubsidi)					Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	68,12*	Pengendalian pencemaran air dan udara	1. Optimalisasi fungsi pengelolaan air limbah dan limbah B3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Lingkungan Yang Dievaluasi (%)	100	1.440.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
					2. Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	68,12*	9.339.800.000	Dinas Lingkungan Hidup
					3. Penurunan beban pencemaran air					Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
					4. Pengendalian sumber emisi	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pelaporan Pengendalian B3 Dan Limbah B3 (%)	100	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Peningkatan tutupan vegetasi lahan	Optimalisasi program konservasi dan penataan ruang terbuka hijau	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Yang Dikelola (Taman, Hutan Kota) (%)	0,188	8.996.500.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Peningkatan pengelolaan sampah	1. Peningkatan pengendalian pencemaran dan pemulihan lingkungan hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Kelurahan/Desa Berbudaya Lingkungan (%)	20	225.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
					2. Pengurangan timbulan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Tingkat Pengelolaan Sampah(%)	35	77.200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
					3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Kemitraan Lingkungan (%)	50	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
					4. Revitalisasi fungsi TPA	Program Pengelolaan Persampahan				Dinas Lingkungan Hidup
				Perencanaan Penataan ruang dan pengembangan kawasan terbangun	1. Perencanaan tata ruang berbasis sumber daya lingkungan berkelanjutan	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup (%)	100	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
				strategis	dan mitigasi bencana					
					2. Penataan Bangunan Sesuai Standar Melalui Layanan Sertifikat Laik Fungsi	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Jumlah Dokumen Pembinaan Dan Pengawasan Pplh (Dokumen)	2	1.115.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
					3. Penataan Kawasan strategis Kabupaten					Dinas Lingkungan Hidup
					4. Pengelolaan dan pengawasan jasa konstruksi yang sesuai standar					Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya pemerataan pembangunan perdesaan	Persentase Desa Mandiri dan Maju (%)	75,77	Percepatan pembangunan desa mandiri dan maju	1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan (%)	1	21.200.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					2. Peningkatan dan penguatan sarana prasarana serta infrastruktur perdesaan	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Persentase Perusahaan Yang Berizin (%)	27	160.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
					3. Penguatan kelembagaan desa dan tata kelola pemerintahan desa serta kerjasama antar desa					
					4. Mendorong pengembangan pariwisata desa					
	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana (Poin)	150	Peningkatan ketangguhan daerah terhadap bencana	1. Peningkatan upaya mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Memiliki PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (%)	0,1232	10.700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					2. Pengendalian kegiatan pada kawasan rawan bencana	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Bangunan, Lingkungan dan Kawasan Strategis yang Tertata (%)	0,17	6.750.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
						Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan dan Tersertifikasi (%)	100	2.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
							Persentase Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (%)	49,35		
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Luas Wilayah yang Penggunaannya Sesuai Tata Ruang (%)	0,85	4.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Total Pagu									Rp. 611.410.500.000,-	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2024

Tabel 4.17 Keterkaitan Prioritas 6 Pembangunan Daerah dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
PPD 6: Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan penguatan sistem perlindungan sosial	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana (Poin)	150	Peningkatan ketangguhan daerah terhadap bencana	1. Peningkatan upaya mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Prosentase Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana (%)	100	8.128.940.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					2. Pengendalian kegiatan pada kawasan rawan bencana	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Fasiliatsi Penaggulangan Bencana (%)	10	500.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
						Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan Wilayah Pengendalian Dan Penangulangan Bencana (Wilayah)	5	1.068.000.000	Dinas Pertanian
	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	1. Jumlah penduduk miskin (Jiwa)	253,13	Peningkatan taraf hidup masyarakat	1. Penyediaan akses terhadap peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Ppks Yang Mendapatkan Pelatihan (%)	80	3.788.000.000	Dinas Sosial
		2. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)*	6.67 - 7.26*			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak	Persentase Tertangani Warga Negara Migran Korban Tindakan Kekerasan (%)	70	155.000.000	Dinas Sosial

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
						Kekerasan				
						Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Kelompok Rentan Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial (%)	80	2.750.000.000	Dinas Sosial
Total Pagu									Rp. 16.389.940.000,-	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2024

Keterangan : * Baseline 2025 berdasarkan SEB 73/PR.03.01/BAPP Provinsi Jawa Barat

Tabel 4.18 Keterkaitan Prioritas 7 Pembangunan Daerah dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
PPD 7 : Tata Kelola pelayanan publik yang inovatif.	Meningkatnya Kesalehan Sosial	Indeks Kesalehan Sosial (Nilai)	84,89 (Baik)	Pembangunan iklim kehidupan masyarakat yang beragama, demokratis, toleran dan berbudaya	1. Penguatan organisasi/lembaga kemasyarakatan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian Dan Pengembangan Daerah Yang Berkontribusi Pada Meningkatnya Kualitas Penelitian Dan Pengembangan Daerah (%)	100	1.942.306.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	84,00 (Baik)	Penerapan standar pelayanan publik pada unit pelayanan publik	1. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, Dan Evakuasi Korban Kebakaran Dan Non Kebakaran (%)	33	8.741.625.578	Dinas Pemadam Kebakaran
						Program Pengelolaan Arsip	Jumlah Arsip Dinamis, Ar(sip Statis dan Simpul JIKN Kabupaten/Kota yang dikelola(Arsip)	84	883.276.345	Dinas Perpustakaan dan Arsip
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100	9.498.562.584	Kewilayahan
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100	29.310.253.093	Kewilayahan
						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100	5.667.499.430	Kewilayahan
						Program Penyelenggaraan Urusan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang	100	6.218.265.878	Kewilayahan

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
						Pemerintahan Umum	dilimpahkan Kepada Camat			
						Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	100	2.608.560.129	Kewilayahan
		2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Nilai)	73,2 (B)		2. Peningkatan integritas dan kualitas SDM pelayanan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100	752.986.000.000	BPKAD
						Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penyelenggaraan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (%)	10	5.185.000.000	BPKAD
						Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung SKM (%)	100	11.736.860.900	Badan Pendapatan Daerah
		3. Nilai Evaluasi SAKIP (Nilai)	75 (BB)		3. Optimalisasi penerapan SOP dan standar pelayanan publik	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan (%)	20	285.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		4. Nilai Evaluasi LPPD (Nilai)	Tinggi (3,1)	Penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik	1. Penguatan Monitoring dan Evaluasi kinerja pelayanan publik	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase pengendalian perkembangan usaha BUMD (%)	98	4.165.101.280	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut
						Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai)	88,55	50.088.619.500	Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
						Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Berkontribusi Pada Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. (%)	62,7	3.093.227.040	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Berkontribusi Pada Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah(%)	49,6	3.553.245.520	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Kapabilitas Apip Elemen Peran Dan Layanan (Poin)	1,1	14.331.936.750	Inspektorat Daerah
						Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Nilai Kapabilitas Apip Pada Elemen Praktik Profesional (Level)	0,45	3.000.455.675	Inspektorat Daerah
		5. Indeks SPBE (Nilai)	3,35		2. Penerapan reward and punishment pelayanan publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Publik Yang Didesiminasikan Kepada Masyarakat (%)	90	4.640.275.000	Dinas Komunikasi dan informatika
						Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat Kematangan Indeks Spbe Pemkab Garut (Poin)	1,35	4.277.000.000	Dinas Komunikasi dan informatika
						Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (Poin)	3	455.051.600	Dinas Komunikasi dan informatika
						Program Penyelenggaraan Persandian Untuk	Indeks keamanan Informasi (INDEKS KAMI) (Angka)	400	1.500.000.000	Dinas Komunikasi dan informatika

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
						Pengamanan Informasi				
		6. Indeks Sistem merit (Nilai)	329 (Sangat Baik)	Pemantapan Penerapan Reformasi birokrasi	1. Penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penerapan Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit (%)	100	4.941.640.400	Badan Kepegawaian dan Diklat
		7. Indeks Kualitas Kebijakan Daerah (Nilai)	73,2 (Baik)		2. Penguatan dan penataan organisasi	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi	70	2.673.352.323	Badan Kepegawaian dan Diklat
		8. Indeks Inovasi Daerah (Nilai)	40,15 (Inovatif)		3. Optimalisasi penerapan merit sistem secara konsisten					
					4. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara transparan dan akuntabel					
				Peningkatan inovasi daerah dalam rangka pelayanan publik dan pembangunan daerah	1. Pelaksanaan satu instansi, satu inovasi (<i>One Agency One Innovation</i>)					
					2. Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi					
	Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,17	Penyelenggaraan pengendalian penduduk	1. Peningkatan pelayanan dan cakupan kepesertaan keluarga berencana	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk(%)	99,4	5.997.154.060	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
					2. Optimalisasi pemanfaatan data Keluarga	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (%)	98	633.575.344	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Data Yang Dimanfaatkan (%)	100	3.755.648.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Persentase Dokumen Kependudukan Yang Dihasilkan Sesuai Dengan Kewajiban (%)	100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Kualitas Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	100	384.650.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya realisasi investasi	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA) (Triliun Rp.)	1,3	Peningkatan promosi dan iklim investasi daerah	1. Perluasan Penyebaran Informasi Potensi, Promosi, dan Peluang Investasi	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Tingkat Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	1	875.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					2. Penyederhanaan pelayanan dan Kemudahan berusaha dan berinvestasi					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					3. Skema reward and punishment terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					4. Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
					5. Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1	489.200.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Total Pagu									Rp. 943.918.342.929,-	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2024

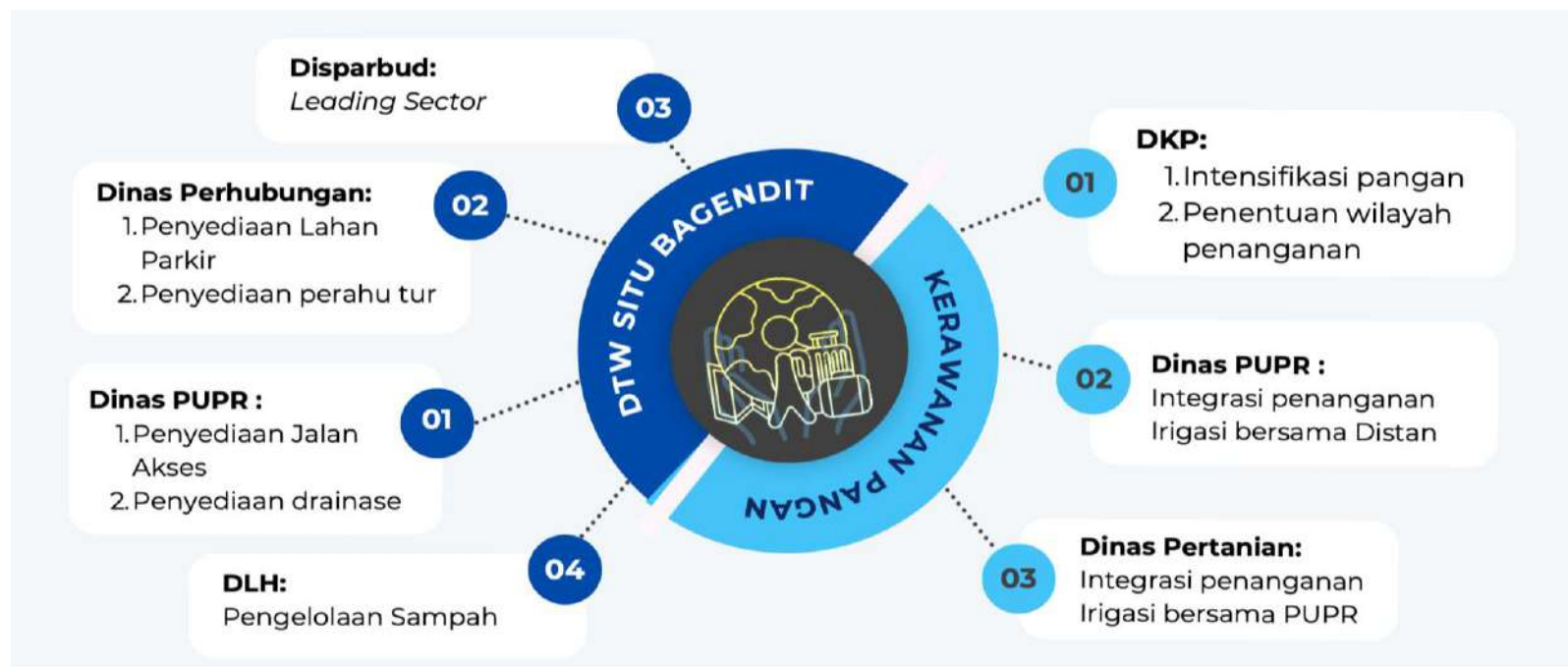
Keterangan : * Baseline 2025 berdasarkan SEB 73/PR.03.01/BAPP Provinsi Jawa Barat

4.2.6.1. Cross Cutting Penanganan Kemiskinan Tahun 2025

Penanganan kemiskinan di Kabupaten Garut dilaksanakan melalui tiga intervensi kemiskinan yakni meliputi 1) pengurangan beban pengeluaran; 2) peningkatan pendapatan masyarakat, 3) penurunan jumlah kantong kemiskinan. Uraian crosscutting penanganan kemiskinan diuraikan sebagai berikut:

Kebijakan peningkatan pendapatan melalui stimulasi sektor unggulan difokuskan kepada pengembangan DTW Situ Bagendit dan Penanganan Kerawanan pangan, yang digambarkan pada crosscutting sebagai berikut:

Gambar 4.4 Peningkatan Pendapatan melalui Stimulasi Sektor Unggulan



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2024

Kebijakan penanganan kemiskinan dari segi infrastruktur diantaranya diwujudkan melalui kebijakan penataan perkotaan dan pengembangan wilayah dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 4.5 Kebijakan Penataan Perkotaan dan Pengembangan Wilayah

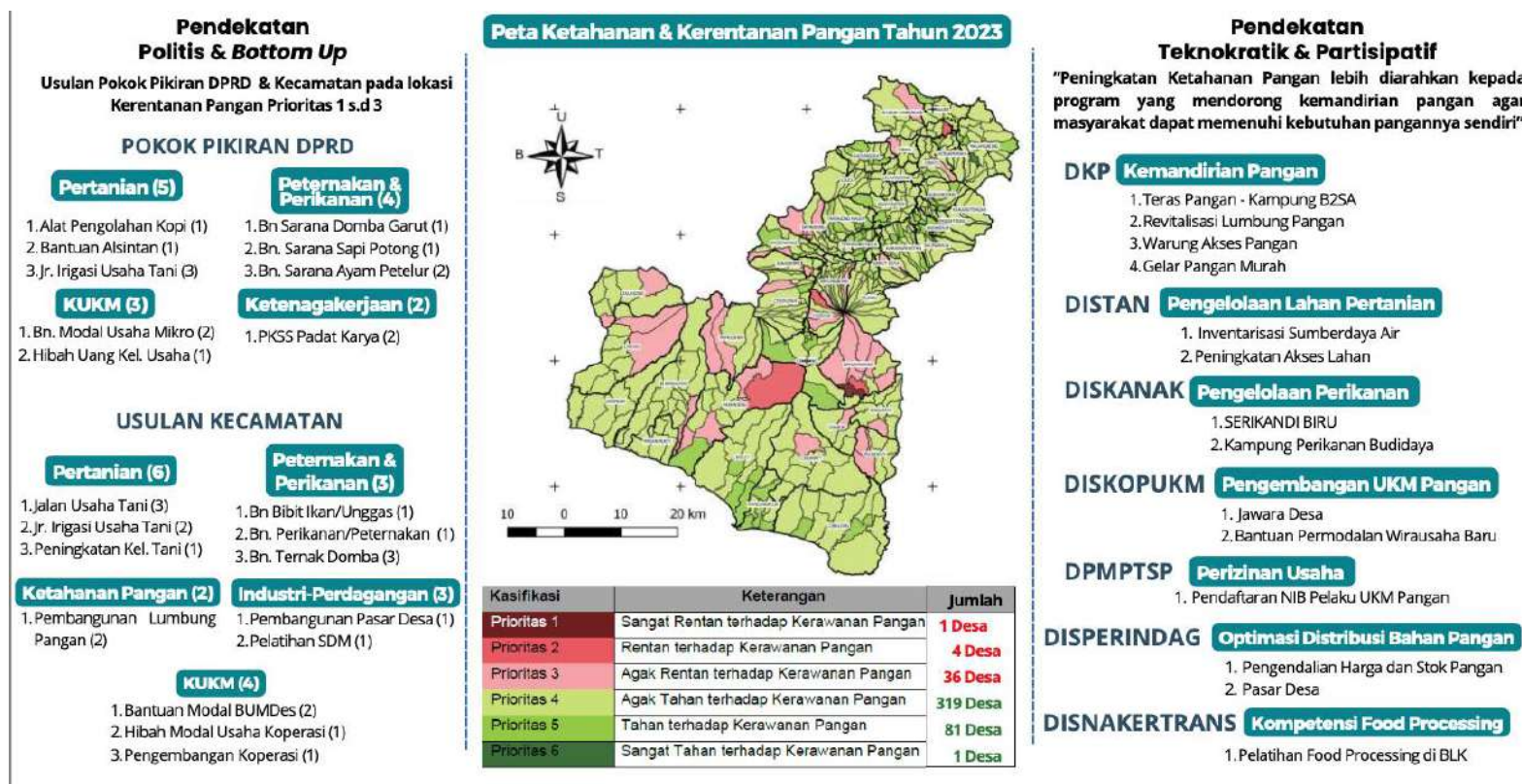


Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2024



Kebijakan terkait pengurangan beban pengeluaran masyarakat dilaksanakan pula melalui peningkatan ketahanan pangan, peningkatan realisasi investasi, pengembangan situ bagendit serta penataan pasar ciawi, yang diuraikan sebagai berikut.

Gambar 4.6. Fokus Peningkatan Ketahanan Pangan Tahun 2025

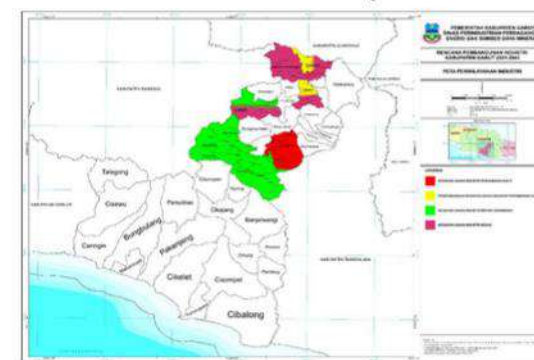


Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2024

Gambar 4.7. Fokus Peningkatan Realisasi Investasi



Kawasan Industri Kabupaten Garut



RPIK menetapkan perencanaan pembangunan industri kabupaten di 4 lokasi (**Leles, Cibatu, BL Limbangan, Selaawi**) dan kepada 4 Industri Unggulan di Kab. Garut yakni : Ind. Kulit, Alas Kaki, Tekstil dan Aneka, Ind. Pangan, Ind. Kopi, Ind. Hulu Agro Oleokimia-Minyak Atsiri

Rasio Jumlah Hotel & Restoran dan Akomodasi & Penginapan Kab. Garut Tahun 2022



Sebaran Hotel & Restoran serta Akomodasi dan Penginapan masih terpusat di 6 Kecamatan yang berada di Perkotaan Garut

Arah Pengembangan Investasi Sektor Tersier dapat diarahkan pada wilayah non Perkotaan Garut, terutama Wilayah Selatan termasuk didalamnya investasi dalam Destinasi Wisata

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2024

Gambar 4.8. Fokus Pengembangan Situ Bagendit



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2024

Gambar 4.9. Penataan Pasar Ciawitali



Pendekatan Teknokratik & Partisipatif

Pasar Ciawitali sebagai salah satu Pasar Induk Terbesar dan Tertua di Kabupaten Garut berada dalam kondisi yang tidak representatif, sehingga membutuhkan pengembangan, penataan dan pembinaan Pasar Rakyat sesuai amanat Perda Garut Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

DISPERINDAG

Penataan Pedagang

1. Penertiban Pedagang Pasar
2. Pendataan Kios tidak Fungsi
3. Penataan Tematik Pedagang
4. Pedagang Tertib Ukur

DISKANAK

Pemanfaatan Sampah

1. Pemanfaatan Sampah Pasar untuk Maggot

DISTAN

Pemanfaatan Sampah Pasar

1. Pemanfaatan Sampah Pasar untuk Pupuk Cair

DPMPSTP

Perizinan Usaha

1. Pendaftaran NIB Pedagang

DKP

Kemanan dan Keterjangkauan Pangan

- Uji Keamanan Pangan
1. Distribusi Pasokan
 2. Operasi Pasar

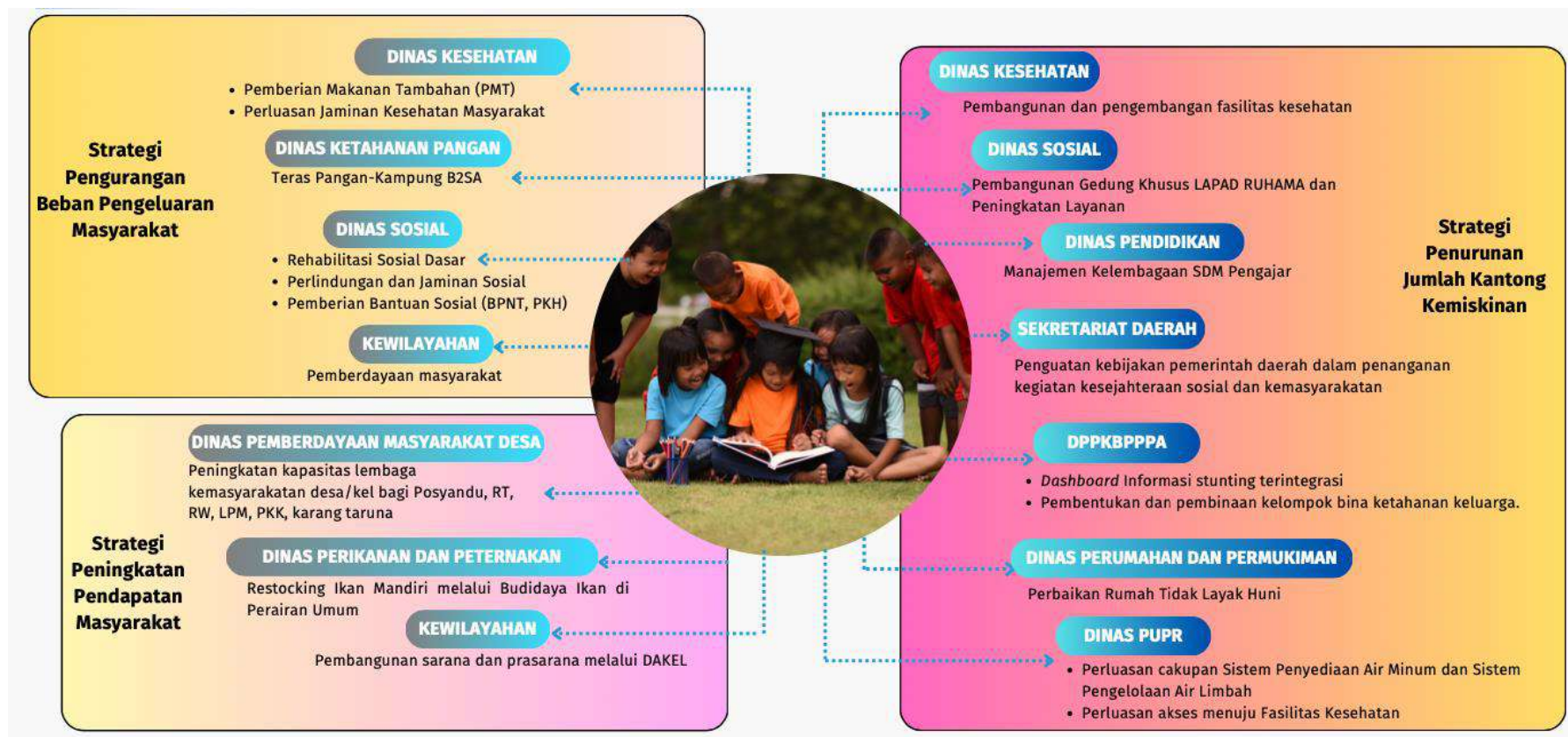
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2024



4.2.6.2. Cross Cutting Penanganan Stunting Tahun 2025

Pada tahun 2022 Kabupaten Garut berhasil menurunkan angka prevalensi *stunting* menjadi 23,6% yang merupakan penurunan tertinggi kedua di Jawa Barat berdasarkan data yang dirilis oleh SSGI Kementerian Kesehatan, pada tahun 2023 angka prevalensi stunting berdasarkan SKI mencapai 24,1 % mengalami kenaikan 0,5%. Sebagai langkah penanganan dan penurunan angka prevalensi stunting Kabupaten Garut, berikut merupakan crosscutting strategi percepatan penurunan *stunting* yang berkaitan dan beririsan dengan strategi penurunan kemiskinan.

Gambar 4.10 Strategi Percepatan Penurunan Stunting



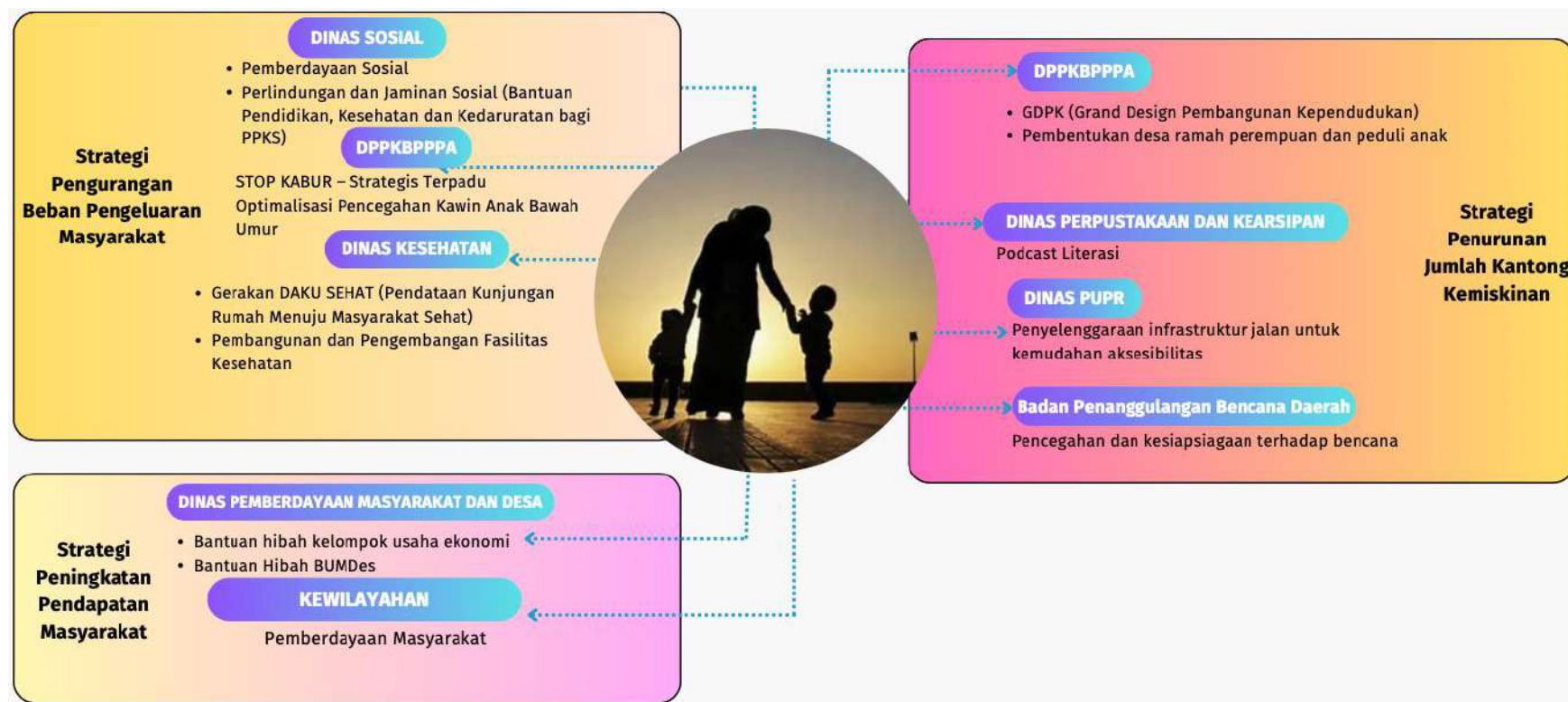
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2024

Selain strategi penurunan stunting, permasalahan AKI dan AKB di Kabupaten Garut yang masih tinggi menjadikan fokus perencanaan pada tahun 2025, hal ini juga dilaksanakan dengan mengintervensi ketiga strategi penanganan kemiskinan. Kabupaten Garut menjadi salah satu dari 5 Kabupaten yang terpilih menjadi sampel dalam Program Kerja Sama RI-UNFPA Siklus 10 (2021-2025) advokasi Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi (PPT-



KESPRO). Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA diamanatkan untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs) menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta prevalensi stunting sejalan dengan sasaran pembangunan nasional. uraian strategi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4. 11 Strategi Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2024



4.2.6.3. *Cross Cutting* Pengendalian Inflasi

Dalam melaksanakan kebijakan penanganan kebijakan inflasi di Kabupaten Garut dilaksanakan pengendalian inflasi melalui pengendalian bahan makanan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan olahraga, transportasi dan komunikasi serta rekreasi dan budaya, yang dimaksudkan untuk dapat mendorong ketahanan pangan serta percepatan penggunaan produk dalam negeri. Pengendalian harga barang pokok penting di Kabupaten Garut saat ini dilakukan dengan mempedomani Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah yang telah disusun melalui Keputusan Bupati Garut Nomor 580/KEP.24-PEREKO/2022 tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024. Peta Jalan Pengendalian Inflasi Kabupaten Garut mengadopsi strategi pengendalian inflasi yang digunakan oleh Bank Indonesia yaitu strategi 4K: Keterjangkauan Harga; Ketersediaan Pasokan; Kelancaran Distribusi; dan Komunikasi Efektif. Strategi ini dilakukan melalui kolaborasi berbagai unsur pemerintah seperti DisperindagESDM, DKP, Bagian Kerjasama, Tim Koordinasi Pembinaan & Pengawasan Pendistribusian LPG, Disdik, DiskopUKM, Dinsos, Diskanak, Distan, Bagian Perekonomian yang pencapaian kinerjanya dilaporkan kepada Bupati Garut melalui Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Di tahun 2025 dan seterusnya, perlu dilakukan penyusunan Peta Jalan baru yang disesuaikan dengan visi misi kepala daerah terpilih dari hasil Pemilu Kepala Daerah Tahun 2024 yang tetap mengintervensi di strategi 4K pengendalian inflasi. Adapun *Cross Cutting* Pengendalian Inflasi dapat dilihat pada gambarr berikut.



Gambar 4.13 Cross Cutting Pengendalian Inflasi



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2024



Dalam rangka mewujudkan keselarasan kebijakan pembangunan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten, maka rumusan prioritas pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan sinergitas dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, dan prioritas pembangunan dalam RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 . Keterkaitan penetapan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025, dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2025 dan prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat Tahun 2025, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.19

Sinergitas Prioritas Pembangunan Tahun 2025 Antara Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Garut

Prioritas Nasional RKP 2025		Prioritas Pembangunan RKPD Jawa Barat 2025		Prioritas Pembangunan Daerah RKPD 2025		Prioritas Nasional dan Provinsi yang Terkait
PN1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	PPP1	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	PPD1	Penanganan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	Prioritas Nasional: PN2, PN3, PN4, PN6
						Prioritas Provinsi : PPP1
PN2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PPP2	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama	PPD2	Reformasi kualitas sistem pendidikan, dan transformasi sistem kesehatan, keluarga berencana, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta peningkatan peran aktif pemuda;	Prioritas Nasional : PN4
						Prioritas Provinsi : PPP2, PPP3
PN3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan,	PPP3	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	PPD3	Penguatan budaya gotong royong, kehidupan beragama dan berbudaya serta ketentraman dan ketertiban politik dan demokrasi	Prioritas Nasional : PN1, PN7, PN8
						Prioritas Provinsi : PPP2, PPP4



Prioritas Nasional RKP 2025		Prioritas Pembangunan RKPD Jawa Barat 2025		Prioritas Pembangunan Daerah RKPD 2025		Prioritas Nasional dan Provinsi yang Terkait
	Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi					
PN4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	PPP4	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	PPD4	Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, penguatan cadangan dan ketahanan pangan daerah, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif mendorong peningkatan inovasi dan pendapatan daerah;	Prioritas Nasional :
						PN2, PN3, PN5, PN6
						Prioritas Provinsi : PPP1, PPP5
PN5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PPP5	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	PPD5	Peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah diikuti dengan pembangunan desa dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Prioritas Nasional :
						PN3
						Prioritas Provinsi : PPP5
PN6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PPP6	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	PPD6	Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan penguatan sistem perlindungan sosial	Prioritas Nasional :
						PN6, PN7, PN8
						Prioritas Provinsi : PPP1, PPP6
PN7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta			PPD7	Tata Kelola pelayanan publik yang inovatif.	Prioritas Nasional :
						PN1, PN7, PN8
						Prioritas Provinsi :



Prioritas Nasional RKP 2025		Prioritas Pembangunan RKPD Jawa Barat 2025		Prioritas Pembangunan Daerah RKPD 2025		Prioritas Nasional dan Provinsi yang Terkait
	Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan					PPP2
PN8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur					

Sumber : RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026, Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat 2025 dan Rancangan RKP Tahun 2025 diolah Bappeda 2024

Tabel 4.20 Prioritas , Sasaran Prioritas dan Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Prioritas Pembangunan	Sasaran Prioritas	Indikator	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025
PPD 1. Penanganan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	S1.4. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Jumlah penduduk miskin (Jiwa)	260,48	190,67-193,67	253,13
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,33	6,41-6,61	6.67 - 7.26*
PPD 2. Reformasi kualitas sistem pendidikan, dan transformasi sistem kesehatan, keluarga berencana, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta peningkatan peran aktif pemuda	S2.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	72,07	72,03 - 72,1	75,04*
	S2.2. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,84	8,43 - 8,93	7,94
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,16	12,13 12,21	12,29*



Prioritas Pembangunan	Sasaran Prioritas	Indikator	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025
	S2.4. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,84	1,1	1,17
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Poin)	72,08		73,82
		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Poin)	83,37		82
PPD3 . Penguatan budaya gotong royong, kehidupan beragama dan berbudaya serta ketentraman dan ketertiban politik dan demokrasi	S.1.1. Meningkatnya Kesalehan Sosial	Indeks kesalehan sosial masyarakat (Nilai)	84,49 (Baik)	Baik	84,89 (Baik)
PPD 4. Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, penguatan cadangan dan ketahanan pangan daerah, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif mendorong peningkatan inovasi dan pendapatan daerah;	S4.2. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan perekonomian daerah	1. Laju pertumbuhan sektor pertanian (%)	1,6		4,31
		2. Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	4,81		4,85
		3. Laju pertumbuhan sektor pariwisata (%)	10,37		12,5
		4. Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan (%)	8,05		6,3
	S4.3. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	5. Pengeluaran per kapita (Rp. 000)	8.685	9.462,50-9.662,50	9.305,82
	S4.4. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	6. Skor Pola Pangan Harapan (Poin)	91,7	82	90
	S4.1 Meningkatnya realisasi investasi	7. Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA) (Triliun Rp.)	1,356	1,52 - 1,53	1,71
PPD 5. Peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah diikuti dengan pembangunan desa dan peningkatan kualitas lingkungan	S5.3 Meningkatnya pemerataan pembangunan perdesaan	Persentase Desa Mandiri dan Maju(%)	68,65		75,77



Prioritas Pembangunan	Sasaran Prioritas	Indikator	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025
hidup yang berkelanjutan	S5.1. Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Ekonomi	Persentase kemandirian jalan kabupaten dan poros desa (%)	55,25	57,92	60,42
		Persentase Luas Areal Daerah Irigasi Yang Terlayani Oleh Jaringan Irigasi (%)	83,43	88,04	91,25
		Persentase kawasan permukiman layak huni (%)	35,66	36,02	36,59
		Cakupan air minum layak (%)	90,04	90,74	91,25
		Cakupan sanitasi layak (%)	68,11	68,53	69,05
	S5.2 Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	66,89	62,31	68,12*
PPD 6. Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan penguatan sistem perlindungan sosial	S6.1. Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana (Poin)	147,39	194	145
PPD 7. Tata Kelola pelayanan publik yang inovatif.	S7. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	Baik (83,81)	Baik	84(Baik)
		2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Nilai)	n/a	A	86,38 (A)
		3. Nilai Evaluasi SAKIP (Nilai)	74,91(BB)	A	80,05(A)
		4. Nilai Evaluasi LPPD (Nilai)	Tinggi (3,4962)	Tinggi	Tinggi (3,4966)
		5. Indeks SPBE (Nilai)	3,29	3,87	3,35
		6. Indeks Sistem merit (Nilai)	328,5 (Sangat Baik)	328 (Sangat Baik)	329(Sangat Baik)
		7. Indeks Kualitas Kebijakan Daerah (Nilai)	68,76 (Baik)		73,2 (Baik)
		8. Indeks Inovasi Daerah (Nilai)	42,96 (Inovatif)		60,01 (Sangat Inovatif)



Keterkaitan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut RKPD Tahun 2025 dengan sasaran pembangunan pembangunan nasional RKP Tahun 2025 dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.21 Keterkaitan antara Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Garut RKPD 2025 dengan Indikator Sasaran Nasional RKP 2025 dan Indikator Sasaran Provinsi Jawa Barat

Prioritas Nasional RKP 2025/ Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional RKP 2025	Prioritas Provinsi Jawa Barat 2025/ Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat RKPD 2025	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat RKPD 2025	Prioritas Daerah Kabupaten Garut dalam RKPD 2025/Sasaran Prioritas Daerah Kabupaten Garut dalam RKPD 2025	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Kabupaten Garut dalam RKPD 2025
PN 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia		PPP6. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah		PPD 1. Penanganan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	
S1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Indeks Demokrasi Indonesia (Nilai)	S17. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	S.1.1. Meningkatnya Kesalehan Sosial	Indeks Kesalihan Sosial
PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru		PPP1. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya		PPD 1. Penanganan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	
		PPP5. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa		PPD 4. Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, penguatan cadangan dan ketahanan pangan daerah, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif mendorong peningkatan inovasi dan pendapatan daerah;	
		PPP6. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah		PPD 5. Peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah diikuti dengan pembangunan desa dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	



Prioritas Nasional RKP 2025/ Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional RKP 2025	Prioritas Provinsi Jawa Barat 2025/ Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat RKP 2025	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat RKP 2025	Prioritas Daerah Kabupaten Garut dalam RKP 2025/ Sasaran Prioritas Daerah Kabupaten Garut dalam RKP 2025	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Kabupaten Garut dalam RKP 2025
				PPD 7. Tata Kelola pelayanan publik yang inovatif.	
S2. Pemantapan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Asia Power Index (Military Capability)	S17. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	S.1.1. Meningkatnya Kesalehan Sosial	Indeks Kesalihan Sosial
	2. Asia Power Index (Diplomatic Influence)a)	S17. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	S4.2. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan perekonomian daerah	1. Laju pertumbuhan sektor pertanian (%) 2. Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%) 3. Laju pertumbuhan sektor pariwisata (%) 4. Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan (%)
	3. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	S17. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	S.1.1. Meningkatnya Kesalehan Sosial	Indeks Kesalihan Sosial
	3. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	S2. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (Poin)	S4.4. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	6. Skor Pola Pangan Harapan (Poin)
	4. Indeks Ketahanan Energi	S11. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	S5.2. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)



Prioritas Nasional RKP 2025/ Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional RKP 2025	Prioritas Provinsi Jawa Barat 2025/ Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat RKPD 2025	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat RKPD 2025	Prioritas Daerah Kabupaten Garut dalam RKPD 2025/Sasaran Prioritas Daerah Kabupaten Garut dalam RKPD 2025	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Kabupaten Garut dalam RKPD 2025
	5. Kapasitas tampungan air (m3/kapita)	S11.Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	S5.1. Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Ekonomi	Persentase Luas Areal Daerah Irigasi Yang Terlayani Oleh Jaringan Irigasi (%)
	6. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	S14. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak (%)	S5.1. Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Ekonomi	Persentase kawasan permukiman layak huni (%)
	7. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	S14. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak (%)	S5.1. Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Ekonomi	Cakupan air minum layak (%)
				S5.1. Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Ekonomi	Cakupan sanitasi layak (%)
	8. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	S4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	S7.Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif	Indeks SPBE (Poin)
	9. Indeks Ekonomi Hijau	S2. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin)	S5.2 Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)
	10. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	S11.Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	S5.2 Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)
	11. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	S15. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	S5.2 Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)



Prioritas Nasional RKP 2025/ Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional RKP 2025	Prioritas Provinsi Jawa Barat 2025/ Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat RKP 2025	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat RKP 2025	Prioritas Daerah Kabupaten Garut dalam RKP 2025/ Sasaran Prioritas Daerah Kabupaten Garut dalam RKP 2025	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Kabupaten Garut dalam RKP 2025
	11. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	S15. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	S5.2 Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)
	12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	S15. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	S5.2 Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)
	13. Persentase Penurunan Emisi GRK - Tahunan (%) - Kumulatif (%)	S11. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	S5.2 Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)
PN3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi		PPP1. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya		PPD 4. Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, penguatan cadangan dan ketahanan pangan daerah, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif mendorong peningkatan inovasi dan pendapatan daerah;	
S3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi	1. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	S4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit (%)	S4.2. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan perekonomian daerah	1. Laju pertumbuhan sektor pertanian (%)
	2. Rasio Kewirausahaan (%)	S10. Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Pengeluaran Per Kapita (Rp 000)	S4.2. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan perekonomian daerah	2. Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)
	3. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	S4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit (%)	S4.2. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan perekonomian daerah	3. Laju pertumbuhan sektor pariwisata (%)



Prioritas Nasional RKP 2025/ Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional RKP 2025	Prioritas Provinsi Jawa Barat 2025/ Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat RKPD 2025	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat RKPD 2025	Prioritas Daerah Kabupaten Garut dalam RKPD 2025/Sasaran Prioritas Daerah Kabupaten Garut dalam RKPD 2025	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Kabupaten Garut dalam RKPD 2025
Melalui Peran Aktif Koperasi	4. Rasio PDB Pariwisata (%)	S3. Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	S4.2. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan perekonomian daerah	4. Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan (%)
	5. Devisa Pariwisata (miliar USD)	S3. Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	S4.3. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita (Rp. 000)
	6. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	S3. Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	S4.4. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Poin)
	7. Aset Perbankan/PDB (%)			S4.1 Meningkatnya realisasi investasi	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA) (Triliun Rp.)
	8. Aset Dana Pensiun/PDB (%)				
	9. Aset Asuransi/PDB (%)				
	10. Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)				
	11. Total Kredit/PDB (%)				
	12. Inklusi Keuangan (%)				
PN4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas		PPP2. Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama PPP3. Penguatan Sistem Kesehatan Daerah PPP4. Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana		PPD 2. Reformasi kualitas sistem pendidikan, dan transformasi sistem kesehatan, keluarga berencana, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta peningkatan peran aktif pemuda; PPD 1. Penanganan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	



Prioritas Nasional RKP 2025/ Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional RKP 2025	Prioritas Provinsi Jawa Barat 2025/ Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat RKP 2025	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat RKP 2025	Prioritas Daerah Kabupaten Garut dalam RKP 2025/ Sasaran Prioritas Daerah Kabupaten Garut dalam RKP 2025	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Kabupaten Garut dalam RKP 2025
S4. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	1. Hasil Pembelajaran: a. Rata-rata nilai PISA i. Membaca ii. Matematika iii. Sains	S5. Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	S2.2. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	1. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
	b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	S5. Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	S2.2. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	1. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
	c. Harapan lama sekolah (tahun)	S5. Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	S2.2. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	2. Harapan Lama Sekolah (Tahun)
	2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	S5. Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	S2.2. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	2. Harapan Lama Sekolah (Tahun)
	3. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	S4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	S1.4. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	2. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
	4. Tingkat Penguasaan Iptek: a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) b. Peringkat Indeks Inovasi Global	S18. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Poin)	S7. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif	Indeks Inovasi Daerah (Nilai)
	5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	S4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	S1.4. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	2. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
	6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	S6. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	S2.4. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (Poin) Indeks Pembangunan



Prioritas Nasional RKP 2025/ Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional RKP 2025	Prioritas Provinsi Jawa Barat 2025/ Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat RKPD 2025	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat RKPD 2025	Prioritas Daerah Kabupaten Garut dalam RKPD 2025/Sasaran Prioritas Daerah Kabupaten Garut dalam RKPD 2025	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Kabupaten Garut dalam RKPD 2025
					Gender (Poin)
	7. Usia Harapan Hidup (tahun)	S8. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	S2.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)
	8. Kesehatan Ibu dan Anak a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	S9. Meningkatnya upaya percepatan penurunan stunting	Prevalensi Stunting (%)	S2.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)
	9. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	S8. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	S2.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)
	10. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	S8. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	S2.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)
	11. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	S6. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (Poin)	S2.4. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (Poin) Indeks Pembangunan Gender (Poin)



Prioritas Nasional RKP 2025/ Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional RKP 2025	Prioritas Provinsi Jawa Barat 2025/ Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat RKP 2025	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat RKP 2025	Prioritas Daerah Kabupaten Garut dalam RKP 2025/ Sasaran Prioritas Daerah Kabupaten Garut dalam RKP 2025	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Kabupaten Garut dalam RKP 2025
	12. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	S6. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda	Indeks Ketimpangan Gender (Poin)	S2.4. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (Poin) Indeks Pembangunan Gender (Poin)
PN5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		PPP1. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya		PPD 4. Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, penguatan cadangan dan ketahanan pangan daerah, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif mendorong peningkatan inovasi dan pendapatan daerah;	
S5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	S1. Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Industri (%)	S4.2. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan perekonomian daerah	1. Laju pertumbuhan sektor pertanian (%)
			Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	S4.2. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan perekonomian daerah	2. Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)
	2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	S4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (Triliun Rupiah)	S4.2. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan perekonomian daerah	3. Laju pertumbuhan sektor pariwisata (%)
	3. Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	S12. Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur	Tingkat Konektivitas (%)	S4.2. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan perekonomian daerah	4. Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan (%)
	4. Biaya Logistik (% PDB)	S12. Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur	Tingkat Konektivitas (%)	S4.1 Meningkatnya realisasi investasi	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA) (Triliun Rp.)



Prioritas Nasional RKP 2025/ Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional RKP 2025	Prioritas Provinsi Jawa Barat 2025/ Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat RKPD 2025	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat RKPD 2025	Prioritas Daerah Kabupaten Garut dalam RKPD 2025/ Sasaran Prioritas Daerah Kabupaten Garut dalam RKPD 2025	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Kabupaten Garut dalam RKPD 2025
PN6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan		PPP5. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa		PPD 6. Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan penguatan sistem perlindungan sosial PPD 5. Peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah diikuti dengan pembangunan desa dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PPD 7. Tata Kelola pelayanan publik yang inovatif.	
S6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)	S7. Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	S1. Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana (Poin)
	2. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	S7. Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	S7. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)
	3. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	S4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	S1.4. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	2. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
	4. Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)	S13. Meningkatnya kualitas infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur (Poin)	S5.3 Meningkatnya pemerataan pembangunan perdesaan	Persentase Desa Mandiri dan Maju (%)
	5. Persentase desa mandiri (%)	S16. Meningkatnya pemerataan pembangunan di wilayah Pedesaan	Indeks Desa Membangun (Poin)	S7. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)



Prioritas Nasional RKP 2025/ Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional RKP 2025	Prioritas Provinsi Jawa Barat 2025/ Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat RKPD 2025	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat RKPD 2025	Prioritas Daerah Kabupaten Garut dalam RKPD 2025/ Sasaran Prioritas Daerah Kabupaten Garut dalam RKPD 2025	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Kabupaten Garut dalam RKPD 2025
	6. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	S14. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak (%)	S5.1. Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Ekonomi	Persentase kawasan permukiman layak huni (%)
PN7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		PPP6. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah		PPD 7. Tata Kelola pelayanan publik yang inovatif.	
S7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	1. Return on Asset (ROA) BUMN (%)	Tidak relevan dengan Provinsi Jawa Barat	Tidak relevan dengan Provinsi Jawa Barat	Tidak relevan dengan Kabupaten Garut	Tidak relevan dengan Kabupaten Garut
	2. Indeks Integritas Nasional	S17. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	S7. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)
	3. Indeks Materi Hukum	S17. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat		2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Nilai)
	4. Indeks Pelayanan Publik	S18. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Poin)		3. Nilai Evaluasi SAKIP (Nilai)
	5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	S18. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Poin)		4. Nilai Evaluasi LPPD (Nilai)
	6. Indeks Persepsi Korupsi	S17. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat		5. Indeks SPBE (Nilai)



Prioritas Nasional RKP 2025/ Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional RKP 2025	Prioritas Provinsi Jawa Barat 2025/ Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat RKPD 2025	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat RKPD 2025	Prioritas Daerah Kabupaten Garut dalam RKPD 2025/Sasaran Prioritas Daerah Kabupaten Garut dalam RKPD 2025	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Kabupaten Garut dalam RKPD 2025
	7. Indeks Pembangunan Hukum	S17. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat		6. Indeks Sistem merit (Nilai)
	8. Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)				7. Indeks Kualitas Kebijakan Daerah (Nilai)
	9. Tingkat Inflasi (%)				8. Indeks Inovasi Daerah (Nilai)
PN8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		PPP2. Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama PPP4. Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana		PPD 1. Penanganan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	
S8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	1. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	S5. Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	S.1.1. Meningkatnya Kesalehan Sosial	Indeks Kesalihan Sosial
	2. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)			S.1.1. Meningkatnya Kesalehan Sosial	Indeks Kesalihan Sosial
	3. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	S11. Meningkatnya pembangunan rendah Karbon dan menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana (Poin)	S1. Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana (Poin)

Sumber : Rancangan RKP 2025, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Barat 2025, Bappeda Kabupaten Garut, diolah 2024



Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap dukungan pada Program/Kegiatan prioritas nasional dalam dokumen RKP 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.22
Tingkat Dukungan Program Prioritas Daerah Terhadap Masing-masing Kegiatan Prioritas pada Prioritas Nasional Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
PN.01 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)				Rp. 1.135.724.900,-	
1	Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat	PPD 3. Penguatan budaya gotong royong, kehidupan beragama dan berbudaya serta ketentraman dan ketertiban politik, demokrasi	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	980.724.900	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Penyehatan media arus utama dan peningkatan kapasitas lembaga dan insan pers	PPD 3. Penguatan budaya gotong royong, kehidupan beragama dan berbudaya serta ketentraman dan ketertiban politik, demokrasi	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	8.745.556.700	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Transformasi pengarusutamaan HAM	PPD7. Tata Kelola pelayanan publik yang inovatif	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	980.724.900	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan bantuan hukum	PPD 3. Penguatan budaya gotong royong, kehidupan beragama dan berbudaya serta ketentraman dan ketertiban politik, demokrasi	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	8.745.556.700	Satuan Polisi Pamong Praja
5	Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan perlindungan dan pemulihan saksi dan korban	PPD 6: Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan penguatan	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	155.000.000	Dinas Sosial



NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		sistem perlindungan sosial			
PN 02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru				Rp.490.576.936.699,-	
1	Penguatan kapabilitas pertahanan termasuk CBRNE, penyempurnaan doktrin, penguatan postur, dan penguatan operasi lintas medan	PPD 3. Penguatan budaya gotong royong, kehidupan beragama dan berbudaya serta ketentraman dan ketertiban politik, demokrasi	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	8.745.556.700	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest				
3	Penguatan intelijen dan kontra intelijen	PPD7. Tata Kelola pelayanan publik yang inovatif	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	4.640.275.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Pengawasan dan pemeliharaan keamanan laut di ALKI dan choke point		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.277.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal strategis		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1.500.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme	PPD7. Tata Kelola pelayanan publik yang inovatif	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	980.724.900	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	Diplomasi kedaulatan				
8	Kontribusi penjagaan stabilitas dan global				
9	Penguatan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia	PPD7. Tata Kelola pelayanan publik yang inovatif	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	4.345.084.200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10	Penguatan postur kelembagaan diplomasi				
11	Ekstensifikasi dan intensifikasi tata kelola kerja sama pembangunan internasional				
12	Promosi aset soft power Indonesia di dunia internasional dan kerja sama sosial-budaya				
13	Penguatan jejaring diplomasi publik dan kemitraan diaspora Indonesia di luar negeri				

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT



NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
14	Pengembangan pangan akuatik	PPD 4: Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, peningkatan realisasi investasi, diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan kualitas konsumsi pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1.594.111.350	Dinas Ketahanan Pangan
15	Pengembangan pangan hewani		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	6.200.410.875	Dinas Ketahanan Pangan
16	Pengembangan pangan nabati		Program Penanganan Kerawanan Pangan	518.712.550	Dinas Ketahanan Pangan
17	Penguatan cadangan pangan		Program Pengawasan Keamanan Pangan	625803844	Dinas Ketahanan Pangan
18	Penjaminan mutu dan keamanan pangan		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1.050.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
19	Penguatan satu data pangan		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	700.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
20	Peningkatan produktivitas hutan	PPD 5: Peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah diikuti dengan pembangunan desa dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	9.339.800.000	Dinas Lingkungan Hidup
21	Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri				
22	Penguatan pengelolaan hutan lestari				
23	Pemulihan ekosistem yang terdegradasi				
24	Pemulihan luas lahan mangrove				
25	Penyediaan pasokan air berkelanjutan	PPD 5: Peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah diikuti dengan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	70.900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
26	Rehabilitasi hutan dan lahan				
27	Pemulihan ekosistem danau dan mata air				



NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
28	Penyediaan data dan informasi DAS	pembangunan desa dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	9.339.800.000	Dinas Lingkungan Hidup
29	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS				
30	Peningkatan pengelolaan kualitas udara di kab/kota di Indonesia				
31	Peningkatan pengelolaan emisi udara dari industri, prasarana, dan jasa	PPD 4 : Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, penguatan cadangan dan ketahanan pangan daerah, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif mendorong peningkatan inovasi dan pendapatan daerah;	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	160.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
32	Peningkatan kualitas lahan	PPD 5: Peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah diikuti dengan pembangunan desa dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	1.115.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
33	Penurunan laju deforestasi		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	4.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
34	Peningkatan kualitas ekosistem gambut		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	9.339.800.000	Dinas Lingkungan Hidup



NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
35	Pengelolaan B3 dan limbah B3	PPD 5: Peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah diikuti dengan pembangunan desa dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
36	Pengawasan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan	PPD 5: Peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah diikuti dengan pembangunan desa dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	1.115.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
37	Pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
38	Peningkatan sarana, prasarana, dan kelembagaan dalam rangka penegakan hukum lingkungan di pusat dan daerah serta pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	9.339.800.000	Dinas Lingkungan Hidup
39	Penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	1.115.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
40	Penguatan instrumen pencegahan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup				
41	Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	PPD 5: Peningkatan kualitas	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	70.900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
42	Pengamanan dan pengawasan kualitas air minum	infrastruktur antar wilayah diikuti dengan pembangunan desa dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	29.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
43	Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan air minum				
44	Peningkatan peran masyarakat dalam pemenuhan air minum				
45	Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan ketahanan iklim				
46	Penguatan tata kelola penyelenggaraan sanitasi yang berorientasi pada keberlanjutan dan ketahanan iklim	PPD 5: Peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah diikuti dengan pembangunan desa dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	12.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
47	Penyusunan dan penerapan pengaturan untuk mendukung penyelenggaraan sanitasi aman dan berkelanjutan				
48	Pengembangan ekosistem berbasis inovasi penyelenggaraan sanitasi				
49	Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur tampungan air				
50	Penyediaan pasokan air berkelanjutan				
51	Pengelolaan risiko daya rusak air				
52	Penyempurnaan tata kelola infrastruktur sumber daya air				
53	Peningkatan penyediaan dan layanan BBM	PPD 4 : Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, penguatan cadangan dan ketahanan pangan daerah, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif mendorong	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	160.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
54	Peningkatan penyediaan dan layanan gas bumi				
55	Peningkatan cadangan dan produktivitas energi				
56	Peningkatan investasi dan pembiayaan transisi energi				
51	Pengelolaan risiko daya rusak air		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	70.900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT



NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		peningkatan inovasi dan pendapatan daerah;			
57	Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur TIK	PPD7. Tata Kelola pelayanan publik yang inovatif	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	4.640.275.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
58	Penguatan SDM digital		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.277.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
59	Digitalisasi sektor ekonomi	PPD 4 : Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, penguatan cadangan dan ketahanan pangan daerah, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif mendorong peningkatan inovasi dan pendapatan daerah;	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	489.200.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
60	Digitalisasi sektor strategis		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
61	Riset dalam rangka penguasaan teknologi	PPD7. Tata Kelola pelayanan publik yang inovatif	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.942.306.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
62	Peningkatan keamanan dan kondusifitas ruang digital		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	785.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
63	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital di pemerintahan (AI, blockchain, metaverse)	PPD7. Tata Kelola pelayanan publik yang inovatif	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	4.640.275.000	Dinas Komunikasi dan Informatika



NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
64	Penguatan industri manufaktur berbasis kelautan - perkapalan dan garam	PPD 5: Peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah diikuti dengan pembangunan desa dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Pelayaran	200.000.000	Dinas Perhubungan
65	Penguatan sistem transportasi, logistik, dan perdagangan jalur perairan				
66	Pengelolaan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil				
67	Penguatan industri halal	PPD 4 : Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, penguatan cadangan dan ketahanan pangan daerah, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif mendorong peningkatan inovasi dan pendapatan daerah;	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	13.350.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
68	Penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional		Program Pengembangan Ekspor	5.000.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
69	Penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah (UMKM) halal	PPD7. Tata Kelola pelayanan publik yang inovatif	Program Perekonomian Dan Pembangunan	4.165.101.280	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
70	Penguatan keuangan syariah		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	300.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menenga



NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
71	Penguatan dana sosial syariah		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	310.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menenga
72	Peningkatan kapasitas terpasang PLT energi terbarukan	PPD 4 : Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, penguatan cadangan dan ketahanan pangan daerah, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif mendorong peningkatan inovasi dan pendapatan daerah;	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	160.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
77	Peningkatan infrastruktur transmisi listrik				
78	Pengembangan transportasi hijau				
79	Perluasan implementasi teknologi bersih				
80	Pengembangan mekanisme pembagian keuntungan dari sumber daya genetik termasuk pengetahuan tradisional				
81	Penerapan efisiensi sumber daya	PPD 4 : Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, penguatan cadangan dan ketahanan pangan daerah, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif mendorong peningkatan inovasi dan pendapatan daerah;	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	160.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
82	Pengembangan produk ramah lingkungan				
83	Penerapan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material				
84	Penguatan ekosistem daur ulang				
85	Peningkatan proporsi EBT dalam bauran energi primer				
86	Efisiensi energi	PPD 5: Peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah diikuti dengan pembangunan desa dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	9.339.800.000	Dinas Lingkungan Hidup
87	Peningkatan transportasi berkelanjutan				
88	Peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan				
89	Peningkatan pencegahan pengurangan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan.				
90	Peningkatan implementasi praktik pertanian yang rendah karbon.				
91	Peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru				



NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
92	Pengembangan industri hijau				
93	Peningkatan pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
94	Penyediaan, optimalisasi, rehabilitasi, pengoperasian dan pemeliharaan, serta pengawasan infrastruktur persampahan, termasuk konservasi tempat pemrosesan akhir dan landfill mining	PPD 5: Peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah diikuti dengan pembangunan desa dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Persampahan	77.200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
95	Penyadartahuan dan pemicuan perubahan perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah, terutama peningkatan permintaan, partisipasi, serta kemauan untuk membayar retribusi				
96	Penguatan landasan regulasi, pedoman penyelenggaraan, dan implementasinya dalam sektor persampahan				
97	Reformasi tata kelola persampahan, termasuk penguatan dan peningkatan kapasitas perencanaan serta pemisahan regulator, operator, dan pengawas serta penegakan hukum				
98	Penegakan hukum dan penyediaan skema insentif dan disinsentif berbasis kinerja dalam pengelolaan sampah				



NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
99	Penerapan ekonomi sirkuler pada persampahan untuk mendorong reformasi value chain sampah, termasuk melalui pelibatan sektor informal dan integrasi dengan pengelolaan sampah spesifik				
100	Pengembangan ekosistem tenaga kerja hijau				
101	Pengembangan kompetensi tenaga kerja hijau				
102	Penguatan peran asosiasi dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA) dalam pengembangan pekerjaan hijau dan tenaga kerja hijau				
103	Pemulihan ekosistem yang terdegradasi	PPD 5: Peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah diikuti dengan pembangunan desa dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	9.339.800.000	Dinas Lingkungan Hidup
104	Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem				
105	Peningkatan peran masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati				
106	Pengendalian spesies asing invasif				
107	Penguatan data, informasi, dan IPTEK keanekaragaman hayati				
108	Pemanfaatan, pemanenan, dan perdagangan spesies liar dilakukan secara berkelanjutan, legal, dan aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan				
109	Peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan				
110	Inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	700.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
111	Peningkatan bioprospeksi sumber daya genetik				



NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
112	Pengembangan pengelolaan keamanan hayati (biosafety)	PPD 5: Peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah diikuti dengan pembangunan desa dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	8.996.500.000	Dinas Lingkungan Hidup
113	Pemulihan luas lahan mangrove		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	9.339.800.000	Dinas Lingkungan Hidup
114	Penurunan laju deforestasi				
115	Pengawasan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan				
116	Peningkatan produktivitas hasil hutan				
117	Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri				
118	Penguatan pengelolaan hutan lestari				
119	Penguatan prakondisi pengelolaan hutan lestari				
PN. 03 MelanjutkanPengembanganInfrastrukturdanMeningkatkanLapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi				Rp. 388.791.755.400,-	
1	Penguatan infrastruktur dan layanan konektivitas	PPD 5: Peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah diikuti dengan pembangunan desa dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	21.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penataan Bangunan Gedung	10.700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	6.750.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT



NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Program Penyelenggaraan Jalan	186.600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	2.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	4.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Pembelian Layanan (Buy The Service) Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	23.849.200.000	Dinas Perhubungan
3	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan (BRT)		Program Pengelolaan Pelayaran	200.000.000	Dinas Perhubungan
4	Penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif	PPD 4 : Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, penguatan cadangan dan ketahanan pangan daerah, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif mendorong peningkatan inovasi dan pendapatan daerah;	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1.050.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
5	Penguatan ekosistem film, animasi, visual arts				
6	Penguatan ekosistem seni, budaya, kerajinan				
7	Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim				
8	Penguatan ekosistem kuliner				
9	Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	PPD 4 : Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, penguatan cadangan dan ketahanan pangan daerah, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif mendorong peningkatan inovasi dan pendapatan daerah;	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1.050.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
10	Peningkatan kapasitas sisi pasokan industri digital		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	320.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya



NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Mineral
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	104.050.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	2.240.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
			Program Pengembangan Ekspor	5.000.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	500000000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	993.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1335000000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	115000000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	100000000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT



NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
11	Digitalisasi sektor ekonomi	PPD 4 : Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, penguatan cadangan dan ketahanan pangan daerah, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif mendorong peningkatan inovasi dan pendapatan daerah;	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	227.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menenga
12	Digitalisasi sektor strategis		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	300.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menenga
13	Perluasan akses dan inovasi pembiayaan		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	310.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menenga
14	Penguatan peran perbankan		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	385.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menenga
15	Penguatan peran sektor keuangan nonbank		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	800.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menenga
16	Peningkatan inklusi dan literasi keuangan		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	1.802.555.400	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menenga
			Program Pengembangan Ukm	1.450.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menenga
PN.04 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas				Rp. 1.142.047.089.956,-	
1	Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun dengan melakukan penguatan layanan 1 tahun pra sekolah (TK/RA/BA) dan percepatan wajib belajar 12 tahun yang berfokus pada jenjang pendidikan yang masih	PPD 2:Reformasi kualitas sistem pendidikan, dan transformasi sistem kesehatan, keluarga berencana, kesetaraan gender	Program Pengelolaan Pendidikan	666.614.560.364	Dinas Pendidikan



NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	membutuhkan akselerasi pelaksanaan wajib belajar	dan pemenuhan hak anak serta peningkatan peran aktif pemuda;			
2	Penguatan pembelajaran berbasis teknologi digital		Program Pengembangan Kurikulum	1.100.000.000	Dinas Pendidikan
3	Perluasan program pendidikan formal dan non- formal, di antaranya melalui pendampingan pada para pekerja dan komunitas seni, olahragawan, serta penyandang disabilitas				
4	Perluasan cakupan bantuan pendidikan prestasi dan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar sampai jenjang pendidikan tinggi, termasuk beasiswa atlet dan seniman		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	750000000	Dinas Pendidikan
5	Pemenuhan layanan pendidikan pesantren yang berkualitas dan pendidikan keagamaan lainnya		Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	775000000	Dinas Pendidikan
6	Pengembangan budaya literasi dan peningkatan kegemaran membaca untuk mendukung kreativitas dan inovasi melalui penguatan akses bahan bacaan berkualitas dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial				
7	Penguatan kualitas dan relevansi penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis industri dan keunggulan wilayah		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	6.008.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8	Peningkatan keahlian tenaga kerja		Program Penempatan Tenaga Kerja	2.280.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9	Mobilitas dan perlindungan tenaga kerja		Program Hubungan Industrial	875.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
10	Penciptaan ekosistem satuan pendidikan yang mendukung penguatan karakter peserta didik		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	24100000000	Dinas Pendidikan
11	Penataan dan pembinaan kelembagaan perguruan tinggi dan program studi untuk peningkatan kualitas dan penguatan bidang STEAM				
12	Penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing				
13	Penurunan stunting		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	402.374.145.571	Dinas Kesehatan
14	Pengendalian penyakit tuberkulosis				
15	Eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta & schistosomiasis)				
16	Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa				
17	Pembudayaan hidup sehat, penyehatan lingkungan, dan olahraga		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	568.185.000	Dinas Kesehatan
18	Investasi pelayanan kesehatan primer				
19	Penguatan layanan unggulan dan pengembangan pelayanan kesehatan di daerah sulit akses		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1.175.093.700	Dinas Kesehatan
20	Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional dan pendanaan kesehatan				
21	Produksi dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.678.157.000	Dinas Kesehatan
22	Penyediaan layanan yang ramah anak dalam rangka pemenuhan hak anak secara universal		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	150.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
23	Penguatan resiliensi dan peningkatan partisipasi anak secara bermakna		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	1.670.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
24	Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam ketenagakerjaan				
25	Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya		Program Perlindungan Khusus Anak	2.130.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
26	Peningkatan derajat kesehatan, penguatan karakter, dan pencegahan perilaku berisiko pada pemuda		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	11.161.519.321	Dinas Pemuda dan Olah Raga
27	Penguatan institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai, moral, integritas karakter, dan pengembangan psikososial anak		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	8.570.300.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
28	Penyediaan fasilitas pendukung keluarga dalam melaksanakan fungsi utama keluarga		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	320.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
29	Penguatan keluarga tunggal, pasca perceraian, dan pekerja migran untuk me				
30	Pemenuhan hak sipil, hukum, dan ekonomi keluarga dan afirmasi bagi keluarga rentan		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	963.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
31	Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan				



NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
32	Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan		Program Perlindungan Perempuan	649.479.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
33	Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan				
34	Penguatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di proses pembangunan				
35	Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia	PPD 7 : Tata Kelola pelayanan publik yang inovatif.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	384.650.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
36	Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan	PPD 6: Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan penguatan sistem perlindungan sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	2.750.000.000	Dinas Sosial
PN. 05 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri				Rp. 15.625.000.000,-	
1	Hilirisasi industri nikel	PPD 4 : Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, penguatan cadangan dan ketahanan pangan daerah, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif mendorong peningkatan inovasi dan pendapatan daerah;	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	160.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
2	Hilirisasi industri bauksit				
3	Hilirisasi industri karet				
4	Hilirisasi industri kelapa				
5	Penguatan industri logam dasar				
6	Pengembangan industri alat angkut (termasuk electric vehicle dan kedirgantaraan)				
7	Peningkatan kompleksitas industri elektronik dan digital (termasuk baterai kendaraan bermotor dan semikonduktor)				
8	Pengembangan industri kimia hilir dan farmasi				
9	Penguatan produktivitas industri makanan dan minuman		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.000.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan



NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
10	Penguatan produktivitas industri tekstil, produk tekstil dan alas kaki		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	13.350.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	115.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
PN.06 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan				Rp. 52.221.776.000,-	
1	Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan	PPD 3. Penguatan budaya gotong royong, kehidupan beragama dan berbudaya serta ketentraman dan ketertiban politik, demokrasi	Program Penataan Desa	900.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Transformasi dan pemberdayaan ekonomi perdesaan		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	1.500.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Peningkatan ketahanan sosial dan pelestarian lingkungan perdesaan		Program Administrasi Pemerintahan Desa	12.408.776.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Penguatan tata kelola, keuangan, dan pendampingan desa adaptif		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	21.200.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Pembangunan kawasan perbatasan				
6	Fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan, terutama bagi pembelian rumah pertama, masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan membangun rumahnya secara swadaya	PPD 6: Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan penguatan sistem perlindungan sosial	Program Pemberdayaan Sosial	3.788.000.000	Dinas Sosial
7	Bantuan sosial yang adaptif melalui Kartu Sejahtera, yang terdiri dari Program Keluarga Harapan, Sembako, Program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat	PPD 1 : Penanganan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	Program Rehabilitasi Sosial	9.675.000.000	Dinas Sosial



NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
8	Mendukung Basis Data Terpadu untuk pemberantasan kemiskinan melalui Satu Sistem Registrasi Sosial Ekonomi				
9	Perluasan cakupan Jaminan Sosial Nasional secara inklusif	PPD 6: Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan penguatan sistem perlindungan sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	2.750.000.000	Dinas Sosial
PN. 07 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				Rp. 769.907.860.900,-	
1	Optimalisasi local taxing power	PPD 7 : Tata Kelola pelayanan publik yang inovatif.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	752.986.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	Optimalisasi kualitas belanja TKD		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.185.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	Pengendalian inflasi pangan bergejolak		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	11.736.860.900	Badan Pendapatan Daerah
PN. 08 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur				Rp. 784.021.057.196,-	
1	Peningkatan literasi keagamaan yang moderat, inklusif, dan bermaslahat	PPD 3. Penguatan budaya gotong royong, kehidupan beragama dan kebudayaan serta ketentraman dan ketertiban politik, demokrasi	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	38.684.737.402	Sekretariat Daerah
2	Peningkatan bimbingan keagamaan dan bimbingan perkawinan				
3	Pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik	PPD 6: Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan penguatan sistem perlindungan sosial	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	155.000.000	Dinas Sosial
4	Peningkatan kerukunan umat beragama		Program Rehabilitasi Sosial	9.675.000.000	Dinas Sosial
5	Peningkatan peran lembaga agama dan keagamaan dalam layanan keagamaan	PPD 6: Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan penguatan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	2.750.000.000	Dinas Sosial



NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		sistem perlindungan sosial			
		PPD 3. Penguatan budaya gotong royong, kehidupan beragama dan berbudaya serta ketentraman dan ketertiban politik, demokrasi	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	971.547.400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	6.820.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Revitalisasi layanan KUA yang berkualitas, merata, dan inklusif				
7	Transformasi layanan penyelenggaraan ibadah haji				
8	Penjaminan produk halal	PPD 4 : Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, penguatan cadangan pangan daerah, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif mendorong peningkatan inovasi dan pendapatan daerah;	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	993.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
9	Pengembangan dana sosial keagamaan untuk mendukung program pembangunan				

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT



NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
10	Penguatan pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan, serta pembinaan ideologi Pancasila	PPD 3. Penguatan budaya gotong royong, kehidupan beragama dan berbudaya serta ketentraman dan ketertiban politik, demokrasi	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	980724900	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11	Pengelolaan terpadu cagar budaya	PPD 4 : Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, penguatan cadangan dan ketahanan pangan daerah, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif mendorong peningkatan inovasi dan pendapatan daerah;	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	400.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
12	Pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal		Program Pengembangan Kebudayaan	1150000000	
13	Pengembangan produk dan jasa berbasis seni budaya				
14	Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional				
15	Pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan				
16	Pelindungan hutan adat dan tanah ulayat serta pemberdayaan masyarakat dan komunitas adat	PPD 4 : Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, penguatan cadangan dan ketahanan pangan daerah, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif mendorong peningkatan inovasi dan pendapatan daerah;	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	175.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman



NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PPD 3. Penguatan budaya gotong royong, kehidupan beragama dan berbudaya serta ketentraman dan ketertiban politik, demokrasi	Program Penetapan Tanah Ulayat	150.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
17	Pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional	PPD 2:Reformasi kualitas sistem pendidikan, dan transformasi sistem kesehatan, keluarga berencana, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta peningkatan peran aktif pemuda;	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	775000000	Dinas Pendidikan
18	Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah				
19	Transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan	PPD 3. Penguatan budaya gotong royong, kehidupan beragama dan berbudaya serta ketentraman dan ketertiban politik, demokrasi	Program Pengelolaan Arsip	883276345	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	285000000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20	Melaksanakan peningkatan peran lembaga dan kapasitas sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana	PPD 6: Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan penguatan sistem perlindungan sosial	Program Penanggulangan Bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
21	Membangun sistem peringatan dini multi ancaman bahaya dan pusat pengendali operasi penanggulangan bencana terpadu				
22	Memulihkan pelayanan dasar bidang fisik, sosial, dan ekonomi di		Program Penanganan Bencana	4.025.000.000	Dinas Sosial



NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	daerah terdampak bencana				
23	Meningkatkan layanan literasi dan edukasi kebencanaan berbasis masyarakat, termasuk melalui desa tangguh bencana				
24	Melakukan peningkatan keandalan dan kebermanfaatan infrastruktur tahan bencana, termasuk penguatan perijinan bangunan gedung		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	6.750.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
25	Melakukan pembangunan pusat logistik dan peralatan berbasis kewilayahan				
26	Menyediakan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana, pencarian dan pertolongan (SAR)	PPD 1 : Penanganan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	Program Penanganan Bencana	4.025.000.000	Dinas Sosial
27	Penetapan dan penyelenggaraan rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (RAK LLAJ) secara komprehensif dan sinergis	PPD 5: Peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah diikuti dengan pembangunan desa dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLaj)	23.849.200.000	Dinas Perhubungan
28	Peningkatan penanganan daerah rawan kecelakaan (DRK)		Program Penyelenggaraan Jalan	186.600.000.000	Dinas Perhubungan
29	Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi udara, laut, dan darat	PPD 7 : Tata Kelola pelayanan publik yang inovatif.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	8.741.625.578	Dinas Pemadam Kebakaran
30	Meningkatkan ketahanan pesisir dan laut	PPD 4 : Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, penguatan cadangan dan ketahanan pangan daerah,	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	900000000	Dinas Perikanan dan Peternakan



NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif mendorong peningkatan inovasi dan pendapatan daerah;			
31	Meningkatkan pembangunan dan konservasi sumber daya air	PPD 5: Peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah diikuti dengan pembangunan desa dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	70.900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
32	Mengembangkan pertanian ramah iklim	PPD 6: Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan penguatan sistem perlindungan sosial	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	500.000.000	Dinas Peternakan
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.068.000.000	Dinas Pertanian
33	Mencegah dan mengendalikan penyakit sensitif iklim	PPD 2:Reformasi kualitas sistem pendidikan, dan transformasi sistem kesehatan, keluarga berencana, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta peningkatan peran aktif pemuda;	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	402.374.145.571	Dinas Perikanan dan Peternakan
34	Tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target pembangunan berketahanan iklim	PPD 5: Peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah diikuti dengan pembangunan desa	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	9.339.800.000	Dinas Lingkungan Hidup

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan			

Sumber : Bappeda Kabupaten Garut, diolah 2024

Selain itu, sebagai bagian dari Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, beberapa proyek strategis yang menjadi amanat Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan diantaranya:

Gambar 4.13 Program Strategis Skala Kewilayahan Jawa Barat 2022-2042



Dukungan program daerah RKPD Tahun 2025 terhadap arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.23 Program Pendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas Kabupaten Garut Tahun 2025

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
Aspek I : Pembangunan Berkelanjutan (Sdg's)		
Tujuan 1: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Tujuan 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosika pertanian berkelanjutan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Pertanian
sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang me-ningkatkan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan dan Peternakan
produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan dan Peternakan
2.5 Pada tahun 2021, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pertanian	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
Tujuan 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
3.8 Pada tahun 2030, Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tujuan 4: Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
hayat untuk semua		
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
4.3 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	Program Pendidik Dan Tenaga Pendidikan	Dinas Pendidikan
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Tujuan 6: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
Tujuan 7: Menjamin akses keenergi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
7.2 Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial pangsa energy terbarukan dalam bauran energi global.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tujuan 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Program Penilaian Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
8.6 Pada tahun 2021, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menenga
	Program Pengembangan Umkm	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menenga
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Pertanian
	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kesenian Daerah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Tujuan 9: Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Dinas Perumahan dan Permukiman
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika
9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
Tujuan 10: Mengurangi kesenjangan didalam dan antar nagara	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
Tujuan 11: Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pengendalian, Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Permukiman
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Lingkungan Hidup



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pencegahan, Penganggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.	Dinas Pemadam Kebakaran
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan 12: Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Lingkungan Hidup
12.4 Pada tahun 2021 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Pertanian
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim	Program Penanganan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
Tujuan 14: Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan dan Peternakan
Tujuan 14: Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
14.2 Pada tahun 2021, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan dan Peternakan
14.5 Pada tahun 2021, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan dan Peternakan
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (<i>small-scale artisanal fishers</i>) terhadap sumber daya laut dan pasar	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perikanan Budidaya Dan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Peningkatan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Pelestarian Sumberdaya Pesisir Dan Perairan Umum	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Pengembangan Sentra Perikanan Dan Penguatan Kelembagaan Usaha	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan dan Peternakan
Tujuan 15: Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghilangkan kehilangan keanekaragaman hayati	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Hutan	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian, Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tujuan 17: Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
Aspek II : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan
Menciptakan manajemen pembangunan dan pengelola pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi yang bersandar pada kepentingan rakyat.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Aspek III : Gender	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
Menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia melalui pengurangan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Aspek IV : Modal Sosial Budaya dan Transformasi Digital	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1. Internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (<i>local knowledge</i>), kearifan local (<i>local wisdom</i>), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Optimalisasi peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sumber pertumbuhan ekonomi	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber : Diolah oleh Bappeda Kabupaten Garut 2024

4.3. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025

Guna menjamin keseimbangan pembangunan daerah antar wilayah maka dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Garut turut mengacu kepada arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 yang bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten konservasi yang didukung oleh agribisnis, pariwisata, kelautan, dan industri yang berkelanjutan, serta berbasis mitigasi bencana.

Kebijakan pembangunan kewilayahan dalam rangka menciptakan suatu rentang kendali yang proporsional dan mencapai hasil yang optimal

dalam pembangunan setiap wilayah dilakukan melalui Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kabupaten Garut, yaitu sebagai berikut:

A. Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis Ekonomi Yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Garut, antara lain :

1. **Kawasan Perkotaan Garut**, dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu penanganan yang harus dilakukan berupa sinergitas dengan pengembangan wilayah sekitar dan menyelaraskan struktur dan pola ruang, serta arah pengembangan wilayah agar terintegrasi dan saling mendukung dengan kawasan tetangga. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, Banyuresmi, Cilawu, dan Karangpawitan. Pengembangan, pembangunan kawasan perkotaan difokuskan pada :
 - 1) Penataan Wilayah Perkotaan Garut;
 - 2) Pelapisan *hotmix* ruas jalan perkotaan;
 - 3) Pembangunan Jalan *By Pass* Tahap II;
 - 4) Perencanaan pembangunan terminal tipe A perkotaan kota Garut;
 - 5) Penanganan pengolahan limbah industri kulit;
 - 6) Peningkatan penanganan pengelolaan PJU;
 - 7) Rehabilitasi drainase perkotaan;
 - 8) Pembangunan akses wisata Jalan alternatif Lingkar Cipanas dan Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata;
 - 9) Pembangunan dan Pengembangan Sarana Olah Raga (SOR);
 - 10) Pembangunan dan Pengembangan *Art Centre*;
 - 11) Pengembangan *Islamic Centre*;
 - 12) Peningkatan Rumah Sakit dr. Slamet menjadi Tipe B Pendidikan;
 - 13) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
 - 14) Pengembangan industri kreatif;
 - 15) Perencanaan pembangunan kawasan Induk Pusat Pemerintahan (IPP) dan sarana fasilitas terpadu Pemerintah Kabupaten Garut;
 - 16) Pembangunan jalan alternatif Banyuresmi - Situ Bagendit;
 - 17) Pengembangan destinasi wisata Situ Bagendit;
2. **Kawasan Koridor Kadungora - Leles - Garut**, dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh

terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu penanganan berupa kawasan transisi antara kegiatan perekonomian di Kota Bandung dan perkotaan Garut, berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional, dan perlu sinergitas infrastruktur. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Kadungora, Leles, Tarogong Kaler dan Tarogong Kidul. Pengembangan, pembangunan kawasan ini difokuskan pada :

- 1) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
- 2) Pembangunan Jalan Alternatif Kadungora-Leles;
- 3) Pembangunan akses wisata Jalan alternatif Situ Cangkuang-Leles;
- 4) Pengembangan kawasan agrowisata desa Haruman Kecamatan Kadungora;
- 5) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
- 6) Pengembangan industri kreatif;

3. **Kawasan Perbatasan Bagian Utara (Balubur Limbangan - Malangbong)**, dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu penanganan berupa perbatasan dengan Kabupaten Bandung, Sumedang dan Tasikmalaya yang akan mendapatkan pengaruh dari pembangunan jalan tol Pembangunan jalan Tol Cileunyi-Nagreg-Ciamis-Banjar dan berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Balubur Limbangan, Selaawi, Kersamanah, Cibatuan dan Malangbong. Pengembangan, pembangunan kawasan perbatasan bagian utara difokuskan pada :

- 1) Perencanaan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Kawasan Industri terpadu;
- 2) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
- 3) Pembangunan jaringan irigasi Leuwigoong;
- 4) Pembangunan jalan alternatif Garut – Cibatuan;
- 5) Revitalisasi dan optimalisasi gedung *trade centre* di Bl. Limbangan;
- 6) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
- 7) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
- 8) Pengembangan industri kreatif;
- 9) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
- 10) Pengembangan *village breeding centre* di Garut Utara;
- 11) Pengembangan kawasan perdesaan agrowisata Barudua Kecamatan Malangbong;



- 12) Pengembangan kawasan perdesaan industri bambu Kecamatan Selaawi;
- 13) Pembangunan Rumah Sakit Garut Utara;
- 14) Pembangunan jalan alternatif Limbangan – Malangbong;
- 15) Pembangunan jalan alternatif kota Balubur Limbangan.

4. **Kawasan Perbatasan Bagian Timur (Singajaya dan sekitarnya)**, dengan kriteria kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal didalam wilayah kabupaten. Isu penanganan berupa perbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya yang perlu dipacu perkembangannya disebabkan infrastruktur yang kurang memadai, sehingga kawasan ini kurang terintegrasi dengan sistem wilayah. Mengantisipasi terhadap potensi kerawanan terhadap konflik sosial. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Banjarwangi, Singajaya, Peundeuy dan Cihurip. Pengembangan, pembangunan kawasan perbatasan bagian timur di fokuskan pada :

- 1) Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta konservasi sumberdaya air;
- 2) Elektrifikasi rumah tangga;
- 3) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
- 4) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
- 5) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
- 6) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
- 7) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
- 8) Pengembangan desa mandiri pangan;
- 9) Pengembangan *village breeding centre* di Garut Selatan;
- 10) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
- 11) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan;
- 12) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
- 13) Perencanaan Pembangunan TPA Wilayah Banjarwangi.

5. **Kawasan Perbatasan Bagian Barat (Caringin - Cisewu - Talegong)**, dengan kriteria kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal didalam wilayah kabupaten. Isu penanganan berupa sebagian besar memiliki fungsi sebagai kawasan lindung. Kondisi ini perlu strategi khusus dalam memacu pertumbuhan wilayahnya yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di sekitarnya dan mengantisipasi terhadap potensi kerawanan terhadap konflik sosial. Berbatasan dengan Cianjur dan Kabupaten Bandung dengan ruang lingkup wilayah meliputi

Kecamatan Kecamatan Caringin, Cisewu dan Talegong. Kawasan ini memiliki banyak limitasi untuk pengembangan wilayahnya. Topografi yang curam dengan kemiringan lereng rata-rata 25% hingga 40% menyebabkan kawasan ini memiliki fungsi sebagai kawasan lindung. Kondisi ini perlu strategi khusus dalam memacu pertumbuhan wilayahnya. Pengembangan, pembangunan kawasan perbatasan bagian barat di fokuskan pada :

- 1) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
- 2) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
- 3) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
- 4) Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta konservasi sumberdaya air;
- 5) Elektrifikasi rumah tangga;
- 6) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan
- 7) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
- 8) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
- 9) Pengembangan desa mandiri pangan;
- 10) Pengembangan destinasi wisata pantai Rancabuaya;
- 11) Perencanaan Pembangunan TPA Wilayah Caringin.

6. **Kawasan Agropolitan Cisurupan dan sekitarnya**, dengan kriteria sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Ruang lingkup wilayah meliputi Cisurupan, Cikajang, Cigedug, Sukaresmi, Pasirwangi dan Bayongbong. Pengembangan, pembangunan kawasan Cisurupan dan sekitarnya difokuskan pada :

- 1) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
- 2) Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta konservasi sumberdaya air;
- 3) Elektrifikasi rumah tangga;
- 4) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
- 5) Pengembangan industri kreatif;
- 6) Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata;
- 7) Pengembangan kawasan agropolitan di kecamatan Cisurupan dan sekitarnya;
- 8) Pengembangan Kawasan Agropolitan Jagung;
- 9) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;



- 10) Pengembangan desa mandiri pangan;
 - 11) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan;
 - 12) Pengembangan Kampung Domba Indonesia (KDI) di Kecamatan Cikajang;
 - 13) Pengembangan komoditas unggulan jeruk Garut, penangkaran benih kentang dan padi ketan;
 - 14) Pengembangan komoditas unggulan jeruk Garut;
 - 15) Peningkatan akses Jalan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Darajat;
7. **Kawasan Minapolitan**, dengan kriteria sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Isu penanganan berupa sektor unggulan minapolitan air tawar yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Tarogong Kaler, Sukawening, Pangatikan, Sucinaraja, Wanaraja, dan Karangpawitan. Pengembangan pembangunan kawasan ini difokuskan pada:
- 1) Pembangunan akses Jalan Alternatif Garut Kota-Karangpawitan-Sucinaraja-Wanaraja-Pangatikan;
 - 2) Pembangunan Jalan Penghubung Kecamatan Karangpawitan-Banyuresmi;
 - 3) Pengembangan Kawasan Agropolitan Jagung;
 - 4) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
 - 5) Pengembangan desa mandiri pangan;
 - 6) Pengembangan minapolitan di Kecamatan Tarogong Kaler dan daerah sekitarnya;
 - 7) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
 - 8) Pengembangan industri kreatif;
8. **Kawasan Koridor Jalan Lintas Jabar Selatan**, dengan kriteria sebagai Kawasan yang berpengaruh terhadap perkembangan wilayah koridornya termasuk Kawasan Garut bagian Selatan dengan dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. Isu penanganan berupa dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi dan perlu sinergitas infrastruktur. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Cibalong, Pameungpeuk, Cikelet, Pakenjeng, Mekarmukti, Bungbulang, dan Caringin. Berpengaruh terhadap perkembangan wilayah koridornya termasuk Kawasan Garut bagian selatan dengan dukungan jaringan

prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. Pengembangan, pembangunan kawasan ini difokuskan pada :

- 1) Perencanaan Pembangunan TPA Wilayah Pameungpeuk;
- 2) Peningkatan akses Jalan Bungbulang – Cijayana dan Bungbulang – Sukarame;
- 3) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
- 4) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
- 5) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
- 6) Peningkatan produksi hasil laut melalui pengembangan sarana dan prasarana penangkapan dan areal tangkap;
- 7) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
- 8) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
- 9) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan;
- 10) Pembangunan sentra industri dan kawasan Peternakan;
- 11) Pengembangan *village breeding centre* di Garut Selatan;
- 12) Pengembangan kawasan destinasi wisata pantai Garut Selatan.

B. Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya di Kabupaten Garut, adalah :

- 1) **Kawasan Cagar Budaya Kampung Adat Dukuh.** Kriteria sebagai Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya dan yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya. Isu penanganan yaitu mempertahankan suasana alam dan tradisi yang dilandasi budaya religi yang kuat, pelestarian cagar budaya, dan tempat perlindungan peninggalan budaya.
- 2) **Kawasan Cagar Budaya Kampung Adat Pulo Cangkuang.** Kriteria sebagai Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya dan yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya. Isu penanganan yaitu mempertahankan suasana alam dan tradisi yang dilandasi budaya religi yang kuat, pelestarian cagar budaya, dan tempat perlindungan peninggalan budaya.

C. Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Garut, adalah Kawasan Wisata Cipanas, dengan kriteria sebagai kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan

tata guna air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian dan kawasan rawan bencana alam. Isu penanganan yaitu meningkatkan potensi objek wisata alam yaitu pemandian air panas dan Taman Wisata Alam sehingga menjadi potensi kawasan yang cepat tumbuh dan berkembang, menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan aksesibilitas dan sarana penunjang wisata, dan merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten. Kawasan Wisata Cipanas di Kecamatan Tarogong Kaler, merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten. Kawasan ini memiliki potensi untuk cepat berkembang dikarenakan memiliki potensi alam sebagai objek wisata alam yaitu pemandian air panas, potensi kawasan wisata khas Cipanas, potensi kawasan wisata agro dan potensi kawasan wisata alam lainnya.

Gambar 4.14 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Garut



D. Arah Kebijakan Pembangunan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 secara umum arah kebijakan pembangunan kabupaten dan kota tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.24 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Garut berdasarkan Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No.	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota



No.	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
I.	Aspek Sosial	
	1) Peningkatan akses dan mutu pendidikan	Seluruh Kabupaten/Kota
	2) Transformasi layanan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi digital;	Seluruh Kabupaten/Kota
	3) Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta distribusi yang menjangkau seluruh wilayah;	Seluruh Kabupaten/Kota
	4) Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar;	Seluruh Kabupaten/Kota
	5) Peningkatan minat baca masyarakat;	Seluruh Kabupaten/Kota
	6) Optimalisasi pendidikan vokasi yang mendukung pengembangan wilayah;	Seluruh Kabupaten/Kota
	7) Transformasi layanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi digital	Seluruh Kabupaten/Kota
	8) Penguatan fasilitas kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan	Seluruh Kabupaten/Kota
	9) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja	Seluruh Kabupaten/Kota
	10) Peningkatan Pelayanan Penyakit Menular (AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria) yang komprehensif	Seluruh Kabupaten/Kota
	11) Percepatan Penurunan Stunting Dalam Mencapai Jabar Zero New Stunting	Seluruh Kabupaten/Kota
	12) Pemenuhan tenaga kesehatan/SDMK	Seluruh Kabupaten/Kota
	13) Peningkatan pelayanan penyakit tidak menular yang komprehensif	Seluruh Kabupaten/Kota
	14) Penguatan Pembiayaan Kesehatan	Seluruh Kabupaten/Kota
	5) Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Seluruh Kabupaten/Kota
	16) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Seluruh Kabupaten/Kota
	17) Pemberdayaan perempuan serta perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Seluruh Kabupaten/Kota
	18) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan	Seluruh Kabupaten/Kota
	19) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana	Seluruh Kabupaten/Kota
	20) Pencegahan dan penanganan penyakit akibat perubahan iklim secara terpadu dan cepat	Seluruh Kabupaten/Kota
	21) Peningkatan mitigasi dan adaptasi bencana termasuk bencana hidrometeorologi	Seluruh Kabupaten/Kota
	22) Perlindungan jaminan layanan sosial bagi masyarakat keluarga ekonomi tidak mampu	Seluruh Kabupaten/Kota
	23)Pembangunan pusat pelayanan publik dalam meningkatkan kecepatan pelayanan kepada masyarakat	Seluruh Kabupaten/Kota
	24) Percepatan penurunan stunting	Seluruh Kabupaten/Kota
	25) Optimasi potensi olahraga, kepemudaan, kebudayaan dan lingkungan hidup	Seluruh Kabupaten/Kota



No.	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
	26) Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, dan daya saing pemuda	Seluruh Kabupaten/Kota
	27) Pengendalian pertumbuhan penduduk	Seluruh Kabupaten/Kota
	28) Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup	Seluruh Kabupaten/Kota
	29) Memberdayakan masyarakat miskin dan mencegah terjadinya kemiskinan baru	Seluruh Kabupaten/Kota
	30) Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan memperkuat rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta Perlindungan dan Jaminan Sosial	Seluruh Kabupaten/Kota
	31) Reformasi Perlindungan Jaminan kesejahteraan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Seluruh Kabupaten/Kota
	32) Peningkatan kinerja lembaga-lembaga demokrasi	Seluruh Kabupaten/Kota
	33) Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Seluruh Kabupaten/Kota
	34) Optimalisasi inovasi daerah berbasis kolaborasi dalam pembangunan dan pengembangan potensi daerah	Seluruh Kabupaten/Kota
	35) Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa	Seluruh Kabupaten/Kota
II.	Aspek Ekonomi	
	1) Pembentukan dan pengembangan kawasan/sentra/klaster produksi sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan	Kabupaten Purwakarta Kabupaten Subang Kabupaten Karawang Kabupaten Bogor Kabupaten Cirebon Kabupaten Majalengka Kabupaten Kuningan Kabupaten Garut Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Ciamis Kota Banjar Kabupaten Pangandaran Kota Sukabumi Kabupaten Sukabumi Kabupaten Bandung Kabupaten Sumedang
	2) Pengelolaan konservasi kelautan dan wilayah pesisir yang berkelanjutan secara terpadu	Kabupaten Subang Kabupaten Cianjur Kabupaten Cirebon Kabupaten Garut Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Sukabumi Kabupaten Bandung
	3) Penyediaan sarana dan prasarana sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan	Kabupaten Purwakarta Kabupaten Subang Kabupaten Cirebon Kabupaten Indramayu Kabupaten Majalengka Kabupaten Kuningan Kabupaten Garut Kabupaten Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Kabupaten Ciamis Kota Banjar Kabupaten Pangandaran Kabupaten Sukabumi Kabupaten Bandung



No.	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
		Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Sumedang
	4) Meningkatkan ketersediaan dan kapasitas SDM pertanian	Kabupaten Subang Kabupaten Cianjur Kabupaten Indramayu Kabupaten Majalengka Kabupaten Kuningan Kabupaten Garut Kabupaten Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Kabupaten Ciamis Kota Banjar Kabupaten Pangandaran Kabupaten Sukabumi Kabupaten Bandung Kabupaten Sumedang
	5) Meningkatkan cakupan dan pelayanan infrastruktur irigasi, khususnya pada lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Kabupaten Purwakarta Kabupaten Cianjur Kabupaten Indramayu Kabupaten Majalengka Kabupaten Kuningan Kabupaten Garut Kabupaten Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Kabupaten Ciamis Kota Banjar Kabupaten Pangandaran Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Sumedang
	6) Memperbaiki Tata Kelola Pangan dengan memperhatikan akses, ketersediaan dan pemanfaatan pangan	Kabupaten Subang Kabupaten Karawang Kabupaten Cianjur Kabupaten Indramayu Kabupaten Kuningan Kabupaten Garut Kabupaten Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Kabupaten Ciamis Kota Banjar Kabupaten Pangandaran Kabupaten Sumedang
	7) Meningkatkan ketersediaan pangan melalui penguatan produksi kebutuhan pangan mandiri, khususnya bahan pokok penting	Kabupaten Garut Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Sukabumi Kabupaten Bandung
	8) Peningkatan kompetensi kewirausahaan pada KUMKM di Jawa Barat	Kabupaten Subang Kota Bogor Kota Bekasi Kabupaten Garut Kabupaten Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Kabupaten Pangandaran Kota Sukabumi Kabupaten Sukabumi Kota Bandung Kabupaten Bandung Kota Cimahi



No.	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
	9) Pengembangan dan pengelolaan daya Tarik wisata, atraksi wisata dan amenitas wisata terintegrasi berskala Nasional dan Internasional	Kabupaten Purwakarta Kabupaten Subang Kabupaten Bogor Kota Cirebon Kabupaten Majalengka Kabupaten Kuningan Kabupaten Garut Kota Banjar Kabupaten Pangandaran Kabupaten Sukabumi Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Sumedang
	10) Pengembangan kemitraan industri pariwisata dan ekonomi kreatif	Kabupaten Subang Kabupaten Bekasi Kabupaten Cianjur Kota Cirebon Kabupaten Garut Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kabupaten Bandung Barat
	11) Penciptaan daya saing produk industri pariwisata dan ekonomi kreatif	Kota Bogor Kota Depok Kabupaten Cirebon Kabupaten Garut Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kabupaten Pangandaran Kota Sukabumi Kota Bandung Kabupaten Bandung Kota Cimahi
	12) Peningkatan kapasitas harmonisasi hubungan industrial	Kabupaten Bogor Kota Depok Kabupaten Cirebon Kabupaten Garut Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kabupaten Pangandaran Kota Sukabumi Kota Bandung Kabupaten Bandung Kota Cimahi
	13) Pengembangan Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Dunia Industri dan UMKM dalam rangka penempatan tenaga kerja	Kabupaten Subang Kabupaten Karawang Kota Bogor Kabupaten Bekasi Kabupaten Cianjur Kabupaten Indramayu Kabupaten Garut Kota Sukabumi
III.	Aspek Infrastruktur	
	1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan terutama di kawasan utara dan selatan Jawa Barat yang dilengkapi fasilitas perlengkapan jalan yang memadai	Seluruh Kabupaten Kota
	2) Peningkatan infrastruktur pengelolaan persampahan yang berorientasi penanganan di hulu melalui pengembangan TPS3R dan TPST;	Seluruh Kabupaten Kota
	3) Peningkatan prasarana pengelolaan air limbah di kawasan permukiman dan kawasan industri	Seluruh Kabupaten Kota
	4) Meningkatkan ketersediaan dan kapasitas SDM pertanian	6 Wilayah Sungai
	5) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perkotaan	Seluruh Kabupaten Kota



No.	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
	6) Peningkatan infrastruktur jaringan irigasi untuk pertanian melalui pembangunan embung/situ dan pengelolaan DAS	Seluruh Kabupaten Kota / 6 Wilayah Sungai
	7) Pengendalian Pencemaran Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas yaitu DAS Citarum, Cilamaya dan Kali Bekasi	1. Kota Bandung 2. Kota Cimahi 3. Kab Bandung 4. Kab Bandung Barat 5. Kab Sumedang 6. Kabupaten Garut 7. Kabupaten Subang 8. Kabupaten Cianjur 9. Kabupaten Purwakarta 10. Kabupaten Karawang 11. Kabupaten Bekasi 12. Kab Bogor 13. Kabupaten Sukabumi 14. Kota Bekasi 15. Kota Bogor 16. Kota Depok
	8) Pemerataan akses terhadap layanan listrik menjangkau seluruh wilayah	Seluruh Kabupaten Kota
	9) Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta pemulihan kualitas lingkungan hidup	kerusakan, serta pemulihan kualitas lingkungan hidup 1. Kota Bandung, Kota Cimahi 2. Kab Bandung 3. Kab Bandung Barat 4. Kab Sumedang 5. Kabupaten Garut 6. Kabupaten Subang 7. Kabupaten Cianjur 8. Kabupaten Purwakarta 9. Kabupaten Karawang 10. Kabupaten Bekasi 11. Kab Bogor 12. Kab Sukabumi 13. Kota Bekasi 14. Kota Bogor 15. Kota Depok
	10) Peningkatan upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan	1. Kota Bandung 2. Kota Cimahi 3. Kab Bandung 4. Kab Bandung Barat 5. Kab Sumedang 6. Kabupaten Garut 7. Kabupaten Subang 8. Kabupaten Cianjur 9. Kabupaten Purwakarta 10. Kabupaten Karawang 11. Kabupaten Bekasi 12. Kab Bogor 13. Kab Sukabumi 14. Kota Bekasi 15. Kota Bogor 16. Kota Depok



No.	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
	11) Rehabilitasi hutan dan lahan Kritis	1. Kabupaten Bogor 2. Kabupaten Bekasi 3. Kabupaten Cianjur 4. Kabupaten Bandung 5. Kabupaten Bandung Barat 6. Kabupaten Sumedang 7. Kabupaten Karawang 8. Kabupaten Sukabumi 9. Kabupaten Cirebon 10. Kabupaten Majalengka 11. Kabupaten Indramayu 12. Kabupaten Subang 13. Kabupaten Purwakarta 14. Kabupaten Kuningan 15. Kabupaten Garut 16. Kabupaten Tasikmalaya 17. Kabupaten Ciamis 18. Kabupaten Pangandaran

Sumber : Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 , diolah bappeda 2024

4.4. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Program pembangunan daerah Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten, terdiri atas Urusan Wajib sebagai urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten yang berkaitan dengan pelayanan dasar, serta Urusan Pilihan sebagai urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2024 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya sebagai berikut :

1. Urusan Bidang Pendidikan :

- 1) Manajemen Pendidikan;

- 2) Kurikulum;
- 3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan ;
- 4) Perizinan Pendidikan ;
- 5) Bahasa dan Sastra.

Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten terdiri atas:

- a) pendidikan anak usia dini;
- b) pendidikan dasar; dan
- c) pendidikan kesetaraan.

2. Urusan Bidang Kesehatan

- 1) Upaya Kesehatan;
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan;
- 3) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman;
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah kabupaten terdiri atas:

- a) pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b) pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c) pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d) pelayanan kesehatan balita;
- e) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f) pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g) pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h) pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k) pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l) pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

3. Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Sumber Daya Air (SDA);
- 2) Air Minum;
- 3) Persampahan;
- 4) Air Limbah;
- 5) Drainase;
- 6) Permukiman;



- 7) Bangunan Gedung;
- 8) Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
- 9) Jalan;
- 10) Jasa Konstruksi;
- 11) Penataan Ruang.

Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten terdiri atas:

- a) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4. Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

- 1) Perumahan;
- 2) Kawasan Permukiman;
- 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
- 4) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU);
- 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten terdiri atas:

- a) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota; dan
- b) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten.

5. Urusan Bidang Ketenteraman, dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat.

- 1) Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 2) Bencana;
- 3) Kebakaran;

Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten terdiri atas:

- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pelayanan informasi rawan bencana;
- c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana;
- e. pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran.

6. Urusan Bidang Sosial

- 1) Pemberdayaan Sosial;



- 2) Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
- 3) Rehabilitasi Sosial;
- 4) Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 5) Penanganan Bencana;
- 6) Taman Makam Pahlawan;

Jenis pelayanan dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten terdiri atas:

- a) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b) rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- d) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2025 disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian kinerja yang direncanakan dalam RPD tahun 2025-2026 dengan turut mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat yang telah dibahas dan disepakati dengan para pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak masyarakat, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan pemerintahan pada proses musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2024 untuk penyusunan RKPD tahun 2025.

Penyusunan rencana program dan kegiatan dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, atas bawah (*top down*) dan bawah atas (*bottom up*), serta pendekatan substansi secara holistik-tematik, integratif, dan spasial dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran RPD tahun 2025-2026 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2025.

Pendanaan program dan kegiatan prioritas, dilaksanakan dengan kolaborasi potensi sumber pendanaan dari dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber pendanaan lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten.

5.1. Rencana Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2025

Program pembangunan daerah tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten, terdiri atas urusan wajib sebagai urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten yang berkaitan dengan pelayanan dasar, serta urusan pilihan sebagai urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

Berdasarkan RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026, program pembangunan daerah dan indikator kinerja yang ingin dicapai tahun 2025 disajikan sebagai berikut:



Tabel 5.1
Program dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Tahun 2025

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Rp	
(1)			(2)			(3)	(4)	(5)	(6)
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.226.539.949.203	
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					1.900.757.977.567	
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP Survey Kepuasan Masyarakat			BB Predikat 84,2 Kategori	1.254.394.301.927	Dinas Pendidikan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Presentase Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga negara usia 7-24 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			65,76 % 82,56 % 96,61 % 84 %	613.700.675.640	Dinas Pendidikan
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan Pendidikan yang menetapkan kurikulum Muatan Lokal Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal			100 % 100 %	1.100.000.000	Dinas Pendidikan
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan			43,46 %	30.038.000.000	Dinas Pendidikan
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Rekomendasi perizinan satuan pendidikan yang diterbitkan Persentase Rekomendasi perizinan satuan Pendidikan yang diterbitkan			100 % 100 %	750.000.000	Dinas Pendidikan
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan Bahasa dan Sastra			30 %	775.000.000	Dinas Pendidikan
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.057.981.731.311	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Publik SKPD Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik UOBK RSUD dr Slamet Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik UOBK RSUD Malangbong Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Puskesmas dan Labkesda SAKIP	86Poin 82Poin 85Poin 83Poin 84Poin	651.186.150.040	Dinas Kesehatan
1	0	0	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Standar Pelayanan Minimal Siklus Hidup persentase akses sanitasi layak Persentase capaian SPM penyakit Persentase capaian UHC Persentase Imunisasi dasar lengkap Persentase puskesmas dengan ketersediaan dengan obat, bahan habis pakai dan vaksin essensial presentase fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah sesuai standar Prevalensi Balita Gizi kurang	100% 3,8% 98% 65% 100% 92% 100% 96%	398.374.145.571	Dinas Kesehatan
1	0	0	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit pemerintah daerah dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	25 %	6.678.157.000	Dinas Kesehatan
1	0	0	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasyankes yang melaksanakan Pelayanan kefarmasian sesuai standar Persentase produk pangan yang diawasi Persentase TPM yang diawasi memenuhi syarat	75% 10% 80%	1.175.093.700	Dinas Kesehatan
1	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) aktif	96 %	568.185.000	Dinas Kesehatan
1	0		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			1.046.556.361.832	
1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai SAKIP	Baik/A Nilai	36.397.914.860	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya yang Terbangun Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	94% 58%	189.353.680.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
							Ruang
1	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jiwa yang Mendapat Akses Air Minum melalui SPAM	91,25 %	83.507.556.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapat Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	68,73 %	48.642.649.500	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Perkotaan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik	55 %	40.148.900.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	0	0	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang Memiliki PBG dan Sertifikat Laik Fungsi	12,32 %	10.672.541.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	0	0	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan, Lingkungan dan Kawasan Strategis yang Tertata	17 %	6.746.976.430	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	0	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Permukaan Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang	60,42 %	624.486.874.442	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	0	1	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan dan Tersertifikasi Persentase Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	100% 49,35%	2.199.719.600	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	0	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Luas Wilayah yang Penggunaannya Sesuai Tata Ruang	85 %	4.399.550.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1 0 4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				132.746.015.975	
1 0 4 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Dinas Perumahan dan Permukiman	B Predikat	10.261.015.975	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 0 4 2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Presentase penanganan rumah koban bencana dan terdampak program pemerintah	100 Persentase	5.985.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 0 4 3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Cakupan Penurunan Luasan Permukiman Kumuh	75,482 ha	8.300.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 0 4 4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Jumlah Rumah yang Tertangani	500 Unit	7.500.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 0 4 5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Luas Kawasan Permukiman dengan PSU yang representatif	222 ha	100.700.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 0 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				47.958.409.067	
1 0 5 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Sakip	A Predikat	8.331.934.806	Satuan Polisi Pamong Praja
1 0 5 2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan Persentase penanganan penegakan perda dan perkara yang terselesaikan Presentase anggota satpol pp dan PPNS yang mendapat pelatihan Presentase pemberdayaan satgas linmas dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	100 % 100 % 43 Jumlah 33 %	8.745.556.700	Satuan Polisi Pamong Praja
1 0 5 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	8.034.415.626	Dinas Pemadam Kebakaran
1 0 5 4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Persentase layanan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	26 %	8.264.911.266	Dinas Pemadam Kebakaran



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja BPBD	80 poin	6.369.741.169	Badan Penanggulan an Bencana Daerah	
1	0	0	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	100 % 100 % 100 %	8.211.849.500	Badan Penanggulan an Bencana Daerah	
1	0		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				40.539.453.451	
1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	80,63 Nilai	19.796.453.451	Dinas Sosial	
1	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan pelatihan	80 %	3.788.000.000	Dinas Sosial	
1	0	0	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Tertangani warga negara migran korban tindakan kekerasan	70 %	155.000.000	Dinas Sosial	
1	0	0	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penanganan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan	100 %	9.675.000.000	Dinas Sosial	
1	0	0	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Kelompok rentan yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	80 %	2.750.000.000	Dinas Sosial	
1	0	0	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan korban bencana alam dan sosial	100 %	4.025.000.000	Dinas Sosial	
1	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pelayanan pengelolaan taman makam pahlawan	75,8 %	350.000.000	Dinas Sosial	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				593.716.542.975	
2	0		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				20.469.665.916	
2	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	87 %	9.506.665.916	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	0	0	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Kompeten	5.32 Persen	6.008.000.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	0	0	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja	15 %	4.080.000.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	0	0	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	72.27 %	875.000.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	0		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				15.155.979.000	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8							
2	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Pelayanan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	9.273.500.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	0	0	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Jumlah Lembaga Pemerintah/ Swasta/ Ormas yang Responsif Gender	75 %	963.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	0	0	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Jumlah Lembaga Pemerintah/ Swasta/ Ormas yang Responsif Gender	100 %	649.479.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	0	0	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah Desa Yang Berkategori DRPPA	25 Jumlah	320.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
2 0 0 8 5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase Pengolahan dan Analisis dan Penyajian Data	75 %	150.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 0 0 8 6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Lembaga Pemerintah/ Swasta/ Ormas ramah Anak	80 %	1.670.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 0 0 8 7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase Mengenai Perlindungan Khusus Anak	85 %	2.130.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 0 9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				16.292.957.448	
2 0 9 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan Pelayanan Kantor	100 %	7.460.873.869	Dinas Ketahanan Pangan
2 0 9 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		Ketersediaan energi perkapita	2520 kkal/kap/hari	1.544.111.350	Dinas Ketahanan Pangan
2 0 9 3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		CV Harga Beras Konsumsi Protein Perkapita	5 %	6.143.455.835	Dinas Ketahanan Pangan
2 0 9 4	PROGRAM PENANGANAN KERAHANAN PANGAN		Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	9,95 %	518.712.550	Dinas Ketahanan Pangan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
2 0 0 9 5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Persentase Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	81 %	625.803.844	Dinas Ketahanan Pangan
2 1 0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				925.000.000	
2 1 0 0 3	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM		Persentase Data Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	Dinas Perumahan dan Permukiman
2 1 0 0 4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	60 %	175.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
2 1 0 0 6	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		Prosentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100 %	600.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
2 1 0 0 7	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT		Prosentase Penetapan Tanah Ulayat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	100 %	150.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
2 1 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				126.455.094.780	
2 1 1 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %	27.488.794.780	Dinas Lingkungan Hidup
2 1 1 0 2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase dokumen lingkungan yang dievaluasi	100 Persen	1.540.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2 1 1 0 3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,33 poin	9.339.800.000	Dinas Lingkungan Hidup
2 1 1 0 4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota)	0,188 persen	8.996.500.000	Dinas Lingkungan Hidup
2 1 1 0 5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase pelaporan pengendalian B3 dan Limbah B3	100 Persen	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2 1 1 0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan PPLH	2 Dokumen	1.115.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2 1 1 0 7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		Jumlah status masyarakat hukum adat di kabupaten/ kota	2 lokasi	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)
2 1 1 8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			Persentase kelurahan/desa berbudaya lingkungan	20 %	225.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2 1 1 9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			Persentase kelurahan/desa berbudaya lingkungan	20 persen	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2 1 1 0	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			Persentase penyelesaian kasus lingkungan hidup	100 Persen	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2 1 1 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			Tingkat Pengelolaan Sampah	35 persen	77.200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2 1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					26.966.857.002	
2 1 2 0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase kualitas penunjang layanan adminduk.	100 Persen	16.211.727.066	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 1 2 2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			Persentase Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital) Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Persentase Penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP Elektronik	35Persen 60Persen 100Persen	5.997.154.060	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 1 2 3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			Persentase Kepemilikan Buku Pokok Pemakaman (BPP) di Desa/Kelurahan/Pemukaman Umum/Pemukaman Keluarga yang ada tugasnya Persentase Pencapaian cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun	99Persen 99% 76Persen	633.575.344	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 1 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Jumlah Mitra yang sudah melakukan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Persentase Dokumen Kependudukan yang dihasilkan sesuai dengan Kewajiban	20Dokumen 100Persen 15Dokumen 6Mitra	3.739.750.532	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 1 2 5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			Jumlah Pelaporan penyajian data kependudukan dan Penyusunan Buku Profil Kependudukan	2 Laporan	384.650.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)
2	1	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			45.391.837.843
2	1	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja DPMD	A Predikat	9.383.061.843	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	1	0	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	25 %	900.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	1	0	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase peningkatan kerjasama desa yang terjalin	6,41 %	1.500.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	1	0	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	100 %	12.408.776.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	1	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan	100 %	21.200.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	1	4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			33.229.254.260
2	1	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %	1.698.629.260	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	1	0	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Jumlah Kecamatan Yang Mempunyai Data dan Informasi Program Bangga Kencana dan PPPA	100 %	8.100.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
2 1 4 0 3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase Kesertaan ber KB (CU/PUS)	72,18 %	14.660.325.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 1 4 0 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga	75,25 %	8.770.300.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	1	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		73.700.719.528	
2 1 5 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat Ketersediaan Fasilitas Penunjang Pelayanan Administrasi, SDM dan Keuangan.	100 %	49.651.519.528	Dinas Perhubungan
2 1 5 0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan Persentase Sosialisasi Keselamatan Perhubungan Tingkat ketersediaan angkutan umum yang beroperasi Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan	95,27 % 87,89 % 96,81 % 88,91 %	23.849.200.000	Dinas Perhubungan
2 1 5 0 3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase Sarana Pelayaran yang Laik Layar	95,55 %	200.000.000	Dinas Perhubungan
2 1 5 0 5	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		Persentase Sarana Prasarana Perkeretaapian	-	-	Dinas Perhubungan
2	1	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		26.650.993.997	
2 1 6 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %	17.469.293.897	Dinas Komunikasi dan Informatika



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
2	1	0	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi publik yang didesiminasikan kepada masyarakat	90 %	4.568.915.600	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	1	0	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat kematangan Indeks SPBE Pemkab Garut	1,35 Poin	4.612.784.500	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				21.000.000.000	
2	1	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi penunjang	100 %	9.392.363.291	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
2	1	0	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase KSP/ USP Berizin	3 %	227.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
2	1	0	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang mematuhi peraturan perundang undangan	7,5 %	300.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
2	1	0	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Bersertifikat Kesehatan Koperasi	5,3 %	310.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
2	1	0	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang ditingkatkan Kompetensinya	10.3 %	385.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
2	1	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diberikan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	2.52 %	1.250.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
2	1	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha Formal	2.32 %	7.685.636.709	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
2	1	0	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang Difasilitasi Pengembangan Usaha	1,18 %	1.450.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
2	1	0	PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI	Persentase minat masyarakat yang diberikan penyuluhan terhadap pendirian koperasi	-	-	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)
							dan Menengah
2	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			17.524.935.502	
2	1	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100%%	13.859.194.602	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1	0	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor	10 %	771.600.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1	0	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor yang berminat untuk Investasi	4 Investor	672.905.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1	0	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Tingkat Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	100 %	1.082.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1	0	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan penanaman modal/LKPM	30 %	827.235.900	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1	0	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100 %	312.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA			137.196.958.871	
2	1	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya nilai SAKIP	BB Predikat	24.677.885.462	Dinas Pemuda dan Olah Raga



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
2 1 9 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Peningkatan Layanan Kepemudaan Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	65 % 100 %	11.161.519.321	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 1 9 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Indek Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga Jumlah atlet berprestasi di tingkat provinsi dan nasional Persentase Jumlah Desa yang Memiliki Sarana Prasarana Keolahragaan	65,23 % 40 Orang 189 Unit	98.445.611.612	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 1 9 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Persentase SDM Kepramukaan yang telah mendapatkan pendidikan dasar kepramukaan	89,3 %	2.911.942.476	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 2 0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				600.000.000	
2 2 0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Indeks Pembangunan Statistik	3 Poin	600.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 2 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				1.500.000.000	
2 2 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Indeks keamanan Informasi (INDEKS KAMI)	400 Angka	1.500.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 2 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				14.019.104.283	
2 2 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	80 %	11.707.305.303	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 2 2 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase Rincian Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dimanfaatkan dan dikembangkan	70 %	1.491.204.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 2 2 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Jumlah Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	-	-	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 2 2 4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Jumlah Sejarah lokal yang terdokumentasikan	-	-	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 2 2 5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	3 Buah	630.273.980	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 2 2 6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		Kepuasan Pengunjung Museum (Persentase)	80 %	190.321.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)
2	2	1	0	PROGRAM PERFILMAN NASIONAL	Jumlah Pelaku Perfilman yang terbina	-	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	2	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		15.053.908.200	
2	2	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80 poin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2	0	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	jumlah pengunjung perpustakaan (pemustaka)	43000pemustaka	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2	0	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	22 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2	4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		1.583.276.345	
2	2	0	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah Arsip Dinamis, Arsip Statis dan Simpul JIKN Kabupaten/Kota yang dikelola	84 Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2	0	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan	20 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		330.108.505.584	
3	2	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		39.747.000.000	
3	2	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	95 %	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	2	0	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Jumlah Prasarana dan sarana Perikanan Tangkap Peningkatan Produksi perikanan tangkap Peningkatan SDM Perikanan Tangkap	50Unit/Tahun 7Kelompok/Tahun 128Ton/Tahun	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	2	0	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	jumlah produksi perikanan pada tahun berkenaan/luas lahan budidaya peningkatan produksi perikanan budiaya dalam 1 tahun Peningkatan SDM Perikanan Budidaya	10Kelompok/Tahun 4kg/m2 732Ton/Tahun	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	2	0	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rasio Lokasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	25 %	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	2	0	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	3 %	Dinas Perikanan dan Peternakan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)
3 2 6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					7.728.526.584	
3 2 6 0 2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Persentase Kepuasan Wisatawan	5 %	4.890.566.784	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 2 6 0 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			Persentase Media yang digunakan	85 %	750.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 2 6 0 4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			Jumlah Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi	0,01	210.888.800	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 2 6 0 5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			Kepuasan Konsumen Produk Ekonomi Kreatif (persentase)	0,29	1.877.071.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 2 7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					134.557.852.000	
3 2 7 0 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			Peningkatan populasi ternak dalam satu tahun Peningkatan produksi hasil peternakan dalam satu tahun	1% 1883Ton/Tahun 1%	10.850.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 2 7 0 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			Jumlah prasarana pertanian sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik	30 Persen	8.350.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 2 7 0 4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			Cakupan wilayah pelayanan kesehatan hewan Cakupan wilayah pelayanan kesehatan masyarakat vetriner	20 %	3.750.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 2 7 0 5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			Cakupan wilayah pengendalian dan penanggulangan bencana	5 Wilayah	500.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 2 7 0 6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			Persentase peningkatan pelaku usaha yang mengurus perizinan	3 %	150.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 2 7 0 7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			Peningkatan Kelompok Tani yang melakukan Pola Usaha Agribisnis	10 %	500.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 2 7 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %	35.330.276.000	Dinas Pertanian
3 2 7 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			Indeks Ketersediaan Sarana yang sesuai peruntukannya	0,085 poin	17.912.076.000	Dinas Pertanian
3 2 7 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	0,103 poin	49.432.500.000	Dinas Pertanian



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)
3 2 7 5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			Persentase Fasilitasi Penaggulangan Bencana	10 %	1.068.000.000	Dinas Pertanian
3 2 7 6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Pertanian yang diberikan	5 %	340.000.000	Dinas Pertanian
3 2 7 7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			Prosentase peningkatan SDM penyuluh melalui pelatihan	10 %	6.375.000.000	Dinas Pertanian
3 2 9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					160.000.000	
3 2 9 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	-	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3 2 9 5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN			Persentase perusahaan yang berizin	27%	160.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3 3 0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					113.103.000.000	
3 3 0 2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai dengan ketentuan	25Pelaku Usaha	320.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3 3 0 3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	3 Unit	104.050.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3 3 0 4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			Persentase ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	15 %	2.240.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3 3 0 5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			Jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor	7 Sektor Usaha	5.000.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
							Sumber Daya Mineral
3	306		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	prosentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa	43 %	500.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	307		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	jumlah produk yg dipromosikan	16 Jenis	993.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	311		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				34.612.127.000
3	311	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %	21.047.127.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	312	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan jumlah industri kecil	1 %	13.350.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	313	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	"Jumlah Industri memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang dimonitor dan dikeluarkan oleh instansi terkait"	10 IKM	115.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	314	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas	0,35 %	100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	322		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				200.000.000
3	323	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Peningkatan Keterampilan Calon Transmigran	32 Orang	200.000.000	Dinas Tenaga Kerja Dan



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
							Transmigrasi
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			232.000.649.240	
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			113.142.357.823	
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase organisasi perangkat daerah yang tepat struktur tepat fungsi Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	97 % 98 % 98 %	72.482.179.647	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Implementasi Bahan Kebijakan lingkup Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Prosentase Koordinasi Pemerintahan Persentase produk rancangan produk hukum yang dikaji Persentase Kerjasama anatar Pemerintah daerah yang difasilitasi	97 % 98 % 98 % 98 %	36.636.893.921	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pengendalian perkembangan usaha BUMD Persentase kualitas pengendalian pembangunan Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu Persentase rumusan bahan kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi dokumen kebijakan SDA, bidang perekonomian, ketahanan pangan, dan pertanian, investasi daerah	98 % 98 % 98 % 98 %	4.023.284.255	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut
4	02		SEKRETARIAT DPRD			118.858.291.417	
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	A Predikat	68.307.315.273	Sekretariat DPRD Kabupaten Garut
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	88,55 Nilai	50.550.976.144	Sekretariat DPRD Kabupaten Garut
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			853.590.849.683	
5	01		PERENCANAAN			18.068.396.291	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Bappeda	100 %	12.087.992.651	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	0	0	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase hasil Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkontribusi pada Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah Persentase hasil Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkontribusi pada Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	100% 100%	2.467.502.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	0	0	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang berkontribusi pada Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang berkontribusi pada Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang berkontribusi pada Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang berkontribusi pada Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang berkontribusi pada Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah Persentase Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang berkontribusi pada Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	40,70% 80,40% 100% 56,80% 62,90% 87,90%	3.512.901.640	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	0	2	KEUANGAN			813.614.136.708	
5	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja BPKAD	100 %	12.288.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	752.986.000.000	Badan Pengelolaan



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
							Keuangan dan Aset Daerah	
5	0 2	0 3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.185.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	0 2	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Bapenda	100 %	31.418.275.808	Badan Pendapatan Daerah	
5	0 2	0 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung SKM Persentase Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Realisasi Retribusi Daerah	100 %	11.736.860.900	Badan Pendapatan Daerah	
5	0 3		KEPEGAWAIAN				17.293.146.761	
5	0 3	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan BKD	98 %	12.343.386.261	Badan Kepegawaian dan Diklat	
5	0 3	0 2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Penerapan Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit	100 %	4.949.760.500	Badan Kepegawaian dan Diklat	
5	0 4		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				2.665.231.923	
5	0 4	0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi	70 %	2.665.231.923	Badan Kepegawaian dan Diklat	
5	0 5		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.949.938.000	
5	0 5	0 2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah yang Berkontribusi pada Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	100 %	1.949.938.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				45.471.143.317	
6	0 1		INSPEKTORAT DAERAH				45.471.143.317	
6	0 1	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai PK APIP pada unsur akuntabilitas manajemen dan kinerja, pengelolaan SDM, budaya dan hubungan organisasi serta tata kelola APIP	1,7 Poin	28.138.750.892	Inspektorat Daerah	
6	0 1	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	NILAI KAPABILITAS APIP ELEMEN PERAN DAN LAYANAN Tingkat Maturitas SPIP Pada Penetapan Dan	1,1 Poin 3,1 Poin	14.331.936.750	Inspektorat Daerah	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Pencapaian Tujuan			
6	0 1	0 3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Nilai Integritas Pencegahan Korupsi Nilai Kapabilitas APIP pada Elemen Praktik Profesional Persentase Capaian MCP KPK Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko Persentase Unit Pelayanan yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas	69,6 Poin 0,45 Level 93 % 0,033 20 %	3.000.455.675	Inspektorat Daerah
6	0 1	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	-	-	Kecamatan Leuwigoong
6	0 1	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	-	-	Kecamatan Pamulihan
7			UNSUR KEWILAYAHAN				208.484.322.246
7	0 1		KECAMATAN				208.484.322.246
7	0 1	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.099.138.792	Kecamatan Banjarwangi
7	0 1	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	200.000.000	Kecamatan Banjarwangi
7	0 1	0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	15.000.000	Kecamatan Banjarwangi
7	0 1	0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	112.800.000	Kecamatan Banjarwangi
7	0 1	0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	130.000.000	Kecamatan Banjarwangi
7	0 1	0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	50.000.000	Kecamatan Banjarwangi
7	0 1	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.494.087.464	Kecamatan Banyuresmi
7	0 1	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	381.741.996	Kecamatan Banyuresmi
7	0 1	0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	15.000.300	Kecamatan Banyuresmi



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)
7 0 0 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	115.000.000	Kecamatan Banyuwesmi
7 0 0 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	229.990.140	Kecamatan Banyuwesmi
7 0 0 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	70.000.870	Kecamatan Banyuwesmi
7 0 0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan	100 %	2.386.307.257	Kecamatan Bayongbong
7 0 0 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	187.445.000	Kecamatan Bayongbong
7 0 0 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	15.000.000	Kecamatan Bayongbong
7 0 0 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	63.632.600	Kecamatan Bayongbong
7 0 0 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	225.000.000	Kecamatan Bayongbong
7 0 0 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	59.976.228	Kecamatan Bayongbong
7 0 0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan	100 %	1.900.116.189	Kecamatan Balubur Limbangan
7 0 0 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	608.559.841	Kecamatan Balubur Limbangan
7 0 0 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	535.548.524	Kecamatan Balubur Limbangan
7 0 0 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	784.501.500	Kecamatan Balubur Limbangan
7 0 0 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	52.080.600	Kecamatan Balubur Limbangan
7 0 0 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	373.781.082	Kecamatan Balubur Limbangan
7 0 0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan	100 %	2.580.456.578	Kecamatan Bungbulang



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	198.616.800	Kecamatan Bungbulang
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	20.000.000	Kecamatan Bungbulang
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	196.400.000	Kecamatan Bungbulang
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	245.000.000	Kecamatan Bungbulang
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	70.000.000	Kecamatan Bungbulang
7	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan	100 %	1.834.806.258	Kecamatan Caringin
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	134.885.900	Kecamatan Caringin
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	18.568.000	Kecamatan Caringin
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	254.799.600	Kecamatan Caringin
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	116.399.000	Kecamatan Caringin
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	55.200.600	Kecamatan Caringin
7	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.351.088.432	Kecamatan Cibalong
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	286.121.891	Kecamatan Cibalong
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	26.620.000	Kecamatan Cibalong
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	78.141.471	Kecamatan Cibalong
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100.000.000	Kecamatan Cibalong
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	25.746.820	Kecamatan Cibalong
7	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.573.911.884	Kecamatan Cibatuh



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	164.997.616	Kecamatan Cibatu
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	26.502.000	Kecamatan Cibatu
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	129.482.000	Kecamatan Cibatu
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	255.000.000	Kecamatan Cibatu
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	50.106.500	Kecamatan Cibatu
7	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.903.045.784	Kecamatan Cibiuk
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	137.373.634	Kecamatan Cibiuk
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	54.694.000	Kecamatan Cibiuk
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	52.392.169	Kecamatan Cibiuk
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	124.999.700	Kecamatan Cibiuk
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	40.541.100	Kecamatan Cibiuk
7	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.105.643.700	Kecamatan Cigedug
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	92.204.300	Kecamatan Cigedug
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	25.250.000	Kecamatan Cigedug
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100.660.500	Kecamatan Cigedug
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	22.844.400	Kecamatan Cigedug
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	46.919.900	Kecamatan Cigedug
7	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.070.077.366	Kecamatan Cihurip



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	190.000.000	Kecamatan Cihurip
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	15.000.000	Kecamatan Cihurip
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	153.000.000	Kecamatan Cihurip
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	130.000.000	Kecamatan Cihurip
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	70.000.000	Kecamatan Cihurip
7	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.465.750.166	Kecamatan Cikajang
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	344.900.020	Kecamatan Cikajang
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	35.100.000	Kecamatan Cikajang
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	15.000.000	Kecamatan Cikajang
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	200.000.000	Kecamatan Cikajang
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	-	-	Kecamatan Cikajang
7	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.091.361.372	Kecamatan Cikelet
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	115.000.000	Kecamatan Cikelet
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	48.800.000	Kecamatan Cikelet
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	175.000.000	Kecamatan Cikelet
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	220.000.000	Kecamatan Cikelet
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	30.000.000	Kecamatan Cikelet
7	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.391.073.114	Kecamatan Cilawu



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	263.178.615	Kecamatan Cilawu
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	39.926.400	Kecamatan Cilawu
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	149.931.500	Kecamatan Cilawu
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	204.875.400	Kecamatan Cilawu
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	34.525.500	Kecamatan Cilawu
7	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.298.763.053	Kecamatan Cisewu
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	126.153.000	Kecamatan Cisewu
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	35.000.000	Kecamatan Cisewu
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	160.600.000	Kecamatan Cisewu
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	210.198.570	Kecamatan Cisewu
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	70.263.000	Kecamatan Cisewu
7	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.783.860.600	Kecamatan Cisompet
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	195.000.000	Kecamatan Cisompet
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	35.000.000	Kecamatan Cisompet
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	150.000.000	Kecamatan Cisompet
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	200.000.000	Kecamatan Cisompet
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	45.000.000	Kecamatan Cisompet
7	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.551.404.927	Kecamatan Cisarupan



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	184.173.300	Kecamatan Cisarupan
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	14.550.000	Kecamatan Cisarupan
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	56.579.900	Kecamatan Cisarupan
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	229.999.700	Kecamatan Cisarupan
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	49.666.300	Kecamatan Cisarupan
7	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	17.450.478.085	Kecamatan Garut Kota
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	454.439.144	Kecamatan Garut Kota
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	15.025.592.820	Kecamatan Garut Kota
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	185.200.000	Kecamatan Garut Kota
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	230.000.000	Kecamatan Garut Kota
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	20.000.000	Kecamatan Garut Kota
7	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.709.557.295	Kecamatan Kadungora
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	239.524.800	Kecamatan Kadungora
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	38.320.400	Kecamatan Kadungora
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	176.438.800	Kecamatan Kadungora
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	233.552.000	Kecamatan Kadungora
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	62.958.100	Kecamatan Kadungora
7	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.877.563.301	Kecamatan Karangtengah



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	190.000.000	Kecamatan Karangtengah
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	15.000.000	Kecamatan Karangtengah
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	72.000.000	Kecamatan Karangtengah
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	30.000.000	Kecamatan Karangtengah
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	70.000.000	Kecamatan Karangtengah
7	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	9.060.870.932	Kecamatan Karangpawitan
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	347.190.780	Kecamatan Karangpawitan
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	5.008.379.200	Kecamatan Karangpawitan
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	34.105.000	Kecamatan Karangpawitan
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	230.000.000	Kecamatan Karangpawitan
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	92.038.900	Kecamatan Karangpawitan
7	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.874.681.379	Kecamatan Kersamanah
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	189.999.844	Kecamatan Kersamanah
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	15.000.000	Kecamatan Kersamanah
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	103.895.200	Kecamatan Kersamanah
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	29.998.300	Kecamatan Kersamanah
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	70.000.000	Kecamatan Kersamanah



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.732.830.000	Kecamatan Leles
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	390.280.000	Kecamatan Leles
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	35.035.400	Kecamatan Leles
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	205.600.900	Kecamatan Leles
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	230.170.200	Kecamatan Leles
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	56.083.500	Kecamatan Leles
7	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %	2.187.876.092	Kecamatan Leuwigoong
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	52.448.895	Kecamatan Leuwigoong
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	18.100.000	Kecamatan Leuwigoong
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	109.700.000	Kecamatan Leuwigoong
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	119.999.600	Kecamatan Leuwigoong
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	30.000.000	Kecamatan Leuwigoong
7	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.491.821.134	Kecamatan Malangbong
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	331.800.000	Kecamatan Malangbong
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	25.000.000	Kecamatan Malangbong
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	151.000.000	Kecamatan Malangbong
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	225.000.000	Kecamatan Malangbong
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	75.000.000	Kecamatan Malangbong



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
7 0 1	0 1	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.981.954.067	Kecamatan Mekarmukti
7 0 1	0 1	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	80.000.000	Kecamatan Mekarmukti
7 0 1	0 1	0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	15.000.000	Kecamatan Mekarmukti
7 0 1	0 1	0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	226.400.000	Kecamatan Mekarmukti
7 0 1	0 1	0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	70.000.000	Kecamatan Mekarmukti
7 0 1	0 1	0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	65.000.000	Kecamatan Mekarmukti
7 0 1	0 1	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.960.880.527	Kecamatan Pakenjeng
7 0 1	0 1	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	126.500.000	Kecamatan Pakenjeng
7 0 1	0 1	0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	26.236.000	Kecamatan Pakenjeng
7 0 1	0 1	0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	140.000.000	Kecamatan Pakenjeng
7 0 1	0 1	0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	220.000.000	Kecamatan Pakenjeng
7 0 1	0 1	0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	40.000.000	Kecamatan Pakenjeng
7 0 1	0 1	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.933.081.448	Kecamatan Pameungpeuk
7 0 1	0 1	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	280.000.000	Kecamatan Pameungpeuk
7 0 1	0 1	0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	10.000.000	Kecamatan Pameungpeuk
7 0 1	0 1	0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	115.600.000	Kecamatan Pameungpeuk
7 0 1	0 1	0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	225.000.000	Kecamatan Pameungpeuk
7 0 1	0 1	0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	66.000.000	Kecamatan Pameungpeuk



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %	1.817.178.094	Kecamatan Pamulihan
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	190.582.500	Kecamatan Pamulihan
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	17.179.400	Kecamatan Pamulihan
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	139.108.360	Kecamatan Pamulihan
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	130.050.400	Kecamatan Pamulihan
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	77.448.200	Kecamatan Pamulihan
7	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.060.883.103	Kecamatan Pangatikan
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	162.417.360	Kecamatan Pangatikan
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	41.235.660	Kecamatan Pangatikan
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	137.583.000	Kecamatan Pangatikan
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	15.805.800	Kecamatan Pangatikan
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	25.450.230	Kecamatan Pangatikan
7	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.933.100.771	Kecamatan Pasirwangi
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	1Laporan 100%	165.000.000	Kecamatan Pasirwangi
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	15.000.000	Kecamatan Pasirwangi
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	91.000.000	Kecamatan Pasirwangi
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	130.000.000	Kecamatan Pasirwangi
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	55.000.000	Kecamatan Pasirwangi



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.270.587.213	Kecamatan Peundeuy
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	190.000.000	Kecamatan Peundeuy
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	15.000.000	Kecamatan Peundeuy
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	93.800.000	Kecamatan Peundeuy
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	30.000.000	Kecamatan Peundeuy
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	70.000.000	Kecamatan Peundeuy
7	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.387.992.193	Kecamatan Samarang
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	422.243.690	Kecamatan Samarang
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	30.000.000	Kecamatan Samarang
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	155.980.000	Kecamatan Samarang
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	235.000.110	Kecamatan Samarang
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	-	-	Kecamatan Samarang
7	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.531.190.479	Kecamatan Selaawi
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	135.000.000	Kecamatan Selaawi
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	60.000.000	Kecamatan Selaawi
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	235.000.000	Kecamatan Selaawi
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	60.000.000	Kecamatan Selaawi
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	120.000.000	Kecamatan Selaawi



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	
7 0 1	0 1	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.063.370.224	Kecamatan Singajaya
7 0 1	0 1	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	155.000.000	Kecamatan Singajaya
7 0 1	0 1	0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	50.000.000	Kecamatan Singajaya
7 0 1	0 1	0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	182.000.000	Kecamatan Singajaya
7 0 1	0 1	0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	215.000.000	Kecamatan Singajaya
7 0 1	0 1	0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	30.000.000	Kecamatan Singajaya
7 0 1	0 1	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.967.705.907	Kecamatan Sucinaraja
7 0 1	0 1	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	190.000.000	Kecamatan Sucinaraja
7 0 1	0 1	0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	15.000.000	Kecamatan Sucinaraja
7 0 1	0 1	0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	15.000.000	Kecamatan Sucinaraja
7 0 1	0 1	0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	130.000.000	Kecamatan Sucinaraja
7 0 1	0 1	0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	70.000.000	Kecamatan Sucinaraja
7 0 1	0 1	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.617.706.385	Kecamatan Sukaresmi
7 0 1	0 1	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	115.000.000	Kecamatan Sukaresmi
7 0 1	0 1	0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	30.000.000	Kecamatan Sukaresmi
7 0 1	0 1	0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	129.000.000	Kecamatan Sukaresmi
7 0 1	0 1	0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	15.000.000	Kecamatan Sukaresmi
7 0 1	0 1	0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	50.000.000	Kecamatan Sukaresmi



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
7 0 1 1	0 1 1	0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.099.155.485	Kecamatan Sukawening
7 0 1 2	0 1 2	0 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	190.000.000	Kecamatan Sukawening
7 0 1 3	0 1 3	0 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	25.000.000	Kecamatan Sukawening
7 0 1 4	0 1 4	0 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	188.800.000	Kecamatan Sukawening
7 0 1 5	0 1 5	0 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	230.000.000	Kecamatan Sukawening
7 0 1 6	0 1 6	0 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	55.000.000	Kecamatan Sukawening
7 0 1 1	0 1 1	0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.678.855.351	Kecamatan Talegong
7 0 1 2	0 1 2	0 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	142.560.260	Kecamatan Talegong
7 0 1 3	0 1 3	0 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	15.006.500	Kecamatan Talegong
7 0 1 4	0 1 4	0 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	129.157.400	Kecamatan Talegong
7 0 1 5	0 1 5	0 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	114.970.300	Kecamatan Talegong
7 0 1 6	0 1 6	0 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	45.045.600	Kecamatan Talegong
7 0 1 1	0 1 1	0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.786.626.785	Kecamatan Tarogong Kaler
7 0 1 2	0 1 2	0 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	398.130.137	Kecamatan Tarogong Kaler
7 0 1 3	0 1 3	0 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	1.420.559.050	Kecamatan Tarogong Kaler
7 0 1 4	0 1 4	0 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	231.792.000	Kecamatan Tarogong Kaler
7 0 1 5	0 1 5	0 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	34.738.400	Kecamatan Tarogong Kaler



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
7 0 0 1 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	219.402.800	Kecamatan Tarong Kaler
7 0 0 1 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	12.292.565.406	Kecamatan Tarong Kidul
7 0 0 1 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	405.874.794	Kecamatan Tarong Kidul
7 0 0 1 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	6.619.800.000	Kecamatan Tarong Kidul
7 0 0 1 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	101.736.000	Kecamatan Tarong Kidul
7 0 0 1 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	230.023.800	Kecamatan Tarong Kidul
7 0 0 1 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	50.000.000	Kecamatan Tarong Kidul
7 0 0 1 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.349.067.464	Kecamatan Wanaraja
7 0 0 1 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	295.575.000	Kecamatan Wanaraja
7 0 0 1 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	30.000.000	Kecamatan Wanaraja
7 0 0 1 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	70.887.969	Kecamatan Wanaraja
7 0 0 1 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	15.000.000	Kecamatan Wanaraja
7 0 0 1 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	94.369.900	Kecamatan Wanaraja
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				21.387.386.435	
8 0 1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				21.387.386.435	
8 0 1 1 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BB Predikat	5.259.637.735	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
8	0	0	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pembinaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang terfasilitasi	100 Persen	980.724.900	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	0	0	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pemilih yang mengikuti pendidikan politik	100 Persen	4.345.084.200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang aktif	100 Persen	3.010.392.200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang terfasilitasi	100 Persen	971.547.400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	0	0	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang ditangani	100 Persen	6.820.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
TOTAL							6.511.299.348.683	

Sumber : RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026, diolah Bappeda 2024 yang dikelola dalam SIPD

5.2. Rencana Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025

Pelaksanaan program pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada bagian sebelumnya, diprioritaskan pula untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Kegiatan pembangunan daerah yang terkait dengan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.2
Rencana Kegiatan dan Alokasi Pendanaan
Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025

SPM/ Layanan SPM		Perangkat Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1. SPM BIDANG PENDIDIKAN					
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	150.000.000
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.200.000.000
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	400.000.000
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	300.000.000
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	51.066.000.000
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	200.000.000
2	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.600.000.000
				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan	24.438.000.000



SPM/ Layanan SPM		Perangkat Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
				Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	200.000.000
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	7.200.000.000
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	360.000.000
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	550.000.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	34.050.000.000
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
			Pembangunan Ruang Kelas Baru		5.280.000.000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		360.000.000
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		350.000.000
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		200.000.000
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		118.678.700.000
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		200.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		10.120.000.000
3	Pendidikan Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	300.000.000
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.100.000.000
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	41.339.700.000
2. SPM BIDANG KESEHATAN					
1	Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	110.000.000
2	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	664.618.000



SPM/ Layanan SPM		Perangkat Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
			Kabupaten/Kota		
3	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	110.000.000
4	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	110.000.000
5	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	176.000.000
6	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.115.400.000
7	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.904.890.000
8	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	110.000.000
9	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	275.000.000
10	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	110.024.000
11	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3.259.062.000
12	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	137.500.000
3. SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					



SPM/ Layanan SPM		Perangkat Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	69.207.556.000
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	300.000.000
				Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	14.000.000.000
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	35.000.000.000
				Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	13.242.649.500
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	400.000.000
4. SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN					
1	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	Dinas Perumahan dan Permukiman	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	600.000.000
				Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	600.000.000
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	Dinas Perumahan dan Permukiman	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	385.000.000
				Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2.800.000.000
				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.000.000.000
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	600.000.000
5. SPM BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.850.438.200
				Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.621.000.000



SPM/ Layanan SPM	Perangkat Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	175.282.400
			Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	26.899.600
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	780.000.000
3	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	255.144.600
			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	178.481.400
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	3.273.032.000
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	246.384.615
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	200.000.000
			Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.311.494.600
			Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100.000.000
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	100.000.000
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100.000.000
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	250.000.000
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000
			Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	780.000.000
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	



SPM/ Layanan SPM		Perangkat Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
6. SPM BIDANG SOSIAL					
1	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	200.000.000
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				250.000.000	
Penyediaan Makanan				1.000.000.000	
Penyediaan Sandang				300.000.000	
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				250.000.000	
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	150.000.000
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	650.000.000
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	750.000.000
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	300.000.000
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	350.000.000
				Pemberian Layanan Kedaruratan	800.000.000
				Pemberian Layanan Rujukan	150.000.000
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	150.000.000
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	150.000.000
				Penyediaan Alat Bantu	700.000.000
				Penyediaan Permakanan	750.000.000
				Penyediaan Sandang	600.000.000
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	150.000.000
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	650.000.000
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	750.000.000
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	300.000.000



SPM/ Layanan SPM	Perangkat Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	350.000.000
			Pemberian Layanan Kedaruratan	800.000.000
			Pemberian Layanan Rujukan	150.000.000
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	150.000.000
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	150.000.000
			Penyediaan Alat Bantu	700.000.000
			Penyediaan Permakanan	750.000.000
			Penyediaan Sandang	600.000.000
4	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	150.000.000
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	650.000.000
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	750.000.000
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	300.000.000
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	350.000.000
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	800.000.000
			Pemberian Layanan Kedaruratan	150.000.000
			Pemberian Layanan Rujukan	150.000.000
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	150.000.000
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	700.000.000
			Penyediaan Alat Bantu	750.000.000
			Penyediaan Permakanan	600.000.000
			Penyediaan Sandang	
5	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	150.000.000
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	650.000.000
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	750.000.000
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	300.000.000
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	



SPM/ Layanan SPM	Perangkat Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
			Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	350.000.000
			Pemberian Layanan Kedaruratan	800.000.000
			Pemberian Layanan Rujukan	150.000.000
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	150.000.000
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	150.000.000
			Penyediaan Alat Bantu	700.000.000
			Penyediaan Permakanan	750.000.000
			Penyediaan Sandang	600.000.000
Total Anggaran				486.478.256.915

Sumber: Hasil Pengolahan Data Input SIPD, tahun 2024

5.3. Rencana Kegiatan Prioritas Tahun 2025

5.3.1 Rencana Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025

Pelaksanaan program pembangunan daerah diprioritaskan pula untuk mendanai urusan terkait upaya penanggulangan kemiskinan, khususnya penanganan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan menjadi 0 (nol) persen pada tahun 2024, sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDG's yaitu menghapus kemiskinan pada tahun 2030. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yaitu melalui strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meminimalkan kantong kemiskinan. Kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Garut yang terkait dengan upaya penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.3
Rencana Kegiatan dan Alokasi Pendanaan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025

Strategi	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Anggaran
Mengurangi Beban Pengeluaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	250.000.000
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	224.703.600
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	155.639.700
		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	189.960.000



Strategi	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Anggaran
	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.100.421.000
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	73.150.000.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	110.000.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	664.618.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	200.000.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	110.000.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	110.000.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	87.890.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.305.490.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	176.000.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.115.400.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.904.890.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	110.000.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	275.000.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	110.024.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3.259.062.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	137.500.000
	Dinas Ketahanan Pangan	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	4.435.639.700
	Dinas Pendidikan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	900.000.000
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	150.000.000
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	100.000.000
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	200.000.000
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	200.000.000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	41.339.700.000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	51.066.000.000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	118.678.700.000
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	195.800.000
		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	6.570.300.000
	Dinas Sosial	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	400.000.000
		Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	225.000.000
		Pelayanan Dukungan Psikososial	200.000.000
		Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	50.000.000
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	725.000.000
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan	750.000.000



Strategi	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Anggaran
		Sosial	
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	300.000.000
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	250.000.000
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	550.000.000
		Pemberian Layanan Kedaruratan	1.450.000.000
		Pemberian Layanan Rujukan	225.000.000
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	225.000.000
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	75.000.000
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	250.000.000
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	148.000.000
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	130.000.000
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000
		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	50.000.000
		Penyediaan Alat Bantu	1.000.000.000
		Penyediaan Makanan	1.000.000.000
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	250.000.000
		Penyediaan Permakanan	1.250.000.000
		Penyediaan Sandang	1.300.000.000
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	250.000.000
		Rujukan Anak-Anak Terlantar	50.000.000
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	50.000.000
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	350.000.000
Meningkatkan Pendapatan	Dinas Ketahanan Pangan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.311.937.715
	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	50.000.000
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	350.000.000
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.300.000.000
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000



Strategi	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Anggaran
	Dinas Perikanan dan Peternakan	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	600.000.000
		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	500.000.000
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000.000
		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	300.000.000
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	300.000.000
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	400.000.000
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	250.000.000
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.700.000.000
	Dinas Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	960.000.000
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3.100.000.000
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.450.000.000
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	360.000.000
	Dinas Sosial	Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	200.000.000
		Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT	150.000.000
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Job Fair/Bursa Kerja	200.000.000
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	500.000.000
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	180.000.000
		Perluasan Kesempatan Kerja	3.200.000.000
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.875.000.000
Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Ketahanan Pangan	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	518.712.550
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	182.784.900
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.812.800.000
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	69.207.556.000
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	13.242.649.500
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	400.000.000
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	400.000.000
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	127.394.800.000
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	500.000.000
		Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,	1.500.000.000



Strategi	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Anggaran
		Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	100.000.000
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100.000.000
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5.000.000.000
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100.000.000
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	100.000.000
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	150.000.000
	Dinas Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	12.480.000.000
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	19.120.000.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	44.170.000.000
	Dinas Perhubungan	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	200.000.000
		Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000
	Dinas Perikanan dan Peternakan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	400.000.000
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	400.000.000
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	2.500.000.000
	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	1.925.000.000
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	5.750.000.000
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	5.400.000.000
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	5.750.000.000
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	23.125.000.000
	Dinas Perumahan dan Permukiman	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	600.000.000
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	600.000.000
		Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1.300.000.000
		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	6.000.000.000
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	385.000.000
		Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	100.000.000
		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	100.000.000
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	100.000.000.000
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	500.000.000
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	7.500.000.000
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	300.000.000
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.000.000.000
		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan	100.000.000



Strategi	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Anggaran
		Permukiman Kumuh	
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Pelatihan Transmigrasi	100.000.000
		Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
		Penyuluhan Transmigrasi	50.000.000
	Kecamatan Balubur Limbangan	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	174.000.000
		Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	28.090.215
	Kecamatan Banjarwangi	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	10.000.000
	Kecamatan Cibatu	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.098.500
	Kecamatan Pangatikan	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	17.808.000
Total Anggaran			811.489.767.212

Sumber: Hasil Pengolahan Data Input SIPD, tahun 2024

5.3.2 Rencana Kegiatan Pengendalian Inflasi Tahun 2025

Dalam upaya pengendalian inflasi Tahun 2025 Kabupaten Garut telah memetakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pengendalian inflasi yang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4
Rencana Kegiatan dan Alokasi Pendanaan
Pengendalian Inflasi Tahun 2025

Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Anggaran
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	100,000,000
Dinas Ketahanan Pangan	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	518,712,550
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	182,784,900
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1,311,937,715
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	4,435,639,700
Dinas Perikanan dan Peternakan	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	500,000,000
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	250,000,000
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	300,000,000
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	500,000,000
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	100,000,000
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	4,500,000,000
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	400,000,000



Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Anggaran
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	400,000,000
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	2,500,000,000
	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	2,000,000,000
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	150,000,000
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	300,000,000
Dinas Pertanian	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	240,000,000
	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	128,000,000
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	360,000,000
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	5,400,000,000
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	5,750,000,000
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	23,125,000,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	340,000,000
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3,100,000,000
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3,100,000,000
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1,450,000,000
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1,950,000,000
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	199,739,900
	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	65,266,100
Kecamatan Kadungora	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	11,660,200
Sekretariat Daerah Kabupaten Garut	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	351,611,080
Total Anggaran		64,020,352,145

Sumber: Hasil Pengolahan Data Input SIPD, tahun 2024

5.3.3 Rencana Kegiatan Optimalisasi Ketahanan Pangan Tahun 2025

Dalam upaya menjaga Ketahanan Pangan Tahun 2025 Kabupaten Garut telah memetakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk Ketahanan pangan yang diuraikan pada tabel berikut.



Tabel 5.5
Rencana Kegiatan dan Alokasi Pendanaan Optimalisasi Ketahanan Pangan
Tahun 2025

Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Anggaran
Dinas Ketahanan Pangan	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	518,712,550
	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	184,629,344
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	309,956,500
	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	131,218,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	-
	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1,361,326,450
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	182,784,900
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1,311,937,715
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	4,435,639,700
	Pemantauan Stok Pangan	80,170,000
	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	159,189,200
	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	60,170,000
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	48,174,610
	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	48,174,610
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	77,291,437,600
	Pembangunan Jembatan	11,355,453,700
	Pemeliharaan Rutin Jalan	11,998,982,012
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1,493,918,000
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	593,862,800
	Rehabilitasi Jalan	36,882,644,400
	Rehabilitasi Jembatan	4,640,381,930
	Rekonstruksi Jalan	480,230,194,000
Dinas Perhubungan	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	950,000,000
	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	3,054,200,000
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	250,000,000
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1,220,000,000
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1,500,000,000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	9,000,000,000
	Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan	500,000,000
Dinas Perikanan dan Peternakan	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan	200,000,000
	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	200,000,000
	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	400,000,000
	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan	500,000,000



Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Anggaran
	Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	300,000,000
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	250,000,000
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	300,000,000
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2,700,000,000
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	250,000,000
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5,700,000,000
	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	200,000,000
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	400,000,000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	1,000,000,000
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	500,000,000
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	100,000,000
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	4,500,000,000
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1,000,000,000
	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	500,000,000
	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	50,000,000
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	400,000,000
	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	300,000,000
	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	300,000,000
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	250,000,000
	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	232,121,600
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1,167,878,400
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	400,000,000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	250,000,000
	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	400,000,000
	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	200,000,000
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,500,000,000
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	300,000,000
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	400,000,000
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	400,000,000
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	2,500,000,000
	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	2,000,000,000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	300,000,000
	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	2,000,000,000
	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	150,000,000
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	600,000,000
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	600,000,000
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	500,000,000
	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	150,000,000
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	150,000,000



Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Anggaran
	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	150,000,000
	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	300,000,000
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	9,000,000,000
	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	200,000,000
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	300,000,000
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	150,000,000
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3,100,000,000
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	100,000,000,000
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	750,000,000
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	200,000,000
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2,150,000,000
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	90,000,000
Dinas Pertanian	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	240,000,000
	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	170,000,000
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	170,000,000
	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	128,000,000
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	360,000,000
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	1,925,000,000
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	5,750,000,000
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	5,400,000,000
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	5,750,000,000
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	23,125,000,000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	5,750,000,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	340,000,000
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	403,500,000
	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	50,000,000
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	100,000,000
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	100,000,000
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	100,000,000
	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	300,000,000
	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	339,000,000
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3,100,000,000
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	1,100,000,000
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	1,100,000,000
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	1,100,000,000
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3,100,000,000
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1,549,014,000
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	4,521,904,000
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	2,341,158,000
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	50,000,000



Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Anggaran
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	960,000,000
	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	365,000,000
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1,450,000,000
	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	200,000,000
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1,950,000,000
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1,200,000,000
	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	200,000,000
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	74,994,000
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	199,739,900
	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	65,266,100
Total Anggaran		875,810,734,021

Sumber: Hasil Pengolahan Data Input SIPD, tahun 2024

5.3.4 Rencana Kegiatan Pengendalian Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025

Dalam upaya Pengendalian Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025 Kabupaten Garut telah memetakan kegiatan untuk Pengendalian Tingkat Pengangguran Terbuka yang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.6
Rencana Kegiatan dan Alokasi Pendanaan Pengendalian Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025

Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Anggaran
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	30,750,000
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	100,000,000
	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	70,000,000
	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	89,418,000
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	50,000,000
	Pemulihan Usaha Mikro	7,103,880,709
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	191,588,000
	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	50,000,000
	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	250,000,000
	Pengembangan Usaha Mikro	500,000,000
	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	350,000,000
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	350,000,000



Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Anggaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	96,200,000
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	336,000,000
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	333,000,000
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	316,800,000
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	312,000,000
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	99,370,000
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	347,930,000
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	74,820,000
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	249,480,000
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	437,738,000
	Pengawasan Penanaman Modal	262,793,000
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	126,704,900
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	572,905,000
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	100,000,000
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75,000,000
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	50,000,000
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	50,000,000
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000
	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	50,000,000
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	100,000,000
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	350,000,000
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	300,000,000



Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Anggaran
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	408,000,000
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	900,000,000
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	1,875,000,000
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1,875,000,000
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	500,000,000
	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	150,000,000
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	180,000,000
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	200,000,000
	Perluasan Kesempatan Kerja	3,200,000,000
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	100,000,000
	Job Fair/Bursa Kerja	200,000,000
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	200,000,000
Total Anggaran		23,764,377,609

Sumber: Hasil Pengolahan Data Input SIPD, tahun 2024

5.3.5 Rencana Kegiatan Penanganan Stunting Tahun 2025

Dalam upaya Penanganan Stunting Tahun 2025 Kabupaten Garut telah memetakan kegiatan untuk Penanganan Stunting yang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.7

Rencana Kegiatan dan Alokasi Pendanaan Penanganan Stunting Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Pagu
1	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	114.300.000
		Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	195.800.000
2	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	200.000.000
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	428.009.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	110.000.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	664.618.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	110.000.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	275.000.000



No	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Pagu
		pada Usia Pendidikan Dasar	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	110.024.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7.547.468.500
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.305.490.000
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3.217.762.900
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.100.421.000
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	267.771.000
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	309.546.600
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	73.150.000.000
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.534.695.000
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	521.880.700
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	55.000.000
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	267.865.400
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	237.985.000
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	220.000.000
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	110.200.000
Total Anggaran			94.053.837.100

Sumber: Hasil Pengolahan Data Input SIPD, tahun 2024

5.4. Proyek Strategis Tahun 2025

Adapun proyek strategis tahun 2025 masih didominasi oleh proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD meliputi Pembangunan jalan GSW, Rehabilitasi jalan perkotaan, Nata Kota (Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh), Penuntasan Jalan Kadungora – Leles dan Penataan Kawasan Simpang Kubang yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.



1. Pembangunan Jalan GSW (Garut – Sucinaraja – Wanaraja)

Pembangunan Jalan Garut - Karangpawitan - Sucinaraja - Wanaraja menghubungkan PKL Perkotaan Garut dengan PPK Wanaraja, PPK Sucinaraja, PPK Karangpawitan. Saat ini Jalan GSW sedang dalam tahap pembebasan lahan. Pada tahun 2023, telah dibebaskan lahan seluas 25.090 m² dengan anggaran Rp 13.055.420.000. Pada tahun 2024 ini direncanakan untuk pembebasan tahap selanjutnya seluas 9.000 m² dengan anggaran sebesar Rp 7.500.000.000. Di tahun 2025 direncanakan untuk dilakukan kembali pembebasan lahan seluas 60.000 m² dengan anggaran Rp 20.000.000.000. Selain pembebasan lahan, pada tahun anggaran 2025 juga direncanakan untuk dilakukan pengerjaan bukaan badan jalan sepanjang 5 km dengan anggaran Rp 14.712.500.000. Berikut merupakan progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 dan akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Tabel 5.8 Progres Kegiatan Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Jalan Alternatif Garut-Sucinaraja-Wanaraja (GSW)

No	Tahun Anggaran	Tanah yang sudah dibebaskan	Luas Tanah yang dibebaskan (m ²)	Perkiraan Panjang (m)	Anggaran (Rp)
1	2023	Desa Tanjungsari Kec. Karangpawitan	25.090	1.600	13.055.420.000

sumber: diolah Bappeda 2024

Tabel 5.9 Rencana Kegiatan Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Jalan Alternatif Garut-Sucinaraja-Wanaraja (GSW)

No	Tahun Anggaran	Tanah yang akan dibebaskan	Luas Tanah yang dibebaskan (m ²)	Perkiraan Panjang (m)	Perkiraan Anggaran (Rp)
1	2024	Desa Godog Kec. Karangpawitan	9.000	600	7.500.000.000
2	2025	Desa Godog Kec. Karangpawitan	60.000	4.000	20.000.000.000
		Desa Sindanggalih Kec. Karangpawitan			
		Desa Sindangpalay Kec. Karangpawitan			
		Desa Karangpawitan Kec. Karangpawitan			

sumber: diolah Bappeda 2024



2. Rehabilitasi Jalan Perkotaan

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi melayani untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Kawasan perkotaan Garut merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal. Fungsi perkotaan Garut sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lokal) perlu ditunjang oleh infrastruktur yang representatif guna mendukung aktivitas dan sarana pelayanan yang terdapat di kawasan tersebut.

Pada tahun anggaran 2025, direncanakan akan dilakukan rehabilitasi jalan yang berada di kawasan perkotaan Garut dengan besar pagu anggaran Rp 9.462.050.000 dan total panjang jalan 6,5 km

3. Nata Kota (Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh)

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 633/Kep.1131-Bappeda/2021 Kawasan kumuh di Kabupaten garut pada tahun 2021 ditetapkan seluas 88,080 Ha. Sejak penetapannya telah dilakukan penanganan secara bertahap sehingga pada tahun anggaran 2024 luas kawasan kumuh di Kabupaten Garut adalah 81,49 Ha.

Di tahun anggaran 2025, direncanakan penanganan di 2 lokasi yakni di kawasan kumuh Haurpanggung dan kawasan kumuh Pakuwon dengan anggaran masing – masing lokasi sebesar Rp 3.000.000.000.

4. Penuntasan Jalan Kadungora – Leles

Jalan Kadungora – Leles merupakan bagian dari jalan lingkar Garut. Jalan ini merupakan jalur alternatif yang dibangun untuk menghindari kemacetan di pusat kota. Jalan lingkar Garut masuk menjadi salah satu proyek strategis Peraturan Presiden No. 87 tahun 2021 tentang percepatan Pembangunan Kawasan Rebana Dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Pada tahun anggaran 2025 direncanakan akan dilakukan penanganan sepanjang 4 km. Penanganan tersebut terdiri dari pengerjaan bukaan jalan dengan anggaran Rp 12.000.400.000 serta pengerjaan pembangunan fisik dengan anggaran 16.360.400.000.

5. Penataan Kawasan Simpang Kubang

Dengan dibangunnya Jalan Lingkar Cipanas dan Jl. Prof. KH, Anwar Musaddad (By Pass/Lingkar Luar Kawasan Perkotaan Garut), selain berfungsi jalan alternatif dan mengurangi beban sirkulasi pada pusat kota, juga berfungsi sebagai batas wilayah Kawasan Perkotaan Garut.



Jalan Lingkar Cipanas dan Jl. Prof. KH, Anwar Musaddad (By Pass/Lingkar Luar Kawasan Perkotaan Garut), bersimpangan dengan Jalan Raya Bandung-Garut yang merupakan Jalan Provinsi dan merupakan akses utama dari Bandung menuju Kawasan Perkotaan Garut/Kab. Tasikmalaya sekaligus menghubungkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Cekungan Bandung dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perkotaan Garut, sehingga keberadaannya cukup strategis sebagai pintu masuk Kawasan Perkotaan Garut.

Kawasan simpang kubang masuk menjadi kawasan strategis yang perlu dilakukan penataannya. Karena keberadaannya yang strategis, maka diperlukan Tugu Gerbang masuk sebagai penanda Kawasan Perkotaan Garut sekaligus pengendali persimpangan. Pada tahun anggaran 2025 direncanakan akan dilakukan penataan dengan pagu anggaran Rp 6.000.000.000.

5.5. Sinergitas Usulan Rencana Kegiatan Bersumber dari APBN Tahun 2025

Dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi, otonomi daerah, dan otonomi desa, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, Pemerintah menganggarkan Transfer ke Daerah (TKD), yang sumber pendanaannya sepenuhnya berasal APBN. Kebijakan terkait TKD diperbaharui dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). TKD terdiri atas: (1) Dana Bagi Hasil (DBH); (2) Dana Alokasi Umum (DAU); (3) Dana Alokasi Khusus (DAK); (4) Dana Otonomi Khusus (Otsus); (5) Dana Keistimewaan; dan (6) Dana Desa.

(1) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non-penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

(2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Arah kebijakan pemanfaatan Dana Alokasi Umum adalah sebagai berikut (1) pemenuhan layanan dasar sesuai dengan gap capaian standar pelayanan minimal di daerah; (2) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data capaian



indikator standar pelayanan minimal untuk seluruh daerah; (3) melanjutkan kebijakan *hold harmless* sampai dengan tahun 2027, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; serta (4) memperkuat sinergi kebijakan penggunaan Dana Alokasi Umum dengan program prioritas nasional.

Kebijakan pengelolaan DAU mengalami perubahan sejak diterbitkannya PMK No. 211/PMK.07/2022 dan PMK No. 212/PMK.07/2022 yang mengatur tentang pengelolaan DAU yang dilaksanakan untuk tahun anggaran 2023. Alokasi DAU TA 2023 dan tahun berikutnya terbagi atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan DAU yang ditentukan penggunaannya.

DAU yang tidak ditentukan penggunaannya diserahkan sesuai kewenangan daerah sesuai dengan prioritas daerah. Sementara DAU yang ditentukan penggunaannya disesuaikan dengan program/kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah antara lain untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, dan bidang layanan umum.

Penggunaan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya digunakan untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum. Sementara untuk penggunaan DAU bidang layanan umum dialokasikan untuk dukungan pendanaan kelurahan dan dukungan penggajian PPPK.

(3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.

DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan: (a.) mencapai prioritas nasional; (b.) mempercepat pembangunan Daerah; (c.) mengurangi kesenjangan layanan publik; (d.) mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau (e.) mendukung operasionalisasi layanan publik.

DAK terdiri atas:

- a. DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah;
- b. DAK non-fisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan

- c. Hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Usulan kegiatan DAK Fisik Tahun 2025 dikelola melalui aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) DAK, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh provinsi dan penilaian kelayakan teknis oleh Kementerian/ Lembaga teknis terkait, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan sebagaimana terlihat pada Gambar berikut.



Gambar 5.1. Tahapan Penyusunan DAK Fisik

Tabel 5.8 Rekapitulasi Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2025

BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN	NILAI USULAN	PERANGKAT DAERAH
01-Pendidikan	01-PAUD	02-Revitalisasi PAUD	22.232.965.000	Dinas Pendidikan
	01-PAUD Total		22.232.965.000	
	02-SD	01-Revitalisasi SD	149.618.918.670	
	02-SD Total		149.618.918.670	
	03-SMP	01-Revitalisasi SMP	255.573.980.000	
	03-SMP Total		255.573.980.000	
	04-SKB	01-Revitalisasi SKB	1.103.205.000	
	04-SKB Total		1.103.205.000	
	08-Perpustakaan	01-Pembangunan dan Revitalisasi Sarpras Layanan Perpustakaan Daerah	5.200.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	08-Perpustakaan Total		5.200.000.000	
01-Pendidikan Total			433.729.068.670	
02-Kesehatan dan KB	01-Penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan	01-Penguatan Puskesmas	5.116.135.350	Dinas Kesehatan
		02-Penguatan Puskesmas Pembantu	1.574.055.000	
	01-Penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan Total		6.690.190.350	
	02-Keluarga Berencana	01-Sarana Prasarana Pelayanan KB	2.515.000.000	



BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN	NILAI USULAN	PERANGKAT DAERAH
02-Keluarga Berencana Total			2.515.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
02-Kesehatan dan KB Total			9.205.190.350	
04-Air Minum	01-Air Minum	01-Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	2.338.540.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		02-Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	4.239.540.000	
		03-Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	2.748.810.000	
01-Air Minum Total			9.326.890.000	
04-Air Minum Total			9.326.890.000	
08-Irigasi	01-Irigasi	03-Rehabilitasi Jaringan Irigasi	8.489.209.400	
	01-Irigasi Total		8.489.209.400	
08-Irigasi Total			8.489.209.400	
20-Perlindungan Perempuan dan Anak	01-Perlindungan Perempuan dan Anak	01-Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	2.032.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
01-Perlindungan Perempuan dan Anak Total			2.032.000.000	
20-Perlindungan Perempuan dan Anak Total			2.032.000.000	
Total			462.782.358.420	

Sumber : hasil pengolahan data usulan DAK tahun 2025

(4) Dana Desa

Dana Desa merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dana Desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD.

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025, sinergitas dukungan program pembangunan daerah Tahun 2025 terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 disajikan pada tabel 5.9.



Tabel 5.9
Sinergitas Program Pembangunan Daerah
Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Daerah	Jumlah Program	Pagu Indikatif
PN 1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PPD 3	1	980.724.900
PN 2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PPD 3, PPD 4, PPD 7	13	27.354.625.234
PN 3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	PPD 1, PPD 3, PPD 4, PPD 5	36	1.306.881.283.681
PN 4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	PPD 2, PPD 6, PPD 7	35	1.247.104.803.667
PN 5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	PPD 1, PPD 4, PPD 5	11	29.462.365.764
PN 6	Membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	PPD 3, PPD 4, PPD 5, PPD 6	15	135.236.352.000
PN 7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	PPD 3, PPD 7	224	922.969.437.522
PN 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis	PPD 1, PPD 3, PPD 4, PPD 5, PPD 6	17	156.171.193.921



Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Daerah	Jumlah Program	Pagu Indikatif
	dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur			
Penunjang (Administrasi Umum)			74	2.685.138.561.994
Grand Total			426	6.511.299.348.683

Sumber: Hasil Pengolahan data matriks Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 (SIPD)

5.6. Usulan Rencana Kegiatan Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian target indikator makro Kabupaten Garut yang menunjang pencapaian target indikator makro provinsi, program prioritas provinsi, program-program strategis provinsi, dan kebijakan kewilayahan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggulirkan bantuan keuangan dan hibah kepada kabupaten dan kota dengan skema pendanaan reguler dan kompetitif.

Pemberian bantuan keuangan dan hibah didasarkan pada kelayakan dan penilaian usulan yang terkait langsung dengan upaya akselerasi pencapaian indikator kinerja daerah dan prioritas pembangunan daerah dengan pola-pola inovatif dan kolaboratif, dengan penentuan usulan bantuan keuangan dan hibah berdasarkan tema yang ditentukan. Proses pemberian pendanaan dilaksanakan melalui verifikasi kelayakan dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif yang ditetapkan Keputusan Gubernur dengan berkolaborasi dengan Reviewer/Penilai Ahli yang berkompeten dan profesional.

Rekapitulasi usulan bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 yang telah diinput pada SIPD sebanyak 1.571 usulan kegiatan pada sebanyak 16 urusan pemerintahan, sebagaimana disajikan pada tabel 5.10.

Tabel 5.10
Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025

Kode	Urusan	No	Usulan	Jumlah Usulan
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1	Kesejahteraan Guru Bantu SD Negeri Daerah Terpencil	1



Kode	Urusan	No	Usulan	Jumlah Usulan
		2	Peningkatan Sarana Prasarana TIK Pendidikan Untuk KBM Siswa SMP (Lab Dan Digital Study Center)	4
		3	Rehabilitasi SD/SMP Negeri Terdampak Bencana	2
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2	Intervensi Balita Weight Faltering, BGM, Dan Underweight	1
		3	Jaminan Kesehatan Bagi PBPU Dan BP Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah	1
		4	Pengembangan Rumah Sakit	3
		5	Peningkatan Puskesmas	8
1.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	Pembangunan Jalan	2
		2	Rehabilitasi Jembatan	2
		3	Rekonstruksi Jalan	167
		4	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase	478
		5	Rehabilitasi Embung/Situ	14
		6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	400
1.4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	Pembangunan Ruang Terbuka Publik	49
		2	Pembangunan Rumah / Perumahan Terkena Dampak Bencana (Relokasi)	2
		3	Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	3
		4	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	1
		5	Pengembangan SPAM	248
		6	Penyediaan PSU Bagi Perumahan Relokasi Akibat Bencana Dan Terdampak Program Pemerintah	6
		7	Penyediaan Sarana Prasarana Persampahan	1
		8	Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni - SL Pada Lokasi Kawasan Kumuh Di Luar Kewenangan Provinsi	120
1.5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Mitigasi Bencana	2
1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1	Pengadaan Sarana Dan Prasarana / Alat Bantu Penyandang Disabilitas	1
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1	Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan	1
		2	Pengembangan Dan Pembangunan Bank Sampah	5
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Bantuan Keuangan Khusus Desa	28
		2	Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)	1
		3	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	1
		4	Dana Operasional Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU)	1
		5	TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	1
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	1	Pembangunan Dan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Dan ASDP	1
		2	Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai Dengan Kewenangan	1
		3	Penyediaan Perlengkapan Jalan	2
		4	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1	Outlet KUMKM Kabupaten/Kota	1



Kode	Urusan	No	Usulan	Jumlah Usulan
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Rehabilitasi Prasarana Pemuda	1
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	Pengembangan Sarana Dan Prasarana BBI	1
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1	Pengembangan Destinasi Wisata	6
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1	REHABILITASI RUMAH POTONG HEWAN (RPH)	1
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	1	Kendaraan Perpustakaan Keliling	1
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2	Pembangunan Depo Arsip	1
Total Jumlah Usulan				1571

Sumber: Hasil Pengolahan Data Input SIPD, tahun 2024

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025, sinergitas dukungan program pembangunan daerah tahun 2025 terhadap prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 disajikan pada tabel 5.11.

Tabel 5.11
Sinergitas Program Pembangunan Daerah
Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Jawa Barat 2025		Prioritas Pembangunan Daerah RKPD 2025		Jumlah Program	Pagu Indikatif (Rp)
PPP 1	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	PPD 1	Penanganan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	43	287.520.822.872
		PPD 4	Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, peningkatan realisasi investasi, diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan kualitas konsumsi pangan		
		PPD 6	Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan penguatan sistem perlindungan sosial		
		PPD 7	Tata Kelola pelayanan publik yang inovatif		
PPP 2	Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama	PPD 1	Penanganan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	233	925.832.132.607
		PPD 2	Reformasi kualitas sistem pendidikan, transformasi		



Prioritas Pembangunan Jawa Barat 2025		Prioritas Pembangunan Daerah RKPD 2025		Jumlah Program	Pagu Indikatif (Rp)
	dan Kehidupan Beragama		sistem kesehatan, keluarga berencana, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta peningkatan peran aktif pemuda		
		PPD 3	Penguatan budaya gotong royong, kehidupan beragama dan berbudaya serta ketentraman dan ketertiban politik, demokrasi		
		PPD 4	Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, peningkatan realisasi investasi, diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan kualitas konsumsi pangan		
		PPD 7	Tata Kelola pelayanan publik yang inovatif		
PPP 3	Penguatan sistem kesehatan daerah	PPD 2	Reformasi kualitas sistem pendidikan, transformasi sistem kesehatan, keluarga berencana, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta peningkatan peran aktif pemuda	7	438.326.206.271
PPP 4	Penguatan sistem perlindungan sosial dan kesiapsiagaan penanggulangan resiko bencana	PPD 1	Penanganan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	17	54.669.179.366
		PPD 2	Reformasi kualitas sistem pendidikan, transformasi sistem kesehatan, keluarga berencana, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta peningkatan peran aktif pemuda		
		PPD 3	Penguatan budaya gotong royong, kehidupan beragama dan berbudaya serta ketentraman dan ketertiban politik, demokrasi		
		PPD 5	Peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah diikuti dengan pembangunan desa dan peningkatan kualitas		



Prioritas Pembangunan Jawa Barat 2025		Prioritas Pembangunan Daerah RKPD 2025		Jumlah Program	Pagu Indikatif (Rp)
			lingkungan hidup yang berkelanjutan		
		PPD 6	Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan penguatan sistem perlindungan sosial		
		PPD 7	Tata Kelola pelayanan publik yang inovatif		
PPP 5	Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengembangan lingkungan hidup serta gerakan membangun desa	PPD 3	Penguatan budaya gotong royong, kehidupan beragama dan berbudaya serta ketentraman dan ketertiban politik, demokrasi	28	1.290.612.722.972
		PPD 5	Peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah diikuti dengan pembangunan desa dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan		
PPP 6	Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah	PPD 3	Penguatan budaya gotong royong, kehidupan beragama dan berbudaya serta ketentraman dan ketertiban politik, demokrasi	24	829.199.722.601
		PPD 4	Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, peningkatan realisasi investasi, diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan kualitas konsumsi pangan		
		PPD 7	Tata Kelola pelayanan publik yang inovatif		
Penunjang (Administrasi Umum)				74	2.685.138.561.994
Grand Total				426	6.511.299.348.683

Sumber: Hasil Pengolahan data matriks Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025

5.7. Rencana Program dan Kegiatan Kabupaten Garut Tahun 2025

Program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD Tahun 2025 dilaksanakan secara terpadu berdasarkan urusan /kewenangan baik urusan wajib maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang dan fungsi lainnya, dengan dukungan pendanaan bersifat indikatif yang kemudian dikelompokkan kedalam prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah.

Rekapitulasi pagu anggaran pendanaan indikatif rencana program dan kegiatan tahun 2025 menurut prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan disajikan pada tabel 5.12.

Tabel 5.12
Rekapitulasi Anggaran Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah
Tahun 2025

7 Prioritas Pembangunan dan 15 Sasaran		Pagu Indikatif (Rp)
PPD 1	Penanganan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	25.013.000.000
	<i>Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat (Tujuan 1 Sasaran 4)</i>	
PPD 2	Reformasi kualitas sistem pendidikan, transformasi sistem kesehatan, keluarga berencana, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta peningkatan peran aktif pemuda	1.207.007.936.520
	<i>Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Tujuan 1 Sasaran 2)</i>	
	<i>Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (Tujuan 1 Sasaran 3)</i>	
	<i>Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak (Tujuan 1 Sasaran 6)</i>	
	<i>Terkendalinya Pertumbuhan dan Distribusi Penduduk (Tujuan 1 Sasaran 5)</i>	
PPD 3	Penguatan budaya gotong royong, kehidupan beragama dan berbudaya serta ketentraman dan ketertiban politik, demokrasi	76.568.975.321
	<i>Meningkatnya Kesalehan Sosial (Tujuan 1 Sasaran 1)</i>	
PPD 4	Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, peningkatan realisasi investasi, diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan kualitas konsumsi pangan	279.054.362.752
	<i>Meningkatnya realisasi investasi (Tujuan 2 Sasaran 1)</i>	
	<i>Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan perekonomian daerah (Tujuan 2 Sasaran 2)</i>	
	<i>Meningkatnya Daya Beli Masyarakat (Tujuan 2 Sasaran 3)</i>	
	<i>Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat (Tujuan 2 Sasaran 4)</i>	
PPD 5	Peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah diikuti dengan pembangunan desa dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	1.276.918.946.972



7 Prioritas Pembangunan dan 15 Sasaran		Pagu Indikatif (Rp)
	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Ekonomi (Tujuan 3 Sasaran 1)	
	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (Tujuan 3 Sasaran 2)	
	Meningkatnya pemerataan pembangunan perdesaan (Tujuan 3 Sasaran 4)	
PPD 6	Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan penguatan sistem perlindungan sosial	16.472.849.500
	Menurunnya risiko bencana (Tujuan 3 Sasaran 3)	
PPD 7	Tata Kelola pelayanan publik yang inovatif	945.124.715.624
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif (Tujuan 4 Sasaran 1)	
	PENUNJANG (ADMINISTRASI UMUM)	2.685.138.561.994
TOTAL		6.511.299.348.683

Sumber: Hasil Pengolahan data matriks Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan tahun 2025 menurut Perangkat Daerah pelaksana disajikan pada tabel 5.13.

Tabel 5.13
Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
01	Dinas Pendidikan	7	19	104	1.900.813.402.567
02	Dinas Kesehatan	6	27	101	1.057.950.711.911
04	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	11	23	79	1.046.566.956.232
05	Dinas Perumahan dan Permukiman	8	17	56	133.640.364.375
06	Satuan Polisi Pamong Praja	2	10	43	17.085.436.406
07	Dinas Pemadam Kebakaran	3	14	31	16.298.441.792
08	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	13	64	14.685.846.369
09	Dinas Sosial	8	24	94	40.468.639.551
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	6	18	44	20.687.074.696
11	Dinas Ketahanan Pangan	6	15	39	16.280.698.668
12	Dinas Lingkungan Hidup	12	26	64	126.447.129.580
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	17	50	26.959.822.202



No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	13	55	45.556.837.843
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	34	78	48.210.233.260
16	Dinas Perhubungan	4	23	47	73.683.978.528
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	6	15	73	28.822.734.997
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	9	16	48	21.216.000.000
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	15	45	17.473.253.862
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	6	19	113	136.982.640.511
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	21	47	16.757.184.545
22	Dinas Perikanan dan Peternakan	12	32	92	63.725.183.600
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	9	24	93	21.954.040.267
24	Dinas Pertanian	7	15	79	110.383.259.000
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	11	19	49	147.859.828.500
26	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut	4	21	85	113.191.077.221
27	Sekretariat DPRD Kabupaten Garut	4	20	124	118.717.641.019
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	19	86	20.033.563.791
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	13	54	770.590.556.280
30	Badan Pendapatan Daerah	3	10	52	42.962.068.928
31	Badan Kepegawaian dan Diklat	3	13	50	19.985.129.984
32	Inspektorat Daerah	3	12	56	45.439.731.917
33	Kecamatan Banjarwangi	5	13	34	2.606.938.712
34	Kecamatan Banyuresmi	6	13	37	3.316.820.450
35	Kecamatan Bayongbong	7	15	37	2.939.581.085
36	Kecamatan Balubur Limbangan	6	19	45	4.241.368.136
37	Kecamatan Bungbulang	7	17	42	3.314.219.678
38	Kecamatan Caringin	6	14	40	2.414.470.588
39	Kecamatan Cibalong	6	15	41	2.888.071.228
40	Kecamatan Cibatuh	7	16	42	3.177.892.056
41	Kecamatan Cibiuk	7	16	38	4.366.062.387
42	Kecamatan Cigedug	6	14	41	4.338.704.600
43	Kecamatan Cihurip	6	13	42	2.631.248.966
44	Kecamatan Cikajang	6	17	35	3.105.750.186
45	Kecamatan Cikelet	6	15	41	2.633.334.972



No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
46	Kecamatan Cilawu	7	15	45	3.100.336.929
47	Kecamatan Cisewu	6	15	37	2.890.977.623
48	Kecamatan Cisompet	7	14	32	3.400.688.600
49	Kecamatan Cisarupan	6	13	36	3.087.581.627
50	Kecamatan Garut Kota	6	14	35	33.364.755.349
51	Kecamatan Kadungora	6	14	43	3.460.098.995
52	Kecamatan Karangtengah	6	13	43	4.257.734.901
53	Kecamatan Karangpawitan	6	16	41	14.769.408.812
54	Kecamatan Kersamanah	6	13	35	5.281.750.723
55	Kecamatan Leles	7	14	42	3.651.245.600
56	Kecamatan Leuwigoong	6	14	43	2.518.705.387
57	Kecamatan Malangbong	7	15	47	8.327.794.734
58	Kecamatan Mekarmukti	7	15	40	4.438.354.067
59	Kecamatan Pakenjeng	6	14	35	2.497.116.527
60	Kecamatan Pameungpeuk	6	13	44	2.620.072.848
61	Kecamatan Pamulihan	7	15	37	2.387.407.674
62	Kecamatan Pangatikan	6	15	35	3.425.451.433
63	Kecamatan Pasirwangi	6	13	33	3.389.100.771
64	Kecamatan Peundeuy	6	13	36	5.678.365.213
65	Kecamatan Samarang	6	14	30	5.230.409.593
66	Kecamatan Selaawi	7	15	40	5.141.190.479
67	Kecamatan Singajaya	6	14	45	2.687.198.624
68	Kecamatan Sucinaraja	6	13	34	2.387.705.907
69	Kecamatan Sukaresmi	6	13	34	3.956.706.385
70	Kecamatan Sukawening	6	13	36	2.788.552.085
71	Kecamatan Talegong	6	14	43	3.131.492.411
72	Kecamatan Tarogong Kaler	6	18	54	6.085.962.772
73	Kecamatan Tarogong Kidul	7	16	39	19.699.464.000
74	Kecamatan Wanaraja	8	18	44	2.862.994.483
75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	13	61	21.376.792.685
Total		469	1203	3809	6.511.299.348.683

Sumber : Hasil Pengolahan data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Matriks rencana program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Garut pada RKPD Tahun 2025 disajikan secara terperinci dalam tabel pada Buku II RKPD Tahun 2025.

5.8. Potensi Kolaborasi Pendanaan Melalui Tanggung Jawab Sosial dan Perusahaan (TJSLP)/Corporate Social Responsibility Kabupaten Garut Tahun 2025

Forum TJSLP/CSR merupakan salah satu Skema Pendanaan Inovatif yang dapat mendukung pencapaian tujuan prioritas Kabupaten Garut ditengah terbatasnya kapasitas riil, beberapa skema yang dapat diterapkan dalam mengoptimalkan potensi CSR di Kabupaten Garut dapat dilaksanakan melalui langkah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Rancangan Peraturan Bupati Garut tentang Peraturan

- Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2017 tentang TJLSP Mekanisme keterlibatan dan pemilihan unsur masyarakat yang terlibat dalam Tim Fasilitasi TJSLP adalah seperti yang telah dibahas dengan Bagian Hukum yaitu “Tokoh Masyarakat yang berasal dari perkumpulan/yayasan/organisasi profesi yang melakukan kegiatan sesuai bidang kerja TJSLP dan mendapatkan rekomendasi dari perkumpulan/yayasan/organisasi profesi” atau dengan penunjukan langsung dengan kriteria tertentu dalam rangka meminimalisir risiko konflik kepentingan dari unsur masyarakat.

2. Membangun Komunikasi Efektif antara Pemerintah Daerah

- Komunikasi efektif antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan perlu dilakukan dengan pendekatan yang bertahap dengan pertimbangan bahwa terdapat perbedaan persepsi dan penerimaan dalam penyelenggaraan Program TJSLP. Adapun tahapan dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a) Tahap I: Penyamaan Persepsi antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan mengenai Dasar Hukum TJSLP, Rencana Pembangunan Daerah, Teknis Penyelenggaraan TJSLP, serta hal lain yang dianggap perlu penyamaan persepsi;



- b) Tahap II: Pembentukan Forum Pelaksana TJSLP Kabupaten Garut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2017 tentang TJSLP;
- Rekomendasi untuk membangun komunikasi efektif antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan akan lebih optimal jika Peraturan Bupati dan Tim Fasilitasi TJSLP yang baru sudah ditetapkan;

3. Menyusun Menu Program dan Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi TJSLP

- Menu Program yang dirancang berdasarkan skala prioritas pembangunan daerah perlu disusun sebagai pedoman kolaborasi pendanaan TJSLP. Selain dari pilihan program, Menu Program juga memuat informasi mengenai sasaran atau lokasi beserta volume yang dibutuhkan sesuai dengan target Pemerintah Daerah;
- Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Program TJSLP berupa kesesuaian sasaran, output dan outcome dapat diselenggarakan jika Tim Fasilitasi TJSLP dan Forum Pelaksana TJSLP sudah terbentuk serta dasar legal yang mengatur monitoring dan evaluasi sudah dipahami bersama.



BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sebagai tolok ukur kinerja pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025, ditetapkan target pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, mencakup Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang merupakan indikator kinerja sasaran pembangunan terseleksi sebagai ukuran keberhasilan sasaran strategis dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa kinerja diukur dengan indikator yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Selain penetapan IKU dan IKK Pemerintah Kabupaten Garut, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan Indikator Makro Pembangunan yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Kemiskinan, Pendapatan Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Gini dan Inflasi. Target Indikator Kinerja Makro tahun 2025 tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.1
Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Garut Tahun 2025

No	Indikator Makro	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025 Garut	
				(a)	(b)
1	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	68,11	69,7-70,68	69,51	70,57
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,85	1,1	1,17	1,17
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,94	4,87-5,57	5,1	4,5-5,1
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	9,77	6,92-7,03	9,21	8,2-9,06
5	Pendapatan Per Kapita (Juta Rp)	26,91	25,43-25,61	29,782	28,49
6	Persentase Pengangguran Terbuka (%)	7,33	6,41-6,61	7,03	6.67 - 7.26*
7	Indeks Gini (poin)	0,361	0,35-0,36	0,30	0,347-0,36
8	Inflasi (%)	2,84	2,5-4,5	2,5-4,5	3,5
9	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Ton CO ₂ Eq)				643.797,58

Sumber : BPS Kabupaten Garut Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD.
Keterangan: a) RPD 2025-2026; b) Hasil Penyelarasan RPJPD Provinsi



6.1 Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pada tabel 6.2 diuraikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur penilaian kinerja sasaran strategis RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026. IKU Daerah, secara berjenjang akan dicapai dengan dukungan pencapaian IKU Perangkat Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari setiap misi RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026. Pada Tabel 6.3 diuraikan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/*Impact* Kabupaten Garut dan Tabel 6.4 diuraikan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/*Outcome* Kabupaten Garut.

Guna mengukur pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, berikut disajikan pada Tabel 6.2 mengenai Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah untuk setiap sasaran pembangunan berdasarkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2025-2026. Sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi yang menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja, dan dasar dalam penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, melakukan *monitoring*, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja, maka dirumuskan target Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 yang menjadi Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2025 untuk nantinya menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2025.

Tabel 6.2
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Garut Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target 2025
1	Indeks kesalehan sosial masyarakat	Nilai	84,49 (Baik)	84,89 (Baik)
2	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,07	75,04*
3	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,84	7,94
4	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,16	12,29*
5	Jumlah penduduk miskin	Ribu jiwa	260,48	253,13
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,33	6.67 - 7.26*
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,84	1,09
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	72,08	73,82
9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	84,5	82



No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target 2025
10	Nilai Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Triliun Rp.	1,356	1,30
11	Laju pertumbuhan sektor pertanian	%	1,6	4,31
12	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	%	4,81	4,85
13	Laju pertumbuhan sektor pariwisata	%	10,37	12,5
14	Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	8,05	6,3
15	Pengeluaran per kapita	Rp. 000	8.685	9.305,82
16	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	91,7	90
17	Persentase kemantapan jalan kabupaten dan poros desa	%	55,25	60,42
18	Persentase Luas Areal Daerah Irigasi Yang Terlayani Oleh Jaringan Irigasi	%	83,43	91,25
19	Persentase kawasan permukiman layak huni	%	35,66	36,59
20	Cakupan air minum layak	%	90,04	91,25
21	Cakupan sanitasi layak	%	68,11	69,05
22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	66,89	68,12
23	Indeks Risiko Bencana	Poin	147,39	145
24	Persentase Desa Mandiri dan Maju	%	68,65	75,77
25	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,81 (Baik)	84 (Baik)
26	Sistem Merit	Nilai	328,5 (Sangat Baik)	329 (Sangat Baik)
27	Nilai SAKIP	Nilai	74,91(BB)	80,05 (A)
28	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	42,96 (Inovatif)	60,01 (Sangat Inovatif)
29	Indeks SPBE	Nilai	3,29	3,35
30	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	n/a	86,38 (A)
31	Nilai Evaluasi LPPD	Nilai	3,4962 (Tinggi)	Tinggi (3,4966)
32	Indeks Kualitas Kebijakan Daerah	Nilai	68,76 (Baik)	73,2 (Baik)

Sumber : BPS, RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026, diolah Bappeda 2024, *SE Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 73/PR.03.01/BAPP tentangPenyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

6.2 Penetapan Target Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Selain itu, indikator kinerja daerah RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 juga memuat indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Garut selama Tahun 2023-2025 baik tingkat dampak (*impact*) maupun tingkat hasil (*outcome*), yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan pelayanan umum. Indikator kinerja daerah untuk Tahun 2023 dan 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel 6.3 dan Tabel 6.4. Indikator kinerja ini juga telah memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor XX Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dimana untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2025 didasari pada



arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Tabel 6.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap
Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/ Impact
Tahun 2023-2025

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target			Keterangan
				2023	2024	2025	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Pertumbuhan PDRB	%	4,94	4,59-5,51	5,23	5	BPS
2	Laju inflasi	%	2,84	2,5-4,5	2,5-4,5	3,5	BPS
3	PDRB per kapita ADHB	Juta Rp	26.914,40	24,33-24,49	25,43-25,61	28,49*	BPS
4	Indeks Gini	Poin	n/a	0,36-0,362	0,35	0,347 - 0,36 *	BPS
5	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	90,23	92,23-92,34	92,97-93,08	92,97	BPS
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	68,11	68,63-69,62	69,7	70,57*	BPS
7	Angka melek huruf	%	n/a	99,45	99,53	99,61	BPS
8	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,84	8,08-8,58	8,43-8,93	7,94	BPS
9	Angka harapan lama sekolah	Tahun	72,07	12,07-12,15	12,13 - 12,21	12,29 *	BPS
10	Angka usia harapan hidup	Tahun	12,16	71,89-72,02	72,03 - 72,16	75,04*	BPS
11	Persentase balita gizi buruk	%	0,07	0,04	0,04	0,04	Perangkat Daerah urusan Kesehatan
12	Prevalensi balita gizi kurang	%	3,9	1,28	0,86	3,8	Perangkat Daerah urusan Kesehatan
13	Prevalensi Stunting	%	n/a		14	21,10*	Perangkat Daerah urusan Kesehatan
13	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah urusan Kesehatan
14	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	70,1	64,81-65,95	66,96-68,05	70,3	BPS
15	Tingkat pengangguran terbuka	%	7,33	7,31 - 7,51	6,61	6.67 - 7.26*	BPS
16	Rasio penduduk yang bekerja	%	92,67	92,69-92,49	93,59-93,39	100.931	BPS
17	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	%	n/a	62,76	64,46	92,97	BPS
18	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	57,31	60,07-61	62,66-63,55	62,66-63,55	BPS



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target			Keterangan
				2023	2024	2025	
19	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	%	n/a	35,69-34,01	34,69-33,08	34,69-33,08	BPS
20	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Setda
21	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	11,21	16,15	16,25	25	Perangkat Daerah urusan Keuangan
22	Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektorat
23	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	poin	91,7	81	82	83	Perangkat Daerah urusan Pangan
24	Penguatan cadangan pangan	%	473	26	30	100	Perangkat Daerah urusan Pangan
25	Penanganan daerah rawan pangan	%	9,28	8,6	9,28	9,95	Perangkat Daerah urusan Pangan
26	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	36,32	35,44-35,31	35-34,92	37,51	BPS
27	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	4,43	8,04-8,1	8,14-8,12	4,32	BPS
28	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	8,96	19,73-19,79	19,74-19,88	8,44	BPS
29	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	18,54	3,6-3,66	3,65-3,71	18,85	BPS
30	Pertumbuhan Industri	%	8,05	4-6	6-6,5		BPS
31	PDRB per kapita ADHK	Juta Rp	16,428	16,45-16,6	17,18	17,51	BPS
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (komoditas pangan)	Rp	588.794	675.489	728.980	782.472	BPS
2	Nilai tukar petani	Poin	n/a	111,17	111,26	111,38	Perangkat Daerah urusan Pertanian
3	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Rp	43,36	427.332	458.001	44,50	BPS
4	Produktivitas total daerah	juta	n/a	46,69	46,75	46,81	BPS
5	Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	4,55	1,7	1,7	1,7	BPS
6	Rasio ketergantungan	Angka	47,16	56,85	56,8	47,11	BPS

Sumber : BPS diolah Bappeda Tahun 2024, Perubahan RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 *SE Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 73/PR.03.01/BAPP tentangPenyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045



Tabel 6.4
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap
Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/ Outcome Tahun
2023-2025

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	
ASPEK PELAYANAN UMUM							
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
	1.01. PENDIDIKAN						
	Angka partisipasi kasar						
1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK	%	N/A	77	78,0	67,26	Perangkat Daerah urusan Pendidikan
2	APK SD sederajat	%	N/A	111,93	112,43	105,06	Perangkat Daerah urusan Pendidikan
3	APK SMP sederajat	%	N/A	109,22	110,04	104,02	Perangkat Daerah urusan Pendidikan
	Angka pendidikan yang ditamatkan						
1	APT SD sederajat	%	N/A	39,69	39,61	33,11	Perangkat Daerah urusan Pendidikan
2	APT SMP sederajat	%	N/A	18,34	18,42	18,52	Perangkat Daerah urusan Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni						
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	92,75	100	100	97,31	Perangkat Daerah urusan Pendidikan
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	87,9	97,6	98,58	99,07	Perangkat Daerah urusan Pendidikan
	Angka partisipasi sekolah						
1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99,59	100	100	100	Perangkat Daerah urusan Pendidikan
2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	95,77	100	100	100	Perangkat Daerah urusan Pendidikan
	Angka Putus Sekolah						
1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	poin	N/A	0	0	0	Perangkat Daerah urusan Pendidikan
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	poin	N/A	0,00005	0,00003	0,002	Perangkat Daerah urusan Pendidikan
	Angka Kelulusan						
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	N/A	100	100	100	Perangkat Daerah urusan Pendidikan
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	N/A	100	100	100	Perangkat Daerah urusan Pendidikan
	Angka Melanjutkan (AM)						
1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	N/A	100	100	100	Perangkat Daerah urusan Pendidikan
2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	N/A	100	100	100	Perangkat Daerah urusan Pendidikan
	Fasilitas Pendidikan						
1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	N/A	79,05	79,34	80,34	Perangkat Daerah urusan Pendidikan



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	
2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	N/A	90,25	91,40	92,15	Perangkat Daerah urusan Pendidikan
3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	satuan	N/A	3,9	3,9	3,9	Perangkat Daerah urusan Pendidikan
4	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat				
5	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	angka	N/A	500,08	500,08	26	Perangkat Daerah urusan Pendidikan
6	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	angka	Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat				
7	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	angka	N/A	20,5	20,5	26	Perangkat Daerah urusan Pendidikan
8	Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar per kelas rata-rata	angka	N/A	20,5	20,5	21	Perangkat Daerah urusan Pendidikan
9	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	N/A	99,74	99,79	99,84	Perangkat Daerah urusan Pendidikan
10	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	%	N/A	100	100	100	Perangkat Daerah urusan Pendidikan
11	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	N/A	99,78	99,84	99,9	Perangkat Daerah urusan Pendidikan
12	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	N/A	93,67	94,55	95,43	Perangkat Daerah urusan Pendidikan
1.02. KESEHATAN							
1	Persentase pelayanan medis	%	100	100	100	100	RSUD dr. Slamet
2	Persentase pelayanan penunjang medis	%	100	n/a	n/a	100	RSUD dr. Slamet
3	Persentase pelayanan profesi medis	%	100	n/a	n/a	100	RSUD dr. Slamet
4	Persentase pelayanan keperawatan	%	100	n/a	n/a	100	RSUD dr. Slamet
5	Persentase pelayanan asuhan keperawatan	%	100	n/a	n/a	100	RSUD dr. Slamet
6	Persentase Capaian SPM (standar pelayanan minimum) yang mencapai target	%	74,77	95	96	76	RSUD dr. Slamet
7	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	orang	320,00	44	44	275	Perangkat Daerah urusan Kesehatan
8	Angka kelangsungan hidup bayi	orang	N/A	54.971	55.026	55030	Perangkat Daerah urusan Kesehatan
9	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	orang	N/A	17	15	14	Perangkat Daerah urusan Kesehatan



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	
10	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	orang	6,5	3,9	3,7	3,6	Perangkat Daerah urusan Kesehatan
11	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	orang	117,65	147,97	147,72	140	Perangkat Daerah urusan Kesehatan
12	Rasio posyandu per satuan balita	rasio	1/100	1/100	1/100	1/100	Perangkat Daerah urusan Kesehatan
13	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	rasio	N/A	1/34000	1/33000	1/33000	Perangkat Daerah urusan Kesehatan
14	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	rasio	N/A	1/416666	1/416666	1/300000	Perangkat Daerah urusan Kesehatan
15	Rasio dokter per satuan penduduk	rasio	1/4770	1/10000	1/10000	1/5000	Perangkat Daerah urusan Kesehatan
16	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	rasio	1/4285	1/10000	1/10000	1/5000	Perangkat Daerah urusan Kesehatan
17	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	n/a	n/a	100	Perangkat Daerah urusan Kesehatan
18	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	96	100	100	98	Perangkat Daerah urusan Kesehatan
19	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	96,28	95	95	100	Perangkat Daerah urusan Kesehatan
20	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah urusan Kesehatan
21	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan
22	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	96,77	95	95	100	Perangkat Daerah urusan Kesehatan
23	Non-Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Rate	11,35	2	2	4	Perangkat Daerah urusan Kesehatan
24	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah urusan Kesehatan
25	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	91,86	100	100	91	Perangkat Daerah urusan Kesehatan
26	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	rasio	281,5	104	99	165	Perangkat Daerah urusan Kesehatan
27	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	rasio	4,03	0,81	0,76	2	Perangkat Daerah urusan Kesehatan
28	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	91,85	100	100	90	Perangkat Daerah urusan Kesehatan
29	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program	%	83,82	100	100	90	Perangkat Daerah urusan Kesehatan



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	
	DOTS						
30	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah urusan Kesehatan
31	Penderita diare yang ditangani	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah urusan Kesehatan
32	Angka kejadian Malaria	Kasus/100.000	0,41	10	10	<1	Perangkat Daerah urusan Kesehatan
33	Tingkat kematian akibat malaria	Kasus/1000	0	0	0	0	Perangkat Daerah urusan Kesehatan
34	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	0	15	15	0	Perangkat Daerah urusan Kesehatan
35	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	0	100	100	0	Perangkat Daerah urusan Kesehatan
36	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,38	1,5	1,5	<1,5	Perangkat Daerah urusan Kesehatan
37	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	%	n/a	n/a	n/a	n/a	Perangkat Daerah urusan Kesehatan
38	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	49,1	25	25	45	Perangkat Daerah urusan Kesehatan
39	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	20	20	100	Perangkat Daerah urusan Kesehatan
1.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR)							
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	55,25	55,27	57,92	60,42	Perangkat Daerah urusan PUPR
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	%	90,04	0,35	0,4	0,45	Perangkat Daerah urusan PUPR
3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam)	%	68,11	89,75	90,5	92,5	Perangkat Daerah urusan PUPR
4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	55,25	2	3	3,5	Perangkat Daerah urusan PUPR
5	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	%	0,3	26	25	20	Perangkat Daerah urusan PUPR
6	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	88,25	68,11	68,53	69,05	Perangkat Daerah urusan PUPR
7	Persentase sempadan sungai yang dipakai	%	0,39	31	30	28	Perangkat Daerah urusan PUPR



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	
	bangunan liar,						
8	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat:	%	18	60	70	50	Perangkat Daerah urusan PUPR
9	Tidak terjadi genangan »2 kali setahun:	%	68,11	70	75	60	Perangkat Daerah urusan PUPR
10	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor,	%	24	30	35	40	Perangkat Daerah urusan PUPR
11	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	33,5	87	90	85	Perangkat Daerah urusan PUPR
12	Rasio Jaringan Irigasi,	%	54	81,5	82	80	Perangkat Daerah urusan PUPR
13	Persentase penduduk berakses air minum	%	20	90,04	90,74	91,25	Perangkat Daerah urusan PUPR
14	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	79,3	90,04	90,74	91,25	Perangkat Daerah urusan PUPR
	Penataan Ruang :						
1	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan,	%	10,31	9,45	9,98	12,32	Perangkat Daerah urusan PUPR
2	Ketaatan terhadap RTRW	%	83,92	84	84,5	85	Perangkat Daerah urusan PUPR
3	Persentase kemantapan Jalan (%)	%	55,25	55,27	57,92	60,42	Perangkat Daerah urusan PUPR
4	Persentase Luas Bangunan Dan Lingkungan Yang Tertata	%	32,48	20	30		Perangkat Daerah urusan PUPR
5	Persentase bangunan dan lingkungan kawasan yang ditata	%	n/a	n/a	n/a		Perangkat Daerah urusan PUPR
6	Persentase proyek tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah urusan PUPR
7	Cakupan air Minum layak (%)	%	90,04	90,04	90,74	91,25	Perangkat Daerah urusan PUPR
8	Cakupan sanitasi layak (%)	%	68,11	68,11	68,53	69,05	Perangkat Daerah urusan PUPR
9	Persentase Luas areal yang terlayani oleh Jaringan irigasi Teknis (%)	%	83,43	84,4	88,04	91,25	Perangkat Daerah urusan PUPR
10	Persentase Luas Genangan di Perkotaan yang Tertangani	%	n/a	n/a	n/a	55	Perangkat Daerah urusan PUPR



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	
11	Persentase tampungan air yang tersedia	%	38,1	82,54	100	47	Perangkat Daerah urusan PUPR
12	Persentase bangunan yang Layak Teknis (%)	%	10,31	9,45	9,98	12,32	Perangkat Daerah urusan PUPR
13	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang (%)	%	83,92	84	84,5	85	Perangkat Daerah urusan PUPR
14	Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih (%)	%	32,27	27,24	31,04	40,8	Perangkat Daerah urusan PUPR
15	Persentase Luas Genangan di Perkotaan yang Tertangani	%	n/a	n/a	n/a	55	Perangkat Daerah urusan PUPR
1.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1	Rasio rumah layak huni,	%	95,3	146,5	100	100	Perangkat Daerah urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Rasio permukiman layak huni,	%	0,357	0,347	0,354	0,360	Perangkat Daerah urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni,	%	80,42	80,42	80,45	80,56	Perangkat Daerah urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau,	%	12,3	12,3	12,37	12,44	Perangkat Daerah urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Persentase permukiman yang tertata,	%	35,66	34,88	35,44	35,96	Perangkat Daerah urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6	Persentase lingkungan permukiman kumuh,	%	0,45	0,42	0,39	0,36	Perangkat Daerah urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan,	%	4,75	7,31	7,89	4,28	Perangkat Daerah urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan,	%	1,24	1,24	n/a	1,21	Perangkat Daerah urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU,	%	77,98	77,98	82,57	89,45	Perangkat Daerah urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
10	Cakupan Penurunan luasan permukiman kumuh	Ha	4,12	6	6	3	Perangkat Daerah urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	
11	Prosentase Penanganan Korban Bencana dan terdampak Program Pemerintah	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
12	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Unit	28.936	29.260	26.990	26.490	Perangkat Daerah urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
13	Luas Kawasan Permukiman dengan PSU yang representatif	Unit	6936	6765,6	7047	7.158	Perangkat Daerah urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
14	Jumah PSU Perumahan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah	Perumahan	13	15	15	15	Perangkat Daerah urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.05. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT							
1	Prosentase Penurunan Pelanggaran Perda	%	64	70	65	60	Perangkat Daerah urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2	Prosentase Penanganan Gangguan Tibum Tranmas	%	75	75	85	90	Perangkat Daerah urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3	Rasio Linmas/10.000 Penduduk	Per 10.000 penduduk	62	65	75	84	Perangkat Daerah urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
4	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
5	Indeks Kapasitas Daerah	Poin	0,72	0,43	0,44	0,78	Perangkat Daerah urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1.06. SOSIAL							
1	Persentase PPKS yang tertangani	%	70	9,17	10,3	65	Perangkat Daerah urusan Sosial
2	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	77	77	77	100	Perangkat Daerah urusan Sosial
3	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok	Bukan kewenangan kabupaten					Perangkat Daerah urusan Sosial



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	
	sosial ekonomi sejenis lainnya,						
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial						Perangkat Daerah urusan Sosial
5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah urusan Sosial
6	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	77	80	100	Perangkat Daerah urusan Sosial
7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	1,68	0,57	0,57	0,57	Perangkat Daerah urusan Sosial
2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
	2.01. TENAGA KERJA						
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Kasus	30	18	16	12	Perangkat Daerah urusan Tenaga Kerja
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus	26	18	16	12	Perangkat Daerah urusan Tenaga Kerja
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Orang	5970	3061	3367	3000	Perangkat Daerah urusan Tenaga Kerja
4	Keselamatan dan perlindungan	%	Kewenangan Provinsi				Perangkat Daerah urusan Tenaga Kerja
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Orang	58962	33000 orang	33000 orang	59962	Perangkat Daerah urusan Tenaga Kerja
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Kasus	0	18	16	0	Perangkat Daerah urusan Tenaga Kerja
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	32	624	656	800	Perangkat Daerah urusan Tenaga Kerja
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Orang	176	70	86	0	Perangkat Daerah urusan Tenaga Kerja
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	0	72	72	0	Perangkat Daerah urusan Tenaga Kerja
10	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	n/a	8,02	8,11	8,11	Perangkat Daerah urusan Tenaga Kerja
	2.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PPPA)						
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	52,35	50	50	52	Perangkat Daerah urusan PPPA



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	10	16	16	16	Perangkat Daerah urusan PPPA
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	45,74	48,33	50,53	50,6	Perangkat Daerah urusan PPPA
4	Rasio KDRT	%	0,014	0,018	0,017	0,017	Perangkat Daerah urusan PPPA
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	2,56	2,40	2,1	2,1	Perangkat Daerah urusan PPPA
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	39,53	32,63	34,63	35	Perangkat Daerah urusan PPPA
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah urusan PPPA
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah urusan PPPA
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah urusan PPPA
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah urusan PPPA
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah urusan PPPA
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah urusan PPPA
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah urusan PPPA
14	Rasio APM perempuan/laki-laki	%	97,27	97,27	97,67	97,7	Perangkat Daerah urusan PPPA



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	
	di SD						
15	Rasio perempuan/ laki di SMP	APM laki-	77,84	77,84	78,24	78,5	Perangkat Daerah urusan PPPA
16	Rasio perempuan/ laki di SMA	APM laki-	55,83	55,83	56,23	56,43	Perangkat Daerah urusan PPPA
17	Rasio perempuan/ laki di Perguruan Tinggi	APM laki-	19,64	19,64	20,04	20,44	Perangkat Daerah urusan PPPA
18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun		99,53	99,53	99,63	99,7	Perangkat Daerah urusan PPPA
19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan di sektor nonpertanian		35,05	35,05	37,25	37,5	Perangkat Daerah urusan PPPA
	2.03. PANGAN						
1	Ketersediaan pangan utama	ton	297.194,12	359.211,19	292.988,05	295.917,93	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita						Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan
	Energi per kapita	kkal/ka p/hari	1488,86	4269	4306	2520	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan
	Protein Perkapita	gram/k ap/hari	39,9	124,5	126,3	66,15	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan
3	Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	%	82,33	79	80	81	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan
	2.04. PERTANAHAN						
1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	m²	n/a	n/a	n/a	n/a	Perangkat Daerah urusan Pertanahan
2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Jumlah Kasus	30	5	5	5	Perangkat Daerah urusan Pertanahan
3	Penyelesaian Izin Lokasi	%	n/a	n/a	n/a	n/a	Perangkat Daerah urusan Pertanahan
	2.05. LINGKUNGAN HIDUP						
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota,	Dokum en	1	1	1	1	Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota,	Dokum en	-	-	-	-	Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi,	Dokum en	4	4	1	1	Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air,	Poin	47,62	51,63	51,69	51,82	Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara,	Poin	94,83	84,25	89,25	80,15	Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Poin	48,32	49,84	49,96	47,43	Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota,	usaha/kegiatan yang diawasi	60	60	25	25	Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota,	PPLH	2	2	1	2	Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup
9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Lokasi	n/a	n/a	n/a	n/a	Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup
10	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Lokasi	1	1	1	1	Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup
11	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan,	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup
12	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana,	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup
13	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat,	Lembaga	5	5	5	5	Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup
14	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup,	Entitas	10	10	25	50	Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup
15	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup
16	Timbulan sampah yang ditangani,	persen	20,81	31,5	38,5	24,5	Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup
17	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	persen	10,67	13,5	16,5	10,5	Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup
18	Persentase cakupan area pelayanan,	persen	16,41	100	100	100	Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	
19	Persentase jumlah sampah yang tertangani,	persen	31,48	45	55	35	Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup
20	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota,	poin	n/a	71	71	71	Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup
21	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan, dan	persen	Tidak terdapat Kerjasama dengan Swasta				
22	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan.	persen					
23	Jumlah status masyarakat hukum adat, kearifan lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	lokasi	n/a	1	1	1	Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup
24	Persentase penyelesaian kasus lingkungan hidup	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup
25	Jumlah Dokumen Produk Pembinaan dan Pengawasan	%	n/a	3	3	3	Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup
26	Persentase dokumen lingkungan yang dievaluasi	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	66,89	60,75	63,21	68,12*	Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup
28	Persentase pelaporan pengendalian B3 dan LB3	%	n/a	100	100	100	Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup
29	Persentase desa/kelurahan yang berbudaya lingkungan	%	n/a	25	50	50	Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup
30	Persentase peningkatan kemitraan lingkungan	%	n/a	20	20	20	Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup
31	Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota)	%	0,164	0,164	0,16	0,188	Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup
32	Tingkat Pengelolaan Sampah	%	31,48	45	55	35	Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup
2.06. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
1	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk	%	72,45	99,9	100		Perangkat Daerah urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	%	85,62	45	49		Perangkat Daerah urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	%	112,7	47	49		Perangkat Daerah urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada		Perangkat Daerah urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah	Sudah	Sudah		Perangkat Daerah urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	72,6	100	100		Perangkat Daerah urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	90	71	72		Perangkat Daerah urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	75	55	60		Perangkat Daerah urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<i>*Indikator permen86 dan permen 18 beririsan dengan permendagri 00096-5384-DUKCAPIL 2023 sehingga untuk tahun 2023 menggunakan perubahan berdasarkan permendagri 5483-disdukcapil</i>							
1	Penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP Elektronik	%	n/a			99,40%	Perangkat Daerah urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	n/a			50,00%	Perangkat Daerah urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)	%	n/a			25% dari total perekaman	Perangkat Daerah urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Pencapaian cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun	%	n/a			98%	Perangkat Daerah urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	
5	Kepemilikan Buku Pokok Pemakaman (BPP) di Desa/Kelurahan/Pemakaman Umum/Pemakaman Keluarga yang ada petugasnya	%	n/a			75%	Perangkat Daerah urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra	%	n/a			3	Perangkat Daerah urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	%	n/a			15	Perangkat Daerah urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	%	n/a			15	Perangkat Daerah urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Penyusunan Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian	%	n/a			1	Perangkat Daerah urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Keluaran/output kinerja pelayanan dokumen lainnya	%	n/a			1 Laporan output 24 (dua puluh empat) dokumen layanan adminduk dan agregat	Perangkat Daerah urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
1	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	%	60	50	60	80	Perangkat Daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Nilai	42	42	42	42	Perangkat Daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Nilai	442	442	442	442	Perangkat Daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Persentase LSM Aktif	%	10	10	11	11	Perangkat Daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	
5	Persentase Berprestasi LPM	%	87	85	90	100	Perangkat Daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6	Persentase Aktif PKK	%	87	85	90	100	Perangkat Daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	Persentase Posyandu Aktif	%	79	78	80	90	Perangkat Daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	%	10,26		9,52	10,52	Perangkat Daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (P2KB)							
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,84	1,1	1,1	1,17	Perangkat Daerah urusan P2KB
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,33	2,2	2,1	2,3	Perangkat Daerah urusan P2KB
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	%	8,3	78,12	87,5	87,55	Perangkat Daerah urusan P2KB
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah urusan P2KB
5	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk	Perda		0	1	0	Perangkat Daerah urusan P2KB
6	Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan	Sektor		8	8		Perangkat Daerah urusan P2KB
7	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non-Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	Sekolah	5	6	6	6	Perangkat Daerah urusan P2KB



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	
8	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	anak	2,64	2,69	2,65	2,5	Perangkat Daerah urusan P2KB
9	Ratio Akseptor KB	%	73,21	70,12	70,82	71,92	Perangkat Daerah urusan P2KB
10	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	%	73,21	70,12	70,82	71,92	Perangkat Daerah urusan P2KB
11	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	Angka	36,36/1000	48,80/1000	48/1000	36,34/100	Perangkat Daerah urusan P2KB
12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	3,36	2,96	2,66	2,6	Perangkat Daerah urusan P2KB
13	Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	13,13	12,76	12,58	12,26	Perangkat Daerah urusan P2KB
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	24,46	22	22,09	23,11	Perangkat Daerah urusan P2KB
15	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	71,49	70,12	70,82	70,93	Perangkat Daerah urusan P2KB
16	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB	%	84,45	80	80,5	80,75	Perangkat Daerah urusan P2KB
17	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB	%	82,95	80,05	81	81,35	Perangkat Daerah urusan P2KB
18	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB	%	79,9	79	79,5	79,54	Perangkat Daerah urusan P2KB
19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	%	4,76	19,05	21,43	23,81	Perangkat Daerah urusan P2KB
20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	78,7	62	65	65,35	Perangkat Daerah urusan P2KB
21	Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	%	53,2	70,4	74,7	79,2	Perangkat Daerah urusan P2KB
22	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri	%	86,5	90	91	91,11	Perangkat Daerah urusan P2KB



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	
23	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	%	442	442	442	79,18	Perangkat Daerah urusan P2KB
24	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah urusan P2KB
25	Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	%	90	74	76	79	Perangkat Daerah urusan P2KB
26	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah urusan P2KB
27	Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)*	%		-	-		Perangkat Daerah urusan P2KB
28	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	72	70	75	77	Perangkat Daerah urusan P2KB
29	Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	81	80	85	87	Perangkat Daerah urusan P2KB
30	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	%	19,09	19,03	19,05	19,15	Perangkat Daerah urusan P2KB
31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes	%	1,2	1,4	1,45	1,5	Perangkat Daerah urusan P2KB
*) Indikator remaja yang terkena IMS merupakan data total penduduk yang terkena Infeksi Menular Seksual (tidak spesifik berdasarkan kelompok umur remaja)							
2.09. PERHUBUNGAN							
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum,	%	120,25	158.71	174.58	190.45	Perangkat Daerah urusan Perhubungan
2	Rasio ijin trayek,	%	0,03	0.08	0.09	0.09	Perangkat Daerah urusan Perhubungan
3	Jumlah uji kir angkutan umum,	Unit	3,968	14,117	14,541	14964	Perangkat Daerah urusan Perhubungan



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis,	Lokasi	2	3	3	3	Perangkat Daerah urusan Perhubungan
5	Persentase layanan angkutan darat,	%	0,06	0.08	0.09	0.09	Perangkat Daerah urusan Perhubungan
6	Persentase kepeniilikan KIR angkutan umum,	%	39.10	6.92	6.4	5.18	Perangkat Daerah urusan Perhubungan
7	Pemasangan Rambu-rambu,	%	89,2	89.00	90.00	91.01	Perangkat Daerah urusan Perhubungan
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan:	Kend/Km	0.06	0.06	0.06	0.06	Perangkat Daerah urusan Perhubungan
9	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, dan	Orang	341.836	1,873,053	1,966,706	2,060,358	Perangkat Daerah urusan Perhubungan
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun.	Orang	341,836	1,873,053	1,966,706	2,060,358	Perangkat Daerah urusan Perhubungan
2.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan,	kelompok	42	42	42	42	Perangkat Daerah urusan Komunikasi dan Informatika
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi,	Bukan Kewenangan Daerah					Perangkat Daerah urusan Komunikasi dan Informatika
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon,						Perangkat Daerah urusan Komunikasi dan Informatika
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet, dan						Perangkat Daerah urusan Komunikasi dan Informatika
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi.						Perangkat Daerah urusan Komunikasi dan Informatika
6	Indeks SPBE	Angka	3,29	3,11	3,87	3,35	Perangkat Daerah urusan Komunikasi dan Informatika
7	Persentase informasi publik yang didiseminasikan kepada masyarakat	%	82	82	100	3,10	Perangkat Daerah urusan Komunikasi dan Informatika
2.11. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM)							
1	Persentase koperasi aktif,	%	2,4	1,5	1,5	2,5	Perangkat Daerah urusan Koperasi dan UKM
2	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	6,2	84	85	7	Perangkat Daerah urusan Koperasi dan UKM
3	Peningkatan Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	UKM	1435	2000	2000	2000	Perangkat Daerah urusan Koperasi dan UKM



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	
4	Persentase fasilitasi penerbitan perizinan koperasi baru	%	35	12,25	12,25	20	Perangkat Daerah urusan Koperasi dan UKM
5	Persentase koperasi yang diawasi	%	4,29	5,5	5,5	7,5	Perangkat Daerah urusan Koperasi dan UKM
6	Persentase koperasi sehat	%	3,19	50	50	5,3	Perangkat Daerah urusan Koperasi dan UKM
7	Persentase Pertumbuhan SDM Koperasi	%	n/a	15	15	1,5	Perangkat Daerah urusan Koperasi dan UKM
8	Persentase Pertumbuhan Omzet Usaha Koperasi	%	2,2	4	4,5	2,5	Perangkat Daerah urusan Koperasi dan UKM
9	Jumlah wirausaha Baru	Wirausaha Baru	1411	1000	1000	1000	Perangkat Daerah urusan Koperasi dan UKM
10	Jumlah UKM yang terbina	Pelaku Usaha Mikro	1141	1000	1000	1000	Perangkat Daerah urusan Koperasi dan UKM
2.12. PENANAMAN MODAL							
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	PMD/PMA	146	100	100	100	Perangkat Daerah urusan Penanaman Modal
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Trilyun Rp	1,357	2,12- 2,13	1,52 - 1,53	1,30	Perangkat Daerah urusan Penanaman Modal
3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	milyar rupiah	n/a				Perangkat Daerah urusan Penanaman Modal
4	Rasio Penanam Modal (PMA -PMDN) mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB)	%	36	20	20	20	Perangkat Daerah urusan Penanaman Modal
5	Rasio realisasi investasi dari minat investasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB)	%	n/a	33	33	33	Perangkat Daerah urusan Penanaman Modal
6	Persentase penyelesaian pengaduan tepat waktu	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah urusan Penanaman Modal
7	Persentase penyelesaian Perizinan tepat waktu	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah urusan Penanaman Modal
8	Persentase data dan informasi perizinan dan non peizinan	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah urusan Penanaman Modal
9	Indeks kepastian hukum berusaha	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Perangkat Daerah urusan Penanaman Modal
2.13. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA							
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	85	32,73	34,55	100	Perangkat Daerah urusan Kepemudaan dan Olahraga



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	
2	Persentase Pemuda yang berprestasi*	%	38	36,78	45	45	Perangkat Daerah urusan Kepemudaan dan Olahraga
3	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina*	%	82	34,55	34,55	100	Perangkat Daerah urusan Kepemudaan dan Olahraga
4	Prosentase nomor cabang olahraga di ikuti	%	100	100	100	n/a	Perangkat Daerah urusan Kepemudaan dan Olahraga
5	Prosentase Olahraga Masyarakat secara rutin*	%	n/a	97,62	100	n/a	Perangkat Daerah urusan Kepemudaan dan Olahraga
6	Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana Keolahragaan	%	n/a	80	90	n/a	Perangkat Daerah urusan Kepemudaan dan Olahraga
7	Persentase Wirausaha Muda	%	34,45	0,16	0,17	35,46	Perangkat Daerah urusan Kepemudaan dan Olahraga
8	Cakupan Pembinaan Olahraga*	%	n/a	90,48	95,24	100	Perangkat Daerah urusan Kepemudaan dan Olahraga
9	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi*	%	n/a	90,48	95,24	20	Perangkat Daerah urusan Kepemudaan dan Olahraga
10	Cakupan Pembinaan Atlet Muda*	%	n/a	33	34	22,63	Perangkat Daerah urusan Kepemudaan dan Olahraga
11	Jumlah Atlet Berprestasi*	Atlet	73	165	175	180	Perangkat Daerah urusan Kepemudaan dan Olahraga
12	Jumlah Prestasi Olahraga*	Atlet	117	35	40	120	Perangkat Daerah urusan Kepemudaan dan Olahraga
13	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Dibina	%	n/a	100	100	n/a	Perangkat Daerah urusan Kepemudaan dan Olahraga
*) Realisasi capaian beberapa indikator pada tahun 2021 ditulis "n/a" karena sudah tidak digunakan sebagai indikator kinerja urusan sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 163 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Pemuda Dan Olah Raga Tahun 2019-2024							
	2.14. STATISTIK						
1	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menggunakan data statistik sektoral	%	100	87	100	100	Perangkat Daerah urusan Statistik
2	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Katego-ri	Ada	Ada	Ada	Ada	BPS
3	Buku "PDRB"	Katego-ri	Ada	Ada	Ada	Ada	BPS



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	
4	Buku Daerah "Profil Daerah"	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Perangkat Daerah urusan Statistik
2.15. PERSANDIAN							
1	Indeks keamanan informasi (INDEKS KAMI)	Poin	450	450	350	400	Perangkat Daerah urusan Persandian
2.16. KEBUDAYAAN							
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Pagelaran	42	5	5	5	Perangkat Daerah urusan Kebudayaan
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	CB/OD CB	25	20	20	30	Perangkat Daerah urusan Kebudayaan
3	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	Buah	1	5	5	5	Perangkat Daerah urusan Kebudayaan
4	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	CB/OD CB	4	5	5	5	Perangkat Daerah urusan Kebudayaan
2.17. PERPUSTAKAAN							
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	orang	39.550	39.500	41.000	42000	Perangkat Daerah urusan Perpustakaan
2	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Eksemplar	67.635	74.135	195.483	80000	Perangkat Daerah urusan Perpustakaan
3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	%	0,0056	0,13	0,13	0,006	Perangkat Daerah urusan Perpustakaan
4	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	orang	160	1.000	1.100	1300	Perangkat Daerah urusan Perpustakaan
5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	14.885	8.754	9.704	15000	Perangkat Daerah urusan Perpustakaan
6	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat	orang	6	10	10	10	Perangkat Daerah urusan Perpustakaan
2.18. KEARSIPAN							
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	47,12	53,94	56,67	55	Perangkat Daerah urusan Kearsipan
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	%	6	17	17	17	Perangkat Daerah urusan Kearsipan
3 URUSAN PILIHAN							
3.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	Konsumsi Ikan	kg	31,64	27,53	27,8	30,5	Perangkat Daerah urusan Kelautan dan Perikanan



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	
2	Nilai Tukar Nelayan	poin	105,4	110,36	110,86	105,6	Perangkat Daerah urusan Kelautan dan Perikanan
3	Produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya)	ton	69056,03	67130	67794	65.602	Perangkat Daerah urusan Kelautan dan Perikanan
4	Produksi dan pemasaran olahan hasil perikanan pada kelompok Binaan	ton	832,3	812	836	848	Perangkat Daerah urusan Kelautan dan Perikanan
5	Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan	Kelompok	9	12	15	12	Perangkat Daerah urusan Kelautan dan Perikanan
3.02. PARIWISATA							
1	Kunjungan Wisata	orang	3.874.751	3.100.000	3.200.000	3.360.000	Perangkat Daerah urusan Pariwisata
2	Lama Kunjungan Wisata	hari	2	2	2	2	Perangkat Daerah urusan Pariwisata
3	PAD Sektor Pariwisata	Rp	2.105.327.876	1.324.846.715	1.430.834.088	2.800.000.000	Perangkat Daerah urusan Pariwisata
3.03. PERTANIAN							
1	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	n/a	35,44-35,31	35-34,92	37,51	Perangkat Daerah urusan Pertanian
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	n/a	n/a	n/a	n/a	Perangkat Daerah urusan Pertanian
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	n/a	n/a	n/a	n/a	Perangkat Daerah urusan Pertanian
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	n/a	n/a	n/a	n/a	Perangkat Daerah urusan Pertanian
5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	kw/ha	67,89	61,52	62,14	67,93	Perangkat Daerah urusan Pertanian
6	Cakupan bina kelompok petani	%	9	10,83	12,61	10	Perangkat Daerah urusan Pertanian
3.05. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							
1	Persentase Perusahaan yang berizin	%	28,57	26,19	28,57	29, 00	Perangkat Daerah urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
3.06. PERDAGANGAN							
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	3	3	4	5	Perangkat Daerah urusan Perdagangan
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	34	36	37	38	Perangkat Daerah urusan Perdagangan



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	38	41,9	42	42,5	Perangkat Daerah urusan Perdagangan
4	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	unit	1	4	4	4	Perangkat Daerah urusan Perdagangan
5	Jenis Produk yang dipromosikan	jenis	14	14	15	16	Perangkat Daerah urusan Perdagangan
6	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai dengan ketentuan	Pelaku usaha	20	19	20	22	Perangkat Daerah urusan Perdagangan
7	Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	12	12	13	14	Perangkat Daerah urusan Perdagangan
8	Jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor	Sektor usaha	7	7	7	8	Perangkat Daerah urusan Perdagangan
3.07. PERINDUSTRIAN							
1	Pertambahan jumlah industri kecil	%	4,86	0,4	1	1,2	Perangkat Daerah urusan Perindustrian
2	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah urusan Perindustrian
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi	%	100	44	45	45	Perangkat Daerah urusan Perindustrian
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	44	45	45	Perangkat Daerah urusan Perindustrian
5	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten Garut	IKM	705	300	350	400	Perangkat Daerah urusan Perindustrian
6	Jumlah Industri memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang dimonitor dan dikeluarkan oleh instansi terkait	IKM	10	10	10	10	Perangkat Daerah urusan Perindustrian



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	
7	Persentase perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas	%	0,2	0,2	0,25	0,28	Perangkat Daerah urusan Perindustrian
3.08. TRANSMIGRASI							
1	Jumlah MOU Antar Daerah dalam Penyelenggaraan Ketransmigrasian	MoU	0	5	7		Perangkat Daerah urusan Transmigrasi
4. PENUNJANG URUSAN							
4.01. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN							
1	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP PEMDA	Nilai	BB	BB	BB	BB	Perangkat Daerah urusan Pembinaan dan Pengawasan
2	Persentase SKPD Nilai SAKIP "A"	Persen	100	75	80	85	Perangkat Daerah urusan Pembinaan dan Pengawasan
3	Tingkat Maturitas SPIP	Level	L3	L.3	L.3	L.3	Perangkat Daerah urusan Pembinaan dan Pengawasan
4	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Persen	94,54	75	78	82	Perangkat Daerah urusan Pembinaan dan Pengawasan
5	Persentase Pengaduan yang tertangani	Persen	100	100	100	100	Perangkat Daerah urusan Pembinaan dan Pengawasan
6	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	L3	L.3	L.3	L.3	Perangkat Daerah urusan Pembinaan dan Pengawasan
7	Persentase MCP (Monitoring Center Prevention) Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi	Persen	92	75	77,5	80	Perangkat Daerah urusan Pembinaan dan Pengawasan
8	Jumlah SKPD/Unit Kerja berpredikat ZI WBK WBBM dari TPN (Tim Penilai Nasional)	unit	0	1	1	1	Perangkat Daerah urusan Pembinaan dan Pengawasan
9	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Persen	94,54	85	90	95	Perangkat Daerah urusan Pembinaan dan Pengawasan
10	Jumlah temuan BPK		12	N/A	N/A	N/A	Perangkat Daerah urusan Pembinaan dan Pengawasan
11	Nilai/Kapabilitas APIP	Poin	3,09	3,09	3,1	3,2	Perangkat Daerah urusan Pembinaan dan Pengawasan
12	Nilai/Level Maturitas SPIP	Poin	3,17	3,17	3,18	3,2	Perangkat Daerah urusan Pembinaan dan Pengawasan
13	Nilai/Indeks Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	Poin	3,08	3,08	3,09	3,1	Perangkat Daerah urusan Pembinaan dan Pengawasan
14	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Indeks	2,77	2,77	2,78	2,79	Perangkat Daerah urusan Pembinaan dan Pengawasan
4.02. PERENCANAAN							



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Perangkat Daerah urusan Perencanaan
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Perangkat Daerah urusan Perencanaan
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Perangkat Daerah urusan Perencanaan
4	Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Perangkat Daerah urusan Perencanaan
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah urusan Perencanaan
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah urusan Perencanaan
7	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	n/a	86	88	88	Perangkat Daerah urusan Perencanaan
4.03. KEUANGAN							
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	Perangkat Daerah urusan Keuangan
2	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	3,78	3,78	3,77	5,38	Perangkat Daerah urusan Keuangan
3	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	20	20	20	20	Perangkat Daerah urusan Keuangan
4	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	10	10	10	10	Perangkat Daerah urusan Keuangan
5	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana,	%	0,35			0,28	Perangkat Daerah urusan Keuangan
6	Perbandingan Antara Belanja Langsung Terhadap Total APBD	%	48,83	46,08	46,48	49,5	Perangkat Daerah urusan Keuangan
7	Perbandingan Antara Belanja Tidak Langsung Terhadap Total APBD	%	51,17	53,92	53,52	50,5	Perangkat Daerah urusan Keuangan
8	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa	%	0,35	0,35	0,36	0,36	Perangkat Daerah urusan Keuangan
9	Penetapan APBD	Kategori	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Perangkat Daerah urusan Keuangan



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	
10	Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah urusan Keuangan
11	Presentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Aset sesuai Standar (SAP) dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah urusan Keuangan
12	Persentase SKPD yang Melaksanakan Penyerapan Anggaran Minimal 90%	%	95	98	100	95	Perangkat Daerah urusan Keuangan
13	Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir	%	90	90	95	95	Perangkat Daerah urusan Keuangan
4.04. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	orang	38	39	39	39	Perangkat Daerah urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
2	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	orang	259	258	258	3226	Perangkat Daerah urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
3	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	orang	8469	10891	10891	10260	Perangkat Daerah urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
4	Kebijakan kepegawaian kabupaten garut yang ditetapkan	Kebijakan	4	3	3	3	Perangkat Daerah urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
5	Persentase penempatan ASN Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi dan Kompetensi	Persen	82	86	88	50	Perangkat Daerah urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
6	Prosentase Terpenuhinya Pengadaan Pegawai	Persen	82	86	88	88	Perangkat Daerah urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
7	Prosentase Data Pegawai yang Telah Diperbaharui.	Persen	97	100	100	99,48	Perangkat Daerah urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
8	Persentase ASN yang Disiplin	Persen	99,96	99,9	99,9	99,87	Perangkat Daerah urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
9	Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	JP	20	20	20	20	Perangkat Daerah urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	
10	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	3	100	100	33	Perangkat Daerah urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
11	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	%	93	100	100	46	Perangkat Daerah urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
12	Persentase Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi PNS	%	86	86	88	58,8	Perangkat Daerah urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
4.06. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	166,7	90	95	95	Perangkat Daerah urusan Penelitian dan Pengembangan
2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan.	%	75	85	90	95	Perangkat Daerah urusan Penelitian dan Pengembangan
	Penerapan SIDA:						
3	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah.	%	100	70	80	100	Perangkat Daerah urusan Penelitian dan Pengembangan
4	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah.	%	100	85	90	100	Perangkat Daerah urusan Penelitian dan Pengembangan
5 PENDUKUNG							
5.01. PENDUKUNG KDH DAN WKDH							
1	Persentase aktifitas keagamaan yang difasilitasi	%	98			98	Perangkat Daerah urusan Pendukung KDH dan WKDH
2	Nilai LPPD	Nilai	Tinggi (3,44962)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Perangkat Daerah urusan Pendukung KDH dan WKDH
3	Persentase kualitas kebijakan dan koordinasi pembangunan	%				98	Perangkat Daerah urusan Pendukung KDH dan WKDH
4	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai	n/a			66.00	Perangkat Daerah urusan Pendukung KDH dan WKDH
5	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Pada SKPD Dan Unit Kerja	Nilai	n/a			3,4	Perangkat Daerah urusan Pendukung KDH dan WKDH
6	Prosentase Pelayanan Internal Terhadap Aktivitas Kedinasan KDH/ WKDH	%	98.00			98.50	Perangkat Daerah urusan Pendukung KDH dan WKDH
5.02. PENDUKUNG DPRD							



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Perangkat Daerah urusan Pendukung DPRD
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Perangkat Daerah urusan Pendukung DPRD
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Perangkat Daerah urusan Pendukung DPRD
4	Tingkat fasilitasi pelaksanaan peran dan fungsi legislasi serta pengawasan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Perangkat Daerah urusan Pendukung DPRD
6 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							
6.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI							
1	Persentase aktifitas keagamaan yang difasilitasi	%	100	75	75	100	Perangkat Daerah urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
2	Nilai LPPD	Nilai	100	80	80	100	Perangkat Daerah urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
3	Persentase kualitas kebijakan dan koordinasi pembangunan	%	99,13	90	90	100	Perangkat Daerah urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai	79,57	72	72	80	Perangkat Daerah urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
5	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Pada SKPD Dan Unit Kerja	Nilai	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Perangkat Daerah urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	
6	Prosentase Pelayanan Internal Terhadap Aktivitas Kedinasan KDH/ WKDH	%	n/a	78	80	82	Perangkat Daerah urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
7. KEWILAYAHAN							
7.01. PEMERINTAHAN							
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Point	83,19	82,9	83,7	83,5	Perangkat Daerah urusan Pemerintahan
2	Nilai Sinergitas Kinerja kecamatan	Nilai	78,40	81,19	84,89	85	Perangkat Daerah urusan Pemerintahan
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	%	100,00	94,12	98,15	99	Perangkat Daerah urusan Pemerintahan
4	Nilai SAKIP Kecamatan	Predika t	B	B	BB	BB	Perangkat Daerah urusan Pemerintahan

Sumber : BPS diolah Bappeda Tahun 2024, Perubahan RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 *SE Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 73/PR.03.01/BAPP tentangPenyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

Pelaksanaan program pembangunan daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Tabel 6.5
Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	SKPD
1. SPM PENDIDIKAN				
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Dinas Pendidikan



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	SKPD
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Dinas Pendidikan
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Dinas Pendidikan
2. SPM KESEHATAN				
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
3. SPM PEKERJAAN UMUM				
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	SKPD
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. SPM PERUMAHAN RAKYAT				
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg Layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Dinas Perumahan dan Permukiman
5. SPM TRANTIBUMLINMAS				
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Dinas Pemadam Kebakaran
6. SPM SOSIAL				
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi	100%	Dinas Sosial
3	Rehabilitasi sosialdasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Dinas Sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Dinas Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Dinas Sosial



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	SKPD
	bencana kab/kota			

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

6.2 Penetapan Target Indikator Sasaran Visi dan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Garut dalam RPJPD Tahun 2025-2045

Sebagai tahun pertama pada periode pertama (2025-2029) pelaksanaan RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2045 atau sebagai baseline, maka untuk menjamin keterukuran indikator sasaran visi dan indikator utama pembangunan Kabupaten Garut, dicantumkan pada tabel berikut.

Tabel 6.6
Target Indikator Sasaran Visi Kabupaten Garut Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2023	Target 2025
1	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	26,91	28,49
2	Kontribusi PDRB Industri pengolahan	Nilai	n/a	9,18
3	Persentase Penduduk Miskin	%	9,77	8,2 - 9,06
4	Rasio Gini	Indeks	0,361	0,36
5	Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota	%	n/a	2,72
6	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	69,22	70,57
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	n/a	643.797,58

Sumber : BPS diolah Bappeda Tahun 2024,
*SE Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 73/PR.03.01/BAPP tentangPenyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

Tabel 6.7

Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten Garut Tahun 2025

Indikator Utama Pembangunan	Realisasi 2023	Target 2025
Pelayanan kesehatan prima untuk semua		
Usia Harapan Hidup	74,66	75,04
Kesehatan Ibu dan Anak :		
a) Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (jumlah)	117,65	71
b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	24,1	21,1
Penanganan Tuberkulosis:		
a) Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) (%)	281,5	91
b) Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate) (%)	83,82	91
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	48,46	88,29



Indikator Utama Pembangunan	Realisasi 2023	Target 2025
Akses pendidikan berkualitas yang merata		
Hasil Pembelajaran :		
a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
i) Indeks Literasi	64,88	78,88
- SD	60,13	71,28
- SMP	41,46	46,5
- SD Kesetaraan	24,03	24,5
- SMP Kesetaraan		
ii) Indeks Numerasi	53,32	74,5
- SD	40,52	72,75
- SMP	14,63	45
- SD Kesetaraan	21,07	33,5
- SMP Kesetaraan		
b) Rata-rata Lama Sekolah		7,91
c) Harapan Lama Sekolah	12,16	12,29
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	5,83	
Perlindungan sosial yang adaptif dan tepat sasaran		
Tingkat Kemiskinan	9,77	8,20 - 9,06
Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten		
Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal		
Peningkatan produktivitas ekonomi daerah		
Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	8,96	9,18
Pengembangan Pariwisata		
a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	4,43	4,62
b) Jumlah Kunjungan Wisatawan (ribu orang)	3.874,75	4.769,42
Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)*		
Produktivitas UMKM		
a) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)*		
b) Rasio kewirausahaan Daerah (%)	2,86	3,13
c) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)*		
Tingkat Pengangguran Terbuka	7,33	6,15-6,7
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	94,55	
Tingkat Penguatan IPTEK		
Indeks Inovasi Daerah	42,96 (Inovatif)	60,01 (Sangat Inovatif)
Penerapan ekonomi hijau		
Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah*		
Peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) atau talenta digital		
Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global		
Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	25,4	25,43
Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)*		
Pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung klaster perekonomian di setiap wilayah pengembangan		



Indikator Utama Pembangunan	Realisasi 2023	Target 2025
Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan		
a) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	36,67	37,99
b) Persentase Desa Mandiri (%)		4,51
Perwujudan pemerintahan yang profesional, adaptif dan inovatif		
Indeks Reformasi Hukum	87,85	87
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,29	3,35
Indeks Pelayanan Publik	4,32	4,35
Survei Penilaian Integritas (Indeks SPI)	67,45	67,7
Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas		
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)*		
Indeks Toleransi		
Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila		
Terwujudnya stabilitas ekonomi makro daerah		
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)*		
Tingkat Inflasi	2,84	
Peningkatan kerjasama antar daerah baik regional maupun internasional		
Efektifitas Kerjasama Daerah		
Peningkatan kerukunan umat beragama		
Indeks Kesalehan Sosial Masyarakat	84,49 (Baik)	84,89 (Baik)
Peningkatan kualitas keluarga dan kesetaraan gender		
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	83,37	82
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,555	0,55
Peningkatan kualitas lingkungan hidup		
Kualitas Lingkungan Hidup		
a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,12	68,12
b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	2,93	5,94
c) Pengelolaan Sampah		
- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	20,81	39,48
- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)		45,70
Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi		
Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		
a) Ketahanan Energi*		
b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)		5,38
c) Ketahanan Air		
- Kapasitas Air Baku (m3/detik)		3,75
- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	35,6	41,83
Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim		
Indeks Risiko Bencana (IRB)	147,39	145
Penurunan Emisi GRK (ton CO2eq)		
a.Kumulatif		-182.644,33

Sumber : BPS diolah Bappeda Tahun 2024,
*SE Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 73/PR.03.01/BAPP tentangPenyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan indikatif. RKPD Kabupaten Garut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Garut.

RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2025 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam hal ini menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta rancangan APBD Tahun 2025.
2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu membuat Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai berikut :
 - a. Dalam membuat Renja Perangkat Daerah, wajib melakukan penyaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum Perangkat Daerah, konsultasi publik, dengar pendapat publik (*public hearing*) atau forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2025, yang merupakan program untuk mencapai prioritas pembangunan daerah, berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2025, yang merupakan program untuk mencapai prioritas pembangunan daerah, berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya;
 - d. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir b di atas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, sebagai tugas pemerintah daerah, atau sebagai tugas pembantuan yang diterima pemerintah kabupaten dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat;
 - e. Penyusunan dan penyampaian rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 yang berasal dari masing-masing Perangkat Daerah, yang melaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah, atau sebagai tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat.
 - f. Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Garut Tahun 2025.



3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pada akhir Tahun Anggaran 2025, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.
5. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam hal:
 - a. Pelaksanaan program-program berdasarkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan yang direncanakan.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam RKPD, seluruh jajaran pemerintah daerah hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN